RENCANA KERJA RKPD

(RENJA)



KANTOR KECAMATAN KAROSSA

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karossa selanjutnya disebut Renja Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dan Renstra Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2021-2026, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen RenjaKantor Kecamatan Karossa. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dirubah dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini menggambarkan tentang sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Karossa serta menjelaskan indikator yang menjadi dasar penilaian keberhasilan suatu program atau kegiatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Ranwal ini yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Karossa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Karossa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Karossa untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja OPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKOPD, Renstra OPD, dengan Ranwal K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, srta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Ranwal OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Ranwal OPD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Ranwal OPD tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Ranwal OPD Tahun Lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja. Jika OPD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerjapelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Diskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal SKPD

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Kerja RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini memuat tentang program-program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 disertai informasi sebagai berikut:

1. indikator kinerja;
2. Kelompok sasaran;
3. Lokasi kegiatan;
4. Kebutuhan dana indikatif
5. Sumber dana

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD

Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2025. Kantor Kecamatan Karossa telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Karossa tahun 2024 telah berjalan dengan baik, sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah program kegiatan yang tertuang di dalam APBD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 atau dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2024, hampir 100% program kerja yang direncanakan didalam RENJA Kantor Kecamatan Karossa tahun 2025 dapat direalisasikan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024, dan realisasi renstra Kantor Kecamatan Karossa yang mengacu padahasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Tahun Berjalan
Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I	Kualiatas peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik kecamatan			Rata rata capaian SPM di kecamatan karossa (%)	80	10,968,903,945	70	1,556,438,311	75	1,693,360,036																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (%)	100,00	175.000.000	0,00	0	100,00	6.358.195									0,00	160,000						
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kualiatas peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik kecamatan (%)	100	175.000.000	0,00	0	100	6.358.195	0%%	0	0%%	160,000					0,00%	160,000	2,02%	160	**2,02%**	**0,09%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99	175,000,000	0	0	4	6,358,195	0	0	2	160,000					2	160,000	2	160,000	**2,02%**	**0,09%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai

		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (%)	100,00	175.000.000	0,00	0	100,00	6.358.195									0,00	160,000						
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			175.000.000	0,00	0		6.358.195	0%%	0	0%%	160,000					0,00%	160,000	2,02%	160	**0,00%**	**0,09%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99	175,000,000	0	0	4	6,358,195	0	0	2	160,000					2	160,000	2	160,000	**2,02%**	**0,09%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dikoordinasikan (%)	100,00	103.000.000	0,00	10.485.000	100,00	10.492.636									0,00	2,700,000						
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dikordinasikan (Kegiatan)	5	103.000.000	20,00	10.485.000	5	10.492.636	0%%	1,350,000	0%%	1,350,000					0,00%	2,700,000	23,33%	13.185.000	**466,67%**	**12,80%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	103,000,000	12	10,485,000	4	10,492,636	1	1,350,000	1	1,350,000					2	2,700,000	14	13,185,000	**23,33%**	**12,80%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai

		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan (%)	100,00	90.000.000	0,00	12.870.000	100,00	0									0,00	0						
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan (Kasus)	3	90.000.000	20,00	12.870.000	3	0	0%%	0	0%%	0					0,00%	0	20,00%	12.870.000	**666,67%**	**14,30%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	90,000,000	1	12,870,000	0	0	0	0	0	0					0	0	1	12,870,000	**20,00%**	**14,30%**	KECAMATAN KAROSSA	Tidak Terlaksana
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100,00	480.000.000	0,00	50.164.671	100,00	28.767.671									0,00	25,501,000						
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentasi fasilitasi rekomendasi dan kordinsi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanankan (%)	100	480.000.000	8,79	50.164.671	100	28.767.671	0%%	0	0%%	25,501,000					0,00%	25,501,000	10,15%	75.665.671	**10,15%**	**15,76%**	KECAMATAN KAROSSA	

		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55	215,000,000	11	23,397,465	1	22,990,465	0	0	1	22,941,000					1	22,941,000	12	46,338,465	**21,82%**	**21,55%**	KECAMATAN KAROSSA	Tercapai
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55	120,000,000	1	8,990,000	0	0	0	0	0	0					0	0	1	8,990,000	**1,82%**	**7,49%**	KECAMATAN KAROSSA	Tidak Terlaksana
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	44	145,000,000	2	17,777,206	2	5,777,206	0	0	1	2,560,000					1	2,560,000	3	20,337,206	**6,82%**	**14,03%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standa (%)	100,00	9.945.903.945	0,00	1.482.918.640	100,00	1.641.383.339									0,00	770,160,894						
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran (%)	100	511.000.000	26,35	44.936.150	100	40.860.436	0%	1,023,000	0%	9,710,000					80,00%	10,733,000	34,52%	55.669.150	**34,52%**	**10,89%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	165,000,000	2	15,224,200	3	13,185,790	0	0	1	3,750,000					1	3,750,000	3	18,974,200	**23,08%**	**11,50%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai

		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	176,000,000	1	18,330,000	1	20,027,597	0	0	0	3,750,000					0	3,750,000	1	22,080,000	**20,00%**	**12,55%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	105,000,000	1	5,518,000	1	4,401,289	0	0	0	0					0	0	1	5,518,000	**20,00%**	**5,26%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	65,000,000	4	5,863,950	2	3,245,760	1	1,023,000	1	2,210,000					2	3,233,000	6	9,096,950	**75,00%**	**14,00%**	KECAMATAN KAROSSA	Tercapai
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan kecamatan tepat waktu (%)	100	6.841.903.945	14,91	1.204.421.348	100	1.422.491.327	0%	305,284,692	0%	384,758,502					40,00%	690,043,194	23,68%	1.894.464.542	**23,68%**	**27,69%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	6,464,903,945	14	1,148,793,470	15	1,367,699,282	3	301,633,692	3	365,613,502					6	667,247,194	20	1,816,040,664	**21,05%**	**28,09%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai

		7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	312,000,000	1	51,945,500	1	51,407,960	0	960,000	0	18,490,000					0	19,450,000	1	71,395,500	**10,00%**	**22,88%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	65,000,000	1	3,682,378	1	3,384,085	0	2,691,000	1	655,000					1	3,346,000	2	7,028,378	**40,00%**	**10,81%**	KECAMATAN KAROSSA	Tercapai
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentse pegawai kecamatan yang dilayani (%)	100	555.000.000	2,08	12.680.000	100	6.750.000	0%	0	0%	6,750,000					0,00%	6,750,000	4,17%	19.430.000	**4,17%**	**3,50%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96	555,000,000	2	12,680,000	2	6,750,000	0	0	2	6,750,000					2	6,750,000	4	19,430,000	**4,17%**	**3,50%**	KECAMATAN KAROSSA	Tercapai
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum berjalan sesuai standar (%)	100	991.000.000	20,20	66.704.986	100	21.725.500	0%	4,281,200	0%	3,050,000					0,00%	7,331,200	26,83%	74.036.186	**26,83%**	**7,47%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	22,000,000	1	1,145,000	1	1,840,000	0	0	0	0					0	0	1	1,145,000	**5,00%**	**5,20%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap	40	245,000,000	2	19,000,000	0	0	0	0	0	0					0	0	2	19,000,000	**5,00%**	**7,76%**	KECAMATAN KAROSSA	Tidak Terlaksana

				an Kantor yang Disediakan																					
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40	25,000,000	1	1,000,000	1	1,991,000	0	0	0	0					0	0	1	1,000,000	**2,50%**	**4,00%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	20,000	25,000,000	7,000	1,970,000	1	2,000,000	0	0	0	0					0	0	7,000	1,970,000	**35,00%**	**7,88%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13	24,000,000	12	1,200,000	12	1,500,000	2	250,000	4	375,000					6	625,000	18	1,825,000	**138,46%**	**7,60%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,550	90,000,000	12	4,660,000	4	5,100,000	1	920,000	1	1,395,000					2	2,315,000	14	6,975,000	**0,90%**	**7,75%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,452	560,000,000	12	37,729,986	4	9,294,500	1	3,111,200	1	1,280,000					2	4,391,200	14	42,121,186	**0,96%**	**7,52%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan yang ada (%)	100	141.000.000	0,00	72.000.000	100	72.000.000	0%	0	0%	30,000,000					0,00%	30,000,000	0,00%	102.000.000	**0,00%**	**72,34%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	141,000,000	0	0	1	72,000,000	0	0	0	30,000,000					0	30,000,000	0	30,000,000	**0,00%**	**21,28%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai

		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1	72,000,000	0	0	0	0	0	0					0	0	1	72,000,000	**0,00%**	**0,00%**	KECAMATAN KAROSSA	Tidak Terlaksana
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)	100	498.000.000	40,13	73.845.156	100	67.881.796	0%	5,343,400	0%	19,960,100					0,00%	25,303,500	46,82%	99.148.656	**46,82%**	**19,91%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,300	265,000,000	12	47,679,756	4	40,064,288	1	1,000,000	1	13,500,000					2	14,500,000	14	62,179,756	**0,42%**	**23,46%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40,000	112,000,000	12	14,165,400	4	15,817,508	1	2,343,400	1	3,460,100					2	5,803,500	14	19,968,900	**0,04%**	**17,83%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	121,000,000	12	12,000,000	4	12,000,000	1	2,000,000	1	3,000,000					2	5,000,000	14	17,000,000	**140,00%**	**14,05%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah panjang urusan yang terpelihara (%)	100	408.000.000	11,30	8.331.000	100	9.674.280	0%	0	0%	0					0,00%	0	11,30%	8.331.000	**11,30%**	**2,04%**	KECAMATAN KAROSSA	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	300,000,000	5	3,392,000	0	0	0	0	0	0					0	0	5	3,392,000	**13,89%**	**1,13%**	KECAMATAN KAROSSA	Tidak Terlaksana

		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	0	3	4,995,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	108,000,000	2	4,939,000	1	4,679,280	0	0	0	0					0	0	2	4,939,000	**20,00%**	**4,57%**	KECAMATAN KAROSSA	Belum Tercapai
Total Target (RP)									**1,693,360,036**		**Total Realisasi (RP)**								**798,681,894**						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**38,93**	**47,17**					
Predikat kinerja																			**SR**	**SR**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan tahun 2024 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100 %).

1. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %.
2. Faktor–faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan, Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, faktor-faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing-masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (Personil) di Kecamatan Karossa.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra tahun 2016-2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rancangan Awal (Ranwal)
4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :

   Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Karossa

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Karossa

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kanor Kecamatan Karossa tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadapperkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Isu-isu penting dan masalah yang dihadapi Kecamatan Karossa didalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan terbaik kepadamasyarakat adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Karossa dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Karossa :
    a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Karossa sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karossa;
    b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan peralatan perkantoran bagi masing-masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
    c. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Karossa sehingga tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
    d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Karossa sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Karossa terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

    Tantangan :

    a. Terbatasnya sarana prasarana yang ada sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
    b. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;

c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
d. Proses perekamam e- KTP di Kecamatan Karossa saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e-KTP tidak bisa dioperasionalkan secara optimal karena sering mengalami kerusakan sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mamuju Tengahatau di Kantor Kecamatan lain;
e. Belum adanya pencetakan KK dan e-KTP di Kantor Kecamatan.

Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Karossa terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
   a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

      Pada tahun anggaran 2020, telah berhasil dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Karossa melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.
   b. Urusan Perencanaan Pembangunan

      Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2020, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya belum maksimal, dikarenakan ada beberapa

program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

c. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

   Kecamatan Karossa mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan-pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit-bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, sertaharus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.

d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

   Pada tahun anggaran 2020, Kantor Kecamatan Karossa telah melaksanakan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan Pentas seni dan budaya, festifal, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Diharapkan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat lagi tiap tahunnya.

e. Urusan Pemberdayaan Perempuan

   Pada tahun anggaran 2020, Kantor Kecamatan Karossa telah melaksanakan program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Diharapkan perempuan dapat lebih berperan pembangunan daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalammusrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasandari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahasilkan usulan program yang dibawah ke Musyawarah Desa.

Di Musyawarah Desa menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga Tahun 2015-2020, dan RPJMN keempat tahun 2026-2030. RKP 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN keempat. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuangan dalam RKP 2025 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2026

Tema RKP Tahun 2025 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Tema pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah pada RKPD Tahun 2026 adalah **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif".**

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Kabupaten maka Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Mamuju Tengah secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Karossa Tahun 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD Kecamatan Karossa sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan member arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan. Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Karossa.

Renja Kecamatan Karossa Tahun 2025 ditujukan untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Karossa. Selain itu Renja juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan peran, tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan percepatan proses sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian tujuan pelayanan publik.

Sasaran dari penyusunan Renja adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna

mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam Renja Kantor Kecamatan Karossa tahun 2025, rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemeritah di Kecamatan Karossa;
3. Meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Meingkatnya pelayanan kependudukan di Kantor Kecamatan Karossa;
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan di Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
3. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa.

Tabel 3.1.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Karossa
Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Indikator	Target SPM / IKK / Standar Nasional / Internasional	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2025	2026	
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	
2	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	
3	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	

5	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)											
6	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan											

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2025 yang dituangkan dalam 2026 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2026 sebagaimana pada bab selanjutunya.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiata rutin OPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Renwal 2025 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan,visi dan misi organisasi.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karossa Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kabupaten 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Karossa sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Karossa Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Karossa diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Karossa, April 2025

Camat Karossa,

HAERIL RIJAL.P, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP. 19810516 2002212 1 008

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

RENJA PERUBAHAN
T.A 2025

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor dan Instansi Pemerintah lainnya. RENJA Perubahan OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen perencanaan, juga diharapkan menyatukan Visi, Misi dan Strategi OPD dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang maju, mandiri khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan, serta untuk mengevaluasi kinerja OPD pada semester pertama pada tahu berjalan dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada semester berikutnya, terutama peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah.

RENJA Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Adapaun berhasil dan tidaknya RENJA ini tidak lepas dari profesionalitas, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap Prioritas Program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang pada akhirnya mampu mewujutkan VISI dan MISI Kabupaten Mamuju Tengah.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masih banyak kelemahan-kekurangan, oleh karena itu kami mohon masukan dari semua pihak dan Masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan Program dan Kegiatan yang Startegis pada masa yang akan datang.

Tobadak, 07 Oktober 2025
KEPALA DINAS

BAHTIAR, S.Kep
NIP. 19680915 198803 1 005

DAFTAR ISI

SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar belakang 3
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II 8

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah 8
2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah 15
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 18
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 19
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 25

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB IV PENUTUP 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah merupakan penjabaran dari penjabaran rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memberikan gambaran tentang program kegiatan yang akan dikerjakan oleh organisasi oleh perangkat daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten mamuju Tengah tahun 2021-2026. Yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten mamuju Tengah.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Mamuju Tengah dalam pelayanan dibidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan berdasarkan visi dan misi Kabupaten mamuju Tengah yang tertuan dalam Renstra 2021-2026 Yaitu :

Visi

“Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Bingkai Lalla Tasi’sara Melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ”

Misi

1. Percepatan peningaktan infranstruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energy listrik serta sumber energy lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Perbaikan dan peningaktan infranstruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumber daya manusia dibidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.
3. Perbaikan dan peningkatan infranstruktur pendidikan sumber daya manusia dibidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkaulitas handal dan bermoral.
4. Peningkatan dan penyediaan infranstruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, prikanan dan peternakan sebagai sector unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Mendorong peningaktan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah disetiap kecamatan yang ada dikabupaten mamuju tengah.
6. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerinathan yang bersih jujur dan bermartabat dan serta berdaya saing.
7. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat mamuju tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia.

8. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai wilayah, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah kabupaten mamuju tengah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten mamuju Tengah

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambanhan Lembaran Negara Republic Nomor 4700);
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5397);
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Singkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 105m, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6041)
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keluangan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6322);
g. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam pencapai visi, misi dan tujuan organsiasi serta memberikan pedoman dalam pencapaian program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah ini bertujuan untuk mensikronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah untuk

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan rencana kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025 ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, reviu terhadap rancangan perubahan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana perubahan program, kegiatan, serta kebutuhan dana dan pagu indikatif Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat komitmen pelaksanaan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Renja Dinas TransNaker Kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025 Triwulan II meliputi kebiajakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan.

Table 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
Kabupaten Mamuju Tengah

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase rencana tenaga kerja (%)	100,00	212.000.000	0,00	0	100,00	39.724.410	0	39,314,410		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	100,00	212.000.000	0,00	0	100,00	39.724.410	0,00%	39,314,410	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5	212.000.000	0	0	1	39.724.410	1	39.314.410	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompet ensi (%)	40,00	952.000.000	0,00	0	25,00	54.743.054	0	54,733,054		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	100,00	740.000.000	0,00	0	100,00	54.743.054	0,00%	54,733,054	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	190	740.000.000	0	0	20	54.743.054	20	54.733.054	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
2			Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial (%)	100	3.756.244.524	100	0	100	1.941.765.796				
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih (%)	100,00	3.756.244.524	0,00	0	100,00	1.941.765.796	0	1,931,744,123		
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Perkara)	4,00	3.756.244.524	0,00	0	5,00	1.941.765.796	0,00%	1,931,744,123	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25	3.756.244.524	0	0	5	1.941.765.796	5	1.931.744.123	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
3			Persentase Transmigran yang mandiri (%)	100	4.251.064.500	80	0	85	129.117.193				

	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perenc anaan pertana han dan kawas an transm igrasiyang tereali sasi menjad i kegiat an teknis (%)	100,00	402.021.500	0,00	0	100,00	119	0	0		
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu (%)	100,00	402.021.500	0,00	0	100,00	119	0,00%	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	5	402.021.500	0	0	1	119.000	0	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Belum Tercapai
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perencanaan pertanahan dan kawasan transmigrasi yang terealisasi menjadi kegiatan teknis (%)	100,00	1.430.021.500	0,00	0	100,00	65.784.109	0	65,650,021		
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan Transmigrasi yang dibangun (%)	100,00	1.028.000.000	0,00	0	100,00	65.784.109	0,00%	65,650,021	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	228.000.000	0	0	2	29.511.080	2	29.376.992	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai

	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	90	800.000.000	0	0	24	36.273.029	24	36.273.029	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase produktivitas pertanian pada kawasan transmigrasi (%)	88,00	2.419.021.500	0,00	0	74,00	63.214.084	0	62,952,210		
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Transmigran yang mandiri (%)	100,00	989.000.000	0,00	0	100,00	63.214.084	0,00%	62,952,210	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	254	279.000.000	0	0	24	43.040.410	24	43.013.260	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	10	710.000.000	0	0	2	20.173.674	2	19.938.950	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
4			Persentase pencapaian kinerja Transnaker (%)	100	7.215.243.279	100	0	100	1.688.641.132				
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	7.215.243.279	0,00	0	100,00	1.688.641.132	0	1,659,987,559		

	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran (%)	100,00	323.476.651	0,00	0	100,00	241.456.276	99,00%	236,756,276	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	91.456.650	0	0	2	53.049.204	2	52.949.204	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	153.569.700	0	0	1	37.171.152	1	36.771.152	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	16.080.000	0	0	1	36.620.562	1	36.520.562	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	15.430.000	0	0	1	35.661.214	1	32.961.214	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	15.731.621	0	0	1	36.817.478	1	36.417.478	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai

	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	31.208.680	0	0	4	42.136.666	4	41.136.666	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	100,00	5.720.251.081	0,00	0	100,00	1.203.647.386	98,00%	1,182,914,313	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	5.619.668.930	0	0	12	1.175.327.448	12	1.154.594.375	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	100.582.151	0	0	4	28.319.938	4	28.319.938	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100,00	67.508.061	0,00	0	100,00	5.241.202	100,00%	3,741,202	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	73	67.508.061	0	0	1	5.241.202	1	3.741.202	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100,00	66.825.000	0,00	0	100,00	25.400.000	100,00%	25,380,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	66.825.000	0	0	4	25.400.000	4	25.380.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100,00	327.028.456	0,00	0	100,00	79.830.228	100,00%	79,687,028	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	########	36.000.008	0	0	1	17.000.000	1	17.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44	11.070.000	0	0	7.000	1.125.000	7.000	1.125.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	204.958.448	0	0	180	5.110.000	180	5.110.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	75.000.000	0	0	181	56.595.228	181	56.452.028	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang (%)	100,00	475.020.000	0,00	0	100,00	95.997.240	100,00%	95,997,240	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	475.020.000	0	0	1	95.997.240	1	95.997.240	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (%)	100,00	139.185.880	0,00	0	100,00	27.472.300	99,00%	25,915,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	139.185.880	0	0	5	27.472.300	5	25.915.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	100,00	95.948.150	0,00	0	100,00	9.596.500	99,00%	9,596,500	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	44.698.150	0	0	16	8.596.500	16	8.596.500	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	51.250.000	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
Total Target (RP)								**3.853.991.585**		**3.814.381.377**			
Rata-rata capaian kinerja (%)										**96,15**	**98,97**		
Predikat kinerja										**ST**	**ST**		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:													

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib Ketenagakerjaan dan urusan pilihan Transmigrasi. Meskipun sebagai organisasi pelaksana urusan non pelayanan dasar, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab besar bagi keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah Periode 2021 – 2026.

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD dapat diukur dengan menggunakan dasar Indikator SPM/Standar nasional, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama SKPD.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Tengah

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKU											
1	Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)			2.70%	2.20%	1.87%	1.50%	2,52%	1.88%	1.87%	1.50%	
2	Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)			70%	80%	85%	90%	70,84%	63,15%	85%	90%	
3	jumlah usaha industrial			0	5	5	5	5	5	5	5	
	IKK											
1	Persentase Kegiatan Yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			20%	25%	30%	35%	29%	23%	30%	35%	

2	Persentase Tenaga Kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten / Kota			30%	30%	40%	40%	39,32%	0.036%	40%	40%	
3	Persentase Tenaga kerja bersertifikat Kompetensi			100%	100%	100%	100%	2.28%	0,95%	100%	100%	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			15%	20%	20%	25%	32,00%	14,22%	20%	25%	
5	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Bina			2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum yang menjadi isu strategis pada Dinas Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten mamuju tengah melalui program Transmigrasi
2. Melakukan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia didaerah eks Transmigrasi
3. Peningkatan infranstruktur dan pemberian bantuan pada daerah-daerah eks Transmigrasi
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
5. Belum tersedianya balai latihan kerja
6. Pelatihan dan penampatan tenaga kerja
7. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja mandiri

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Table 2.2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota Mamuju Tengah

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output)*	Satuan	2025		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output)*	Satuan	2025		Catatan Penting
			target	Rp				target	Rp	
(4)	(5)		(13)	(14)	(4)	(5)		(13)	(14)	
DINAS TRANSMIGRASI					**DINAS TRANSMIGRASI**					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	***Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan***		40	19.903.987	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan***		40	19.903.987	

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga kerja yang di fasilitasi pelayanan antar kerja*		40	19903987	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga kerja yang di fasilitasi pelayanan antar kerja*		40	19903987	
Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*	*Orang*	40	19.903.987	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*	*Orang*	40	19.903.987	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	***Rasio Tenaga Kerja yang siap kerja***		**1**	**0**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Rasio Tenaga Kerja yang siap kerja***		**1**	**16.255.944**	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase peningkatan tenaga kerja yang terdata*		-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase peningkatan tenaga kerja yang terdata*		10	16.255.944	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusunan RTK Mikro*	*Orang*	0	0	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusunan RTK Mikro*	*Orang*	10	16.255.944	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	***Persentase kasus terselesaikan***		**100%**	**1.671.082.255**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase kasus terselesaikan***		**100%**	**1.618.563.095**	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		18.005	1.671.082.255	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		5	1.618.563.095	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*Perkara*	5	10.574.695	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*Perkara*	5	2.880.695	

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	*Orang*	18.000	1.660.507.560	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	*Orang*	18.000	1.615.682.400	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian**		**1**	**35.281.361**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian**		**1**	**168.335.461**	
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*		2	35.281.361	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*		2	168.335.461	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*Satuan Permukiman*	2	35.281.361	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*Satuan Permukiman*	2	168.335.461	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	***Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)***		1.201	14.904.852	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)***		1.201	67.953.118	
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Persentase Perncanaan Transmigrasi*		1.201	14.904.852	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Persentase Perncanaan Transmigrasi*		1.201	67.953.118	
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain*	*Dokumen*	1	14.904.852	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain*	*Dokumen*	1	47.952.852	

Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	*Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Hektar*	1.200	0	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	*Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Hektar*	1.200	20.000.266	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***		**16**	**74.222.750**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***		**16**	**39.277.750**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**16**	**74.222.750**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**16**	**39.277.750**	
Fasilitas kunjungan tamu	*Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu*	*laporan*	12	5.000.000	Fasilitas kunjungan tamu	*Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu*	*laporan*	12	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	4	69.222.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	4	29.277.750	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**1**	**15.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**1**	**15.600.000**	
Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	27.452.824	Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	27.452.824	
Penydiaan jasa pelayanan umum kantor	*jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor*	*Laporan*	12	15.600.000	Penydiaan jasa pelayanan umum kantor	*jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor*	*Laporan*	12	15.600.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***		**1**	**1.091.502.757**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***		**1**	**1.275.110.773**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	14	1.091.502.757		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	14	1.275.110.773	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	4	1.556.231		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	4	1.110.146	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Laporan*	4	2.635.042		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Laporan*	4	32.255.125	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi kepegawaian terlayani***		**1**	**106.450.000**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi kepegawaian terlayani***		**1**	**64.000.000**	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Unit*	14	30.000.000		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Unit*	14	30.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Dokumen*	1	20.500.000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Dokumen*	1	20.500.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	1	22.125.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	0	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	2	33.825.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	2	13.500.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***		**1**	**99.000.000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***		**1**	**95.997.240**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*	3	99.000.000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*	3	95.997.240	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***		**1**	**19.888.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***		**1**	**139.742.350**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan*	*Unit*	6	17.922.200		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	6	35.922.200	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	0	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	0	4.200.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	3	19.888.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	3	99.620.150	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***		**6**	**8.623.562**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***		**6**	**33.304.168**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	1.417.067		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	28.417.067	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	2.039.302		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	952.725	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan*	*Dokumen*	1	1.978.099		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan*	*Dokumen*	1	1.741.653	

		Dokumen Perubahan RKA-SKPD						*Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	1.597.254		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	958.777	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*Laporan*	1	1.591.840		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	1	1.233.946	

Tobadak, 07 Oktober 2025

Kepala Dinas

BAHTIAR, S.Kep

Nip. 19660915 198903 1 005

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelahkegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Rencana Kinerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelahkegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output)*	Satuan	2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
							target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(13)	(14)	(19)	(20)
			02. 07	**DINAS TRANSMIGRASI**						
			2. 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
Meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah		Tingkat Penganggur an terbuka (TPT)	2. 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan***		20	19.903.987	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
	Meningkatnya Kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK)	2. 07 04 2.03	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga kerja yang di fasilitasi pelayanan antar kerja*		20	19903987	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			2. 07 04 2.01 2	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*	*Orang*	20	19.903.987	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

			2.	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			***Rasio Tenaga Kerja yang siap kerja***		**100**	**16.255.944**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			2.	07	02	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		*Persentase peningkatan tenaga kerja yang terdata*		10	16.255.944	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			2.	07	02	2.01	02			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusunan RTK Mikro*	*Orang*	10	16.255.944	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
	meningkatnya Penyelesaian perselisishan hubungan industrial	**jumlah usaha industrial**	**2.**	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			***Persentase kasus terselesaikan***		**100%**	**1.671.082.255**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			2.	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		*Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		18.010	1.671.082.255	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			2.	07	05	2.02	01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*Perkara*	10	10.574.695	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			2.	07	05	2.02	05			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	*Orang*	18.000	1.660.507.560	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

mewujudkan kawasan Transmigrasi sebagai lumbung pertanian	**meningkatnya persentase Peningkatan produktivitas pertanian kawasan Transmigrasi**	**persentase Produktivitas pertanian pada kawasan transmigrasi yang di bina**	**3.**	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian**		**1**	**168.335.461**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3.	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*		2	168.335.461	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	04	2.01	02		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*Satuan Permukiman*	2	168.335.461	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	02			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		***Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)***		27	34.905.118	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	02	2.01			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Persentase Perncanaan Transmigrasi*		27	34.905.118	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	02	2.01	01		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain*	*Dokumen*	2	14.904.852	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	02	2.01	03		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	*Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Hektar*	25	20.000.266	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
Mneingkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Transmigrasi	**Meningkatnya dukungan dan pencapaian kinerja**	**Persentase capaian Program Dinas Transmigrasi dan**	**3**	**32**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***		**95**	**1.673.350.394**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**

dan Tenaga Kerja	**urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**	**Tenaga Kerja**														
			3.	**32**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**16**	**39.277.750**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	32	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu*	*Paket*	12	10.000.000	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	32	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	4	29.277.750	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**32**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**24**	**43.052.842**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	32	01	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	27.452.842	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	32	01	2.08	2		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Laporan*	12	15.600.000	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**32**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***		**22**	**1.308.476.044**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	32	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	14	1.275.110.773	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	32	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	4	1.110.146	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

			3	3 2	0 1	2.0 2	0 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	4	32.255.125	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**3 2**	**0 1**	**2.0 5**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi kepegawaian terlayani***		**3**	**13.500.000**	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 5	0 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	1	0	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 5	1 1			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	2	13.500.000	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**3 2**	**0 1**	**2.0 7**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***		**1**	**95.997.240**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	3 2	0 1	2.0 7	0 2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*Unit*	1	95.997.240	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**3 2**	**0 1**	**2.0 9**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***		**23**	**139.742.350**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	3 2	0 1	2.0 9	0 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Unit*	14	35.922.200	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.1 2	0 6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	6	4.200.000	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.1 0	0 9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	3	99.620.150	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

			3	**3 2**	**0 1**	**2.0 1**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***		**6**	**33.304.168**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	28.417.067	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	952.725	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	1.741.653	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	958.777	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Laporan*	1	1.233.946	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
JUMLAH													244	3.583.833.159	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Maka dengan ini diharapkan pelaksanakan pembangunan akan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mencapai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) , Khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah .

Keberhasilan pencapain tujuan dan sasaran rencana strategis Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah tidak hanya tergantung pada Dinas yang terkait saja akan tetapi harus dikoordinasikan secara terpadu dengan instansi itu sendiri dan keikutsertaan masyarakat , mulai dari perencanaan , penyusunan program dan pelaksanaan.

Diharapkan Renja ini dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kita semua khusus Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah serta mampu mengoptimalkan upaya untuk pencapaian tujuan yang kita inginkan.

Tobadak, 07 Oktober 2025
Kepala Dinas

BACHTIAR, S.Kep
NIP. 19680915 198803 1 005

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

DINAS PERHUBUNGAN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

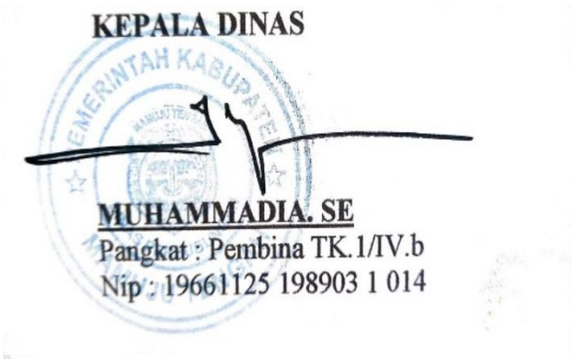
Renja ini, yang secara formal merupakan rujukan utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, mengangkat Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah . Dengan Visi dan Misi ini diharapkan dukungan sarana prasarana transportasi dan layanan transportasi yang nyaman dan berkelanjutan dapat diwujudkan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah.

Untuk mewujudkan tersebut, beberapa program kerja ditetapkan dalam Renja ini, dengan beberapa program diharapkan masyarakat dapat mengakses transportasi dengan nyaman, dalam arti selamat, aman, lancar, tertib dan teratur.

Demikian dokumen Renja ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak.

Tobadak, September 2025

KEPALA DINAS



MUHAMMADIA. SE
Pangkat : Pembina TK.1/IV.b
Nip : 19661125 198903 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang. 3

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 15

1.4. Sistematika Penulisan 15

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 17

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 17

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32

2.4. Review terhadap Rencana Kerja RKPD 34

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49

3.3. Program dan Kegiatan 51

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 65

4.1 Program dan Kegiatan 65

BAB V. PENUTUP 75

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir dan;
f. Penetapan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

I.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

I.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD Tahun 2025 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

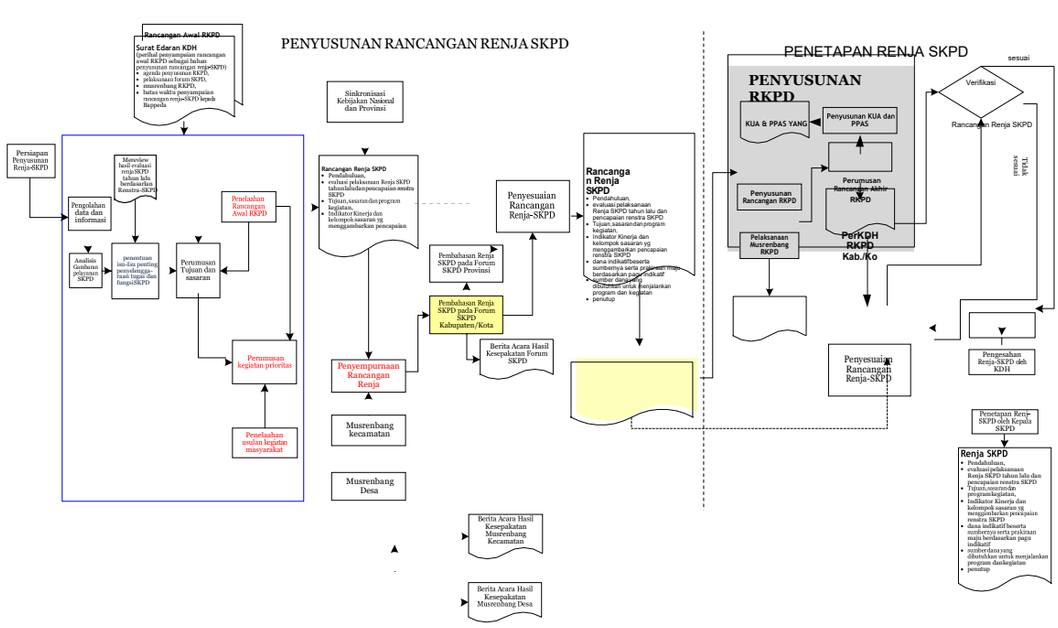
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Kerja PD



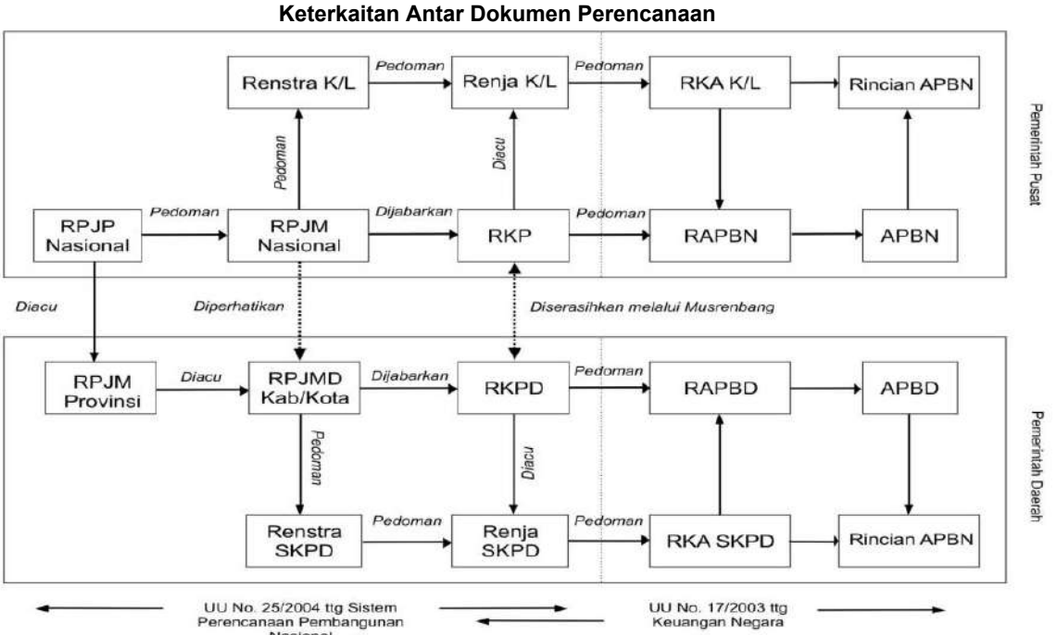
I.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 – 2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -2024 dan RPJMN Tahun 2020 -2024, di mana RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 -2026 sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah.

Pada lingkup pemerintahan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-undang nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah propinsi Sulawesi Barat.
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang nomor 38 tahun 2007 tentang jalan
7. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
8. Undang-undang nomor 17 tentang pelayaran
9. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kierja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
14. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 HasiL Veri fikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Bupati Mamuju No. 24 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju Tengah

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
2. Peraturan WaliKabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris Dinas, membawahi;
    1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian.
c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi;
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Angkutan;
    3. Seksi pengujian Sarana.
d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi;
    1. Seksi Prasarana;
    2. Seksi Keselamatan;
    3. Seksi Pengembangan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam menyelenggarkan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan;
b. Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan program kerja pada Dinas Perhubungan sesuai dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Membina bawahan dalam pelaksanaan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan perhubungan;
c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi program kerja yang ada pada Dinas Perhubungan kepada lintas sektor terkait guna kelancaran pelaksanaan program kerja dan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan perhubungan;
d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja yang telah disusun agar dapat mengetahui capaian kinerja;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan hasil evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretaris Dinas

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas Perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Koordinasi rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelporan dinas Perhubungan;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Penyusunan koordinasi peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh, Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksana urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja;
b. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan;
c. Penyusun rencana anggaran dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. Memantau dan mengawasi kegiatan bawahan;
d. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
e. Mengevaluasi dan menilai hasil/prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan di bagian perencanaan dan Keuangan;
g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan dan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan dengan fungsi-fungsi lain di lingkup Dinas.
i. Mengendalikan rencana kinerja tahunan;
j. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Dinas meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas;
k. Menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
m. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Kinerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas meliputi bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, laporan realisasi fisik kegiatan setiap bulan, dan laporan insidentil lainnya berkaitan dengan kegiatan Dinas;
o. Menyusun laporan keuangan akhir tahun Dinas ;

p. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran (PA);
q. Melaksanaan kegiatan meneliti dan mengoreksi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
r. Melaksanakan verifikasi terhadap SPP UP, GU, TU, LS dan LS gaji yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
s. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
t. Membuat laporan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

(1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan Umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian dan umum mempunyai fungsi:
    a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan kepangkatan, promosi jabatan dan pengembangan SDM melalui Diklat;
    b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pendistribusian surat serta pengarsipan;
    c. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pemeliharaan barang/perlengkapan dinas.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan(2), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai uraian tugas :
    a. Menyusun program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum.
    b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
    c. Memantau dan mengawasi kegiatan bawahan;
    d. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
    e. Mengevaluasi dan menilai hasil/prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
    f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kepegawaian dan umum;
    g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub bagian Kepegawaian dan Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepegawaian dan umum dengan fungsi-fungsi lain di lingkup Dinas;
    i. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian dan umum, kearsipan, serta perlengkapan dan aset;
    j. Mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat;

k. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
l. Membuat laporan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

(1) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan.

(2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian sarana;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu lintas, Angkutan dan Pengujian sarana;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian sarana; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan(2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai uraian tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan renja;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
c. Melaksanakn pembinaan teknis operasional di bidang lalu Lintas dan Angkutan;
d. Menyiapkan bahan penetapan jaringan Jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
e. Melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang Angkutan;
f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang lalu Lintas dan Angkutan, serta menyajikan alternative pemecahannya;
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
i. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pengujian Sarana

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal

(1) Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas membantu kepala bidang lalu Lintas dan angkutan untuk melakukan urusan pembinaan, kelancaran, keamanan keselamatan Lalu Lintas dan pemakai jalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan data/Informasi sebagai bahan penyusunan ranwal;
b. Pengumpulan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional urusan lalu Lintas;
c. Pelaksanaan pembinaan, kelancaran, keamanan, keselamatan Lalu Lintas dan pemakaian jalan;
d. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penetapan jaringan jalan dan perlengkapan jalan;
e. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penetapan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Lalu Lintas.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan(2), Seksi Pengujian Sarana mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengujian sarana perhubungan daerah Kabupaten Mamuju TengahTahapan :
   1) Menghimpun data dan informasi;
   2) Mengolah dan menganalisis data dan informasi;
   3) Menyusun rencana kegiatan sesuai sasaran indikator kinerja yang ditetapkan dilingkungan kerja dinas;
b. Melaksanakan kebijakan pengujian sarana perhubungan daerah kabupaten Mamuju tengah Tahapan :
   1) Melaksanakan analisis data pengujian sarana di lingkungan dinas;
   2) Menyusun kerangka acuan kegiatan dan rencana atau penetapan kebutuhan anggaran kegiataan perawatan prasarana;
   3) Mengusulkan dan memproses pengadaan pengujian sarana di lingkungan kerja dinas;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengujian berkala kendaraan bermotor dan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal daerah Kabupaten Mamuju TengahTahapan :
   1) Mengevaluasi program kegiatan seksi pengujian sarana yang sudah dilaksanakan tahun yang lalu;
   2) Meneliti dan mengevaluasi dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang

dipersyaratkan pada pelaksanaan program kegiatan seksi pengujian sarana;

3) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan

d. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya; Tahapan :

1) Menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
2) Menentukan standar kualitas dan/atau kuantitas hasil kerja;
3) Mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Tahapan :

1) Mengkaji usulan kebutuhan dan pengadaan pengujian sarana di lingkungan dinas;
2) Mereview hasil analisis indikator kinerja program dan kegiatan pengujian sarana di lingkungan dinas;
3) Merumuskan konsep pertimbangan teknis penetapan kegiatan pengujian sarana di lingkungan dinas.
4) Koordinasi/konsultasi dokumen/laporan/berkas dan pelaporan;

g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahapan :

1) Menerima dan meneliti usulan penandatanganan dokumen SKP;
2) Memverifikasi dan menilai dokumen SKP sesuai prestasi kinerja, perilaku kerja dengan obyektif, terukur, akuntabel dan efektif;
3) Menandatangani dan menyerahkan hasil penilaian SKP yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan agar di diproses lebih lanjut

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Angkutan

(1) Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi danpelaporan di bidang penyediaan angkutan umum unutk jasa angkutan orang dan/barang dalam daerah kabupaten/kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu daerah kabupaten/Kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), seksi Angkutan, mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan data/informasi sebagai bahan penyusunan renja;
b. Pengumpulan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional urusan angkutan;
c. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan angkutan;
d. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang angkutan;
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Angkutan;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan(2), Seksi Angkutan mempunyai urain tugas :

a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan renja;
b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional urusan angkutan;
c. Melakukan pembinaan dan pengendalian perusahaan angkutan;
d. Melakukan pelayanan teknis usaha Trayek angkutan;
e. Melakukan pengkajian tarif angkutan pedesaan;
f. Menyiapakan dat/informasi sebagai bahan penetapan dan pengevaluasian jaringan trayek angkutan serta komposisi kendaraan;
g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan angkutan, serta menyajikan alternative pemecahannya;
h. Mendistribusikantugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Peraturan-peraturanyang terkait dengan perencanaan dan penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.2.3 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

I.2.4 Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah tidak masuk dalam program yang tercantum dalam MDG's.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

I.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

I.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang.
1.6. Landasan Hukum.
1.7. Maksud dan Tujuan.
1.8. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.7. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.8. Review terhadap Rencana Kerja RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.6. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2025. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 2.715.618.997 (Dua Milyar Tujuh Ratus lima Belas Juta Enam ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau dengan realisasi triwulan II dengan anggaran Rp. 1.258.103.491 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Ribu Empat ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 46% Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Perhubungan Tahun 2025 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka menunjang urusan pemerintah Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah dengan Indikator Kinerja presentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target program sebesar 100% dengan Realisasi Program sebesar 46%. Program ini terdiri atas 7 (Tujuh) Kegiatan 9 (sembilan) Sub Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung urusan internal Dinas Perhubungan yang bersifat rutin. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 16 (Enam belas) Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.890.827.582, terealisasi sebesar Rp. 756.175.731,- (39%). Anggaran yang tersedia ini untuk kebutuhan 7 (Tujuh) Kegiatan 23 (Dua puluh Tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

      Kegiatan ini terdiri atas 7 (Tujuh) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan perencanaan yang bersifat rutin sebagai berikut:

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini di capai dengan indicator output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan dengan capaian indikator kinarja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 33.077.731,- terserap sebesar Rp. 29.705.248,- atau sebesar 89%. Permasalahan yang dihadapi adanya gaji tenaga honorer tidak dibayarkan karena tidak masuk Kantor. semetara untuk kegiatan rutin ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator output Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 10.050.344,-terserap sebesar Rp. 0- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi masi kurangnya dana solusinya penambahan dana.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp.24119.949,- terserap sebesar Rp 0,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi masi kurangnya dana solusinya penambahan dana.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian indicator kinerja 100 % dengan anggaran Rp. 19.313.536 ,- terserap sebesar Rp. 0,- atau sebesar 90%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian indicator kinerja 100 % dengan anggaran Rp. 72.470 519,- terserap sebesar Rp. 0,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 24438.724,- terserap sebesar Rp. 23.868.596,- atau sebesar 87%. Permasalahan untuk sementara ini masih kuranya Bimbingan Teknis terkait dokumen pelaporan solusinya untuk mengefektifkan kegiatan ini yaitu penambahan anggaran.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp 0 terserap sebesar Rp. 0,- atau sebesar 95%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini masih terbatasnya data untuk mengefektifkan kegiatan ini yaitu penambahan anggaran.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan berfungsi untuk mendukung kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 1.269.918.585,- terserap sebesar Rp.

513.827.168,- atau sebesar 40%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 39.574.936,- terserap sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Peremasalahan yang dihadapi untuk sementara ini belum ada sangat mendasar, hanya perubahan harga barang solusinya efisien pengguna anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan anggaran Rp. 41.248.078,- terserap sebesar Rp. 34.987.439,- atau sebesar 84%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara ini belum ada.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan administrasi kepegawaaian perangkat daerah diantaranya sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan anggaran Rp. 5.000.000,- terserap sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara ini belum ada.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan capaian indikator sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- terserap sebesar Rp.0- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi adanya perubahan harga barang solusi efisien pengguna anggaran.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 5.928.120,- terserap sebesar Rp. 961.000,- atau sebesar 98%. Permasalahan yang dihadapi adanya perubahan harga barang dengan solusi efisien pengguna anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian indicator sebesar 100%

dengan pagu anggaran sebasar Rp. 2.200.000,- serapan sebesar Rp1.200.000- atau sebesar 54%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian indicator 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.409.850,- terserap sebesar Rp. 43.524.800,- atau sebesar 95%. Permasalahan yang dihadapi kekurangan dana solusi untuk mengefektifkan kegiatan perlunya penambahan anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan dengan capaian indicator 100% dengan pagu sebesar Rp. 138.497.240,- serapan sebesar Rp. 47.998.620,- atau sebesar 34%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara tidak ada.
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dengan capaian indicator 100% dengan pagu sebesar Rp. 106.928.430,- serapan sebasar Rp. 40.000.000,- atau sebesar 37%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara tidak ada.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2(dua) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian indikator sebesar 100% dengan pagu anggaran sebasar Rp. 10.251.760,- serapan sebesar Rp. 3.652.500,- atau sebesar 35%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah orang yang terbayarkan dengan capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.600.000,- serapan sebesar Rp. Rp. 7.800.000,- atau 50%. Permasalah yang dihadapi untuk sementara tidak ada.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2(dua) sub kegiatan yang mendukung kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini dicapi dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya indicator capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.406.500,- serapan sebesar Rp. 3.650.000,- atau sebesar 29%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya kegiatan ini dicapai dengan jenis peralatan kerja yang diperbaiki.dan dibayarkan pajaknya indicator capaian kinerja 100 % dengan pagu anggaran Rp. 8.393.000 dengan serapan sebesar Rp. 0., atau sebesar 100% Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan dengan Indikator Kinerja Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota dengan target program sebesar 100% dengan Realisasi Program sebesar 99%. Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan 4 (empat) Sub Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung urusan urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) Sub Kegiatan ini sebesar Rp 824.791.415., terealisasi sebesar Rp. 501.927.760,- (60,86%). Anggaran yang tersedia ini untuk kebutuhan 3 (tiga) Kegiatan 4 (empat Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan kabupaten/kota. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Operasi Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan kebijakan Jalan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.107.125.000, serapan sebesar Rp. 106.225.000,- atau sebesar 99%. Permasalahan yang dihadapi untuk saat ini belum ada.
   - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.0, serapan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%. Permasalahan yang dihadapi untuk saat ini belum ada.

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator \ yang Tersedia dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 717.666.415, serapan sebesar Rp.395.702.760,-

atau sebesar 55%. Permasalah yang dihadapi untuk sementara tidak ada .

c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator yang Tersedia dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 0, serapan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Permasalah yang dihadapi untuk sementara tidak ada .

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Perhubungan masih banyak kekuarangan dikarenakan kurangnya anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 95% dapat dikatakan dalam kategori sebagian berhasil.

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI SULAWESI, KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (000)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (000)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	
1	2	3	4	5	6,000	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar									
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**				2.262.720.215	2.127.672.094		3.487.534.956		
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**4.594.019.466**	**179.190.309**	**439.397.644**	**349.306.387**	**79%**	**1.074.758.000**	**1.603.254.696**	**35%**
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**3.444.550.340**	**37.989.335**	**287.690.688**	**201.519.431**	**70%**	**834.000.000**	**1.073.508.766**	**31%**
2.15.02.2.02.0001	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3.444.550.340**	**37.989.335**	**287.690.688**	**201.519.431**	**70%**	**834.000.000**	**1.073.508.766**	31%
	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)	Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	2.852.000.000	0	249.887.650	163.716.467	**66%**	690.000.000	853.716.467	30%

	pengadaan Rambu-rambu	Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	592.550.340	37.989.335	37.803.038	37.802.964	**100%**	144.000.000	219.792.299	37%
2.15.02.2,06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**1.149.469.126**	**141.200.974**	**151.706.956**	**147.786.956**	**97%**	**240.758.000**	**529.745.930**	46%
2.15.02..2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.149.469.126	141.200.974	151.706.956	147.786.956	97%	240.758.000	529.745.930	46%
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.292.775.779**	**1.891.834.495**	**1.823.322.571**	**1.778.365.707**	**98%**	**2.412.776.956**	**4.517.754.452**	**40%**
2,15,01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**777.931.906**	**122.510.357**	**224.049.004**	**213.143.001**	97%	**167.183.156**	**502.836.514**	65%
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.690.156	19.243.000	38.246.156	37.065.653	97%	**39.157.156**	73.328.490	44%
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.481.350	6.974.879	16.428.334	14.928.334	98%	4.807.000	43.731.148	186%
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.913.400	6.798.634	32.249.269	31.949.269	95%	5.301.000	32.832.790	127%

2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	123.426.000	21.982.576	21.633.156	20.733.156	97%	25.858.000	124.255.071	101%
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25.653.000	8.104.054	81.339.995	76.414.495	91%	5.165.000	45.321.148	177%
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	166.314.000	24.549.000	34.152.094	32.052.094	99%	34.843.000	59.392.000	36%
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.454.000	34.858.214	-	-	0%	52.052.000	1.187.669.330	482%
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.588.084.518**	**1.263.626.115**	**1.121.510.343**	**1.100.759.116**	94%	**1.142.792.000**	**3.507.177.231**	**63%**
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.138.820.833	1.171.477.865	1.021.695.292	1.005.703.102	94%	1.053.204.000	2.269.389.314	44%
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	199.698.000	59.943.172	47.907.452	44.707.449	93%	39.699.000	149.990.737	75%

2,15,01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	249.565.685	32.205.078	51.907.599	50.348.565	98%	49.889.000	100.094.078	40%
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.290.295.727**	**19.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**98%**	**291.652.000**	**328.652.000**	**25%**
2.15. 01..2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	268.190.000	19.000.000	-	0	93%	66.061.000	103.061.000	38%
2.15.01..2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	765.305.727	0	18.000.000	18.000.000	97%	158.391.000	172.731.585	23%
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	256.800.000	0	-	0	100%	67.200.000	70.740.000	28%
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.246.805.441**	**202.948.867**	**209.883.234**	**203.731.423**	**97%**	**304.044.350**	**710.724.640**	**57%**
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27.076.000	0	-		#REF!	5.466.000	5.466.000	20%
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84.500.000	55.986.386	27.251.699	27.251.699	100%	17.500.000	100.738.085	119%

2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	126.498.721	19.713.986	20.402.885	14.340.585	97%	27.328.350	61.382.921	49%
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.500.000	3.000.000	3.540.000	3.540.000	100%	3.750.000	10.290.000	59%
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	991.230.720	124.248.495	158.688.650	158.599.139	100%	250.000.000	532.847.634	54%
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.264.000.000**	**216.184.240**	**202.925.670**	**202.925.667**	**70%**	**266.000.000**	**685.109.907**	**54%**
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	480.000.000	95.993.240	95.997.240	95.997.240	100%	96.000.000	287.990.480	60%
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	784.000.000	120.191.000	106.928.430	106.928.427	100%	170.000.000	397.119.427	51%
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500.434.065**	**29.002.500**	**25.856.320**	**24.093.500**	**100%**	**101.535.000**	**138.480.500**	**28%**
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	152.434.065	13.402.500	10.256.320	8.493.500	100%	31.935.000	53.831.000	35%

2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	348.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	100%	69.600.000	100.800.000	29%
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**625.224.122**	**38.562.416**	**21.098.000**	**15.713.000**	**93%**	**139.570.450**	**193.845.866**	**31%**
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	585.349.122	32.234.416	13.328.000	7.943.000	83%	131.595.450	171.772.866	29%
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39.875.000	6.328.000	7.770.000	7.770.000	100%	7.975.000	22.073.000	55%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan baik dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat kita gambarkan kinerjanya adalah terkait Indikator Kinerja Kunci Urusan pemerintah bidang perhubungan, sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pemerintah bidang perhubungan belum memiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan Pemerintahan Wajib Pendiidikan yaitu;

1. Kesehatan;
2. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
5. Sosial.

Sedangkan Layanan Urusan Wajib Non Dasar salah satu di dalamnya Urusan Perhubungan terkait Indikator Kinerja Kunci Urusan pemerintah Dalam hal ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Indikator Kinerja OPD Sesuai Permendagri No.18 tahun 2020

	IKK Outcome	Target						Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota											
1	IK1 (angkutan jalan) = jumlah trayek yang dilayni (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	28,82%	32,94%	32,94 %	32,94%	32,94%	32,94%	28,82%	25,09%	57%	59%
2	IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	8,25%	8,25%	9,75 %	9,75 %	11,25%	11,25%	8,25%	12,00%	67%	67%
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota											
	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,50	0,50	0,602	0,614

No.	IKK Output	Target						Capaian			
		2021	2022	2024	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota											
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	33%	33%	34%	35%	37%	37%	33%	33%	0	0
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala										
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	5%	19%	19%	19%	19%	19%	5%	12%	24%	20%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan Dinas Perhubungan

Sesuai dengan peraturan Bupati Mamuju tengah No. 41 tahun 2016 bahwa Dinas Perhubungan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dengan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perhubungan;
b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Mamuju Tengah di Bidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kab. Mamuju Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi diatas, kinerja pelayanan Dinas difokuskan pada pelayanan teknis di bidang Perhubungan, yaitu pelayanan Parkir, Penyediaan Alat dan Perlengkapan jalan dan Keselamatan Jalan, yang dapat meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai wewenang:

a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam Kab. Mamuju Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
f. Penelitian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
g. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan sesuai dengan petunjuk Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas, Membawahi;

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;

2. Kepala Sub Umum Dan Kepegawaian.

c. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, Membawahi;

1. Kepala Seksi Lalu Lintas;

2. Kepala Seksi Angkutan;

3. Kepala Seksi Pengujian.

d. Kepala Bidang Prasarana Dan Keselamatan, Membawahi;

1. Kepala Seksi Prasarana;

2. Kepala Seksi Keselamatan;

3. Kepala Seksi Pengembangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3.2 Permasalahan terkait Isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Mamuju tengah adalah

1. Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar guna mendukung peningkatan kemandirian ekonomi daerah
2. Masih banyaknya muatan yang overload dan Over Dimensi
3. Mendorong terciptanya keselamatan lalu lintas jalan
4. Kurangnya Sarana Prasana Perhubungan
5. PKB (Belum adanya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Perubahan PAD Dinas Perhubungan

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, dengn visi yaitu “Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La’la Tassisara” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

Misi I : Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar

Mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Tercakup juga upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dl mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

Misi 4 : Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- **Kekuatan (Strenghs)**

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

- **Kelemahan (weaknesses)**

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang perhubungan
3. Tidak adanya Regulasi Tentang Tunjangn Lauk Pauk Petugas LLAJ
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

- **Peluang (Opportunity)**

1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari Bupati dan wakil Bupati terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan *stake holder* lainnya

- **Tantangan (threat)-**

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik
3. Belum Jelasnya ketetapan Peraturan RTRW yang terbaru
4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kelancar lalu lintas
5. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas
6. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal Tabel Tc-31 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
b. Penyediaan gedung pengujian
c. Penyediaan Sarpras pengaman dan pengendali lalu lintas
d. Optimalisasi manajemen Rekayasa lalu lintas

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah tidak berbeda dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan menjadi usulan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Mamuju Tengah sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasiasosiasi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ringkasan kegiatan terkait akomodasi MUSRENG dan POKIR, sebagai berikut:

a. Musrembang Kecamatan

Jumlah Usulan MUSRENG Terkait Tupoksi Dishub : 14 Usulan

➢ Jumlah Usulan MUSRENG Ditolak : 9 Usulan

➢ Jumlah Usulan diakomodir dalam Kegiatan : 3 Usulan

➢ Ket : 9 Usulan terkait tidak bisa di akomodir karena pagu anggaran tidak mencukupi Dengan rincian usulan sebagai berikut : Pengadaan LPJU, tambatan Perahu, dan Micro bus

b. POKIR

Jumlah Usulan Pokir Terkait Tupoksi Dishub : 5 Usulan

➢ Jumlah Usulan MUSRENG Ditolak : 0 Usulan

➢ Jumlah Usulan diakomodir dalam Kegiatan : 3 Usulan

➢ Ket : 2 Usulan terkait tidak bisa di akomodir karena bukti dukung lokasi tidak lengkap

Dengan rincian usulan sebagai berikut : Pengadaan LPJU, Pengadaan Pincara

Usulan Prioritas Perangkat Daerah tahun 2024								
Dinas Perhubungan								
No	**Usulan**	**Volume**		**Pagu**		**sumber usulan**		
						Usulan Kecamatan	**Pokir**	
1	**Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas**	**10**	**unit**	**2.500.000**	**25.000.000**	**Tobadak 3,**		
2	**Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas**	**5**	**unit**	**2.500.000**	**12.500.000**	**Topoyo**		
3	**Pengadaan LPJU**	**20**	**unit**	**18.000.000**	**360.000.000**		**desa waeputeh**	**SYAHRIL R**

4	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		dusun bajiminasa-desa pontanakayyang	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
5	Pengadaan LPJU	10	unit	18.000.000	180.000.000		barakkang	HAMKA.S.PDI
6	Pengadaan Perahu penyeberangan	2	unit	100.000.000	200.000.000		batu parigi/tobadak	SUKRI
7	Pengadaan LPJU	100	unit	18.000.000	1.800.000.000		mahahe-batu parigi	AGUS SETIAWAN
8	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		kec. Topoyo	SYAHRIL R
9	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		salugatta	HERLINA
10	Pengadaan LPJU	70	unit	18.000.000	1.260.000.000		desa bojo	ELVIS
11	Pengadaan LPJU	120	unit	18.000.000	2.160.000.000		pontanakayyang	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
12	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		desa tinali	HERLINA
13	Pengadaan LPJU	70	unit	18.000.000	1.260.000.000		Desa mahahe - desa parigi	AGUS SETIAWAN
14	Pengadaan LPJU	20	Unit	18.000.000	360.000.000		Desa Barakkang	HAMKA.S.PDI
15	Pengadaan LPJU	20	Unit	18.000.000	360.000.000		babana ke desa kire	HERLINA
16	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		desa tinali	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
17	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		desa kire	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
18	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		desa bojo	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
19	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		desa lemba hada	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
20	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		desa pasapa	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
21	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		jalan desa kire	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
22	Pembangunan Tambatan Perahu	1	unit	500.000.000	500.000.000	Topoyo, dusun tumbu		
23	Pengadaan LPJU	7	unit	18.000.000	126.000.000	Desa Salugatta		
24	Pengadaan LPJU	10	unit	18.000.000	180.000.000	Desa tumbu		
25	Pengadaan LPJU	12	unit	18.000.000	216.000.000	dusun jaya mandiri, dusun rawa mangun kec. Topoyo		
26	Pengadaan LPJU	10	unit	18.000.000	180.000.000	dusun suka damai, dusun suka makmur Desa kayu calla		
27	Pengadaan LPJU	5	unit	18.000.000	90.000.000	dusun salibiro dan dusun bendungan		
28	Pengadaan Zonz Selamat Sekolah	1	Paket	60.000.000	60.000.000	Desa Barakkang		
29	Pengadaan LPJU	40	unit	18.000.000	720.000.000	tobadak 3, palongaan		
30	Pengadaan LPJU	15	unit	18.000.000	270.000.000	desa lara		

31	Pengadaan LPJU	17	unit	18.000.000	306.000.000	Bina makmur-dusun sipodeceng, tobadak		
32	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000	dusun mario, polo pangale		
33	Pengadaan LPJU	40	unit	18.000.000	720.000.000	desa kuo ke desa sejati		
34	Pengadaan LPJU	40	unit	18.000.000	720.000.000	Polo pangale, kombiling, sartanamaju kec pangale		
35	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000	Desa Salupangkang IV		
36	Pengadaan LPJU	200	unit	18.000.000	3.600.000.000	karama, Desa Pangale	PRIORITAS JALAN NASIONAL	
total					20.435.500.000			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar peneyelenggaraan kinerja Pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional, Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Arah Kebijakan :
   - Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
   - Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
   - Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
   - Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
   - Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
   - Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
   - Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.
2. Prioritas Nasional 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan Arah kebijakan :
   - Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
   - Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
   - Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

a.Tujuan

Tujuan Strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan Strategi ini maka

Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

NO	SASARAN
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik
2	Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan
3	Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Kabupaten Mamuju Tengah
4	Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kab. Mamuju Tengah
5	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah adalah :

	TUJUAN
	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan professional
	Meningkatkan infrastruktur Perhubungan
	Mewujudkan keselamatan, keamanan dankenyamanan berlalu lintas dalam Kab. Mamuju Tengah
	Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kab. Mamuju Tengah
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pada Dinas Perhubungan

d. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan mengacu

pada :

- Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengah.

  Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 maka tema visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Mamuju Tengah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Visi :" Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La'la Tassisara	**Misi I : Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar** *Mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Tercakup juga upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dl mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.*	Meningkatkan infrastruktur Perhubungan	Terpenuhinya Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan
	Misi 4 : Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Nilai Sakip Presentase Temuan material

				Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

2.1.d.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.3.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

1.3.5 Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.1.2 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.2.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam

2.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.4.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.5.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.5.2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2.6 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.6.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.7 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.8.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja SKPD, Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai 3 rumusan program 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan Sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah

c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perhubungan

Kode	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Kinerja Program dan kegiatan (outcome)	Indikator Program Kegiatan (output)	2024			Catatan Penting	Indikator Program Kegiatan (output)	2025		
					Target		Rp.			Target		Rp.
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar											
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**											
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,65**	**persen**	**2.397.758.000**		**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,70**	**persen**	**3.379.758.000**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000		**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			

2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	mateng	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	457.000.000		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	319.000.000
					30	persen				0		
2.15.02.2.02.01	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**282.000.000**		**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**144.000.000**
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Mamuju Tengah		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	150.000.000		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	-
	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale Kec. Tobadak		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	25	unit	-		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	30	unit	-
	pengadaan Rambu-rambu	Kec. Topoyo, Kec. Tobadak, Kec. Budong-budong dan Kec. Pangale		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	55	unit	132.000.000		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	60	unit	144.000.000
2.15.02.2.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**175.000.000**		**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**175.000.000**
	Pengadaan Zoss (Zona Selamat Sekolah)	Kec. Topoyo		Jumlah Zoss yang terpasang	2	Paket	125.000.000		Jumlah Zoss yang terpasang	2	Paket	125.000.000
	Pengadaan Rass	Kec. Topoyo		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000

2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**			**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	33	persen	250.000.000		**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	17	persen	2.000.000.000
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Mamuju Tengah	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2	dok	250.000.000		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-	-
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Mamuju Tengah	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit	2.000.000.000
2. 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000		**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000
2.15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang DitingkatkanKapasitasnya	2	Orang	50.000.000		Jumlah Sumber Daya Manusia PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang DitingkatkanKapasitasnya	2	Orang	50.000.000
2.15.02.2, 06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000		**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000
2.15.02..2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporann	30.000.000		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporann	30.000.000

2.15.02..2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000
2.15.02.2, 09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**25**	**persen**	**1.260.000.000**		**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**13**	**persen**	**630.000.000**
2.15.02.2. 09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	unit	1.260.000.000		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	unit	630.000.000
2 15 02 2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**	
2 15 02 2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

2 15 02 2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**		**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000
2 .15. 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**20**	**persen**	**901.350.000**		**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**22**	**persen**	**121.350.000**
2 .15. 03. 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**19**	**persen**	**901.350.000**		**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**25**	**persen**	**121.350.000**
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Mamuju Tengah	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3	unit	901.350.000		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	4	unit	121.350.000
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**44**	**persen**	**2.268.825.250**		**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**46**	**persen**	**2.364.276.956**

2,15,01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**151.772.500**		**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**Persen**	**167.183.156**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	30.280.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	39.157.156
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.370.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.807.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	4.819.500		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	5.301.000
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	24.627.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	25.858.000
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	4.919.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	5.165.000

2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	33184000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	34843000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	49.573.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	52.052.000
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**		**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000
2,15,01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000		umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000

2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**291.183.000**		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**339.152.000**
2.15.01..2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Jersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95	psng	47.500.000
2.15.01..2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	75.534.000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	66.061.000
2.15.01..2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	150.849.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	158.391.000
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	org	64.800.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	org	67.200.000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	283.493.000		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	304.044.350
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4	Paket	5.466.000		Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4	Paket	5.466.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.500.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	17.500.000

2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	26.027.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	27.328.350
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.500.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.750.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420	Laporan	240.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430	Laporan	250.000.000
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	160.000.000		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	170.000.000
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	160.000.000		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	170.000.000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	100.014.300		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	101.535.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	36	Laporan	30.414.300		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	31.935.000

				Listrik yang Disediakan								
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	131.595.450		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	unit	131.595.450
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

Berdasarkan Rencana Kerja SKPD, Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai 3 rumusan program 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan Sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perhubungan

Kode	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Kinerja Program dan kegiatan (outcome)	Indikator Program Kegiatan (output)	2024			Catatan Penting	Indikator Program Kegiatan (output)	2025		
					Target		Rp.			Target		Rp.
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar											
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**											
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,65**	**persen**	**19.037.758.000**		**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,70**	**persen**	**3.379.758.000**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000		**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			

2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	mateng	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	17.097.000.000		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	319.000.000
					30	persen				0		
2.15.02.2.02.01	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**16.867.000.000**		**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**144.000.000**
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Mamuju Tengah		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	150.000.000		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	-
	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale Kec. Tobadak		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	919	unit	16.542.000.000		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	30	unit	-
	pengadaan Rambu-rambu	Kec. Topoyo, Kec. Tobadak, Kec. Budong-budong dan Kec. Pangale		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	70	unit	175.000.000		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	60	unit	144.000.000
2.15.02.2.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**230.000.000**		**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**175.000.000**
	Pengadaan Zoss (Zona Selamat Sekolah)	Kec. Topoyo		Jumlah Zoss yang terpasang	3	Paket	180.000.000		Jumlah Zoss yang terpasang	2	Paket	125.000.000
	Pengadaan Rass	Kec. Topoyo		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000

2.15.02.2 .03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**			**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	33	persen	250.000.000		**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	17	persen	2.000.000.000
2.15.02.2 .03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Mamuju Tengah	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2	dok	250.000.000		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-	-
2.15.02.2 .03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Mamuju Tengah	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit	2.000.000.000
2. 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000		**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000
2.15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang DitingkatkanKapasitasnya	2	Orang	50.000.000		Jumlah Sumber Daya Manusia PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang DitingkatkanKapasitasnya	2	Orang	50.000.000
2.15.02.2 ,06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000		**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000
2.15.02.. 2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporann	30.000.000		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporann	30.000.000

2.15.02.. 2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000
2.15.02.2 ,09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**25**	**persen**	**1.260.000.00 0**		**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**13**	**persen**	**630.000.000**
2.15.02.2 .09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	unit	1.260.000.000		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	unit	630.000.000
2 15 02 2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**	
2 15 02 2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

2 15 02 2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**		**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000
2 .15. 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**20**	**persen**	**1.601.350.000**		**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**22**	**persen**	**500.000.000**
2 .15. 03. 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**6**	**persen**	**1.601.350.000**		**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**25**	**persen**	**500.000.000**
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Mamuju Tengah	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5	unit	1.101.350.000		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	4	unit	121.350.000

2 15 03 2.13 06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Topoyo, dusun tumbu	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	unit	500.000.000		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	unit	500.000.000
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**44**	**persen**	**2.597.625.250**		**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**46**	**persen**	**2.364.276.956**
2,15,01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**480.572.500**		**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**Persen**	**167.183.156**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	30.280.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	39.157.156
							328.800.000					
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.370.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.807.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	4.819.500		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	5.301.000

2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	24.627.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	25.858.000
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	4.919.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	5.165.000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	33184000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	34843000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	49.573.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	52.052.000
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**		**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**

2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000
2,15,01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000		umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**291.183.000**		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**339.152.000**
2.15.01..2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Jersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95	psng	47.500.000
2.15. 01..2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	75.534.000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	66.061.000

2.15.01.. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	150.849.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	158.391.000
2.15.01.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	org	64.800.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	org	67.200.000
2.15.01.2 .06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	283.493.000		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	304.044.350
2.15.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.466.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.466.000
2.15.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.500.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	17.500.000
2.15.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	26.027.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	27.328.350
2.15.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.500.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.750.000

2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420	Laporan	240.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430	Laporan	250.000.000
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	160.000.000		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	170.000.000
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	160.000.000		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	170.000.000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	100.014.300		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	101.535.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	30.414.300		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	31.935.000

2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	131.595.450		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	unit	131.595.450
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja)Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Kabupaten Mamuju Tengah,

KEPALA DINAS

MUHAMMADIA. SE
Pangkat : Pembina TK.1/IV.b
Nip : 19661125 198903 1 014

RENJA PERUBAHAN

KECAMATAN TOPOYO

TAHUN

2025

KECAMATAN TOPOYO

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KATAPENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun Anggaran 2025 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semuapihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini.

Topoyo, 01 Nopember 2025

CAMAT TOPOYO

MASRI R., S.Pd.,MM.,M.Tr.Ap
Pangkat:Penata IV/a
NIP. 19770310 200906 1 003

DAFTARIS

SAMPUL.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB IPENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulis .....

BAB II Hasil Evaluasi Kecamatan Topoyo Tahun Lalu .....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Topoyo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Topoyo .....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....

3.2 Program dan Kegiatan kecamatan Topoyo 2024 .....

BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah .....

4.1 Strategi dan Kebijakan .....

BAB V Penutup.....

BABI
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Perencanaanmemilikiperanyangsangatstrategisdalamrangkapercepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah.Melaluiperencanaanyangbaik,diharapkantujuanpembangunanyaknime wujudkankesejahteraanmasyarakatdapatsegeratercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiapOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja(RENJA), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPDdanmengacukepadaRKPD.Berdasarkanhaltersebut,makaPerikanan(DISKAN) Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja(Renja) tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1tahunberjalan.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,karenaRENJAmenerjemahkanperencananstrategisjangkamenengah(RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggarantahunan, RENJAmenjembatanisinkronisasi, harmonisasiRencanaStrategiske dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengandemikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBDditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut,RENJAmempunyaifungsipokokdanmenjadiacuanbagiseluruhpembangunankarenamemuatseluruhkebijakanpubliksebagai berikut:

1.1.1. MenjadipedomandalampenyusunanAPBDkarenamemuatarahkebijakanpembangunanDaerahsatutahun;

1.1.2. Menciptakankepastiankebijakan,karenamerupakankomitmenPemerintah.

Rancangan Renja OPD dibahas pada forum OPD, dimana pembahasantersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugasdan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbangkecamatan,penajamanindikatordantargetkinerjaprogramdankegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatanantar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaiansasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaianpendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untukmasing-masingOPD.

ProsespenyusunanRancanganawalRENJAdidasarkanpadapenjaringanaspirasiyangdiformulasikanmelaluiforumMusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasilevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebihlanjut penyusunan Dokumen RKPDdan RENJA SKPD juga diintegrasikandenganprioritaspembangunanPemerintahProvinsimaupunPemerintahPusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun2004yangmenyatakanbahwaDaerahKabupatendanKotamerupakanbagiandariProvinsisertamempunyaihubunganwewenang,keuangan,Pelayananumum,pemanfaatanSumberDayaAlamdanSumberDayalainnya.MusrenbangberfungsisebagaiforumuntukmenghasilkankesepakatanantarpelakupembangunantentangrancanganRKPDdanRENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasisasaran,arahkebijakan,programdankegiatanSKPDsertamasyarakat

dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah SebagaiDokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkandenganRENJASKPDmempunyaikedudukanyangstrategis,yaitumenjembataniantaraperencanaanstrategisjangkamenengahdenganperencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJASKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regionaldenganmemuatarahkebijakanpembangunan,Prioritaspembangunan,rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakanpedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas PlafonAnggaranSementaradanAPBD.

Rancangan Awal Rencana Kerja Keamatan TopoyoKabupaten MamujuTengah memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024yangmerupakanpenjabarandariVisi,MisidanProgramdariRenstraOPD Kantor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai satuan kerja perangkatdaerah yang mendukung pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dibidangurusanPelayanan.

Setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan(RKT).

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kecamatan Topoyo.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Kecamatan Topoyo dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Topoyo merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Topoyo. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun 2025 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2. LandasanHukum

Adapun LandasanHukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ini adalah :

1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

2. Undang – UndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaaPembangunan Nasional;
3. Undang – UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang PembentukanPeraturan Perundan g- undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PeraturanPemerintahNomor8Tahun2008tentangTahapan,TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun2017tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjangDaerahDanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara PerubahanRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah,RencanaPembangunanJangkaMenengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 MaksuddanTujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat DaerahKecamatan Topoyo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi pembangunan yang perlu untuk digali dan dikembangkan serta diaplikasikan pada tahun-tahun berikutnya ;
2. Untuk mengetahui prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkanbaik dalam program Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan masyarakat ;

3. Untuk mengetahui hambatan dan pemecahan masalah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan secara umum ;
4. Untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 ;
5. Untuklebihmeningkatkankinerja,etoskerjadankemampuan aparat PemerintahKecamatan Topoyo dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat serta hasil pembangunannya.

Sedangkan Tujuan penyusunanRencanaKinerjaPerangkat Daerah Kecamatan Topoyo Tahun 2025 adalahsebagai pedoman/ acuan dalam menyelenggarakankegiatanpemerintahan,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun.

1.4 SistematikaPenulisan

Rancangan Awal Rencana Kecamatan Topoyo kabupaten MamujuTengahTahun2025,disusundengansistematikasebagai berikut:

Bab I Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dantujuansertaSistematikaPenyusunan.

Bab II merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaanRenja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu padaAPBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPDsudah disahkan. Selanjutnya dikaitkandengan pencapaian target RenstraOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RenjaOPD tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanantahun lalu yang berisi tentang: Evaluasi Pelaksnaan Renja OPD Tahun Laludan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu PentingPenyelenggraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan

AwalRKPD danPenelaahanUsulanProgramdanKegiatanMasyarakat.

Bab III merupakan penjelasan tentang Tujuan, Sasaran, Program danKegiatan, yang terdiri dari: Telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahanterhadapkebijakanprovinsi,TujuandanSasaranRenja,ProgramdanKegiatan.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari Penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BABII

HASIL EVALUASI KECAMATAN TOPOYO TAHUN LALU

2.1. EvaluasiPelaksanaanRenjaKecamatan TopoyoTahunLaludanCapaianRenstraKecamatan Topoyo

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun2018tentangTataCaraPerencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta TataCara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiapdokumen perencanaanharusdievaluasidalampelaksanaannya.OlehkarenaituRenjaKecamatan TopoyoKabupatenMamujuTengahTahun2025jugaharusdilakukanevaluasi.EvaluasiterhadapRenjaKecamatan TopoyoKabupatenMamujuTengahTahun2024meliputi4(Empat)hal,yaitukebijakanperencanaanprogram & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasilrencanaprogram&kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun2025,memperhatikanbeberapaunsurpokoksebagai manaberikut:

1. Masalah-masalahyangdihadapidansumberdayayangakandigunakansertapengalokasiannya;
2. Tujuanyangdikehendaki;
3. Sasarandanprioritasuntukmewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakandalampelaksanaanyasertaorganisasipelaksananya

Penyusunan Renja Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025jugamemperhatikanhal halsebagaiberikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalampenyusunanperencanaantahun2025;
2. Memperhatikankeberlanjutan(sustainabledevelopment)untukmenjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah - masalahyangdihadapidansumberdayayangakandigunakansertapengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian RenstraKecamatan TopoyoKabupatenMamujuTengahsampaidengantahun2024 dapat diuraikan pada tabel berikut:

RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRenjaPerangkatDaerahdanPencapaianRenstraPerangkat Daerah s/dTahun2024 Kecamatan Topoyo KabupatenMamujuTengah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan			Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan (%)	100	8.411.932.340	100	0	100	1.479.018.840																
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	8.171.932.340	0,00	0	100,00	1.472.998.304									0	1,416,031,022						
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran (%)	100,00	753.000.000	0,00	0	100,00	143.919.856	0%	0	0%	32,908,800	0%	14,409,600	99%	96,599,096	99,00%	143,917,496	16,06 %	143.917.496	**16,06%**	**19,11%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33	58.000.000	0	0	6	6.728.271	2	0	1	2.478.100	0	0	3	4.250.000	6	6.728.100	6	6.728.100	**18,18%**	**11,60%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	32.000.000	0	0	1	5.286.710	1	0	0	4.536.000	0	0	0	750.000	1	5.286.000	1	5.286.000	**20,00%**	**16,52%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	24.000.000	0	0	1	5.553.582	1	0	0	0	0	0	0	5.553.400	1	5.553.400	1	5.553.400	**20,00%**	**23,14%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	32.000.000	0	0	1	3.995.142	1	0	0	3.394.700	0	0	0	600.000	1	3.994.700	1	3.994.700	**20,00%**	**12,48%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai

		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	24.000.000	0	0	1	4.161.207	1	0	0	0	0	0	0	4.160.696	1	4.160.696	1	4.160.696	**20,00%**	**17,34%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	560.000.000	0	0	1	115.407.268	1	0	0	22.500.000	0	13.707.200	1	79.200.000	2	115.407.200	2	115.407.200	**8,00%**	**20,61%**	KECAMATAN TOPOYO	Melampaui
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	23.000.000	0	0	3	2.787.676	1	0	1	0	0	702.400	1	2.085.000	3	2.787.400	3	2.787.400	**6,25%**	**12,12%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	100,00	5.602.447.340	0,00	0	100,00	1.048.579.836	0%	188,596,294	0%	354,634,739	0%	187,325,360	98%	267,862,721	98,00%	998,419,114	18,00%	998.419.114	**18,00%**	**17,82%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	5.577.447.340	0	0	13	1.046.108.425	3	188.596.294	3	354.634.739	3	187.325.360	3	265.391.821	12	995.948.214	12	995.948.214	**16,00%**	**17,86%**	KECAMATAN TOPOYO	Belum Tercapai
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	25.000.000	0	0	1	2.471.411	0	0	0	0	0	0	1	2.470.900	1	2.470.900	1	2.470.900	**20,00%**	**9,88%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100,00	155.000.000	0,00	0	100,00	21.992.215	0%	0	0%	7,060,000	0%	750,000	100%	14,057,000	100,00%	21,867,000	23,81%	21.867.000	**23,81%**	**14,11%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	30.000.000	0	0	2	2.822.215	1	0	1	750.000	0	750.000	0	1.322.000	2	2.822.000	2	2.822.000	**33,33%**	**9,41%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai

		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	125.000.000	0	0	4	19.170.000	1	0	1	6.310.000	0	0	0	12.735.000	2	19.045.000	2	19.045.000	**14,29%**	**15,24%**	KECAMATAN TOPOYO	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100,00	854.950.000	0,00	0	100,00	94.255.202	0%	0	0%	21,863,624	0%	14,232,600	100 %	56,267,525	100,00%	92,363,749	2,08%	92.363.749	**2,08 %**	**10,80%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	255.000.000	0	0	1	26.850.000	0	0	1	8.700.000	0	5.350.000	0	11.000.000	1	25.050.000	1	25.050.000	**3,57 %**	**9,82%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	64	75.000.000	0	0	4	4.005.000	0	0	2	1.395.000	1	1.300.000	1	1.310.000	4	4.005.000	4	4.005.000	**6,25 %**	**5,34%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	290	94.950.000	0	0	1	4.176.202	0	0	0	0	0	3.092.600	1	1.082.000	1	4.174.600	1	4.174.600	**0,34 %**	**4,40%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000	90.000.000	0	0	1	14.640.000	0	0	1	2.275.000	0	910.000	0	11.455.000	1	14.640.000	1	14.640.000	**0,01 %**	**16,27%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460	340.000.000	0	0	1	44.584.000	0	0	1	9.493.624	0	3.580.000	0	31.420.525	1	44.494.149	1	44.494.149	**0,22 %**	**13,09%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang (%)	100,00	136.000.000	0,00	0	100,00	7.148.078	20%	0	30%	5,371,700	20%	1,047,000	30%	727,500	100,00%	7,146,200	4,02%	7.146.200	**4,02 %**	**5,25%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19	74.000.000	0	0	1	4.000.000	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	**5,26 %**	**5,41%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36	62.000.000	0	0	2	3.148.078	0	0	1	1.371.700	0	1.047.000	0	727.500	1	3.146.200	1	3.146.200	**2,78 %**	**5,07%**	KECAMATAN TOPOYO	Belum Tercapai

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (%)	100,00	422.000.000	0,00	0	100,00	67.569.117	0%	0	0%	16,592,949	0%	13,947,870	99%	35,749,644	99,00%	66,290,463	6,27%	66.290.463	**6,27%**	**15,71%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	250.000.000	0	0	1	34.760.687	0	0	1	6.082.200	0	7.728.200	0	20.944.400	1	34.754.800	1	34.754.800	**1,67%**	**13,90%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	72.000.000	0	0	1	14.941.780	0	0	1	4.760.749	0	3.719.670	0	5.190.244	1	13.670.663	1	13.670.663	**10,00%**	**18,99%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	100.000.000	0	0	1	17.866.650	0	0	1	5.750.000	0	2.500.000	0	9.615.000	1	17.865.000	1	17.865.000	**7,14%**	**17,87%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	100,00	248.535.000	0,00	0	100,00	89.534.000	0%	6,000,000	0%	28,790,000	0%	19,665,000	99%	31,572,000	99,00%	86,027,000	23,81%	86.027.000	**23,81%**	**34,61%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	248.535.000	0	0	7	89.534.000	1	6.000.000	2	28.790.000	2	19.665.000	0	31.572.000	5	86.027.000	5	86.027.000	**23,81%**	**34,61%**	KECAMATAN TOPOYO	Belum Tercapai
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan (%)	100,00	240.000.000	0,00	0	100,00	6.020.536									0	6,020,400						
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus yang diselesaikan (%)	0,00	240.000.000	0,00	0	0,00	6.020.536	0%	0	0%	0	0%	0	0%	6,020,400	0,00%	6,020,400	20,00%	6.020.400	**0,00%**	**2,51%**	KECAMATAN TOPOYO	

		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	240.000.000	0	0	1	6.020.536	0	0	0	0	0	0	1	6.020.400	1	6.020.400	1	6.020.400	**20,00%**	**2,51%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kecamatan			Rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan di Kantor Kecamatan (%)	100	1.018.000.000	100	0	100	87.865.284																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (Indeks)	100,00	478.000.000	100,00	0	100,00	84.045.284									100	84,044,200						
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintah yang dikordinasikan (%)	100,00	478.000.000	0,00	0	100,00	84.045.284	0%	0	0%	11,800,000	0%	22,141,200	0%	50,103,000	0,00%	84,044,200	22,50%	84.044.200	**22,50%**	**17,58%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	240.000.000	0	0	1	30.442.144	0	0	1	4.000.000	0	10.441.200	0	16.000.000	1	30.441.200	1	30.441.200	**25,00%**	**12,68%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	238.000.000	0	0	12	53.603.140	0	0	3	7.800.000	3	11.700.000	6	34.103.000	12	53.603.000	12	53.603.000	**20,00%**	**22,52%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi sara per 1.000 penduduk (%)	0,00	540.000.000	0,00	0	0,00	3.820.000									0	3,820,000						

		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan (%)	0,00	62.000.000	0,00	0	0,00	3.820.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3,820,000	0,00 %	3,820,000	6,45%	3.820.000	**0,00 %**	**6,16%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	31	62.000.000	0	0	2	3.820.000	0	0	0	0	0	0	2	3.820.000	2	3.820.000	2	3.820.000	**6,45 %**	**6,16%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
3	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa			Persentase Desa dengan penataan administrasi sesuai standar (%)	100	1.251.256.497	100	0	100	45.495.500															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dikoordinasikan (%)	100,00	516.000.000	0,00	0	95,00	41.918.354									0	41,915,200						
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target (%)	100,00	516.000.000	0,00	0	99,00	41.918.354	0%	34,638,000	0%	0	0%	0	0%	7,277,200	0,00 %	41,915,200	10,03 %	41.915.200	**10,13%**	**8,12%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	220.000.000	0	0	1	34.772.810	1	34.638.000	0	0	0	0	0	134.400	1	34.772.400	1	34.772.400	**20,00%**	**15,81%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.500	296.000.000	0	0	1	7.145.544	1	0	0	0	0	0	0	7.142.800	1	7.142.800	1	7.142.800	**0,07 %**	**2,41%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai

		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundanganya (%)	100,00	735.256.497	0,00	0	95,00	3.577.146									0	3,577,000						
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan (%)	100,00	219.256.497	0,00	0	100,00	3.577.146	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3,577,000	0,00 %	3,577,000	20,00 %	3.577.000	**20,00%**	**1,63%**	KECAMATAN TOPOYO	
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	75	219.256.497	0	0	15	3.577.146	15	0	0	0	0	0	0	3.577.000	15	3.577.000	15	3.577.000	**20,00%**	**1,63%**	KECAMATAN TOPOYO	Tercapai
Total Target (RP)									**1.612.379.624**									**Total Realisasi (RP)**				**1.555.407.822**		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**98,75**	**96,47**					
Predikat kinerja																			**ST**	**ST**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Disusun

Tobadak, 20 Januari 2025

CAMAT TOPOYO

MASRI,S.Pd., MM., M.Tr.Ap

Pangkat: Penata,III

NIP : 197703102009061003

Disetujui

Tobadak, ... 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

LITHA FEBRIANI, SE, M.Si

Pangkat: Pembina TK.I,IV

NIP : 198302152003122004

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat DaerahKecamatan Topoyo 4telahterlewati.Berbagaiprogramdankegiatanpembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, danuntuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasisecaramenyeluruh.

1. Tidak terdapat Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi targetkinerja.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai saat inibelumadaprogram/kegiatanyangtelahmelebihitargetyangtelahditentukan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPDAdapun implikasi yang timbul dari program kerja Perikanan KabupatenMamujuTengahberupaadanyapeningkatandedikasisumberdayaaparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalamRencanaStrategisPerikanan Kab.MamujuTengah.
4. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaranuntuk rencanaprogram/kegiatanadalah:
    - Mengadakanpendekatandanpenyesuaiananggaranterhadappelaksanaanprogramdankegiatandimaksud;
    - Memberikanargumentasi/presentasiatasprogram/kegiatansehinggananti nya akan mengarah pada terwujudnya Pembangunandi Kecamatan Topoyo.

EvaluasipelaksanaanrencanakerjaKecamatan Topoyo dilaksanakansetelahselesaitahunanggaranberjalan,hasildarievaluasitersebutdigunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun2025.

2.2 AnalisisKinerjaPelayananPerangkatDaerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukanmelalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yangmenggambarkantingkatpencapaiansuatukegiatanyangtelahditetapkan.Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output),hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikatortersebutdapatberupadana,sumberdayamanusia,laporan,danindikatorlainnya.Penetapanindikatorkinerjainidiikutidenganpenetapanbesaranindikatorkinerjauntukmasing–masingjenisindikatoryangtelahditetapkan.

SelanjutnyadilakukanAnalisisCapaianKinerjaatassasaranyangdidasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukananalisis

pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukandengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan denganmemanfaatkandatakinerja.

KeberhasilansuatuperencanaandapatdilihatdengansinergiantaraperencanaanpembangunanNasionalyangdiselenggarakanolehpemerintahpusat dan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan Pemerinah DaerahProvinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifatpengaturantelahdibuatuntukmensinergikanperencanaanpembangunanNasional dan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotaantara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangsistemperencanaannasionalyangdikenaldengan prosesmusyawarahperencanaanpembangunan(Musrenbang).Meskipunsistemmusrenbangsudahdikembangkanlebihbaik,dalampembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masihbelumoptimal.

MelihatkondisitersebutdiatasKecamatan Topoyo KabupatenMamujuTengah selaku OPD yang menangani urusan Pilihan Kecamatan Topoyo mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsidankabupatendalamrangka:

1. Mendukungkoordinasiantarpelakupembangunan
2. Menjamin terciptanyaintegrasi,singkronisasi,baikantardaerahantarfungsipemerintahmaupunantarpusat dandaerah.
3. Menjaminketerkaitandankonsistensiantarperencanaan,penganggaran,pelaksanadanpengawasan.
4. MengoptimalkanpartisipasimasyarakatdalamhalpengusulanProgramdanKegiatan.
5. Menjamintercapainyapenggunaansumberdayasecaraefesien,efektif,berkeadilandanbekelanjuta

2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiPerangkatDaerah

Berdasarkanuraiandiatas,selanjutnyadi tentukanisu- isupenting penyelenggaraantugas danfungsiPerangkatDaerahyangberpengaruh terhadappelaksanaantugasdanfungsiKecamatan Topoyo.

Kecamatan Topoyo Kab.Mamuju Tengah dalam menghadapi perubahanlingkunganstrategis.Isu- isustrategisdimaksudantaralain:

1. Faktorsosiologis :

   Kecamatanmempunyai perananyangpenting danstrategis dalam pembangunan.Denganjumlah pendudukyang banyak dan terletakdi IbukotaKec.Topoyo mempunyai kontribusiyangbesar dalam mempercepattercapainya tujuan pembangunan.

1. Faktor ekonomi:

   Sebagian besar wilayahKecamatan Topoyomerupakan wilayah perdagangan dan jasa, menuntutpenyediaan layanan yang cepat, akurat,efektif,efisien dan akuntable.

2. Faktorpendidikan :

masyarakatTingkatpendidikanyang relativemenengahkebawahmenjadi perhatianPemerintahKecamatanmendorongpartisipasidankreatifitasmasyarakat.

3. FaktorKesehatanMasyarakat:

   KesadarandanperilakuwargaperludiarahkandalammewujudkanPerilaku HidupBersihdanSehat.

4. Faktorkeamanandankenyamanan lingkungan Masyarakat:

   Koordinasi dan kerja samaantara Linmas Desa dengan pembinaan Forkopimkasetempat.

2.4 ReviewterhadapRancanganAwalRKPD

Untukmenjagabahwa

PerencanaanPembangunanyangdirencanakanagartetapdalam koridoryangadadansesuai denganyangdiinginkan,tentunyaKecamatan Topoyoharusmelakukan reviewTerhadap Program Kegiatan yang telah direncanakan dengan harapanuntuk mengetahuibahwaprogramdankegiatan tersebut masih layakatautidakuntukdilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhandankondisiaktualyangada.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025terhadap hasil analisiskebutuhandapatdilihatpadaTabelberikutini:

Review TerhadapRancangan AwalR KPDTahun 2025
Kecamatan Topoyo KabupatenMamujuTengah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cacatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Belanja Langsung					**Belanja Lan gsung**					
A	**Kegiatan Rutin**	**Kecamatan Topoyo**				**KegiatanRutin**	**Kecamatan Topoyo**				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan**	**100%**	1.387.186.639,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan**	**100%**	1.387.186.639,00	
1. 1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100%**	100.530.000,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100%**	100.530.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	78.530.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	78.530.000,00	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	2.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	2.500.000,00	
1. 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**1.190.449.468**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**1.190.449.468**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.128.456.639,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.128.456.639,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	1.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	1.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000,00	
1. 3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	**70.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	**70.000.000**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Topoyo	Jumlah sarana pendukung Disiplin PNS	1 Unit	2.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Topoyo	Jumlah sarana pendukung Disiplin PNS	1 Unit	2.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Topoyo	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	3.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Topoyo	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	3.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan	80 Orang	1.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan	80 Orang	1.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Topoyo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha	5 Orang	1.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Topoyo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha	5 Orang	1.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	2 Orang	12.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	2 Orang	12.000.000,00	
1. 4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**177.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**177.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.200.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.200.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 Laporan	4.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 Laporan	4.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	15.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	15.000.000,00	
1. 5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**20.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**20.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Topoyo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Topoyo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	3.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Topoyo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	3.000.000,00	
1. 6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	15.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	15.000.000,00	
1. 7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	20.000.000,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan**	**100%**	**202.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan**	**100%**	**202.000.000**	
2. 1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**95.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**95.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	30.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	30.000.000,00	
2. 2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada dkecamatan**	**100%**	**80.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada dkecamatan**	**100%**	**80.000.000**	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	2.000.000,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	2.000.000,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	1.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	1.000.000,00	
	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah mengenai fasilitas pemerintah atau pelayanan umum	15 Layanan	1.000.000,00	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah mengenai fasilitas pemerintah atau pelayanan umum	15 Layanan	1.000.000,00	

2. 3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target**	**100%**	**27.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target**	**100%**	**27.000.000**	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	1.000.000,00	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	1.000.000,00	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**308.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**308.000.000**	
3. 1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan**	**100%**	**113.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan**	**100%**	**113.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	3.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	3.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan**	**100%**	**90.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan**	**100%**	**90.000.000**	
4. 1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase kasus yang terselesaikan**	**100%**	**55.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase kasus yang terselesaikan**	**100%**	**55.000.000**	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3.000.000,00	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk**	**100%**	**154.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk**	**100%**	**154.000.000**	
5. 1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan**	**100%**	**154.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan**	**100%**	**154.000.000**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	3.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	3.000.000,00	

	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	1.000.000,00	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	1.000.000,00	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kasus	2.000.000,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kasus	2.000.000,00	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**100%**	**298.256.497**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	**100%**	**298.256.497**	
6. 1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan**	**100%**	**298.256.497**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan**	**100%**	**298.256.497**	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	2.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	2.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen	1.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Topoyo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	1.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	1.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Topoyo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	1.500.000,00	

BABIII

TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH

3.1 TujuandanSasaranRenja PerangkatDaerah

Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Tahun 2024, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026 dan Hasil Pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Topoyo. Dimana tujuan pembuatan Ranwal renja Tahun 2025 lebih terfokus kepada pembangunan infrastruktur fasilitas atau sarana prasarana masyarakat, meningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor kecamatan Topoyo.

Dalam perencanaan kinerja Kecamatan Topoyo merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis lokasi, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan RI. Dengan perencanaan yang strategis yang jelas dan sinsergis, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Topoyo, maka diperlukan arah kebijakan yang menjadi prioritas. Dalam arah kebijakan ini memuat juga tujuan, dan Sasaran.

Adapun Tujuan dan Sasaran Perankat Daerah Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah adalah Sebagai Berikut :

1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kecamatan Topoyo untuk Priode diarahkan kepada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kecamatan;
2. Mengadakan rapat kordinasi satu kali dalam satu bulan dan konsultasi keluar dan dalam daerah;
3. Meningkatkan disiplin administrasi perkantoran;
4. Meningkatkan peran aktif dan control masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;

5. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
6. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
7. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

2. SasaranRenja

Adapun sasaran dari renja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Kebutuhan Pelengkapan Administrasi dan ATK Perkantoran ;
2. Memenuhi Kebutuhan Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.
3. Menyediakan kebutuhan kebersihan gedung dan lingkungan Kantor.
4. Memberikan kesempatan Kepada staf atau Pegawai untuk melakukan DIKLAT dan Pelatihan (LATPIM).
5. Memenuhi Kelengkapan sarana dan prasarana Gedung Kantor.
6. Mendapatkan juara dalam kegiatan lomba atau event-event nasional atau tingkat kota seperti MTQ dan Kegiatan Hari hari Besar lainnya

a. Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.2. ProgramdanKegiatan

Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja

merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tabel dilembaran berikut :

RumusanRencanaProgramdanKegiatanPerangkatDaerahTahun2025 danPrakiraanMajuTahun2026
Kecamatan Topoyo KabupatenMamujuTengah

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan		100			100	
		Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan		100			100	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100	242,845,000		100	261,845,000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100	160,000,000		100	179,000,000
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Mamuju Tengah	7	15,000,000		7	15,000,000
0.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Mamuju Tengah	1	8,000,000		1	10,000,000
0.00.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Mamuju Tengah	1	8,000,000		1	10,000,000
0.00.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Mamuju Tengah	1	8,000,000		1	10,000,000
0.00.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Mamuju Tengah	1	8,000,000		1	10,000,000
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Mamuju Tengah	5	112,000,000		5	112,000,000
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Mamuju Tengah	12	1,000,000		12	12,000,000

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Adminnistrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu		100	1,193,449,468		100	1,178,449,468
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Mamuju Tengah	15	1,128,449,468		15	1,128,449,468
0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	15,000,000		15	15,000,000
0.00.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Mamuju Tengah	1	20,000,000		1	2,000,000
0.00.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Mamuju Tengah	1	5,000,000		1	8,000,000
0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Mamuju Tengah	18	25,000,000		18	25,000,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Dearah Yang Dilayani		100	125,000,000		100	175,000,000
0.00.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Mamuju Tengah	3	20,000,000		3	20,000,000
0.00.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Mamuju Tengah	2	10,000,000		2	10,000,000
0.00.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Mamuju Tengah	4	45,000,000		5	65,000,000
0.00.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Mamuju Tengah	0	0		150	30,000,000
0.00.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Mamuju Tengah	5	50,000,000		5	50,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar		100	215,000,000		100	282,200,000
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Mamuju Tengah	8	10,000,000		8	10,000,000
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Mamuju Tengah	4	45,000,000		8	85,000,000
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Mamuju Tengah	10	10,000,000		20	25,000,000

0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Mamuju Tengah	12	5,000,000		60	10,000,000
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Mamuju Tengah	50	20,000,000		100	30,000,000
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Mamuju Tengah	40	10,000,000		36	7,200,000
0.00.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Mamuju Tengah	10	15,000,000		10	15,000,000
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Mamuju Tengah	3000	20,000,000		3000	20,000,000
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Mamuju Tengah	80	80,000,000		100	80,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100	122,000,000		100	140,000,000
0.00.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Mamuju Tengah	7	50,000,000		7	50,000,000
0.00.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Mamuju Tengah	2	50,000,000		2	50,000,000
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Mamuju Tengah	2	10,000,000		8	28,000,000
0.00.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Mamuju Tengah	10	12,000,000		10	12,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan yang Tersedia		100	105,000,000		99	105,000,000
0.00.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Mamuju Tengah	12	50,000,000		12	50,000,000
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Mamuju Tengah	2	15,000,000		2	15,000,000
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Mamuju Tengah	2	20,000,000		2	20,000,000

0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Mamuju Tengah	3	20,000,000		3	20,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Brang milim daerah penunjang urusan milik daerah sesuai standar		100	82,845,000		100	82,845,000
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Mamuju Tengah	7	82,845,000		7	82,845,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan		100	55,000,000		100	55,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus yang diselesaikan		100	55,000,000		100	55,000,000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Mamuju Tengah	1	55,000,000		1	55,000,000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		99	35,000,000		100	35,000,000
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Mamuju Tengah	2	35,000,000		2	35,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan		100	0		100	0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan		100	100,000,000		99	100,000,000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Mamuju Tengah	1	50,000,000		0	50,000,000

7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Mamuju Tengah	12	50,000,000		12	50,000,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	80,000,000		100	88,000,000
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	Mamuju Tengah	6	25,000,000		6	28,000,000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Mamuju Tengah	6	35,000,000		6	35,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Mamuju Tengah	15	20,000,000		20	25,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target		99	35,000,000		100	35,000,000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Mamuju Tengah	6	35,000,000		6	35,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi sara per 1.000 penduduk		0	0		0	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan		0	206,000,000		0	211,000,000
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Mamuju Tengah	55	23,000,000		275	25,000,000

7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	Mamuju Tengah	2	45,000,000		2	45,000,000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	Mamuju Tengah	65	37,000,000		65	37,000,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	Mamuju Tengah	65	24,000,000		65	24,000,000
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Mamuju Tengah	2	12,000,000		2	15,000,000
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	Mamuju Tengah	1	45,000,000		1	45,000,000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Mamuju Tengah	4	20,000,000		4	20,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dikoordinasikan		100	0		100	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target		100	113,000,000		100	113,000,000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Mamuju Tengah	1	45,000,000		1	45,000,000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Mamuju Tengah	350	68,000,000		350	68,000,000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan di kelurahan		95	75,000,000		95	75,000,000

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Mamuju Tengah	300	45,000,000		300	45,000,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Mamuju Tengah	150	30,000,000		150	30,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundanganya		100	0		100	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan		99	349,000,000		100	356,000,000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	30,000,000		15	30,000,000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	10,000,000		15	10,000,000
7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Mamuju Tengah	15	21,000,000		15	21,000,000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	10,000,000		15	15,000,000
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	15,000,000		15	15,000,000
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	5,000,000		15	7,000,000
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	15,000,000		15	15,000,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	45,000,000		15	45,000,000
7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	20,000,000		15	20,000,000

7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	25,000,000		15	25,000,000
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	10,000,000		15	10,000,000
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	15,000,000		15	15,000,000
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	23,000,000		15	23,000,000
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Mamuju Tengah	15	30,000,000		15	30,000,000
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Mamuju Tengah	15	20,000,000		15	20,000,000
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Mamuju Tengah	15	55,000,000		15	55,000,000
					3,051,294,468			**3,210,494,468**

BABIV

RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH

4.1 StrategidanKebijakan

1. Strategi

Strategis umum untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :

1. Pemantapan dan Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Kelembagaan dalam rangka mendukung tugas penjabat Bupati Mamuju Tengah.
2. Pemantapan kualitas pembangunan dalam pelayanan masyarakat yang konsisten dan terpadu dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
3. Harmonisasi kerjasama antar lembaga multi stakeholders. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Kecamatan Topoyo sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
5. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
7. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
8. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
9. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

2. Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan Kasemen diarahkan Kepada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kecamatan;
2. Mengadakan rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah;
3. Meningkatkan disiplin administrasi perkantoran;

4. Meningkatkan peran aktif dan control masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
5. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
6. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
7. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi ;

BABV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Topoyo tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja sebagai aparatur kecamatan topoyo sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan efektif dan efisien.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Topoyo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Topoyo. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 202, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Topoyo. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Topoyo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan TopoyoTahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Topoyountuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Topoyopada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Topoyo, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Topoyo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Topoyo, 01 Nopember 2025

CAMAT TOPOYO



MASRI R., S.Pd.,MM.,M.Tr.Ap

Nip. 19770310 200906 1 003

2025

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

BAPPERIDA
MAMUJU TENGAH
30/9/2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor dan Instansi Pemerintah lainnya. Renja Perubahan Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen perencanaan, juga diharapkan menyatukan Visi, Misi Kepala Daerah dengan Strategi Perangkat dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang maju, mandiri khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan, serta untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang diharapkan memacu kinerja pada tahun berikutnya, terutama peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia pada Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah.

Renja Perubahan Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 sesuai dengan target dan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap Prioritas Program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Mamuju Tengah.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja masih banyak kelemahan-kekurangan, oleh karena itu kami mohon masukan dari semua pihak guna meningkatkan efektivitas Perencanaan Pembangunan pada masa yang akan datang.

Tobadak, 30 September 2025
Kepala Badan

H. DZULKIFLI, S.IP., M.Si., MM
NIP. 19810707 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **13**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PPerangkat Daerah 39

2.3 Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 42

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 42

2.5 Penalaah Usulan Program dan Kegiatan 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **44**

3.1 Telaah Tahapan Kebijakan Nasional 44

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 44

3.3 Program dan Kegiatan 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN PERANGKAT DAERAH **50**

BAB V PENUTUP **55**

BAB I

PENDAHULUAN

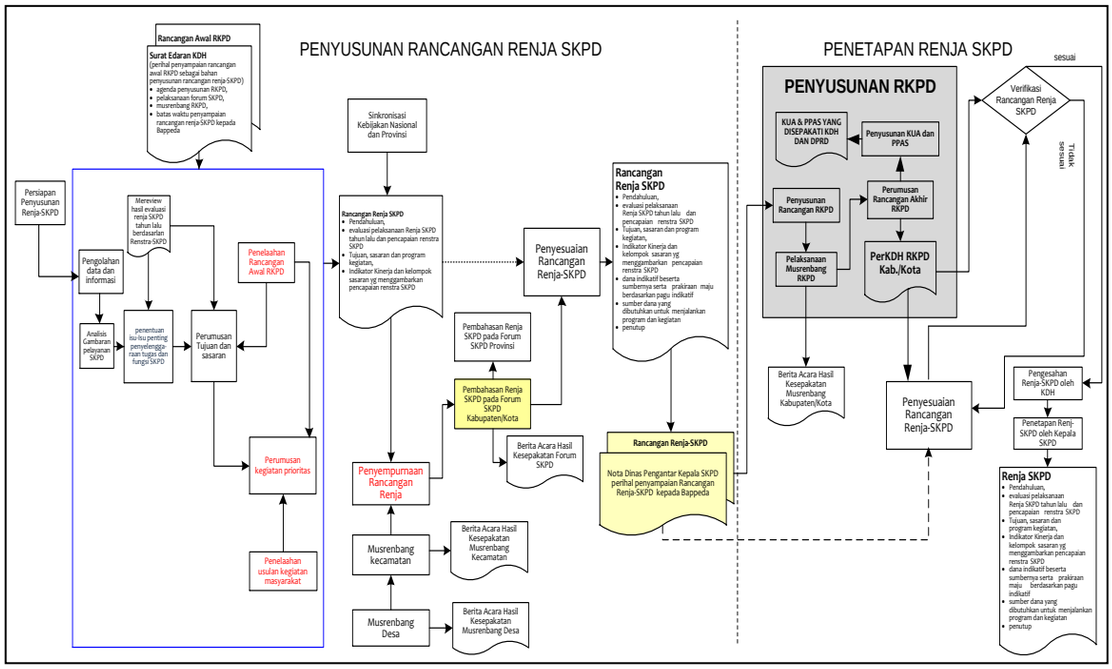
1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satunya ruang lingkup perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif sesuai dengan program prioritas pada rancangan dokumen RKPD Kabupaten. Dalam penyusunan haruslah berpedoman kepada rancangan awal RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen rencana pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah, agar tetap terjaga sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan daerah dalam periode satu tahun.

Dokumen Renja ini akan menyempurnakan penyusunan dokumen RKPD yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Bagan alir penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RenjaPerangkat Daerah Kabupaten/Kota



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang menuangkanisu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 termasuk dukungan terhadap tugas-tugas yang diemban Pejabat Bupati, rancangan Renja ini kemudian dibuat setelah mengumpulkan data dan informasi berupa regulasi terkait, kebijakan-kebijakan nasional terkait, hasil evaluasi pelaksanaannya, dan dokumen realisasi pencapaian Renja tahun sebelumnya (2020 / n-2) serta data khusus yang dibutuhkan (termasuk data dari musrenbang kecamatan). Setelah menelaah rancangan awal RKPD, RenjaBappeda akhirnya merumuskan dukungan terhadap RKPD dan sesuai dengan tugas Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan serta pengendalian daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022, berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2022;
15. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis tentang kondisi faktual Perangkat Daerah yang dapat memberikan informasi terhadap keberadaan potensi maupun masalah yang adasehingga mampu memberikan acuan dalam bekerja dalam satu tahun anggaran 2022.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menyiapkan dokumen rencana kerja satu tahun Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk

menjalankan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari:

1.1 Latar Belakang. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Terdiri dari:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Perangat Daerah. Memuat kajian

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangat Daerah. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah. Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangat Daerah; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangat Daerah; 3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangat Daerah; dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atau rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan. Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Di tahun kelima penyelenggaraan pemerintahan Kepala Daerah terpilih, pada tahun 2025 Pemerintah Daerah berfokus pada tema "**Pemantapan perekonomian rakyat dan pelayanan publik serta pemeliharaan daya dukung dan daya tamping lingkungan"** dengan pelaksanaan pembangunan diprioritaskan kepada:

a. Pemantapan infrastruktur transportasi perdesaan;
b. Pengembangan literasi, bahasa dan sastra daerah;
c. Penguatan sistem ketersedian obat dan alat kesehatan;
d. Penguatan sistem pengendalian laju inflasi;
e. Peningkatan kualitas capaian pemenuhan SPM;
f. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
g. Pengembangan keluarga sejahtera;
h. Pemantapan fungsi kawasan terpadu mandiri sebagai sentra agropolitan;
i. Pemantapan pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN;
j. Penguatan kuatitas output inovasi perangkat daerah;
k. Penguatan sistem deteksi dini konflik sosial;
l. Pemeliharaan keanekaragaman hayati

Adapun program yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan non urusan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Anggaran 2020
Kabupaten Mamuju Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Taret Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)**	**100**	**100**	**2.935.905.563**	**2.898.046.306**	**96,70%**	100,00	100,00	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran (%)	100	100	**175.360.208**	**172.238.374**	**100%**	100	99,00%	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	3	56.267.312	56.003.310	2	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	10.801.672	10.199.800	2	1	1	100

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	9.249.692	8.769.572	2	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DokumenDPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	11.174.124	10.271.800	2	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	10.449.099	9.846.700	2	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa	1	5	77.418.309	77.147.192	4	3	3	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	100	100	**1.443.953.866**	**1.425.534.219**	**95%**	100	98,00%	98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	33	1.429.126.309		18	18	18	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3	14.827.557	14.026.900	2	1	1	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100	100	**136.991.000**	**136.631.000**	**97%**	100	100,00%	100
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	3	136.991.000	136.631.000	1	1	1	100

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100	100	**131.377.204**	**129.937.572**	**83%**	100	100,00%	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	-	97.677.204	97.527.572	1	2	2	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	33.700.000	32.410.000	4	2	2	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100	100	**680.204.659**	**675.396.515**	**97%**	100	100,00%	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	100	5.354.465	5.353.508	1	1	1	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7	256.808.694	256.760.649	5	4	4	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30000	4000	31.889.500	31.889.000	29.000	30.000	30.000	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4250	71.200.000	70.468.000	5.400	1	1	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220	320	314.952.000	310.925.358	218	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (%)	100	100	**250.726.035**	**248.411.391**	**98%**	100	99,00%	99

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	999	83.035.979	82.983.985	98	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	1	77.790.056	75.597.406	2	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2	89.900.000	89.830.000	3	2	2	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	100	1	**72.649.217**	**68.057.235**	**100%**	100	99,00%	99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	20	72.649.217	68.057.235	16	16	16	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	-	-	**-**	-	5	5	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuaian penjabaran dokumen perencanaan dan penganggaran (%)**	**100**	**100**	**986.276.464**	**252.773.512**	**100%**	100,00	100,00	100
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah (Dokumen)	3	3	**537.065.586**	**524.480.204**	**100%**	2	2,00%	100
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	4	200.980.000	200.915.000	3	4	4	100
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	2	108.504.415	106.777.641	3	4	4	100

	dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	4	72.140.698	64.321.199	3	2	2	100
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	2	19.684.242	19.683.176	3	1	1	100
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	6	33.797.260	31.272.276	3	2	2	100
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	526	31	13.798.182	13.433.910	5	5	5	100
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	3	88.160.789	88.077.002	3	3	3	100
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	**137.082.109**	**122.827.092**	**100%**	100	100,00%	100
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0	3	65.148.603	63.659.460	10	1	1	100
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0	0	783.213	782.564	8	40	40	100

	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0	0	71.150.293	58.385.068	1	1	1	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	3	3	**200.454.853**	**197.586.577**	**100%**	3	3,00%	100
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	4	49.883.423	49.302.768	3	3	3	100
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	3	150.571.430	148.283.809	5	4	4	100
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (%)	0	100	**111.673.916**	**111.013.240**	**100%**	100	100,00%	100
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0	100	43.612.348	43.428.396	34	1	1	100
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	100	63.278.355	4.782.564	1	1	1	100,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan penganggaran (%)**	**100**	**100**	**79.691.948**	**298.776.865**	**100%**	100,00	100,00	100

	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan b.Persentase rata-rata koordinasi urusan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan (%)	100	100	**916.096.029**	**298.776.865**	**100%**	100	100,00%	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	0	**449.153.240**	**437.747.994**	5	5	5	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	0	14.704.856	14.704.000	5	5	5	100,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	0	8.034.072	8.016.400	5	5	5	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	0	2.929.847	2.872.673	5	5	5	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	2	25.976.373	25.725.500	5	5	5	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	4	61.177.546	60.961.426	5	5	5	100

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	1	7.735.501	7.722.500	5	5	5	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3	5	9.373.344	8.372.100	5	5	5	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	a. Persentase ratarata koordinasi urusan bidang Perekonomian yang dilaksanakan b. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang SDA yang dilaksanakan (%)	100	100	109.524.754	**62.128.900**	**100%**	100	100,00%	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	5	24.048.920	42.670.700	5	6	6	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	0	274.054.245	19.458.200		6	6	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	a. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang infrastruktur yang dilaksanakan b. Persentase rata-rata koordinasi urusan bidang kewilayahan yang dilaksanakan (%)	100	100	**404.449.201**	**396.453.701**	**100%**	100	100,00%	100

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	4	57.294.280	55.032.074	4	4	4	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	13.798.873	13.026.000	4	4	4	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	0	-	-	-	4	4	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	3	8.356.331	8.137.500	4	4	4	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	0	166.705.847	166.429.393	4	4	4	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	3	63.960.000	63.551.960	4	4	4	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Cakupan inovasi, peneltian dan Pengembangan Pembangunan daerah yang dilaksanakan (%)**	**100**	**100**	**784.722.985**	**209.643.969**	4	100	100,00	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang	100	100	**565.666.752**	**410.243.230**	**100%**	100,00	100,00%	50

	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian yang dilaksanakan (%)								
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	1	132.853.877	127.976.830	1	2	2	100
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	132.810.000	132.792.000	1	2	1	50
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan asset daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan asset daerah, Reformasi Birokrasi	1	1	300.002.875	149.474.400	1	1	0	50
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yangmemenuhi syarat kompetisi ajang inovasi Tingkat nasional (Inovasi)	2	2	**219.056.233**	**218.688.678**	**100%**	2	2,00%	100
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	0	19.072.212	19.000.198	1	1	1	100
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	199.984.021	199.688.480	1	42	42	100

Adapun sumber penerimaan program dan kegiatan diatas bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah telah mendekati cukup dilengkapi dengan sarana dan prasarana rutin yang menunjang operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida di tahun 2024 berupa kegiatan urusan perencanaan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan Database Hasil Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 yang berlokasi di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, yang dijadikan bahan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tahun 2026;
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen-dokumen kajian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan APBD Tahun 2024 yang menghasilkan dokumen Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran Perubahan 2025.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menghasilkan dokumen Evaluasi Renja.
5. Kegiatan penyusunan dokumen informasi daerah yang menghasilkan dokumen berupa profil Daerah, Website Bappeda, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Inovasi Daerah.
6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang terintegrasi yang menghasilkan dokumen berupa dokumen pendukung perncanaan pembangunan.

Pada tahun 2024, Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan non urusan (operasional rutin) sebanyak 3 program dan 7 kegiatan, urusan perencanaan sebanyak 2 Program dan 7 Kegiatan, urusan pengembangan dan penelitian sebanyak 1 program dan 2 kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappeda berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana indikator tersebut disusun kedalam 3 (tiga) Tataran, sebagai berikut:

1. Tataran Pengambil Kebijakan, indikator kinerja kuncinya sebagai berikut:
    - Ketepatan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006
    - Urusan wajib yang harus dilaksanakan (urusan perencanaan dan urusan statistik)
    - Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh public
    - Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
    - Belanja publik terhadap DAU
2. Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum, indikator kinerja kuncinya sebagai berikut:
    - Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
    - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
    - Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
    - Rasio struktur jabatan dan eselon yang terisi
    - Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah
    - Rasio PNS Perangkat Daerah terhadap Perangkat Daerah kabupaten
    - Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
    - Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
    - Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKA-SKPD)
    - Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah
    - Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah

- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah
- Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD
- Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (Realisasi)
- Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)
- Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (Realisasi)
- Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)
- Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah
- Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah
- Jumlah fasilitas/ prasarana informasi :
- Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan, indikator kinerja kuncinya sebagai berikut:
   - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
   - Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
   - Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
   - Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
   - Buku Profil Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPERIDA
Kabupaten Mamuju Tengah

No	Indikator Kinerja	SPM/SN	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Skor Kesesuain Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Skor Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA PPAS			1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Skor Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS			0,06	0.07	0,09	0,1	0,06	0,08	0,1	0,11	
4	Persentase Rata-Rata Capaian sasaran RPJMD			100%	100%	86,68%	86,70%	100%	86,67%	86,70%	86,71%	Setelah dilakukan reviu maka ada revisi terhadap hasil perhitungan capaian sasaran RPJMD berdasarkan pengisian e-monev
5	Persentase Rata-Rata Capaian IKK Pembangunan Daerah			100%	100%	61,10%	61,68%	100%	60,68%	61,3%	61,7%	Telah dilakukan perhitungan Kembali terhadap hasil capaian berdasarkan koordinasi dengan bagian Pemerintahan dan diperoleh angka yang sangat jauh di bawah capaian sebelumnya
6	Indeks Inovasi Daerah			52	54,6	59,30	59,60	54,5	58,95	59,4	59,7	
7	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan			50%	100%	85%	86,5%	50%	84%	86%	87%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2025 tertuang dalam prioritas provinsi dan prioritas kabupaten yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah dengan prioritas “Pemantapan perekonomian rakyat dan pelayanan publik serta pemeliharaan daya dukung dan daya tamping lingkungan” dengan arah kebijakan berupa mendorong peningkatan kualitas perencanaan dengan memastikan keselarasan RPJMD dengan RKPD,memastikan update data dan informasi secara perodik, optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk akselerasi proses perencanaan pembangunan dan meningkatkan tertib dalam perencanaan pada setiap perangkat daerah keselarasan nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, memastikan kesesuaian pagu Program RKPD dan KUA PPAS, serta Peningkatan inovasi daerah melalui pemenuhan inovasi pada masing-masing perangkat daerah. Berikut adalah penjabaran isu strategis pada Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 2.3
Isu Strategis BAPPERIDA Kabupaten Mamuju Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isi KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Menguatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran	- Keterbatasan sumberdaya dalam perencanaan maupun pengendalian pembangunan - Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan - Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi; - Belum efektifinya evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Akuntabilitas kinerja		Perubahan Paradigma Pembangunan Global	Bonus Demografi dengan SDM Berkualitas	Konektivitas Antar Wilayah (Darat, Laut dan Udara)	- Perubahan peraturan perundangan Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah - Komitmen Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain - Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan SDM melalui

	Perangkat Daerah yang masih rendah - Minimnya ketersediaan data dan kelitbangan -					pendidikan dan pelatihan - Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian - Adanya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan isu-isu strategis yang tertuang dalam rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025, salah satunya adalah pencegahan penyebaran dan penanganan Virus Corona di Kabupaten Mamuju Tengah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengelolaan kebudayaan daerah, pembangunan infrastruktr dasar, pendidikaan dan kesehatan serta penataan lingkungan dan pengelolaan lingkungan, Bappeda mengambil peran sebagai fungsi koordinasi dan basis perencanaan, dimana seluruh kegiatan tersebut haruslah melalui perencanaan-perencanaan yang matang dan telah memiliki dokumen perencanaan yang disusun di Bappeda. Untuk tahun 2025 Bapperida telah menuang program dan kegiatan sampai pada dokumen Penjabaran APBD dan DPA Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan isu-isu lainnya telah sesuai dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Bappeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida sebagai penyelenggara Musrenbang dimana kesepakatannya akan dituang dalam dokumen perencanaan daerah, untuk itu Bappeda berupaya untuk tetap fokus agar usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat sesuai dengan analisis teknis dan telaah dari Perangkat Daerah dapat tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Di Tahun 2025 ini, program dan kegiatan Bapperida masih memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sarana dan prasarana serta memastikan bahwa pada tahun 2025 seluruh Perangkat Daerah melaksanakan Kebijakan Nasional yang menjadi prioritas RKPN 2025 dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, dalam asistensi RKA-Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan menggunakan metode pendekatan tematik, holistic, integrative dan spaasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program*. Dengan cara memastikan hanya program yang bebar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimana amanat RPJMN 2025-2029, RKP 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

3.2 **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Tugas Bupati Mamuju Tengah sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Visi : Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Misi : -Memperkuat transformasi ekonomi -Memperkuat transformasi tata Kelola -Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	• Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersifat lintas sektor. • Melibatkan seluruh komponen pelaku pembangunan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	• Mendorong peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan; • Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; • Membangun dan mengembangkan sarana prasarana institusi perencanaan.
	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Meningkatkan keterpenuhan kualitas perencanaan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.	• Mendorong perangkat daerah untuk fokus dan memenuhi target kinerja yang diemban pada masing-masing perangkat daerah.
	Meningkatnya penerapan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah	• Meningkatkan keterpenuhan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan; • Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang akurat dan cepat; • Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi.	• Meningkatkan kerjasama dengan Daerah lain, Perguruan Tinggi, Akademisi, Peneliti, serta Lembaga atau perseorangan yang kredibel; • Melakukan update data dan informasi secara periodik; • Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas terhadap perencanaan pembangunan; • Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk akselerasi proses perencanaan pembangunan dan meningkatkan tertib dalam perencanaan.

Dari uraian diatas, dapat diturunkan dalam rencana kegiatan dalam setiap bidang. Dalam setiap kegiatan memiliki tujuan dalam rangka perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yang disesuaikan dengan Visi Misi Bupati. Berikut adalah uraian Program dan Kegiatan Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA BAPPERIDA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Skor Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA PPAS	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)**	**100**
		Skor Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD		**Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)**	**100**
		Skor Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**a. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)** **b. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)** **c. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)** **d. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)** **e. Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)**	**a.1** **b.2** **c.1** **d.2** **e.2** **f.2** **g.1**

				f. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen) **g. Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)**	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**a. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)** **b. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)**	**a.4** **b.4**
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4

			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4
	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rata Rata Capaian IKK Pembangunan Daerah	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan**	**100**
		Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran RPJMD	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)** **b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)** **c. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)** **d. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)** **e. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)** **f. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada**	**a.3** **b.3** **c.3** **d.3** **e.3** **f.3** **g.3** **h.3**

				Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) **g. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)** **h. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)**	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	3
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**a. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)** **b. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)** **c. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)** **d. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)** **e. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)** **f. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)** **g. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)**	**a.4** **b.4** **c.5** **d.4** **e.5** **f.5** **g.4** **h.5**

				h. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (JPD, JMD dan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**a. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)** **b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)** **c. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)** **d. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)** **e. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)**	**a. 3** **b. 4** **c. 3** **d. 4** **e. 3** **f. 4** **g. 4** **h. 3**

				f. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) **g. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)** **h. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)**	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	3
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Infrastruktur yang dimonitor dan dievaluasi	3
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	4
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Kewilayahan yang dimonitor dan dievaluasi	4
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4
	Meningkatnya Penerapan Hasil-hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**a. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)** **b. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang**	**a.100** **b.100**

				Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Menjadi Dasar Perumusan Kebijakan	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**a. Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)** **b. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)**	**a.8** **b.2**
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	8
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Inovasi yang memenuhi syarat kompetisi ajang inovasi tingkat nasional**	**2**
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2

Sumber : Bidang-Bidang Bapperida Kab. Mamuju Tengah.

Sedangkan untuk Program dan Kegiatan rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN BAPPERIDA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	a. Nilai SAKIP b. Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Bapperida	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)**	**100%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**a. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)** **b. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)** **c. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)** **d. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi**	**a.1** **b.1** **c.1** **d.1** **e.1** **f.1**

				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) **e. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)** **Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) b. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	a.27 b.1

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah penelitian Bidang Perhubungan yang dilaksanakan	1
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	a.2 b.6
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) c. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) d. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) e. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	a.1 b.4 c.1 d.192 e.30.000

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	a.12 b.12 c.60
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) b. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	a.16 b.5
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	16

				Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bapperida memiliki target dan capaian yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan adalah 4 program, terdiri satu program rutin dan tiga program pokok Bapperida, dengan total kegiatan 14 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah **Rp. 4.352.864.447**, dengan rincian sumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam tabel berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	2026		Penanggung jawab
			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)**		**100**	**Rp. 491.629.521,00**	**Bidang PPEPD**
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)		**100**		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**h. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)** **i. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)** **j. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)** **k. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)** **l. Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)** **m. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)** **n. Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)**		**a.1** **b.2** **c.1** **d.2** **e.2** **f.2** **g.1**	**Rp. 350.048.277,00**	**Bidang PPEPD**

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)		2	Rp. 260.760.000,00	Bidang PPEPD
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)		2	Rp. 31.014.005,00	Bidang PPEPD
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)		1	Rp. 11.000.616,00	Bidang PPEPD
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)		2	Rp. 13.125.571,00	Bidang PPEPD
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		1	Rp. 13.851.093,00	Bidang PPEPD
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)		1	Rp. 9.352.268,00	Bidang PPEPD
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)		2	Rp. 10.944.724,00	Bidang PPEPD
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Prencanaan Pembangunan Daerah	**c. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)** **d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)**		**a.4** **b.4**	**Rp. 141.581.244,00**	**Bidang PPEPD**
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		4	Rp. 36.367.487,00	Bidang PPEPD
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)		4	Rp. 105.213.757,00	Bidang PPEPD

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase rata-rata koordinasi urusan yang dilaksanakan**		**100**	**Rp. 326.036.722,00**	**BIDANG PPM, IFWIL**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)** **b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)** **c. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)** **d. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)** **e. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)** **f. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)**		**a.3** **b.3** **c.3** **d.3** **e.3** **f.3** **g.3** **h.3**	**Rp. 188.814.316,00**	**BIDANG PPM**

	g. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) **h. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)**				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		3	Rp. 8.990.508,00	BIDANG PPM
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		3	Rp. 5.484.078,00	BIDANG PPM
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		3	Rp. 5.384.617,00	BIDANG PPM
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		3	Rp. 8.523.074,00	BIDANG PPM
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		3	Rp. 22.577.057,00	BIDANG PPM
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		3	Rp. 5.210.574,00	BIDANG PPM

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		3	Rp. 5.593.662,00	BIDANG PPM
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		3	Rp. 127.050.746,00	BIDANG PPM
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**a. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)** **b. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)** **c. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)** **d. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)** **e. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)** **f. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan**		**a.4** **b.4** **c.5** **d.4** **e.5** **f.5** **g.4** **h.5**	**Rp. 60.577.374,00**	**BIDANG IFWIL**

	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) **g. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)** **h. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)**				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		5	Rp. 50.902.601,00	BIDANG IFWIL
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		5	Rp. 9.674.773,00	BIDANG IFWIL
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**a. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)** **b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)** **c. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)** **d. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen**		**a. 3** **b. 4** **c. 3** **d. 4** **e. 3** **f. 4** **g. 4** **h. 3**	**Rp. 76.645.032,00**	**BIDANG IFWIL**

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) **e. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)** **f. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)** **g. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)** **h. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)**				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan		3	Rp. 17.693.397,00	BIDANG IFWIL
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Infrastruktur yang dimonitor dan dievaluasi		3	Rp. 13.459.555,00	BIDANG IFWIL
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan		4	Rp. 18.174.144,00	BIDANG IFWIL
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan urusan bidang Kewilayahan yang dimonitor dan dievaluasi		4	Rp. 10.479.000,00	BIDANG IFWIL

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)		4	Rp. 16.838.936,00	BIDANG IFWIL
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**a. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)** **b. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)**		**a.100** **b.100**	**Rp. 1.131.078.383**	**BIDANG RIDA**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**a. Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)** **b. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)**		**a.8** **b.2**	**Rp. 995.193.528,00**	**BIDANG RIDA**
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1	Rp. 65.704.405,00	BIDANG RIDA
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		3	Rp. 779.489.123,00	BIDANG RIDA
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		1	Rp. 150.000.000,00	BIDANG RIDA

Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Inovasi yang memenuhi syarat kompetisi ajang inovasi tingkat nasional**		**2**	**Rp. 135.884.855**	**BIDANG RIDA**
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		2	Rp. 135.884.855	BIDANG RIDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)**		**100%**	**Rp. 2.404.119.821**	**SEKRETARIAT**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**f. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)** **g. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)** **h. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)** **i. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)** **j. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)** **Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)**		**a.1** **b.1** **c.1** **d.1** **e.1** **f.1**	Rp. 152.421.435,00	**SEKRETARIAT**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1	Rp. 50.018.778,00	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	Rp. 9.587.421,00	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	Rp. 6.969.914,00	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	Rp. 9.365.322,00	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	Rp. 9.841.031,00	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1	Rp. 66.638.969,00	SEKRETARIAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	c. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		**a.27** **b.1**	**Rp. 1.725.744.586**	**SEKRETARIAT**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		27	Rp. 1.687.804.612	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	Rp. 37.939.974,00	SEKRETARIAT
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	**Jumlah penelitian Bidang Perhubungan yang dilaksanakan**		**1**	**Rp. 55.401.683,00**	**SEKRETARIAT**
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	Rp. 55.401.683,00	SEKRETARIAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)** **b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)**		**a.2** **b.6**	**Rp. 41.599.943,00**	**SEKRETARIAT**
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		2	Rp. 26.499.943,00	SEKRETARIAT
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		6	Rp. 15.100.000,00	SEKRETARIAT

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)** **b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)** **c. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)** **d. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)** **e. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**		**a.1** **b.4** **c.1** **d.192** **e.30.000**	**Rp. 213.630.100,00**	**SEKRETARIAT**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	Rp. 1.629.950,00	SEKRETARIAT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	Rp. 47.266.800,00	SEKRETARIAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	Rp. 33.875.000,00	SEKRETARIAT
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		4	Rp. 46.245.000,00	SEKRETARIAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	Rp. 84.613.350,00	SEKRETARIAT

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	d. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) e. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		a.12 b.12 c.60	Rp. 182.408.324,00	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	Rp. 75.134.124,00	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		60	Rp. 20.724.200,00	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	Rp. 86.550.000,00	SEKRETARIAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)** **b. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)**		**a.16** **b.5**	**Rp. 32.913.750,00**	**SEKRETARIAT**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		16	Rp. 18.615.000,00	SEKRETARIAT
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		5	Rp. 14.298.750,00	SEKRETARIAT

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang didalamnya memuat kebijakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah harus mempedomani RKPD Perubahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025;
2. Renja Perubahan Tahun 2025 diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dan transparan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah;
3. Renja Perubahan Tahun 2025 akan menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusuna Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025;
4. Renja Perubahan Tahun 2025, akan menjadi bahan evaluasi terhadap pencapaian target yang mendukung tugas pejabat Bupati Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

Sebagai daerah otonomi baru, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah dirumuskan secara (1) Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal; (2) Efektif, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal; (3) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

RENCANA KERJA PERUBAHAN



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

T.A. 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Sukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan untuk Periode Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini kami susun sebagai Upaya dan Ikhtiar kami untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara atas pelayanan administrasi urusan bidang kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun berdasarkan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dibuat sebagai pedoman utama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan dedikasi dan profesionalisme atas program dan kegiatan pada tahun 2025.

Kami sadar sepenuhnya bahwa implementasi rencana ini akan menghadapi tantangan. Namun dukungan semua pihak terkait, kami yakin dapat mengatasi setiap hambatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Perubahan Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap rencana ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat khususnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamuju Tengah dan menjadi landasan yang kokoh dalam memberikan pelayanan publik terutama pada urusan bidang kepegawaian yang lebih baik untuk semua.

Tobadak, Oktober 2025
Kepala BKPSDM,

Drs. H. Bambang Suparni, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199504 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 12

BAB IV PENUTUP 13

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja TW. II 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) juga meliputi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek sisa waktu satu tahun berjalan. Fungsi Renja Perubahan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja Perubahan memuat hasil evaluasi renja triwulan II kegiatan untuk waktu periode satu tahun berjalan yang berpedoman pada Situasi dan kondisi yang terjadi di daerah serta Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja Perubahan BKPSDM dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Evaluasi Capaian Kinerja. Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mamuju Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi anggaran berbagai sumber daya dalam mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah adalah selain untuk menyesuaikan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025, juga untuk merumuskan arah kebijakan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dan strategi pembangunan daerah yang dapat mendorong peran aktif seluruh pihak dan terkhusus kepada Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan layanan administrasi urusan bidang kepegawaian menjadi lebih baik.

Sebagai tindaklanjut dari uraian diatas, tujuan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah digunakan sebagai :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dengan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan yang telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah ke dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II TAHUN 2025

Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah;
c. Pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
d. Pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan penerapan Merit System dalam manajemen ASN			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	52	5,046,596,592	52	1,832,262,693	52	1,752,096,451																
				Indeks Merit System (Indeks)	1		1		1																	
				Indeks Kepuasan ASN (Indeks)	85		81		83																	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jabatan fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	66,00	5.046.596.592	0,00	1.832.262.693	65,17	1.752.096.451									0,00	417,230,921						
				Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	96,88		0,00		95,56										0,00							
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah (%)	75	1.335.207.574	22,46	599.853.344	62	206.067.817	0%%	0	0%%	90,570,354					0,00%	90,570,354	26,07%	690.423.698	**41,84%**	**51,71%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9	155,990,319	1	16,861,016	2	26,736,195	0	0	0	6,225,363					0	6,225,363	1	23,086,379	**11,11%**	**14,80%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1,101	438,805,356	446	512,758,468	200	146,129,142	159	0	0	78,293,867					159	78,293,867	605	591,052,335	**54,95%**	**134,70%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	181	133,585,899	33	20,283,860	35	33,202,480	0	0	0	6,051,124					0	6,051,124	33	26,334,984	**18,23%**	**19,71%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	606,826,000	1	49,950,000	0	0	0	0	0	0					0	0	1	49,950,000	**20,00%**	**8,23%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi (%)	100	748.235.032	20,92	452.044.878	100	529.625.033	0%%	0	0%%	15,315,000					0,00%	15,315,000	20,92%	467.359.878	**20,92%**	**62,46%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	250	159,709,822	50	3,131,415	50	15,513,192	0	0	0	3,000,000					0	3,000,000	50	6,131,415	**20,00%**	**3,84%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1,460	481,351,994	300	35,713,583	200	46,587,901	0	0	0	12,315,000					0	12,315,000	300	48,028,583	**20,55%**	**9,98%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	225	107,173,216	50	413,199,880	50	467,523,940	0	0	0	0					0	0	50	413,199,880	**22,22%**	**385,54%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah (%)	100	2.006.489.267	18,72	667.780.868	100	960.754.599	0%%	223,882,483	0%%	80,735,900					0,00%	304,618,383	18,72%	972.399.251	**18,72%**	**48,46%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	164	225,000,000	0	0	40	227,635,108	0	223,882,483	0	0					0	223,882,483	0	223,882,483	**0,00%**	**99,50%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	170	225,000,000	50	182,778,654	0	0	0	0	0	0					0	0	50	182,778,654	**29,41%**	**81,23%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	110	1,375,232,640	50	485,002,214	50	425,954,215	0	0	0	80,735,900					0	80,735,900	50	565,738,114	**45,45%**	**41,14%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	14	181,256,627	0	0	3	307,165,276	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik (%)	100	956.664.719	6,67	112.583.603	100	55.649.002	0%%	0	0%%	6,727,184					0,00%	6,727,184	6,67%	119.310.787	**6,67%**	**12,47%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	113,434,359	0	0	1	13,311,136	0	0	0	2,248,000					0	2,248,000	0	2,248,000	**0,00%**	**1,98%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	45,000,000	1	37,512,379	0	0	0	0	0	0					0	0	1	37,512,379	**33,33%**	**83,36%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	175	313,775,760	0	0	20	21,398,197	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0	439,454,600	0	75,071,224	0	20,939,669	0	0	0	4,479,184					0	4,479,184	0	79,550,408	**0,00%**	**18,10%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
		5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	3	45,000,000	0	0	1	0	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP BKPSDM (Nilai)	70	10,950,430,728	65	1,795,284,947	67	2,002,623,450																
				Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (%)	0		0		0																	
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	10.950.430.728	0,00	1.795.284.947	100,00	2.002.623.450									0,00	915,550,768						
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran (%)	100	177.203.125	22,67	41.427.000	100	46.601.339	0%	0	0%	19,121,000					80,00%	19,121,000	28,67%	60.548.000	**28,67%**	**34,17%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	53,586,608	2	14,279,500	3	36,394,563	1	0	0	18,520,000					1	18,520,000	3	32,799,500	**30,00%**	**61,21%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	26,793,303	1	6,260,000	1	5,103,388	1	0	0	0					1	0	2	6,260,000	**40,00%**	**23,36%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
		5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	26,793,303	1	6,260,500	1	5,103,388	0	0	0	601,000					0	601,000	1	6,861,500	**20,00%**	**25,61%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	53,586,608	1	6,627,000	0	0	0	0	0	0					0	0	1	6,627,000	**20,00%**	**12,37%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	16,443,303	1	8,000,000	0	0	0	0	0	0					0	0	1	8,000,000	**33,33%**	**48,65%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	100	7.792.791.737	13,33	1.309.182.682	100	1.759.578.020	0%	492,669,521	0%	322,646,797					40,00%	815,316,318	20,78%	2.124.499.000	**20,78%**	**27,26%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	7,679,525,218	17	1,279,922,182	19	1,726,967,457	19	492,669,521	0	310,146,797					19	802,816,318	36	2,082,738,500	**42,35%**	**27,12%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
		5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	32,886,608	0	0	1	32,610,563	0	0	0	12,500,000					0	12,500,000	0	12,500,000	**0,00%**	**38,01%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	80,379,911	1	29,260,500	0	0	0	0	0	0					0	0	1	29,260,500	**20,00%**	**36,40%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100	43.236.606	10,00	3.855.000	100	13.782.953	0%	0	0%	4,750,000					40,00%	4,750,000	10,00%	8.605.000	**10,00%**	**19,90%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	26,793,303	1	3,855,000	0	0	0	0	0	0					0	0	1	3,855,000	**20,00%**	**14,39%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	16,443,303	0	0	1	13,782,953	0	0	0	4,750,000					0	4,750,000	0	4,750,000	**0,00%**	**28,89%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100	100.000.000	0,00	0	100	10.000.000	0%	0	0%	10,000,000					0,00%	10,000,000	50,00%	10.000.000	**50,00%**	**10,00%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	100,000,000	0	0	2	10,000,000	2	0	0	10,000,000					2	10,000,000	2	10,000,000	**50,00%**	**10,00%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100	1.227.133.313	20,00	177.765.775	100	64.366.700	0%	0	0%	15,387,100					0,00%	15,387,100	30,07%	193.152.875	**30,07%**	**15,74%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	101,814,555	1	12,589,500	0	0	0	0	0	0					0	0	1	12,589,500	**20,00%**	**12,37%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	53,586,608	1	8,150,000	1	17,685,000	1	0	0	0					1	0	2	8,150,000	**40,00%**	**15,21%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	1,071,732,150	100	157,026,275	100	46,681,700	25	0	26	15,387,100					51	15,387,100	151	172,413,375	**30,20%**	**16,09%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	67.073.600	50,00	37.158.220	100	25.000.000	0%%	0	0%%	24,446,250					0,00%	24,446,250	70,00%	61.604.470	**70,00%**	**91,85%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	67,073,600	5	37,158,220	5	25,000,000	0	0	2	24,446,250					2	24,446,250	7	61,604,470	**70,00%**	**91,85%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)	100	1.384.933.288	20,00	164.664.000	100	33.468.688	0%	0	0%	10,367,100					0,00%	10,367,100	45,00%	175.031.100	**45,00%**	**12,64%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	15,259,600	0	0	1	33,468,688	0	0	1	10,367,100					1	10,367,100	1	10,367,100	**50,00%**	**67,94%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1,369,673,688	2	164,664,000	0	0	0	0	0	0					0	0	2	164,664,000	**40,00%**	**12,02%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	100	158.059.059	20,91	61.232.270	100	49.825.750	0%%	0	0%%	16,163,000					0,00%	16,163,000	22,73%	77.395.270	**22,73%**	**48,97%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55	120,012,567	12	54,932,270	16	49,825,750	2	0	0	16,163,000					2	16,163,000	14	71,095,270	**25,45%**	**59,24%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Tercapai
		5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	38,046,492	8	6,300,000	0	0	0	0	0	0					0	0	8	6,300,000	**20,00%**	**16,56%**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Terlaksana
								Total Target (RP)		**3,754,719,901**							**Total Realisasi (RP)**			**1,332,781,689**					
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		**29,85**	**35,50**				
																			Predikat kinerja		**SR**	**SR**				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																										

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**2.637.856.906,00**	**2.943.224.645,64**	**3.754.719.901,00**	**1.116.862.995,00**							**3.504.683.378,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.637.856.906,00**	**2.943.224.645,64**	**3.754.719.901,00**	**1.116.862.995,00**							**3.504.683.378,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**2.637.856.906,00**	**2.943.224.645,64**	**3.754.719.901,00**	**1.116.862.995,00**							**3.504.683.378,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**1.230.769.374,00**	**1.395.078.768,64**	**2.002.623.450,00**	**816.826.472,00**							**2.047.595.846,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran*				100 %	100 %	38.804.125,00	34.601.339,00	46.601.339,00	7.797.214,00			-	- -	-		38.804.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.087.179,00	24.394.563,00	36.394.563,00	25.307.384,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.087.179,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.542.589,00	5.103.388,00	5.103.388,00	-439.201,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.542.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.543.589,00	5.103.388,00	5.103.388,00	-440.201,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.543.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.087.179,00	0,00	0,00	-11.087.179,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.087.179,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.543.589,00	0,00	0,00	-5.543.589,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.543.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*				100 %	100 %	115.677.608,00	1.170.163.338,64	1.759.578.020,00	1.643.900.412,00			-	- -	PNS BKPSDM		1.060.242.305,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	55.435.303,00	1.146.714.775,64	1.726.967.457,00	1.671.532.154,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.087.179,00	23.448.563,00	32.610.563,00	21.523.384,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.087.179,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.087.179,00	0,00	0,00	-11.087.179,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.087.179,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.087.179,00	0,00	0,00	-11.087.179,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.087.179,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.630.768,00	0,00	0,00	-16.630.768,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.630.768,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar*				100 %	100 %	11.087.178,00	7.536.953,00	13.782.953,00	2.695.775,00			-	- -	-		11.087.178,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.543.589,00	0,00	0,00	-5.543.589,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.543.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.543.589,00	7.536.953,00	13.782.953,00	8.239.364,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.543.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai PD yang dilayani*				100 %	100 %	214.393.966,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-204.393.966,00			-	- -	-		214.393.966,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	32.085.000,00	0,00	0,00	-32.085.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.085.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.543.589,00	0,00	0,00	-5.543.589,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.543.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.543.589,00	0,00	0,00	-5.543.589,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.543.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				83 Orang	83 Orang	110.871.788,00	0,00	0,00	-110.871.788,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.871.788,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*				100 %	100 %	278.736.394,00	82.482.700,00	64.366.700,00	-214.369.694,00			-	- -	-		278.736.394,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.065.640,00	0,00	0,00	-21.065.640,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.065.640,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.420.000,00	0,00	0,00	-12.420.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.420.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.420.000,00	0,00	0,00	-12.420.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.420.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.087.179,00	17.685.000,00	17.685.000,00	6.597.821,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.087.179,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	221.743.575,00	64.797.700,00	46.681.700,00	-175.061.875,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			221.743.575,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi*				100 %	100 %	119.977.200,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-94.977.200,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	51.750.000,00	0,00	0,00	-51.750.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	34.113.600,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-9.113.600,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	34.113.600,00	0,00	0,00	-34.113.600,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia*				100 %	100 %	291.149.314,00	15.468.688,00	33.468.688,00	-257.680.626,00			-	- -	-		283.388.289,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.761.025,00	15.468.688,00	33.468.688,00	25.707.663,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	283.388.289,00	0,00	0,00	-283.388.289,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			283.388.289,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*				100 %	100 %	160.943.589,00	49.825.750,00	49.825.750,00	-111.117.839,00			-	- -	-		160.943.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	24.830.846,00	49.825.750,00	49.825.750,00	24.994.904,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.830.846,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	24.830.846,00	0,00	0,00	-24.830.846,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.830.846,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	7.781.897,00	0,00	0,00	-7.781.897,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.781.897,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	51.750.000,00	0,00	0,00	-51.750.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			51.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	51.750.000,00	0,00	0,00	-51.750.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			51.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Jabatan fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)** **Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan**				**65,17 95,56 % %**	**65,17 95,56 % %**	**1.407.087.532,00**	**1.548.145.877,00**	**1.752.096.451,00**	**50.000.000,00**							**1.457.087.532,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase keterpenuhan ASN Mamuju Tengah*				62,32 %	62,32 %	366.960.092,00	212.502.761,00	206.067.817,00	-160.892.275,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Mamuju Tengah		416.960.092,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	27.717.947,00	0,00	0,00	-27.717.947,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			27.717.947,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	27.717.946,00	25.369.195,00	26.736.195,00	-981.751,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			27.717.946,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				200 Dokumen	200 Dokumen	85.153.841,00	159.223.086,00	146.129.142,00	60.975.301,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			85.153.841,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	13.858.973,00	0,00	0,00	-13.858.973,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			13.858.973,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	13.858.973,00	0,00	0,00	-13.858.973,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			13.858.973,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				35 Dokumen	35 Dokumen	27.717.947,00	27.910.480,00	33.202.480,00	5.484.533,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			27.717.947,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	26.780.625,00	0,00	0,00	-26.780.625,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			26.780.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	52.664.099,00	0,00	0,00	-52.664.099,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			52.664.099,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1800 Dokumen	1800 Dokumen	13.858.973,00	0,00	0,00	-13.858.973,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			13.858.973,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	16.630.768,00	0,00	0,00	-16.630.768,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			16.630.768,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi*				100 %	100 %	85.683.371,00	236.642.561,00	529.625.033,00	443.941.662,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Mamuju Tengah		85.683.371,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				50 Dokumen	50 Dokumen	33.261.536,00	15.021.192,00	15.513.192,00	-17.748.344,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			33.261.536,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				200 Dokumen	200 Dokumen	30.247.477,00	60.828.901,00	46.587.901,00	16.340.424,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.247.477,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	22.174.358,00	160.792.468,00	467.523.940,00	445.349.582,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			22.174.358,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah*				100 %	100 %	665.116.256,00	969.408.599,00	960.754.599,00	295.638.343,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Mamuju Tengah		665.116.256,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				40 Orang	40 Orang	56.250.000,00	236.083.108,00	227.635.108,00	171.385.108,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			56.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				35 Dokumen	35 Dokumen	56.250.000,00	0,00	0,00	-56.250.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			56.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				75 Dokumen	75 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	426.898.215,00	425.954.215,00	125.954.215,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				3 Dokumen	3 Dokumen	36.269.376,00	306.427.276,00	307.165.276,00	270.895.900,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			36.269.376,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				40 Orang	40 Orang	36.269.376,00	0,00	0,00	-36.269.376,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			36.269.376,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				2 Dokumen	2 Dokumen	36.269.376,00	0,00	0,00	-36.269.376,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			36.269.376,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				30 Orang	30 Orang	36.269.376,00	0,00	0,00	-36.269.376,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			36.269.376,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				45 Orang	45 Orang	36.269.376,00	0,00	0,00	-36.269.376,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			36.269.376,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				4 Laporan	4 Laporan	36.269.376,00	0,00	0,00	-36.269.376,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			36.269.376,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik*				100 %	100 %	289.327.813,00	129.591.956,00	55.649.002,00	-233.678.811,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Mamuju Tengah		289.327.813,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	21.152.750,00	0,00	0,00	-21.152.750,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			21.152.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	17.417.003,00	20.019.136,00	13.311.136,00	-4.105.867,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			17.417.003,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	20 Orang	22.193.940,00	25.233.197,00	21.398.197,00	-795.743,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			22.193.940,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				3 Orang	3 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				0 Orang	0 Orang	91.113.650,00	34.339.669,00	20.939.669,00	-70.173.981,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			91.113.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	42.450.470,00	0,00	0,00	-42.450.470,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			42.450.470,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	49.999.954,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**2.637.856.906,00**	**2.943.224.645,64**	**3.754.719.901,00**	**-32.319.565.638,02**							**3.504.683.378,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi Aparatur Sipil Negara BKPSDM sebagai penyelenggara layanan urusan bidang administrasi kepegawaian dalam ruang lingkup sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing.

Sebagaimana dokumen ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 juga diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas perangkat daerah melalui koordinasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian, tetapi juga menjadi upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja aparatur serta kemajuan pembangunan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan khusunya pada urusan bidang layanan administrasi kepgawaian.

Tobadak, Oktober 2025
Kepala BKPSDM,

Drs. H. Bambang Suparni, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199504 1 00

RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

Alamat : Jln. Poros Mamuju-Palu (Samping Toko Bangunan Fajar Harapan), Dusun Tallungallo, Desa Tobadak, Mamuju Tengah, Kode Pos 91563

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 yang merupakan penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan strategis, kebijakan dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana di Kab Mamuju Tengah. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada Renstra, RKPD, RPJM Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan di BPBD Kab Mamuju Tengah yang telah menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025. Harapan kami dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik untuk menghadapi dan mencari solusi atas permaslahan kebencanaan di Mamuju Tengah sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Mamuju Tengah.

Tobadak, 12 September 2025

Kepala Pelaksana BPBD

Drs. Sigit Dwi Hastono

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19660913 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 10

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17

BAB IV PENUTUP 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian RENJA

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mamuju Tengah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

b. Proses Penyusunan Renja

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

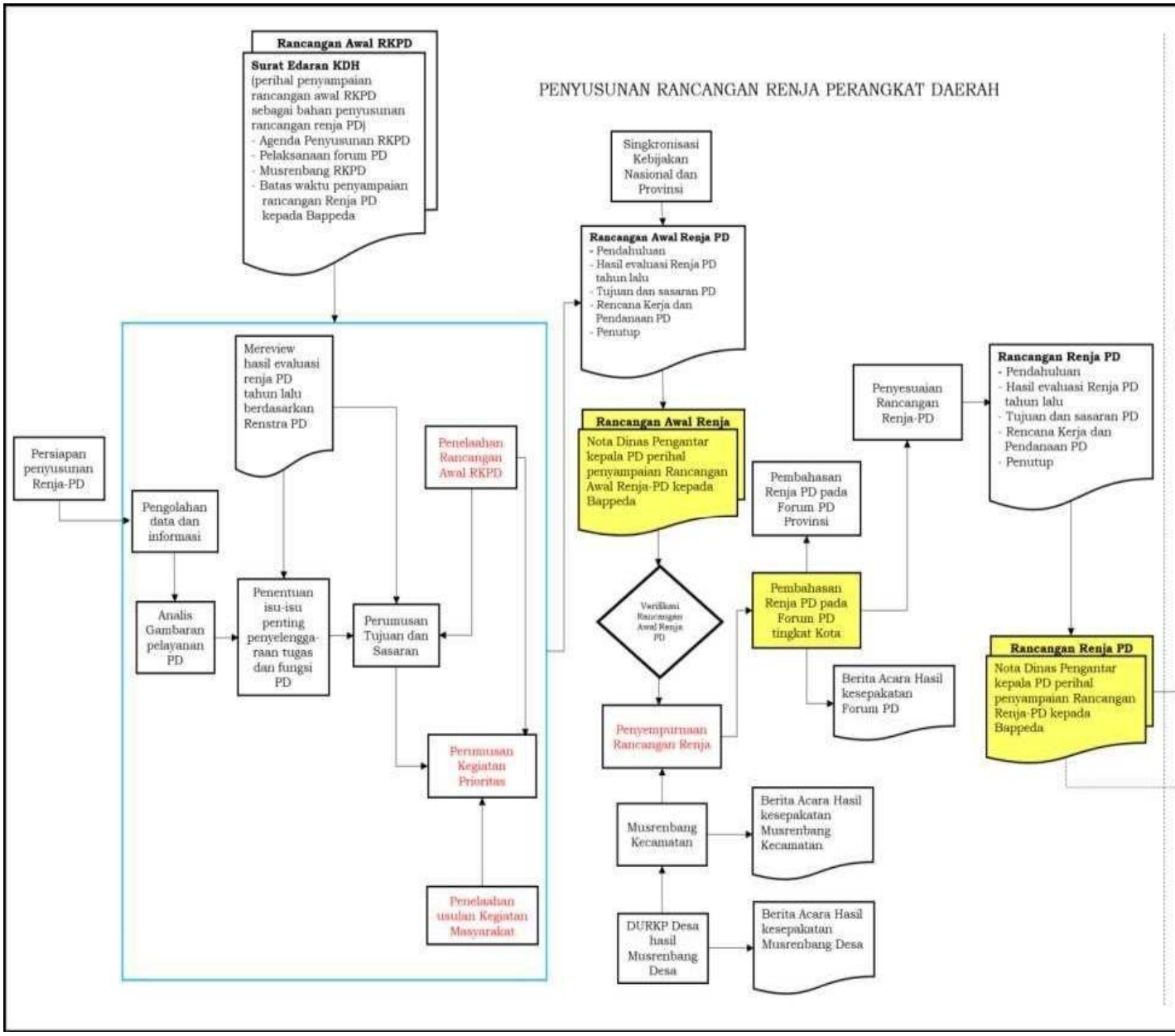
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategik nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini :


PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja PD)
- Agenda Penyusunan RKPD
- Pelaksanaan forum PD
- Musrenbang RKPD
- Batas waktu penyampaian rancangan Renja PD kepada Bappeda
Singkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Awal Renja PD
- Pendahuluan
- Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
- Tujuan dan sasaran PD
- Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Penutup
Mereview hasil evaluasi renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Persiapan penyusunan Renja-PD
Pengolahan data dan informasi
Analis Gambaran pelayanan PD
Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Perumusan Kegiatan Prioritas
Penelaahan usulan Kegiatan Masyarakat
Rancangan Awal Renja
Nota Dinas Pengantar kepala PD perihal penyampaian Rancangan Awal Renja-PD kepada Bappeda
Verifikasi Rancangan Awal Renja PD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan
DURKP Desa hasil Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja PD pada Forum PD Provinsi
Pembahasan Renja PD pada Forum PD tingkat Kota
Berita Acara Hasil kesepakatan Forum PD
Penyesuaian Rancangan Renja-PD
Rancangan Renja PD
- Pendahuluan
- Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
- Tujuan dan sasaran PD
- Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Penutup
Rancangan Renja PD
Nota Dinas Pengantar kepala PD perihal penyampaian Rancangan Renja-PD kepada Bappeda

d. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

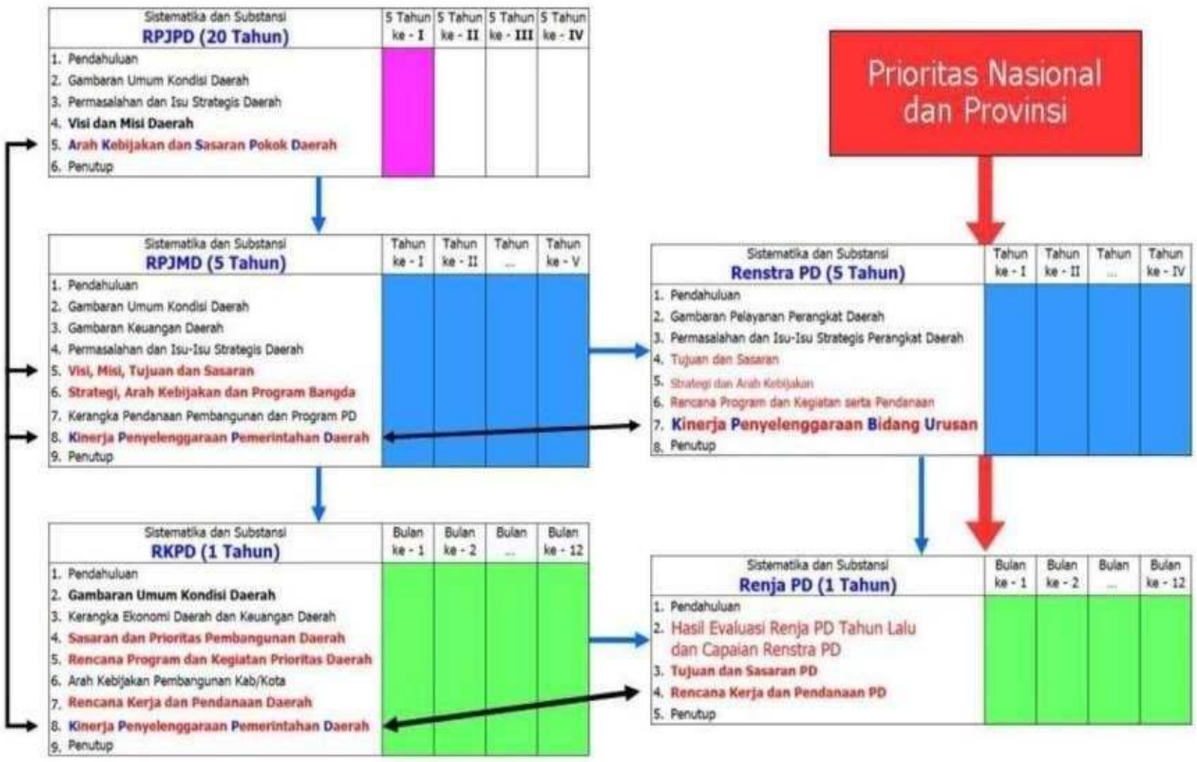
Keterkaitan Renja OPD dengan Renja Provinsi dilakukan secara integrative dengan dokumen - dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Banjar.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

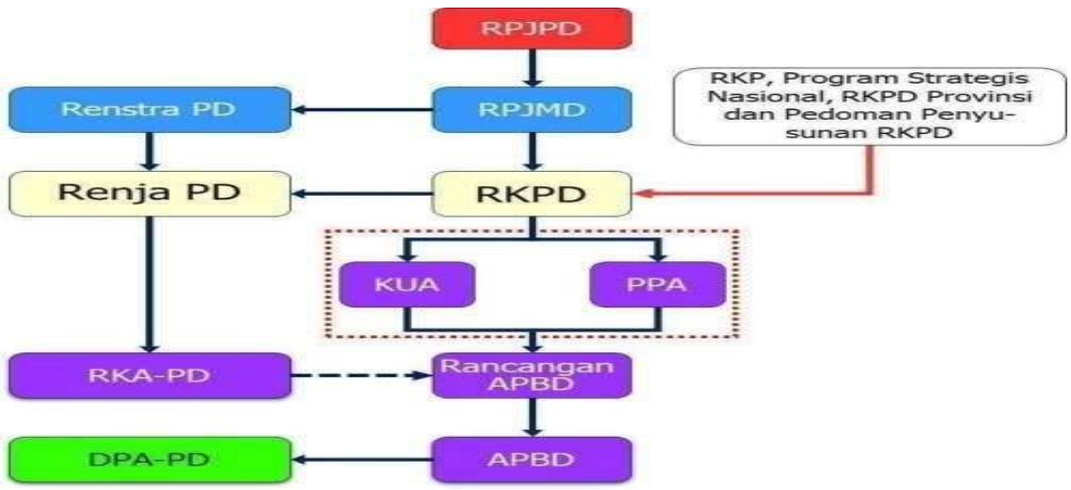
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA PPAS, dan RAPBD.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian Lembaga dan Renja Kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut :



e. Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025;
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2026;
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Barat;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
37. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 BPBD Kab Mamuju Tengah adalah :

1. Pedoman bagi BPBD Kab Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam RPJMD 2021 – 2026;
2. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, dan evaluasi di BPBD Kab Mamuju Tengah.

Adapun tujuan dari penuyusunan Renja BPBD Kab Mamuju Tengah adalah :

1. Sebagai landasan operasional BPBD Kab Mamuju Tengah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Sebagai pedoman untuk melakukan monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan Ii

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD s/d triwulan II, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Daerah, paling sedikit mencakup urusan/ program/ kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana kerja dan pendanaan Daerah.

Bab IV : Penutup

Pada bagian ini dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan TRIWULAN II dapat disajikan dalam table berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d TRIWULAN II

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Daerah sampai s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja perangkat daerah Tahun 2025 yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2025)		Realisasi kinerja dan Anggaran renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
1	**Meningkatnya Tata Kelola pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	**Persentase urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)**	**100%**	**12.811.309.845**	**100%**	**6.521.451.838**	**100%**	**1.778.357.958**	**33,52%**	**539.973.651**	**34,65%**	**316.398.583**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**68,17%**	**856.372.234**	**68,17%**	**7.377.824.072**	**68,17%**	**57,59%**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)**	**100%**	**368.000.000**	**100%**	**202.020.985**	**100%**	**20.314.550**	**0,00%**	**-**	**22,22%**	**8.310.500**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**22,22%**	**8.310.500**	**22,22%**	**210.331.485**	**22,22%**	**57,16%**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,00	213.000.000	7,00	113.668.348	3,00	18.407.664			1,00	7.907.000					1,00	7.907.000	8,00	121.575.348	61,54%	57,08%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	19.000.000	2,00	4.584.984	1,00	404.041									0,00	-	2,00	4.584.984	50,00%	24,13%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,00	19.000.000	2,00	2.094.000	1,00	366.268									0,00	-	2,00	2.094.000	50,00%	11,02%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6,00	73.000.000	4,00	58.021.214	1,00	404.041			1,00	403.500					1,00	403.500	5,00	58.424.714	83,33%	80,03%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4,00	19.000.000	2,00	2.064.000	1,00	366.268									0,00	-	2,00	2.064.000	50,00%	10,86%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	25.000.000	7,00	21.588.439	2,00	366.268									0,00	-	7,00	21.588.439	58,33%	86,35%	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**22,22%**	**40,91%**	**60,47%**	**57,16%**	**58,87%**	**44,91%**	
			Predikat kinerja															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**Rendah**	**Rendah**	**sangat rendah**	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan PD yang tepat waktu**	**100%**	**7.376.969.237**	**100%**	**3.926.094.781**	**100%**	**1.485.804.144**	**30,05%**	**401.563.120**	**18,72%**	**256.450.378**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**48,77%**	**658.013.498**	**48,77%**	**4.584.108.279**	**48,77%**	**62,14%**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480,00	7.201.969.237	44,00	3.823.291.762	198,00	1.454.068.752	60,00	398.563.120	36,00	245.219.378					96,00	643.782.498	140,00	4.467.074.260	29,17%	62,03%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,00	25.500.000	4,00	18.629.323	1,00	366.268			1,00	366.000					1,00	366.000	5,00	18.995.323	83,33%	74,49%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Daerah sampai s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja perangkat daerah Tahun 2025 yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2025)		Realisasi kinerja dan Anggaran renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22,00	149.500.000	14,00	84.173.696	4,00	31.369.124	1,00	3.000.000	1,00	10.865.000					2,00	13.865.000	16,00	98.038.696	72,73%	65,58%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**48,77%**	**44,29%**	**31,69%**	**62,14%**	**61,74%**	**67,36%**	
Predikat kinerja (nilai)																		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**Rendah**	**sedang**	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah pada PD yang tepat waktu**	**100%**	**159.000.000**	**100%**	**84.974.333**	**100%**	**15.386.268**	**0,00%**	**3.000.000**	**50,00%**	**2.750.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**50,00%**	**5.750.000**	**50,00%**	**90.724.333**	**50,00%**	**57,06%**	
		Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8,00	159.000.000	4,00	84.974.333	2,00	15.386.268		3.000.000	1,00	2.750.000					1,00	5.750.000	5,00	90.724.333	62,50%	57,06%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**50,00%**	**37,37%**	**62,50%**	**57,06%**	**62,50%**	**57,06%**	
Predikat kinerja (nilai)																		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**Rendah**	**Rendah**	**rendah**	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani**	**100%**	**364.000.000**	**100%**	**24.000.000**	**100%**	**7.110.000**	**100,00%**	**7.100.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**7.100.000**	**100,00%**	**31.100.000**	**100,00%**	**8,54%**	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	320.000.000	1,00	5.000.000											0,00	-	1,00	5.000.000	20,00%	1,56%	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20,00	44.000.000	4,00	19.000.000	1,00	7.110.000	1,00	7.100.000							1,00	7.100.000	5,00	26.100.000	25,00%	59,32%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**100,00%**	**99,86%**	**24,00%**	**8,54%**	**22,50%**	**30,44%**	
Predikat kinerja (nilai)																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**sangat rendah**	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD yang tepat waktu**	**100%**	**1.661.900.000**	**100%**	**893.829.421**	**100%**	**44.157.205**	**28,13%**	**13.664.600**	**31,25%**	**19.170.205**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**59,38%**	**32.834.805**	**59,38%**	**926.664.226**	**59,38%**	**55,76%**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	64.000.000			1,00	1.795.000		500.000							0,00	500.000	0,00	500.000	0,00%	0,78%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	253.400.000	4,00	115.872.095	1,00	3.945.505			1,00	3.935.505					1,00	3.935.505	5,00	119.807.600	83,33%	47,28%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6,00	27.000.000	2,00	7.360.411	1,00	2.208.000				1.678.000					0,00	1.678.000	2,00	9.038.411	33,33%	33,48%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6,00	65.500.000	4,00	28.747.500	1,00	560.000									0,00	-	4,00	28.747.500	66,67%	43,89%	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,00	85.000.000	6,00	51.200.000	3,00	9.370.000	1,00	1.801.000		1.542.000					1,00	3.343.000	7,00	54.543.000	43,75%	64,17%	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130,00	1.167.000.000	56,00	690.649.415	25,00	26.278.700	8,00	11.363.600	9,00	12.014.700					17,00	23.378.300	73,00	714.027.715	56,15%	61,18%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**59,38%**	**74,36%**	**54,17%**	**55,76%**	**47,21%**	**41,80%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Daerah sampai s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja perangkat daerah Tahun 2025 yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2025)		Realisasi kinerja dan Anggaran renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
Predikat kinerja																		**Rendah**	**Sedang**	**Rendah**	**Rendah**	**Sangat Rendah**	**sangat rendah**	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan PD yang diadakan tepat waktu**	**100%**	**1.208.824.000**	**100%**	**516.301.799**	**100%**	**109.324.431**	**100,00%**	**109.304.431**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**109.304.431**	**100,00%**	**625.606.230**	**100,00%**	**51,75%**	
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4,00	325.000.000	1,00	35.392.049											0,00	-	1,00	35.392.049	25,00%	10,89%	
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15,00	883.824.000	6,00	480.909.750	2,00	109.324.431	2,00	109.304.431							2,00	109.304.431	8,00	590.214.181	53,33%	66,78%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**100,00%**	**99,98%**	**47,37%**	**51,75%**	**39,17%**	**38,83%**	***Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah***
Predikat kinerja																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**Sangat Rendah**	**sangat rendah**	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan PD yang disediakan tepat waktu**	**100%**	**710.526.608**	**100%**	**347.013.629**	**100%**	**53.641.500**	**0,00%**	**1.117.500**	**125,00%**	**17.800.500**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**125,00%**	**18.918.000**	**125,00%**	**365.931.629**	**125,00%**	**51,50%**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,00	109.500.000	4,00	52.224.057	1,00	6.000.000			2,00	2.500.000					2,00	2.500.000	6,00	54.724.057	100,00%	49,98%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8,00	387.754.608	6,00	146.399.572	2,00	26.041.500		1.117.500	1,00	6.300.500					1,00	7.418.000	7,00	153.817.572	87,50%	39,67%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6,00	213.272.000	4,00	148.390.000	1,00	21.600.000			2,00	9.000.000					2,00	9.000.000	6,00	157.390.000	100,00%	73,80%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**125,00%**	**35,27%**	**95,00%**	**51,50%**	**95,83%**	**54,48%**	
Predikat kinerja																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**	**Rendah**	**Sangat Tinggi**	**rendah**	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan PD yang dipelihara sesuai standar**	**100%**	**962.090.000**	**100%**	**527.216.890**	**100%**	**42.619.860**	**10,00%**	**4.224.000**	**30,00%**	**11.917.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**40,00%**	**16.141.000**	**40,00%**	**543.357.890**	**40,00%**	**56,48%**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00	317.400.000	4,00	182.781.074	1,00	19.596.040		2.939.000		6.255.000					0,00	9.194.000	4,00	191.975.074	66,67%	60,48%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00	610.000.000	20,00	325.820.816	5,00	21.623.820	1,00	1.285.000	2,00	5.062.000					3,00	6.347.000	23,00	332.167.816	69,70%	54,45%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24,00	34.690.000	16,00	18.615.000	4,00	1.400.000			1,00	600.000					1,00	600.000	17,00	19.215.000	70,83%	55,39%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**40,00%**	**37,87%**	**69,84%**	**56,48%**	**69,07%**	**56,78%**	
Predikat kinerja																		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sedang**	**Rendah**	**Sedang**	**rendah**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Daerah sampai s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja perangkat daerah Tahun 2025 yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2025)		Realisasi kinerja dan Anggaran renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
2.	**Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar**	**100%**	**13.112.718.507**	**76%**	**4.844.882.672**	**100%**	**2.649.207.489**	**1,79%**	**352.562.500**	**49,63%**	**487.060.458**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**51,41%**	**839.622.958**	**51,41%**	**5.684.505.630**	**51,41%**	**43,35%**	
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100%**	**804.000.000**	**100%**	**248.203.853**	**100%**	**298.721.857**	**0,00%**	**137.812.500**	**100,00%**	**160.903.500**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**298.716.000**	**100,00%**	**546.919.853**	**100,00%**	**68,02%**	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	600,00	554.000.000	350,00	248.203.853	50,00	23.096.857			50,00	23.091.000					50,00	23.091.000	400,00	271.294.853	66,67%	48,97%	
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1,00	250.000.000			1,00	275.625.000		137.812.500	1,00	137.812.500					1,00	275.625.000	1,00	275.625.000	100,00%	110,25%	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100,00%**	**100,00%**	**66,72%**	**68,02%**	**83,33%**	**79,61%**	
			Predikat kinerja (nilai)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sedang**	**Sedang**	**Tinggi**	**tinggi**	
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100%**	**4.724.965.000**	**100%**	**792.810.291**	**100%**	**117.918.536**	**0,00%**	**4.500.000**	**87,50%**	**7.486.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**87,50%**	**11.986.000**	**87,50%**	**804.796.291**	**87,50%**	**17,03%**	
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	4,00	100.000.000			1,00	15.103.000									0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	45,00	250.000.000			21,00	4.486.268			21,00	4.486.000					21,00	4.486.000	21,00	4.486.000	46,67%	1,79%	
		Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300,00	500.000.000	100,00	11.650.000											0,00	-	100,00	11.650.000	33,33%	2,33%	
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4,00	660.000.000	2,00	75.819.009											0,00	-	2,00	75.819.009	50,00%	11,49%	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50,00	258.505.000	20,00	91.457.684											0,00	-	20,00	91.457.684	40,00%	35,38%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Daerah sampai s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja perangkat daerah Tahun 2025 yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2025)		Realisasi kinerja dan Anggaran renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4,00	480.000.000	1,00	69.699.666	1,00	55.000.000									0,00	-	1,00	69.699.666	25,00%	14,52%	
		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5,00	1.774.560.000	2,00	274.565.880	1,00	43.329.268		4.500.000		3.000.000					0,00	7.500.000	2,00	282.065.880	40,00%	15,89%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1,00	166.000.000	1,00	156.886.870											0,00	-	1,00	156.886.870	100,00%	94,51%	
		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4,00	535.900.000	2,00	112.731.182											0,00	-	2,00	112.731.182	50,00%	21,04%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**87,50%**	**10,16%**	**35,73%**	**17,03%**	**42,78%**	**21,88%**	
Predikat kinerja																		**Tinggi**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**sangat rendah**	
		Kegiatan Pelayanan Penyelamanatan dan Evakuasi Korban	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**5.421.903.507**	**100%**	**3.415.834.913**	**100%**	**834.036.890**	**7,14%**	**205.750.000**	**4,76%**	**143.366.800**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**11,90%**	**349.116.800**	**11,90%**	**3.764.951.713**	**11,90%**	**69,44%**	
		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6,00	4.744.903.507	4,00	3.082.820.138	4,00	767.946.272	1,00	191.250.000	1,00	127.500.000					2,00	318.750.000	6,00	3.401.570.138	100,00%	71,69%	
		Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	305,00	380.000.000	205,00	155.507.672	50,00	29.280.000	5,00	10.000.000	3,00	5.068.000					8,00	15.068.000	213,00	170.575.672	69,84%	44,89%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yangMendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	100.000.000			30,00	36.810.618		4.500.000		10.798.800					0,00	15.298.800	0,00	15.298.800	0,00%	15,30%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Daerah sampai s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja perangkat daerah Tahun 2025 yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun (2025)		Realisasi kinerja dan Anggaran renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
		Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	6,00	197.000.000	4,00	177.507.103											0,00	-	4,00	177.507.103	66,67%	90,11%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**11,90%**	**41,86%**	**53,48%**	**69,44%**	**59,13%**	**55,50%**	
Predikat kinerja (nilai)																		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**Sedang**	**Rendah**	**rendah**	
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina**	**100%**	**2.161.850.000**	**100%**	**388.033.615**	**100%**	**1.398.530.206**	**0,00%**	**4.500.000**	**6,25%**	**175.304.158**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**6,25%**	**179.804.158**	**6,25%**	**567.837.773**	**6,25%**	**26,27%**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1,00	110.000.000	1,00	108.930.982											0,00	-	1,00	108.930.982	100,00%	99,03%	
		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	4,00	165.000.000	1,00	11.064.181											0,00	-	1,00	11.064.181	25,00%	6,71%	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	200,00	100.000.000			25,00	25.231.855									0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	6,00	1.786.850.000	4,00	268.038.452	7,00	1.373.298.351		4.500.000	2,00	175.304.158					2,00	179.804.158	6,00	447.842.610	100,00%	25,06%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**6,25%**	**12,86%**	**3,79%**	**26,27%**	**56,25%**	**32,70%**	
Predikat kinerja (nilai)																		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**sangat rendah**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**4.427.565.447**											**1.695.995.192**					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		**62,59%**	**52,90%**	**50,40%**	**48,43%**	**58,20%**	**48,45%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		**Rendah**	**Rendah**	**Rendah**	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**sangat rendah**	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**: Pengkoordinasian, Pengkomandoan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah**
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**: Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor**
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya*)	**: Meningkatkan pengadministrasian dokumen terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sub kegiatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal**
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Renja PD Kabupaten*)	**: Melakukan penelaahan terhadap indikator dan target kinerja untuk proses perencanaan periode selanjutnya**

BAB III
RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program BPBD Kab Mamuju Tengah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan program untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan BPBD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Indicator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menetukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program, sebagai bahan pengendalian dan evalasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kineja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan triwulan II yang telah diuraikan pada Bab II, maka disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KAB. MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (7-9)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**2.504.320.526,00**	**1.873.230.184,00**	**4.427.565.128,00**	**1.923.244.602,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.504.320.526,00**	**1.873.230.184,00**	**4.427.565.128,00**	**1.923.244.602,00**
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**2.504.320.526,00**	**1.873.230.184,00**	**4.427.565.128,00**	**1.923.244.602,00**
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**1.349.320.526,00**	**1.373.396.559,00**	**1.793.942.639,00**	**1.252.379.474,00**
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu*	100 %	100 %	30.000.000,00	25.212.148,00	24.004.550,00	-5.995.450,00
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	21.453.550,00	20.252.664,00	5.252.664,00
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	770.309,00	404.041,00	-2.595.959,00
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	765.135,00	366.268,00	-2.633.732,00
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	770.309,00	404.041,00	-2.595.959,00
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	765.135,00	366.268,00	-2.633.732,00
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	687.710,00	2.211.268,00	-788.732,00
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu*	100 %	100 %	743.000.000,00	1.067.684.882,00	1.493.050.075,00	750.050.075,00
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	700.000.000,00	1.047.064.927,00	1.454.068.752,00	754.068.752,00
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	11 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	720.309,00	1.761.268,00	-1.238.732,00
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	19.899.646,00	37.220.055,00	2.220.055,00
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tepat Waktu*	100 %	100 %	25.000.000,00	3.755.483,00	15.386.268,00	-9.613.732,00
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	3.755.483,00	15.386.268,00	-4.613.732,00
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (7-9)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Pengawai yang terlayani*	100 %	100 %	25.000.000,00	12.500.000,00	7.110.000,00	-17.890.000,00
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	12.500.000,00	7.110.000,00	2.110.000,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum PD yang Tepat Waktu*	100 %	100 %	160.000.000,00	70.658.255,00	44.157.205,00	-115.842.795,00
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0,00	2.690.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	3.945.505,00	3.945.505,00	-11.054.495,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.002.000,00	2.208.000,00	-2.792.000,00
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.100.000,00	560.000,00	-4.440.000,00
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	9.400.000,00	9.370.000,00	-5.630.000,00
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	120.000.000,00	50.520.750,00	26.278.700,00	-93.721.300,00
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu*	100 %	100 %	160.000.000,00	109.324.431,00	109.324.431,00	-50.675.569,00
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	109.324.431,00	109.324.431,00	-10.675.569,00
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan PD yang diadakan tepat waktu*	100 %	100 %	91.000.000,00	41.641.500,00	54.653.000,00	-36.347.000,00
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (7-9)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	26.041.500,00	27.053.000,00	-12.947.000,00
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	15.600.000,00	21.600.000,00	-23.400.000,00
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dipelihara sesuai standar*	100 %	100 %	115.320.526,00	42.619.860,00	46.257.110,00	-69.063.416,00
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	52.000.000,00	19.596.040,00	24.596.540,00	-27.403.460,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	21.623.820,00	20.260.570,00	-39.739.430,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	3.320.526,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.920.526,00
2,	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Desa Tangguh Bencana**	**100 %**	**100 %**	**1.155.000.000,00**	**499.833.625,00**	**2.633.622.489,00**	**1.915.000.000,00**
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*	100 %	100 %	170.000.000,00	299.741.090,00	298.721.857,00	128.721.857,00
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	50 Orang	50.000.000,00	24.116.090,00	23.096.857,00	-26.903.143,00
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	275.625.000,00	275.625.000,00	155.625.000,00
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	100 %	100 %	425.000.000,00	106.786.036,00	117.918.536,00	-307.081.464,00
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	15.103.000,00	15.103.000,00
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	4.640.268,00	4.486.268,00	-20.513.732,00
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	11.118.000,00	0,00	-40.000.000,00
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	20 Keluarga	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	49 Orang	49 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-20.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (7-9)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana							
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan	40.000.000,00	36.027.768,00	43.329.268,00	3.329.268,00
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	100 %	100 %	395.000.000,00	48.028.293,00	822.951.890,00	427.951.890,00
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas							
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	6.099.407,00	765.636.272,00	565.636.272,00
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	8.000.000,00	29.280.000,00	-720.000,00
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota							
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	15 Orang	20.000.000,00	33.928.886,00	28.035.618,00	8.035.618,00
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit							
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase daerah rawan bencana yang dibina*	78,57 %	78,57 %	165.000.000,00	45.278.206,00	1.394.030.206,00	1.229.030.206,00
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (7-9)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0 Orang	20 Orang	0,00	25.231.855,00	25.231.855,00	25.231.855,00
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga	2 Lembaga	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota							
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota							
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	20.046.351,00	1.368.798.351,00	1.328.798.351,00
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	J U M L A H					**2.504.320.526,00**	**1.873.230.184,00**	**4.427.565.128,00**	**-32.319.565.638,02**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan. Sebagai sebuah dokumen rencana, setiap tahapan telah diusahakan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini. Namun jika terdapat situasi- situasi yang masih belum diperhitungkan atau berpengaruh pada perjalanan dokumen ini maka dokumen rencana ini dapat ditinjau kembali untuk perbaikan dan penyesuaian kondisi.

Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terkait kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berpengaruh terhadap strategi dan pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten. Dokumen Renja BPBD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) dan angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Mamuju Tengah yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana. Salam tangguh dan salam kemanusiaan.

Tobadak, 12 September 2025

Kepala Pelaksana BPBD

Drs. Sigit Dwi Hastono

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19660913 199103 1 010

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BPKPAD KAB. MAMUJU TENGAH

Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jln. Tammauni Pue Ballung Kompleks KTM Benteng Kayu Mangiwang Tobadak, KodePos 91563
Website : https://keuangan.mamujutengahkab.go.id/ *Email* : bakeumateng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 900/509/VIII/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renacana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa perangkat Daerah Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) wajib Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan perubahannya sebagai pedoman pelaksanaan kgiatan Tahun 2025
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomorr 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan perubahan pagu anggaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta sebagai acuan dalam penentuan ketercapaian target kinerja sesusi dengan tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 11 Agustus 2025

KEPALA BADAN,

IMANSYAH, S.Kom., MM
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 198001012009011025

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak;
2. Bappeda Litbang.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wata'ala karena atas karunia dan RahmatNyalah, sehingga Rencana Kerja Perubahan BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 bisa diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan ini kami susun dalam bentuk dokumen, dimana penyusunannya merujuk pada Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dan menyelaraskannya dengan Visi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*".

Rencana Kerja Perubahan BPKPAD merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan di BPKPAD Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja termasuk BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam pencapaian sasaran dan program Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja BPKPAD ini masih jauh dari sempurna, maka dalam proses perumusan dan penyusunannya menjadi dokumen Rencana Kerja akan melibatkan setiap unit kerja atau bidang yang ada di Lingkungan BPKPAD dan seluruh stake holder terkait.

Oleh karenanya, kami mengharapkan semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan, baik berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyelesaian dokumen Rencana Kerja.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, besar harapan kami untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan BPKPAD sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BPKPAD TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja BPKPAD

Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKPAD 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Badan Keuangan 20

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra PD

Tahun 2025..... 22

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BPKPAD 33

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH..... 36

BAB V : PENUTUP..... 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 10

Tabel 2.2. Penetapan Indikator.....19

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024..... 24

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelaolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Tahun 2025 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya yang dikelola oleh BPKPAD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja dan juga Rencana Kerja Perubahan yang mana disusun untuk mendukung

secara langsung maupun tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sejalan dengan arahan RPJPD serta Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*" diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Mamuju Tengah secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
3. Mendorong daya saing perekonomian daerah;
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat;
6. Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjabarkan sasaran dan program yang ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahun 2025. Rencana kinerja disusun berdasarkan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan serta menjadi komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersankutan, indicator sasaran dan rencana capaian program, kegiatan serta indicator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya meliputi indikator input, output, outcome dan impact.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksankan oleh instansi pemerintah.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatn dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan tugs-tugas umum pemerintah dan pembangunan selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sasaran yang ditetapkan dan akan dicapai dalam tahun anggaran 2025 meliputi 4 Program, 15 Kegiatan dan 76 sub kegiatan sebagaimana yang tertuang di Rencana Kerja Perubahan 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Renja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2023;
15. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-2023 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.;
21. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah.

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan BPKPAD Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan BPKPAD Tahun 2025 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025;
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Mamuju Tengah;
4. Sebagai upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKPAD Mamuju Tengah;
5. Menegaskan tujuan, asasran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renja Perubhan BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, meliputi :

I. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKPAD

2.1. Evaluasi Kerja Pelaksanaan Rencana Kerja BPKPAD Tahun 2025 sampai triwulan II;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKPAD;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi BPKPAD Kab. Mamuju Tengah;

2.4. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. BAB III TUJUAN, DAN SASARAN BADAN KEUANGAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan Perubahan BPKPAD Tahun 2025

IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKPAD TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2025 dan Capaian Renstra BPKPAD

Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis BPKPAD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah selama Tahun 2022.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BADAN KEUANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
BPKPAD										
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	3	2	2	100	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	3	2	2	100	2	2	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	225	45	45	45	100	45	45	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	225	45	45	45	100	45	45	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	225	45	45	45	100	45	45	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	225	45	45	45	100	45	45	100
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	3	2	2	100	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	2	100	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20	100	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	-	-	-		-	-	

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	-	-	-		-	-	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	-	-	-		-	-	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan penetausahaan keuangan	750	-	100	100	100	-	-	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60	12	12	12	100	2	2	100
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5	1	1	1	100	-	-	100
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60	12	12	12	100	12	12	100
	Penatausahaan Pembiayan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayan Daerah	4	-				-	-	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	1	1	1	100	1	1	100
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Juamlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	175	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5	-	-	-		1	1	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5	-	-	-		-	-	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	225	100	1	1	100	45	43	100

		Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4	-	-	-		-		
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45	-	45	45	100	45	45	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	99	-	-	-		-	-	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	4	-	-	-		-	-	
	Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	12	-	3	3	100	3	3	100
	Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	225	45	45	45	100	45	45	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	2	2	100
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	-	-	-		-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	-	-	-		1	1	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	-	-	-		-	-	

	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4	-	-	-		-	-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	-	-	-		-	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45	-	-	-		-	-	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	1	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	4	-	-	-		-	-	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Produk Hukum yang didokumentasikan dan di Publikasikan								
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	-	-	-		5	5	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	-	-	-		1	1	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah									
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	45	-	-	-		45	45	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	20	4	4	4	100	4	4	100
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150	-	-	-		150	150	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	-	1	1	100	1	1	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	1	1	100
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	40	-	1	1	100	-	-	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	1	1	100
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	40	40	40	40	100	40	40	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	175	30	40	40	100	40	40	100

	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50	-	10	10	100	10	10	100
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60	60	60	45	100	60	60	100
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	-	4	4	100	4	4	100
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4	-	4	4	100	4	4	100
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	-	50	50	100	50	50	100
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	-	1	1	100	1	1	100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasl Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3	-	-			-	-	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10	10	10	10	100	10	10	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20	20	20	20	100	20	20	100
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5	-	-			-	-	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan yang disusun	1	-	1	1	100	1	1	100
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	5	5	5	5	100	70.000	70.000	100
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100	-	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	-	100	100	100	100	100	100

	Penilitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	-	-	-		1	1	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60	12	12	12	100	12	12	100
	Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	1	-	-	-		-	-	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	367.443	-	-	-		75.000	75.000	
	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	1	1	1	1	100	1	1	100
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	5	-	-	-		-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	4	4	100	4	4	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100			100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	25	25	25	100	100	100	100

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	-	-	-		-	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	-	-		-	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	1	5	1	1	100	5	5	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15	-	15	15	100	-	-	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15	-	-	-		-	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	-	3	3	100	-	-	100
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15	-	-	-		15	15	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	-	3	3	100	3	3	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	-		-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	25	25	25	100	-	-	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	-			100	-	-	100

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	25	25	25	100	1	1	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50	20	50	50	100	50	50	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	50	20	50	50	100	50	50	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	5	5	100	5	5	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	-	-	-		-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	-	-	-		50	50	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	20	20	100	20	20	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	-	-	-		-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	4	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	50	50	50	100	50	50	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	-	-	-		-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	-	200	200	100	200	200	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	-	-	-		-	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	2	-	-	-		2	2	
	Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	2	1	100	2	2	100

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	-	5	5	100	5	5	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10	10	10	100	10	10	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	20	20	100	20	20	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	100	-	-	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	20	20	20	100	1	1	100
	Pemeliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	20	12	12	100	12	12	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	-	12	12	100	12	12	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	-			100	1	1	100

Sumber : BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan cara mengkaji indkator kinerja yang akan dicapai oleh instansi. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input),* keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Sesuai analisis yang telah dilakukan, BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah memiliki sasaran yakni terwujudnya pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan.

Penetapan indikator kinerja tersebut diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan seperti pada tabel 2.2 berikut.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPKPAD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga	Jumlah Belanja Pegawai diluar guru dan Tenaga Kesehatan dibagi Jumlah APBD x 100%	21%	23%	25%	27%	26,07%	29,83%	29	28	
2	Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan pada APBD x 100%	5%	5%	5%	5%	6,43%	7,7%	8%	9%	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum	Jumlah Belanja Urusan Pemerintah – Transfer Expenditures dibagi Jumlah Belanja APBD x 100%	64%	63%	62%	61%	61,26%	61,28%	60%	58%	
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi dibagi total belanja APBD	10%	9%	8%	7%	6,65%	8,3%	4,8%	4,5%	
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi dibagi total PAD dalam APBD	10%	9%	8%	7%	12,5%	13,7%	4,8%	4,5%	
6	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	Nilai Realisasi Silpa dibagi Total Belanja Anggaran Tahun Sebelumnya x100%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	1,03%	6,56%	

Sumber: BPKPAD Kab. Mamuju Tengah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPAD

a. Tingkat kinerja pelayanan guna mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan maka tidak lepas dari faktor pendanaan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun pembangunan di bidang keuangan daerah, sumber-sumber dana yang dipergunakan adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penerimaan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Dari aspek keuangan, pelaksanaan kegiatan di BPKPAD selaku PPKD terbagi dalam bagian pendapatan, bagian belanja dan pembiayaan.

Bagian pendapatan meliputi sebagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Bagian belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Bagian Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD :

1) Kurangnya SDM dan sarana prasarana perkantoran mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan di BPKPAD;
2) Belum tersedianya database pajak yang valid dan banyaknya objek pajak seperti warung, minerba yang belim memiliki izin usaha ;
3) Terjadinya perubahan sistem pelayanan baik secara Peraturan Perundang-undangan maupun sistem pelayanan pembayaran digital dan tuntutan pelayanan lainnya kepada masyarakat serta banyaknya evaluasi kinerja pengelolaan PAD;
4) Perubahan kebijakan yang dinamis.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah (RPJMD) Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*". Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD tahun 2017-2022 serta penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BPKPAD terkait erat dengan pencapaian misi ke 4, yaitu "Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik".

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021 - 2026 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Tantangan :

1) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2) Kurangnya jumlah SDM pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di BPKPAD.
3) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat;

Peluang :

1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah.
2) Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik.
3) Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
4) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun legeslatif.

e. Formulasi Isu-isu penting dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah :

1) Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;
2) Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah;
3) Mewujudkan laporan keuangan berbasis aplikasi (e-budgeting);
4) Meningkatnya jumlah asset yang memiliki legalitas (sertifikat);
5) Terlaksananya pengamanan asset daerah.

2.4. Review terhadap RKPD Tahun Anggaran 2024.

BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam salah satu pelaksana peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi yang memfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan standarisasi ketatalaksanaan khususnya pelayanan publik berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh

OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada dilaksanakan penyesuaian RKPD Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RKPD PERUBAHAN (BPKPAD) TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Ranwal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEUANGAN					**104.911.204.388,86**						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**Rasio PAD terhadap total APBD**	**100**	**91.876.243.561,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Rasio PAD terhadap total APBD**	**100**	**91.876.243.561,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**1.287.470.813,00**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**1.799.500.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tobadak	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	34.166.622,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tobadak	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	34.166.622,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	34.393.159,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	34.393.159,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	44.227.514,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	44.227.514,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	45.649.076,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	45.649.076,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	25.484.133,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	45 Dokumen	25.484.133,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	Tobadak	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	45 Dokumen	54.949.003,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	Tobadak	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	45 Dokumen	54.949.003,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tobadak	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	749.000.046,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tobadak	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	749.000.046,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tobadak	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	299.601.260,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tobadak	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	299.601.260,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tobadak	Jumlah Dokumen Regulasi serta	4 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tobadak	Jumlah Dokumen Regulasi serta	4 Dokumen	0	

					Kebijakan Bidang Anggaran								Kebijakan Bidang Anggaran			
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**Tobadak**	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**362.347.596,00**			**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Tobadak**	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**362.347.596,00**	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	131.414.167,00				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	131.414.167,00	
			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	0				Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	0	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	12.479.867,00				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	12.479.867,00	
			Penatausahaan Pembiayan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayan Daerah	1 Dokumen	0				Penatausahaan Pembiayan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayan Daerah	1 Dokumen	0	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	35.729.582,00				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	35.729.582,00	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tobadak	Juamlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	0				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tobadak	Juamlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tobadak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	112.497.463,00				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tobadak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	112.497.463,00	
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang	45 Dokumen	27.250.930,00				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah	1 Dokumen	27.250.930,00	

			Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	0			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	45 Dokumen	0	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tobadak	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	45 Orang	42.975.587,00			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tobadak	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Laporan	42.975.587,00	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	350.000.000			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	350.000.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100**	**399.310.396,00**			**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100**	**399.310.396,00**	
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	19.079.111,00			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	19.079.111,00	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	4 Dokumen	26.040.241,00			Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	4 Dokumen	26.040.241,00	
			Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban	Tobadak	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	12 Laporan	25.919.791,00			Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban	Tobadak	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	12 Laporan	25.919.791,00	

			Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran					Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran			
			Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	42 Laporan	145.291.297,00			Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	42 Laporan	145.291.297,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Laporan	146.521.048,00			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Laporan	146.521.048,00	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dokumen	0			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan	1 Dokumen	0			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	1 Dokumen	0	

					Tuntutan Kerugian Daerah								dan Tuntutan Kerugian Daerah			
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	75 Oang	0			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	75 Oang	0	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	50 Lembaga	7.289.379,00			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	50 Lembaga	7.289.379,00	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	29.169.529,00			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	29.169.529,00	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Oang	350.000.000			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Oang	350.000.000	
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	50 Orang	350.000.000			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	50 Orang	350.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	225.500.000			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	225.500.000	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			**Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100**	**89.571.788.800,00**			**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100**	**89.571.788.800,00**	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	87.571.788.800,00			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	87.571.788.800,00	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000,00			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000,00	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		**Tobadak**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100**	**255.325.956,00**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		**Tobadak**	**Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100**	**255.325.956,00**	

			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	63.795.570,00			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	63.795.570,00	
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	127.722.000,00			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	127.722.000,00	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	63.808.386,00			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	63.808.386,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			**Tobadak**	**Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD**	**100**	**672.587.103,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Tobadak**	Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	**100**	**672.587.103,00**	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Tobadak**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**672.587.103,00**			**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**672.587.103,00**	
			Penyusunan Standar Harga	Tobadak	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	25.021.684,00			Penyusunan Standar Harga	Tobadak	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	25.021.684,00	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	34 Dokumen	20.551.695,00			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.551.695,00	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Dokumen	0	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	270.317.732,00			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	270.317.732,00	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	34 Laporan	0			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	0	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	91.525.000,00			Pengamanan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	91.525.000,00	
			Penilaian Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	46.806.015,00			Penilaian Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	46.806.015,00	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	0			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60 Laporan	0	

			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	92.156.558,00			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	92.156.558,00	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	11.917.514,00			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	11.917.514,00	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	114.290.905,00			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	114.290.905,00	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	0			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD**	**100**	**1.431.696.911,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**Tobadak**	**Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD**		**1.431.696.911,00**	
		Pengelolaan pendapatan Daerah				**100**	**1.431.696.911,00**		Pengelolaan pendapatan Daerah					**1.431.696.911,00**	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	54.846.664,00			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	54.846.664,00	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasl Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	0			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasl Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	0	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	83.080.808,00			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	83.080.808,00	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Unit	238.614.100,00			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	238.614.100,00	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10 Laporan	50.365.438,00			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10 Laporan	50.365.438,00	

			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah laporan yang disusun	10 Laporan	159.078.121,00			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah laporan yang disusun	4 Laporan	159.078.121,00	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tobadak	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	61.007 Objek	46.343.752,00			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tobadak	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	80.000 Objek	46.343.752,00	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	63.000 Dokumen	20.921.564,00			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	300 Dokumen	20.921.564,00	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	82.602.494,00			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	82.602.494,00	
			Penilitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	23.065.847,00			Penilitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	23.065.847,00	
			Penagihan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Dokumen	479.460.920,00			Penagihan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Dokumen	479.460.920,00	
			Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	20 Dokumen	0			Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	50 Dokumen	0	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	100.239.444,00			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	100.239.444,00	
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Tobadak	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	12 Laporan	47.130.315,00			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Tobadak	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	12 Laporan	47.130.315,00	
			Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	12 Lapoan	45.947.444,00			Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	12 Lapoan	45.947.444,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**	**10.930.676.813,86**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Tobadak**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**	**10.930.676.813,86**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tobadak**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100**	**97.834.348,00**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100**	**97.834.348,00139.050.000**	**9**
			Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tobadak	4 Dokumen	38.851.071,00	37.550.000			Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	37.550.000	

			Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Tobadak	4 Dokumen	5.864.218,00	15.000.000			Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Tobadak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	15.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	Tobadak	4 Dokumen	5.557.698,00	16.500.000			Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tobadak	4 Dokumen	5.956.757,00	17.200.000			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.200.000	
			Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tobadak	4 Dokumen	6.065.306,00	14.500.000			Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dokumen	14.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	4 Laporan	12.943.381,00	46.200.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	46.200.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	4 Laporan	22.595.917,00	36.000.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	36.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tobadak**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100**	**9.658.939.182,86**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	100	**9.658.939.182,86**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	9.631.543.071,86			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	9.631.543.071,86	
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	2 Laporan	27.396.111,00			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	1 Dokumen	45.000.000	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Tobadak**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**	**35.710.213,00**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tobadak**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**	**35.710.213,00**	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.000.894,00			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.000.894,00	

			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24.709.319,00			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24.709.319,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Tobadak**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100**	**209.963.183,00**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tobadak**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100**	**209.963.183,00**	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tobadak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	113.415.425,00			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tobadak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	113.415.425,00	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tobadak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	0			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tobadak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	0	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	55.058.918,00			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	55.058.918,00	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2 Dokumen	0			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tobadak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2 Dokumen	0	
			Monitoring, Evluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobadak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	41.488.840,00			Monitoring, Evluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobadak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	41.488.840,00	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tobadak	Jumlah pegawai berdasarkan	3 Orang	0			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tobadak	Jumlah pegawai berdasarkan	3 Orang	0	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	0			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tobadak**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**184.257.650,00**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tobadak**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**184.257.650,00**	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobadak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96 Paket	0	

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tobadak	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	26.018.250,00			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tobadak	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	26.018.250,00	
			Penyediaan Bahan/ Material	Tobadak	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Paket	28.260.000,00			Penyediaan Bahan/ Material	Tobadak	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Orang	28.260.000,00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokumen	20.000.000,00			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tobadak	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	20.000.000,00	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobadak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	0			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobadak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Orang	0	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Laporan	109.979.400,00			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Orang	109.979.400,00	
			Dukungan Pelaksanaan Sistm Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tobadak	Jumlah dokumn Dukungan Pelaksanaan Sistm Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0			Dukungan Pelaksanaan Sistm Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tobadak	Jumlah dokumn Dukungan Pelaksanaan Sistm Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tobadak**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**237.000.000,00**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tobadak**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**237.000.000,00**	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	186.000.000,00			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tobadak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	186.000.000,00	
			Pengadaan Mebel	Tobadak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0			Pengadaan Mebel	Tobadak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	0	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	20.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tobadak**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**	**204.283.437,00**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100**	**204.283.437,00**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri		Tobadak	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.986.108,00			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri	Tobadak	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.986.108,00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tobadak	1 Laporan	141.297.329,00	195.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobadak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	195.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tobadak**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100**	**302.688.800,00**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tobadak**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100**	**302.688.800,00**	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobadak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	140.988.800,00			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobadak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	140.988.800,00	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	31.700.000,00			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobadak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	31.700.000,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tobadak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130.000.000,00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tobadak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130.000.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPKPAD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Isu-isu nasional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun kedepan terutama bersumber dari RPJMN 2020-2024 yang dapat diidentifikasi berdasarkan agenda pembangunan nasional yang termuat di dalamnya yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung proses pembangunan daerah melalui dukungan Terhadap Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah 2021-2026, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi Bupati Terpilih.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kab. Mamuju Tengah. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara* dan mendukung misi yang pertama *"*Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar*".*

3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPKPAD

3.2.1 Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra BPKPAD dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 900.1.15.5.2023 tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja BPKPAD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan Renja BPKPAD tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel dan tranparan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Renja BPKPAD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan;
b. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada BPKPAD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKPAD

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah, direncanakan akan dilaksanakan Program dan Kegiatan dengan total alokasi dana Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 104.911.204.388,86 (Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja BPKPAD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mamuju tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KEUANGAN				**104.911.204.388,86**				**116.058.500.000**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Rasio PAD terhadap total APBD**	**Tobadak**	**100**	**91.876.243.561,00**	**DAU**		**100**	**103.717.000.000**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase penyusunan rencana anggaran daerah**	**Tobadak**	**100**	**1.287.470.813,00**	**DAU**		**1000**	**1.817.000.000**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Tobadak	2 Dokumen	34.166.622,00	DAU		2 Dokumen	58.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Tobadak	2 Dokumen	34.393.159,00	DAU		2 Dokumen	58.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Tobadak	45 Dokumen	44.227.514,00	DAU		45 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Tobadak	45 Dokumen	45.649.076,00	DAU		45 Dokumen	75.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Tobadak	45 Dokumen	25.484.133,00	DAU		45 Dokumen	52.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	Tobadak	45 Dokumen	54.949.003,00	DAU		45 Dokumen	52.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tobadak	2 Dokumen	749.000.046,00	DAU		2 Dokumen	850.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tobadak	2 Dokumen	299.601.260,00	DAU		2 Dokumen	423.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tobadak	4 Dokumen	0	DAU		4 Dokumen	173.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase Pengelolaan Perbendaharaan DAerah**	**Tobadak**	**100**	**362.347.596,00**			**100**	**903.000.000**
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tobadak	12 Dokumen	131.414.167,00	DAU		12 Dokumen	383.000.000

			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tobadak	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	12.000.000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tobadak	4 Dokumen	12.479.867,00	DAU		12 Dokumen	43.000.000
			Penatausahaan Pembiayan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayan Daerah	Tobadak	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	12.000.000
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tobadak	4 Dokumen	35.729.582,00	DAU		4 Dokumen	98.000.000
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Juamlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tobadak	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	22.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tobadak	12 Laporan	112.497.463,00	DAU		12 Laporan	138.000.000
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tobadak	45 Dokumen	27.250.930,00	DAU		45 Dokumen	38.000.000
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tobadak	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	52.000.000
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	45 Orang	42.975.587,00	DAU		45 Orang	105.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**100%**	399.310.396,00				**870.000.000**
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tobadak	8 Laporan	19.079.111,00	DAU		8 Laporan	52.000.000
			Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Tobadak	4 Dokumen	26.040.241,00	DAU		4 Dokumen	62.000.000

				Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban							
			Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Tobadak	12 Laporan	25.919.791,00	DAU		12 Laporan	42.000.000
			Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	42 Laporan	145.291.297,00	DAU		42 Laporan	77.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tobadak	2 Laporan	146.521.048,00	DAU		2 Laporan	293.000.000
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	12.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tobadak	2 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	122.000.000
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tobadak	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	12.000.000
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	17.000.000
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	75 Oang	0	DAU		75 Oang	122.000.000
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Tobadak	50 Lembaga	7.289.379,00	DAU		50 Lembaga	32.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Tobadak	1 Laporan	29.169.529,00	DAU		1 Laporan	27.000.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Tobadak**	**100%**	**89.571.788.800,00**				**99.672.000.000**
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tobadak	12 Laporan	87.571.788.800,00	DAU		12 Laporan	90.152.000.000
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tobadak	1 Laporan	2.000.000.000,00	DAU		1 Laporan	9.520.000.000
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		**Persentase data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**Tobadak**	**100%**	**255.325.956,00**			**100%**	**455.000.000**

			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	1 Dokumen	63.795.570,00	DAU		1 Dokumen	149.000.000
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tobadak	1 Dokumen	127.722.000,00	DAU		1 Dokumen	183.000.000
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tobadak	150 Orang	63.808.386,00	DAU		150 Orang	123.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			**Persentase Nilai Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD**	**Tobadak**	**100%**	**672.587.103,00**			**100**	**899.500.000**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		**PersentasePengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tobadak**	**100%**	672.587.103,00	**DAU**		**100**	**899.500.000**
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Tobadak	2 Dokumen	25.021.684,00	DAU		2 Dokumen	54.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tobadak	34 Dokumen	20.551.695,00	DAU		34 Dokumen	25.000.000
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	2 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	22.000.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tobadak	1 Laporan	270.317.732,00	DAU		1 Laporan	73.000.000
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Tobadak	34 Laporan	0	DAU		34 Laporan	105.000.000
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Tobadak	12 Laporan	91.525.000,00	DAU		12 Laporan	99.000.000
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Tobadak	4 Laporan	46.806.015,00	DAU		4 Laporan	58.000.000
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tobadak	4 Laporan	0	DAU		4 Laporan	54.000.000
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tobadak	1 Laporan	92.156.558,00	DAU		1 Laporan	94.000.000
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tobadak	4 Laporan	11.917.514,00	DAU		4 Laporan	25.000.000
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Tobadak	1 Laporan	114.290.905,00	DAU		1 Laporan	228.000.000
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang	Tobadak	20 Orang	0	DAU		20 Orang	62.500.000

				Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**Persentasi Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**	**Mamuju Tengah**	**100**	**1.431.696.911,00**			**100**	**1.736.000.000**
	Pengelolaan pendapatan Daerah			**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Tobadak**	**100**	**1.431.696.911,00**			**100**	**1.736.000.000**
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	3 Dokumen	54.846.664,00	DAU		3 Dokumen	197.000.000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasl Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	3 Dokumen	0	DAU		3 Dokumen	147.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tobadak	10 Laporan	83.080.808,00	DAU		10 Laporan	163.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tobadak	8 Unit	238.614.100,00	DAU		8 Unit	93.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tobadak	10 Laporan	50.365.438,00	DAU		10 Laporan	53.000.000
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan yang disusun	Tobadak	10 Laporan	159.078.121,00	DAU		10 Laporan	80.000.000
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	Tobadak	61.007 Objek	46.343.752,00	DAU		61.007 Objek	353.000.000
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Tobadak	63.000 Dokumen	20.921.564,00	DAU		63.000 Dokumen	43.500.000
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tobadak	12 Layanan	82.602.494,00	DAU		12 Layanan	37.000.000
			Penilitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Tobadak	12 Dokumen	23.065.847,00	DAU		12 Dokumen	33.500.000
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tobadak	12 Dokumen	479.460.920,00	DAU		12 Dokumen	234.000;000
			Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajka Daerah	Tobadak	20 Dokumen	0	DAU		20 Dokumen	53.000.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tobadak	12 Dokumen	100.239.444,00	DAU		12 Dokumen	177.000.000
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	Tobadak	12 Laporan	47.130.315,00	DAU		12 Laporan	43.000.000
			Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronifikasi Trnsaksi Pemerintah Daerah	Tobadak	12 Lapoan	45.947.444,00	DAU		12 Lapoan	30.500.000

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**Mamuju Tengah**	**100**	**10.930.676.813,86**	**DAU**		**100**	**9.706.000.000**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**Tobadak**	**100**	**97.834.348,00**	**DAU**		**100**	**166.000.000**
			Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobadak	4 Dokumen	38.851.071,00	4 Dokumen		4 Dokumen	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobadak	4 Dokumen	5.864.218,00	4 Dokumen		5 Dokumen	17.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tobadak	4 Dokumen	5.557.698,00	4 Dokumen		1 Dokumen	17.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tobadak	4 Dokumen	5.956.757,00	4 Dokumen		1 Dokumen	20.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tobadak	4 Dokumen	6.065.306,00	4 Dokumen		7 Dokumen	17.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	4 Laporan	12.943.381,00	4 Laporan		4 Laporan	30.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	4 Laporan	22.595.917,00	4 Laporan		5 Laporan	25.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**Tobadak**	**100**	**9.658.939.182,86**			**100**	**7.550.000.000**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	23 Orang/Bulan	9.631.543.071,86	23 Orang/Bulan		25 Orang	7.500.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Tobadak	2 Laporan	27.396.111,00	2 Laporan		2 Dokumen	50.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**Tobadak**	**100**	**35.710.213,00**	**DAU**		**100**	**62.000.000**
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tobadak	1 Dokumen	11.000.894,00	1 Dokumen		1 Dokumen	20.000.000
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	1 Laporan	0	1 Laporan		1 Laporan	12.000.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	1 Laporan	0	1 Laporan		1 Laporan	10.000.000

			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobadak	1 Laporan	24.709.319,00	1 Laporan		1 Laporan	20.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**Tobadak**	**100**	**209.963.183,00**			**100**	**359.000.000**
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tobadak	10 Unit	113.415.425,00	10 Unit		10 Unit	15.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tobadak	90 Paket	0	90 Paket		100 Paket	65.000.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobadak	12 Dokumen	55.058.918,00	12 Dokumen		12 Dokumen	46.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tobadak	2 Dokumen	0	2 Dokumen		2 Dokumen	110,000,000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobadak	3 Dokumen	41.488.840,00	3 Dokumen		3 Dokumen	38.550.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tobadak	3 Orang	0	3 Orang		5 Orang	50.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobadak	5 Orang	0	5 Orang		5 Orang	35.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**Tobadak**	**100**	**184.257.650,00**			**100**	**872.000.000**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tobadak	1 Paket	0	1 Paket		10 Paket	430.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobadak	4 Paket	26.018.250,00	4 Paket		2 Paket	50.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobadak	12 Paket	28.260.000,00	12 Paket		12 Paket	38.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tobadak	50 Dokumen	20.000.000,00	50 Dokumen		50 Dokumen	25.000.000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tobadak	10 Laporan	0	10 Laporan		100 Laporan	12.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobadak	100 Laporan	109.979.400,00	100 Laporan		100 Laporan	310.000.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Tobadak	1 Dokumen	0	1 Dokumen		2 Dokumen	7.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah PD penunjang yang terpenuhi**	**Tobadak**	**100**	**237.000.000,00**	**DAU**		**100**	**170.000.000**

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tobadak	3 Unit	186.000.000,00	3 Unit		2 Unit	55.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tobadak	1 Unit	0	1 Unit		5 Unit	40.000.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Tobadak	30 Unit	20.000.000	30 Unit		30 Paket	37.500.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tobadak	10 Unit	31.000.000,00	10 Unit		10 Unit	38.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Tobadak**	**100**	**204.283.437,00**	**DAU**		**100**	**195.000.000**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tobadak	1 Laporan	62.986.108,00			1 Laporan	62.986.108,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobadak	1 Laporan	141.297.329,00	1 Laporan		1 Laporan	195.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**Tobadak**	**100**	**302.688.800,00**	**DAU**		**100**	**332.000.000**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tobadak	23 Unit	140.988.800,00	23 Unit		25 Unit	130.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tobadak	20 Unit	31.700.000,00	20 Unit		20 Unit	55.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tobadak	1 Unit	130.000.000,00	1 Unit		1 Unit	147.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai penyesuaian atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan strategis daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

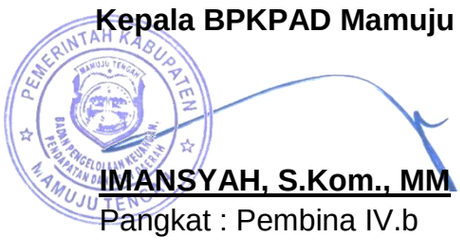
Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, serta subkegiatan BPKPAD pada Tahun 2025 tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan riil pendanaan, serta kebutuhan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Melalui dokumen ini, BPKPAD Mamuju Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif dan berkelanjutan.

Renja Perubahan Tahun 2025 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terkoordinasi, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penyusunan RKA serta pengukuran kinerja pada tahun berjalan.

Akhirnya, kami menyadari bahwa pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 memerlukan dukungan, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan komitmen bersama, diharapkan target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga kontribusi BPKPAD terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah dapat semakin optimal dan sesuai dengan visi misi pemerintah daerah.

Tobadak, 29 Agustus 2025

Kepala BPKPAD Mamuju Tengah



IMANSYAH, S.Kom., MM

Pangkat : Pembina IV.b

NIP : 19800101 200901 1 02

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah
Dusun Lemba Bou Belakang JNE Topoyo
Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 ini dapat disusun. Penyusunan Renja ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah, yang dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan.

Rencana kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial selama satu tahun ke depan serta sebagai rujukan untuk evaluasi kinerja. Dengan demikian, Rencana Kerja ini berperan sebagai alat kendali dan wujud transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah menuju tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat memerlukan saran, kritik, dan masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah di tahun-tahun berikutnya. Semoga Rencana Kerja tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

Mamuju Tengah, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

HJ. NIRWANASARI ARAS T.,SE.MM
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19790907 201101 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		Ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	**HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	44
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
	3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	50
BAB V	**PENUTUP**	60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial memainkan peran penting dalam keseluruhan upaya pembangunan nasional. Fokus pada kesejahteraan sosial tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata di berbagai sektor. Kontribusi dari sektor ini diharapkan akan menyelaraskan dan mendukung pembangunan di bidang lainnya, menciptakan sinergi yang produktif dan efektif.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan yang vital untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini dirancang untuk memandu pelaksanaan program dan kegiatan selama periode satu tahun, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang. Dengan adanya RENJA-SKPD, setiap perangkat daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program-programnya secara sistematis dan terukur, serta memastikan bahwa upaya pembangunan daerah dapat dilakukan secara terencana dan berdampak positif.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraaan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan ke dalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

3. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja SKPD, diawali dengan mengadakan Rapat Koordinasi Sinergitas Bidang Teknis terkait di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Rakor Sinergitas ini bertujuan menghimpun masukan tentang program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimasukkan dalam rencana kerja untuk Tahun 2025. Juga untuk mendapatkan gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan dapat menunjang kinerja SKPD.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar. Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah;
15. Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah sebagai rumusan prioritas kegiatan pembangunan daerah serta sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan disusunnya Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, efektif, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2025;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen rencana kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bagian ini terdiri atas 4 (empat) sub-bab yakni latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu. Pada bagian ini terdiri atas 5 (lima) sub-bab yakni evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tahun lalu dan capaian renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs *(Sustainable Development Goals),* tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini terdiri atas 3 (tiga) sub-bab yakni telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, serta program dan kegiatan.

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan Program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023, dilaksanakan 7 program, 13 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.739.029.058 dengan realisasi sebesar Rp. 2.795.638.658. Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 (T-C.29).

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG DILAKSANAKAN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	2	2.03	2	*Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah TKSK yang memperoleh layanan peningkatan kemampuan*	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	6 Orang	**16 Orang**	**320%**

1	6	3			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	3	2.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	3	2.01	1	*Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal*	*Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi*	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	**15 Orang**	**300%**
1	**6**	**3**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**6**	**3**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	3	2.01	1	*Penyediaan Sandang*	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang*	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	50 Paket	60 Paket	1200%
1	6	3	2.01	9	*Pemberian Layanan Data dan Pengaduan*	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan data dan pengaduaan*	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	120 Orang	300%

1	6	3	2.01	10	*Pemberian Layanan Kedaruratan*	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	25 Orang	65 Orang	325%
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**91%**	**91%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**291%**	**320%**
1	**6**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemutakhran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan**	**91%**	**91%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**291%**	**320%**
1	6	5	2.02	1	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	37.121 Jiwa	37.121 Jiwa	37.121 Jiwa	37.121 Jiwa	100%	37.121 Jiwa	111.363 Jiwa	300%
1	6	5	2.02	3	*Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluargaa*	*Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga*	6.692 Orang	6.692 Orang	6.692 Orang	6.692 Orang	100%	6.692 Orang	20.076 Orang	2990%
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**6**	**6**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	6	2.01	1	*Penyediaan Makanan*	*Jumlah korban bencana yang mendapat makanan*	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	30 Orang	300%

1	6	6	2.01	5	*Pelayanan Dukungan Psikososial*	*Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial*	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30 Orang	100%	10 Orang	50 Orang	500%
1	**6**	**6**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	6	2.02	2	*Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*	*Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia*	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	50 Orang	120 Orang	343%
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**6**	**7**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	7	2.01	2	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	*Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Dipelihara*	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	3 Titik	300%
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	**6**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	1	2.01	1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan PD*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	300%

1	6	1	2.01	2	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	1	2.08	1	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah jasa surat menyurat	1800 Surat	300 Surat	300 Surat	300 Surat	100%	300 Surat	900 Surat	50%
1	6	1	2.08	2	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
1	6	1	2.08	4	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
1	**6**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	1	2.09	1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%
1	6	1	2.09	2	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	300%
1	6	1	2.09	8	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Aset	1 Aset	1 Aset	1 Aset	100%	1 Aset	3 Aset	300%

1	**6**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	1	2.06	2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	10 Unit	15 Unit	750%
1	6	1	2.06	5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5.042 Lembar	20.090 Lembar	20.090 Lembar	20.090 Lembar	100%	20.090 Lembar	60270 Lembar	1195%
1	6	1	2.06	9	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	50 Kegiatan	83%	60 Kegiatan	170 Kegiatan	243%
1	**6**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**299%**	**299%**
1	6	1	2.02	1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah ASN	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	30 Orang	300%
1	6	1	2.02	7	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300%
1	**6**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1	6	1	2.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	3 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	5 Orang	167%

Secara umum realisasi program / kegiatan telah memenuhi target kinerja. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota yang terdiri dari 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan mendapat capaian sebesar 100% hal tersebut didukung oleh SDM yang baik sehingga kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target. Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang mendapat capaian 100%. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memberikan pembinaan kepada TKSK yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan sekaligus mitra kerja Dinas Sosial. Pembinaan yang diberikan kepada PSKS dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi dalam menangani PPKS. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang memiliki capaian 100%. Hal tersebut dikarenakan penanganan yang cepat dan tanggap Dinas Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial PPKS baik penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Anak Terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Tuna Susila, Gelandangan, dan Pengemis. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang mendapat capaian lebih dari 100%. Kegiatan ini berisi Pendataan fakir miskin dengan melakukaan pembinaan kepada Operator Siks Ng Desa, verivali data, pengelolaan data serta pemberian bantuan untuk Fakir Miskin berupa PKH. Untuk program penanganan bencana yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan memiliki capaian 100% hal itu dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat bencana banjir sehingga Dinas Sosial mendirikan Dapur Umum, dan pemulangan Orang Terlantar serta operasional rutin anggota Tagana. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) terdiri dari satu kegiatan dan satu sub-kegiatan yang telah mencapai 100% capaian. Pelaksanaan pemeliharaan rutin di TMP Bahagia bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keindahan TMP di Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan kegiatan pemeliharaan yang teratur, TMP tersebut dapat terpelihara dengan baik dan tetap menjadi tempat yang layak untuk menghormati pahlawan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah

"Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial tugas pembantuan yang diberikan".

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang sosial;
2. Pembinaan dan pengendalian pelayanan Sosial, baik teknis maupun administrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang sosial;
4. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Dinas Sosial ;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di bidang Sosial dengan instansi terkait;
6. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang Sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mamuju Tengah adalah :

"Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara"

Makna yang terkandung dalam rumusan visi ini adalah maju, sejahtera dan bingkai Lalla' Tassisara menggambarkan kondisi masa depan yang hendak dicapai bersama oleh seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah.

"Maju" adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya.

"Sejahtera" adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin

meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

"Bingkai Lalla' Tassisara" adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman. Dengan visi tersebut, kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dicita-citakan semakin membalik, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2025, maka ditempuh misi sebagai berikut :

1. **Misi 1**

   Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar

   Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

2. **Misi 2**

   Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

   Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.

3. **Misi 3**

   Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

   Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain

memperkuatan sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi penghidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

4. **Misi 4**

   Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

   Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.

5. **Misi 5**

   Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

   Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai *Lalla' Tassisara*, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

6. **Misi 6**

   Menjaga Keberlanjutan Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

   Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah.

Telaah terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah memberi gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini ditunjukkan melalui :

a. Melalui Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar

   Adapun sasaran dari misi tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas Dinas Sosial adalah terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Kabupaten dengan indikator sasaran rata-rata capaian SPM.

b. Melalui Misi ke-3 : Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

   Adapun sasaran dari misi tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas Dinas Sosial adalah meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan indikator sasaran angka kemiskinan.

c. Melalui Misi ke-4 : Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

   Adapun sasaran dari misi tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas rutin Dinas Sosial adalah Meningkatnya dukungan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan di bidang sosial;
2. Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang sosial;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan di bidang sosial;
5. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tersebut di atas dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang termuat dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026. Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah merumuskan kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam penentuan dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA).

Untuk tahun 2024, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Review RENSTRA Dinas

Sosial Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30)

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERENGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*	*12*	*13*
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	94,08%	94,22	94,30	95%	96%	
2	Persentase PMKS yang tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	94,08%	94,22	94,30	95%	96%	
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100%	100%	100%	100%	100%	94,08%	94,22	94,30	95%	96%	
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainya		100%	100%	100%	100%	100%	0,04%	0%	0%	1%	1,50%	
5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0,10%	0,20%	
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	53%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tujuan meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan dengan target indikator persentase rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan PMKS pada Tahun 2022 sebesar 100% dan 100% untuk Tahun 2023. Namun pada Tahun 2024 tujuan Dinas Sosial mengalami perubahan yang tertuang pada Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS dengan target 100% dan 100% untuk target Tahun 2024.

Realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun 2021 dan 2022 telah mencapai target yaitu sebesar 100% dan 100%. Realisasi tersebut dapat tercapai karena didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik diantara pegawai Dinas Sosial, mitra kerja dan peran serta masyarakat.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun permalasahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Basis Data yang belum valid dan belum berbasis manajemen sistem informasi yang baik;
2. Belum konsisten dan terintegrasinya kebijakan setiap perangkat daerah yang terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Belum mantapnya pemahaman koordinasi dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi bidang kesejahteraan sosial masyarakat terutama berkaitan dengan program lintas sektor;

4. Rendahnya taraf pendidikan dan Sumber daya manusia, serta infrastruktur yang belum memadai;
5. Kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
6. Sistem administrasi pemerintahan belum tersusun dengan jelas dan rapih sehingga masih banyak peraturan-peraturan yang tumpang tindih;
7. Luasnya Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan aksesibilitas yang sulit dikarenakan ada beberapa daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau;
8. Laju Pertumbuhan Penduduk yang tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya mobilitas penduduk;
9. Keadaan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen;
10. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat; dan
11. Terjadinya berbagai masalah di bidang sosial seperti bencana, konflik, krisis ekonomi yang memerlukan penanganan yang cepat dan intensif.

Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah juga mempunyai peluang, di antaranya sebagai berikut :

1. perundang-undangan yang mendukung koordinasi, sinkronisasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Potensi alam yang mendukung;
3. Peraturan Komitmen pimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Terdapat media massa yang cukup beragam seperti media online, Koran, radio;
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya dan dinamis bagi daerah untuk melakukan pembangunan khususnya di bidang kesejahteraan sosial;

6. Komitmen pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
7. Adanya berbagai program nasional beserta seluruh struktur pendukungnya seperti PKH, BPNT, dan program-program lainnya; dan
8. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) untuk penanggulangan masalah-masalah sosial.

Dari penjabaran di atas dapat ditentukan isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

a. Tingkat akurasi Basis Data Terpadu;
b. Masih tingginya penduduk miskin;
c. Angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masih cukup tinggi;
d. Tingkat pendapatan penduduk yang masih rendah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar;
e. Kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial belum maksimal;
f. Belum adanya sarana dan prasarana atau tempat perlindungan untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS serta penanganan kebencanaan;
g. Sarana dan prasarana kantor berupa perangkat pengolahan data yang belum memadai;
h. Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga programmer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan;
i. SOP yang belum terintegrasi; dan
j. Kurangnya sinergitas *stakeholders* dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan setiap tahun sebagai pedoman dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah bertanggung jawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan

kemiskinan serta menjadi salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif yang termuat dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah harus menitikberatkan pada pencapaian prioritas dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Mamuju Tengah.

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2025, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Berikut adalah perbandingan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah :

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*4*	*3*	*5*	*6*	*2*	*4*	*3*	*5*	*6*	
	SOSIAL					**SOSIAL**					
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.948.685.300**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.948.685.300**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**118.381.628**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**118.381.628**	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAMUJU TENGAH	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 Dokumen	64.683.354	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAMUJU TENGAH	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 Dokumen	64.683.354	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	36.199.174	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	36.199.174	
c	Forum OPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen Ranwal	1 Dokumen	17.499.100	Forum OPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen Ranwal	1 Dokumen	17.499.100	

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**739.877.685**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**739.877.685**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAMUJU TENGAH	Jumlah ASN	10 Orang	709.397.276	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAMUJU TENGAH	Jumlah ASN	10 Orang	709.397.276	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Dokumen	30.480.409	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Dokumen	30.480.409	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**241.176.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**241.176.000**	
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	18 Orang	241.176.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	18 Orang	241.176.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**301.221.490**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**301.221.490**	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAMUJU TENGAH	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	180.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAMUJU TENGAH	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	180.000.000	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	MAMUJU TENGAH	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	MAMUJU TENGAH	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 jenis	5.000.000	
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MAMUJU TENGAH	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	38 Meter, 20049 Lembar	8.915.170	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MAMUJU TENGAH	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	38 Meter, 20049 Lembar	8.915.170	

d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	60 Kali	107.306.320	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAMUJU TENGAH	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	60 Kali	107.306.320	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**185.404.135**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**185.404.135**	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MAMUJU TENGAH	Jumlah jasa surat menyurat	300 Surat	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MAMUJU TENGAH	Jumlah jasa surat menyurat	300 Surat	3.000.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MAMUJU TENGAH	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	20 mbps 1000 m3 19785 kwh	39.000.135	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MAMUJU TENGAH	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	20 mbps 1000 m3 19785 kwh	39.000.135	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAMUJU TENGAH	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Orang	143.404.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAMUJU TENGAH	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Orang	143.404.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**97.289.362**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**97.289.362**	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	42.097.912	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	42.097.912	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAMUJU TENGAH	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 Unit	25.191.450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAMUJU TENGAH	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 Unit	25.191.450	

c	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	MAMUJU TENGAH	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	MAMUJU TENGAH	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	1 Unit	30.000.000	
B	**Program Pemberdayaan Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Jenis PSKS yang meningkat kemampuannya**	**100%**	**72.835.855**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Jenis PSKS yang meningkat kemampuannya**	**100%**	**72.835.855**	
1	**Pengembangan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah PSKS yang memperoleh layanan pengembangan Potensi**	**6 PSKS**	**72.835.855**	**Pengembangan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah PSKS yang memperoleh layanan pengembangan Potensi**	**6 PSKS**	**72.835.855**	
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	MAMUJU TENGAH	Jumlah TKSK yang memperoleh layanan peningkatan kemampuan	6 Orang TKSK, 108 Orang Karang Taruna	72.835.855	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	MAMUJU TENGAH	Jumlah TKSK yang memperoleh layanan peningkatan kemampuan	6 Orang TKSK, 108 Orang Karang Taruna	72.835.855	
C	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani**	**100%**	**7.728.000**	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani**	**100%**	**7.728.000**	
1	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**5 Orang**	**7.728.000**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**5 Orang**	**7.728.000**	
a	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	5 Orang	7.728.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	5 Orang	7.728.000	
D	**Program Rehabilitasi Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis**	**100%**	**355.070.000**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis**	**100%**	**355.070.000**	

			yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)					**yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**			
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai standar**	**40 Orang**	**355.070.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai standar**	**40 Orang**	**355.070.000**	
a	Penyediaan Sandang	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	5 orang	106.767.000	Penyediaan Sandang	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	5 orang	106.767.000	
b	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan data dan pengaduaan	20 orang	71.279.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan data dan pengaduaan	20 orang	71.279.000	
c	Pemberian Layanan Kedaruratan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	15 orang	90.319.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	15 orang	90.319.000	
d	Penyediaan Alat bantu	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	15 orang	52.710.000	Penyediaan Alat bantu	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	15 orang	52.710.000	
e	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia dan tuna sosial terlantar di luar panti sosial	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	5 orang	33.995.000	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia dan tuna sosial terlantar di luar panti sosial	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	5 orang	33.995.000	

2	**Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	MAMUJU TENGAH	**Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**296.120.000**	**Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**296.120.000**	
a	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	10 Orang	42.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	10 Orang	42.000.000	
b	Pemberian Layanan Kedaruratan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	15 Orang	65.520.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	15 Orang	65.520.000	
c	Penyediaan Permakanan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bantuan Permakanan sesuai standar Gizi	10 orang	35.700.000	Penyediaan Permakanan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bantuan Permakanan sesuai standar Gizi	10 orang	35.700.000	
d	Penyediaan Sandang	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkanBantuan Sandang sesuai standar	10 orang	22.900.000	Penyediaan Sandang	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkanBantuan Sandang sesuai standar	10 orang	22.900.000	

e	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial dan Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	75 orang	100.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial dan Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	75 orang	100.000.000	
f	Pemberian Layanan Rujukan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	5 orang	15.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	5 orang	15.000.000	
g	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	5 Orang	15.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	MAMUJU TENGAH	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	5 Orang	15.000.000	
E	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**100%**	**810.532.400**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**100%**	**810.532.400**	
1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan**	**100%**	**323.404.772**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan**	**100%**	**323.404.772**	
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	MAMUJU TENGAH	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/kota yang terdata	37121 Jiwa	255.315.700	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	MAMUJU TENGAH	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/kota yang terdata	37121 Jiwa	255.315.700	

b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	6692 KK	68.089.072	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	6692 KK, 6000 KPM, 20 Kel	68.089.072	
c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	110 KK	150.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	MAMUJU TENGAH	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	110 KK	150.000.000	
F	**Program Penanganan Bencana**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100%**	**720.813.400**	**Program Penanganan Bencana**	**MAMUJU TENGAH**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100%**	**720.813.400**	
1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial**	**20 Orang**	**280.974.800**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial**	**20 Orang**	**280.974.800**	
a	Penyediaan Makanan	MAMUJU TENGAH	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial dan mendapat makanan	10 Orang	7.782.800	Penyediaan Makanan	MAMUJU TENGAH	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial dan mendapat makanan	10 Orang	7.782.800	
b	Pelayanan Dukungan Psikososial	MAMUJU TENGAH	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	10 Orang	273.192.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	MAMUJU TENGAH	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	10 Orang	273.192.000	
2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penerima layanan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana**	**35 Orang**	**439.838.600**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**MAMUJU TENGAH**	**Jumlah penerima layanan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana**	**35 Orang**	**439.838.600**	
a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	35 Orang	439.838.600	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	MAMUJU TENGAH	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	35 Orang	439.838.600	

G	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**BABANA**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100%**	**61.726.578**	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**BABANA**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100%**	**61.726.578**	
1	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**BABANA**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Dipelihara**	**1 Titik**	**61.726.578**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**BABANA**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Dipelihara**	**1 Titik**	**61.726.578**	
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	BABANA	Jumlah Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota yang Dipelihara	1 Titik	61.726.578	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	BABANA	Jumlah Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota yang Dipelihara	1 Titik	61.726.578	
JUMLAH				**4.127.391.533**		**JUMLAH**				**4.127.391.533**	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan hasil perbandingan antara RKPD Kabupaten Mamuju Tengah dan hasi analisis kebutuhan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada RKPD tahun 2025 sama dengan Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025;
2. Seluruh target capaian indikator kinerja yang ada RKPD tahun 2025 sama dengan Seluruh target capaian indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025;
3. Pagu indikatif setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang ada RKPD tahun 2024 sama untuk kebutuhan dana setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati dan dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun usulan-usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.32).

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	PRORAM/ KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penganganan Fakir Miskin	Mamuju Tengah	Sosialisasi Penanganan Fakir Miskin	100.000.000	Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman untuk upaya Penanganan Fakir Miskin
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Tabel 2.4 (Tabel T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				
	PRORAM/ KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DINAS SOSIAL**	**IKM**	**100%**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Sosial**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**3 Dokumen**	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan dan Ranwal	2 Dokumen	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Sosial**	**Persentase Serapan Anggaran**	**100%**	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Sosial**	**Tingkat Kompetensi ASN**	**100%**	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Dinas Sosial	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang Kursus Singkat/Pelatihan	2 Orang	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Sosial**	**Persentase Penyediaan komponen Operasional kantor**	**100%**	

1.06.01.2.06.02	Penyediaan peralan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Unit	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	38.20049 meter.lembar	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Sosial**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Surat	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20100019785 mbpsm3kwh	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Orang	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Sosial**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Unit	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	
1.06.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dinas Sosial	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**KAB. MAMUJU TENGAH**	**Persentase Jenis PSKS yang menerima Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Jumlah PSKS yang memperoleh layanan pengembangan Potensi**	**100%**	

1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**KAB. MAMUJU TENGAH**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani**	**100%**	
1.06.03.2	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota**	**5 Orang**	
1.06.03.2.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	5 Orang	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**KAB. MAMUJU TENGAH**	**Persentase penyandang disibalitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar**	**100%**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta gelandangan pengemis diluar Panti**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar**	**100%**	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	

1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	
1.06.05.2.02	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**KAB. MAMUJU TENGAH**	**Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan**	**100%**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase pemutakhran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan**	**100%**	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	37121 jiwa	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6692 KK	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	110 KK	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**KAB. MAMUJU TENGAH**	**Persentase Penanganan Bencana yang tersalurkan**	**100%**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**100%**	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosal dan/atau relawan sosial yang tersedia**	**100%**	

1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**KAB. MAMUJU TENGAH**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	100%	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota**	**1 Titik**	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Titik	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan adanya jaminan bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan ini meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun dalam bentuk tahunan.

Melalui RPJPN 2005-2025, fokus pembangunan jangka menengah adalah periode 2020-2024, dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, berkeadilan, dan sejahtera. Hal ini dilakukan melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor, dengan penekanan utama pada penguatan struktur ekonomi yang tangguh, berbasis pada keunggulan kompetitif di setiap daerah. Keberhasilan pembangunan tersebut sangat bergantung pada sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas tetapi juga kompeten. Tahap terakhir dari RPJPN 2005-2025 adalah penyusunan RPJMN.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis *(Major Project).* Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Proyek Prioritas Strategis *(Major Project)* lebih lanjut dijabarkan salah satunya ke dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Renstra Kementerian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah: ‘‘Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitan serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan

aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Adapun sasaran strategis Kementerian Sosial yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan melalui indikator Indeks Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional melalui indikator :
   a. Indeks Partisipasi Sosial
   b. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
   c. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
   d. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
   e. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik melalui indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Dari hasil telaahan Renstra Kementerian Sosial ditemukan sasaran strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebing lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran serta indikator tujuan dan sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (T1)	Skor Kepuasan Masyarakat atas SPM Sosial	Meningkatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (S1)	Rata-rata Capaian SPM Bidang Sosial

		Rasio rumah tangga fakir miskin terhadap total rumah tangga miskin		Persentase Penurunan Rumah Tangga Fakir Miskin
				Persentase Penurunan Rumah Tangga Nelayan Miskin
2	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Sosial (T2)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya dukungan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Sosial (S2)	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial. Program dan kegiatan ini tentunya secara langsung menyasar pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya dituangkan juga ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan direncanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan :
     - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan :
- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan :
- 1.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub-kegiatan :
- 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-kegiatan :
- 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-kegiatan :
- 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :

2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :
- 2.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan :

3.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan sub-kegiatan :

3.1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :

4.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub-kegiatan :

4.1.1 Penyediaan Sandang

4.1.2 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

4.1.3 Pemberian Layanan Kedaruratan

4.1.4 Penyediaan Alat bantu

4.1.5 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia dan tuna sosial terlantar di luar panti sosial

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :

5.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :

5.1.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

5.1.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi

6. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan :

6.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :

6.1.1 Penyediaan Makanan

6.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :

6.2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan :

7.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan sub-kegiatan :

7.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mamuju Tengah oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Ada 6 Program, 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 4.127.391.533,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagaimana tabel 4.1. di bawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	SOSIAL								
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**1.948.685.300**	**DAU**		**100%**	**1.948.685.300**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**118.381.628**	**DAU**		**100%**	**118.381.628**
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	MAMUJU TENGAH	2 Dokumen	64.683.354	DAU		2 Dokumen	64.683.354

b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	MAMUJU TENGAH	1 Dokumen	36.199.174	DAU		1 Dokumen	36.199.174
c	Forum OPD	Jumlah Dokumen Ranwal	MAMUJU TENGAH	1 Dokumen	17.499.100	DAU		1 Dokumen	17.499.100
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**739.877.685**	**DAU**		**100%**	**739.877.685**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	MAMUJU TENGAH	10 Orang	709.397.276	DAU		10 Orang	709.397.276
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	MAMUJU TENGAH	2 Dokumen	30.480.409	DAU		2 Dokumen	30.480.409
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**241.176.000**	**DAU**		**100%**	**241.176.000**
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	MAMUJU TENGAH	18 Orang	241.176.000	DAU		18 Orang	241.176.000
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**301.221.490**	**DAU**		**100%**	**301.221.490**
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	MAMUJU TENGAH	2 Unit	180.000.000	DAU		10 Unit	180.000.000

b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	MAMUJU TENGAH	10 jenis	5.000.000	DAU		10 jenis	5.000.000
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	MAMUJU TENGAH	38 Meter, 20049 Lembar	8.915.170	DAU		38 Meter, 20049 Lembar	8.915.170
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	MAMUJU TENGAH	60 Kali	107.306.320	DAU		60 Kali	107.306.320
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**185.404.135**	**DAU**		**100%**	**185.404.135**
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	MAMUJU TENGAH	300 Surat	3.000.000	DAU		300 Surat	3.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	MAMUJU TENGAH	20 mbps	39.000.135	DAU		20 mbps	39.000.135
				1000 m3		DAU		1000 m3	
				19785 kwh		DAU		19785 kwh	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	MAMUJU TENGAH	12 Orang	143.404.000	DAU		12 Orang	143.404.000
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**97.289.362**	**DAU**		**100%**	**97.289.362**

a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	MAMUJU TENGAH	1 Unit	42.097.912	DAU		1 Unit	42.097.912
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	MAMUJU TENGAH	3 Unit	25.191.450	DAU		3 Unit	25.191.450
c	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud terpelihara	MAMUJU TENGAH	1 Unit	30.000.000	DAU		1 Unit	30.000.000
B	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Jenis PSKS yang meningkat kemampuannya**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**72.835.855**	**DAU**		**100%**	**72.835.855**
1	**Pengembangan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSKS yang memperoleh layanan pengembangan Potensi**	**MAMUJU TENGAH**	**6 PSKS**	**72.835.855**	**DAU**		**6 PSKS**	**72.835.855**
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang memperoleh layanan peningkatan kemampuan	MAMUJU TENGAH	6 Orang TKSK, 108 Orang Karag Taruna	72.835.855	DAU		6 Orang TKSK, 108 Orang Karag Taruna	72.835.855
C	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**7.728.000**	**DAU**		**100%**	**7.728.000**
1	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**MAMUJU TENGAH**	**5 Orang**	**7.728.000**	**DAU**		**5 Orang**	**7.728.000**

a	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	MAMUJU TENGAH	5 Orang	7.728.000	DAU		5 Orang	7.728.000
D	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase (%) penyandang disabilitas**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**355.070.000**	**DAU**		**100%**	**355.070.000**
		terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan							
		gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)							
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas**	**Jumlah penyandang disabilitas**	**MAMUJU TENGAH**	**40 Orang**	**355.070.000**	**DAU**		**40 Orang**	**355.070.000**
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	**terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan**							
	serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**gelandangan pengemisyang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai standar**							
a	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	MAMUJU TENGAH	5 orang	106.767.000	DAU		5 orang	106.767.000
b	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan data	MAMUJU TENGAH	20 orang	71.279.000	DAU		20 orang	71.279.000

		dan pengaduaan							
c	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	MAMUJU TENGAH	15 orang	90.319.000	DAU		15 orang	90.319.000
d	Penyediaan Alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	MAMUJU TENGAH	15 orang	52.710.000	DAU		15 orang	52.710.000
e	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia dan tuna sosial terlantar di luar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan Layanan kedaruratan	MAMUJU TENGAH	5 orang	33.995.000	DAU		5 orang	33.995.000
2	**Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**	MAMUJU TENGAH	**100%**	**296.120.000**	**DAU**		**100%**	**296.120.000**
a	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	MAMUJU TENGAH	10 Orang	42.000.000	DAU		10 Orang	42.000.000

b	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	MAMUJU TENGAH	15 Orang	65.520.000	DAU		15 Orang	65.520.000
c	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bantuan Permakanan sesuai standar Gizi	MAMUJU TENGAH	10 orang	35.700.000	DAU		10 orang	35.700.000
d	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkanBantuan Sandang sesuai standar	MAMUJU TENGAH	10 orang	22.900.000	DAU		10 orang	22.900.000
e	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial dan Atau Pusat Kesejahteraan Sosial	MAMUJU TENGAH	75 orang	100.000.000	DAU		75 orang	100.000.000
f	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	MAMUJU TENGAH	5 orang	15.000.000	DAU		5 orang	15.000.000

g	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	MAMUJU TENGAH	5 Orang	15.000.000	DAU		5 Orang	15.000.000
E	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**810.532.400**	**DAU**		**100%**	**810.532.400**
1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**323.404.772**	**DAU**		**100%**	**323.404.772**
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/kota yang terdata	MAMUJU TENGAH	37121 Jiwa	255.315.700	DAU		37121 Jiwa	255.315.700
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	MAMUJU TENGAH	6692 KK	68.089.072	DAU		6692 KK, 6000 KPM, 20 Kel	68.089.072
c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	MAMUJU TENGAH	110 KK	110 KK	DAU		110 KK	150.000.000

F	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**MAMUJU TENGAH**	**100%**	**720.813.400**	**DAU**		**100%**	**720.813.400**
1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Perlindungan dan Jaminan sosial**	**MAMUJU TENGAH**	**20 Orang**	**280.974.800**	**DAU**		**20 Orang**	**280.974.800**
a	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial dan mendapat makanan	MAMUJU TENGAH	10 Orang	7.782.800	DAU		10 Orang	7.782.800
b	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	MAMUJU TENGAH	10 Orang	273.192.000	DAU		10 Orang	273.192.000
2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerima layanan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana**	**MAMUJU TENGAH**	**35 Orang**	**439.838.600**	**DAU**		**35 Orang**	**439.838.600**

a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	MAMUJU TENGAH	35 Orang	439.838.600	DAU		35 Orang	439.838.600
G	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**BABANA**	**100%**	**61.726.578**	**DAU**		**100%**	**61.726.578**
1	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Dipelihara**	**BABANA**	**1 Titik**	**61.726.578**	**DAU**		**1 Titik**	**61.726.578**
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota yang Dipelihara	BABANA	1 Titik	61.726.578	DAU		1 Titik	61.726.578
JUMLAH				***4.127.391.533***				***4.127.391.533***	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yang disusun berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025. Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai yang telah direncanakan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, di antaranya sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas pertama yang harus dilaksanakan;
2. Pada tahun 2025, diharapkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sudah dapat dilaksanakan dengan paradigma baru. Sejauh ini, pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih menggunakan paradigma lama yang mengarah pada pemecahan masalah *(problem solving)* dan pendekatan kelayakan sebagai penyandang masalah. Akibatnya, peran pemerintah lebih dominan melalui kegiatan rehabilitatif, penyantunan, pemberian bantuan, dan lain-lain. Dalam jangka panjang, paradigma ini menciptakan sikap malas, ketergantungan yang tinggi, serta harapan terhadap bantuan pemerintah. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial juga cenderung menuntut agar pemerintah menyelesaikan masalah mereka. Paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial lebih dikenal sebagai Employment *Community For Development* (ECFD), yang menganggap penyandang masalah sosial dari segi potensi dan kemampuan internal mereka. Paradigma ini tidak menganggap orang bermasalah sebagai orang yang tidak mampu, melainkan mereka dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan diri dan berusaha.

Oleh karena itu, perlu dioptimalkan kedepannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan potensi melalui kegiatan pemberdayaan. Pada paradigma baru ini, peran pemerintah sangat kecil dan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial. Dengan paradigma ini diharapkan tumbuh sikap dan perilaku kemandirian dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial;

3. Kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan sasaran;
4. Ketepatan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Ketepatan sasaran pelayanan berangkat dari Basis Data Terpadu yang valid dan terverifikasi sehingga diperlukan adanya pemutakhiran basis data di setiap tahunnya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 sebagai bahan pertimbangan penyusunan anggaran pembangunan dan acuan dalam pelaksanaaan program kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami sangat harapkan sebagai perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja ini pada masa yang mendatang.

Mamuju Tengah, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

HJ. NIRWANASARI ARAS T.,SE.MM
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19790907 201101 2 005

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mamuju Tengah, Agustus 2025

Kepala Dinas



HASANUDDIN,HW,S.Ag.,M.Si.

NIP : 19750608 200112 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LatarBelakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan Publik lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Kependudukan Kab. Mamuju tengah Tahun Anggaran 2025, mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah, selaras dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah. Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah Tahun 2025 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi Bagian, melainkan sudah berganti status sebagai Dinas. Sehingga sebagai salah satu SKPD baru dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tentu berusaha semaksimal mungkin untuk memacu diri dalam rangka memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat, khususnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

I.2 LandasanHukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Mamuju Tengah No. 04 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah KabupatenMamuju Tengah.

10. Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 27 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kebupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

I.3 Maksud danTujuan

Maksud :

Secara umum, maksud penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Defenitif Kabupaten Mamuju Tengah yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di pedomani setiap tahunnya. Hal ini merupakan tujuan yang tidak terpisah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

Tujuan :

a. Menyamakan persepsi dan pandangan semua jajaran pegawai/ staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah dalam tujuan organisasi
b. Tersedianya tolok ukur dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah
c. Menyediakan informasi mengenai kegiatan program yang akan di jalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai skala prioritas pertahun berdasarkan rencana strategis dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat

I.8 SistematikaPenulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju TengahTahun 2025, meliputi :

 BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

2.2 Landasan Hukum

2.3 Maksud Dan Tujuan

2.4 Sistematika Penulisan

 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkast Daerah

2.3 Isu-Isu Pentingh Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Proram dan Kegiatan

 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

 BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2025 yang menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik, sehingga berbagai sasaran dan program dapat dicapai. Sedangkan Prioritas Program RENSTRA yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 disampaikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG.	BELANJA DAERAH		
	ANGGARAN	REALISASI	%
01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Rp 1.676.027.279**	**Rp 1.632.525.495**	97.40
02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Rp 402.598.372**	**Rp 399.075.700**	99.13
03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Rp 341.875.077**	**Rp 341.772.500**	99.97
04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Rp 179.669.896**	**Rp 179.451.705**	99.88
05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Rp 95.312.734**	**Rp 95.306.000**	99.99
JUMLAH TOTAL	**Rp. 2.695.483.358**	**Rp. 2.648.131.400**	**98.25**

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan program dan kegiatannya.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Kinerja				
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Persentase Perekaman KTP elektronik	92%	93%	94%	95%	97%	98%	92.90 %	94.37%	94.99%	97,69 %	
	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	13%	28%	43%	58%	73%	88%	34.85%	42.53%	45.39%	45,32 %	
	Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0 sd 18 Tahun	61%	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95.73%	104.91%	98.78%	98.87%	
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	14.00%	55%	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%	84.37 %	

Seperti yang telah di cantumkan pada tabel Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah diatas

Persentase Data Kependudukan pada tahun 2021 telah melampui target Renstra yang telah ditentukan dan pada Tahun 2022 telah memenuhi target. Untuk perhitungan data kependudukan pada IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan Data Konsoilidasi Bersih dari Kementerian Dalam Negeri Semester II dan untuk capaian tahun 2022 untuk sementara masi menggunakan data semester I disebabkan Data Konsoilidasi Bersih belum rilis dari Kementerian Dalam Negeri

adapun mengenai masalah formulasi perhitungan IKU seperti pada tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula Perhitungan		Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan	1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP / Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	X 100	Data Konsilidasi Bersih (DKB) Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kemendagri
		2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	x 100	Data Konsilidasi Bersih (DKB) Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kemendagri
		3	Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0 sd 18 Tahun	%	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun	X 100	Data Konsilidasi Bersih (DKB) Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kemendagri
		4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / Jumlah OPD	X 100	Laporan Perjanjian Kerjasama

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan administrasi kependudukan diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana di atur dalam Permendagrai Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persentase Perekaman KTP elektronik
2. Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA
3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 Tahun
4. Persentase OPD yang tela memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Tabel. 2.3
PENACAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahunh Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***	***18***	***19***	***20***
1	Perekaman KTP elektronik				93%	94%	95%	97%	98%	92.90 %	94.37 %	94.99 %	97,69 %		99.89 %	101 .47 %	99. 99%	100, 71%	
2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				28%	43%	58%	73%	88%	34.85 %	42.53 %	45.39 %	45,32 %		124.4 6%	98. 91%	78. 26%	62,0 5%	
3	Kepemilikan akte kelahiran 0 sd 17 Tahun				70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95.73 %	104. 91%	98.78 %	98.87 %		136,7 6%	139 .87 %	123 .48 %	109, 85%	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				55%	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%	84.37 %		181.8 2%	153 .85 %	133 ,33 %	99.2 6%	

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini yang utama yaitu :

”**PERCEPATAN**” terkait dengan Pelayanan/Penerbitan Dokumen Kependudukan, **”KOLABORASI**” dalam upaya Pemanfaatan Data Base Kependudukan dan ”**JANGKAUAN**” dalam rangka peningkatan pelayanan Publik Administrasi yang berarti Pendekatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan.

Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah sering melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat pusat dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Administrasi

Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah diberlakukannya Undang-undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dan juga dilakukannya Bimtek mengenai administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat guna pencapaian kinerja khususnya dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang ditempuh dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Belum tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat, sehingga perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi kebijakan kependudukan kepada masyarakat tidak hanya kepada aparat desa/kelurahan akan tetapi kepada masyarakat langsung.
2. sarana dan prasarana IT untuk pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai, untuk itu perlu di adakan pembaruan untuk sarana dan prasarana IT.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebelum nanti akhirnya menjadi dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang disahkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek. Sangat dimungkinkan dalam proses berjalan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 menjadi dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 terjadi perbedaan/pergeseran program/kegiatan beserta pagu anggaran yang disinkronkan dengan program prioritas Provinsi Sulawesi Barat, Nasional maupun perkembangan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kenaikan pada pagu anggaran dari tahun yang lalu dan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2025.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**DUKCAPIL**	Persentase Dokumen Pendaftara Penduduk yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100	Rp305,600,000	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	DUKCAPIL	**Persentase Dokumen Pendaftara Penduduk yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan**	100	**Rp305,600,000**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan	19500	Rp20,000,000	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	DUKCAPIL	**Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan**	19500	**Rp20,000,000**	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Rp20,000,000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Rp20,000,000	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Penataan Pendafatran Penduduk yang di sediakan	20000	Rp40,000,000	Penataan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Penataan Pendafatran Penduduk yang di sediakan	20000	Rp40,000,000	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	20000	Rp40,000,000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	20000	Rp40,000,000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang di sediakan	20000	Rp245,600,000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang di sediakan	20000	Rp245,600,000	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	19500	Rp75,600,000	**Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk**	DUKCAPIL	**Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait**	19500	**Rp75,600,000**	

								Pendaftaran Penduduk			
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1	Rp170,000,000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk**	1	Rp170,000,000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DUKCAPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	C	Rp292,400,000	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	DUKCAPIL	**Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan**	C	**Rp292,400,000**	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil yang di sediakan dan terbitkan	10000	Rp80,000,000	Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil yang di sediakan dan terbitkan	10000	Rp80,000,000	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	Rp20,000,000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	Rp20,000,000	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	Rp60,000,000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	Rp60,000,000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang di sediakan	10100	Rp212,400,000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang di sediakan	10100	Rp212,400,000	
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	Rp150,000,000	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	Rp150,000,000	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang disediakan	1	Rp0	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	DUKCAPIL	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang disediakan**	1	**Rp0**	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	32	Rp235,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	32	Rp235,000,000	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Data kependudukan Yang di Sedaikan	34	Rp15,000,000	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	DUKCAPIL	**Jumlah Data kependudukan Yang di Sedaikan**	34	**Rp15,000,000**	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	34	Rp15,000,000	**Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**	DUKCAPIL	**Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan**	34	**Rp15,000,000**	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di sediakan	91	Rp200,000,000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di sediakan	91	Rp200,000,000	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Rp100,000,000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Rp100,000,000	

	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Rp100,000,000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Rp100,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Rp20,000,000	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	DUKCAPIL	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	1	**Rp20,000,000**	
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Rp20,000,000	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Rp20,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	Jumlah profil kependudukan yang disusun	2	Rp63,600,000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	Jumlah profil kependudukan yang disusun	2	Rp63,600,000	
	Penyusunan Profil Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Pengelolaan Profil Kependudukan	2	Rp63,600,000	Penyusunan Profil Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Pengelolaan Profil Kependudukan	2	**Rp63,600,000**	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	DUKCAPIL	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	34	Rp33,600,000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	DUKCAPIL	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	34	**Rp33,600,000**	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhanyang Lain yang tersusun	120	Rp30,000,000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhanyang Lain yang tersusun	120	**Rp30,000,000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DUKCAPIL	Persentase Dokumen perencanaan dan penganggaran yang mendukung Kesinambungan Pembangunan	100	Rp1,959,350,271	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	DUKCAPIL	**Persentase Dokumen perencanaan dan penganggaran yang mendukung Kesinambungan Pembangunan**	100	**Rp1,959,350,271**	

	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	Rp30,750,271	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	Rp30,750,271	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkaT Daerah	4	Rp15,750,271	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkaT Daerah	4	Rp15,750,271	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp15,000,000	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	DUKCAPIL	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	4	**Rp15,000,000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Rp1,520,000,000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DUKCAPIL	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**	100	**Rp1,520,000,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DUKCAPIL	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp1,520,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DUKCAPIL	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp1,520,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	Rp40,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	Rp40,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DUKCAPIL	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp15,000,000	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	DUKCAPIL	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	1	**Rp15,000,000**	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Rp25,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Rp25,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	13	Rp101,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	13	Rp101,000,000	
	Pengadaan Mebel	DUKCAPIL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Rp20,000,000	Pengadaan Mebel	DUKCAPIL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Rp20,000,000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DUKCAPIL	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Rp30,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DUKCAPIL	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Rp30,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DUKCAPIL	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp51,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DUKCAPIL	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp51,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DUKCAPIL	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	Rp222,600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DUKCAPIL	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	Rp222,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Rp90,000,000	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Rp90,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Rp132,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Rp132,600,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DUKCAPIL	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	Rp45,000,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DUKCAPIL	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	100	**Rp45,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DUKCAPIL	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Rp45,000,000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	DUKCAPIL	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	5	**Rp45,000,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEENTINGAN TAHUN 2024

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	12
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DUKCAPIL	Persentase Dokumen Pendaftara Penduduk yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100	100	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan	19500	19500	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Penataan Pendafatran Penduduk yang di sediakan	20000	20000	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	20000	20000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang di sediakan	20000	20000	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	19500	19500	
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1	1	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DUKCAPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	C	C	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil yang di sediakan dan terbitkan	10000	10000	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	1	

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	10000	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang di sediakan	10100	10100	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	1	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang disediakan	1	1	
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	1	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	32	32	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Data kependudukan Yang di Sedaikan	34	34	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	34	34	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di sediakan	91	91	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	

Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	1	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DUKCAPIL	Jumlah profil kependudukan yang disusun	2	2	
Penyusunan Profil Kependudukan	DUKCAPIL	Jumlah Pengelolaan Profil Kependudukan	2	2	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	DUKCAPIL	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	34	34	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhanyang Lain yang tersusun	120	120	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DUKCAPIL	Persentase Dokumen perencanaan dan penganggaran yang mendukung Kesinambungan Pembangunan	100	100	
Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkaT Daerah	4	4	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DUKCAPIL	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DUKCAPIL	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	100	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DUKCAPIL	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DUKCAPIL	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	13	13	
Pengadaan Mebel	DUKCAPIL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DUKCAPIL	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DUKCAPIL	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DUKCAPIL	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DUKCAPIL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DUKCAPIL	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DUKCAPIL	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan nasional "***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Dengan upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan arah pembangunan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sedangkan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk itu, pemerintah kabupaten Mamuju Tengah harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Poin 6 Misi Bupati dan Wakil Bupati defenitif, maka perlu di jabarkan dalam Renja untuk menjadi tujuan dan sasaran yang lebih operasional yang di tuangkan dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- **Tujuan :**
  1. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
  2. Meningkatnya Tata Kelola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- **Sasaran :**
  1. Terpenuhinya pelayanan kependudukan
  2. Terpenuhinya pelayanan Pencatatan Sipil
  3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan padA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, direncanakan akan dilaksanakan beberapa Program dan Kegiatan dengantotal alokasi dana sebagaimana

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 ialah sebesar **Rp. 3.335.597.686** Program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lainsebagai berikut :

1. **Anggaran Belanja Terdiri Dari**
   A. Belanja tidak langsung
   B. Belanja langsung
   C. Gaji dan tunjangan pegawai

PROGRAM/KEGIATAN

2

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Penataan Pendaftaran Penduduk

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Sipil

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Penyusunan Profil Kependudukan

Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Sekretariat

1. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran yang bertanggung jawab.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang lebih baik.

b. Bidang Pendaftaran Penduduk

1. Penyusunan produk hukum daerah sebagai turunan dari produk hukum induk yang mengatur tentang administrasi kependudukan, cetak blanko KK dan KTP, serta jasa layanan.
2. Meningkatkan pemahaman Operator, register, dan Supervisor serta pengelola SIAK mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten mengenai tata aturan administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan kualitas data, jaminan keamanan data yang dihimpun.
4. Menyelenggarakan pelayanan pendaftaranan penduduk dengan mengacu pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi hukum yang mengatur tentang administrasi kependudukan beserta perubahannya.
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendaftaran penduduk bagi petugas , supervisor, registrar dan operator.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk meminimalisir pelanggaran administrasi kependudukan melalui sweeping KK / KTP di masyarakat.
7. Penyajian dan pendayagunaan hasil pendayagunaan hasil pendaftaran penduduk dalam pengelolaan administrasi kependudukan untuk pelayanan publik guna pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Menyediakan blanko akta-akta catatan sipil.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang membuat akta-akta catatan sipil sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008.

3. Menertibkan pembukuan akta-akta catatan sipil.
4. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan langsung akta-akta catatan sipil di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Meningkatkan pengelolaan arsip akta-akta catatan sipil.
6. Memberikan layanan informasi tentang akta-akta catatan sipil secara prima

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Data dan Informasi

1. Melengkapi/menambah/mengganti perangkat komputer dan jaringan program SIAK sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
2. Memelihara/merawat perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat di fungsikan dalam pemrosesan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
3. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola perangkat SIAK dan jaringan tehnologi informasi.
4. Menyediakan back up data dan memelihara data base kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Menyediakan data base kependudukan dan Pecatatan Sipil yang steril dari virus/updating data.
6. Memberi dan mencabut hak akses supervisor dan operator kecamatan.
7. Memberikan format contoh blanko laporan kependudukan bulanan dan triwulan dan mensosialisasikan sampai tingkat yang paling bawah.
8. Mengintensifkan pengumpulan laporan kependudukan bulanan dan triwulan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kabupaten.
9. Mengevaluasi dan menganalisa hasil laporan kependudukan.
10. Memonitor pelaksanaan sistem administrasi kependudukan baik itu prosedur pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil ditingkat Desa dan Kecamatan.
11. Memberikan Reward bagi pengumpul laporan terbaik dan tercepat di tingkat RT dan RW.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MAMUJU TENGAH

TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.774.198.767,00	2.378.476.750,18	2.900.737.095,00					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.774.198.767,00	2.378.476.750,18	2.900.737.095,00					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.774.198.767,00	2.378.476.750,18	2.900.737.095,00					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	1.359.198.767,00	1.345.154.054,18	1.810.521.399,00					

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA Perubahan Jumlah dokumen evaluasi kinerja Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen perencanaan PD Jumlah Dokumen RKA-PD Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	100.000.000,00	37.767.166,00	37.767.166,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	19.938.786,00	14.568.786,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	17.828.380,00	13.828.380,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara Jumlah laporan yang tersedia	13 Dokumen 13 Orang 1 Dokumen	13 Dokumen 13 Orang 1 Dokumen	959.000.000,00	1.020.872.497,18	1.020.872.497,18					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	900.000.000,00	1.020.872.497,18	1.417.609.842,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya yang diadakan Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan Tusi Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlsh tamu yang difasilitaasi	1500 Dokumen 1 Orang 3 Unit 440 Orang 5 Orang 80 Set	1500 Dokumen 1 Orang 3 Unit 440 Orang 5 Orang 80 Set	65.000.000,00	0,00	0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlsh tamu yang difasilitaasi	1500 Dokumen 3 Unit 440 Orang	1500 Dokumen 3 Unit 440 Orang	30.000.000,00	39.329.500,00	39.329.500,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	15.329.500,00	15.329.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang disediakanjumlah Mebel yang diadakanJumlah Peralatan yang disediakanJumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	20 Unit2 Unit3 Unit5 Unit	20 Unit2 Unit3 Unit5 Unit	105.000.000,00	50.501.683,00	50.501.683,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Mebel											
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.501.683,00	50.501.683,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah satuan listrik yang di pakai Jumlah surat yang dikelola	1000 Surat 34269 KWh 3 Orang	1000 Surat 34269 KWh 3 Orang	80.198.767,00	142.703.658,00	142.703.658,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.198.767,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	88.103.658,00	88.103.658,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	54.600.000,00	132.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaran kendaran dinas yang dipeliharan	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	53.979.550,00	53.979.550,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	53.979.550,00	53.979.550,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK	97 %	97 %	525.000.000,00	354.260.488,00	407.660.488,00					
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dilayani dari pelayanan kelilingJumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkanJumlah Dokumen Perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkanJumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	18000 Dokumen400 Dokumen4370 Dokumen5500 Dokumen	18000 Dokumen400 Dokumen4370 Dokumen5500 Dokumen	220.000.000,00	41.125.000,00	41.125.000,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	18000 Dokumen	18000 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											

		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4370 Laporan	4370 Laporan	50.000.000,00	41.125.000,00	18.925.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5500 Dokumen	5500 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk yang diadakan	40000 Set	40000 Set	50.000.000,00	40.090.200,00	40.090.200,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan											
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	40000 Dokumen	40000 Dokumen	50.000.000,00	40.090.200,00	40.090.200,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yangmengikuti Sosialisasi Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen pendaftaran penduduk dari peristiwa penting yang diterbitkan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang dikoordinasikan dalam kerjasama layanan pendaftaran penduduk Jumlah peralatan fasilitasi pendaftaran penduduk yang dipilhara	3444 Dokumen 3 Media 50 Orang 7 Lembaga 7 Unit	3444 Dokumen 3 Media 50 Orang 7 Lembaga 7 Unit	235.000.000,00	273.045.288,00	273.045.288,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk											

		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3444 Dokumen	3444 Dokumen	50.000.000,00	85.200.000,00	160.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	187.845.288,00	187.845.288,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	50000 Orang	50000 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase rata-rata kepemilikan Dokumen pencatatan sipil	85 %	85 %	475.000.000,00	312.426.883,00	354.226.883,00					
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta pencatatan sipil yang diterbitkan Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada pelayanan keliling Jumlah Formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil yang diadakan	2500 Dokumen 65000 Set 700 Dokumen	2500 Dokumen 65000 Set 700 Dokumen	195.000.000,00	103.055.875,00	103.055.875,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7000 Dokumen	7000 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil											
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	1 Layanan	70.000.000,00	41.125.000,00	20.525.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan											

		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	61.930.875,00	61.930.875,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah aparat desa dan aparat lainnya yangmengikuti Sosialisasi Pencatatan sipil jumlah dokumen pencatatan sipil dari peristiwa penting yang diterbitkan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang dikerjasamakan berhubungan dengan penerbitan akta pencatatan sipil Jumlah peralatan fasilitasi pencatatan sipil yang dipilhara	2890 Dokumen 3 Lembaga 3 Media 50 Orang 7 Unit	2890 Dokumen 3 Lembaga 3 Media 50 Orang 7 Unit	260.000.000,00	209.371.008,00	209.371.008,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil											

		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil											
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	51.600.000,00	114.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	157.771.008,00	157.771.008,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil											
		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil											

		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	50000 Orang	50000 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang pencatatan sipil mengikuti bimtek	5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil											
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	85 %	85 %	350.000.000,00	269.435.325,00	197.528.325,00					
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Bahan Dokumen Database Kependudukan Skala Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	15.999.325,00	15.999.325,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	15.999.325,00	15.999.325,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Manual Pelayanan Jumlah jenis Media yang digunakan Jumlah Lembaga yang pemerintah dan non pemerintah yang di koordinasikan dalam kerja sama penebitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah Pengadaan peralatan SIAK Jumlah Peserta Sosialisasi PIAK	12 Dokumen 16 Unit 3 Media 45 Lembaga 50 Peserta	12 Dokumen 16 Unit 3 Media 45 Lembaga 50 Peserta	270.000.000,00	228.496.000,00	228.496.000,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	142.314.000,00	70.407.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	86.182.000,00	86.182.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat											
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pegawai PIAK yang mengikuti Bimtek terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	8 Orang	8 Orang	30.000.000,00	24.940.000,00	24.940.000,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan											

		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	24.940.000,00	24.940.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Buku Profil Kependudukan yang tersedia di lembaga yang dikerjasamakan	100 %	100 %	65.000.000,00	97.200.000,00	130.800.000,00					
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang di cetak Jumlah dokumen bahan buku profil kependudukan	114 Exampler 16 Dokumen	114 Exampler 16 Dokumen	65.000.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota											
		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	16 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000,00	67.200.000,00	100.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain											
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Alokasi Umum (DAU)			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.774.198.767,00	**2.378.476.750,18**	**2.900.737.095,00**					

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPDdisusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepadaRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Defenitif, diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTahun Anggaran 2025 inimerupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD, dandiharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh,agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Kerja ini secara umum menguraikanprogram dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta indikator kinerja untuk program yangdinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan tugaspokokdanfungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terlaksana dalam upayameningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasipelaksanaan kegiatan program Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotakhususnya dan dapat mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025.

Sangat disadari bahwa penulisan Renja ini jauh dari kesempurnaan, olehnya itu dengan segala kerendahan hati, kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kelengkapannya.

Tobadak, Agustus 2025
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

HASANUDDIN HW, S.Ag.,M.Si
Nip : 19750608 2010141003

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

DINAS PERHUBUNGAN

Perunahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

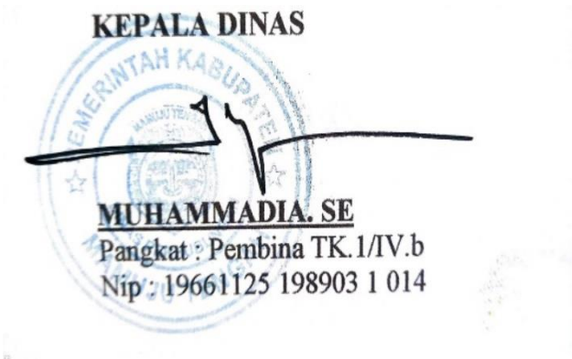
Renja ini, yang secara formal merupakan rujukan utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah, mengangkat Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah . Dengan Visi dan Misi ini diharapkan dukungan sarana prasarana transportasi dan layanan transportasi yang nyaman dan berkelanjutan dapat diwujudkan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah.

Untuk mewujudkan tersebut, beberapa program kerja ditetapkan dalam Renja ini, dengan beberapa program diharapkan masyarakat dapat mengakses transportasi dengan nyaman, dalam arti selamat, aman, lancar, tertib dan teratur.

Demikian dokumen Renja ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak.

Tobadak, September 2025

KEPALA DINAS



MUHAMMADIA. SE
Pangkat : Pembina TK.1/IV.b
Nip : 19661125 198903 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I. PENDAHULUAN **3**

1.1. Latar Belakang. 3

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 15

1.4. Sistematika Penulisan 15

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **17**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 17

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32

2.4. Review terhadap Rencana Kerja RKPD 34

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **48**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49

3.3. Program dan Kegiatan 51

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **65**

4.1 Program dan Kegiatan 65

BAB V. PENUTUP **75**

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir dan;
f. Penetapan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

I.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

I.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD Tahun 2025 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

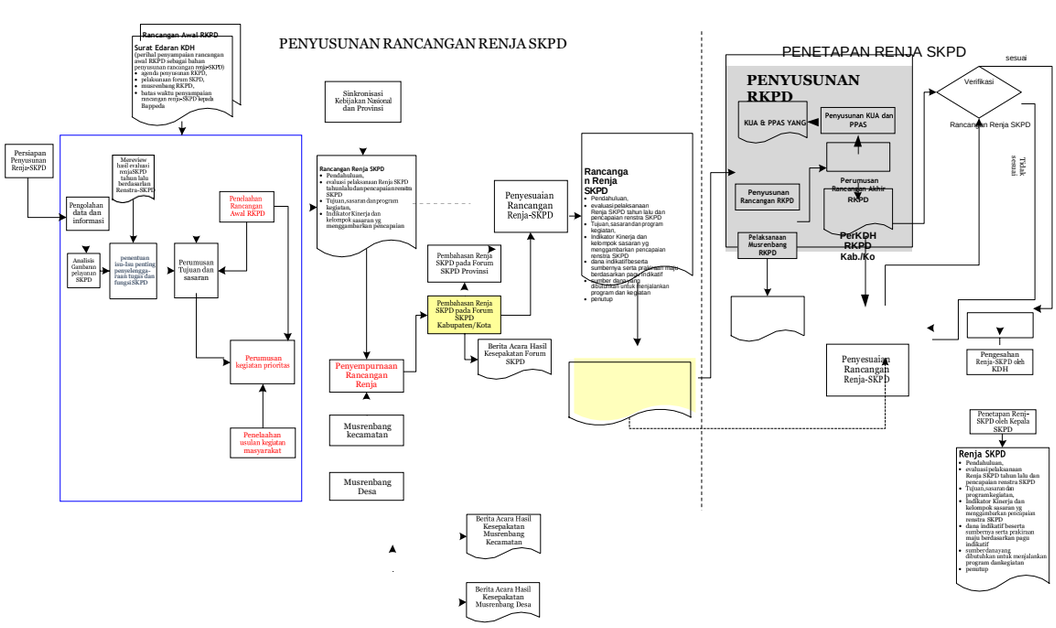
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Kerja PD



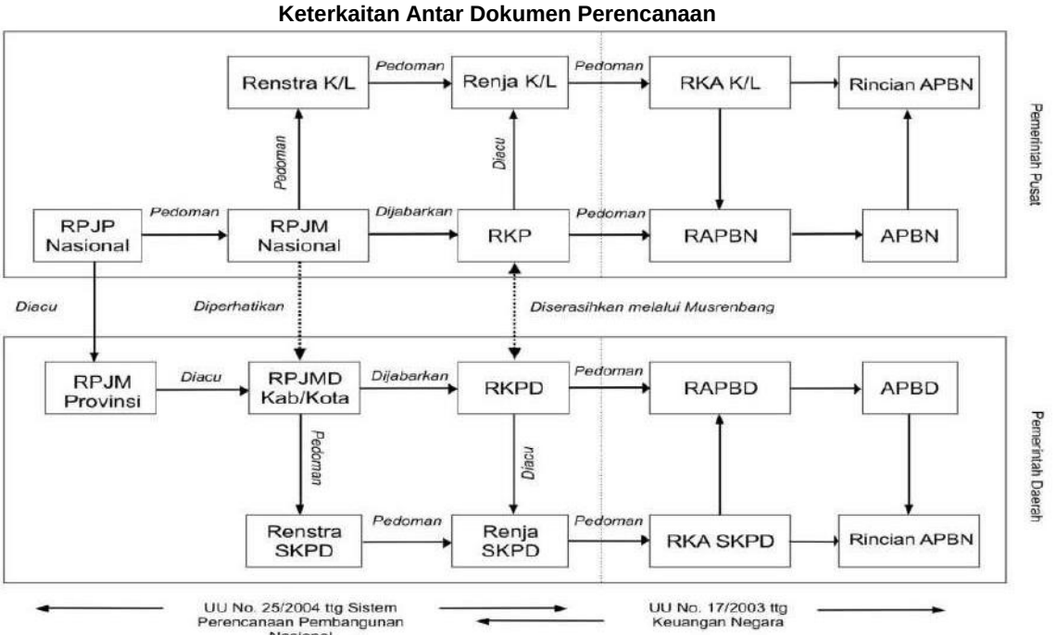
I.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 – 2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -2024 dan RPJMN Tahun 2020 -2024, di mana RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2021 -2026 sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah.

Pada lingkup pemerintahan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-undang nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah propinsi Sulawesi Barat.
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang nomor 38 tahun 2007 tentang jalan
7. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
8. Undang-undang nomor 17 tentang pelayaran
9. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kierja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
14. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 HasiL Veri fikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Bupati Mamuju No. 24 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju Tengah

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
2. Peraturan WaliKabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris Dinas, membawahi;
    1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian.
c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi;
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Angkutan;
    3. Seksi pengujian Sarana.
d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi;
    1. Seksi Prasarana;
    2. Seksi Keselamatan;
    3. Seksi Pengembangan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam menyelenggarkan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan;
b. Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan program kerja pada Dinas Perhubungan sesuai dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Membina bawahan dalam pelaksanaan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan perhubungan;
c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi program kerja yang ada pada Dinas Perhubungan kepada lintas sektor terkait guna kelancaran pelaksanaan program kerja dan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan perhubungan;
d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja yang telah disusun agar dapat mengetahui capaian kinerja;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan hasil evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretaris Dinas

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas Perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Koordinasi rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelporan dinas Perhubungan;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Penyusunan koordinasi peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh, Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksana urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja;
b. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan;
c. Penyusun rencana anggaran dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. Memantau dan mengawasi kegiatan bawahan;
d. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
e. Mengevaluasi dan menilai hasil/prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan di bagian perencanaan dan Keuangan;
g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan dan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan dengan fungsi-fungsi lain di lingkup Dinas.
i. Mengendalikan rencana kinerja tahunan;
j. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Dinas meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas;
k. Menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
m. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Kinerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas meliputi bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, laporan realisasi fisik kegiatan setiap bulan, dan laporan insidentil lainnya berkaitan dengan kegiatan Dinas;
o. Menyusun laporan keuangan akhir tahun Dinas ;

p. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran (PA);
q. Melaksanaan kegiatan meneliti dan mengoreksi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
r. Melaksanakan verifikasi terhadap SPP UP, GU, TU, LS dan LS gaji yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
s. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
t. Membuat laporan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

(1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan Umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian dan umum mempunyai fungsi:
    a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan kepangkatan, promosi jabatan dan pengembangan SDM melalui Diklat;
    b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pendistribusian surat serta pengarsipan;
    c. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pemeliharaan barang/perlengkapan dinas.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan(2), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai uraian tugas :
    a. Menyusun program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum.
    b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
    c. Memantau dan mengawasi kegiatan bawahan;
    d. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
    e. Mengevaluasi dan menilai hasil/prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
    f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kepegawaian dan umum;
    g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub bagian Kepegawaian dan Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepegawaian dan umum dengan fungsi-fungsi lain di lingkup Dinas;
    i. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian dan umum, kearsipan, serta perlengkapan dan aset;
    j. Mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat;

k. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
l. Membuat laporan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

(1) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan.

(2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian sarana;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu lintas, Angkutan dan Pengujian sarana;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian sarana; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan(2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai uraian tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan renja;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
c. Melaksanakn pembinaan teknis operasional di bidang lalu Lintas dan Angkutan;
d. Menyiapkan bahan penetapan jaringan Jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
e. Melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang Angkutan;
f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang lalu Lintas dan Angkutan, serta menyajikan alternative pemecahannya;
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
i. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pengujian Sarana

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal

(1) Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas membantu kepala bidang lalu Lintas dan angkutan untuk melakukan urusan pembinaan, kelancaran, keamanan keselamatan Lalu Lintas dan pemakai jalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan data/Informasi sebagai bahan penyusunan ranwal;
b. Pengumpulan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional urusan lalu Lintas;
c. Pelaksanaan pembinaan, kelancaran, keamanan, keselamatan Lalu Lintas dan pemakaian jalan;
d. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penetapan jaringan jalan dan perlengkapan jalan;
e. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penetapan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Lalu Lintas.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan(2), Seksi Pengujian Sarana mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengujian sarana perhubungan daerah Kabupaten Mamuju TengahTahapan :
   1) Menghimpun data dan informasi;
   2) Mengolah dan menganalisis data dan informasi;
   3) Menyusun rencana kegiatan sesuai sasaran indikator kinerja yang ditetapkan dilingkungan kerja dinas;
b. Melaksanakan kebijakan pengujian sarana perhubungan daerah kabupaten Mamuju tengah Tahapan :
   1) Melaksanakan analisis data pengujian sarana di lingkungan dinas;
   2) Menyusun kerangka acuan kegiatan dan rencana atau penetapan kebutuhan anggaran kegiataan perawatan prasarana;
   3) Mengusulkan dan memproses pengadaan pengujian sarana di lingkungan kerja dinas;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengujian berkala kendaraan bermotor dan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal daerah Kabupaten Mamuju TengahTahapan :
   1) Mengevaluasi program kegiatan seksi pengujian sarana yang sudah dilaksanakan tahun yang lalu;
   2) Meneliti dan mengevaluasi dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang

dipersyaratkan pada pelaksanaan program kegiatan seksi pengujian sarana;

3) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan

d. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya; Tahapan :

1) Menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
2) Menentukan standar kualitas dan/atau kuantitas hasil kerja;
3) Mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Tahapan :

1) Mengkaji usulan kebutuhan dan pengadaan pengujian sarana di lingkungan dinas;
2) Mereview hasil analisis indikator kinerja program dan kegiatan pengujian sarana di lingkungan dinas;
3) Merumuskan konsep pertimbangan teknis penetapan kegiatan pengujian sarana di lingkungan dinas.
4) Koordinasi/konsultasi dokumen/laporan/berkas dan pelaporan;

g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahapan :

1) Menerima dan meneliti usulan penandatanganan dokumen SKP;
2) Memverifikasi dan menilai dokumen SKP sesuai prestasi kinerja, perilaku kerja dengan obyektif, terukur, akuntabel dan efektif;
3) Menandatangani dan menyerahkan hasil penilaian SKP yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan agar di diproses lebih lanjut

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Angkutan

(1) Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi danpelaporan di bidang penyediaan angkutan umum unutk jasa angkutan orang dan/barang dalam daerah kabupaten/kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu daerah kabupaten/Kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), seksi Angkutan, mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan data/informasi sebagai bahan penyusunan renja;
b. Pengumpulan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional urusan angkutan;
c. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan angkutan;
d. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang angkutan;
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Angkutan;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan(2), Seksi Angkutan mempunyai urain tugas :

a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan renja;
b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis opersional urusan angkutan;
c. Melakukan pembinaan dan pengendalian perusahaan angkutan;
d. Melakukan pelayanan teknis usaha Trayek angkutan;
e. Melakukan pengkajian tarif angkutan pedesaan;
f. Menyiapakan dat/informasi sebagai bahan penetapan dan pengevaluasian jaringan trayek angkutan serta komposisi kendaraan;
g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan angkutan, serta menyajikan alternative pemecahannya;
h. Mendistribusikantugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Peraturan-peraturanyang terkait dengan perencanaan dan penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.2.3 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

I.2.4 Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah tidak masuk dalam program yang tercantum dalam MDG's.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

I.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

I.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang.
1.6. Landasan Hukum.
1.7. Maksud dan Tujuan.
1.8. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.7. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.8. Review terhadap Rencana Kerja RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.6. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2025. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 2.715.618.997 (Dua Milyar Tujuh Ratus lima Belas Juta Enam ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau dengan realisasi triwulan II dengan anggaran Rp. 1.258.103.491 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Ribu Empat ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 46% Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Perhubungan Tahun 2025 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka menunjang urusan pemerintah Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah dengan Indikator Kinerja presentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target program sebesar 100% dengan Realisasi Program sebesar 46%. Program ini terdiri atas 7 (Tujuh) Kegiatan 9 (sembilan) Sub Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung urusan internal Dinas Perhubungan yang bersifat rutin. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 16 (Enam belas) Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.890.827.582, terealisasi sebesar Rp. 756.175.731,- (39%). Anggaran yang tersedia ini untuk kebutuhan 7 (Tujuh) Kegiatan 23 (Dua puluh Tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

      Kegiatan ini terdiri atas 7 (Tujuh) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan perencanaan yang bersifat rutin sebagai berikut:

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini di capai dengan indicator output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan dengan capaian indikator kinarja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 33.077.731,- terserap sebesar Rp. 29.705.248,- atau sebesar 89%. Permasalahan yang dihadapi adanya gaji tenaga honorer tidak dibayarkan karena tidak masuk Kantor. semetara untuk kegiatan rutin ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator output Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 10.050.344,-terserap sebesar Rp. 0- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi masi kurangnya dana solusinya penambahan dana.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp.24119.949,- terserap sebesar Rp 0,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi masi kurangnya dana solusinya penambahan dana.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian indicator kinerja 100 % dengan anggaran Rp. 19.313.536 ,- terserap sebesar Rp. 0,- atau sebesar 90%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian indicator kinerja 100 % dengan anggaran Rp. 72.470 519,- terserap sebesar Rp. 0,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini belum ada yang mendasar hanya perubahan harga di alat tulis dengan solusi efisien penggunaan anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 24438.724,- terserap sebesar Rp. 23.868.596,- atau sebesar 87%. Permasalahan untuk sementara ini masih kuranya Bimbingan Teknis terkait dokumen pelaporan solusinya untuk mengefektifkan kegiatan ini yaitu penambahan anggaran.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp 0 terserap sebesar Rp. 0,- atau sebesar 95%. Permasalahan yang dihadapi untuk semetara ini masih terbatasnya data untuk mengefektifkan kegiatan ini yaitu penambahan anggaran.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan berfungsi untuk mendukung kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 1.269.918.585,- terserap sebesar Rp.

513.827.168,- atau sebesar 40%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian kinerja 100% dengan anggaran Rp. 39.574.936,- terserap sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Peremasalahan yang dihadapi untuk sementara ini belum ada sangat mendasar, hanya perubahan harga barang solusinya efisien pengguna anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan anggaran Rp. 41.248.078,- terserap sebesar Rp. 34.987.439,- atau sebesar 84%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara ini belum ada.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan administrasi kepegawaaian perangkat daerah diantaranya sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan anggaran Rp. 5.000.000,- terserap sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara ini belum ada.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan capaian indikator sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- terserap sebesar Rp.0- atau sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi adanya perubahan harga barang solusi efisien pengguna anggaran.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 5.928.120,- terserap sebesar Rp. 961.000,- atau sebesar 98%. Permasalahan yang dihadapi adanya perubahan harga barang dengan solusi efisien pengguna anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian indicator sebesar 100%

dengan pagu anggaran sebasar Rp. 2.200.000,- serapan sebesar Rp1.200.000- atau sebesar 54%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian indicator 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.409.850,- terserap sebesar Rp. 43.524.800,- atau sebesar 95%. Permasalahan yang dihadapi kekurangan dana solusi untuk mengefektifkan kegiatan perlunya penambahan anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan dengan capaian indicator 100% dengan pagu sebesar Rp. 138.497.240,- serapan sebesar Rp. 47.998.620,- atau sebesar 34%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara tidak ada.
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dengan capaian indicator 100% dengan pagu sebesar Rp. 106.928.430,- serapan sebasar Rp. 40.000.000,- atau sebesar 37%. Permasalahan yang dihadapi untuk sementara tidak ada.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2(dua) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian indikator sebesar 100% dengan pagu anggaran sebasar Rp. 10.251.760,- serapan sebesar Rp. 3.652.500,- atau sebesar 35%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah orang yang terbayarkan dengan capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.600.000,- serapan sebesar Rp. Rp. 7.800.000,- atau 50%. Permasalah yang dihadapi untuk sementara tidak ada.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2(dua) sub kegiatan yang mendukung kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat rutin diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini dicapi dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya indicator capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.406.500,- serapan sebesar Rp. 3.650.000,- atau sebesar 29%. Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya kegiatan ini dicapai dengan jenis peralatan kerja yang diperbaiki.dan dibayarkan pajaknya indicator capaian kinerja 100 % dengan pagu anggaran Rp. 8.393.000 dengan serapan sebesar Rp. 0., atau sebesar 100% Permasalahan perubahan harga dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan dengan Indikator Kinerja Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota dengan target program sebesar 100% dengan Realisasi Program sebesar 99%. Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan 4 (empat) Sub Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung urusan urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) Sub Kegiatan ini sebesar Rp 824.791.415., terealisasi sebesar Rp. 501.927.760,- (60,86%). Anggaran yang tersedia ini untuk kebutuhan 3 (tiga) Kegiatan 4 (empat Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan kabupaten/kota. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Operasi Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan kebijakan Jalan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.107.125.000, serapan sebesar Rp. 106.225.000,- atau sebesar 99%. Permasalahan yang dihadapi untuk saat ini belum ada.
   - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dicapi dengan indicator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.0, serapan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%. Permasalahan yang dihadapi untuk saat ini belum ada.

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator \ yang Tersedia dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 717.666.415, serapan sebesar Rp.395.702.760,-

atau sebesar 55%. Permasalah yang dihadapi untuk sementara tidak ada .

c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator yang Tersedia dengan capaian indicator sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 0, serapan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Permasalah yang dihadapi untuk sementara tidak ada .

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Perhubungan masih banyak kekuarangan dikarenakan kurangnya anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 95% dapat dikatakan dalam kategori sebagian berhasil.

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI SULAWESI, KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (000)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (000)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	
1	2	3	4	5	6,000	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar									
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**				2.262.720.215	2.127.672.094		3.487.534.956		
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**4.594.019.466**	**179.190.309**	**439.397.644**	**349.306.387**	**79%**	**1.074.758.000**	**1.603.254.696**	**35%**
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**3.444.550.340**	**37.989.335**	**287.690.688**	**201.519.431**	**70%**	**834.000.000**	**1.073.508.766**	**31%**
2.15.02.2.02.0001	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3.444.550.340**	**37.989.335**	**287.690.688**	**201.519.431**	**70%**	**834.000.000**	**1.073.508.766**	31%
	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)	Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	2.852.000.000	0	249.887.650	163.716.467	**66%**	690.000.000	853.716.467	30%

	pengadaan Rambu-rambu	Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	592.550.340	37.989.335	37.803.038	37.802.964	**100%**	144.000.000	219.792.299	37%
2.15.02.2,06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**1.149.469.126**	**141.200.974**	**151.706.956**	**147.786.956**	**97%**	**240.758.000**	**529.745.930**	46%
2.15.02..2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.149.469.126	141.200.974	151.706.956	147.786.956	97%	240.758.000	529.745.930	46%
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.292.775.779**	**1.891.834.495**	**1.823.322.571**	**1.778.365.707**	**98%**	**2.412.776.956**	**4.517.754.452**	**40%**
2,15,01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**777.931.906**	**122.510.357**	**224.049.004**	**213.143.001**	97%	**167.183.156**	**502.836.514**	65%
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.690.156	19.243.000	38.246.156	37.065.653	97%	**39.157.156**	73.328.490	44%
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.481.350	6.974.879	16.428.334	14.928.334	98%	4.807.000	43.731.148	186%
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.913.400	6.798.634	32.249.269	31.949.269	95%	5.301.000	32.832.790	127%

2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	123.426.000	21.982.576	21.633.156	20.733.156	97%	25.858.000	124.255.071	101%
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25.653.000	8.104.054	81.339.995	76.414.495	91%	5.165.000	45.321.148	177%
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	166.314.000	24.549.000	34.152.094	32.052.094	99%	34.843.000	59.392.000	36%
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.454.000	34.858.214	-	-	0%	52.052.000	1.187.669.330	482%
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.588.084.518**	**1.263.626.115**	**1.121.510.343**	**1.100.759.116**	94%	**1.142.792.000**	**3.507.177.231**	**63%**
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.138.820.833	1.171.477.865	1.021.695.292	1.005.703.102	94%	1.053.204.000	2.269.389.314	44%
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	199.698.000	59.943.172	47.907.452	44.707.449	93%	39.699.000	149.990.737	75%

2,15,01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	249.565.685	32.205.078	51.907.599	50.348.565	98%	49.889.000	100.094.078	40%
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.290.295.727**	**19.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**98%**	**291.652.000**	**328.652.000**	**25%**
2.15. 01..2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	268.190.000	19.000.000	-	0	93%	66.061.000	103.061.000	38%
2.15.01..2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	765.305.727	0	18.000.000	18.000.000	97%	158.391.000	172.731.585	23%
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	256.800.000	0	-	0	100%	67.200.000	70.740.000	28%
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.246.805.441**	**202.948.867**	**209.883.234**	**203.731.423**	**97%**	**304.044.350**	**710.724.640**	**57%**
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27.076.000	0	-		#REF!	5.466.000	5.466.000	20%
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84.500.000	55.986.386	27.251.699	27.251.699	100%	17.500.000	100.738.085	119%

2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	126.498.721	19.713.986	20.402.885	14.340.585	97%	27.328.350	61.382.921	49%
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.500.000	3.000.000	3.540.000	3.540.000	100%	3.750.000	10.290.000	59%
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	991.230.720	124.248.495	158.688.650	158.599.139	100%	250.000.000	532.847.634	54%
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.264.000.000**	**216.184.240**	**202.925.670**	**202.925.667**	**70%**	**266.000.000**	**685.109.907**	**54%**
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	480.000.000	95.993.240	95.997.240	95.997.240	100%	96.000.000	287.990.480	60%
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	784.000.000	120.191.000	106.928.430	106.928.427	100%	170.000.000	397.119.427	51%
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500.434.065**	**29.002.500**	**25.856.320**	**24.093.500**	**100%**	**101.535.000**	**138.480.500**	**28%**
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	152.434.065	13.402.500	10.256.320	8.493.500	100%	31.935.000	53.831.000	35%

2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	348.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	100%	69.600.000	100.800.000	29%
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**625.224.122**	**38.562.416**	**21.098.000**	**15.713.000**	**93%**	**139.570.450**	**193.845.866**	**31%**
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	585.349.122	32.234.416	13.328.000	7.943.000	83%	131.595.450	171.772.866	29%
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39.875.000	6.328.000	7.770.000	7.770.000	100%	7.975.000	22.073.000	55%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan baik dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat kita gambarkan kinerjanya adalah terkait Indikator Kinerja Kunci Urusan pemerintah bidang perhubungan, sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pemerintah bidang perhubungan belum memiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan Pemerintahan Wajib Pendiidikan yaitu;

1. Kesehatan;
2. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
5. Sosial.

Sedangkan Layanan Urusan Wajib Non Dasar salah satu di dalamnya Urusan Perhubungan terkait Indikator Kinerja Kunci Urusan pemerintah Dalam hal ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Indikator Kinerja OPD Sesuai Permendagri No.18 tahun 2020

IKK Outcome		Target						Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota											
1	IK1 (angkutan jalan) = jumlah trayek yang dilayni (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	28,82%	32,94%	32,94 %	32,94%	32,94%	32,94%	28,82%	25,09%	57%	59%
2	IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	8,25%	8,25%	9,75 %	9,75 %	11,25%	11,25%	8,25%	12,00%	67%	67%
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota											
V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota		0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,50	0,50	0,602	0,614

No.	IKK Output	Target						Capaian			
		2021	2022	2024	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota											
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	33%	33%	34%	35%	37%	37%	33%	33%	0	0
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala										
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	5%	19%	19%	19%	19%	19%	5%	12%	24%	20%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan Dinas Perhubungan

Sesuai dengan peraturan Bupati Mamuju tengah No. 41 tahun 2016 bahwa Dinas Perhubungan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dengan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perhubungan;
b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Mamuju Tengah di Bidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kab. Mamuju Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi diatas, kinerja pelayanan Dinas difokuskan pada pelayanan teknis di bidang Perhubungan, yaitu pelayanan Parkir, Penyediaan Alat dan Perlengkapan jalan dan Keselamatan Jalan, yang dapat meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai wewenang:

a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam Kab. Mamuju Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
f. Penelitian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
g. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan sesuai dengan petunjuk Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas, Membawahi;

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;

2. Kepala Sub Umum Dan Kepegawaian.

c. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, Membawahi;

1. Kepala Seksi Lalu Lintas;

2. Kepala Seksi Angkutan;

3. Kepala Seksi Pengujian.

d. Kepala Bidang Prasarana Dan Keselamatan, Membawahi;

1. Kepala Seksi Prasarana;

2. Kepala Seksi Keselamatan;

3. Kepala Seksi Pengembangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3.2 Permasalahan terkait Isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Mamuju tengah adalah

1. Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar guna mendukung peningkatan kemandirian ekonomi daerah
2. Masih banyaknya muatan yang overload dan Over Dimensi
3. Mendorong terciptanya keselamatan lalu lintas jalan
4. Kurangnya Sarana Prasana Perhubungan
5. PKB (Belum adanya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Perubahan PAD Dinas Perhubungan

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, dengn visi yaitu “Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La’la Tassisara” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

Misi I : Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar

Mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Tercakup juga upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dl mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

Misi 4 : Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- **Kekuatan (Strenghs)**

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

- **Kelemahan (weaknesses)**

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang perhubungan
3. Tidak adanya Regulasi Tentang Tunjangn Lauk Pauk Petugas LLAJ
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

- **Peluang (Opportunity)**

1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari Bupati dan wakil Bupati terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan *stake holder* lainnya

- **Tantangan (threat)-**

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik
3. Belum Jelasnya ketetapan Peraturan RTRW yang terbaru
4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kelancar lalu lintas
5. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas
6. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal Tabel Tc-31 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
b. Penyediaan gedung pengujian
c. Penyediaan Sarpras pengaman dan pengendali lalu lintas
d. Optimalisasi manajemen Rekayasa lalu lintas

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah tidak berbeda dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan menjadi usulan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Mamuju Tengah sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasiasosiasi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ringkasan kegiatan terkait akomodasi MUSRENG dan POKIR, sebagai berikut:

a. Musrembang Kecamatan

Jumlah Usulan MUSRENG Terkait Tupoksi Dishub : 14 Usulan

➢ Jumlah Usulan MUSRENG Ditolak : 9 Usulan

➢ Jumlah Usulan diakomodir dalam Kegiatan : 3 Usulan

➢ Ket : 9 Usulan terkait tidak bisa di akomodir karena pagu anggaran tidak mencukupi Dengan rincian usulan sebagai berikut : Pengadaan LPJU, tambatan Perahu, dan Micro bus

b. POKIR

Jumlah Usulan Pokir Terkait Tupoksi Dishub : 5 Usulan

➢ Jumlah Usulan MUSRENG Ditolak : 0 Usulan

➢ Jumlah Usulan diakomodir dalam Kegiatan : 3 Usulan

➢ Ket : 2 Usulan terkait tidak bisa di akomodir karena bukti dukung lokasi tidak lengkap

Dengan rincian usulan sebagai berikut : Pengadaan LPJU, Pengadaan Pincara

Usulan Prioritas Perangkat Daerah tahun 2024								
Dinas Perhubungan								
No	**Usulan**	**Volume**		**Pagu**		**sumber usulan**		
						Usulan Kecamatan	**Pokir**	
1	**Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas**	**10**	**unit**	**2.500.000**	**25.000.000**	**Tobadak 3,**		
2	**Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas**	**5**	**unit**	**2.500.000**	**12.500.000**	**Topoyo**		
3	**Pengadaan LPJU**	**20**	**unit**	**18.000.000**	**360.000.000**		**desa waeputeh**	**SYAHRIL R**

4	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		dusun bajiminasa-desa pontanakayyang	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
5	Pengadaan LPJU	10	unit	18.000.000	180.000.000		barakkang	HAMKA.S.PDI
6	Pengadaan Perahu penyeberangan	2	unit	100.000.000	200.000.000		batu parigi/tobadak	SUKRI
7	Pengadaan LPJU	100	unit	18.000.000	1.800.000.000		mahahe-batu parigi	AGUS SETIAWAN
8	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		kec. Topoyo	SYAHRIL R
9	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		salugatta	HERLINA
10	Pengadaan LPJU	70	unit	18.000.000	1.260.000.000		desa bojo	ELVIS
11	Pengadaan LPJU	120	unit	18.000.000	2.160.000.000		pontanakayyang	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
12	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		desa tinali	HERLINA
13	Pengadaan LPJU	70	unit	18.000.000	1.260.000.000		Desa mahahe - desa parigi	AGUS SETIAWAN
14	Pengadaan LPJU	20	Unit	18.000.000	360.000.000		Desa Barakkang	HAMKA.S.PDI
15	Pengadaan LPJU	20	Unit	18.000.000	360.000.000		babana ke desa kire	HERLINA
16	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		desa tinali	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
17	Pengadaan LPJU	20	unit	18.000.000	360.000.000		desa kire	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
18	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		desa bojo	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
19	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		desa lemba hada	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
20	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		desa pasapa	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
21	Pengadaan LPJU	25	unit	18.000.000	450.000.000		jalan desa kire	ALAMSYAH ARIFIN, A.md.KEP
22	Pembangunan Tambatan Perahu	1	unit	500.000.000	500.000.000	Topoyo, dusun tumbu		
23	Pengadaan LPJU	7	unit	18.000.000	126.000.000	Desa Salugatta		
24	Pengadaan LPJU	10	unit	18.000.000	180.000.000	Desa tumbu		
25	Pengadaan LPJU	12	unit	18.000.000	216.000.000	dusun jaya mandiri, dusun rawa mangun kec. Topoyo		
26	Pengadaan LPJU	10	unit	18.000.000	180.000.000	dusun suka damai, dusun suka makmur Desa kayu calla		
27	Pengadaan LPJU	5	unit	18.000.000	90.000.000	dusun salibiro dan dusun bendungan		
28	Pengadaan Zonz Selamat Sekolah	1	Paket	60.000.000	60.000.000	Desa Barakkang		
29	Pengadaan LPJU	40	unit	18.000.000	720.000.000	tobadak 3, palongaan		
30	Pengadaan LPJU	15	unit	18.000.000	270.000.000	desa lara		

31	**Pengadaan LPJU**	**17**	**unit**	**18.000.000**	**306.000.000**	**Bina makmur-dusun sipodeceng, tobadak**		
32	**Pengadaan LPJU**	**20**	**unit**	**18.000.000**	**360.000.000**	**dusun mario, polo pangale**		
33	**Pengadaan LPJU**	**40**	**unit**	**18.000.000**	**720.000.000**	**desa kuo ke desa sejati**		
34	**Pengadaan LPJU**	**40**	**unit**	**18.000.000**	**720.000.000**	**Polo pangale, kombiling, sartanamaju kec pangale**		
35	**Pengadaan LPJU**	**20**	**unit**	**18.000.000**	**360.000.000**	**Desa Salupangkang IV**		
36	**Pengadaan LPJU**	**200**	**unit**	**18.000.000**	**3.600.000.000**	**karama, Desa Pangale**	**PRIORITAS JALAN NASIONAL**	
total					**20.435.500.000**			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar peneyelenggaraan kinerja Pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional, Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Arah Kebijakan :
   - Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
   - Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
   - Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
   - Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
   - Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
   - Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
   - Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.
2. Prioritas Nasional 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan Arah kebijakan :
   - Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
   - Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
   - Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

a.Tujuan

Tujuan Strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan Strategi ini maka

Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

NO	SASARAN
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik
2	Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan
3	Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Kabupaten Mamuju Tengah
4	Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kab. Mamuju Tengah
5	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah adalah :

	TUJUAN
	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan professional
	Meningkatkan infrastruktur Perhubungan
	Mewujudkan keselamatan, keamanan dankenyamanan berlalu lintas dalam Kab. Mamuju Tengah
	Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kab. Mamuju Tengah
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pada Dinas Perhubungan

d. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan mengacu

pada :

- Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengah.

  Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 maka tema visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Mamuju Tengah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Visi :" Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La'la Tassisara	**Misi I : Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar** *Mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Tercakup juga upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dl mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.*	Meningkatkan infrastruktur Perhubungan	Terpenuhinya Infrastruktur Sarana Prasarana Perhubungan Meningkatkan keselamatan Lalu lintas	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota Persentase Penurunan angka kecelakan di wilayah perkotaan
	Misi 4 : Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan	Nilai Sakip Presentase Temuan material

				Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

2.1.d.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.3.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

1.3.5 Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.1.2 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.2.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam

2.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.4.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.5.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.5.2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2.6 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.6.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.7 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.8.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja SKPD, Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai 3 rumusan program 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan Sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah

c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perhubungan

Kode	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Kinerja Program dan kegiatan (outcome)	Indikator Program Kegiatan (output)	2024			Catatan Penting	Indikator Program Kegiatan (output)	2025		
					Target		Rp.			Target		Rp.
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar											
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**											
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,65**	**persen**	**2.397.758.000**		**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,70**	**persen**	**3.379.758.000**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000		**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			

2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	mateng	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	457.000.000		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	319.000.000
					30	persen				0		
2.15.02.2.02.01	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**282.000.000**		**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**144.000.000**
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Mamuju Tengah		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	150.000.000		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	-
	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale Kec. Tobadak		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	25	unit	-		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	30	unit	-
	pengadaan Rambu-rambu	Kec. Topoyo, Kec. Tobadak, Kec. Budong-budong dan Kec. Pangale		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	55	unit	132.000.000		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	60	unit	144.000.000
2.15.02.2.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**175.000.000**		**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**175.000.000**
	Pengadaan Zoss (Zona Selamat Sekolah)	Kec. Topoyo		Jumlah Zoss yang terpasang	2	Paket	125.000.000		Jumlah Zoss yang terpasang	2	Paket	125.000.000
	Pengadaan Rass	Kec. Topoyo		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000

2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**			**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	33	persen	250.000.000		**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	17	persen	2.000.000.000
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Mamuju Tengah	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2	dok	250.000.000		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-	-
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Mamuju Tengah	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit	2.000.000.000
2. 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000		**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000
2.15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang DitingkatkanKapasitasnya	2	Orang	50.000.000		Jumlah Sumber Daya Manusia PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang DitingkatkanKapasitasnya	2	Orang	50.000.000
2.15.02.2, 06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000		**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000
2.15.02..2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporann	30.000.000		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporann	30.000.000

2.15.02..2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000
2.15.02.2, 09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**25**	**persen**	**1.260.000.000**		**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**13**	**persen**	**630.000.000**
2.15.02.2. 09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	unit	1.260.000.000		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	unit	630.000.000
2 15 02 2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**	
2 15 02 2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

2 15 02 2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**		**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000
2 .15. 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**20**	**persen**	**901.350.000**		**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**22**	**persen**	**121.350.000**
2 .15. 03. 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**19**	**persen**	**901.350.000**		**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**25**	**persen**	**121.350.000**
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Mamuju Tengah	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3	unit	901.350.000		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	4	unit	121.350.000
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**44**	**persen**	**2.268.825.250**		**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**46**	**persen**	**2.364.276.956**

2,15,01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**151.772.500**		**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**Persen**	**167.183.156**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	30.280.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	39.157.156
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.370.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.807.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	4.819.500		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	5.301.000
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	24.627.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	25.858.000
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	4.919.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	5.165.000

2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	33184000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	34843000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	49.573.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	52.052.000
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**		**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000
2,15,01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000		umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000

2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**291.183.000**		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**339.152.000**
2.15.01..2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Jersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95	psng	47.500.000
2.15.01..2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	75.534.000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	66.061.000
2.15.01..2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	150.849.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	158.391.000
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	org	64.800.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	org	67.200.000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	283.493.000		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	304.044.350
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4	Paket	5.466.000		Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4	Paket	5.466.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.500.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	17.500.000

2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	26.027.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	27.328.350
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.500.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.750.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420	Laporan	240.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430	Laporan	250.000.000
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	160.000.000		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	170.000.000
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	160.000.000		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	170.000.000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	100.014.300		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	101.535.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	36	Laporan	30.414.300		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	31.935.000

				Listrik yang Disediakan								
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	131.595.450		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	unit	131.595.450
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

Berdasarkan Rencana Kerja SKPD, Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah mempunyai 3 rumusan program 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan Sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perhubungan

Kode	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Kinerja Program dan kegiatan (outcome)	Indikator Program Kegiatan (output)	2024			Catatan Penting	Indikator Program Kegiatan (output)	2025		
					Target		Rp.			Target		Rp.
	Urusan wajib bukan Pelayanan dasar											
2,15	**BIDANG PERHUBUNGAN**											
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,65**	**persen**	**19.037.758.000**		**Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota**	**0,70**	**persen**	**3.379.758.000**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000		**Peresentase Pelaksanaan Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	25	persen	60.000.000
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			

2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	mateng	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.000.000
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	17.097.000.000		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	20	persen	319.000.000
					30	persen				0		
2.15.02.2.02.01	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**16.867.000.000**		**Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun**	**3**	**unit**	**144.000.000**
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Mamuju Tengah		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	150.000.000		Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	60	meter	-
	Pengadaan LPJU (Lampu penerang jalan umum)	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale Kec. Tobadak		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	919	unit	16.542.000.000		Jumlah LPJU (Lampu penerang jalan umum) yang terpasang	30	unit	-
	pengadaan Rambu-rambu	Kec. Topoyo, Kec. Tobadak, Kec. Budong-budong dan Kec. Pangale		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	70	unit	175.000.000		Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	60	unit	144.000.000
2.15.02.2.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**230.000.000**		**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**3**	**Paket**	**175.000.000**
	Pengadaan Zoss (Zona Selamat Sekolah)	Kec. Topoyo		Jumlah Zoss yang terpasang	3	Paket	180.000.000		Jumlah Zoss yang terpasang	2	Paket	125.000.000
	Pengadaan Rass	Kec. Topoyo		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000		Jumlah Rass yang terpasang	1	Paket	50.000.000

2.15.02.2 .03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**			**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	33	persen	250.000.000		**Presentase keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	17	persen	2.000.000.000
2.15.02.2 .03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Mamuju Tengah	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2	dok	250.000.000		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-	-
2.15.02.2 .03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Mamuju Tengah	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit	2.000.000.000
2. 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000		**PersentaseKeterpenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	25	persen	50.000.000
2.15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang DitingkatkanKapasitasnya	2	Orang	50.000.000		Jumlah Sumber Daya Manusia PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang DitingkatkanKapasitasnya	2	Orang	50.000.000
2.15.02.2 ,06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000		**Presentase Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	19	persen	270.758.000
2.15.02.. 2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporann	30.000.000		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporann	30.000.000

2.15.02.. 2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	240.758.000
2.15.02.2 ,09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**25**	**persen**	**1.260.000.00 0**		**Presentase Keterpenuhaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**13**	**persen**	**630.000.000**
2.15.02.2 .09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Budong-Budong Kec. Pangale	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	unit	1.260.000.000		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	unit	630.000.000
2 15 02 2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**			**Persentase Pelakasanaan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**persen**	
2 15 02 2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

2 15 02 2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**		**Persentase Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33**	**persen**	**50.000.000**
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	50.000.000
2 .15. 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**20**	**persen**	**1.601.350.000**		**Rasio konektvitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten/Kota**	**22**	**persen**	**500.000.000**
2 .15. 03. 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**6**	**persen**	**1.601.350.000**		**Persentase Keterpenuhan Sarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**25**	**persen**	**500.000.000**
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Mamuju Tengah	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5	unit	1.101.350.000		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	4	unit	121.350.000

2 15 03 2.13 06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Topoyo, dusun tumbu	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	unit	500.000.000		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	unit	500.000.000
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**44**	**persen**	**2.597.625.250**		**PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**46**	**persen**	**2.364.276.956**
2,15,01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**480.572.500**		**Presentase keterpenuhaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17**	**Persen**	**167.183.156**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	30.280.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	39.157.156
							328.800.000					
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.370.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.807.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	4.819.500		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	5.301.000

2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	24.627.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPDumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	25.858.000
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	4.919.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	5.165.000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	33184000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	34843000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	49.573.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	52.052.000
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**		**Presentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16,7**	**persen**	**1.142.792.000**

2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang	1.053.204.000
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	39.699.000
2,15,01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000		umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	dok	49.889.000
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**291.183.000**		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17**	**persen**	**339.152.000**
2.15.01..2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Jersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95	psng	47.500.000
2.15. 01..2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	75.534.000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	66.061.000

2.15.01..2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	150.849.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145	Orang	158.391.000
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	org	64.800.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	org	67.200.000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	283.493.000		**Presentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	16,7	persen	304.044.350
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.466.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.466.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.500.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	17.500.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	26.027.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	27.328.350
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.500.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.750.000

2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420	Laporan	240.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430	Laporan	250.000.000
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	160.000.000		**Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	18	persen	170.000.000
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.000.000
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	160.000.000		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	170.000.000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	100.014.300		**Presentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17,00	persen	101.535.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	30.414.300		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	31.935.000

2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	Laporan	69.600.000
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450		**Presentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17	persen	139.570.450
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	131.595.450		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	unit	131.595.450
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	unit	7.975.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja)Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Tengah Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat*, Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Kabupaten Mamuju Tengah,

KEPALA DINAS

MUHAMMADIA. SE
Pangkat : Pembina TK.1/IV.b
Nip : 19661125 198903 1 014

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KAB. MAMUJU TENGAH

TAHUN 2025



RENJA PERUBAHAN 2025

DISUSUN OELH : KASUBAG PERENCANAAN

K A T A P E N G A N T A R

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rakhmat dan hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 telah selesai disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program-program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Dispustsip Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025, yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga sehingga Renja ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, dan semoga dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 08 September 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Muhammad Ashari, S.T.,M.Tr.A.P
Pangkat : Pembina Tk I.IV/c
NIP. 19790715 200604 1 025

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispustsip daerah 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Distpusipda 38

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 38

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 47

BAB V : PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komperehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepaskan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Dispustsip) sebagai Perangkat Daerah Provinsi memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Renja Tahun 2025 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan

penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2025, yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat
d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemrintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kota.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tat Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
j. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.
l. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksudnya adalah :

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025

1.3.2. Tujuannya adalah

a. Mewujudkan tertib sistem perencanaan pembangunan daerah;
b. Menciptakan perencanaan yang konsisten dan sinergis;
c. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RPOGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPK Tahun 2025

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2019-2024

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2025, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah s.d. Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (out come/out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaiar Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Wajib									
	KEARSIPAN									
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan**	100%					100%		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	100%	-		-		100%		
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	100%	10 Arsip	20 Arsip	200%
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasioanal Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase Arsip yang tersedia dalam JIKN**	100%	-	-	-		100%		
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kearsipan yang Bekualitas	50 orang	-	50	50	100%	100	150	300%

	PERPUSTAKAAN									
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**					-			
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dikelola	100%					100%		
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan menejemen layanan TIK berbasis ISO 20000 (ITSM : Informasi Tehcnology Service Management)	-	-	-	-	-	3	3	-
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 perpustakaan	-	-	-	-	5	5	100%
	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	6 perpustakaan	3 Perpustakaan	-	-	-	6 Perpustakaan	9 Perpustakaan	150%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	400 bahan pustaka	100 bahan pustaka	400 bahan pustaka	400 bahan pustaka		500 bahan pustaka	1000 bahan pustaka	250%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	100%	-	-	-		-	-	

	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	(outcome) mengevaluasi budaya baca dan literasi masyarakat (output) terlaksananya minat baca masyarakat	100 peserta	10 peserta	100 peserta	100 peserta		100 peserta	210 peserta	210%
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	(out come) JumlahPemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca(Out Put) Jumlah Masyakat yang menerima	20 orang	20 orang	20 Orang	20 Orang		20 Orang	60 orang	300%

Mamuju Tengah, 08 September 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Muhammad Ashari, S.T.,M.Tr.A.P
Pangkat : Pembina Tk I.IV/c
NIP. 19790715 200604 1 025

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai tabel 2.1. diatas, untuk urusan wajib bidang perpustakaan dan kearsipan telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara periodik realisasi kinerja dalam rangka target capaian kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2024, masih disebut wajar sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/satuan kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Meskipun program dan kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilaksanakan secara wajar, tetapi untuk mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2024 masih diperlukan upaya-upaya perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien dan efektif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

Urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan Perpustakaan maupun pelayanan Kearsipan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.2. sebagai berikut

Tabel 2.2.

Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET						REALISASI					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembanguanan Literasi Masyarakat	Orang	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Yang Diukur Menggunakan Survei / Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat	Kabid Perpustakaan	10%	15%	18,40%	18,40%	50,5%%	60%	20,1%	41,8%	50,0%	51,82%		
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	persen	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat yang didapatkan dengan metode sesnsus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan Aspek Kehidupan Masyarakat (AM)	Kabid Perpustakaan	10%	10%	10,13%	10,13%	20,5%	40%	1,55%	1,6%	10,5 %	10,44%		
2	meningkatnya OPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab annasional)	Persen	T = (a + I + s + j)/4	Kabid Kearsipan	10%	10,15%	20,6%	20,6%	30,5%	40,15%	4,42 %	4,42 %	41,16 %	47 %		

		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		T = (m + b + g + a + c + i)/6		10%	10,15%	20,6%	20,6%	30,5%	40,15%	-	-	-	61 %		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

a. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 45 tahun 2016 Tentang Tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah;

Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju Tengah katagorinya tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program.

Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah yang jelas dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten serta adanya Renstra tersebut, telah membuka peluang untuk melakukan perannya berkaitan dengan isu strategis bidang perpustakaan yaitu pemberdayaan Perpustakaan dalam mencerdaskan masyarakat, dan bidang Kearsipan yaitu arsip sebagai pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Dilihat dari kedudukan maupun katagori tipe C, saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekertariat**
   a. Kelompok Perencanaan
   b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
3. **Bidang Perpustakaan**
   a. Pejabat Fungsional Perpustakaan (Pustakawan)
4. **Bidang Kearsipan**
   a. Pejabat Fungsional Kearsipan (Pranata Komputer)

Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Permasalahan Program Pengelolaan Kearsipan adalah

a. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan
b. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan
c. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang kearsipan
d. Belum terdata dan tertatanya arsip secara baku
e. Belum dilestarikannya benda-benda sejarah di Mamuju Tengah.

Sedangkan permasalahan Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan adalah :

a. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan
b. Kurangnya SDM Pengelola Perpustakaan
c. Kurangnya Minat Baca Masyarakat

c. Tantangan dan Peluang Peningkatan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah

1. Tantangan

Tantangan dan Peluang Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategik baik dari internal maupun eksternal organisasi yang menjadi tantangan, yaitu :

a. Banyaknya jumlah penduduk umur 1 - 75 Kabupaten Mamuju Tengah dimana pada tahun 2024 sudah mencapai 143,27 ribu jiwa dan luasnya wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan menjadi tantangan bagi terselengaranya pelayanan perpustakaan yang merata dan berkeadilan. Sampai saat ini baru ada 18 perpustakaan desa/kelurahan dan Perpustakaan
b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perpustakaan dan arsip mengakibatkan buruknya pengelolaan perpustakaan dan arsip.
c. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi jika tidak disikapi dengan baik (penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga yang terampil dan profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi) akan menjadi bumerang yang menjadikan lembaga perpustakaan dan kearsipan tertinggal jauh dibelakang (tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern).
d. Tidak adanya tenaga fungsional arsiparis / petugas khusus yang menangani kearsipan di Perangkat Daerah dan kurangnya sarana prasana kearsipan di Perangkat Daerah merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai lembaga pembina kearsipan.
e. Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan, seperti gedung aula perpustakaan, mobil dan motor perpustakaan keliling, gedung depo arsip, dll.

2. Peluang

a. Terbitnya undang-undang UU Nomor Tahun tentang perpustakaan dan UU Nomor Tahun tentang kearsipan beserta peraturan pelaksananya dan berubahnya status Kantor Perpustakaan, Arsip dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah semakin menguatkan keberadaan dan meningkatkan daya tawar lembaga perpustakaan dan kearsipan.

b. Adanya perhatian dari pengambil kebijakan di Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengembangan perpustakaan dan kearsipan ditandai

dengan pemberian anggaran yang relatif cukup untuk peningkatan sarana prasarana kearsipan dan penambahan koleksi perpustakaan, walaupun dari segi jumlah nominal masih perlu ditingkatkan.

c. Tingginya kebutuhan sebagian masyarakat terhadap informasi, buku dan bahan pustaka lainnya ditengah mahalnya harga perolehan, hal tersebut membuka peluang bagi lembaga perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan yang didukung layanan internet dan hot spot gratis hingga ke tingkat kecamatan/desa, juga dapat diupayakan pendirian taman baca/sudut baca ditempat-tempat yang strategis di wilayah perkotaan.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029, Visi Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

“***Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan ”*** Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kab. Mamuju Tengah, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan di wujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamuju Tengah dalam 5 (lima) tahun Kedepan.

Visi tersebut dijabarkan kedalam enam (6) Misi. Misi sesuai dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Misi Kedua (1) yaitu

"Memperkuat Transformasi Sosial"

Dinas perpustakaan dan Kearsipan Mengacu kepada Misi Bupati Yang ke 1 (Satu) di Bidang Pendidikan yang memiliki kaitan dengan perpustakaan.

Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, yang memudahkan masyarakat mendapat informasi melalui buku. Dunia Pendidikan, buku terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah perpustakaan dan pelayanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadapa mutu pedidikan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025, dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

KODE	Rancanagan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2026				
	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Program dan Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**100%**	**217.652.666,00**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**100%**	**415.000.000,00**
2.23.02.201	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Perpustakaan yangdikelola**	**100%**	**92.652.666,00**	**PengelolaanPerpustakaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Perpustakaan yangdikelola**	**100%**	270.000.000,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	6 Pepustakaan	27.652.666,00	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	6 Pepustakaan	30.000.000,00
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Diklat	50 Pustakawan	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Diklat	50 Pustakawan	90.000.000,00
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Mamuju Tengah	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Mamuju Tengah	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen	30.000.000,00
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Eksemplar	15.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Eksemplar	45.000.000,00
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Mamuju Tengah	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 perpustakaan	15.000.000,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Mamuju Tengah	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 dokumen	75.000.000,00
2.23.02.202	**Pembudayaan Gemar MembacaTingkatDaerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	**100%**	**125.000.000,00**	**Pembudayaan Gemar MembacaTingkatDaerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	**100%**	**145.000.000,00**

2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada SatuanPendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus sertaMasyarakat	Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	100 peserta	30.000.000,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada SatuanPendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus sertaMasyarakat	Mamuju Tengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	100 peserta	35.000.000,00
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan SaranaPerpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Perpustakaan yang tersedia	2 Unit	35.000.000,00	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Perpustakaan yang tersedia	2 Unit	40.000.000,00
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Mamuju Tengah	Jumlah Orang Menerima Penghargaan	20 Orang	25.000.000,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Mamuju Tengah	Jumlah Orang Menerima Penghargaan	20 Orang	30.000.000,00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang berbasis Inklusi Sosial	5 Perpus	35.000.000,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mamuju Tengah	Jumlah Perpustakaan yang berbasis Inklusi Sosial	5 Perpus	40.000.000,00
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAHKUNO**		**Persentase koleksi nasionalNaskahKuno yangdilestarikan**	**100%**	**13.000.000,00**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAHKUNO**		**Persentase koleksi nasionalNaskahKuno yangdilestarikan**	**100%**	**20.000.000,00**
2.23.03.2.01	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIKDAERAH KABUPATEN /KOTA**		**Persentase NaskahKuno yangdilestarikan**	**100%**	**13.000.000,00**	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIKDAERAH KABUPATEN /KOTA**		**Persentase NaskahKuno yangdilestarikan**	**100%**	**20.000.000,00**
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan Pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Mamuju Tengah	Jumlah masyarakat yang terlibat yang berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno	4 Orang	5.000.000,00	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan Pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Mamuju Tengah	Jumlah masyarakat yang terlibat yang berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno	3 Orang	10.000.000,00
2.23.03.2.01.02	Pengemabangan, Pengolahan Pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Mamuju Tengah	Jumlah Naskah kuno yang di alih mediakan	4 naskah	8.000.000,00	Pengemabangan, Pengolahan Pengalih median naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Mamuju Tengah	Jumlah Naskah kuno yang di alih mediakan	3 naskah	10.000.000,00
2.24.02	**PROGRAMPENGELOLAAN ARSIP**		**Persentase ArsipDinamis danStatis yangdiarsipkan di Kearsipan**	**100%**	**85.000.000,00**	**ProgramPengelolaanArsip**		**Persentase ArsipDinamis danStatis yangdiarsipkan di Kearsipan**	**100%**	**110.000.000,00**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	**10 Arsip**	**40.000.000,00**	**Pengelolaan ArsipD inamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	**10 Arsip**	**55.000.000,00**
2.24.2.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Topoyo	Jumlah Arsip Dinamis yang di ciptakan	10 Arsip	25.000.000,00	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Topoyo	Jumlah Arsip Dinamis yang di ciptakan	10 Arsip	30.000.000,00

2.24.2.2.01.03	Pengawasan Arsip dinamis kewenagan kabupaten/kota	Topoyo	Jumlah Arsip Dinamis yang di Awasi	10 Arsip	15.000.000,00	Pengawasan Arsip dinamis kewenagan kabupaten/kota	**Topoyo**	Jumlah Arsip Dinamis yang di Awasi	10 Arsip	25.000.000,00
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Persentase Arsipyang lindungidan di selamatkan**	**100%**	**30.000.000,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Persentase Arsipyang lindungidan di selamatkan**	**100%**	**35.000.000,00**
2.24.03.205.05	**Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang**		**Persentase ArsipYangdi musnahkan**	**5 Arsip**	**30.000.000,00**	**Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang**		**Persentase ArsipYangdi musnahkan**	**5 Arsip**	**35.000.000,00**
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan penetapan autentitas arsip statis yang dinyatakan hilang	Topoyo	Jumlah Arsip statis yang di nilai	5 Arsip	30.000.000,00	Penilaian dan penetapan autentitas arsip statis yang dinyatakan hilang	**Topoyo**	Jumlah Arsip statis yang di nilai	5 Arsip	35.000.000,00
2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**		**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan**	**100%**	**15.000.000,00**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**		**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan**	**100%**	**20.000.000,00**
2.24.04.2.01	**Pelayanan izin menggunakan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota**		**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan**	**2 Izin**	**15.000.000,00**	**Pelayanan izin menggunakan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota**		**Persentase Arsip yang memiliki Izin Penggunaan**	**2 Izin**	**20.000.000,00**
2.24.04.2.01.02	Penyedian daftar Dan penetapan izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Topoyo & Tobadak	Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	2 Izin	15.000.000,00	Penyedian daftar Dan penetapan izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Topoyo & Tobadak	Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	2 Izin	20.000.000,00
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.120.600.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**1.213.000.000,00**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**51.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**65.000.000,00**
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Topoyo	Jumlah dokumen perencanaan PD	4Dokumen 110 Kali	20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Topoyo	Jumlah dokumen perencanaan PD	4 Dokumen 105 Kali	25.000.000,00
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	5.000.000,00
2.23.01.2.01.0.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	5.000.000,00

2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	5.000.000,00
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	5.000.000,00
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Topoyo	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3 Dokumen	20.000.000,00
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**900.000.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**950.000.000,00**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Topoyo	Jumlah ASN	12 ASN	900.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Topoyo	Jumlah ASN	12 ASN	950.000.000,00
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	5.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	6.000.000,00
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.000.000,00
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**9.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**9.000.000**
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perpustakaan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Orang	9.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perpustakaan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Orang	9.500.000,00
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai**	**100%**	**55.600.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai**	**100%**	**66.000.000,00**
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju tengah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju tengah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	15.000.000,00
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 Jenis	2.600.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 Jenis	3.000.000,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5500 Lembar	5.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju Tengah	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5500 Lembar	5.000.000,00
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	5 Media	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju Tengah	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	5 Media	5.000.000,00
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Kotak	3.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Kotak	3.000.000,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	65 Kali	25.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	62 Kali	35.000.000,00

2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**65.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**75.000.000,00**
2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit 24 Bulan	30.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit 24 Bulan	35.000.000,00
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mamuju Tengah	Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	Mamuju Tengah	Jumlah mebel yang diadakan	3 Unit	15.000.000,00
2.23.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Topoyo	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	3 Unit	25.000.000,00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Topoyo	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	3 Unit	25.000.000,00
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**27.500.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**33.000.000,00**
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	Jumlah jasa surat menyurat	250 Lembar	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju Tengah	Jumlah jasa surat menyurat	250 Lembar	3.000.000,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	5936 kwh,m3, bulan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	5936 kwh,m3, bulan	15.000.000,00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju Tengah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju Tengah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	15.000.000,00
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**12.500.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**14.500.000,00**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Jasa	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Jasa	5.500.000,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 Jasa	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Mamuju Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 Jasa	6.000.000,00
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	2.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	3.000.000,00
JUMLAH					**1.446.252.66**					**1.770.000.00**

Berdasarkan hasil review rancangan awal RKPD 2025 sesuai Tabel 2.3. diatas, rencana kerja sesuai hasil analisis belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya mengingat kebijakan umum anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah untuk dialokasikan pada Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah masih terbatas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Mamuju Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Penerima Manfaat)
(1)	(2)	(	(4)	(	(6)
	Program Pembinaan Perpustakaan		**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**		
	Pengadaan Aplikasi Perpustakaan Online	Tobadak	Jumlah Perpustakaan Online	1	Masyarakat Umum dan Masyarakat Mamuju Tengah
	Pembangunan Gedung Perpustakaan	1. Desa Lomba Bou Desa Topoyo 2. Desa Barakkang Kec. Budong-budong 3. Desa Sartana Maju Kec. Pangale	Jumlah Bangunan Perpustakaan	3 Unit	Masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2015-2019, dapat dilihat pada Tabel 2.6 :

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perpusnas 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1	Menggerakkan masyarakat gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan	1. Peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca; 2. Pengembangan semua jenis perpustakaan; 3. Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Layanan Perpustakaan; 4. Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan; 5. Peningkatan Keragaman Koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian Koleksi Warisan Budaya Bangsa Indonesia; 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana	A. Program Pengembangan Perpustakaan terdiri dari kegiatan : 1. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional; 2. Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional; 3. Preservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno; 4. Peningkatan Layanan dan Jasa Perpustakaan dan Informasi; 5. Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca; 6. Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan; 7. Pengembangan Pustakawan; 8. Pengelolaan Perpustakaan

2	Mendorong perkembangan semua jenis perpustakaan sesuai standar dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat		B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Perpustakaan Nasional terdiri dari kegiatan : 1. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional 2. Perencanaan, Hukum, dan Humas Perpustakaan Nasional; 3. Pengawasan dan Pendidikan Akuntabilitas Aparatur Perpustakaan Nasional
3	Meningkatkan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TIK		
4 5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan Mengembangkan keragaman dan pelestarian koleksi nasional dalam mendukung masyarakat pembelajar sepanjang hayat sesuai karakter bangsa		C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional meliputi kegiatan Pengediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Nasional

Selanjutnya berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia **(ANRI) 2015-2019** dapat dilihat pada Tabel 3.2. yaitu :

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan ANRI 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1	Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komperehensif dan terpadu melalui Sistem Kearsipan Nasional	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (PT Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, oragnisasi Politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan/tokoh nasional	A. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional; B. Program Akreditasi Kearsipan; C. Program Pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan dan Sertifikasi; D. Program Penilaian dan Akuisisi Arsip; E. Program Pembinaan Kearsipan Daerah I; F. Program Pembinaan Kearsipan II; G. Program Pembinaan Kearsipan Pusat; H. Program Pemanfaatan Arsip I. Program Pengolahan Arsip Statis; J. Program Preservasi Kearsipan; K. Program Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan, Penyimpanan dan Perawatan Arsip; L. Program Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; M. Program Pengelolaan Data dan TIK ANRI; N. Program Penyelemggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, O. Program Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional
2	Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	
3	Terwujudnya penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional	Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional	
4	Terwujudnya manajemen internal dan yang rpofesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional	Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju TengahTahun 2024

Tujuan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah 2024 sebagai berikut;

1. Memenuhi kebutuhan baca masyarakat dan penataan kearsipan perangkat daerah

Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan daerah (Jumlah buku dan jumlah judul buku yang tersedia)

2. Meningkatnya kapasitas sistem arsip daerah (Jumlah arsip OPD yang terdata dan tertata)

Sedangkan sasaran Program Kegitatan sebagai berikut;

1. Tersedianya sarana/prasarana perpustakaan serta bacaan yang sesuai kebutuhan
2. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM Kearsipan yang sesuai standar
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana/prasarana
4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan
5. Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan dalam mendukung penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**1.476.252.666,00**							**1.800.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.466.252.666,00**							**1.788.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**1.371.252.666,00**							**1.668.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**1.130.600.000,00**						**-**	**1.223.000.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu*	-			100 %	51.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu*	-			100 %	900.000.000,00			-	-	-	-	950.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	900.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		950.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani*	-			100 %	9.000.000,00			-	-	-	-	9.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	9.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar*	-			100 %	65.600.000,00			-	-	-	-	76.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	2.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5500 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				220 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daeran Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi*	-			100 %	65.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia*	-			100 %	27.500.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5936 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara*	-			100 %	12.500.000,00			-	-	-	-	14.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Persentase perpustakaan Sesuai standar nasional perpustakaan***	**-**			**100 %**	**227.652.666,00**						**-**	**425.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase perpustakaan yang dikelola*	-			100 %	92.652.666,00			-	-	-	-	270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				6 Perpustakaan	27.652.666,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Eksemplar	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pengunjung perpustakaan*	-			100 %	135.000.000,00			-	-	-	-	155.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				20 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				100 Lokus	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Persentase koleksi nasional naskah kuno yang dilestarikan***	**-**			**100 %**	**13.000.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*persentase naskah kuno yang dilestarikan*	-			100 %	13.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				5 Orang	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				4 Eksemplar	8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**95.000.000,00**							**120.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di kearsipan***	**-**			**100 %**	**50.000.000,00**						**-**	**65.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip Dinamis yang terkelola*	-			100 %	50.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				10 Berkas	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan***	**-**			**100 %**	**30.000.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	*Persentase Arsip yang dimusnahkan*	-			100 %	30.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				5 Arsip	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	***Persentase Arsip yang memiliki izin penggunaan***	**-**			**100 %**	**15.000.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip yang memiliki izin penggunaan*	-			100 %	15.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				2 Arsip	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X	**NON URUSAN**						**10.000.000,00**							**12.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**10.000.000,00**							**12.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**10.000.000,00**						**-**	**12.000.000,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu*	-			100 %	10.000.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H							**1.476.252.666,00**							**1.800.000.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	3	4
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**100%**	**250.000.885,00**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perpustakaan yang dikelola**	100%	145.377.303,00
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang di kembangkan	6 Perpustakaan	15.613.350,00
2.23.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	23.978.275,00
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Dokumen Data Perpustakaan	1 dokumen	63.609.206,00
2.23.02.2.01.0004	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 perpustakaan	42.176.472,00
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	100%	**104.623.582,00**
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	100 peserta	49.545.581,00
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang Menerima Penghargaan	20 Orang	55.078.001,00
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan**	**100%**	**28.942.350,00**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Dinamis yang terkelolah**	**100%**	**28.942.350,00**
2.24.2.2.01.0003	Pengawasan Arsip dinamis kewenagan kabupaten/kota	Jumlah Arsip Dinamis yang di Awasi	10 Arsip	28.942.350,00
1.02.01.2.05	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**849.660.487,00**
1.02.01.2.05.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	**100%**	**76.752.110,00**
1.02.01.2.05.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	4 Dokumen105 Kali	33.752.124,00
1.02.01.2.05.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	3.979.873,00
1.02.01.2.05.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	4.230.868,00
1.02.01.2.05.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	4.421.424,00
1.02.01.2.05.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	3.933.245,00
1.02.01.2.05.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3 Dokumen 95	26.434.576,00
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	**100%**	**477.553.907,00**
1.02.01.2.06.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	12 0rang	477.553.907,00
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**7.910.000,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.02.01.2.07.05.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	2 Orang	7.910.000,00
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**136.518.970,00**
1.02.01.2.06.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	51.708.470,00
1.02.01.2.06.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	10 Jenis	25.306.000,00
1.02.01.2.06.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	5500 Lembar	3.947.500,00
1.02.01.2.06.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	220 Orang	8.225.000,00
1.02.01.2.06.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	62 Kali	47.332.000,00
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	**100%**	**96.000.000,00**
1.02.01.2.07.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit 24 Bulan	96.000.000,00
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**1.000.000,00**
1.02.01.2.08.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	1.000.000,00
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**53.925.500,00**
1.02.01.2.09.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Jasa	46.725.500,00
1.02.01.2.09.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	7.200.000,00
JUMLAH				**1.128.603.722,00**

Mamuju Tengah, 08 September 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Muhammad Ashari, S.T.,M.Tr.A.P
Pangkat : Pembina Tk I.IV/c
NIP. 19790715 200604 1 025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**1.476.252.666,00**	**1.128.603.722,00**	**2.416.922.988,00**	**940.670.322,00**							**1.788.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.476.252.666,00**	**1.128.603.722,00**	**2.416.922.988,00**	**940.670.322,00**							**1.788.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**1.381.252.666,00**	**1.099.661.372,00**	**2.378.310.638,00**	**997.057.972,00**							**1.668.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**1.140.600.000,00**	**849.660.487,00**	**1.214.534.105,00**	**82.400.000,00**							**1.223.000.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	51.000.000,00	76.752.110,00	124.352.110,00	73.352.110,00			-	- -	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	33.752.124,00	81.352.124,00	61.352.124,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.979.873,00	3.979.873,00	-20.127,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.230.868,00	4.230.868,00	230.868,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.421.424,00	4.421.424,00	421.424,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.933.245,00	3.933.245,00	-66.755,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	26.434.576,00	26.434.576,00	11.434.576,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu*				100 %	100 %	910.000.000,00	477.553.907,00	818.637.525,00	-91.362.475,00			-	- -	-		950.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	900.000.000,00	477.553.907,00	818.637.525,00	-81.362.475,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			950.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**1.476.252.666,00**	**1.128.603.722,00**	**2.416.922.988,00**	**940.670.322,00**							**1.788.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.381.252.666,00**	**1.099.661.372,00**	**2.378.310.638,00**	**997.057.972,00**							**1.668.000.000,00**	
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.476.252.666,00**	**1.128.603.722,00**	**2.416.922.988,00**	**940.670.322,00**							**1.788.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**1.381.252.666,00**	**1.099.661.372,00**	**2.378.310.638,00**	**997.057.972,00**							**1.668.000.000,00**	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani*				100 %	100 %	9.000.000,00	7.910.000,00	7.180.000,00	-1.820.000,00			-	- -	-		9.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	9.000.000,00	7.910.000,00	7.180.000,00	-1.820.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar*				100 %	100 %	65.600.000,00	136.518.970,00	113.438.970,00	47.838.970,00			-	- -	-		76.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dan semestinya dapat dijadikan pedoman bagi setiap unit kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan selama 1 (satu) tahun

Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi serta langkah-langkah nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka merealisasikan rencana-rencana yang sudah tertuang dalam bentuk dokumen Renja tersebut agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi kerja seluruh pegawai, dan dapat mendorong terjadinya suatu peningkatan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.



RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penyesuaian arah kebijakan perencanaan daerah, khususnya setelah ditetapkannya Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2029 sebagai dokumen acuan terbaru. Perubahan ini mengharuskan dilakukan penyelarasan kembali tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta target kinerja yang sebelumnya merujuk pada Renstra 2021–2026.

Dengan demikian, Renja Perubahan 2025 ini tidak hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen operasional untuk memastikan bahwa pengelolaan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan penguatan sumber daya ekonomi masyarakat pada tahun berjalan tetap berjalan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah yang baru.

1. Penyusunan dokumen ini disusun melalui proses:
2. review dan penajaman capaian kinerja,
3. sinkronisasi dengan Renstra 2025–2029,
4. penyesuaian terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah, serta
5. masukan dari pemangku kepentingan melalui mekanisme koordinasi internal perangkat daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renja Perubahan 2025 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sektor pangan dan pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah, serta mendorong tercapainya peningkatan produksi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kemajuan daerah.

Tobadak, 7 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Ir. H. AMRULLAH, MMPub
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19670312 200003 1 0077

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 8

2.2. Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH 38

BAB IV PENUTUP 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 pada awalnya disusun mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021–2026 dan telah ditetapkan sebagai Renja Pokok Tahun 2025.

Namun, pada tahun berjalan terjadi perubahan arah perencanaan pembangunan jangka menengah, ditandai dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2029. Perubahan dokumen Renstra ini menuntut adanya penyelarasan kembali terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta target pembangunan yang tercantum dalam Renja Tahun 2025. Dengan demikian, diperlukan penyusunan Renja Perubahan 2025 untuk memastikan seluruh aktivitas pembangunan sektor pangan dan pertanian tetap berada dalam koridor rencana jangka menengah terbaru.

Di samping perubahan dokumen acuan, dinamika pembangunan daerah juga menunjukkan adanya sejumlah kondisi strategis yang perlu direspons. Tantangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju Tengah meliputi antara lain:

1. Alih fungsi lahan pertanian, terutama pada kawasan persawahan tadah hujan yang rentan bertransformasi menjadi lahan perkebunan.
2. Keterbatasan sumber air dan infrastruktur penunjang produksi, yang berdampak pada stabilitas produktivitas komoditas utama.
3. Kerentanan ketahanan pangan rumah tangga, yang perlu ditangani melalui peningkatan diversifikasi pangan, penguatan cadangan dan distribusi pangan, serta intervensi pemberdayaan masyarakat.
4. Penguatan kapasitas petani, kelembagaan, dan penyuluhan, yang menjadi prasyarat peningkatan produktivitas dan adaptasi terhadap perubahan kondisi iklim dan pasar.

Perubahan-perubahan tersebut menuntut penyesuaian program dan kegiatan agar tetap relevan, terukur, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, Renja Perubahan 2025 disusun untuk:

1. Menyelaraskan arah kebijakan tahunan perangkat daerah dengan dokumen Renstra yang baru.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kapasitas fiskal tahun berjalan.
3. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja perangkat daerah.

4. Menjadi pedoman operasional pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang Tahun 2025.

Dengan disusunnya Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan sektor pangan, pertanian, dan peternakan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berjalan lebih efektif, adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
11. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 sebagai acuan utama penyelarasan Renja Perubahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, dan target Renja Tahun 2025 terhadap dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2029 yang menjadi acuan terbaru.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan target tahun 2025 dengan arah pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025–2029.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi aktual sektor pangan, pertanian, dan peternakan di Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Menjamin konsistensi perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah.
4. Mengakomodasi dinamika kebutuhan pembangunan, termasuk isu strategis seperti alih fungsi lahan, ketahanan pangan rumah tangga, kapasitas kelembagaan petani, dan ketersediaan sarana produksi pertanian.
5. Menjadi pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang Tahun Anggaran 2025 agar berjalan efektif dan terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada struktur dokumen Renja

Perubahan sebagaimana tertuang dalam draft tahun sebelumnya, namun dengan penguatan substansi sesuai pendekatan perencanaan dalam Renja 2026. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

   Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan Renja Perubahan 2025, landasan hukum yang menjadi dasar penyusunannya, maksud dan tujuan penyesuaian dokumen, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dilakukannya perubahan Renja sehubungan dengan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029 serta dinamika pembangunan daerah.

2. **Bab II Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II**

   Bab ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian sementara tahun berjalan, termasuk pencapaian indikator kinerja, program dan kegiatan, serta isu-isu penting penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian. Kajian ini disusun mengikuti pendekatan evaluasi sebagaimana digunakan dalam Renja 2026, meliputi: evaluasi pelaksanaan program, analisis kinerja layanan, capaian Renstra, serta penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD.

3. **Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

   Bab ini berisi penjabaran rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 setelah penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029. Termasuk di dalamnya indikator kinerja, target, lokasi kegiatan, serta kebutuhan anggaran. Penyajian mengikuti pendekatan perencanaan efektif sebagaimana digunakan dalam Renja 2026, yaitu menekankan keterpaduan antara sasaran, program prioritas, dan kapasitas fiskal.

4. **Bab IV Penutup**

   Bab ini memuat kesimpulan umum terkait arah kebijakan dan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi program dan kegiatan. Bagian ini menjadi pengantar untuk memastikan bahwa seluruh perubahan yang dilakukan berjalan konsisten dengan Renstra baru dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap dokumen perencanaan wajib dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 perlu dilakukan evaluasi sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, terutama karena terjadinya penyesuaian dokumen acuan dari Renstra 2021–2026 menjadi Renstra 2025–2029.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah bertujuan menilai sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan, mengidentifikasi capaian kinerja, serta mengukur kesesuaian antara target dan realisasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilaksanakan melalui penelahaan terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Dengan demikian, proses evaluasi menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa pencapaian pembangunan tetap berada dalam jalur prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperhatikan berbagai aspek strategis yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini mencakup permasalahan aktual sektor pangan dan pertanian, seperti alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan sarana irigasi pada lahan sawah tadah hujan, rendahnya kapasitas petani, serta ancaman kerawanan pangan di beberapa wilayah. Selain itu, dinamika perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan kebutuhan peningkatan produktivitas komoditas utama turut menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas kegiatan.

Selanjutnya, penyusunan Renja Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja Tahun 2024 dan perkembangan capaian hingga Triwulan II Tahun 2025, yang menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai *entry point* untuk memperbaiki kelemahan perencanaan, mengoptimalkan kegiatan yang telah berjalan baik, serta menyesuaikan target kinerja dengan kemampuan riil sumber daya dan kapasitas fiskal daerah.

Selain aspek teknis, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 juga memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainable development) agar arah pembangunan tetap konsisten dan berkesinambungan. Fokus diberikan pada upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan, penguatan kelembagaan petani, peningkatan diversifikasi pangan lokal, serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang menjadi penopang utama produksi pangan daerah. Upaya-upaya ini menjadi sangat penting mengingat peran strategis sektor pangan dan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kondisi aktual, kebijakan pembangunan daerah, serta perubahan dokumen Renstra, maka penyusunan Renja Perubahan 2025 diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil evaluasi Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 serta perkembangan pelaksanaan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut sebagai dasar penyempurnaan rencana kerja pada tahun berjalan.

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Periode Pelaksanaan: Triwulan II tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	TERJAGANYA KEANEKARAGAMAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN			SCORE POLA PANGAN HARAPAN (PPH) (%)	84,5	4.097.000.000	83,5	256.405.700	84	286.235.193															
				KETERSEDIAAN PANGAN (Angka)	147		125		136																
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (%)	100,00	3.282.000.000	15,00	229.205.700	100,00	211.671.913									15,00	60,902,700					
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	5	720.000.000	33,33	97.469.200	5	110.000.412	16%	17,100,000	0%	23,811,500					16,00 %	40,911,500	46,03 %	138.380.700	**920,63%**	**19,22 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	225	360.000.000	0	0	75	36.840.242	0	7.200.000	0	4.800.000					0	12.000.000	0	12.000.000	**0,00%**	**3,33%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3	300.000.000	0	0	1	47.544.933	0	5.400.000	1	15.123.000					1	20.523.000	1	20.523.000	**33,33%**	**6,84%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	21	60.000.000	21	97.469.200	1	25.615.237	0	4.500.000	1	3.888.500					1	8.388.500	22	105.857.700	**104,76%**	**176,43%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (%)	94	2.562.000.000	33,04	131.736.500	93	101.671.501	14%	6,000,000	0%	13,991,200					14,00 %	19,991,200	33,77 %	151.727.700	**36,51%**	**5,92%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	642.000.000	2	41.114.400	1	20.399.742	0	3.000.000	0	2.000.000					0	5.000.000	2	46.114.400	**40,00%**	**7,18%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	69	1.920.000.000	18	90.622.100	1	81.271.759	0	3.000.000	1	11.991.200					1	14.991.200	19	105.613.300	**27,54%**	**5,50%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	100,00	425.000.000	9,00	0	100,00	48.834.799									9,00	8,141,500					
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan (Dokumen)	1	425.000.000	0,00	0	1	48.834.799	9%	4,500,000	0%	3,641,500					9,00%	8,141,500	0,00%	8.141.500	**0,00%**	**1,92%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	5	425.000.000	0	0	1	48.834.799	0	4.500.000	0	3.641.500					0	8.141.500	0	8.141.500	**0,00%**	**1,92%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan (%)	100,00	390.000.000	0,00	27.200.000	100,00	25.728.481									0,00	4,996,000					
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten (Kegiatan)	1	390.000.000	16,67	27.200.000	1	25.728.481	0%	0	0%	4,996,000					0,00%	4,996,000	50,00%	32.196.000	**5.000,00%**	**8,26%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	6	390.000.000	1	27.200.000	2	25.728.481	0	0	2	4.996.000					2	4.996.000	3	32.196.000	**50,00%**	**8,26%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	MENINGKATNYA PRODUKSI PERTANIAN			PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN (%)	2,48	23.340.000.000	2,42	2.512.781.380	2,45	1.392.565.503														
				PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA (%)	1,26		1,24		1,25															
				PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN (%)	1,28		1,26		1,27															
				PERSENTASE PENINGKATAN POPULASI TERNAK (%)	1,28		1,26		1,27															
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditas pertani an (%)	2,46	15.700.000.000	0,00	1.496.761.000	2,79	758.958.619									0,00	109,644,300					
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaan sarana pertanian (%)	100	8.200.000.000	20,00	1.187.840.500	100	592.193.663	0%	27,600,000	0%	42,925,300					0,00%	70,525,300	22,00 %	1.258.365.800	**22,00%**	**15,35 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	25	7.500.000.000	5	756.989.900	1	291.557.901	0	9.300.000	1	30.725.300					1	40.025.300	6	797.015.200	**24,00%**	**10,63 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	25	700.000.000	5	430.850.600	1	300.635.762	0	18.300.000	0	12.200.000					0	30.500.000	5	461.350.600	**20,00%**	**65,91 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain (Ekor)	5.100	7.500.000.000	12,50	308.920.500	5.100	166.764.956	0% %	22,500,000	0% %	16,619,000					0,00%	39,119,000	12,50 %	348.039.500	**0,25%**	**4,64%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	25.500	7.500.000.000	3.187	308.920.500	5.100	166.764.956	0	22.500.000	0	16.619.000					0	39.119.000	3.187	348.039.500	**12,50%**	**4,64%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase ketersediaan prasarana pertanian (%)	40,00	3.550.000.000	0,00	43.673.700	36,00	51.210.000									0,00	0					
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase pengembangan prasarana pertanian (%)	100	1.050.000.000	10,00	43.673.700	100	0	0% %	0	0% %	0					0,00%	0	10,00 %	43.673.700	**10,00%**	**4,16%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	10	750.000.000	2	43.673.700	0	0	0	0	0	0					0	0	2	43.673.700	**20,00%**	**5,82%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prsarana pertanian (%)	100	2.500.000.000	0,00	0	100	51.210.000	0% %	0	0% %	0					0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	25	2.500.000.000	0	0	5	51.210.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase meningkatnya populasi ternak (%)	2,40	320.000.000	0,00	181.654.500	2,30	179.599.409									0,00	80,740,000					
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah (%)	100	320.000.000	25,00	181.654.500	100	179.599.409	22%	39,900,000	0%	40,840,000					22,00 %	80,740,000	37,50 %	262.394.500	**37,50%**	**82,00 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16	320.000.000	4	181.654.500	4	179.599.409	0	39.900.000	2	40.840.000					2	80.740.000	6	262.394.500	**37,50%**	**82,00%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penuru nan kejadia n dan jumlah kasus penyak it hewan menula r (%)	100,00	2.100.000.000	10,00	94.906.500	100,00	116.404.981									10,00	20,000,000					
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	100	2.100.000.000	10,00	94.906.500	100	116.404.981	10%	12,000,000	0%	8,000,000					10,00 %	20,000,000	10,00 %	114.906.500	**10,00%**	**5,47%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100	1.500.000.000	20	94.906.500	20	66.404.981	0	12.000.000	0	8.000.000					0	20.000.000	20	114.906.500	**20,00%**	**7,66%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	280	600.000.000	0	0	70	50.000.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan usaha bidang pertani an dan peterna kan (%)	1,29	300.000.000	0,00	0	1,27	0									0,00	0					

		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pertanian yang memperoleh Izin lengkap lingkup dalam daerah (%)	100	300.000.000	0,00	0	100	0	0% %	0	0% %	0					0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	15	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyul han pertanian dan kelembagaan petani (%)	100,00	1.370.000.000	23,00	695.785.680	100,00	286.392.494									23,00	109,500,000					
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian (%)	100	1.370.000.000	25,00	695.785.680	100	286.392.494	23%	65,700,000	0%	43,800,000					23,00 %	109,500,000	25,00 %	805.285.680	**25,00%**	**58,78 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	450	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20	800.000.000	5	319.782.500	5	286.392.494	0	65.700.000	0	43.800.000					0	109.500.000	5	429.282.500	**25,00%**	**53,66 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	2	120.000.000	1	376.003.180	0	0	0	0	0	0					0	0	1	376.003.180	**50,00%**	**313,34 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	MENINGKATNYA DUKUNGAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KETAHAHAN PANGAN DAN PERTANIAN			PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (%)	100	29.723.099.536	100	4.863.492.516	100	5.807.923.674														
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	29.723.099.536	27,00	4.863.492.516	100,00	5.807.923.674									27,00	2,649,846,300					
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monev evaluasi tepat waktu (%)	100	289.500.000	20,00	105.389.400	99	63.232.818	18%	11,400,000	0%	12,610,000					80,00 %	24,010,000	30,00 %	129.399.400	**30,30%**	**44,70 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	70.000.000	2	87.795.400	3	59.813.190	1	11.400.000	0	12.610.000					1	24.010.000	3	111.805.400	**30,00%**	**159,72 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	59.500.000	1	4.995.500	1	704.907	1	0	0	0					1	0	2	4.995.500	**40,00%**	**8,40%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	51.500.000	1	4.995.500	1	704.907	0	0	0	0					0	0	1	4.995.500	**20,00%**	**9,70%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	51.500.000	1	4.981.500	1	1.004.907	1	0	0	0					1	0	2	4.981.500	**40,00%**	**9,67%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	57.000.000	1	2.621.500	1	1.004.907	0	0	0	0					0	0	1	2.621.500	**20,00%**	**4,60%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	100	22.006.599.536	52,50	4.257.542.528	100	5.340.112.759	29%	1,544,789,516	0%	945,498,517					40,00 %	2,490,288,033	112,50 %	6.747.830.561	**112,50%**	**30,66 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	285	21.978.599.536	228	4.200.501.128	684	5.298.885.762	171	1.535.489.516	171	939.298.517					342	2.474.788.033	570	6.675.289.161	**200,00%**	**30,37 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	28.000.000	1	57.041.400	1	41.226.997	0	9.300.000	0	6.200.000					0	15.500.000	1	72.541.400	**25,00%**	**259,08 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	40.000.000	30,00	26.289.000	100	24.488.257	0% %	4,800,000	0% %	3,200,000					40,00 %	8,000,000	30,00 %	34.289.000	**30,00%**	**85,72 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	40.000.000	6	26.289.000	1	24.488.257	0	4.800.000	0	3.200.000					0	8.000.000	6	34.289.000	**30,00%**	**85,72 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani (%)	100	319.000.000	15,38	21.580.000	100	47.264.700	15%	7,050,000	0%	11,850,000					0,00%	18,900,000	16,35 %	40.480.000	**16,35%**	**12,69 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	34.000.000	0	0	1	34.124.700	0	7.050.000	0	4.700.000					0	11.750.000	0	11.750.000	**0,00%**	**34,56 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52	285.000.000	16	21.580.000	2	13.140.000	0	0	1	7.150.000					1	7.150.000	17	28.730.000	**32,69%**	**10,08 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100	1.608.000.000	22,30	278.215.174	100	116.486.396	5%	6,000,000	0%	38,618,483					0,00%	44,618,483	24,80 %	322.833.657	**24,80%**	**20,08 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23	460.000.000	3	72.638.000	2	18.000.000	0	0	0	0					0	0	3	72.638.000	**13,04%**	**15,79 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23	210.000.000	3	2.755.000	1	2.540.170	0	0	0	0					0	0	3	2.755.000	**13,04%**	**1,31%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	183.000.000	6	17.370.000	5	3.924.000	0	0	0	0					0	0	6	17.370.000	**25,00%**	**9,49%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	155.000.000	14	48.355.000	12	30.290.000	0	6.000.000	0	4.000.000					0	10.000.000	14	58.355.000	**29,17%**	**37,65 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	600.000.000	15	137.097.174	12	61.732.226	3	0	3	34.618.483					6	34.618.483	21	171.715.657	**43,75%**	**28,62 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100	820.000.000	0,00	0	0	95.997.240	20%	0	0%	23,999,310					0,00%	23,999,310	0,00%	23.999.310	**0,00%**	**2,93%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22	820.000.000	0	0	1	95.997.240	0	0	0	23.999.310					0	23.999.310	0	23.999.310	**0,00%**	**2,93%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia (%)	100	4.355.000.000	25,00	112.785.284	100	87.791.504	11%	9,900,000	0%	23,630,474					0,00%	33,530,474	35,00 %	146.315.758	**35,00%**	**3,36%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	355.000.000	15	48.097.284	12	48.191.504	3	0	3	17.030.474					6	17.030.474	21	65.127.758	**35,00%**	**18,35 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	4.000.000.000	15	64.688.000	12	39.600.000	3	9.900.000	3	6.600.000					6	16.500.000	21	81.188.000	**35,00%**	**2,03%**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	100	285.000.000	7,23	61.691.130	100	32.550.000	12%	3,900,000	0%	2,600,000					0,00%	6,500,000	11,49 %	68.191.130	**11,49%**	**23,93 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	235	285.000.000	17	61.691.130	47	32.550.000	6	3.900.000	4	2.600.000					10	6.500.000	27	68.191.130	**11,49%**	**23,93 %**	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Total Target (RP)									**7.486.724.370**		**Total Realisasi (RP)**							**3.043.770.800**						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**31,02**	**40,66**					
Predikat kinerja																		**SR**	**SR**					

2.2. Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dilakukan melalui proses review internal untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, terutama dalam rangka penyesuaian arah kebijakan dengan Renstra 2025–2029. Review ini menelaah perkembangan aktual di lapangan, dinamika kebijakan nasional, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang berpengaruh terhadap realisasi kinerja.

Pada periode awal Tahun 2025, pelaksanaan Renja dilakukan dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden, termasuk pemotongan belanja perjalanan dinas hingga 50%, sehingga beberapa aktivitas koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan teknis harus disesuaikan. Meskipun demikian, perangkat daerah tetap melaksanakan sejumlah kegiatan prioritas dengan pendekatan efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan review sampai dengan Triwulan II, terdapat sejumlah isu penting dan capaian yang menjadi bahan evaluasi Renja Perubahan 2025, sebagai berikut:

1. Tantangan sektor tanaman pangan akibat minimnya infrastruktur irigasi dan alih fungsi lahan

Sebagian besar wilayah persawahan masih merupakan sawah tadah hujan sehingga sangat dipengaruhi curah hujan. Pada semester awal, kapasitas produksi tidak meningkat signifikan karena terbatasnya sarana irigasi, pompanisasi, serta tidak stabilnya kondisi hidrologi. Selain itu, indikasi alih fungsi lahan produktif menambah tekanan terhadap luas tanam efektif. Kondisi ini menuntut penyesuaian fokus kegiatan pada penyediaan sarana air, perlindungan lahan pertanian, dan intervensi yang lebih tepat sasaran.

2. Keterbatasan dukungan program pusat dan kebutuhan penyiapan dokumen teknis

Potensi komoditas pertanian Mamuju Tengah cukup besar, namun pemanfaatan peluang program kementerian masih terhambat oleh keterbatasan dokumen pendukung seperti peta geospasial, data teknis, dan proposal kegiatan. Tantangan ini juga diperberat oleh efisiensi anggaran yang membatasi penyusunan dokumen dan proses verifikasi lapangan. Oleh karena itu, beberapa kegiatan prioritas perlu diarahkan untuk menyiapkan persyaratan teknis agar daerah tetap dapat berkompetisi dalam memperoleh dukungan program pusat.

3. Implementasi kebijakan satu peta pada perizinan perkebunan membutuhkan dukungan pembiayaan

Pelaksanaan kebijakan satu peta menuntut sinkronisasi data perizinan perkebunan lintas sektor. Hingga Triwulan II, proses verifikasi lapangan, pendataan ulang, dan validasi peta masih membutuhkan biaya pendampingan khusus. Dengan kapasitas

anggaran terbatas, proses ini berjalan bertahap dan menjadi salah satu pertimbangan perubahan alokasi dalam Renja Perubahan 2025.

4. Ancaman penyakit hewan dan kebutuhan respons cepat di lapangan

Kasus penyakit hewan strategis seperti PMK, ASF, dan Jembrana tetap menjadi perhatian. Meski anggaran terbatas, perangkat daerah tetap melaksanakan beberapa layanan dasar peternakan seperti:

i. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, yang dilaksanakan secara efisien dengan memaksimalkan tenaga lapangan dan peralatan yang tersedia.

ii. Pengamanan lalu lintas ternak, meski harus menyesuaikan kebutuhan pengadaan obat-obatan dan sarana pemeriksaan akibat efisiensi anggaran.

Upaya ini diperlukan untuk menjaga kestabilan populasi ternak dan menjamin keamanan pangan asal hewan.

5. Pelaksanaan kegiatan strategis berbasis efisiensi pada subsektor pangan dan hortikultura

Meskipun terjadi pembatasan anggaran, beberapa kegiatan prioritas tetap dapat dilaksanakan, antara lain:

- Pemberian bantuan benih cabai kepada 5 kelompok tani, sebagai langkah intervensi cepat untuk menekan inflasi komoditas pangan sensitif.
- Monitoring pupuk bersubsidi dan alsintan pascapanen, untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan sarana produksi digunakan secara optimal.
- Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan mengaktifkan kembali fungsi OKKPD, terutama dalam pengawasan mutu, pemantauan keamanan produk, dan fasilitasi distribusi pangan segar.
- Pemanfaatan pekarangan melalui program Gerasarum bagi 10 kelompok wanita tani, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan diversifikasi pangan lokal.
- Pendataan harga pangan secara berkala, yang menjadi bahan untuk penyusunan neraca pangan dan analisis ketersediaan–kebutuhan pangan daerah.
- Penguatan subsektor hortikultura, perkebunan, dan perlunya dukungan berkelanjutan

Subsektor hortikultura dan perkebunan menunjukkan perkembangan stabil hingga Triwulan II. Namun keberlangsungan capaian ini memerlukan peningkatan penyuluhan, pengendalian OPT, penyediaan sarana produksi, dan dukungan pascapanen. Kegiatan ini menjadi bagian dari penyesuaian prioritas dalam Renja Perubahan 2025.

7. Efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan beberapa program

Adanya kebijakan efisiensi nasional berdampak langsung pada pengurangan beberapa kegiatan, termasuk:

- Pengurangan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh, akibat pemotongan belanja operasional dan dukungan mobilitas.
- Penundaan beberapa kegiatan pembinaan teknis yang membutuhkan perjalanan dinas lintas kecamatan.

Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam melakukan penyesuaian target dan realokasi program pada Renja Perubahan.

Tabel 2.2 Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Perubahan	Alasan Kebutuhan Pagu Anggaran	Catatan Penting
		Target	Realisasi					
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		4.951.176.097	202.970.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		7.533.921.955		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		102.900.303	56.852.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		287.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		102.900.303	56.852.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		287.000.000		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Peresentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat*	65.000.396	43.741.500	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Peresentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat*	212.000.000		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*	45.000.412	35.741.500	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*	111.000.000		

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	10.000.242	7.200.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	37.000.000		
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	25.944.933	20.253.000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	48.000.000		
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	9.055.237	8.288.500	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	26.000.000		
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah warga Desil-1 P3KE yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan untuk diversifikasi sumber pangan (Orang) Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	19.999.984	8.000.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah warga Desil-1 P3KE yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan untuk diversifikasi sumber pangan (Orang) Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	101.000.000		

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	9.999.742	5.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	20.000.000		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	10.000.242	3.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	81.000.000		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Prersentase penanganan kerawanan pangan*	32.899.799	8.141.500	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Prersentase penanganan kerawanan pangan*	50.000.000		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan*	32.899.799	8.141.500	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan*	50.000.000		
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	32.899.799	8.141.500	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	50.000.000		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan*	5.000.108	4.969.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan*	25.000.000		

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar*	5.000.108	4.969.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar*	25.000.000		
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	5.000.108	4.969.000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	25.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4.848.275.794	146.118.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		7.246.921.955		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		4.848.275.794	146.118.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		7.246.921.955		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase penunjang urusan Dinas Pertanian berjalan sesuai standar Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani*	4.505.272.681	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase penunjang urusan Dinas Pertanian berjalan sesuai standar Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani*	5.750.921.955		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu*	41.613.190	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu*	69.400.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	37.613.190		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	66.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	700.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	700.000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1.000.000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1.000.000		

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*	4.128.452.644	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*	5.181.972.288		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	4.105.945.647		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	5.136.972.288		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	22.506.997		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	45.000.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar*	5.288.257	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar*	24.488.257		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	5.288.257		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	24.488.257		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani*	28.064.700	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani*	70.000.000		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		14.924.700		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		40.000.000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	13.140.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	30.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*	101.115.146	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*	149.464.170		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	18.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	50.000.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2.540.170		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2.540.170		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3.924.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3.924.000		

Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	6.290.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	33.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	70.360.976		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	60.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi*	95.997.240	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi*	130.997.240		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	95.997.240		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	130.997.240		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia*	87.791.504	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia*	89.600.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48.191.504		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	50.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	39.600.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	39.600.000		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*	16.950.000	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*	35.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16.950.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	35.000.000		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian*	144.004.229	103.118.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian*	765.000.000		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase penggunaan sarana pertanian*	64.999.273	63.999.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase penggunaan sarana pertanian*	600.000.000		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	39.999.411	39.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	320.000.000		
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	24.999.862	24.999.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	280.000.000		

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak dan Hijauan pakan ternak yan disediakan*	79.004.956	39.119.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak dan Hijauan pakan ternak yan disediakan*	165.000.000		
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	79.004.956	39.119.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	165.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase meningkatnya populasi ternak*	103.999.409		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase meningkatnya populasi ternak*	180.000.000		
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah*	103.999.409		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah*	180.000.000		
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	103.999.409	80.740.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	180.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*	69.998.981	18.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*	116.000.000		

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*	69.998.981	18.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*	116.000.000		
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	19.998.981	18.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	66.000.000		
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	50.000.000		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	50.000.000		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani*	25.000.494	25.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani*	435.000.000		

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*% Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian*	25.000.494	25.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*% Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian*	435.000.000		
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	25.000.494	25.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	435.000.000		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH

Dalam penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka disusunlah usulan perubahan pagu dan indikator yang tertuang dalam table 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kabupaten : Mamuju Tengah
Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				7.617.849.884,00	5.151.195.576,00	7.486.724.370,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				595.000.000,00	102.900.303,00	286.235.193,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				595.000.000,00	102.900.303,00	286.235.193,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100 %	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	30 %	30 %	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	1 unit	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIK	Peresentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	100 %	100 %	380.000.000,00	65.000.396,00	211.671.913,00	

ASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan Masyarakat						
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100 %	100 %	185.000.000,00	45.000.412,00	45.000.412,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia							
	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	75 Keluarga	75 Keluarga	15.000.000,00	10.000.242,00	36.840.242,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota							
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	15.000.000,00	25.944.933,00	47.544.933,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota							

	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pemantauan Stok Pangan							
	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota							
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota							
	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis							
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan							
	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	9.055.237,00	25.615.237,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)							
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							

	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	40 Ton	40.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	40 Ton	40 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota							
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	40 Ton	40 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota							
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	40 Ton	40 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal							
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah warga Desil-1 P3KE yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan untuk diversifikasi sumber pangan (Orang) Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target	100 % 40 orang	100 % 40 orang	75.000.000,00	19.999.984,00	19.999.984,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

	Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	9.999.742,00	20.399.742,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16 Laporan	16 Laporan	25.000.000,00	10.000.242,00	81.271.759,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun							
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	24 Laporan	24 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prersentase penanganan kerawanan pangan	100 %	100 %	75.000.000,00	32.899.799,00	48.834.799,00	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	32.899.799,00	32.899.799,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan							
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	32.899.799,00	48.834.799,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	% Desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani (%) Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	100% % 3 Laporan	100% % 3 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

	Kewenangan Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	9 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	100 %	125.000.000,00	5.000.108,00	25.728.481,00	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.000.000,00	5.000.108,00	5.000.108,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	21 Dokumen	21 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan							
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	7 Dokumen	7 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	5.000.108,00	25.728.481,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							
	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							
	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.022.849.884,00	5.048.295.273,00	7.200.489.177,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.022.849.884,00	5.048.295.273,00	7.200.489.177,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan Dinas Pertanian berjalan sesuai standar Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani	100 100 % Persen	100 100 % Persen	5.091.849.884,00	4.505.292.309,00	5.807.923.674,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	100 %	40.000.000,00	41.632.818,00	41.632.818,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	37.613.190,00	59.813.190,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.004.907,00	704.907,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.004.907,00	704.907,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						PERTANIAN
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.004.907,00	1.004.907,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.004.907,00	1.004.907,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	100 %	4.386.649.884,00	4.128.452.644,00	4.128.452.644,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ bulan	57 Orang/ bulan	4.369.649.884,00	4.105.945.647,00	5.298.885.762,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	22.506.997,00	41.226.997,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100 %	100 %	48.000.000,00	5.288.257,00	5.288.257,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	5 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	5.288.257,00	24.488.257,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	100 %	80.000.000,00	28.064.700,00	28.064.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	0,00	14.924.700,00	34.124.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	100 %	208.000.000,00	101.115.146,00	101.115.146,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	2.540.170,00	2.540.170,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	3.924.000,00	3.924.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	6.290.000,00	30.290.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	70.360.976,00	61.732.226,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	100 %	180.000.000,00	95.997.240,00	95.997.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	15.000.000,00	95.997.240,00	95.997.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pertanian yang tersedia	100 %	100 %	94.200.000,00	87.791.504,00	87.791.504,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	48.191.504,00	48.191.504,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	100 %	55.000.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46+1 Unit	46+1 Unit	25.000.000,00	16.950.000,00	32.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian	2,46 %	2,46 %	340.000.000,00	144.004.229,00	758.958.619,00	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaan sarana pertanian	100 %	100 %	280.000.000,00	64.999.273,00	64.999.273,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	39.999.411,00	291.557.901,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	24.999.862,00	300.635.762,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan							
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan							
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura							
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang							
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	7000 Batang	7000 Batang	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang							
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	5000 Batang	5000 Batang	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji							
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	8000 Gram	8000 Gram	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan							
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan							
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura							
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak dan Hijauan pakan ternak yan disediakan	5100 Ekor	5100 Ekor	60.000.000,00	79.004.956,00	79.004.956,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							

	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5100 Ekor	5100 Ekor	35.000.000,00	79.004.956,00	166.764.956,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	15000 Dosis	15000 Dosis	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase ketersediaan prasarana pertanian Luas Sawah yang produktif	40 4420,92 % Ha	40 4420,92 % Ha	526.000.000,00	0,00	51.210.000,00	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase pengembangan prasarana pertanian	100 %	100 %	325.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian							
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	65000 Ha	65000 Ha	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan							
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan							
	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan							

	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	7 Unit	7 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan							
	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura							
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan							
	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan							
	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota							
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota							
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota							

	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian							
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prsarana pertanian	100 %	100 %	201.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	51.210.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit							
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya							
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan							
	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase meningkatnya populasi ternak	2,4 %	2,4 %	470.000.000,00	103.999.409,00	179.599.409,00	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan penanggulangan penyakit hewan menular	100 %	100 %	110.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular							
	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase jaminan pelayanan hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar daerah	100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM							
	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah	100 %	100 %	180.000.000,00	103.999.409,00	103.999.409,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium							
	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	103.999.409,00	179.599.409,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase penerapan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan							
	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan							
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	3 %	3 %	125.000.000,00	69.998.981,00	116.404.981,00	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Presentase identifikasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %	100 %	125.000.000,00	69.998.981,00	69.998.981,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20 Ha	10 Ha	25.000.000,00	19.998.981,00	66.404.981,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	70 Ha	70 Ha	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	60 Ha	60 Ha	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							
	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan							
	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PERIZINAN	Persentase peningkatan usaha	1,29 %	1,29 %	225.000.000,00	0,00	0,00	

USAHA PERTANIAN	bidang pertanian dan peternakan						
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha pertanian yang memperoleh Izin lengkap lingkup dalam daerah	100 %	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian							
	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian							
	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian							
	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan							
	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

	Hewan, Rumah Potong Hewan						
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan							
	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan							
	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan							
	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase ketersediaan penyedia obat hewan	100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan							
	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani	100 %	100 %	245.000.000,00	225.000.345,00	286.392.494,00	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	% Kelompok tani yang terlayani penyuluhan pertanian Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100 %	100 %	245.000.000,00	225.000.345,00	225.000.345,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							

	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	25.000.494,00	286.392.494,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota							
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian							
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	56 Orang	56 Orang	50.000.000,00	199.999.851,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota							
	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani							
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian							
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				7.617.849.884,00	**5.151.195.576,00**	**7.486.724.370,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah serta perubahan dokumen acuan dari Renstra 2021–2026 menjadi Renstra 2025–2029. Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 tetap berada dalam koridor kebijakan strategis pemerintah daerah, serta selaras dengan kebutuhan aktual masyarakat di sektor pangan, pertanian, dan peternakan.

Renja Perubahan 2025 ini memuat penyesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan, serta kebutuhan pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan perangkat daerah selama tahun berjalan. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, kondisi faktual di lapangan, kebijakan nasional, kapasitas fiskal daerah, serta prioritas pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, mengendalikan penyakit hewan, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan ini, diharapkan seluruh pelaksana teknis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku usaha tani, lembaga masyarakat, maupun mitra pembangunan, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan sektor pangan dan pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah.

Semoga Renja Perubahan 2025 ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja perangkat daerah dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tobadak, 7 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Ir. H. AMRULLAH, MMPub
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19670312 200003 1 0077

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah azzawa jallla, atas Rahmat-Nyalah sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mamuju Tengah dapat terselesaikan, walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini, dimaksudkan sebagai dasar untuk mengarahkan pada tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi sesuai dengan arah kebijakan, dan program prioritas, serta sasaran kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan secara regular setiap tahun. Sekaligus, penyesuaian dengan sasaran dan program pendanaan pada tahun berjalan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahunan ini. Semoga, Allah yang Maha Pengampun senantiasa mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan yang terjadi. Amin.

Topoyo, 19 Agustus 2025

Kepala Dinas

ASMUNI, S.Pd., M.Pd

Nip. 19681115 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.1 Landasan Hukum 2

1.2 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB I PENDAHULUAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **5**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 7

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 8

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 8

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **11**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 11

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **14**

BAB V PENUTUP **24**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.....6
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 7
Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD 9
Tabel 2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 10
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup.....11
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana kerja Pembangunan Daerah (RPJPD). Rencana pembangunan daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengeh dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota, maka diterbitkanlah Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan,langkah dan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan provinsi.

Dengan demikian maka sangat jelaslah bahwa penyusunan Rencana Kerja atau Renja SKPD adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap SKPD. Demikian pula dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, untuk merealisasikan kepentingan dan kebutuhan satu tahun kedepan

maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dan dibuat dengan memperhatikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra SKPD Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dibidang Lingkungan Hidup.

DLH mempunyai tugas untuk pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi Udara, Air dan Tanah, menjaga keseimbangan lingkungan dengan dilaksanakannya penghijauan lingkungan, menjaga kualitas ekosistem hutan lindung dan daerah aliran sungan (DAS) sebagai sumber oksigen dan air. Dengan demikian sangatlah tepat jika sekiranya pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam memantapkan programnya dan memantapkan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup, mewujudkan program serta kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.2.1 Undang –undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

1.2.2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Daerah dan Pusat;

1.2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.2.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.2.5 Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;

1.2.6 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1.2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.2.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1.2.9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1.2.10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkugan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

1.2.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan

1.2.12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah adalah untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendukung pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mendukung tercapainya kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentasi Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentasi Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Tersedianya peningkatan Disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Presentasi Peningkatan Kapasitas SDM yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat secara tepat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Presentasi peningkatan kesejahteraan pegawai yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Luas cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	773,75 Ha	773,75 Ha	773,75 Ha	773,75 Ha	793,75 Ha	793,75 Ha	793,75 Ha

Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dipantau dan dikendalikan	Sungai = 5. Perusahaan 2 rumah sakit / puskesmas	Sungai = 5. Perusahaan 2 rumah sakit / puskesmas	Sungai = 5. Perusahaan 2 rumah sakit / puskesmas	Sunga i = 5. Perusahaan 2 rumah sakit / puskesmas	Sungai = 5. Perusahaan 2 rumah sakit / puskesmas	Sunga i = 5. Perusahaan 2 ruma h sakit / puskesmas	Sunga i = 5. Perusahaan 2 ruma h sakit / puskesmas
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lokasi perlindungan dan konservasi SDA	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	-	-	-
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan	Jumlah Dokumen Akses SDA yang dapat diakses masyarakat luas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Terget Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,71	74,71	75,00	75,29	75,59	75,88	76,17
2	Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	-	-	7641,34	7564,93	7489,28	7414,39	7340,24
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,75	58,75	58,85	58,95	59,05	59,15	59,25
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,05	86,05	86,16	86,26	86,36	86,46	86,56

5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	81,11	81,11	82,09	83,07	84,05	85,03	86,01
6	Persentase Penurunan Emisi GRK	-	-	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
7	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
8	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	24 %	24 %	26 %	27 %	28 %	30 %	30 %
9	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	74 %	74 %	73 %	72 %	71 %	70 %	70 %
10	Persentase Cakupan Area Pelayanan Sampah	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,24 %	1,26 %	1,27 %	1,29 %
11	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0,00011 %	0,00011 %	0,00011 %	0,00011 %	0,00013 %	0,00016 %	0,00019 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Pengelolaan Persampahan;
2. Penurunan Pencemaran Air, Udara dan Tanah;
3. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; dan
4. Penambahan Ruang Terbuka Hijau.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikat or kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Cat at an Penti ng
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Topoyo	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	80 %	550.000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tobadak	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	80 %	550.000	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mamuju Tengah	Cakupan Wilayah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56 %	230.000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mamuju Tengah	Cakupan Wilayah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56 %	230.000	
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Mamuju Tengah	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordinasikan Pengendalian Limbahnya	100 %	35.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Mamuju Tengah	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordinasikan Pengendalian Limbahnya	100 %	35.000	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Mamuju Tengah	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	80 %	85.000	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Mamuju Tengah	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	75 %	85.000	
5	Program Pengelolaan Sampah	Mamuju Tengah	Persentase Sampah yang dikelola	73 %	1.439.500	Program Pengelolaan Sampah	Mamuju Tengah	Persentase Sampah yang dikelola	73 %	1.439.500	
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tobadak dan Topoyo	Cakupan Keanekaragaman Hayati yang dikelola	100 %	30.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tobadak dan Topoyo	Cakupan Keanekaragaman Hayati yang dikelola	100 %	30.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Sampah	Kec. Topoyo; Desa Topoyo, Desa Tabolang, Desa Salupangkang Kec. Tobadak; Desa Mahahe	Jumlah sarana yang disediakan Jumlah sarana yang disediakan Jumlah Sarana yang disediakan	50 unit 1 unit mobil 1 Unit 1 Unit	Tempat sampah. Pengangkut sampah Pengangkut sampah Pengelolaan sampah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat RPJP 2025-2029 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

1. Mendayagunakan dan mengelola sumberdaya alam terbarukan;
2. Menjaga dan melestarikan sumber daya air dan energi;
3. Mengembangkan potensi kelautan;
4. Menjaga, mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumber daya khas dan kehati;
5. Mitigasi bencana;
6. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta
7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hal ini mengimplikasikan diharuskannya kelembagaan di bidang lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada lampiran 1, menyebutkan bahwa pembangunan Lingkungan Hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan kehidupan manusia. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penangan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,71	75,00	75,29	75,59	75,88	76,17
	Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	-	7641,34	7564,93	7489,28	7414,39	7340,24
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta menurunnya emisi gas rumah kaca (S1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,75	58,85	58,95	59,05	59,15	59,25
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,05	86,16	86,26	86,36	86,46	86,56
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	81,11	82,09	83,07	84,05	85,03	86,01
	Persentase Penurunan Emisi GRK	-	1%	2%	3%	4%	5%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (S2)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	70%	75%	80%	85%	90%	95%
Meningkatnya pengelolaan persampahan (S3)	Persentase penanganan timbulan sampah	24%	26%	27%	28%	30%	30%
	Persentase pengurangan timbulan sampah	74%	73%	72%	71%	70%	70%
	Persentase cakupan area pelayanan sampah	1,23%	1,23%	1,24%	1,26%	1,27%	1,29%

nya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (S4)	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Kawasan Perkotaan	0,00011%	0,00011%	0,00011%	0,00013%	0,00016%	0,00019%
kan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	C	C	CC	CC	B
nya Dukungan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat 1)	Persentase Capa ian Kinerja Program Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Pergeseran)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025 (Setelah Pergeseran)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				5.234.220.828	DAU					DAU
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				5.234.220.828	DAU					DAU
2.11.01	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	Persentase urusan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Topoyo	100%	1.919.528.543	**DAU**		Topoyo	100%	1.919.528.543	**DAU**

2.11.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Topoyo	100 %	23.426.223	DAU		Topoyo	100 %	23.426.223		DAU
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Topoyo	1 Dokumen	17.549.714	DAU		Topoyo	1 Dokumen	17.549.714		DAU
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD yang disusun	Topoyo	1 Dokumen	967.191	DAU		Topoyo	1 Dokumen	967.191		DAU
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD yang disusun	Topoyo	1 Dokumen	1.342.191	DAU		Topoyo	1 Dokumen	1.342.191		DAU
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD yang disusun	Topoyo	1 Dokumen	987.575	DAU		Topoyo	1 Dokumen	987.575		DAU
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD yang disusun	Topoyo	1 Dokumen	1.405.441	DAU		Topoyo	1 Dokumen	1.405.441		DAU

2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Topoyo	1 Dokumen	1.174.111	DAU		Topoyo	4 Dokumen	1.174.111		DAU
2.11.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Topoyo	100 %	1.275.715.101	DAU		Topoyo	100 %	1.275.715.101		DAU
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Topoyo	10 Orang	1.175.450.542	DAU		Topoyo	10 Orang	1.175.450.542		DAU
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	Topoyo	10 Orang	79.800.000	DAU		Topoyo	1 Orang	79.800.000		DAU
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Topoyo	1 Dokumen	13.287.273	DAU		Topoyo	1 Dokumen	13.287.273		DAU
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Topoyo	18 Dokumen	7.177.286	DAU		Topoyo	18 Dokumen	7.177.286		DAU
2.11.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Topoyo	100 %	5.000.000	DAU		Topoyo	100 %	5.000.000		DAU
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tugas dan fungsi	Topoyo	1 Orang	5.000.000	DAU		Topoyo	10 Orang	5.000.000		DAU

2.11.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Topoyo	100 %	53.802.750	DAU		Topoyo	100 %	53.802.750		DAU
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Topoyo	4 Jenis	1.025.000	DAU		Topoyo	5 Jenis	1.025.000		DAU
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	Topoyo	10 Jenis	1.945.000	DAU		Topoyo	10 Jenis	1.945.000		DAU
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Topoyo	3 Jenis	4.015.000	DAU		Topoyo	2 Jenis	4.015.000		DAU
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Topoyo	200 Tamu	3.680.000	DAU		Topoyo	200 Tamu	3.680.000		DAU
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Topoyo	20 kali	43.137.750	DAU		Topoyo		43.137.750		
2.11.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Topoyo	100 %	120.000.000	DAU		Topoyo	100 %	120.000.000		DAU
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Topoyo	1 Unit	120.000.000	DAU		Topoyo	1 Unit	120.000.000		DAU
2.11.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Topoyo	100 %	43.558.855	DAU		Topoyo	100 %	43.558.855		DAU

2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Topoyo	20 mbps 600 m3 15000 kwh	18.958.855	DAU		Topoyo	20 mbps 600 m3 15000 kwh	18.958.855		DAU
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Topoyo	2 Orang	24.600.000	DAU		Topoyo	2 Orang	24.600.000		DAU
2.11.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Topoyo	100%	515.171.860	DAU		Topoyo	100%	515.171.860		DAU
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Topoyo	12 Unit	39.647.500	DAU		Topoyo	12 Unit	39.647.500		DAU
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Topoyo	11 Unit	416.814.360	DAU		Topoyo	11 Unit	416.814.360		DAU
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	Jumlah alat besar	Topoyo	2 Unit	53.810.000	DAU		Topoyo	2 Unit	53.810.000		DAU
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Topoyo	1 Gedung	4.900.000	DAU		Topoyo	1 Gedung	4.900.000		DAU

2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Topoyo	18 Unit	0	DAU		Topoyo	18 Unit	0	DAU
2.11.06	**Program Pembinaan da Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Llingkungan Hidup (PPLH)**	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Topoyo	80 %	39.251.638	DAU		Topoyo	100 %	39.251.638	DAU
2.11.06.2.01	***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lngkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Topoyo	53 Dunia usaha	39.251.638	DAU		Topoyo	1 Dokumen	39.251.638	DAU
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Data Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang teregistrasi	Topoyo	3 Dokumen	23.166.881	DAU		Topoyo		23.166.881	DAU
2.11.06.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang diawasi	Topoyo	3 Dokumen	16.084.757	DAU		Topoyo	1 Dokumen	16.084.757	DAU

	Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
2.11.10	***Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup***	Jumlah Aduan/Laporan yang dilakukan penanganan	Topoyo	2 Dokumen	10.655.535	DAU		Topoyo		10.655.535	DAU
2.11.10 2.01	***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota***	Jumlah Aduan/Laporan yang dilakukan penanganan	Topoyo	2 Dokumen	10.655.535	DAU		Topoyo		10.655.535	DAU
2.11.10 2.01. 04	***Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota***	Jumlah Berita Acara Aduan/Laporan yang dilakukan penanganan	Topoyo	2 Dokumen	10.655.535	DAU		Mamuju Tengah		10.655.535	DAU
2.11.03	**Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Cakupan Wilayah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mamuju Tengah	56 %	46.416.096	DAU		Mamuju Tengah	67 %	46.416.096	DAU
2.11.03.2.01	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana	Mamuju Tengah	100 %	46.416.096	DAU		Mamuju Tengah	100 %	46.416.096	DAU

2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, dan Udara	Jumlah dokumen Pemantauan Kualitas Air dan udara yang disusun	Mamuju Tengah	3 Dokumen	32.374.104	DAU		Mamuju Tengah	1 Dokumen	32.374.104	DAU

2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase penurunan emisi GRK	Mamuju Tengah	1 Dokumen	14.041.992	DAU		Mamuju Tengah	1 Dokumen	14.041.992	DAU
		-									
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Cakupan keanekaragaman hayati yang dikelola	Mamuju Tengah	100 %	364.203.409	DAU		Mamuju Tengah	100 %	364.203.409	DAU
2.11.04.2.01	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Mamuju Tengah	1692.5 m2	364.203.409	DAU		Mamuju Tengah	1692.5 m2	364.203.409	DAU
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mamuju Tengah	1 Lokasi	364.203.409	DAU		Mamuju Tengah	1 Lokasi	364.203.409	DAU
2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordinasikan Pengendalian Limbahnya	Mamuju Tengah	100 %	22.509.985	DAU		Mamuju Tengah	100 %	22.509.985	DAU

2.11.05.2.01	***Penyimpanan Sementara Limbah B3***	Persentase Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang memiliki Penyimpanan Sementara Limbah B3	Mamuju Tengah	100 %	22.509.985	DAU		Mamuju Tengah	100 %	22.509.985	DAU
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Izin Limbah B3 yang diterbitkan	Mamuju Tengah	5 Rekomendasi	18.272.507	DAU		Mamuju Tengah	3 Rekomendasi	18.272.507	DAU
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Berita Acara Verifikasi Lapangan	Mamuju Tengah	5 Berita Acara	4.237.478	DAU		Mamuju Tengah	3 Berita Acara	4.237.478	DAU

2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan sampah	Mamuju Tengah	73 %	2.714.509.376						DAU
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan sampah	Mamuju Tengah		2.714.509.376						
2.11.11.2.01.13	Pengurangan Sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Persentase penanganan sampah	Mamuju Tengah	73 %	9.611.876	DAU		Mamuju Tengah	73 %	9.611.876	DAU
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana/Prasarana yang disediakan	Mamuju Tengah	Tempat sampah 50 buah, Mobil 1 Unit,	1.134.097.500	DAU		Mamuju Tengah	Dum Truk 1 Unit, Mobil Amrol 1 Unit, dan Maintenance	2.501.761.000	DAU

									Timbangan Sampah 1 paket		
2.11.11.2.01.17	Penanganan Sampah melalui pemilahan dan Pengolahan Sampah di instalasi Pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undanngan.			Uang Lauk Pauk Tenaga Kebersihan (1248 Orang/bulan), Honorarium Sopir Kendaraan pengangkut Sampah, dan Honorarium Tenaga Kebersihan Sopir	1.570.800.000	DAU		Mamuju Tengah		1.570.800.000	DAU
Jumlah Pagu Indikatif			5.234.220.828					6.601.884.328			

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 untuk dilaksanakan pada tataran implementasi. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama. Mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mamuju Tengah.

Hasil kinerja Renja Perubahan PD dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja PD tahun berikutnya sehingga kinerja PD dapat terukur dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan rencana kerja ini akan di prioritaskan untuk dapat menjalankan program dan kegiatan yang dapat mendukung pemerintahan.

Topoyo, 19 Agustus 2025

Kepala Dinas

ASMUNI, S.Pd., M.Pd

Nip. 19681115 199203 1 010

Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah

Renja PERUBAHAN



2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 mengacu pada Kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan yang direncanakan Awal di dalam Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Topoyo,

Kepala DPPPA-PPKB Kabupaten
Mamuju Tengah

Hj. Nahda, S.Kep., MM
Pangkat: Pembina TK.I,IV/b
NIP. 19660501 198602 2 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Tahun Berjalan 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 25

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 31

2.4 Review Terhadap Rancangan akhi RKPD..... 33

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 43

BAB V PENUTUP..... 71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Dokumen Renja 2024.

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja (RENJA)

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya disebut Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan akhi RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari Program/ Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perubahan

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan: 1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD. 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan. 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Persiapan Penyusunan Renja Pembentukan Tim Penyusun Renja Orientasi mengenai Renja Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja Pengumpulan Data dan Informasi b. Pengolahan Data dan Informasi Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja. c.

Tahap Perumusan Rancangan Renja Pengolahan data dan informasi; Analisis gambaran pelayanan OPD; Mereview hasil evaluasi pelaksanan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Telaah terhadap rancangan akhi RKPD Perumusan tujuan dan sasaran; Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; Perumusan kegiatan prioritas 8 Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dam Keluarga Berencana Tahun 2025 Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD; Penyempurnaan rancangan kerja OPD;¬Pembahasan forum OPD; dan Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD f. Penetapan Renja.

1.1.3. Keterkaitan antara Dokumen Renja dengan renstra Perangkat Daerah dan RKPD Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen- dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga menentukan Rencana Strategis (Renstra) K/L setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor4301);
12. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan kerangka pengeluaran jangka menengah
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
22. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
26. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
27. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

30. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
39. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
45. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
46. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB (Mendasarkan UU. 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 dan Pewakilan BKKBN No 163 Tahun 2016
47. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (sebagai dasar revisi Renstra);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verfikasi, dan Validasi Pemtakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

53. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
54. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah. Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
55. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur,Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota Lampiran Peraturan
56. Kepala Bkkbn Nomor: 163 Tahun 2016 Tanggal :15 Agustus 2016;Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026
58. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menjamin Konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan.
2. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan.
3. Memberi landasan penentuan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 Memenuhi kebutuhan target kinerja sesuai kondisi sasaran program yang ditetapkan pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

a. BAB I. PENDAHULUAN
   Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

b. BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2025)

   Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Tahun berjalan, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan akhi RKPD, PenelahaanUsulan Program dan Kegiatan.

c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan yang sesuai dengan renstra

d. BAB V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut Input, Output dan Outcome.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tw. II tahun 2025

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tw.II tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Mamuju Tengah, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   -

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   2. Program Perlindungan Perempuan
   3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   4. Program Perlindungan Khusus Anak
   5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   6. Program Pengendalian Penduduk
   7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

c. Faktor-Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan

   Beberapa faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah :

   1. Luasnya wilayah binaan penyuluh KB.
   2. Terciptanyan koordinasi antara Instansi terkait.
   3. Peningkatan Kinerja Petugas PKB dan PLKB dalam Penggerakan akseptor MKJP dilini Lapangan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Triwulan IV, pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut. Evaluasi Pelaksanaan keseluruhan Program dan kegiatan urusan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun Tahun Lalu dan Tahun Berjalan dapat dilihat pada tabel T.C-29

Rancana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Prevelensi kepesertaan KB aktif			Persentase Peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur (%)	87,71	19.699.594.430	82,89	0	83,80	2.025.805.397																
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	55,00	19.699.594.430	0,00	0	45,00	2.025.805.397									0,00	390,306,000						
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase stakeholders dan mitra kerja yang berperan aktif dalam program KKBPK (%)	85	9.310.551.065	0,00	0	80	705.995.397	0%	42,200,000	0%	96,626,000	0%	0	0%	0	0,00%	138,826,000	0,00%	138.826.000	**0,00%**	**1,49%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.2.01 .0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5	236.000.000	0	0	1	218.490.397	0	42.200.000	0	41.626.000	0	0	0	0	0	83.826.000	0	83.826.000	**0,00%**	**35,52%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.03.2.01 .0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	25	8.710.601.065	0	0	5	120.000.000	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000	**0,00%**	**0,28%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai

		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25	129.350.000	0	0	5	77.500.000	0	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000	**0,00%**	**23,97%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	30	105.250.000	0	0	6	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	33	129.350.000	0	0	5	200.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan (%)	100	1.620.000.000	0,00	0	100	420.000.000	0%	0	0%	77,100,000	0%	0	0%	0	0,00%	77,100,000	0,00%	77.100.000	**0,00%**	**4,76%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.895	1.620.000.000	0	0	379	420.000.000	0	0	0	77.100.000	0	0	0	0	0	77.100.000	0	77.100.000	**0,00%**	**4,76%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi (%)	100	8.211.043.365	0,00	0	100	333.010.000	0%	0	0%	70,580,000	0%	0	0%	0	0,00%	70,580,000	0,00%	70.580.000	**0,00%**	**0,86%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	67	167.630.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Terlaksana
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	67.676	1.003.163.026	0	0	19.602	319.510.000	0	0	0	70.580.000	0	0	0	0	0	70.580.000	0	70.580.000	**0,00%**	**7,04%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	25	6.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Terlaksana
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5	640.250.000	0	0	1	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai

		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang di bina (%)	100	558.000.000	0,00	0	100	566.800.000	0%	0	0%	103,800,000	0%	0	0%	0	0,00%	103,800,000	0,00%	103.800.000	**0,00%**	**18,60%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.2.04 .0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	159	173.000.000	0	0	17	270.000.000	0	0	0	75.600.000	0	0	0	0	0	75.600.000	0	75.600.000	**0,00%**	**43,70%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.03.2.04 .0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	159	385.000.000	0	0	17	296.800.000	0	0	0	28.200.000	0	0	0	0	0	28.200.000	0	28.200.000	**0,00%**	**7,32%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
2	Meningkatnya status kemandirian keluarga sejahtera dan			Presentase KS 1 dan pra sejahtera dari total keluarga (%)	10	6.267.552.055	18	0	12	748.197.446															
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	80,00	453.450.852	0,00	0	65,00	157.200.000									0,00	27,500,000						
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk (%)	90	73.470.852	0,00	0	80	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Rancana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

		2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	7	73.470.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Terlaksana
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memiliki rumah data (%)	100	379.980.000	0,00	0	100	157.200.000	0%	10,700,000	0%	16,800,000	0%	0	0%	0	0,00%	27,500,000	0,00%	27.500.000	0,00%	7,24%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3	280.000.000	0	0	1	97.200.000	0	10.700.000	0	6.800.000	0	0	0	0	0	17.500.000	0	17.500.000	0,00%	6,25%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6	99.980.000	0	0	1	60.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0,00%	10,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Ratio akseptor KB (%)	78,80	5.814.101.203	0,00	0	78,50	590.997.446									0,00	6,000,000					
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga yang di bina (%)	88	4.230.101.203	0,00	0	87	62.997.268	0%	0	0%	6,000,000	0%	0	0%	0	0,00%	6,000,000	0,00%	6.000.000	0,00%	0,14%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

		2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	81	1.695.500.800	0	0	20	14.997.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	15	88.800.000	0	0	5	48.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0,00%	6,76%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	150	2.445.800.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Terlaksana
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Stakeholdes dan mitrakerja yang berperan aktif melalui pembinaan ketahanan dan kesejaheraan keluarga (%)	80	1.584.000.000	0,00	0	70	528.000.178	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3	750.000.000	0	0	1	240.000.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai

		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3	834.000.000	0	0	1	288.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Rasio kekerasan perempuan (%)	1,49	1.646.100.000	4,49	0	2,99	358.992.682																
				Kabupaten Layak Anak (Nilai)	900-1000		700-800		800-900																	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Persentase anggaran rensponsif gender terhadap APBD (%)	1,00	776.100.000	0,00	0	1,00	71.599.586									0,00	9,000,000						
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menerapkan PPRG dan ARG (%)	90	195.000.000	0,00	0	80	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Terlaksana
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan di lembaga legislatif dan lembaga PEMDA (%)	25	501.100.000	0,00	0	25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

		2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	501.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Terlaksana
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga penyedia layanan perempuan yang di berdayakan (%)	5	80.000.000	0,00	0	5	71.599.586	0%	5,400,000	0%	3,600,000	0%	0	0%	0	0,00%	9,000,000	0,00%	9.000.000	0,00%	11,25%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	80.000.000	0	0	50	71.599.586	0	5.400.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0,00%	11,25%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	100,00	425.000.000	0,00	0	100,00	160.361.438									0,00	94,131,511						
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	425.000.000	0,00	0	100	160.361.438	0%	8,700,000	0%	85,431,511	0%	0	0%	0	0,00%	94,131,511	0,00%	94.131.511	0,00%	22,15%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80	425.000.000	0	0	20	160.361.438	0	8.700.000	0	85.431.511	0	0	0	0	0	94.131.511	0	94.131.511	0,00%	22,15%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai

Rancana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan penyelesaiaan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)	100,00	245.000.000	0,00	0	100,00	49.762.025									0,00	49,531,000						
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeasan (%)	100	245.000.000	0,00	0	100	49.762.025	0%	0	0%	49,531,000	0%	0	0%	0	0,00%	49,531,000	16,67%	49.531.000	**16,67%**	**20,22%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	152	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Terlaksana
		2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	120.000.000	0	0	1	49.762.025	0	0	1	49.531.000	0	0	0	0	1	49.531.000	1	49.531.000	**33,33%**	**41,28%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	200.000.000	0,00	0	100,00	77.269.633									0,00	27,864,500						
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha yang terlobat dalam PHA (%)	90	200.000.000	0,00	0	80	77.269.633	0%	5,400,000	0%	22,464,500	0%	0	0%	0	0,00%	27,864,500	0,00%	27.864.500	**0,00%**	**13,93%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	200.000.000	0	0	1	77.269.633	0	5.400.000	0	22.464.500	0	0	0	0	0	27.864.500	0	27.864.500	**0,00%**	**13,93%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai

4	Meningkatnya data tata kelola kinerja dan keuangan pada DPPPA-PPKB			Nilai Sakip DPPPA-PPKB (Nilai)	62 (B)	15.588.414.958	57 (CC)	0	60 (B)	2.933.534.690																
				Persentase temual material pemeriksaan keuangan DPPPA-PPKB (%)	0		0		0																		
		2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	15.588.414.958	0,00	0	100,00	2.933.534.690									0,00	1,296,791,670						
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100	313.400.000	0,00	0	100	123.617.314	0%	17,400,000	0%	32,984,500	0%	0	0%	0	80,00%	50,384,500	5,00%	50.384.500	**5,00%**	**16,08%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	100.000.000	0	0	3	79.019.615	1	17.400.000	0	11.600.000	0	0	0	0	1	29.000.000	1	29.000.000	**10,00%**	**29,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	46.000.000	0	0	1	28.612.666	0	0	0	18.110.000	0	0	0	0	0	18.110.000	0	18.110.000	**0,00%**	**39,37%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai

		2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	25.000.000	0	0	1	4.473.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	23.900.000	0	0	1	3.275.820	1	0	0	3.274.500	0	0	0	0	1	3.274.500	1	3.274.500	**20,00%**	**13,70%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
		2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	18.500.000	0	0	1	2.995.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	100.000.000	0	0	4	5.240.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu (%)	100	10.696.514.958	0,00	0	100	2.481.599.185	0%	671,324,656	0%	433,203,914	10%	0	10%	0	40,00%	1,104,528,570	37,78%	1.104.528.570	**37,78%**	**10,33%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108	10.316.514.958	0	0	322	2.442.290.136	60	671.324.656	0	410.414.914	0	0	0	0	60	1.081.739.570	60	1.081.739.570	**55,56%**	**10,49%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai

		2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	380.000.000	0	0	1	39.309.049	1	0	0	22.789.000	0	0	0	0	1	22.789.000	1	22.789.000	**20,00%**	**6,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100	710.000.000	0,00	0	100	47.886.959	0%	0	0%	11,702,000	20%	0	20%	0	0,00%	11,702,000	0,00%	11.702.000	**0,00%**	**1,65%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	130.000.000	0	0	1	29.136.959	0	0	0	11.702.000	0	0	0	0	0	11.702.000	0	11.702.000	**0,00%**	**9,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	580.000.000	0	0	6	18.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100	1.449.500.000	0,00	0	100	36.241.750	0%	0	0%	980,000	10%	0	10%	0	0,00%	980,000	0,00%	980	**0,00%**	**0,07%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	49.500.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai

		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195	1.400.000.000	0	0	40	33.241.750	0	0	0	980.000	0	0	0	0	0	980.000	0	980.000	**0,00%**	**0,07%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjnang terpenuhi (%)	100	1.194.000.000	0,00	0	100	184.590.170	0%	0	0%	120,590,100	10%	0	10%	0	0,00%	120,590,100	0,00%	120.590.100	**0,00%**	**10,10%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	444.000.000	0	0	1	96.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	**0,00%**	**7,21%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	750.000.000	0	0	1	88.590.170	0	0	0	88.590.100	0	0	0	0	0	88.590.100	0	88.590.100	**0,00%**	**11,81%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia (%)	100	950.000.000	0,00	0	100	34.599.312	0%	0	0%	8,606,500	10%	0	10%	0	0,00%	8,606,500	0,00%	8.606.500	**0,00%**	**0,91%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Rencana Kerja (RenJa) Perubahan Tahun 2025

		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	350.000.000	0	0	1	18.999.312	0	0	0	4.706.500	0	0	0	0	0	4.706.500	0	4.706.500	**0,00%**	**1,34%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	600.000.000	0	0	1	15.600.000	0	0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000	**0,00%**	**0,65%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang terpelihara (%)	100	275.000.000	0,00	0	100	25.000.000	0%	0	0%	0	10%	0	10%	0	0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	250.000.000	0	0	3	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Tercapai
		2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Terlaksana
								Total Target (RP)		**6.066.530.215**						**Total Realisasi (RP)**			**1.901.124.681**						
																Rata-rata capaian kinerja (%)			**9,51**	**31,34**					
																Predikat kinerja			**SR**	**SR**					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak menangani dua urusan pilihan yaitu Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak berkewajiban memenuhi target capaian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

Gambaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Tengah dalam pencapaian target pelayanan SKPD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel T.C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	8		9	10	13		14	15
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				2,55%	2,55%	2,55%	2,55%		2,45%	2,45%	1,73%
	TFR (Total Fertility Rate)				2,5	2,49	2,48	2,47	2,69	2.70	2,68	2,59
	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB				69,23%	70%	72,55%	80%			57,58%	57,58%
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk				69,23%	70%	70%	70%			66,67%	66,67%
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk				3	1	1	1				
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan				12 sektor	12 sektor	14 sektor	16 sektor			11 sektor	12 sektor
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan onformal yang melakukan pendidikan kependudukan				4	5	6	7			2	2
	Rata-rata jumlah anak per keluarga				3 Jiwa	3Jiwa	2,9 Jiwa	2,8 Jiwa				

	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio petugas pembantu pembina kB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ratio akseptor KB				77,50%	80%	80%	82%	80,60%	63,29%	77,50%	64,31%
	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempan menikah usia 15-49				59.62%	60%	60%	65%		29,21%	55,97%	59,40%
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun				2.92%	2.90%	2.85%	2.80%				
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)				17,90%	17,80%	17,60%	16,95%		35,70%	23,51%	10,90%
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)				16,81%	22,00%	30%	33%		16,65%	26,01%	20,39%
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi				16,81%	22,00%	30%	33%				
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB				90%	90%	93%	95%		96%	97%	97%

	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB				90%	90%	93%	95%		63,64%	77,35%	78,23%
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB				80%	80%	85%	90%		59,82%	65,11%	65,93%
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan				5	5	5	5	0	3	5	5
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				85%	88%	90%	92%	66,66%	71,57%	77,22%	75,41%
	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standar pelayanan				100%	100%	100%	100%		123%	124%	127%
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes				65%	66%	67%	68%				
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				12,74%	13,00%	14,74%	15,00%				

	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa				98,50%	99,50%	100%	100%				
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan				3,42%	3,45%	3,45%	3,48%				
	Proporsi Kursi yang di duduki perempuan di DPR				25%	25%	25%	25%			12%	19,05%
	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta				30%	30%	35%	35%				12,14%
	Rasio KDRT				0,06%	0,06%	0,06%	0,06%			0,0047%	0,0114%
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur				25%	24%	24%	23%				
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				35,80%	35,80%	35,85%	35,85%				
	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penganangan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP dan PPT/PKT di R.S				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.				100%	100%	100%	100%				
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				2.05%	2.10%	2.15%	2.20%				

	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum				80%	80%	85%	85%			100%	100%
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100%	100%	100%	100%			100%	100%
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan				90%	90%	90%	90%			100%	100%
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD				0,92%	1,15%	1,15%	1,15%			96,48% *(sumber : Mateng dalam angka)*	96,76% (sumber : Mateng dalam angka)
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP				4.40%	4.40%	4.42%	4.42%			73,33% *(sumber : Mateng dalam angka)*	73,47% *(sumber : Mateng dalam angka)*
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA				2%	2,11%	2.12%	2.12%			57,96% *(sumber : Mateng dalam angka)*	63,36% *(sumber : Mateng dalam angka)*
	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi				2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun				80%	80%	80%	80%				
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian				70%	70%	70%	70%				

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024
   a. Permasalahan terkait Perlindungan Perempuan :
      1) Masih rendahnya persentase ARG dalam APBD;
      2) Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG di Kabupaten/Kota;
      3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
      4) Perlunya sosialisasi dan edukasi terhadap kekerasan Perempuan.
   b. Permasalahan terkait Bidang Perlindungan Anak :
      1) Belum optimalnya Pemenuhan hak anak;
      2) Tingginya angka pernikahan dini;
      3) Perlunya sosialisasi dan edukasi terhadap kekerasan anak;
   c. Permasalahan terkait UPTD PPA :
      1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
      2) Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak.;
   d. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan:
      1) Tingginya ego sektoral sehingga ada beberapa perangkat daerah yang kurang berperan aktif di kampung KB;
      2) Tingginya Angka Kelahiran (TFR) dilihat dari masih tingginya angka kematian pada bayi;
   e. Permasalahan terkait Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera :
      1) Tingginya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeetned);
      2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kontrasepsi KB
      3) Masih banyak mitos yg berkembang di masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi
      4) MasihTerbatas nya tenaga Medis kompeten dalam pemberian pelayanan KB
      5) Sarana prasarana yang masih kurang memadai untuk pelayanan KB

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Perlindungan Perempuan
   1) Rendahnya ARG (Anggaran Responsif Gender)
   2) **Implementasi PUG belum optimal**
   3) Keterwakilan perempuan di legislatif rendah
   4) Kurangnya edukasi tentang kekerasan terhadap Perempuan

b. Perlindungan Anak
   1) Pemenuhan hak anak belum optimal
   2) Angka pernikahan dini tinggi
   3) Kurangnya edukasi tentang kekerasan terhadap anak

c. UPTD PPA
   1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

d. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan
   1) Tingginya ego sektoral antar perangkat daerah
   2) Tingginya angka kelahiran (TFR)

e. Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
   1) Tingginya unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)
   2) Rendahnya pemahaman & banyaknya mitos soal kontrasepsi
   3) Terbatasnya tenaga medis dan sarana pelayanan KB

3. Peluang

1) Dukungan kebijakan nasional dan regulasi yang semakin kuat

   Adanya RPJMN, Perpres KLA, Perda PUG, dan Inpres Stunting yang memperkuat mandat program DP3APPKB.

2) Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan

   Peluang untuk memperkuat sistem pelaporan, edukasi daring, serta kampanye digital (contoh: aplikasi Perlindungan Perempuan & Anak, dashboard SIGA, e-KB)

3) Komitmen pemerintah pusat terhadap kesetaraan gender dan perlindungan anak

   Memberi ruang untuk penguatan kelembagaan, penambahan anggaran, serta

program prioritas nasional (contoh: PUG, Kabupaten/Kota Layak Anak, UPTD PPA).

4) Sinergi multisektor dan peluang kerja sama lintas OPD, swasta, dan Masyarakat Potensi mengembangkan kemitraan dengan BUMN, dunia usaha (CSR), LSM, tokoh agama, dan tokoh adat untuk kampanye dan layanan berbasis komunitas.

2.4 Review terhadap Rancangan akhi RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam RKPD Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan akhi RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju TengahpadaTabelT-C31.

Rencana kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

Tabel LC.3

Kegiatan, Lokasi, Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Kabupaten Mamuju Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Mamuju Tengah	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	35,00	2.349.686.236	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Mamuju Tengah	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	35,00	2.349.686.236
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Mamuju Tengah	Persentase stakeholders dan mitra kerja yang berperan aktif dalam program KKBPK (%)	75	667.500.812	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Mamuju Tengah	Persentase stakeholders dan mitra kerja yang berperan aktif dalam program KKBPK (%)	75	667.500.812
	Pengendalian Program KKBPK	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	134.995.437	Pengendalian Program KKBPK	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	134.995.437
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5	157.500.008	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5	157.500.008
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5	75.000.367	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5	75.000.367
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	100.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	100.000.000

	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5	200.005.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5	200.005.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Mamuju Tengah	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan (%)	100	168.001.800	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Mamuju Tengah	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan (%)	100	168.001.800
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Mamuju Tengah	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	379	168.001.800	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Mamuju Tengah	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	379	168.001.800
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi (%)	100	1.229.884.624	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi (%)	100	1.229.884.624
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13	174.552.400	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13	174.552.400
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19.502	273.358.392	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19.502	273.358.392
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Mamuju Tengah	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	769.263.832	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Mamuju Tengah	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	769.263.832

	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	12.710.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	12.710.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Mamuju Tengah	Persentase Kampung KB yang di bina (%)	100	284.299.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Mamuju Tengah	Persentase Kampung KB yang di bina (%)	100	284.299.000
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	17	3.750.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	17	3.750.000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Mamuju Tengah	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17	280.549.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Mamuju Tengah	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17	280.549.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Mamuju Tengah	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	50,00	169.870.852	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Mamuju Tengah	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	50,00	169.870.852
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mamuju Tengah	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk (%)	70	23.470.852	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mamuju Tengah	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk (%)	70	23.470.852
	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Mamuju Tengah	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	5	23.470.852	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Mamuju Tengah	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	5	23.470.852

	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase Desa yang memiliki rumah data (%)	100	146.400.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase Desa yang memiliki rumah data (%)	100	146.400.000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	86.400.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	86.400.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2	60.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2	60.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Mamuju Tengah	Ratio akseptor KB (%)	78,10	885.351.682	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Mamuju Tengah	Ratio akseptor KB (%)	78,10	885.351.682
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Mamuju Tengah	Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga yang di bina (%)	86	352.184.362	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Mamuju Tengah	Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga yang di bina (%)	86	352.184.362
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	23.384.362	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	23.384.362
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Mamuju Tengah	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	5	28.800.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Mamuju Tengah	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	5	28.800.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Mamuju Tengah	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	32	300.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Mamuju Tengah	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	32	300.000.000

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Mamuju Tengah	Persentase Stakeholdes dan mitrakerja yang berperan aktif melalui pembinaan ketahanan dan kesejaheraan keluarga (%)	60	533.167.320	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Mamuju Tengah	Persentase Stakeholdes dan mitrakerja yang berperan aktif melalui pembinaan ketahanan dan kesejaheraan keluarga (%)	60	533.167.320
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mamuju Tengah	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	269.167.320	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mamuju Tengah	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	269.167.320
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mamuju Tengah	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1	264.000.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mamuju Tengah	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1	264.000.000
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Mamuju Tengah	Persentase anggaran rensponsif gender terhadap APBD (%)	1,00	212.868.634	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Mamuju Tengah	Persentase anggaran rensponsif gender terhadap APBD (%)	1,00	212.868.634
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase OPD yang menerapkan PPRG dan ARG (%)	70	62.868.169	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase OPD yang menerapkan PPRG dan ARG (%)	70	62.868.169
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	62.868.169	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	62.868.169

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase perempuan di lembaga legislatif dan lembaga PEMDA (%)	25	150.000.465	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Persentase perempuan di lembaga legislatif dan lembaga PEMDA (%)	25	150.000.465
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Mamuju Tengah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	150.000.465	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Mamuju Tengah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	150.000.465
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	persentase lembaga penyedia layanan perempuan yang di berdayakan (%)	5	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	persentase lembaga penyedia layanan perempuan yang di berdayakan (%)	5	0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	0
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Mamuju Tengah	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	100,00	163.207.243	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Mamuju Tengah	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	100,00	163.207.243
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	163.207.243	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	163.207.243
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15	163.207.243	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15	163.207.243

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Mamuju Tengah	Cakupan penyelesaiaan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)	100,00	99.999.854	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Mamuju Tengah	Cakupan penyelesaiaan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)	100,00	99.999.854
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeasan (%)	100	99.999.854	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeasan (%)	100	99.999.854
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32	99.999.854	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32	99.999.854
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Mamuju Tengah	Cakupan anak korban kekerasan yang mendap atkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	71.979.023	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Mamuju Tengah	Cakupan anak korban kekerasan yang mendap atkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	71.979.023
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Peresentase lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha yang terlobat dalam PHA (%)	70	71.979.023	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Peresentase lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha yang terlobat dalam PHA (%)	70	71.979.023
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	71.979.023	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	71.979.023

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mamuju Tengah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	2.860.269.952	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mamuju Tengah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	2.860.269.952
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100	164.809.415	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100	164.809.415
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	102.800.280	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	102.800.280
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	32.426.905	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	32.426.905
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	8.030.838	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	8.030.838
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.023.175	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.023.175
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3.177.990	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3.177.990
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	14.350.227	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	14.350.227

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu (%)	100	2.324.747.050	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu (%)	100	2.324.747.050
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2.284.746.779	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2.284.746.779
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	40.000.271	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	40.000.271
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100	71.993.741	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100	71.993.741
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	39.813.741	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	39.813.741
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	32.180.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	32.180.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100	52.783.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100	52.783.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	49.783.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	49.783.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju Tengah	Persentase BMD-PD penunjnang terpenuhi (%)	100	184.587.410	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju Tengah	Persentase BMD-PD penunjnang terpenuhi (%)	100	184.587.410
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	95.997.240	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	95.997.240
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	88.590.170	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	88.590.170
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju Tengah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia (%)	100	34.599.336	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju Tengah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia (%)	100	34.599.336
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	18.999.336	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	18.999.336
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	15.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	15.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju Tengah	Persentase barang milik Daerah yang terpelihara (%)	100	26.750.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju Tengah	Persentase barang milik Daerah yang terpelihara (%)	100	26.750.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	25.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1.750.000
			Total Target (RP)		**6.813.233.476**	**Total Target (RP)**				**6.813.233.476**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan : Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas dan Mewujudkan Kesetaraan Gender

Sasaran : 1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Meningkatnya Pravelensi Kepesertaan KB Aktif
3. Meningkatnya Status Kemandirian Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera
4. Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Dinas PPPA - PPKB

3.2 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian **Visi** Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 yaitu **"Mamuju Tegah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla Tassisara"** dan **Misi ke 2** yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar**.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Kegiatan (2025)

Jumlah Program yaitu 8 Program yang terdiri dari Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

7 kegiatan dan 17 sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/kota, 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan pada program perlindungan perempuan, 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga, 1 kegiatan dan 1 sub

kegiatan pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan pada Program Pengendalian Penduduk, 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan pada Program pembinaan Keluarga Berencana, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejaterah (KS).

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Tabel 3.3 (T-C.33):

Rencana kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

TABEL T-C 33

T.C. - 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6.477.862.783,00	5.217.288.232,98	6.066.530.214,98		10.267.328.399,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.477.862.783,00	5.217.288.232,98	6.066.530.214,98		10.267.328.399,00
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						3.077.342.783,00	2.662.282.657,98	3.292.527.371,98		4.565.009.202,00
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					2.597.277.185,00	2.347.494.449,98	2.933.534.689,98		3.819.943.604,00
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu			100 %	100 %	161.677.185,00	54.467.314,00	54.467.314,00	100 %	66.700.000,00
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Dokumen	2 Dokumen	100.600.280,00	9.419.615,00	79.019.615,00	2 Dokumen	23.000.000,00
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	32.426.905,00	28.612.666,00	28.612.666,00	1 Dokumen	10.000.000,00
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	4.473.466,00	4.473.466,00	1 Dokumen	5.000.000,00
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.275.820,00	3.275.820,00	1 Dokumen	5.000.000,00
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.995.105,00	2.995.105,00	1 Dokumen	3.700.000,00

	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Laporan	4 Laporan	14.350.000,00	5.690.642,00	5.240.642,00	4 Laporan	20.000.000,00
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu			100 %	100 %	2.040.000.000,00	1.948.505.253,00	1.948.505.253,00	100 %	2.718.743.604,00
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.000.000.000,00	1.909.196.204,00	2.442.290.136,00	23 Orang/bulan	2.638.743.604,00
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	39.309.049,00	39.309.049,00	1 Laporan	80.000.000,00
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai PD yang dilayani			100 %	100 %	34.600.000,00	50.489.051,00	50.489.051,00	100 %	151.000.000,00
	2	08	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.900.000,00	31.739.051,00	29.136.959,00	1 Dokumen	26.000.000,00
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Orang	6 Orang	13.700.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	6 Orang	125.000.000,00

	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar			100 %	100 %	55.000.000,00	49.843.350,00	49.843.350,00	100 %	323.500.000,00
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	2 Paket	13.000.000,00
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1 Laporan	10.500.000,00
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	40 Laporan	2 Laporan	42.000.000,00	46.843.350,00	33.241.750,00	2 Laporan	300.000.000,00
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang terpenuhi			100 %	100 %	225.000.000,00	184.590.170,00	184.590.170,00	100 %	260.000.000,00
	2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	1 Unit	95.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	1 Unit	90.000.000,00
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	5 Unit	20.000.000,00
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	88.590.170,00	88.590.170,00	1 Unit	150.000.000,00

	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia			100 %	100 %	46.000.000,00	34.599.311,98	34.599.311,98	100 %	210.000.000,00
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	18.999.311,98	18.999.311,98	1 Laporan	70.000.000,00
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	4 Laporan	20.000.000,00
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	1 Laporan	120.000.000,00
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara			100 %	100 %	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100 %	90.000.000,00
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	1 Unit	35.000.000,00
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	3 Unit	50.000.000,00

	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	5 Unit	5.000.000,00
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran responsif gender terhadap APBD			1 %	2 %	120.000.000,00	49.999.586,00	71.599.586,00	2,5 %	255.000.000,00
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menerapkan PPRG dan ARG			70 %	70 %	50.000.000,00	0,00	0,00	83 %	65.000.000,00
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	1 Dokumen	65.000.000,00
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan di lembaga legislatif dan lembaga PEMDA			25 %	25 %	30.000.000,00	0,00	0,00	25 %	150.000.000,00
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi										
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Organisasi	5 Organisasi	30.000.000,00	0,00	0,00	5 Organisasi	150.000.000,00
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perempuan yang diberdayakan			100 %	100 %	40.000.000,00	49.999.586,00	49.999.586,00	100 %	40.000.000,00
	2	08	02	2.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	49.999.586,00	71.599.586,00	50 Orang	40.000.000,00

3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan)			100 %	100 %	100.000.000,00	149.979.706,00	160.361.438,00	100 %	85.000.000,00
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			100 %	100 %	100.000.000,00	149.979.706,00	149.979.706,00	100 %	85.000.000,00
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	149.979.706,00	160.361.438,00	20 Orang	85.000.000,00
4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan penyelesaiaan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan			100 %	100 %	70.065.598,00	50.000.048,00	49.762.025,00	100 %	70.065.598,00
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan			100 %	100 %	70.065.598,00	50.000.048,00	50.000.048,00	100 %	70.065.598,00
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	50.000.048,00	49.762.025,00	1 Dokumen	40.000.000,00
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.065.598,00	0,00	0,00	1 Dokumen	30.065.598,00

5	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan anak korban kekerasan yang mendap atkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			100 %	100 %	120.000.000,00	64.808.868,00	77.269.633,00	100 %	135.000.000,00
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang terlibat dalam PHA			80 %	80 %	40.000.000,00	64.808.868,00	64.808.868,00	80 %	40.000.000,00
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	64.808.868,00	77.269.633,00	1 Dokumen	40.000.000,00
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang di Kembangkan			100 %	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	100 %	95.000.000,00
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	10 Orang	50.000.000,00
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	1 Dokumen	45.000.000,00

6	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Layani			100 %	100 %	70.000.000,00	0,00	0,00	100 %	200.000.000,00
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak			80 %	80 %	30.000.000,00	0,00	0,00	80 %	75.000.000,00
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA										
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Kegiatan	5 Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	5 Kegiatan	75.000.000,00
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang koordinasinya tingkat daerah kabupaten/kota			2 Layanan	2 Layanan	20.000.000,00	0,00	0,00	2 Layanan	95.000.000,00
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 Orang	19 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	19 Orang	95.000.000,00
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	20.000.000,00	0,00	0,00		30.000.000,00
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota										
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	1 Dokumen	30.000.000,00

Rencana kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.400.520.000,00	2.555.005.575,00	2.774.002.843,00		5.702.319.197,00
7	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			65 Nilai	1,9 %	187.000.000,00	122.400.000,00	157.200.000,00	1,9 %	169.996.000,00
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk			70 %	70 %	43.000.000,00	0,00	0,00	70 %	50.000.000,00
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal										
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00	10 Satuan Pendidikan	25.000.000,00
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal										
							Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23.000.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan	25.000.000,00
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki rumah data			50 %	100 %	144.000.000,00	122.400.000,00	122.400.000,00	100 %	119.996.000,00
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga										
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	62.400.000,00	97.200.000,00	1 Laporan	100.000.000,00
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB										
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	1 Dokumen	19.996.000,00

8	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			45 %	20 %	2.358.520.000,00	1.856.605.397,00	2.025.805.397,00	20 %	3.982.522.857,00
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Stakeholders dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Program KKBPK			80 %	80 %	666.000.000,00	536.795.397,00	536.795.397,00	80 %	1.873.170.213,00
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK										
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 Laporan	1 Laporan	134.000.000,00	49.290.397,00	218.490.397,00	1 Laporan	54.000.000,00
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5 Laporan	5 Laporan	157.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	5 Laporan	1.746.120.213,00
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	77.500.000,00	77.500.000,00	5 Laporan	26.000.000,00
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	6 Dokumen	21.050.000,00
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5 Organisasi	12 Organisasi	200.000.000,00	200.005.000,00	200.005.000,00	12 Organisasi	26.000.000,00

	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan			100 %	100 %	194.270.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	100 %	226.270.000,00
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	379 Orang	379 Orang	168.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	379 Orang	200.000.000,00
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB										
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	77 Organisasi	77 Organisasi	26.270.000,00	0,00	0,00	77 Organisasi	26.270.000,00
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi			100 %	100 %	1.214.500.000,00	333.010.000,00	333.010.000,00	100 %	1.766.082.644,00
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	14 Laporan	14 Laporan	189.000.000,00	0,00	0,00	14 Laporan	34.964.069,00
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	19602 Orang	4270 Orang	273.000.000,00	319.510.000,00	319.510.000,00	4270 Orang	298.418.575,00

	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	5 Unit	5 Unit	740.000.000,00	0,00	0,00	5 Unit	1.300.000.000,00
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	1 Laporan	132.700.000,00
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kampung KB yang dibina			100 %	100 %	283.750.000,00	566.800.000,00	566.800.000,00	100 %	117.000.000,00
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB										
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	17 Dokumen	53 Dokumen	3.750.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	53 Dokumen	40.000.000,00
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas										
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	17 Kampung	53 Kampung	280.000.000,00	296.800.000,00	296.800.000,00	53 Kampung	77.000.000,00
9	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Ratio Akseptor KB			78,5 %	78,5 %	855.000.000,00	576.000.178,00	590.997.446,00	78,5 %	1.549.800.340,00

	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina			87 %	87 %	351.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	87 %	989.800.340,00
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)										
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	20 Laporan	1 Laporan	23.000.000,00	0,00	14.997.268,00	1 Laporan	341.500.160,00
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)										
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5 Laporan / Dokumen	5 Laporan / Dokumen	28.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	5 Laporan / Dokumen	30.000.000,00
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	40 Unit	40 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	40 Unit	618.300.180,00
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase stakeholdes san mitra kerja yang berperan aktif melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga			60 %	60 %	504.000.000,00	528.000.178,00	528.000.178,00	60 %	560.000.000,00
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)										
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 laporan	1 laporan	240.000.000,00	240.000.178,00	240.000.178,00	1 laporan	260.000.000,00
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)										
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 laporan	1 laporan	264.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	1 laporan	300.000.000,00
											J U M L A H	**6.477.862.783,00**	**5.217.288.232,98**	**6.066.530.214,98**		**10.267.328.399,00**

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mamuju Tengah telah disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini dibuat agar dapat diaplikasikan dalam berbagai permasalahan terkait dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian dan Keluarga Berencana Kab.Mamuju Tengah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat sehingga keberpihakan pada masyarkat benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian dan Keluarga Berencana Kab.Mamuju Tengah. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan Rencana Kerja dengan berpedoman pada kewenangan urusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Topoyo, Februari 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian dan
Keluarga Berencana

Hj. NAHDA. S.Kep., MM
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP 19660501 198602 2 009

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**6.477.862.783,00**	**5.217.288.232,98**	**6.066.530.214,98**	**-411.332.568,02**							**10.267.328.399,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.477.862.783,00**	**5.217.288.232,98**	**6.066.530.214,98**	**-411.332.568,02**							**10.267.328.399,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3.077.342.783,00**	**2.662.282.657,98**	**3.292.527.371,98**	**215.184.588,98**							**4.565.009.202,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**						**2.597.277.185,00**	**2.347.494.449,98**	**2.933.534.689,98**	**1.222.666.419,00**							**3.819.943.604,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	161.677.185,00	54.467.314,00	123.617.314,00	-38.059.871,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	OPD		66.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.600.280,00	9.419.615,00	79.019.615,00	-21.580.665,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.426.905,00	28.612.666,00	28.612.666,00	-3.814.239,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	4.473.466,00	4.473.466,00	-3.526.534,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.275.820,00	3.275.820,00	-724.180,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.995.105,00	2.995.105,00	695.105,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			3.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.350.000,00	5.690.642,00	5.240.642,00	-9.109.358,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu*				100 %	100 %	2.040.000.000,00	1.948.505.253,00	2.481.599.185,00	441.599.185,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	OPD		2.718.743.604,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.000.000.000,00	1.909.196.204,00	2.442.290.136,00	442.290.136,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			2.638.743.604,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	39.309.049,00	39.309.049,00	-690.951,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pegawai PD yang dilayani*				100 %	100 %	34.600.000,00	50.489.051,00	47.886.959,00	13.286.959,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	OPD		151.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	20.900.000,00	31.739.051,00	29.136.959,00	8.236.959,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	13.700.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	5.050.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*				100 %	100 %	55.000.000,00	49.843.350,00	36.241.750,00	-18.758.250,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	OPD		323.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	2 Laporan	42.000.000,00	46.843.350,00	33.241.750,00	-8.758.250,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD penunjang terpenuhi*				100 %	100 %	225.000.000,00	184.590.170,00	184.590.170,00	-40.409.830,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	OPD		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	95.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	88.590.170,00	88.590.170,00	-31.409.830,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan tersedia*				100 %	100 %	46.000.000,00	34.599.311,98	34.599.311,98	-11.400.688,02			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	OPD		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	18.999.311,98	18.999.311,98	-8.000.688,02	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	OPD		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase anggaran responsif gender terhadap APBD**				**1 %**	**2 %**	**120.000.000,00**	**49.999.586,00**	**71.599.586,00**	**135.000.000,00**							**255.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang menerapkan PPRG dan ARG*				70 %	70 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	OPD		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase perempuan di lembaga legislatif dan lembaga PEMDA*				25 %	25 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Organisasi Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Organisasi	5 Organisasi	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan perempuan yang diberdayakan*				100 %	100 %	40.000.000,00	49.999.586,00	71.599.586,00	31.599.586,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Satgas UPTD		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	49.999.586,00	71.599.586,00	31.599.586,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan)**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**149.979.706,00**	**160.361.438,00**	**-15.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum*				100 %	100 %	100.000.000,00	149.979.706,00	160.361.438,00	60.361.438,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Korban kekerasan		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	149.979.706,00	160.361.438,00	60.361.438,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan penyelesaiaan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan**				**100 %**	**100 %**	**70.065.598,00**	**50.000.048,00**	**49.762.025,00**	**0,00**							**70.065.598,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan*				100 %	100 %	70.065.598,00	50.000.048,00	49.762.025,00	-20.303.573,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Masyarakat		70.065.598,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	50.000.048,00	49.762.025,00	9.762.025,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.065.598,00	0,00	0,00	-30.065.598,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			30.065.598,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendap atkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**				**100 %**	**100 %**	**120.000.000,00**	**64.808.868,00**	**77.269.633,00**	**15.000.000,00**							**135.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang terlibat dalam PHA*				80 %	80 %	40.000.000,00	64.808.868,00	77.269.633,00	37.269.633,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	OPD		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	64.808.868,00	77.269.633,00	37.269.633,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang di Kembangkan*				100 %	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Anak/Masyarakat		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Layani**				**100 %**	**100 %**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak*				80 %	80 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	OPD		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				5 Kegiatan	5 Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang koordinasinya tingkat daerah kabupaten/kota*				2 Layanan	2 Layanan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	OPD/UPTD		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				19 Orang	19 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**3.400.520.000,00**	**2.555.005.575,00**	**2.774.002.843,00**	**-626.517.157,00**							**5.702.319.197,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**				**65 Nilai**	**1,9 %**	**187.000.000,00**	**122.400.000,00**	**157.200.000,00**	**-17.004.000,00**							**169.996.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase OPD yang berperan aktif dalam pengendalian kuantitas penduduk*				70 %	70 %	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Sekolah		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase desa yang memiliki rumah data*				50 %	100 %	144.000.000,00	122.400.000,00	157.200.000,00	13.200.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	FASKES		119.996.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	62.400.000,00	97.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			19.996.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**				**45 %**	**20 %**	**2.358.520.000,00**	**1.856.605.397,00**	**2.025.805.397,00**	**1.624.002.857,00**							**3.982.522.857,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Stakeholders dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Program KKBPK*				80 %	80 %	666.000.000,00	536.795.397,00	705.995.397,00	39.995.397,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	OPD/Catin, Ibu Hamil, Pasca Salin, Balita, Baduta/Balai Penyuluh KB/PLKB/ Masyarakat/Kampung KB		1.873.170.213,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	134.000.000,00	49.290.397,00	218.490.397,00	84.490.397,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Laporan	5 Laporan	157.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-37.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			1.746.120.213,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	77.500.000,00	77.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			21.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	12 Organisasi	200.000.000,00	200.005.000,00	200.005.000,00	5.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan*				100 %	100 %	194.270.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	225.730.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Kader PPKBD dan Sub PPKBD		226.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				379 Orang	379 Orang	168.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	252.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				77 Organisasi	77 Organisasi	26.270.000,00	0,00	0,00	-26.270.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			26.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi*				100 %	100 %	1.214.500.000,00	333.010.000,00	333.010.000,00	-881.490.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	FASKES/Akseptor/Balai Penyuluh KB		1.766.082.644,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				14 Laporan	14 Laporan	189.000.000,00	0,00	0,00	-189.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			34.964.069,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				19602 Orang	4270 Orang	273.000.000,00	319.510.000,00	319.510.000,00	46.510.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			298.418.575,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Unit	5 Unit	740.000.000,00	0,00	0,00	-740.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			132.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Persentase kampung KB yang dibina*				100 %	100 %	283.750.000,00	566.800.000,00	566.800.000,00	283.050.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Masyarakat		117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				17 Dokumen	53 Dokumen	3.750.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	266.250.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				17 Kampung	53 Kampung	280.000.000,00	296.800.000,00	296.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Ratio Akseptor KB**				**78,5 %**	**78,5 %**	**855.000.000,00**	**576.000.178,00**	**590.997.446,00**	**694.800.340,00**							**1.549.800.340,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina*				87 %	87 %	351.000.000,00	48.000.000,00	62.997.268,00	-288.002.732,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Keluarga beresiko stunting		989.800.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				20 Laporan	1 Laporan	23.000.000,00	0,00	14.997.268,00	-8.002.732,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			341.500.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				5 Laporan / Dokumen	5 Laporan / Dokumen	28.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				40 Unit	40 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			618.300.180,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase stakeholdes san mitra kerja yang berperan aktif melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*				60 %	60 %	504.000.000,00	528.000.178,00	528.000.178,00	24.000.178,00			-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)	Keluarga beresiko stunting		560.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	1 laporan	240.000.000,00	240.000.178,00	240.000.178,00	178,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	1 laporan	264.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perniakhan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								**6.477.862.783,00**	**5.217.288.232,98**	**6.066.530.214,98**	**-411.332.568,02**							**10.267.328.399,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD) TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan ***Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)*** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025. Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang diuraikan secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah ini secara umum belum mampuh memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran Rencana Kerja Tahun 2025. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini.

Tobadak,

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mamuju Tengah

HJ. MASNAWIAH, S.Pd.SD
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19690112 198803 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 23

3.3. Program dan Kegiatan 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

BAB V PENUTUP 32

Lampiran-Lampiran

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.1. Substansi Kegiatan Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050/13402/SJ

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan kegiatan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan rencana kerja.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Rencana Kerja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah untuk satu tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

1. Memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan untuk tahun rencana secara komprehensif dan integralistik.
2. Sebagai dokumen resmi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Terdiri dari :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Perangat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan yang telah di input di sistem/SIPD.

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DPM-PTSP Tahun 2021-2026. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju Tengah terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2024.

Total nilai realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.107.781.070,- (96,83%) dari alokasi dana sebesar Rp. 2.176.891.571,- sedangkan realisasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.998.679.672,- (98,69%) dari alokasi dana sebesar Rp. 3.038.515.352,-. Terdapat Penurunan dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 96,83%.

Secara umum didalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada DPM-PTSP telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan namun belum mencapai 100% (seratus persen). Dari kondisi tersebut harus dilakukan perbaikan guna mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kekurangan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024 disajikan pada **Tabel 2.1.**

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah Karena ada beberapa program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya pada tahun 2024, maka secara otomatis

akan mengurangi capaian target Renstra. Dan untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan upaya untuk penambahan terget kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

1. Lebih teliti dalam pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya denganacuan serapan pada tahun sebelumnya

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya program atau kegiatan. Pengukuran dilaksanakan berdasarkan kinerja yang telah dilakukan. Ranwal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2025.
Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPM-PTSP serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) disajikan pada **Tabel 2.2.**

Sedangkan Analisa Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 melaksanakan 3 (Tiga) program yang tercantum dalam penetapan kinerjayang terdiri dari :

a. 2 (Dua) program yang menjadi urusan wajib Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPM-PTSP).
b. 1 (satu) program yang bersifat penunjang terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut telah dianalisa terhadappelaksanaannya sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 149.739.707,- dan realisasi anggaran Rp. 149.071.287,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 99,55%. Indikator programnya adalah rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan dengan target 5 hari didapatkan realisasasinya 5 hari. Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 100%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Eletronik*, dengan output jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan target kinerja 1.539 Pelakupelaku usaha, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 3.444 pelaku usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 223,7%.

  Adapun ***Kelebihan dari Pencapaian***:

  - Telah Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha untuk mendaftarkan Izin usahanya.
  - Adanya Sosialisasi ke Pelaku Usaha tentang Pentingnya Pemenuhan Izin Usaha.

  Adapun ***kendalanya*** :

  - Masih banyak pelaku usaha yang tidak memahami

aplikasi perizinan.

- Kurangnya SDM pelaku usaha serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Perlunya peningkatan SDM pelaku usaha melalui sosialisasi terkait penggunaan aplikasi dan manfaatnya bagi keberlangsungan usahanya.

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 461.177.000,- dan realisasi anggaran Rp. 456.258.477,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 98.93%. Indikator programnya adalah persentase kegiatan investasi yang patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan target 100% didapatkan realisasinya 98,93% Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 99%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan;

- *Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha*, dengan output Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan target kinerja 196 pelaku usaha, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 230 pelaku usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 117,3%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  - Target Sudah tercapai bahkan melebihi dari yang di targetkan.
  - Masih Banyak Pelaku Usaha yang belum melengkapi

Perizinan Berusahanya.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

- Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.
- Perlunya dibuatkan peraturan2 di daearh terkait Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

➢ *Pengawasan Penanaman Modal*, dengan output Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha, dengan target kinerja 60 kegiatan usaha, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 148 kegiatan usaha, maka persentase realisasi kinerja sebesar 246,6%.

Adapun ***kendalanya*** :

- Target kinerja telah tercapai bahkan melampaui dari yang ditetapkan sebelumnya.
- Juga masih Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

- Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.
- Perlunya peningkatan kegiatan Pemantauan dan pengawasan yang lebih intenship lagi kedepannya.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.565.974.864,- dan realisasi anggaran Rp. 1.502.451.306,- sehingga didapatkan realisasi anggaran sebesar 95,94%. Indikator programnya adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target 100% didapatkan realisasinya 95,94% Sehingga tingkat capaian kinerja didapatkan 98%.

Capaian Indikator Program ini ditunjang kegiatan. Kegiatan

dimaksud berikut besaran output (indikator kegiatan) yang diperoleh berdasarkan target kinerja berbanding realisasi kinerja berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*, dengan output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan target kinerja 1 dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*, dengan output Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*, dengan output Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan target kinerja 1 dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- *Evaluasi Kinerja Perangkat*, dengan output Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 1 dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,* dengan output jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, dengan target kinerja 11 orang, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 11 orang, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujia/Verifikasi Keuangan SKPD,* dengan output jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SIPD, dengan target kinerja 10 Dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 10 Dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya,

untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan target kinerja 1 Dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 Dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%,

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah,

- *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* dengan output Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan target kinerja 1 laporan, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 laporan, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

  penetapan target kinerja dan anggaran yang tersedia

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* dengan output Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan target kinerja 3 Orang, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 3 Orang, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

Adapun ***kendalanya*** :

Target kinerja telah tercapai.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

penetapan target kinerja dan anggaran yang tersedia

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Fasilitasi Kunjungan Tamu,* dengan output jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dengan target kinerja 11 laporan, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 11 laporan, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan.

- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,* dengan output jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target kinerja 21 laporan, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 21 laporan, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendala/alasannya*** :

  Capaian kinerja sangat tinggi karena satuan OPD memaksimalkan terselenggaranya rapat koordinasi dengan anggaran yang terbatas.

  Upaya mengatasi kendala/alasannya yakni :

  Perencanaan tahun berikutnya perlu menyinkronkan penetapan target kinerja dan anggaran yang tersedia

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,*

dengan output Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, dengan target kinerja 1 Tahun, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 Tahun, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

Adapun ***kendalanya*** :

Target kinerja telah tercapai.

Upaya mengatasi kendalanya yakni :

Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik,* dengan output jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target kinerja 3 laporan, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 3 laporan, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,* dengan output jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, dengan target kinerja 1 Dokumen, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 1 Dokumen, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi

priorotas.

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Kegiatan;

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan,* dengan output jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihhara dan dibayarkan pajaknya, dengan target kinerja 8 unit, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 8 unit, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Target kinerja telah tercapai.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Penambahan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,* dengan output jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dengan target kinerja 25 unit, dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah 25 unit, maka persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

  Adapun ***kendalanya*** :

  Adnya beberapa peralatan dan mesin lainnya yang sudah tidak layak untuk dipelihara, namun belum diusulkan untuk dimusnakan.

  Upaya mengatasi kendalanya yakni :

  Menginventarisasi keadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi priorotas.

2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang terjadi selama tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya informasi terkait pelaksanaan dan kewajiban terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
2. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti Pembinaan/Bimbingan Teknis Pelaksanaaan Penanaman Modal
3. Kurangnya minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Mamuju Tengah
4. Promosi penanaman modal daerah kurang dimaksimalkan serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai.
5. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memahami aplikasi serta prosedur penerbitan perizinan.
6. Banyaknya pelaku usaha yang menutup diri dan tidak mau terbuka kepada petugas di lapangan dalam memberikan data-data yang diperlukan, yang diakibatkan kurangnya pemahaman tentang pendataan usaha.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan di dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi terhadap Pelaku Usaha tentang pentingnya kepemilikan perizinan berusaha;
2. Kurangnya kepedulian dari pelaku usaha terhadap kewajiban terkait pelaksanaan penanaman modal sesuai perizinannya
3. Belum tersedianya dokumen pemetaan potensi investasi di masing-masing sektor.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha serta kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha khususnya penggunaan aplikasi perizinan

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan DPMPTSP antara lain:

a. Adanya Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah.

b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah.
c. Adanya prinsip transparansi dalam pelayanan dengan tidak menetapkan retribusi untuk seluruh izin yang dilayani DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah.
d. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Online.
e. Sistem Online Single Submission (OSS).

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yaitu dengan Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau e-Government. Pelaksanaan e-Goverment yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/ arus pelayanan perizinan serta terpublikasinya informasi perizinan dengan diterbitkannya Standar Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan (SP), Profil Perangkat Daerah dan Brosur perizinan.
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam

rangka pengembangan dan penertiban perizinan di Kabupaten Mamuju Tengah.

4. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu online kepada masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan visi dan misi Bupati terkait program prioritasprogram/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada Tabel 2.5. Program/Kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD yang direncanakan merupakan rancangan yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Mamuju Tengah dan telah dikondisikan dengan laporan evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya atau n-1 atau tahun 2024 yaitu terdiri dari 3 (tiga) Program dengan 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.176.891.571 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) Review terhadap Rancangan RKPD, membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Review terhadap Rancangan RKPD disajikan pada **Tabel 2.4.**

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat di harapakan pada saat menyampaikan ususlan

harus sesuai pada fungsi dan tugas pokok OPD, hal ini akan di peroleh pada saat pelaksanaan forum OPD dan serta musrenbang kabupaten. Pelaksanaan musrenbang merupakan wadah bersama antar pelaku (stakhoder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui musrenbang kecamatan, usulan OPD serta unsur stakholder yang lain dalam rangka upaya menyusun penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja (Renja) OPD tahun anggaran 2025, Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakholder dengan berpedoman kepada matriks renstra 2021 – 2026 yang telah disusun, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja OPD serta berdasarkan target Tenstra 2021- 2026.

Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat desa/ kelurahan sampai tingkat kecamatan tidak ada usulan yang menunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : **DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal dan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 050/13402/SJ tanggal 2 Desember 2019 tentang Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024 maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut yang disajikan pada **Tabel 3.1.**

TABEL 3.1.
SUBSTANSI KEGIATAN SESUAI SURAT EDARAN MENDAGRI NO.050/13402/SJ

No.	Substansi Kegiatan Sesuai Surat Edaran No. 050/13402/SJ	Diakomodir dalam RKPD 2024
1	*Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur*	√

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 Kabupaten Mamuju Tengah. Serta kaitannya dengan Perubahan-RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025. Berdasarkan visi, misi dan prioritas pembangunan daerah bahwa untuk pelaksanaan dan arah pembangunan DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah didasarkan pada Misi ke 3 (tiga) Kabupaten Mamuju Tengah yaitu “Mendorong daya saing perekonomian daerah” dan Misi ke 4 (empat) yaitu “Memantapkan tata kelolah pemerintahan yang baik”.

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka DPMPTSP mempunyai program yang terdapat didalam Renstra DPMPTSP Tahun

2021 – 2026 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah "Meningkatnya Nilai Investasi pada Kabupaten Mamuju Tengah" melalui Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.

Sasaran :

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi Investasi;
b. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PM-PTSP;

TABEL 3.2.

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DPM-PTSP KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan realisasi Investasi	a. Pertumbuhan investasi daerah
		b. IKM Layanan Perizinan
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PM-PTSP	a. Nilai SAKIP Dinas PM-PTSP
		b. Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas PM-

		PTSP

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah mewujudkannya dalam bentuk program dan kegiatan antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<u>Sub Kegiatan :</u>

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

<u>Sub Kegiatan :</u>

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pengadaan Aset Tak Berwujud
e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Mebel
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

e. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Kegiatan :

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
   b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
   c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTSP) perlu melaksanakan program dan kegiatan yang disajikan pada **Tabel 3.3**.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2025 ada pada Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) disajikan pada **Tabel 4.**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoala perencanan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis kepada kepentingan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan paradigma baru, mempromosikan potensi dan peluang investasi didaerah dan memberikan kemudahan perizinan berusaha, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaaan yang dampaknya merembes kebawah (*trackle down effecct)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta sasaran program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kenerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Tabel 2.1
(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpasu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	50
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen		-			1 Dokumen	1 Dokumen	16,67
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		-	-	0%	-	-	-
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		-			1 Dokumen	1 Dokumen	16,67
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang		12 Orang	12 Orang	100	15 Orang	27 Orang	28,13

2	18	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	20 Dokumen	33,33
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan		-			-	-	-
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**600**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani**	**600**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	18	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	175 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	190 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	190 Orang		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		-		-	9 Orang	9 Orang	13,85
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38.500 Paket		-	-	-	-	-	-

2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	180.000 Paket		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100	-	10 Dokumen	16,67
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	66 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	21 Laporan	33,33
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan		21 Laporan	55 Laporan	261,90	21 Laporan	76 Laporan	60,32
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD DPMPTSP penunjang yang terpenuhi**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	59 Unit		16 Unit	14 Unit	87,50	-	14 Unit	23,73
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		7 Unit	7 Unit	100	5 Unit	12 Unit	37,50
2	18	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Website		-	-	-	1 Website	1 Website	20
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	6 Laporan	33,33
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	33,33

2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit		8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	16 Unit	33,33
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit		-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit		20 Unit	20 Unit	100	25 Unit	45 Unit	31,03
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	100	-	1 Unit	16,67
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Pertumbuhan Investasi berskala Nasional**	**52,83**		**27,83**	**27,83**	**100**	**5,00**	**32,83**	**62,14**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**52,83**		**27,83**	**27,83**	**100**	**5,00**	**32,83**	**62,14**
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1		-	-	-	-	-	-
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	5		-	-	-	-	-	-
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**300**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**66,67**
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	81		80	80	100	-	80	98,77
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**11**		**1**	**1**	**100**	**-**	1	9,09
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Peningkatan peminat investasi Daerah**	**600**		**100**	**100**	**100**	**-**	**100**	**16,67**
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1		-	-	-	-	-	-
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	16,67
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan**	**26 Hari**		**5 Hari**	**5 Hari**	**100**	**5 Hari**	**10 Hari**	**38,46**

2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**33,33**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sietem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8.976 Pelaku Usaha		1.396 Pelaku Usaha	1.392 Pelaku Usaha	99,71	1.396 Pelaku Usaha	2.788 Pelaku Usaha	31,06
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	144 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha	29 Kegiatan Usaha	120,83	24 Kegiatan Usaha	53 Kegiatan Usaha	36,81
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	250 Orang		-	-	-	50 Orang	50 Orang	20
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku**	**600**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200%**	**33,33**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN**	**600%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200%**	**33,33**
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	336 Kegiatan Usaha		36 Kegiatan Usaha	35	97,22	60 Kegiatan Usaha	95 Kegiatan Usaha	28,27
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1120 Pelaku Usaha		182 Pelaku Usaha	182	100	182 Pelaku Usaha	364 Pelaku Usaha	32,50
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	336 Kegiatan Usaha		36 Kegiatan Usaha	144	400	60 Kegiatan Usaha	204 Kegiatan Usaha	60,71

Tabel 2.2
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mamuju Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024	Tahun (n) 2025	Tahun (n+1) 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Investasi Daerah			27,83%	5,00%	5,00%	5,00%	-7,33%	6%	5,00%	5,00%	
2	IKM Layanan Perizinan			61,26 Baik	62,51 Baik	68,76 Baik	75,64 Baik	82,47 (Baik)	82,49 Baik	82,50 Sangat Baik	83,52 Sangat Baik	

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : **DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**4.358.030.593**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**4.358.030.593**	
06.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	340.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	340.600.000	
06.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	65.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	65.600.000	
06.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
06.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
06.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
06.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
06.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	65.000.000	

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
06.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	130.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	130.000.000	
07.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu	100%	**1.972.508.618**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu	100%	**1.972.508.618**	
07.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM-PTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1.736.246.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1.736.246.862	
07.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	92.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	92.800.000	
07.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.500.000	
07.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	130.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	130.000.000	
07.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	206.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	206.000.000	
07.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	65.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	65.000.000	
07.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	65.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	65.000.000	
07.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	76.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	76.000.000	
07.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani	100%	503.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani	100%	503.000.000	

07.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPM-PTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	18.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	18.000.000	
07.04.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340Dokumen	40.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	40.000.000	
07.04.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM-PTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	285.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	285.000.000	
07.04.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPM-PTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	60.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	60.000.000	
07.04.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	100.000.000	
07.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar	100%	593.611.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar	100%	593.611.000	
07.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	
07.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	100.000.000	
07.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPM-PTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	7.000.000	
07.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.700 Paket	155.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.700 Paket	155.000.000	
07.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPM-PTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.000 Paket	10.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.000 Paket	10.200.000	
07.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	100.000.000	
07.05.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	20.000.000	

07.05.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	112.411.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	112.411.000	
07.05.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
07.05.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	59.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	59.000.000	
07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM-PTSP	Persentase BMD DPMPTSP penunjang yang terpenuhi	100%	**418.510.000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD DPMPTSP penunjang yang terpenuhi	100%	**418.510.000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM-PTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1Unit	20.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1Unit	20.000.000	
07.06.01	Pengadaan Mebel	DPM-PTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6Unit	9..460.000	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	9..460.000	
07.06.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	39.050.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	39.050.000	
07.06.03	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DPM-PTSP	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Website	50.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DPMPTSP	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Website	50.000.000	
07.06.04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	
07.06.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	
07.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPM-PTSP	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	90.650.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	90.650.000	
07.07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	
07.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	23.954.505	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	23.954.505	

07.07.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	
07.07.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000	
07.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	**138.446.470**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	**138.446.470**	
07.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM-PTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	41.846.470	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	41.846.470	
07.08.02	Pemeliharaan Mebel	DPM-PTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	
07.08.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.600.000	
07.08.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
8	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**Pertumbuhan Investasi berskala Nasional**	**5%**	**80.000.000**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**Pertumbuhan Investasi berskala Nasional**	**5%**	**80.000.000**	
08.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	30.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	30.000.000	
08.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal	1 Dokumen	30.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal	1 Dokumen	30.00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	**Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	80 Buku	50.000.000	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Kab. Mamuju Tengah	**Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	80 Buku	50.000.000	

	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	50.000.000	
9	**Program Promosi Penanaman Modal**		**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**2**	**385.000.000**	**Program Promosi Penanaman Modal**		**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**2**	**320.000.000**	
09.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan peminat investasi Daerah	100%	385.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan peminat investasi Daerah	100%	320.000.000	
09.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Luar/dalam Wilayah Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	1 Dokumen	135.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Luar/dalam Wilayah Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	1 Dokumen	135.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	250.000.000	
10	**Program Pelayanan Penanaman Modal**		**Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan**	**4 Hari**	**217.954.709**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**		**Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan**	**4 Hari**	**217.954.709**	
10.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah	100%	**217.954.709**	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah	100%	**217.954.709**	
10.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sietem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.539 Pelaku Usaha	120.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sietem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.539 Pelaku Usaha	120.000.000	
10.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	24 Kegiatan Usaha	62.910.547	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	24 Kegiatan Usaha	62.910.547	
10.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan	50 Orang	35.044.162	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan	50 Orang	35.044.162	

	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan			Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan			
11	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**		**Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku**	**100%**	**422.305.400**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**		**Persentase Kegiatan Investasi yang patuh terhadap perundangan yang berlaku**	**100%**	**422.305.400**	
11.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN	100%	422.305.400	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN	100%	422.305.400	
11.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	60 Kegiatan Usaha	117.635.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	60 Kegiatan Usaha	117.635.100	
11.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	196 Pelaku Usaha	204.350.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	196 Pelaku Usaha	204.350.300	
11.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 Kegiatan Usaha	100.320.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 Kegiatan Usaha	100.320.000	
Jumlah					**2.601.260.109**	***Jumlah***				**2.601.260.109**	

Tabel 3.3
(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : **DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tengah**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**5.513.190.662,00**							**6.526.508.618,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.513.190.662,00**							**6.526.508.618,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**5.513.190.662,00**							**6.526.508.618,00**	
1,	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 Persen**	**4.362.530.593,00**						**-**	**5.120.508.618,00**	
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu***	**-**			**100 Persen**	**340.000.000,00**			**-**	**-**	**Kantor DPMPTSP**	**-**	**400.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	0	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	0	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	0	4 Laporan	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobad	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		145.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

									ak							
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan DPMPTSP Tepat Waktu***	**-**			**100 Persen**	**1.972.508.618,00**			**-**	**-**	**Kantor DPMPTSP**	**-**	**2.206.508.618,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		11 Orang/bulan	10 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.736.246.862,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		1.936.246.862,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	92.761.756,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		112.761.756,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	1 Laporan	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	0	10 Laporan	130.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar***	**-**			**100 Persen**	**206.000.000,00**			**-**	**-**	**Kantor DPMPTSP**	**-**	**245.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	76.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Pegawai DPMPTSP yang dilayani***				**100 Persen**	**503.000.000,00**			**-**	**-**	**Kantor DPMPTSP**	**-**	**560.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0	18 Paket	18.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0	0	10 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	0	2 Orang	285.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		295.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	15 Orang	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8 Orang	9 Orang	5 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase administrasi umum DPMPTSP berjalan sesuai standar***				**100 Persen**	**688.611.000,00**			**-**	**-**	**Kantor DPMPTSP**	**-**	**891.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		26.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	2 Paket	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	0	10 Paket	7.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7700	0	100 Paket	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0	0	120 Paket	10.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		10	0	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		11 Laporan	11 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		21 Laporan	21 Laporan	15 Laporan	112.411.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0	4 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0	1 Dokumen	59.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase BMD DPMPTP penunjang yang terpenuhi***	**-**			**100 Persen**	**420.510.000,00**			**-**	**-**	**Kantor DPMPTSP**	**-**	**478.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0	1 Unit	22.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	10 Unit	9.460.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	1 Unit	5 Unit	39.050.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		0	0	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		158.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia***	**-**			**100 Persen**	**90.954.505,00**			**-**	**-**	**Kantor DPMPTSP**	**-**	**145.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	23.954.505,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***	**-**			**100 Persen**	**140.946.470,00**			**-**	**-**	**Kantor DPMPTSP**	**-**	**195.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8 Unit	8 Unit	41.846.470,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

			Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0	20 Unit	12.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	25 Unit	10 Unit	11.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor DPMPTSP		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase kegiatan investasi yang patuh terhadap purundangan yang berlaku***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**266.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal***	**-**			**1 Dokumen**	**50.000.000,00**			**-**	**Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah**	**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**-**	**76.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		0	0	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		0	0	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	***Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**1 Dokumen**	**150.000.000,00**			**-**	**Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah**	**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**-**	**190.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		0	0	5 Daerah	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 kec	120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		0	0	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3,	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Presentase Peningkatan peminat investasi Daerah***				**100 %**	**140.000.000,00**						**-**	**195.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota***				**1 Dokumen**	**140.000.000,00**			**-**	**Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah**	**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**-**	**195.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1	0	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		0	0	1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4,	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***persentase penanaman modal yang berjalan sesuai dengan kewenangan Daerah***	**-**			**100 %**	**238.354.669,00**						**-**	**295.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	***Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik***	**-**			**1616 Pelaku Usaha**	**238.354.669,00**			**-**	**Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik**	**Dinas Penana man Modal Pelayana n Terpadu Satu Pintu**	**-**	**295.000.000,00**	**DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		7458 Pelaku Usaha	1539 Pelaku Usaha	1616 Pelaku Usaha	120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Dinas Penanam an Modal Pelayana n Terpadu Satu Pintu	1.697 Pelaku Usaha	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
		Perioritas 2025 (menyangkut IKM)	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*		50	0	50 Pelaku Usaha	35.044.162,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Pelaku Usaha	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Dinas Penanam an Modal Pelayana n Terpadu Satu Pintu	50 Pelaku Usaha	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														

			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		24	0	24 Kegiatan Usaha	83.310.507,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Dinas Penanam an Modal Pelayana n Terpadu Satu Pintu	24 Kegiatan Usaha	95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5,	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase laporan realisasi LKPM PMA/PMDN***	**-**			**100 %**	**422.305.400,00**						**-**	**520.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya***	**-**			**60 Kegiatan Usaha.**	**422.305.400,00**			**-**	**Mendorong Daya Saing Perekonom ian Daerah**	**Dinas Penana man Modal Pelayana n Terpadu Satu Pintu**	**-**	**520.000.000,00**	**DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
		Mengikuti Juknis Dari Pusat, Dana DAK	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*		60	0	60 Kegiatan Usaha.	117.635.100,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonom ian Daerah	Dinas Penanam an Modal Pelayana n Terpadu Satu Pintu	60 Kegiatan Usaha.	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		196 Pelaku Usaha	196 Pelaku Usaha	182 Pelaku Usaha	204.350.300,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonom ian Daerah	Dinas Penanam an Modal Pelayana n Terpadu Satu Pintu	182 Pelaku Usaha	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	100.320.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60 Kegiatan Usaha	120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan***	**-**			**1616 Pelaku Usaha**	**150.000.000,00**						**-**	**130.000.000,00**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan***	**-**			**1616 Pelaku Usaha**	**150.000.000,00**			**-**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**-**	**-**	**130.000.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		0	0	4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JUMLAH							**5.513.190.662,00**							**6.526.508.618,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan ini disusun sebagai tindak lanjut dari dinamika perkembangan kondisi daerah, perubahan kebijakan pemerintah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan penyesuaian arah kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renja Perubahan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas PUPR dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tetap mengacu pada prinsip good governance dan mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tertata, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang berdaya guna bagi masyarakat Mamuju Tengah.

Mamuju Tengah, 21 Oktober 2025
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. MAMUJU TENGAH

Muh. Yahya Saleh, S.ST.,M.Eng
NIP. 19750403 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH **5**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 23

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **26**

3.2. Kondisi Umum dan Tantangan Pembangunan Sektor PUPR 26

3.3. Tujuan Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah 27

3.4. Sasaran Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 27

3.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 28

3.6. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran 29

3.7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Mamuju Tengah 30

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH **35**

4.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) 35

4.2. Rencana Tindak Lanjut 35

BAB V Penutup **37**

5.1. Kesimpulan 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang terencana dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pemerintahan daerah, pembangunan diselenggarakan secara terpadu dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem drainase, air bersih, perumahan, permukiman, serta penataan ruang wilayah yang berkelanjutan. Infrastruktur publik yang memadai merupakan fondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, menurunkan kesenjangan sosial, serta mendorong investasi dan produktivitas masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026.

Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan, seringkali muncul dinamika dan perubahan yang signifikan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. **Perubahan kebijakan nasional dan daerah**, seperti penyesuaian arah pembangunan yang diatur dalam kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. **Penyesuaian pagu anggaran**, baik karena perubahan kemampuan keuangan daerah maupun adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat dan provinsi;
3. **Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan**, termasuk kondisi darurat seperti bencana alam, perubahan iklim, atau kebutuhan mendesak masyarakat;
4. **Hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya**, yang menunjukkan adanya program atau kegiatan yang perlu disempurnakan atau diarahkan ulang agar lebih efektif;

5. **Masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder)** dalam forum konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, diperlukan penyusunan **Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025** sebagai bentuk respons adaptif terhadap perubahan situasi dan kebutuhan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi sarana penting untuk melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan agar tetap relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Renja Perubahan ini juga diharapkan menjadi alat manajemen yang efektif untuk memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui dokumen ini, Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan nasional dan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur prinsip, tahapan, serta mekanisme penyusunan rencana pembangunan secara berjenjang dan terintegrasi antara pusat dan daerah;
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**, yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menjadi pedoman teknis bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan;
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. **Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2021** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026;
6. **Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025**, sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan daerah tahunan;

7. **Peraturan perundang-undangan lain** yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk peraturan teknis dari Kementerian PUPR dan kebijakan nasional lainnya.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, penyusunan Renja Perubahan Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 memiliki kekuatan yuridis dan menjadi instrumen legal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah yang terarah, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan **Rencana Kerja Perubahan Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025** memiliki tujuan utama untuk menyesuaikan arah, prioritas, dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kondisi terkini, serta memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. **Menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah**, agar program dan kegiatan Dinas PUPR tetap selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan mendukung pencapaian target RPJMD Tahun 2021–2026;
2. **Mengakomodasi perubahan pagu indikatif dan kemampuan keuangan daerah**, baik yang disebabkan oleh kebijakan fiskal maupun efisiensi penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap efektif dan proporsional;
3. **Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya**, dengan melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang belum optimal dan memperkuat kegiatan yang terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat;
4. **Menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terkini**, termasuk kebutuhan mendesak yang muncul akibat faktor sosial, ekonomi, atau lingkungan;
5. **Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran**, agar proses pembangunan dapat berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel;
6. **Menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan Dinas PUPR Tahun 2025**, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat diukur keberhasilannya berdasarkan indikator kinerja yang jelas;
7. **Mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif**, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan tersusunnya dokumen **Rencana Kerja Perubahan Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025** ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah dapat lebih responsif terhadap perubahan, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya **Mamuju Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing**.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, Analisa Kinerja OPD dan isu-isu penting Tugas dan Fungsi OPD serta review terhadap Ranwal Renja RKOPD dan Kajian usulan Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan terhadap Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah serta faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan triwulan 4 tahun 2024, berikut ini :

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,37	3,288,755,868	3,201,821,423	97,36	103,87	4,25	4,53		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,11	83,945,535	80,565,829	95,97	98,83	0,11	0,11		
1.03.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,01	9,491,614	9,480,000	99,88	99,00	0,01	0.01	11,614	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,01	9,491,614	9,480,000	99,88	99,00				
1.03.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,02	12,999,641	12,798,000	98,45	94,00	0,02	0.02	201,641	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	12,999,641	12,798,000	98,45	94,00				
1.03.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,02	16,493,604	16,493,604	100,00	100,00	0,02	0.02	0	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	16,493,604	16,493,604	100,00	100,00				
1.03.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,02	12,989,228	12,989,228	100,00	100,00	0,02	0.02	0	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	12,989,228	12,989,228	100,00	100,00				
1.03.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,02	16,488,909	13,455,000	81,60	100,00	0,02	0.02	3,033,909	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	16,488,909	13,455,000	81,60	100,00				
1.03.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,02	15,482,539	15,349,997	99,14	100,00	0,02	0.02	132,542	Tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	15,482,539	15,349,997	99,14	100,00				
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,19	2,406,298,477	2,371,365,756	98,55	99,30	3,15	3,17		
1.03.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	50	3,16	2,380,317,873	2,345,475,756	98,54	98,49	3,11	3.11	34,842,117	tidak

	ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan									ada

LAPORAN REKAP REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2024 KEADAAN TRIWULAN IV (JANUARI-DESEMBER)

Tabel II.1. Rekap Realisasi Kegiatan Pembangunan Fisik dan Keuangan

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			3,16	2,380,317,873	2,345,475,756	98,54	98,49				
1.03.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,01	7,493,926	7,450,000	99,41	99,41	0,01	0.01	43,926	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,01	7,493,926	7,450,000	99,41	99,41				
1.03.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0,02	18,486,678	18,440,000	99,75	100,00	0,02	0.02	46,678	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	18,486,678	18,440,000	99,75	100,00				
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,02	18,492,898	18,490,000	99,98	99,96	0,02	0,02		
1.03.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,02	18,492,898	18,490,000	99,98	99,96	0,02	0.02	2,898	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	18,492,898	18,490,000	99,98	99,96				
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,15	113,750,308	100,505,000	88,36	85,37	0,13	0,13		
1.03.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,09	68,890,308	68,835,000	99,92	99,37	0,09	0.09	55,308	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,09	68,890,308	68,835,000	99,92	99,37				
1.03.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,06	44,860,000	31,670,000	70,60	71,37	0,04	0.04	13,190,000	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,06	44,860,000	31,670,000	70,60	71,37				
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,57	427,919,885	427,429,853	99,89	99,97	0,57	0,57		

1.03.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,01	7,091,000	7,000,000	98,72	100,00	0,01	0.01	91,000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,01	7,091,000	7,000,000	98,72	100,00				
1.03.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,05	35,600,000	35,460,000	99,61	99,97	0,05	0.05	140,000	TIDAK ADA

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,05	35,600,000	35,460,000	99,61	99,97				
1.03.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,05	39,950,000	39,835,000	99,71	99,90	0,05	0.05	115,000	TIDAK ADA
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,05	39,950,000	39,835,000	99,71	99,90				
1.03.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,44	328,791,000	328,744,853	99,99	100,00	0,44	0.44	46,147	TIDAK ADA
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,44	328,791,000	328,744,853	99,99	100,00				
1.03.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,02	16,487,885	16,390,000	99,41	100,00	0,02	0.02	97,885	TIDAK ADA
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	16,487,885	16,390,000	99,41	100,00				
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,20	151,599,415	127,840,565	84,33	91,50	0,17	0,18		
1.03.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,18	135,999,415	112,240,565	82,53	83,00	0,15	0.15	23,758,850	TIDAK ADA
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,18	135,999,415	112,240,565	82,53	83,00				
1.03.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,02	15,600,000	15,600,000	100,00	100,00	0,02	0.02	0	TIDAK ADA
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	15,600,000	15,600,000	100,00	100,00				
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,12	86,749,350	75,624,420	87,18	146,87	0,10	0,17		
1.03.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	0,05	40,708,950	37,106,420	91,15	91,00	0,05	0.05	3,602,530	TIDAK ADA

	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,05	40,708,950	37,106,420	91,15	91,00				
1.03.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0,02	14,700,000	7,218,000	49,10	49,61	0,01	0.01	7,482,000	TIDAK ADA
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,02	14,700,000	7,218,000	49,10	49,61				
1.03.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,04	31,340,400	31,300,000	99,87	300,00	0,04	0.12	40,400	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,04	31,340,400	31,300,000	99,87	300,00				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			4,61	3,476,701,571	2,945,460,500	84,72	75,00	3,91	3,46		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4,41	3,320,505,502	2,894,371,500	87,17	80,00	3,84	3,53		
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	0,06	44,351,000	0	0,00	0,00	0,00	0	44,351,000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,06	44,351,000	0	0,00	0,00				
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	16 KM	0,83	627,657,404	422,642,800	67,34	100,00	0,56	0.83	205,014,604	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,83	627,657,404	422,642,800	67,34	100,00				
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	19 KM	0,36	274,877,666	263,573,000	95,89	100,00	0,35	0.36	11,304,666	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,36	274,877,666	263,573,000	95,89	100,00				
1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	30 KM	2,84	2,142,428,161	1,985,832,000	92,69	100,00	2,64	2.84	156,596,161	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			2,84	2,142,428,161	1,985,832,000	92,69	100,00				
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	0,31	231,191,271	222,323,700	96,16	100,00	0,30	0.31	8,867,571	TIDAK ADA
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,31	231,191,271	222,323,700	96,16	100,00				

1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,21	156,196,069	51,089,000	32,71	66,67	0,07	0,14		
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.001 KM	0,01	8,300,000	0	0,00	0,00	0,00	0	8,300,000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,01	8,300,000	0	0,00	0,00				
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	0,13	98,070,501	4,418,000	4,50	100,00	0,01	0.13	93,652,501	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,13	98,070,501	4,418,000	4,50	100,00				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Bendung	0,07	49,825,568	46,671,000	93,67	100,00	0,06	0.07	3,154,568	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,07	49,825,568	46,671,000	93,67	100,00				
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			22,38	16,863,621,090	15,450,157,719	91,62	95,83	20,51	21,45		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			22,38	16,863,621,090	15,450,157,719	91,62	95,83	20,51	21,45		
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1500 Liter/Detik	9,50	7,159,750,292	6,729,939,014	94,00	100,00	8,93	9.5	429,811,278	
	Dana Alokasi Khusus Fisik - Belanja Modal			8,92	6,718,228,212	6,288,416,934	93,60	100,00				
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,59	441,522,080	441,522,080	100,00	100,00				
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1500 Liter/Detik	7,82	5,888,473,908	5,682,117,150	96,50	100,00	7,54	7.82	206,356,758	
	Dana Alokasi Khusus Fisik - Belanja Modal			7,58	5,713,593,022	5,507,236,264	96,39	100,00				
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,23	174,880,886	174,880,886	100,00	100,00				
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5,06	3,815,396,890	3,038,101,555	79,63	78,22	4,03	4.43	777,295,335	TIDAK ADA
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			4,41	3,323,823,890	2,942,656,290	88,53	75,00				
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,65	491,573,000	95,445,265	19,42	100,00				

1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			7,86	5,922,780,841	5,716,288,000	96,51	100,00	7,59	7,86		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			7,86	5,922,780,841	5,716,288,000	96,51	100,00	7,59	7,86		
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	700 Rumah Tangga	7,86	5,922,780,841	5,716,288,000	96,51	100,00	7,59	7.86	206,492,841	
	Dana Alokasi Khusus Fisik - Belanja Operasi			7,86	5,922,780,841	5,716,288,000	96,51	100,00				
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			0,76	569,002,363	424,231,000	74,56	82,50	0,56	0,62		

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,76	569,002,363	424,231,000	74,56	82,50	0,56	0,62		
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2525 M	0,62	464,879,339	323,034,000	69,49	70,00	0,43	0.43	141,845,339	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,62	464,879,339	323,034,000	69,49	70,00				
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	2650 M	0,14	104,123,024	101,197,000	97,19	95,00	0,13	0.13	2,926,024	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,14	104,123,024	101,197,000	97,19	95,00				
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			4,08	3,075,319,639	2,575,219,500	83,74	88,83	3,42	3,63		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			4,08	3,075,319,639	2,575,219,500	83,74	88,83	3,42	3,63		
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	6 Bangunan Gedung	3,32	2,504,407,410	2,004,326,500	80,03	76,18	2,66	2.24	500,080,910	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,32	996,425,629	541,728,700	54,37	25,00				
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			2,00	1,507,981,781	1,462,597,800	96,99	110,00				

1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	20 Orang	0,27	199,999,646	199,989,000	99,99	99,00	0,27	0.26	10,646	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,27	199,999,646	199,989,000	99,99	99,00				
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	95 Dokumen	0,49	370,912,583	370,904,000	100,00	100,00	0,49	0.49	8,583	tidak ada

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,49	370,912,583	370,904,000	100,00	100,00				
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			0,15	112,447,823	112,047,000	99,64	100,00	0,15	0,15		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			0,15	112,447,823	112,047,000	99,64	100,00	0,15	0,15		
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,15	112,447,823	112,047,000	99,64	100,00	0,15	0.15	400,823	Tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,15	112,447,823	112,047,000	99,64	100,00				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			55,55	41,853,555,693	40,442,458,331	96,63	98,20	53,68	54,55		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			55,55	41,853,555,693	40,442,458,331	96,63	98,20	53,68	54,55		
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	566.42 KM	44,97	33,878,830,833	33,655,831,531	99,34	90,96	44,67	41.37	222,999,302	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,16	123,200,000	6,999,997	5,68	100,00				
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			21,03	15,846,609,813	15,846,609,813	100,00	100,00				
	Dana Alokasi Khusus Fisik - Belanja Modal			12,70	9,566,732,800	9,566,732,800	100,00	68,00				

	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - Belanja Modal			11,07	8,342,288,220	8,235,488,921	98,72	100,00				
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	36.13 KM	0,54	406,133,996	395,311,600	97,34	100,00	0,52	0.54	10,822,396	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			0,54	406,133,996	395,311,600	97,34	100,00				
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	322 Jembatan	8,17	6,153,352,661	5,748,666,800	93,42	100,00	7,63	8.17	404,685,861	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			2,65	1,993,337,661	1,993,337,661	100,00	100,00				
	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - Belanja Modal			5,52	4,160,015,000	3,755,329,139	90,27	100,00				
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	884.36 KM	0,84	629,933,544	629,225,900	99,89	99,00	0,84	0.83	707,644	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,84	629,933,544	629,225,900	99,89	99,00				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	22.13 KM	1,04	785,304,659	13,422,500	1,71	100,00	0,02	1.04	771,882,159	
	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - Belanja Modal			1,04	785,304,659	13,422,500	1,71	100,00				
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			0,24	179,632,310	164,223,200	91,42	94,00	0,22	0,22		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			0,06	47,229,250	47,229,200	100,00	100,00	0,06	0,06		
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	95 Dokumen	0,06	47,229,250	47,229,200	100,00	100,00	0,06	0.06	50	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,06	47,229,250	47,229,200	100,00	100,00				
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			0,18	132,403,060	116,994,000	88,36	88,00	0,16	0,15		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	0,18	132,403,060	116,994,000	88,36	88,00	0,16	0.15	15,409,060	tidak ada
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,18	132,403,060	116,994,000	88,36	88,00				
JUMLAH				**100**	**75,341,817,198**	**71,031,906,673**			**94.28**	**94.37**	**4,309,910,525**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Fungsi utama Dinas PUPR adalah mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas PUPR sampai dengan **Triwulan II Tahun 2025** menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang memerlukan penyesuaian melalui **Renja Perubahan Tahun 2025**.

Kinerja pelayanan Dinas PUPR juga ditunjukkan melalui meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Mamuju Tengah, tersedianya sarana prasarana dasar permukiman, serta penguatan tata ruang wilayah yang lebih tertib dan terarah. Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan optimalisasi pengelolaan aset infrastruktur masih menjadi fokus utama yang akan diperkuat dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

Melalui penyesuaian yang tertuang dalam **Renja Perubahan Tahun 2025**, Dinas PUPR diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian kegiatan prioritas, serta memperkuat tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Sub Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 4 sub urusan yaitu:

1. **Bina Marga (Jalan dan Jembatan)**

   Bidang Bina Marga memiliki tanggung jawab dalam pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

2. **Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)**

   Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan jaringan irigasi, drainase, serta sumber air baku.

3. **Cipta Karya (Bangunan Gedung dan Permukiman)**

   Bidang Cipta Karya berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, bangunan gedung negara, dan penataan lingkungan permukiman.

4. **Penataan Ruang**

   Bidang Penataan Ruang berfungsi mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar selaras dengan rencana tata ruang dan pembangunan berkelanjutan.

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabel II.2. Tabel Evaluasi terhadap RKPD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Terpenuhinya kemantapan kondisi prasarana jalan (Konektifitas antar wilayah) semua sarana ke PU-an			Tingkat kemantapan jalan Kabupaten (%)	59	1,769,055,788,088	50	0	53	49,266,659,399																
				Reancana tata pengaturan air dan tata pengairan Kabupaten (%)	34,66		31,66		32,66																	
				Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	59		50		53																	
				Persentase bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten Kota (%)	0		0		0																	
				Ketaatan terhadap RTRW (%)	100		100		100																	
				Jumlah bangunan ber- IMB dan persatuan bangunan yang di berikan Kabupaten Kota dalam tahun Eksisting (Angka)	4,480		2,946		3,388																	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrut kru pengend alian banjir di WS kewena ngan kab/kota (%)	45,70	556.103.308.966	10,00	0	39,70	3.476.701.571									10,00	2,945,460,500						
				rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Ha)	4.999,00		300,00		3.000,00										300,00							
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi (%)	45	534.810.950.791	0,00	0	40	3.320.505.502	0%	86,394,000	12%	13,973,500	15%	526,693,100	11%	2,267,310,900	38,00%	2,894,371,500	30,17%	2.894.371.500	**76,07%**	**0,54%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	5	254,351,000	0	0	1	44,351,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	**20,00%**	**0,00%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	112	399,468,559,404	0	0	16	627,657,404	0	960,000	0	800,000	0	40,236,000	14	380,646,800	14	422,642,800	14	422,642,800	**12,50%**	**0,11%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	139	117,194,877,666	0	0	19	274,877,666	0	0	0	960,000	0	960,000	17	261,653,000	17	263,573,000	17	263,573,000	**12,23%**	**0,22%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	392	17,811,971,450	0	0	30	2,142,428,161	0	74,814,000	0	3,000	0	485,497,100	24	1,425,517,900	24	1,985,832,000	24	1,985,832,000	**6,12%**	**11,15%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1	81,191,271	0	0	1	231,191,271	0	10,620,000	0	12,210,500	0	0	1	199,493,200	1	222,323,700	1	222,323,700	**100,00%**	**273,83%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jaringan primer (Ha)	5,000	21.292.358.175	0,00	0	3,000	156.196.069	0%	1,280,000	0%	0	300%	480,000	0%	49,329,000	300,00%	51,089,000	3,81%	51.089.000	**0,13%**	**0,24%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0	208,300,000	0	0	0	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21	20,334,232,607	0	0	1	98,070,501	0	640,000	0	0	0	320,000	1	3,458,000	1	4,418,000	1	4,418,000	**4,76%**	**0,02%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	45	749,825,568	0	0	3	49,825,568	0	640,000	0	0	0	160,000	3	45,871,000	3	46,671,000	3	46,671,000	**6,67%**	**6,22%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah kabuapaten (%)	55,00	1.002.030.220.110	45,00	0	45,00	569.002.363									45,00	424,231,000						
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam daerah Kabupaten/Kota (%)	54	1.002.030.220.110	0,00	0	45	569.002.363	10%	0	15%	960,000	10%	163,074,000	10%	260,197,000	45,00%	424,231,000	0,00%	424.231.000	**0,00%**	**0,04%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	0	1,109,917,086	0	0	2,525	464,879,339	0	0	0	480,000	0	157,560,000	1,500	164,994,000	1,500	323,034,000	1,500	323,034,000	**0,00%**	**29,10%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	0	698,129,024	0	0	2,650	104,123,024	0	0	0	480,000	0	5,514,000	2,550	95,203,000	2,550	101,197,000	2,550	101,197,000	**0,00%**	**14,50%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2	1,000,222,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terlaksana
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan milik permerintah dan lingkungann ya yang ditata (Kawasan)	4.480,00	14.209.934.605	99,00	0	3.388,00	3.075.319.639									99,00	2,575,219,500						
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB,PBG dan sertifikat LAIK fungsi (Sertifikat)	4,480	14.209.934.605	0,00	0	3,388	3.075.319.639	10%	229,986,000	30%	63,192,000	30%	556,211,700	29%	1,725,829,800	99,00%	2,575,219,500	3,33%	2.575.219.500	**0,10%**	**18,12%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0	10,440,942,861	0	0	6	2,504,407,410	1	9,997,000	0	25,600,000	0	518,931,700	5	1,449,797,800	6	2,004,326,500	6	2,004,326,500	**0,00%**	**19,20%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	200	1,039,999,646	0	0	20	199,999,646	5	199,989,000	0	0	0	0	15	0	20	199,989,000	20	199,989,000	**10,00%**	**19,23%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai

		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	0	2,728,992,098	0	0	95	370,912,583	5	20,000,000	0	37,592,000	0	37,280,000	88	276,032,000	93	370,904,000	93	370,904,000	**0,00%**	**13,59%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	persentase bangunan milik pemerintah dan lingkungnnya yang ditata tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	100,00	922.447.823	100,00	0	100,00	112.447.823									100,00	112,047,000						
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan (%)	97	922.447.823	0,00	0	100	112.447.823	10%	0	25%	16,757,000	28%	10,920,000	37%	84,370,000	100,00%	112,047,000	0,00%	112.047.000	**0,00%**	**12,15%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	922,447,823	0	0	1	112,447,823	1	0	0	16,757,000	0	10,920,000	0	84,370,000	1	112,047,000	1	112,047,000	**0,00%**	**12,15%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	60,00	194.059.425.012	53,00	0	54,00	41.853.555.693									53,00	40,442,458,331						
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang di tetapkan kepala daerah dalam SK kewenagan jalan Kabupaten (%)	1	194.059.425.012	0,00	0	1	41.853.555.693	0%	3,699,733,600	0.11%	143,853,500	0.13%	18,793,233,923	0.31%	17,805,637,308	0,55%	40,442,458,331	0,00%	40.442.458.331	**0,00%**	**20,84%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0	151,690,434,378	0	0	566	33,878,830,833	0	3,406,961,497	0	135,167,500	0	15,902,783,643	566	14,210,918,891	566	33,655,831,531	566	33,655,831,531	**0,00%**	**22,19%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0	1,056,353,876	0	0	36	406,133,996	0	19,824,600	0	0	0	0	34	375,487,000	34	395,311,600	34	395,311,600	**0,00%**	**37,42%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	13	1,139,727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terlaksana
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0	30,065,999,185	0	0	322	6,153,352,661	0	259,525,000	0	8,686,000	0	2,890,450,280	322	2,590,005,520	322	5,748,666,800	322	5,748,666,800	**0,00%**	**19,12%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0	2,929,933,560	0	0	884	629,933,544	0	3	0	0	0	0	874	629,225,897	874	629,225,900	874	629,225,900	**0,00%**	**21,48%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0	7,176,977,013	0	0	22	785,304,659	0	13,422,500	0	0	0	0	22	0	22	13,422,500	22	13,422,500	**0,00%**	**0,19%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai

		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci tata ruang (RRTR kabupaten) (%)	100,00	1.730.451.572	100,00	0	100,00	179.632.310									100,00	164,223,200						
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang disetujui (Dokumen)	49	250.000.000	0,00	0	50	47.229.250	10%	0	10%	0	15%	0	15%	47,229,200	50,00%	47,229,200	36,14%	47.229.200	**72,29%**	**18,89%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	249	250,000,000	0	0	95	47,229,250	20	0	15	0	30	0	25	47,229,200	90	47,229,200	90	47,229,200	**36,14%**	**18,89%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan (%)	99	1.480.451.572	0,00	0	99	132.403.060	24%	9,655,000	25%	11,014,800	25%	18,575,000	25%	77,749,200	99,00%	116,994,000	0,00%	116.994.000	**0,00%**	**7,90%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	1,480,451,572	0	0	2	132,403,060	1	9,655,000	0	11,014,800	0	18,575,000	1	77,749,200	2	116,994,000	2	116,994,000	**0,00%**	**7,90%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pada Pekerjaan Umum & Tata Ruang			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	100	150,012,074,654	100	0	100	26,075,157,799																
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik. (%)	100		100		100																	
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	27.880.935.438	100,00	0	100,00	3.288.755.868									100,00	3,201,821,423						
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersedia (Dokumen)	13	1.163.096.578	0,00	0	13	83.945.535	1%	30,330,000	4%	9,950,000	5%	9,000,000	3%	31,285,829	99,00%	80,565,829	23,33%	80.565.829	**179,49%**	**6,93%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	155,002,422	0	0	1	9,491,614	1	9,480,000	0	0	0	0	0	0	1	9,480,000	1	9,480,000	**20,00%**	**6,12%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	241,549,619	0	0	1	12,999,641	1	0	0	0	0	3,000,000	0	9,798,000	1	12,798,000	1	12,798,000	**20,00%**	**5,30%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	151,851,211	0	0	1	16,493,604	1	5,850,000	0	0	0	3,000,000	0	7,643,604	1	16,493,604	1	16,493,604	**20,00%**	**10,86%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	245,601,384	0	0	1	12,989,228	1	7,150,000	0	1,500,000	0	0	0	4,339,228	1	12,989,228	1	12,989,228	**20,00%**	**5,29%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai

		1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	151,777,703	0	0	1	16,488,909	1	0	0	6,950,000	0	0	0	6,505,000	1	13,455,000	1	13,455,000	**20,00%**	**8,86%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	217,314,239	0	0	2	15,482,539	1	7,850,000	0	1,500,000	0	3,000,000	1	2,999,997	2	15,349,997	2	15,349,997	**40,00%**	**7,06%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Kegiatan)	15	20.344.823.166	0,00	0	15	2.406.298.477	1%	463,601,165	4%	805,736,233	5%	559,184,364	5%	542,843,994	98,00%	2,371,365,756	19,36%	2.371.365.756	**129,05%**	**11,66%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	249	20,128,791,856	0	0	50	2,380,317,873	5	452,311,165	5	801,896,233	0	555,394,364	35	535,873,994	45	2,345,475,756	45	2,345,475,756	**18,07%**	**11,65%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	98,660,420	0	0	1	7,493,926	0	7,450,000	0	0	0	0	1	0	1	7,450,000	1	7,450,000	**20,00%**	**7,55%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	117,370,890	0	0	1	18,486,678	0	3,840,000	0	3,840,000	0	3,790,000	1	6,970,000	1	18,440,000	1	18,440,000	**20,00%**	**15,71%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Daftar)	9	211.402.098	0,00	0	9	18.492.898	0%	4,089,999	2%	3,340,001	3%	2,870,000	4%	8,190,000	100,00%	18,490,000	20,00%	18.490.000	**222,22%**	**8,75%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	211,402,098	0	0	1	18,492,898	1	4,089,999	0	3,340,001	0	2,870,000	0	8,190,000	1	18,490,000	1	18,490,000	**20,00%**	**8,75%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Orang)	55	1.552.336.244	0,00	0	36	113.750.308	10%	25,875,000	10%	13,215,000	10%	10,170,000	6%	51,245,000	100,00%	100,505,000	19,00%	100.505.000	**52,78%**	**6,47%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	398,416,240	0	0	1	68,890,308	0	13,215,000	0	13,215,000	0	10,170,000	1	32,235,000	1	68,835,000	1	68,835,000	**20,00%**	**17,28%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500	1,153,920,004	0	0	100	44,860,000	10	12,660,000	10	0	0	0	70	19,010,000	90	31,670,000	90	31,670,000	**18,00%**	**2,74%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Daftar)	15	2.575.544.149	0,00	0	15	427.919.885	1%	49,345,436	4%	51,053,134	5%	75,783,977	5%	251,247,306	100,00%	427,429,853	20,00%	427.429.853	**133,33%**	**16,60%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	486,089,760	0	0	1	7,091,000	1	0	0	0	0	0	0	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	**20,00%**	**1,44%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	250,625,384	0	0	1	35,600,000	1	3,900,000	0	3,850,000	0	3,900,000	0	23,810,000	1	35,460,000	1	35,460,000	**20,00%**	**14,15%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai

		1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	287,770,000	0	0	1	39,950,000	1	0	0	9,685,000	0	4,800,000	0	25,350,000	1	39,835,000	1	39,835,000	**20,00%**	**13,84%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	1,374,571,120	0	0	1	328,791,000	1	42,445,436	0	33,018,134	0	65,583,977	0	187,697,306	1	328,744,853	1	328,744,853	**20,00%**	**23,92%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	176,487,885	0	0	1	16,487,885	1	3,000,000	0	4,500,000	0	1,500,000	0	7,390,000	1	16,390,000	1	16,390,000	**20,00%**	**9,29%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Daftar)	10	1.200.374.563	0,00	0	10	151.599.415	1%	28,860,324	2%	21,410,965	4%	19,053,179	3%	58,516,097	99,00%	127,840,565	20,00%	127.840.565	**200,00%**	**10,65%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	865,574,563	0	0	1	135,999,415	1	26,260,324	0	18,810,965	0	16,453,179	0	50,716,097	1	112,240,565	1	112,240,565	**20,00%**	**12,97%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	334,800,000	0	0	1	15,600,000	1	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	0	7,800,000	1	15,600,000	1	15,600,000	**20,00%**	**4,66%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa service peralatan kantor setiap tahun (Daftar)	15	833.358.640	0,00	0	15	86.749.350	2%	33,300,000	4%	5,618,000	6%	2,000,000	3%	34,706,420	99,00%	75,624,420	18,67%	75.624.420	**124,44%**	**9,07%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	537,971,040	0	0	30	40,708,950	3	2,000,000	7	2,000,000	0	2,000,000	14	31,106,420	24	37,106,420	24	37,106,420	**16,00%**	**6,90%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	89,700,000	0	0	1	14,700,000	1	0	0	3,618,000	0	0	0	3,600,000	1	7,218,000	1	7,218,000	**20,00%**	**8,05%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	205,687,600	0	0	1	31,340,400	1	31,300,000	0	0	0	0	0	0	1	31,300,000	1	31,300,000	**20,00%**	**15,22%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase jumlah rmah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga seluruh kab. (%)	100,00	95.231.430.566	95,83	0	100,00	16.863.621.090									95,83	15,450,157,719						
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penerima manfaat sarana air bersih/air minum (%)	99	95.231.430.566	0,00	0	100	16.863.621.090	10%	1,206,443,531	22.83%	1,600,000	40%	5,961,287,985	20%	8,280,826,203	92,83%	15,450,157,719	18,67%	15.450.157.719	**18,67%**	**16,22%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	7,500	42,062,522,080	0	0	1,500	7,159,750,292	0	1,206,443,531	0	1,600,000	0	1,583,540,695	1,500	3,938,354,788	1,500	6,729,939,014	1,500	6,729,939,014	**20,00%**	**16,00%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	7,500	34,145,555,886	0	0	1,500	5,888,473,908	0	0	0	0	0	1,435,091,000	1,500	4,247,026,150	1,500	5,682,117,150	1,500	5,682,117,150	**20,00%**	**16,64%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai

		1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	25	19,023,352,600	0	0	5	3,815,396,890	0	0	0	0	0	2,942,656,290	4	95,445,265	4	3,038,101,555	4	3,038,101,555	**16,00%**	**15,97%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Tercapai
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik (%)	100,00	26.899.708.650	100,00	0	100,00	5.922.780.841									100,00	5,716,288,000						
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah (%)	100	26.899.708.650	0,00	0	100	5.922.780.841	10%	0	30%	0	35%	1,282,500,000	25%	4,433,788,000	100,00%	5,716,288,000	0,00%	5.716.288.000	**0,00%**	**21,25%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0	26,899,708,650	0	0	700	5,922,780,841	0	0	100	0	0	1,282,500,000	600	4,433,788,000	700	5,716,288,000	700	5,716,288,000	**0,00%**	**21,25%**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tercapai
Total Target (RP)						**75,341,817,198**					**Total Realisasi (RP)**								**71,031,906,673**						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**94,42**		**94,28**				
Predikat kinerja																			**ST**		**ST**				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah menghadapi berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Isu-isu ini mencakup aspek tata kelola, sumber daya, dan pelayanan publik, baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Adapun isu-isu penting yang diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. **Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Belum Merata**
   Masih terdapat kesenjangan antarwilayah dalam hal ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta sarana air bersih. Beberapa wilayah perdesaan masih sulit dijangkau karena keterbatasan konektivitas dan aksesibilitas.
2. **Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah dan Efisiensi Penggunaan Anggaran**
   Keterbatasan dana pembangunan menyebabkan beberapa program strategis harus dilaksanakan secara bertahap. Efisiensi penggunaan anggaran dan optimalisasi sumber pendanaan alternatif (DAK, DID, dan kerjasama pemerintah-swasta) perlu ditingkatkan.
3. **Kualitas Perencanaan dan Kesiapan Dokumen Teknis yang Belum Optimal**
   Beberapa kegiatan fisik mengalami keterlambatan pelaksanaan akibat keterlambatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan dokumen lingkungan (UKL-UPL/AMDAL), yang berdampak pada efektivitas waktu pelaksanaan.
4. **Pemeliharaan Infrastruktur yang Belum Optimal**
   Fokus pembangunan masih didominasi kegiatan fisik baru, sementara kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala belum sepenuhnya terencana dengan baik, sehingga menimbulkan penurunan kualitas infrastruktur yang telah dibangun.
5. **Tantangan Pengelolaan Tata Ruang dan Penegakan Kepatuhan Pemanfaatan Ruang**
   Masih terdapat pelanggaran terhadap rencana tata ruang, kurangnya data spasial yang terintegrasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan pemanfaatan ruang di lapangan.
6. **Keterbatasan SDM Teknis dan Fungsional**
   Jumlah dan kompetensi tenaga teknis seperti perencana, pengawas, dan tenaga ahli bidang penataan ruang masih belum seimbang dengan beban kerja dan kebutuhan proyek pembangunan daerah.
7. **Pengaruh Kondisi Lingkungan dan Perubahan Iklim**
   Peningkatan intensitas hujan dan perubahan pola iklim memengaruhi ketahanan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan irigasi. Hal ini menuntut Dinas PUPR untuk mengembangkan desain pembangunan infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan.
8. **Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik yang Masih Terbatas**
   Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data infrastruktur, pengaduan masyarakat, serta pemantauan progres pekerjaan masih perlu dikembangkan secara sistematis dan terintegrasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 menetapkan tema pembangunan daerah yaitu **"Percepatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Wilayah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan"**.

Tema tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, serta memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR sebagai penggerak utama pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil review, terdapat kesesuaian yang kuat antara program dan kegiatan Dinas PUPR dengan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD 2025, khususnya pada bidang:

1. **Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah** – melalui program pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten, jembatan penghubung, dan peningkatan infrastruktur desa penunjang kawasan ekonomi;
2. **Penguatan Ketahanan Sumber Daya Air dan Mitigasi Bencana** – melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan normalisasi drainase lingkungan;
3. **Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman** – melalui pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan layak huni;
4. **Pengembangan Tata Ruang dan Penataan Wilayah Berbasis Data Spasial** – melalui kegiatan penyusunan RDTR dan pemutakhiran peta tata ruang kabupaten.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui proses **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)** tingkat desa, kecamatan, hingga forum OPD, masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan berbagai usulan program dan kegiatan yang sebagian besar berkaitan dengan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan.

Dinas PUPR telah melakukan penelaahan terhadap usulan-usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kesesuaian dengan kewenangan, dan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah. Hasil penelaahan menunjukkan pola usulan masyarakat sebagai berikut:

1. **Usulan Peningkatan Jalan Lingkungan dan Jalan Desa**
   Sebagian besar usulan masyarakat menitikberatkan pada peningkatan akses jalan antar desa dan jalan usaha tani untuk mendukung produktivitas ekonomi masyarakat.
2. **Permintaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Drainase**
   Usulan ini banyak berasal dari kawasan pertanian produktif yang membutuhkan ketersediaan air yang stabil dan pengendalian banjir di musim hujan.
3. **Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan**
   Masyarakat mengusulkan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi terutama di wilayah padat penduduk dan daerah rawan air.
4. **Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Publik**
   Terdapat usulan untuk rehabilitasi kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, serta sarana ibadah dan pelayanan publik lainnya.
5. **Penataan Ruang dan Pengendalian Kawasan Permukiman**
   Usulan ini mencakup kebutuhan akan penataan kawasan perkotaan, pengaturan zona pemukiman baru, serta penyediaan ruang terbuka hijau.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa lebih dari **70% usulan masyarakat relevan dengan kewenangan Dinas PUPR**, dan telah diakomodasi dalam Renja Perubahan Tahun 2025 dengan prioritas berdasarkan urgensi pelayanan publik, ketersediaan anggaran, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5.1 Strategi

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan fokus pada konektivitas antarwilayah dan kawasan strategis ekonomi.
2. Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur berbasis data dan teknologi informasi.

3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana permukiman, sumber daya air, dan penataan ruang.
4. Mendorong pembangunan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
5. Meningkatkan efektivitas pemeliharaan infrastruktur melalui sistem manajemen aset daerah.
6. Mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan melalui sinergi antara APBD, DAK, dan kerjasama pemerintah-swasta.

2.5.2 Arah Kebijakan

1. **Bidang Bina Marga:** peningkatan dan preservasi jaringan jalan dan jembatan yang menjadi prioritas pelayanan dasar dan konektivitas ekonomi wilayah.
2. **Bidang Sumber Daya Air:** peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan penguatan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim.
3. **Bidang Cipta Karya:** peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengelolaan air bersih, sanitasi, dan pembangunan gedung fasilitas publik yang layak dan berkelanjutan.
4. **Bidang Penataan Ruang:** penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan RDTR prioritas, dan digitalisasi informasi tata ruang sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan daerah.
5. **Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Publik:** peningkatan kapasitas SDM teknis, digitalisasi sistem pelayanan infrastruktur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Pengertian Tujuan dan Sasaran

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran merupakan komponen penting yang menjadi pedoman arah pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
Tujuan menjelaskan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran menggambarkan hasil yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Bagi **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah**, tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian **tujuan pembangunan daerah** sebagaimana tertuang dalam **RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026** dan **RKPD Perubahan Tahun 2025**.

Penyusunan tujuan dan sasaran ini mengacu pada:

1. **Renstra Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026**,
2. **RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026**,
3. **RKPD Perubahan Tahun 2025**,
4. **Kebijakan teknis Kementerian PUPR**, khususnya bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang,
5. **Isu strategis daerah dan nasional**, seperti percepatan konektivitas wilayah, peningkatan layanan dasar, serta penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital (Smart Governance).

Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Tahun 2025 berfungsi sebagai *guideline* agar setiap bidang dalam Dinas PUPR mampu berorientasi pada hasil (outcome-based planning), mendukung efisiensi anggaran, dan menjamin manfaat langsung bagi masyarakat.

3.2. Kondisi Umum dan Tantangan Pembangunan Sektor PUPR

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat beberapa tantangan yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran tahun 2025, antara lain:

1. **Masih terbatasnya kondisi jalan kabupaten dalam kategori mantap** – Sebagian jaringan jalan belum terpelihara optimal, terutama pada wilayah produksi dan daerah perdesaan.
2. **Belum optimalnya jaringan irigasi dan pengendalian daya rusak air** – Kondisi irigasi di beberapa daerah mengalami sedimentasi dan kerusakan akibat faktor usia bangunan dan perubahan iklim.
3. **Keterbatasan akses sanitasi dan air bersih di sebagian masyarakat pedesaan** – Terdapat kesenjangan pelayanan antara wilayah pusat kecamatan dan desa terpencil.
4. **Masih lemahnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang (RTRW)** – Pemanfaatan ruang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik ruang dan degradasi lingkungan.
5. **Perlu penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan digitalisasi proses layanan.**

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka tujuan dan sasaran Dinas PUPR Tahun 2025 diarahkan untuk menjawab tantangan di atas secara sistematis dan terukur.

3.3. Tujuan Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas PUPR memiliki tujuan utama untuk **mewujudkan infrastruktur yang handal, merata, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa arah strategis sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang pekerjaan umum (Bina Marga)**
   Melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan agar kondisi mantap meningkat dan konektivitas antarwilayah menjadi lebih baik.
2. **Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air (Bidang SDA)**
   Dengan cara meningkatkan fungsi jaringan irigasi, memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, serta memastikan keberlanjutan pemanfaatan air melalui konservasi dan efisiensi pengelolaan.
3. **Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi dan air bersih (Bidang Cipta Karya)**
   Berfokus pada pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), drainase lingkungan, dan penyediaan sarana air minum aman berbasis masyarakat.
4. **Mewujudkan penataan ruang wilayah yang tertib, terpadu, dan berkelanjutan (Bidang Penataan Ruang)**
   Melalui penyusunan, peninjauan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Mamuju Tengah.
5. **Meningkatkan profesionalisme dan daya saing sektor jasa konstruksi (Bidang Jasa Konstruksi)**
   Dengan meningkatkan validitas data BUJK/TKK, memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja, serta memperkuat peran daerah dalam pembinaan jasa konstruksi.
6. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital (Smart Governance)**
   Dengan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, penerapan sistem informasi digital, dan optimalisasi pelayanan publik secara elektronik.

3.4. Sasaran Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025

Sasaran merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai dari pelaksanaan tujuan tersebut.

Sasaran menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Dinas PUPR selama Tahun 2025.

No	Tujuan	Sasaran Tahun 2025	Indikator Kinerja Sasaran (IKS)	Target 2025
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat b. Jumlah jembatan dalam kondisi baik meningkat	- Persentase jalan mantap (%) - Panjang jembatan berfungsi baik (m)	78% jalan mantap

No	Tujuan	Sasaran Tahun 2025	Indikator Kinerja Sasaran (IKS)	Target 2025
2	Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air	a. Peningkatan jaringan irigasi berfungsi baik b. Penurunan titik genangan di wilayah rawan banjir	- Persentase jaringan irigasi berfungsi baik (%) - Jumlah titik genangan tertangani	85% jaringan berfungsi
3	Meningkatkan layanan sanitasi dan air bersih	a. Akses masyarakat terhadap sanitasi layak meningkat b. Akses air minum aman meningkat	- Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%) - Persentase penduduk dengan akses air minum aman (%)	80% akses sanitasi
4	Mewujudkan penataan ruang wilayah yang tertib	a. Kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW meningkat b. Penyusunan dokumen tata ruang terlaksana	- Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW (%) - Jumlah dokumen RTR/RDTR tersusun	90% kepatuhan
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital	a. Peningkatan layanan digitalisasi administrasi b. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Persentase layanan digital (%) - Nilai SAKIP	85% digitalisasi

3.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kontribusi langsung terhadap **pencapaian arah pembangunan daerah** sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2025, yang meliputi:

1. **Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Antar Kawasan**
   → Melalui pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar yang menghubungkan sentra ekonomi, perdesaan, dan kawasan produktif.
2. **Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air dan Lingkungan**
   → Melalui pengelolaan irigasi, drainase, serta pengendalian banjir dan longsor secara terpadu.
3. **Peningkatan Akses terhadap Sanitasi dan Air Bersih**
   → Melalui kegiatan bidang Cipta Karya, untuk mewujudkan lingkungan sehat dan mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) sektor air bersih dan sanitasi.

4. **Penataan Ruang yang Efektif dan Berkelanjutan**
   → Melalui penyusunan, peninjauan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten dengan RTRW Kabupaten.
5. **Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi Daerah**
   → Melalui pembinaan BUJK dan TKK serta fasilitasi sertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
6. **Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Menuju Smart Governance**
   → Melalui digitalisasi layanan publik, manajemen kinerja elektronik, dan transparansi pelaporan berbasis aplikasi.

3.6. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran tersebut, Dinas PUPR menetapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga

- Mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan dengan pendekatan berbasis prioritas wilayah.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan.
- Mengembangkan sistem manajemen aset jalan digital berbasis GIS.

b. Bidang Sumber Daya Air

- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi utama dan tersier.
- Pembangunan saluran drainase untuk menanggulangi genangan di kawasan padat penduduk.
- Penguatan kelembagaan irigasi (P3A) dan kolaborasi dengan masyarakat petani.

c. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

- Peningkatan pembangunan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu).
- Rehabilitasi jaringan air bersih berbasis desa dan SPAM skala kecil.
- Penguatan kelembagaan pengelola sanitasi dan air minum (KSM) melalui pelatihan dan pendampingan.
- Penerapan sistem monitoring air bersih dan sanitasi berbasis data (dashboard digital).
- Pendataan dan pembinaan BUJK dan tenaga kerja konstruksi daerah.
- Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja bekerja sama dengan LPJK dan LSP Konstruksi.
- Pengawasan penerapan standar K3 dan mutu pelaksanaan konstruksi di lapangan.

d. Bidang Penataan Ruang

- Penyusunan dan revisi RTRW dan RDTR yang responsif terhadap dinamika pembangunan.
- Penegakan aturan pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban.
- Pengembangan peta digital geospasial untuk mempermudah pengendalian dan perencanaan wilayah.

f. Sekretariat / Bidang Tata Kelola

- Digitalisasi proses perencanaan, pelaporan, dan evaluasi melalui e-office dan e-Monev.
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial.
- Penguatan sistem akuntabilitas dan pelaporan kinerja berbasis SAKIP.

3.7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Mamuju Tengah

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan beserta pendanaannya yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah pada perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**67.325.399.850,00**	**72.311.894.890,97**	**33.137.485.019,91**	**-34.187.914.830,09**							**111.177.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**67.325.399.850,00**	**72.311.894.890,97**	**33.137.485.019,91**	**-34.187.914.830,09**							**111.177.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**67.325.399.850,00**	**72.311.894.890,97**	**33.137.485.019,91**	**-34.187.914.830,09**							**111.177.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor**				**1 dokumen undefined**	**1 dokumen undefined**	**4.748.500.000,00**	**2.900.117.274,74**	**3.877.741.749,74**	**68.500.000,00**							**4.817.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	92.000.000,00	50.513.693,00	46.411.282,00	-45.588.718,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		104.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	3.090.012,00	1.492.330,00	-9.007.670,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			12.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	4.611.633,00	1.969.003,00	-12.030.997,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	13.248.720,00	10.813.768,00	-6.686.232,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			19.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	4.555.511,00	1.940.032,00	-12.059.968,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	5.022.658,00	2.346.187,00	-16.153.813,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			20.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.500.000,00	19.985.159,00	27.849.962,00	10.349.962,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			19.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.430.000.000,00	2.215.598.324,74	3.257.733.731,74	-172.266.268,26			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	-		3.634.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3.400.000.000,00	2.215.598.324,74	3.257.733.731,74	-142.266.268,26	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			3.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			11.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			22.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.500.000,00	6.977.944,00	3.684.640,00	-16.815.360,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	-		22.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.500.000,00	6.977.944,00	3.684.640,00	-16.815.360,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			22.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	124.000.000,00	65.214.263,00	88.570.746,00	-35.429.254,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Masyrakat Kabupaten Mamuju Tengah		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000,00	23.214.263,00	54.970.746,00	-19.029.254,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	50.000.000,00	42.000.000,00	33.600.000,00	-16.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	346.500.000,00	353.103.050,00	274.031.350,00	-72.468.650,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju tengah		374.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	164.182.000,00	132.386.500,00	124.386.500,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	18.000.000,00	20.193.500,00	5.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	23.160.000,00	8.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	280.000.000,00	145.567.550,00	128.644.850,00	-151.355.150,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			20.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	445.000.000,00	0,00	0,00	-445.000.000,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju tengah		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	385.000.000,00	0,00	0,00	-385.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	182.500.000,00	165.600.000,00	165.600.000,00	-16.900.000,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju tengah		204.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			185.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	17.500.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-1.900.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			19.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	108.000.000,00	43.110.000,00	41.710.000,00	-66.290.000,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju tengah		117.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	39.500.000,00	38.910.000,00	38.910.000,00	-590.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	18.500.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	-15.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			20.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Kota yang di layani oleh jaringan irigasi**				**1986 Ha**	**1986 Ha**	**2.640.000.000,00**	**14.880.000,00**	**3.479.133.278,03**	**860.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.490.000.000,00	14.880.000,00	677.650.105,06	-1.812.349.894,94			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Masyrakat Kabupaten Mamuju Tengah		3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				7 KM	7 KM	600.000.000,00	0,00	309.560.538,46	-290.439.461,54	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				1 KM	1 KM	300.000.000,00	0,00	18.526.200,00	-281.473.800,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi				30 KM	30 KM	1.500.000.000,00	0,00	219.194.095,50	-1.280.805.904,50	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	14.880.000,00	130.369.271,10	40.369.271,10	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	2.801.483.172,97	2.651.483.172,97			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Masyrakat Kabupaten Mamuju Tengah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.5 KM	0.5 KM	100.000.000,00	0,00	101.558.000,00	1.558.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	1 Bendung	50.000.000,00	0,00	2.699.925.172,97	2.649.925.172,97	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**15.175.000.000,00**	**10.343.476.893,44**	**10.057.655.898,00**	**1.485.000.000,00**							**16.660.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.175.000.000,00	10.343.476.893,44	10.057.655.898,00	-5.117.344.102,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Masyrakat Kabupaten Mamuju Tengah		16.660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1500 Liter/Detik	1500 Liter/Detik	5.500.000.000,00	2.163.619.030,44	313.795.000,00	-5.186.205.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				100 Liter/Detik	100 Liter/Detik	6.100.000.000,00	5.273.782.500,00	5.692.004.867,00	-407.995.133,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			6.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1500 Unit	1500 Unit	3.575.000.000,00	2.906.075.363,00	4.051.856.031,00	476.856.031,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			3.860.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**5.500.000.000,00**	**3.728.553.641,00**	**3.761.345.000,00**	**500.000.000,00**							**6.000.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah*				undefined undefined	undefined undefined	5.500.000.000,00	3.728.553.641,00	3.761.345.000,00	-1.738.655.000,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Masyrakat Kabupaten Mamuju Tengah		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				700 Rumah Tangga	700 Rumah Tangga	5.500.000.000,00	3.728.553.641,00	3.761.345.000,00	-1.738.655.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabuapaten**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**300.000.000,00**	**513.991.040,85**	**230.358.059,00**	**2.200.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	513.991.040,85	230.358.059,00	-69.641.941,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Masyrakat Kabupaten Mamuju Tengah		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				400 M	400 M	200.000.000,00	415.828.782,60	74.351.059,00	-125.648.941,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				200 M	200 M	100.000.000,00	98.162.258,25	120.027.000,00	20.027.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	35.980.000,00	35.980.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB/PBG dan sertifikat LAIK fungsi**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**2.400.000.000,00**	**1.720.579.042,15**	**1.606.492.296,63**	**500.000.000,00**							**2.900.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	2.400.000.000,00	1.720.579.042,15	1.606.492.296,63	-793.507.703,37			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	-		2.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				6 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.472.657.762,15	1.263.761.377,63	-736.238.622,37	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	9.600.000,00	52.800.000,00	-147.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				65 Dokumen	65 Dokumen	200.000.000,00	238.321.280,00	289.930.919,00	89.930.919,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**150.000.000,00**	**131.999.048,00**	**16.000.000,00**	**50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	131.999.048,00	16.000.000,00	-134.000.000,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	131.999.048,00	16.000.000,00	-134.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan Kabupaten**				**100 %**	**100 %**	**36.219.985.000,00**	**52.943.257.950,79**	**10.077.078.738,51**	**37.630.015.000,00**							**73.850.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jalan dalam kondisi mantap*				60 %	60 %	36.219.985.000,00	52.943.257.950,79	10.077.078.738,51	-26.142.906.261,49			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		73.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				2 Jembatan	2 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10.4 KM	10.4 KM	28.189.985.000,00	52.413.806.196,18	5.384.819.136,74	-22.805.165.863,26	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			45.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3 KM	3 KM	200.000.000,00	431.298.685,60	2.704.462.499,97	2.504.462.499,97	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	3 Jembatan	0,00	0,00	139.727.000,00	139.727.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				7 Jembatan	1 Jembatan	5.300.000.000,00	98.153.069,01	1.103.839.452,00	-4.196.160.548,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				884,36 KM	884,36 KM	530.000.000,00	0,00	544.231.000,00	14.231.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5 KM	5 KM	2.000.000.000,00	0,00	199.999.649,80	-1.800.000.350,20	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten)**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**191.914.850,00**	**15.040.000,00**	**31.680.000,00**	**58.085.150,00**							**250.000.000,00**	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	191.914.850,00	15.040.000,00	31.680.000,00	-160.234.850,00			-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				150 Dokumen	150 Dokumen	191.914.850,00	15.040.000,00	31.680.000,00	-160.234.850,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**67.325.399.850,00**	**72.311.894.890,97**	**33.137.485.019,91**	**-32.319.565.638,02**							**111.177.000.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH

4.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mengalami penyesuaian terhadap dinamika kondisi fiskal, prioritas pembangunan, serta kebijakan nasional dan daerah.

Renja Perubahan disusun sebagai bentuk penyesuaian atas Renja Murni Tahun 2025, dengan mempertimbangkan:

1. **Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah**
    - Penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ketahanan sumber daya air.
    - Penyesuaian dengan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.
2. **Perubahan Kondisi Fiskal Daerah**
    - Penyesuaian pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
    - Reorientasi belanja langsung menuju kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan layanan publik.
3. **Perubahan Prioritas Pembangunan dan Target Kinerja**
    - Penajaman sasaran prioritas bidang pekerjaan umum, sumber daya air, cipta karya (sanitasi dan air bersih), penataan ruang, dan jasa konstruksi.
    - Penyesuaian indikator kinerja sasaran dan target capaian agar tetap relevan dengan kondisi aktual serta hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
4. **Perubahan Kebijakan Teknis Bidang PUPR**
    - Sinkronisasi dengan pedoman teknis Kementerian PUPR dan regulasi LPJK terkait pembinaan jasa konstruksi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, serta sertifikasi kompetensi.
    - Penyesuaian kebijakan digitalisasi pelayanan publik menuju sistem Smart PUPR.

Kaidah pelaksanaan Renja Perubahan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- Efisiensi dan efektivitas,
- Transparansi dan akuntabilitas,
- Partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,
- Berorientasi hasil (outcome-based planning),
- Keselarasan antar program dan bidang, serta
- Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 berjalan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan beberapa langkah tindak lanjut strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Perencanaan dan Koordinasi

1. Melaksanakan sinkronisasi perencanaan antarbidang (Bina Marga, SDA, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang) dengan Bappeda, Dinas teknis lainnya, serta pemerintah provinsi.
2. Melakukan penajaman indikator kinerja kegiatan sesuai arah pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat (Kementerian PUPR) dan mitra pembangunan untuk dukungan program strategis lintas wilayah.

b. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Program

1. Menetapkan sistem pemantauan berbasis digital (e-Monev) untuk memastikan ketercapaian target fisik dan keuangan.
2. Melakukan rapat evaluasi bulanan dan triwulanan untuk setiap bidang dalam rangka mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi cepat.
3. Mengoptimalkan pengawasan lapangan melalui tim pengendalian teknis internal.

c. Penguatan Sumber Daya dan Kapasitas Kelembagaan

1. Peningkatan kapasitas aparatur di bidang teknis, administrasi, dan manajemen proyek melalui pelatihan dan workshop.
2. Mendorong sertifikasi tenaga ahli PUPR untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu layanan.
3. Penguatan sistem informasi internal dalam pengelolaan dokumen teknis dan pelaporan keuangan.

d. Pengelolaan Keuangan dan Penyesuaian Pagu

1. Melakukan penyesuaian pagu kegiatan agar sejalan dengan realisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja prioritas.
2. Menetapkan alokasi anggaran berbasis kinerja, dengan fokus pada kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
3. Melakukan pengendalian keuangan secara ketat sesuai prinsip value for money dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Optimalisasi Kerjasama dan Kemitraan

1. Meningkatkan sinergi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam kegiatan infrastruktur berbasis partisipatif (Padat Karya, KSM, dan CSR Infrastruktur).
2. Menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan asosiasi jasa konstruksi untuk pelatihan tenaga kerja lokal.
3. Memanfaatkan program dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan infrastruktur strategis daerah.

f. Penguatan Digitalisasi dan Transparansi Data

1. Mengembangkan Sistem Informasi PUPR Terpadu (SIM-PUPR) untuk mendukung transparansi data kegiatan dan progres proyek.
2. Menyediakan dashboard informasi publik terkait progres pembangunan infrastruktur dan data jasa konstruksi.
3. Meningkatkan integrasi data geospasial untuk perencanaan dan pengendalian penataan ruang.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diharapkan Renja Perubahan Dinas PUPR Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB V
Penutup

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat adaptif dan dinamis, yang disusun untuk menyesuaikan arah pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kondisi faktual di lapangan, perubahan kebijakan nasional maupun daerah, serta kemampuan fiskal daerah pada tahun berjalan.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa faktor strategis, antara lain:

1. **Penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan nasional dan provinsi** dalam rangka memperkuat peran daerah terhadap agenda pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar;
2. **Perubahan kemampuan keuangan daerah**, baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun transfer pusat (DAK dan DAU), yang berdampak terhadap pagu indikatif perangkat daerah;
3. **Perubahan prioritas pembangunan daerah** sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2025, yang menekankan peningkatan infrastruktur wilayah, penguatan ketahanan sumber daya air, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan;
4. **Hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya**, yang menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pembinaan jasa konstruksi, manajemen infrastruktur jalan, dan peningkatan layanan air bersih serta sanitasi; serta
5. **Perkembangan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan** yang menuntut pelayanan infrastruktur yang lebih cepat, berkualitas, dan merata.

Melalui dokumen Renja Perubahan Tahun 2025, Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah berupaya menegaskan kembali arah strategisnya dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah, yakni:

*"*Terwujudnya *infrastruktur yang handal, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk mendukung Mamuju Tengah yang maju, produktif, dan sejahtera."*

Rencana kerja perubahan ini mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR, yaitu:

- **Bidang Bina Marga**, yang berfokus pada pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan konektivitas jaringan jalan dan jembatan;
- **Bidang Sumber Daya Air**, yang mengelola infrastruktur irigasi, drainase, serta pengendalian banjir dan genangan;
- **Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi**, yang bertanggung jawab atas peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dan air minum layak;
- **Bidang Penataan Ruang**, yang berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan RTRW dan RDTR, serta pemetaan geospasial;
- **Sekretariat / Tata Kelola**, yang mengoordinasikan perencanaan, pelaporan, keuangan, dan penguatan sistem informasi berbasis digital (Smart PUPR).

Secara substantif, Renja Perubahan Dinas PUPR Tahun 2025 menitikberatkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dengan pendekatan *value for money* dan orientasi hasil (*outcome-based planning*). Pelaksanaan program diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan fisik

dan penguatan kelembagaan, sehingga seluruh hasil pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya guna.

Dalam konteks implementasi kebijakan daerah, dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 berperan sebagai:

1. **Instrumen sinkronisasi perencanaan antarlevel pemerintahan**, antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten;
2. **Acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025**;
3. **Pedoman pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah**, yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
4. **Landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan prioritas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang** di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Dari keseluruhan arah kebijakan yang tertuang, pelaksanaan Renja Perubahan Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan hasil nyata berupa:

- Terwujudnya jaringan jalan dan jembatan kabupaten yang lebih mantap dan terhubung antarwilayah;
- Berfungsinya jaringan irigasi, drainase, dan pengendali banjir secara optimal;
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dan air bersih yang layak;
- Tersusunnya dokumen rencana tata ruang yang akurat dan digunakan secara konsisten dalam pengendalian pembangunan;
- Terwujudnya tenaga kerja konstruksi daerah yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing; serta
- Terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan melalui penerapan sistem informasi digital di lingkungan Dinas PUPR.

Selain itu, dokumen ini menegaskan komitmen Dinas PUPR dalam mendukung prinsip Good Governance dan Smart Governance, melalui penguatan sistem informasi manajemen, keterbukaan data publik, dan digitalisasi proses layanan teknis.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat transformasi kelembagaan menuju birokrasi yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah juga menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama keberhasilan pelaksanaan program.

Melalui pelatihan teknis, peningkatan kompetensi aparatur, serta sinergi dengan LPJK, LSP Konstruksi, dan pemerintah provinsi, diharapkan kapasitas pelaksana di lapangan semakin meningkat dan mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Renja Perubahan Tahun 2025 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan rencana kerja strategis yang merepresentasikan semangat perubahan, adaptasi, dan inovasi Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

Melalui implementasi yang terarah dan pengawasan yang ketat, dokumen ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah yang tangguh, efisien, inklusif, dan berkeadilan.

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2025



INSPEKTORAT
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

mswordcoverpages.com

Daftar Isi

Kata Pengantar 3

Bab I

Pendahuluan 4

1.1 Latar Belakang..... 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud Tujuan..... 8

1.4 Sistematik Penulisan..... 9

BAB ll

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... 14

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 32

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 37

2.4. Review Rancangan Awal RKPD .....

BAB lll

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 46

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 46

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 55

3.3. Program dan Kegiatan 59

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....

PENUTUP 60

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat tuhan yang maha esa, pada akhirnya rencana kerja Perubahan inspektorat kabupaten mamuju tengah tahun 2025 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Renja Perubahan inspektorat kabupaten mamuju tengah tahun 2025 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, inspektorat kabupaten mamuju tengah secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Renja Perubahan inspektorat kabupaten mamuju tengah tahun 2025 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya inspektorat kabupaten mamuju tengah sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Topoyo, 6 Agustus 2025
Inspektur
Kabupaten Mamuju Tengah

SAKARIA K S.Ag.,M.Pd.,MM., CGCAE., CIPA
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV c
NIP : 19731010 200003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan dan Perundang - undangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk memperbaiki dan menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja perangkat daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja perubahan PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, RENSTRA PD dan RPJM.

Rencana Kerja (RENJA) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan renja Perubahan PD yaitu:

1. Persiapan penyusunan renja perubahan PD;
2. Tahap penyusunan Renja perubahan PD;
3. Pembahasan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
4. Penyajian dan penyampaian renja perubahan PD;
5. Verifikasi dan penyempurnaan renja perubahan yang mengacu pada rancangan akhir RKPD;
6. Penetapan renja PD.

Renja perubahan PD kabupaten disusun dengan mengacu

pada RKPD, mengacu pada renstra PD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam renja perangkat daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja PD juga disusun berdasarkan Renstra PD, dimana Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam renja PD, selaras dengan renstra PD. Renja seluruh PD se-Kabupaten Mamuju Tengah akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Mamuju Tengah. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RABPD, sehingga renja PD adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan rencana kerja perubahan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan renja perubahan Inspektorat Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit- unit kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip Good Governance dan Clean Government.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen rencana kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bagian ini terdiri atas 4 (empat) sub-bab yakni latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

1.1. **Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. **Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. **Sistematika Penyusunan Rencana Kerja**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu. Pada bagian ini terdiri atas 5 (lima) sub-bab yakni evaluasi pelaksanaan renja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah tahun lalu dan capaian renstra Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda**.**

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4. **Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.5. **Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.6. **Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan Program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 terhadap capaian renstra Inspektorat Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4,302,293,596,- yang dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub. Kegiatan. Realisasi fisik dan keuangaan sebesar Rp. 4,152,688,743,- dengan capaian sebesar 96,52%.

Berikut adalah tabel realisasi fisik dan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024:

Tabel 2.1

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	VOL	Pagu Dana	Bobot %	Realisasi Keuangan			SISA PAGU ANGGARAN
					Terbayar		TTB	
					Rp	%	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4/Tot4x100)*	*6*	*7 (6/4x100)*	*8 (7x5)/100*	*12 (4-6)*
BELANJA LANGSUNG		-	**4,302,293,596**	**100.00**	**4,152,688,743**	**96.52**	**96.52**	**149,604,853**
URUSAN			***3,103,180,700***	**72.13**	***2,954,419,512***	**95.21**	**68.67**	**148,761,188**
4.02 . 4.02.01.01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**3,103,180,700**	**100.00**	**2,954,419,512**	**95.21**	**95.21**	**148,761,188**
4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 01	***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***		***16,435,035***	**0.53**	***16,392,500***	**99.74**	**0.53**	***42,535***
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		7,314,535	44.51	7,272,000	99.42	44.25	42,535
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2,820,500	38.56	2,820,500	100.00	38.56	-
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,800,000	170.18	4,800,000	100.00	170.18	-
5 . 2 . 1 . 04 . 71	Belanja Lembur		1,500,000	31.25	1,500,000	100.00	31.25	-
4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 02	***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD***		***11,517,140.00***	**0.37**	***11,506,500***	**99.91**	**0.37**	***10,640***
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		3,509,640	30.47	3,499,000	99.70	30.38	10,640
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2,937,500	83.70	2,937,500	100.00	83.70	-
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		750,000	25.53	750,000	100.00	25.53	

5 . 2 . 1 . 04 . 71	Belanja Lembur		4,320,000	576.00	4,320,000	100.00	576.00	-
4.02.01.01 . 01 . 06	***Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD***		**12,489,820.00**	**0.40**	**12,476,500**	**99.89**	**0.40**	13,320
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		4,182,320	119.17	4,169,000	99.68	118.79	13,320
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2,937,500	100.00	2,937,500	100.00	100.00	-
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,320,000	576.00	4,320,000	100.00	576.00	-
5 . 2 . 1 . 04 . 71	Belanja Lembur		1,050,000	24.31	1,050,000	100.00	24.31	-
4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 02	***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD***		***61,579,600.00***	**1.98**	***61,572,500***	**99.99**	**1.98**	***7,100***
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1,667,100	2.71	1,660,000	99.57	2.70	7,100
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2,937,500	176.20	2,937,500	100.00	176.20	-
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		875,000	29.79	875,000	100.00	29.79	-
5 . 2 . 1 . 04 . 27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		52,500,000	6000.00	52,500,000	100.00	6000.00	-
5 . 2 . 1 . 04 . 71	Belanja Lembur		3,600,000	411.43	3,600,000	100.00	411.43	-
4.02.01.01 . 01 . 06	***Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD***		**11,953,971.00**	**0.39**	**11,934,500**	**99.84**	**0.38**	19,471
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		4,666,471	279.92	4,647,000	99.58	278.75	19,471
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2,937,500	100.00	2,937,500	100.00	100.00	-
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		750,000	85.71	750,000	100.00	85.71	-
5 . 2 . 1 . 04 . 71	Belanja Lembur		3,600,000	100.00	3,600,000	100.00	100.00	-

4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 06	***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***		**10,307,432.00**	**0.33**	**10,287,500**	**99.81**	**0.33**	**19,932**
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		2,749,932	93.61	2,730,000	99.28	92.94	19,932
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3,207,500	74.25	3,207,500	100.00	74.25	-
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		750,000	71.43	750,000	100.00	71.43	-
5 . 2 . 1 . 04 . 71	Belanja Lembur		3,600,000	342.86	3,600,000	100.00	342.86	-
4.02 . 4.02.01.01 . 02 . 01	***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***		**2,133,996,689.00**	**68.77**	**2,081,861,955.00**	**97.56**	**67.09**	**52,134,734.00**
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS		1,210,094,437	56.71	1,199,792,711	99.15	56.22	10,301,726
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		155,353,562	7.28	153,668,352	98.92	7.20	1,685,210
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		125,173,800	5.87	122,860,000	98.15	5.76	2,313,800
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		132,086,000	6.19	131,190,000	99.32	6.15	896,000
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		8,321,150	0.39	8,255,000	99.21	0.39	66,150
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS		77,411,911	3.63	76,837,620	99.26	3.60	574,291
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		7,756,563	0.36	7,648,703	98.61	0.36	107,860
5 . 1 . 1 . 08 . 01	Belanja Pembulatan Gaji PNS		19,199	0.00	18,953	98.72	0.00	246
5 . 1 . 1 . 13 . 01	Belanja Jaminan Kesehatan PNS		97,415,281	4.56	67,594,189	69.39	3.17	29,821,092
6 . 1 . 1 . 13 . 01	Belanja Jaminan Kesehatan Kerja PNS		2,495,386	1.61	2,470,663	99.01	1.59	24,723

7 . 1 . 1 . 13 . 01	Belanja Jaminan Kematian PNS		7,486,293	5.98	7,412,123	99.01	5.92	74,170
8 . 1 . 1 . 13 . 01	Tambahan Penghasilan ASN		277,955,593	210.44	277,955,593	100.00	210.44	-
9 . 1 . 1 . 13 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objdek		32,427,514	389.70	26,158,048	80.67	314.36	6,269,466
4.02 . 4.02.01.01 . 02 . 05	***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***		***11,125,611.00***	***0.36***	***11,119,500.00***	**99.95**	**0.36**	***6,111***
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		3,088,111	27.76	3,082,000	99.80	27.70	6,111
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2,937,500	26.40	2,937,500	100.00	26.40	-
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,500,000	13.48	1,500,000	100.00	13.48	-
5 . 2 . 1 . 04 . 71	Belanja Lembur		3,600,000	32.36	3,600,000	100.00	32.36	-
4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 12	***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD***		**11,185,633.00**	**100.00**	**11,181,000.00**	**99.96**	**99.96**	**4,633**
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		3,148,133	**28.14**	3,143,500	99.85	28.10	4,633
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2,937,500	**26.26**	2,937,500	100.00	26.26	-
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,500,000	**13.41**	1,500,000	100.00	13.41	-
5 . 2 . 1 . 04 . 71	Belanja Lembur		3,600,000	**32.18**	3,600,000	100.00	32.18	-
4.02 . 4.02.01.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***		***134,880,800.00***	***175.55***	***110,399,665***	***81.85***	***143.69***	***24,481,135.00***
5 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Diklat Kepemimpinan		58,000,000.00	43.00	57,173,041.00	98.57	42.39	*826,959*

5 . 2 . 1 . 01 . 04	Belanja Perjalanan Dinas		76,880,800.00	132.55	53,226,624	69.23	91.77	23,654,176
4.02 . 4.02.01.01 . 06 . 01	***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***		***1,262,287***	***100***	***1,260,000***	**99.82**	**99.82**	**2,287**
5 . 2 . 1 . 01 . 31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik		1,262,287	100.00	1,260,000	99.82	99.82	2,287
4.02 . 4.02.01.01 . 01 . 28	***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***		***120,000,000***	***100***	***65,714,557***	**54.76**	**54.76**	***54,285,443***
5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		120,000,000	100.00	65,714,557	54.76	54.76	*54,285,443*
4.02 . 4.02.01.01 . 06 . 03	***Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***		***2,341,500***	***100***	***1,916,000***	**81.83**	**81.83**	***425,500***
5 . 2 . 1 . 01 . 30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		2,341,500	100.00	1,916,000	81.83	81.83	*425,500*
4.02 . 4.02.01.01 . 06 . 05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		***4,299,000***	***100***	***4,290,000***	**99.79**	**99.79**	**9,000**
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4,299,000.00	100.00	4,290,000.00	99.79	99.79	9,000
4.02 . 4.02.01.01 . 06 . 09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**		***255,887,800***	**8.25**	***255,797,204***	**99.96**	**8.24**	**90,596**
5 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		247,727,800.00	96.81	247,637,204.00	99.96	96.78	90,596
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		8,160,000	3.29	8,160,000	100.00	3.29	-
4.02 . 4.02.01.01 . 07 . 06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		**22,091,000**	270.72	**22,000,000**	99.59	269.61	
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Personal Computer		15,000,000	67.90	15,000,000	100.00	67.90	-
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer)		7,091,000	47.27	7,000,000	98.72	46.67	91,000
4.02 . 4.02.01.01 . 08 . 01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		**1,500,000**		**1,500,000**	100.00	0.00	

6 . 1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		1,500,000		1,500,000	100.00	0.00	
4.02 . 4.02.01.01 . 08 . 02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**		**40,617,132**	**1.31**	**36,843,431**	**90.71**	1.19	**3,773,701**
5 . 2 . 1 . 04 . 60	Belanja Tagihan Air		1,056,000	2.60	793,500	75.14	1.95	262,500
5 . 2 . 1 . 04 . 61	Belanja Tagihan Listrik		39,561,132	97.40	36,049,931	91.12	88.76	3,511,201
4.02 . 4.02.01.01 . 08 . 04	***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***		***181,200,000***	**5.84**	***171,000,000***	**94.37**	**5.51**	***10,200,000***
5 . 2 . 1 . 04 . 30	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		153,600,000.00	84.77	146,400,000.00	95.31	80.79	7,200,000
6 . 2 . 1 . 04 . 31	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		12,000,000.00		9,000,000.00	75.00	0.00	3,000,000
5 . 2 . 1 . 04 . 55	Belanja Jasa Tenaga Supir		15,600,000.00	10.16	15,600,000.00	100.00	10.16	-
4.02 . 4.02.01.01 . 09 . 01	***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan***		***26,261,250***	**0.85**	***24,961,200***	**95.05**	**0.80**	**1,300,050**
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		25,000,000	95.20	24,961,200	99.84	95.05	38,800
6 . 2 . 1 . 01 . 13	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		1,261,250	5.05	-	0.00	0.00	1,261,250
4.02 . 4.02.01.01 . 03 . 04	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		**11,249,000**	**0.36**	**9,405,000**	**83.61**	**0.30**	***1,844,000***
6 . 2 . 1 . 01 . 13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		10,500,000	93.34	8,656,000	82.44	76.95	*1,844,000*
7 . 2 . 1 . 04 . 67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		749,000	7.13	749,000	100.00	7.13	-
4.02 . 4.02.01.01 . 09 . 06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		21,000,000	**0.68**	21,000,000	**100.00**	0.68	-

5 . 2 . 1 . 19 . 21	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-KomputerUnit-Komputer Jaringan		2,000,000	9.52	2,000,000	100.00	9.52	-
6 . 2 . 1 . 19 . 05	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		14,000,000	700.00	14,000,000	100.00	700.00	-
7 . 2 . 1 . 19 . 06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software		5,000,000	35.71	5,000,000	100.00	35.71	-
PENGAWASAN			**1,199,112,896.00**	**27.87**	**1,198,269,231.00**	**99.93**	**27.85**	***843,665***
4.02 . 4.02.01.01 . 15	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**1,199,112,896**	**100.00**	**1,198,269,231**	**99.93**	**99.93**	**843,665**
4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 01	**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**		**60,000,000**		**60,000,000**			**-**
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		60,000,000		60,000,000			-
4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 17	**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**		**167,360,000**	**13.96**	**167,360,000**	**0.00**	**0.00**	**-**
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		167,360,000	100.00	167,360,000	100.00	100.00	-
4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 03	**Reviu Laporan Kinerja**		**226,240,000**	**18.87**	**226,240,000**	**100.00**	**18.87**	**-**
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		226,240,000	100.00	226,240,000	100.00	100.00	-
4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 04	**Reviu Laporan Keuangan**		**193,108,000**	**16.10**	**193,008,200**	**99.95**	**16.10**	**99,800**
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Biasa		42,388,000	21.95	42,313,900	99.83	21.91	74,100
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		150,720,000	78.05	150,694,300	99.98	78.04	25,700
4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 05	**Pengawasan Desa**		**59,360,000**	**4.95**	**59,360,000**	**100.00**	**4.95**	**-**
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		59,360,000	100.00	59,360,000	100.00	100.00	-

4.02 . 4.02.01.01 . 15 . 06	**Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**		**66,468,000**	**5.54**	**66,463,200**	**99.99**	**5.54**	**4,800**
5 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Perjalanan Biasa		36,388,000		36,383,200.00	99.99	0.00	4,800
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		30,080,000		30,080,000.00	100.00	0.00	-
4.02 . 4.02.01.01 . 16 . 01	**Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**		**64,000,000**	**5.34**	**64,000,000**	**100.00**	**5.34**	**-**
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		64,000,000	100.00	64,000,000	100.00	100.00	-
4.02 . 4.02.01.01 . 16 . 02	**Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**		**151,604,000**	**12.64**	**151,602,000**	**100.00**	**12.64**	**2,000**
5 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Perjalanan Biasa		7,284,000	4.80	7,282,000	99.97	4.80	2,000
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		144,320,000	95.20	144,320,000	100.00	95.20	-
4.02 . 4.02.01.01 . 17 . 02	**Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**		**74,831,666**	**6.24**	**74,104,000**	**99.03**	**6.18**	**727,666**
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1,367,666	1.83	1,349,000	98.64	1.80	18,666
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		534,000	0.71	530,000	99.25	0.71	4,000
5 . 2 . 1 . 04 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3,200,000	4.28	3,000,000.00	93.75	4.01	200,000
5 . 2 . 1 . 04 . 26	Jasa Narasumber,Moderator		2,500,000	3.34	2,500,000.00	100.00	3.34	-
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		2,000,000	2.67	1,625,000.00	81.25	2.17	375,000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		65,230,000		65,100,000.00			
4.02 . 4.02.01.01 . 18 . 01	**Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**		**136,141,230**	**11.35**	**136,131,831**	**99.99**	**11.35**	**9,399**

0 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		984,789	30.77	977,000	99.21	30.53	7,789
1 . 2 . 1 . 23 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		33,805,000	1352.20	33,805,000	100.00	1352.20	-
2 . 2 . 1 . 23 . 26	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,250,000	212.50	4,250,000	100.00	212.50	-
3 . 2 . 1 . 23 . 52	Jasa Narasumber,Moderator		8,900,000	13.64	8,900,000	100.00	13.64	-
4 . 2 . 1 . 23 . 52	Honor Tim		38,550,000	28.32	38,550,000	100.00	28.32	-
5 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		35,542,200	3609.12	35,540,590	100.00	3608.95	1,610
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,760,000	5.21	1,760,000	100.00	5.21	-
	wabe site		12,349,241	290.57	12,349,241	100.00	290.57	-
			4,302,293,596.00	**100**	**4,152,688,743.00**	**96.52**	**96.52**	**149,604,853**

2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi.

a. Kedudukan Inspektorat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**.** Bab IV Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota bagian Ketiga pasal 12 ayat (5) yang berbunyi inspektur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah.

Hal ini di kuatkan lagi dengan peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada bagian Bab V pasal 61 ayat 1 yang menyatakan inspektorat dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah

b. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah nomor 20 tahun 2024 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas inspektorat kabupaten Mamuju Tengah yang dijelaskan pada bab 5 pasal 61 mengenai tugas dan fungsi inspektorat kabupaten mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;

4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah;
6. pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak pidana Korupsi;
7. pengawasan pelaksanaan program reformasi biokrasi;
8. mengoordinasikan pelaksanaan dan monitoring tugas-tugas Pengawasan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
9. merumuskan hasil pengawasan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
10. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dalam menindaklanjuti perumusan hasil pengawasan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
11. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan inspektorat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan organisasi dan personil

Struktur organisasi inspektorat kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Inspektorat kabupaten Mamuju Tengah sejak tanggal 04 November tahun 2021 dipimpin oleh Inspektur atas nama Dr. SAKARIAK ,S.Ag., M.Pd., MM., CGCAE., CIPA., CGRS dalam melaksanakan tugas inspektur dibantu oleh sekretaris yang

membawahi 1 sub bagian yaitu sub bagian kepegawaian dan keuangan serta 4 inspektur pembantu wilayah selaku unsur pelaksana teknis yang masing-masing telah ditetapkan wilayah kerjanya berdasarkan peraturan daerah Mamuju Tengah.

Adapun struktur organisasi inspektorat kabupaten Mamuju Tengah sesuai Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat Inspektorat, Membawahi:
   a. Sub Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu Wilayah 1;
4. Insptektur Pembantu Wilayah 2;
5. Inspektur Pembantu Wilayah 3;
6. Inspekrtur Pambantu Investigasi.

Untuk kelompok jabatan fungsional yaitu terdiri atas pejabat fungsional auditor sebanyak 9 orang, P2UPD 4 orang, yang berasal dari inpassing yang dilakukan oleh BPKP adapun jumlah SDM pada inspektorat kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebanyak 52 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24
2	Tenaga Kontrak	28
	Jumlah	52

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Sesuai Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	31
2	Wanita	21
	Jumlah	52

Tabel 2.4
Jumlah Jabatan

	Jabatan	Jumlah
	Inspektur	: 1 Orang
	Sekretaris	: 1 Orang
	Inspektur pembantu	: 4 Orang
	Kepala sub.bagian	: 1 Orang
	Jabatan fungsional auditor	: 9 Orang
	Jabatan fungsional P2UPD	: 34Orang
	Staf	: 4 Orang
	Jumlah	: 24 Orang

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 dengan realisasinya.

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 serta Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2024), Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah berencana melaksanakan program dan kegiatan dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 4.452.431.267,** terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 4.421.340.267** dan Belanja Modal **Rp. 31.091.000**

Pada akhir tahun 2024 dicapai dengan realisasi anggaran 96,52%. Untuk mencapai realisasi di atas, Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pencairan anggaran yang telah berjalan diharapkan dapat tercapa

Tabel 2.5
LAPORAN REALISASI KEUANGAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASI SETELAH PERUBAHAN
	INSPEKTORAT	**4,452,431,267**	**4,302,293,596**	**4,152,688,743**	96.52 %
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**4,452,431,267**	**4,302,293,596**	**4,152,688,743**	96.52 %
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3,398,543,601**	**3,103,180,700**	**2,954,419,512**	95.21 %
1:01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**124,282,998**	**124,282,998**	**124,170,000**	99.91 %
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,435,035	16,435,035	16,392,500	99.74 %
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11,517,140	11,517,140	11,506,500	99.91 %
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,489,820	12,489,820	12,476,500	99.89 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASI SETELAH PERUBAHAN
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	61,579,600	61,579,600	61,572,500	99.99 %
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11,953,971	11,953,971	11,934,500	99.84 %
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,307,432	10,307,432	10,287,500	99.81 %
1:02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,479,237,634**	**2,156,307,933**	**2,104,162,455**	97.58 %
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,456,926,390	2,133,996,689	2,081,861,955	97.56 %
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,125,611	11,125,611	11,119,500	99.95 %
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11,185,633	11,185,633	11,181,000	99.96 %
1:03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110,244,000	134,880,800	110,399,665	81.85 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASI SETELAH PERUBAHAN
0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110,244,000	134,880,800	110,399,665	81.85 %
1:04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383,790,587	383,790,587	328,977,761	85.72 %
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,262,287	1,262,287	1,260,000	99.82 %
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,000,000	120,000,000	65,714,557	54.76 %
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,341,500	2,341,500	1,916,000	81.83 %
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,299,000	4,299,000	4,290,000	99.79 %
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255,887,800	255,887,800	255,797,204	99.96 %
1:05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,091,000	22,091,000	22,000,000	99.59 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASI SETELAH PERUBAHAN
0005	Pengadaan Mebel	9,000,000	-	-	-
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,091,000	22,091,000	22,000,000	99.59 %
1:06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211,387,132	223,317,132	209,343,431	93.74 %
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,570,000	1,500,000	1,500,000	100 %
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,617,132	40,617,132	36,843,431	90.71 %
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169,200,000	181,200,000	171,000,000	94.37 %
1:07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,510,250	58,510,250	55,366,200	94.63 %
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,261,250	26,261,250	24,961,200	95.05 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASI SETELAH PERUBAHAN
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11,249,000	11,249,000	9,405,000	83.61 %
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	959,256,000	988,140,000	988,033,400	99.99 %
2:01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	820,216,000	772,536,000	772,431,400	99.99 %
0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	110,880,000	60,000,000	60,000,000	100 %
0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	169,600,000	167,360,000	167,360,000	100 %
0003	Reviu Laporan Kinerja	197,760,000	226,240,000	226,240,000	100 %
0004	Reviu Laporan Keuangan	216,148,000	193,108,000	193,008,200	99.95 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASI SETELAH PERUBAHAN
0005	Pengawasan Desa	59,360,000	59,360,000	59,360,000	100 %
0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	66,468,000	66,468,000	66,463,200	99.99 %
2:02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	139,040,000	215,604,000	215,602,000	100 %
0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	71,360,000	64,000,000	64,000,000	100 %
0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	67,680,000	151,604,000	151,602,000	100 %
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	94,631,666	210,972,896	210,235,831	99.65 %
3:01	Pendampingan dan Asistensi	94,631,666	210,972,896	210,235,831	99.65 %
0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan	94,631,666	74,831,666	74,104,000	99.03 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASI SETELAH PERUBAHAN
	Pemerintahan Daerah				
0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	136,141,230	136,131,831	99.99 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah

Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perang Daerah.kat

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Kajian terhadap Kinerja Pengawasan	• Pemeriksaan Komprehensif dan khusus • Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	• PP No. 60 Tahun 2008 • Permenpan No.04/MPAN/03/2008 • Permenpan No.05/MPAN/03/2008 • Permenpan No. 059 Tahun 2009 • Permenpan No. 019 Tahun 2009	Semakin banyaknya jumlah obyek pemeriksaan yaitu sebanyak 34 PERANGKAT DAERAH, obrik ditambah 54 desa, obrik ditambah sekolah SD dan SMP dan Puskesmas maupun sub obrik	Adanya kebijakan perubahan organisasi PERANGKAT DAERAH sehingga jumlah obrik semakin meningkat	• Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Pemeriksa, untuk mengawasai seluruh obrik yang ada • Aparatur Pengawas (APIP) belum sepenuhnya memiliki kompetensi • Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan sangat minim • Jumlah Auditor / P2UPD masih sangat kurang

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Inspektorat sebagai Internal Kontrol yang berfungsi menjadi Quality Assurance	Dalam proses pelaksanaan	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit	Pedoman Pemeriksaan/Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler (POPREG)	Prosedur/Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian	Penyempurnaan POPREG yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
Kuantitas Auditor dan P2UPD	Sudah ada 9 orang Auditor dan 3 orang P2UPD	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah seharusnya sudah memiliki jumlah Auditor lebih besar dari yang ada.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Proses rekuitmen dan Pembentukan Auditor dan P2UPD	Peningkatan Kapabilitas SDM Pengawas
Level Kapabilitas APIP	APIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah berada pada Level 3 dengan catatan	Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas APIP Daerah sudah pada Level 3 penuh	Pengembangan SDM Pengawasan dan Profesional Auditor	Penguatan Kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektivitas	Peningkatan Kapabilitas APIP menuju ke Level 3 penuh
Level Maturitas SPIP	Level “terdefinisi dengan nilai 3,000	Hasil evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP			
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan	LHP yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan	Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh Auditor berbedabeda	Belum pernah dilaksanakannya Bimtek Penulisan LHP yang efektif	Peningkatan kualitas laporan dan format laporan belum seragam
Efektifitas Dampak Hasil Pemeriksaan	Masih belum efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan	Kualitas temuan kurang memadai	Sistem Pengendalian internal PERANGKAT DAERAH masih lemah	Hasil Temuan Pemeriksaan yang berulang
Kajian terhadap penyelesaian tindak	Daftar obrik yang sudah selesai tindaklanjutnya,	Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2006	• Fungsi Tim	*Auditee* yang menindaklanjuti	Ada beberapa obrik yang kurang kooperatif

lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK	dalam proses tindak lanjut ataupun belum selesai tindak lanjutnya		tindak lanjut • Koordinasi tindak lanjut • Sarana dan Prasarana penunjang olah data tindak lanjut		
Opini BPK	Opini WTP	Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK-RI	Pendampingan dan asistensi secara berkala	Komitmen seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Mamuju Tengah	Pengelolaan kas, barang inventaris dan Barang persediaan pada satuan kerja belum tertib

Dalam Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. PD masih tidak fokus terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan, kurang Kooperatif dalam Memberikan data yg di minta Inspektorat;
2. Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya;
3. Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
4. Peningkatan kapabilitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya controllable bagi Inspektorat;
5. Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
6. Teknisaudit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif masih lemah;
7. Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;
8. Norma, standar dan prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
9. Peraturan Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP tentang tata cara pemeriksaan;
10. Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
11. Pemeriksaan Belum terlalu menyentuh akar permasalahan;
12. Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.
13. Masih Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
14. Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.
15. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKP
16. Tingginya dinamika masyarakat yang menuntut adanya good

governance dan clean government.

17. Tingginya temuan hasil pemeriksaan terutama yang menyangkut kerugian daerah;
18. Arah kebijakan pengawasan yang ditujukan untuk percepatan reformasi birokrasi

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1) Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Bupati Mamuju Tengah;
3) Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
4) Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
5) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
6) Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1) Masih Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
2) Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.

3) Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKP

Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Mamuju Tengah ini.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2024, maka Renja Tahun 2025 terdapat banyak perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik dari jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan maupun besaran anggaran yang menjadi kebutuhan Inspektorat Mamuju Tengah.

Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2.7

Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Presentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**3,112,002,404**	**APBD**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah temuan Hasil pengawasan internal**	**Mamuju Tengah**	**125 Laporan**	**2,815,002,404**	**APBD**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporkan hasil pemeriksaan kinerja yang diterbitkan	Mamuju Tengah	15 LHP	261,182,250	APBD
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik yang dilaporkan hasil pemeriksaan keuangannya	Mamuju Tengah	48 LHP	1,360,429,324	APBD
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu kinerja	Mamuju Tengah	18 LHR	347,565,330	APBD
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu keuangan	Mamuju Tengah	10 LHR	216,148,000	APBD
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa yang diterbitkan	Mamuju Tengah	21 LHP	130,000,000	APBD

6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Temuan APIP dan BPK Yang Telah Ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	25 Dokumen/Laporan	245,000,000	APBD
6	01	02	2.01	08	Kerja sama pengawasan Internal	Jumlah instansi Kerja sama pengawasan Internal yang terlaksana	Mamuju Tengah	2 Instansi	254,677,500	APBD
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**penurunan jumlah pengaduan stakeholder**	**Mamuju Tengah**	**6 Kegiatan / Kasus**	**297,000,000**	**APBD**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelesaian kerugian negara yang ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	3 Kegiatan / Kasus	152,000,000	APBD
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah aduan dan *current issue* yang ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	10 Kegiatan/ Kasus	145,000,000	APBD
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Kebijakan yang dirumuskan pelaksanaannya, pendampingan dan asistensi**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**756,939,489**	**APBD**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang ditetapkan**	**Mamuju Tengah**	**6 Kegiatan**	**305,890,876**	**APBD**

6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang di laksanakan	Mamuju Tengah	3 kegiatan	71,746,287	APBD
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Dilaksanan	Mamuju Tengah	3 Kegiatan	234,144,590	APBD
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah OPD dan Desa yang didampingi dan di asistensi**	**Mamuju Tengah**	**7 Kali Pendampingan**	**451,048,612**	**APBD**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah urusan yang dilakukan pendampingan dan asistensi atas proses perencanaan dan penggaran	Mamuju Tengah	3 Kali Pendampingan	128,302,762	APBD
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang terlaksana	Mamuju Tengah	1 Kali Pendampingan	127,338,750	APBD
6	01	03	2.02	03	\Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Rapat koordinasi serta pengawasan yang dilaksanakan terkait MCP KPK	Mamuju Tengah	1 Kali Pendampingan	112,289,625	APBD
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Yang Terlaksana	Mamuju Tengah	2 Kali Pendampingan	83,117,475	APBD

6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**3,971,867,085**	**APBD**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**163,250,000**	**APBD**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	2 Dokumen	37,000,000	APBD
6	01	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	25,000,000	APBD
6	01	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	29,000,000	APBD
6	01	03	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	29,700,000	APBD
6	01	03	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	22,000,000	APBD
6	01	03	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	20,550,000	APBD

6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**2,505,023,498**	**APBD**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Mamuju Tengah	24 orang	2,456,926,390	APBD
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	23,550,000	APBD
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Mamuju Tengah	4 Dokumen	24,547,108	APBD
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai Perangkat daerah yang dilayani**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**531,807,038**	**APBD**
6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai PD berdisiplin baik	Mamuju Tengah	24 Orang	132,300,000	APBD
6	01	03	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Mamuju Tengah	24 Pasang	64,508,653	APBD
6	01	03	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Fungsi	Mamuju Tengah	24 Orang	334,998,385	APBD
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**424,376,299**	**APBD**
6	01	03	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Mamuju Tengah	15 Buah	5,440,838	APBD
6	01	03	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	1 Unit	120,000,000	APBD

6	01	03	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga PD yang disediakan	Mamuju Tengah	14 Buah	6,088,866	APBD
6	01	03	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Mamuju Tengah	36025 Lembar	42,846,595	APBD
6	01	03	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	Mamuju Tengah	35 Kali	250,000,000	APBD
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**72,000,000**	**APBD**
6	01	03	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	Mamuju Tengah	-	-	APBD
6	01	03	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Mamuju Tengah		-	APBD
6	01	03	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Mamuju Tengah	3 Unit	30,000,000	APBD
6	01	03	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	6 Unit	42,000,000	APBD
6	**01**	**03**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**222,500,000**	**APBD**
6	01	03	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Mamuju Tengah	2 paket	6,000,000	APBD
6	01	03	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Mamuju Tengah	2 Paket	47,300,000	APBD

6	01	03	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	3 Paket	169,200,000	APBD
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**52,910,250**	**APBD**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mamuju Tengah	1 Unit	26,261,250	APBD
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Mamuju Tengah	11 Unit	11,249,000	APBD
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Mamuju Tengah	22 Unit	15,400,000	APBD

Dari tabel di atas dapat disimpulkan hasil perbandingan antara RKPD Kabupaten Mamuju Tengah dan hasi analisis kebutuhan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada RKPD tahun 2025 berbeda dengan Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025;
2. Seluruh target capaian indikator kinerja yang ada RKPD tahun 2025 berbeda dengan Seluruh target capaian indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026;
3. Pagu indikatif setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang ada RKPD tahun 2025 sama untuk kebutuhan dana setiap program/kegiatan/sub.kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut maka rumusan pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi dan penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029 adalah:

“MAMUJU TENGAH DAERAH AGROPOLITAN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

Kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi ini adalah Mamuju tengah daerah agropolitan maju, sejahtera, dan berkelanjutan Keempat kata kunci ini saling terkait satu sama lain dalam menggambarkan kondisi masa depan yang hendak dicapai bersama oleh seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah. Artikulasi atau penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut teruraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Penjelasan Visi

No	Visi	Pokok visi	Penjelasan pokok visi
1.	“ MAMUJU TENGAH DAERAH AGROPOLITAN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN ”	Daerah Agropolitan	kondisi penciri Mamuju Tengah dari perspektif kewilayahan. Pada tahun 2029, Tobadak sebagai Kota Terpadu Mandiri Agropolitan sudah semakin menunjukkan eksistensinya sebagai perkotaan berbasis ekosistem pertanian yang memiliki kecukupan infrastruktur untuk ativitas ekonomi, sosial, dan budaya secara terpadu.
2.		Maju	kondisi manusia dan masyarakat Mamuju Tengah pada tahun 2029 yang sehat dan cerdas serta menguasai iptekin sehingga mampu berperan sebagai aktor pembangunan yang unggul. Maju juga merupakan gambaran tentang kondisi terpenuhinya infrastruktur dasar berupa jalan yang semakin berkualitas dan fasilitas penanganan limbah rumah tangga serta sarana-prasarana penanganan sampah sehingga Kota Terpadu Mandiri Agropolitan dan pusat-pusat agribisnis di perdesaan menjelmakan kondisi bersih dan indah
3.		Sejahtera	kondisi perekonomian daerah yang mampu menjamin pendapatan masyarakat yang tinggi, merata, dan terlindungi dari kerentanan sosial-ekonomi. Sejahtera juga bermakna terjaminnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan daerah dalam suasana interaksi antar ummat beragama yang rukun serta interaksi antar kebudayaan yang saling mengapresiasi, yang di dalamnya terbuka ruang partisipasi bagi seluruh lapisan umur dan relasi gender.
4.		Berkelanjutan	kondisi alam dan lingkungan Mamuju Tengah yang lestari dan didalam perkembangannya terjalin keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Berkelanjutan juga bermakna terwujudnya tata kelola yang integratif dan adaptif serta menjamin kesinambungan pembangunan dari tahun ke tahun dan kesinambungan pembangunan dengan tahapan berikutnya.

3.1.2. Misi

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Keseluruhan rumusan misi ini terkait dengan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 perubahan yang didorong tidak cukup dengan cara reformasi, melainkan dengan cara transformasi. Dengan transformasi itulah bangsa kita dapat mendorong gerak perubahan yang cepat dan menyeluruh. Misi transformasi juga menjadi substansi dalam rancangan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045, dimana periode 2025-2029 merupakan tahap perkuatan fondasi transformasi. Berdasarkan hal itu maka misi pembangunan yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:

(1) Memperkuat fondasi transformasi sosial

Misi ini bertujuan pada terwujudnya manusia dan masyarakat Mamuju Tengah yang sehat dan panjang umur, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dari kemiskinan dan kerentanan. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial adaptif untuk kelompok rentan.

(2) Memperkuat fondasi transformasi ekonomi

Misi ini bertujuan pada terwujudnya perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi melalui penerapan iptekin dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya perekonomian yang dimiliki oleh Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif; pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; transformasi digital dalam mendukung aktivitas perekonomian; integrasi ekonomi daerah dengan superhub ekonomi di IKN; dan pengembangan perkotaan berbasis agropolitan dan perdesaan perdesaan berbasis agribisnis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(3) Memperkuat fondasi transformasi tata kelola

Misi ini bertujuan pada terwujudnya tata kelola berintegritas

dan adaptif sesuai aspirasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan di Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, pelayanan publik yang sesuai standar, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan akuntabilitas kinerja yang baik.

(4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro

Misi ini bertujuan pada terwujudnya kondisi daerah yang aman untuk semua dan tersedianya kebutuhan pokok masyarakat secara terjangkau. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, mewujudkan kondisi sosial politik dan demokrasi substansial, dan menjaga stabilitas ekonomi makro daerah terutama pengendalian inflasi dan ketersediaan barang penting dan pokok bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

(5) Memelihara ketahanan sosia budaya dan ekologi

Misi ini bertujuan pada terwujudnya harmoni dan kohesi sosial dalam bingkai kearifan lokal *La'la Tassisara* serta ketahanan ekologi dalam menghadapi berbagai kerentanan akibat bencana dan perubahan iklim. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat, kebudayaan yang maju dan saling mengapresiasi, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan perlindungan anak, masyarakat inklusif di tengah heterogenitas sosial, lingkungan hidup berkualitas, ketahanan air, kemandirian pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

(6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata

Misi ini bertujuan pada terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah. Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan yang seimbang antar kecamatan, antara wilayah perkebunan dengan wilayah pesisir, antara pedalaman dengan pusat perkotaan, dan antara sentra agropolitan dengan sentra agribisnis.

(7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas

Misi ini bertujuan memenuhi kebutuhan infrastruktur serta sarana prasarana yang berkualitas. Misi ini mencakup upaya umum dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah terutama jalan dan sarana prasarana pelayanan dasar terutama untuk pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana pusat pertumbuhan terutama pengembangan agropolitan, agroindustry, agribisnis, dan agrikultur.

(8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah

Misi ini bertujuan pada terwujudnya kesinambungan antar tahun dan antar tahapan pembangunan di Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, kapasitas fiskal, dan daya saing investasi daerah.

Agar pelaksanaan Program Kegiatan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perlu ada Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Adapun Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

1. **Visi**

   "Terwujudnya Manajemen Pemerintahan yang baik melalui Pengawasan yang Profesional".

2. **Misi**

   Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai visi adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dan Pembinaan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah**

      Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan diharapakan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi unit kerja khususnya dan bagi pemerintah Daerah pada umumnya dalam upaya melakukan perubahan-perubahan menuju kearah manajemen yang lebih baik, sehingga pengawasan yang dilakukan harus mempunyai kualitas yang dapat diandalkan serta dapat berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk itu pengawasan harus bersifat konstruktif dan dinamis.

   b. **Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Aparatur Pengawasan**

      Dalam pelaksanaan pengawasan harus menggunakan metode pemeriksaan yang baik sehingga temuan yang didapat juga berkualitas. Hal tersebut dapat tercapai apabila Inspektorat didukung oleh tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas, sehingga senantiasa diperlukan pengiriman Diklat dan Pelatihan dalam rangla meningkatkan profesionalisme dan kemandirian aparatur pengawas

   c. **Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan**.

Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan, kantor yang memadai dapat menciptakan kondisi kerja yang kondusi, yangberdampak positif terhadap produktifitas pegawai.

Agar pelaksanaan program kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang dituangkan dalam Visi dan Misi PERANGKAT DAERAH perlu diambil langkah - langkah strategis sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Negara dan Daerah secara ekonomis, efesien, efektif, transparan dan akuntabilitas;
b. Meningkatkan Manejemen Pemerintahan yang baik;
c. Meningkatkan sinergi Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
d. Meningkatkan mutu SDM aparat Inspektorat sesuai dengan standar audit
e. Meningkatkan dan memberdayakan sarana dan prasarana dalam mendukung hasil Pengawasan yang efektif;
f. Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Insektorat Kabupaten Mamuju Tengah, maka arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan:

1. Meningkatkan Pengelolaan anggaran Negara/secara ekonomis, efesien, efektif, transparan, dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan sinerji Pengawasan dengan Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);

4. Meningkatkan mutu SDM aparat pengawas sesuai standar audisi;
5. Meningkatkan dan memberdayakan sarana dan prasarana dalam mendukung hasil pengawasan yang efektif;
6. Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Sasaran

1. Terwujudnya pengelolaan Anggaran Negara dan Daerah yang ekonomis, efesien, transparan, dan akuntabilitas;
2. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik;
3. Tewujudnya pelayanan dan penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pengawas interen pemerintah (APIP) secara efektif sesuai rekomendasi
4. Terwujudnya peningkatan kompetisi aparat Inspektorat sesuai standar audit;
5. Terwujudnya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara ekonomis, efesien, dan efektif;
6. Terselenggaranya sistem dan metode kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

c. Prioritas Rencana Kerja

1. Pemeriksaan PKPT mencakup PERANGKAT DAERAH dan PERANGKAT DAERAH Kecamatan.
2. Review atas laporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah.
3. Pemeriksaan kepala desa yang berakhir masa jabatanya.
4. Pemeriksaan ADD dan Dana Desa.
5. Pemeriksaan Puskesmas.
6. Pemeriksaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Mamuju Tengah
7. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat.
8. Pemutahiran data hasil temuan internal dan eksternal.

Tabel 3.4

Tujuan dan Sasaran serta indikator tujuan dan sasaran

Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6.01.0.00.0.00.01.0000 – INSPEKTORAT											
- Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan - Meningkatnya kualitas produk hukum dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
		Meningkatnya Efektifitas Pengawasan yang Efektif Berbasis Resiko	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
		Efektifitas Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
			Manajemen Resiko Indeks (MRI) (Level)	3	3	3	3	3	3	3	
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	3	3	3	3	3	3	

			(Level)								
		Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Rekomendasi Hatsil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	0	65	68	70	73	75	78	
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	70	75	78	80	83	85	88	
			Persentasea Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana korupsi (%)	0	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Integritas SPI KPK (%)	0	80	82	85	88	90	95	
			nilai MCP KPK (poin)	60	60	65	68	73	77	80	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Inspektorat	Nilai SAKIP (Nilai)	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
			Nilai IPKD MCPPenguatan APIP (%)	0	64	68	72	76	80	84	

			Nilai Indeks PPG (Program Pengendalian Gratifikasi) (%)	0	60	65	70	75	80	85	
			Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Inspektorat (%)	0	0	0	0	0	0	0	

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Implementasi yang hams dilakukan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 - 2029 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Mamuju Tengah terpilih periode 2025- 2029.

Sesuai visi, misi, tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai peran dalam mewujudkan visi diatas melalui sasaran ke 3 yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.**

Misi Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Prinsip-prinsip Pemerintahan yang bersih meliputi wawasan ke depan, keterbukaan dan tranparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisien dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;

4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur Pengawas adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan yang merupakan capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan jumlah program yang direncanakan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun anggaran 2025 secara keseluruhan adalah 3 program dengan total 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta

kebutuhan dana / pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2025 terdiri dari Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan adalah sebagai berikut:

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Presentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**3,112,002,404**	**APBD**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah temuan Hasil pengawasan internal**	**Mamuju Tengah**	**125 Laporan**	**2,815,002,404**	**APBD**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporkan hasil pemeriksaan kinerja yang diterbitkan	Mamuju Tengah	15 LHP	261,182,250	APBD
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik yang dilaporkan hasil pemeriksaan keuangannya	Mamuju Tengah	48 LHP	1,360,429,324	APBD
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu kinerja	Mamuju Tengah	18 LHR	347,565,330	APBD
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu keuangan	Mamuju Tengah	10 LHR	216,148,000	APBD

6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa yang diterbitkan	Mamuju Tengah	21 LHP	130,000,000	APBD
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Temuan APIP dan BPK Yang Telah Ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	25 Dokumen/Laporan	245,000,000	APBD
6	01	02	2.01	08	Kerja sama pengawasan Internal	Jumlah instansi Kerja sama pengawasan Internal yang terlaksana	Mamuju Tengah	2 Instansi	254,677,500	APBD
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**penurunan jumlah pengaduan stakeholder**	**Mamuju Tengah**	**6 Kegiatan / Kasus**	**297,000,000**	**APBD**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelesaian kerugian negara yang ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	3 Kegiatan / Kasus	152,000,000	APBD
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah aduan dan *current issue* yang ditindaklanjuti	Mamuju Tengah	10 Kegiatan/ Kasus	145,000,000	APBD
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Kebijakan yang dirumuskan pelaksanaannya, pendampingan dan asistensi**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**756,939,489**	**APBD**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang**	**Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang ditetapkan**	**Mamuju Tengah**	**6 Kegiatan**	**305,890,876**	**APBD**

					Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang di laksanakan	Mamuju Tengah	3 kegiatan	71,746,287	APBD
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Dilaksanan	Mamuju Tengah	3 Kegiatan	234,144,590	APBD
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah OPD dan Desa yang didampingi dan di asistensi**	**Mamuju Tengah**	**7 Kali Pendampingan**	**451,048,612**	**APBD**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah urusan yang dilakukan pendampingan dan asistensi atas proses perencanaan dan penggaran	Mamuju Tengah	3 Kali Pendampingan	128,302,762	APBD
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang terlaksana	Mamuju Tengah	1 Kali Pendampingan	127,338,750	APBD
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Rapat koordinasi serta pengawasan yang dilaksanakan terkait MCP KPK	Mamuju Tengah	1 Kali Pendampingan	112,289,625	APBD

6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Yang Terlaksana	Mamuju Tengah	2 Kali Pendampingan	83,117,475	APBD
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**3,971,867,085**	**APBD**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**163,250,000**	**APBD**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju Tengah	2 Dokumen	37,000,000	APBD
6	01	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	25,000,000	APBD
6	01	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	29,000,000	APBD
6	01	03	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	29,700,000	APBD
6	01	03	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	22,000,000	APBD

6	01	03	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	20,550,000	APBD
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**2,505,023,498**	**APBD**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Mamuju Tengah	24 orang	2,456,926,390	APBD
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Mamuju Tengah	1 Dokumen	23,550,000	APBD
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Mamuju Tengah	4 Dokumen	24,547,108	APBD
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai Perangkat daerah yang dilayani**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**531,807,038**	**APBD**
6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai PD berdisiplin baik	Mamuju Tengah	24 Orang	132,300,000	APBD
6	01	03	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Mamuju Tengah	24 Pasang	64,508,653	APBD
6	01	03	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Fungsi	Mamuju Tengah	24 Orang	334,998,385	APBD
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**424,376,299**	**APBD**
6	01	03	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	Mamuju Tengah	15 Buah	5,440,838	APBD

6	01	03	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	1 Unit	120,000,000	APBD
6	01	03	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga PD yang disediakan	Mamuju Tengah	14 Buah	6,088,866	APBD
6	01	03	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Mamuju Tengah	36025 Lembar	42,846,595	APBD
6	01	03	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	Mamuju Tengah	35 Kali	250,000,000	APBD
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**72,000,000**	**APBD**
6	01	03	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	Mamuju Tengah	-	-	APBD
6	01	03	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Mamuju Tengah		-	APBD
6	01	03	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Mamuju Tengah	3 Unit	30,000,000	APBD
6	01	03	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Mamuju Tengah	6 Unit	42,000,000	APBD
6	**01**	**03**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**222,500,000**	**APBD**
6	01	03	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Mamuju Tengah	2 paket	6,000,000	APBD

6	01	03	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Mamuju Tengah	2 Paket	47,300,000	APBD
6	01	03	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Mamuju Tengah	3 Paket	169,200,000	APBD
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**Mamuju Tengah**	**100%**	**52,910,250**	**APBD**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mamuju Tengah	1 Unit	26,261,250	APBD
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Mamuju Tengah	11 Unit	11,249,000	APBD
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Mamuju Tengah	22 Unit	15,400,000	APBD

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu **"MAMUJU TENGAH DAERAH AGROPOLITAN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN".**

RENCANA KERJA RKPD

RENJA



KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Budong-budong Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam halpenyusunan Rencana Kerja Kecamatan Budong-budong Tahun Anggaran 2025 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana KerjaTahun Anggaran 2025 ini.

Babana, November 2025
Camat Budong-budong,

AWALUDDIN A,S.Sos.M.Tr.A.P
Pangkat : Pembina, IV/b
Nip. 19830223 200604 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG TAHUN 2025 ..... **8**

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong 10

2.2. Penetapan Indikator Kinerja 17

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor Kecamatan Budong-Budong 19

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 20

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG **37**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 38

3.3. Program dan Kegiatan 39

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **48**

BAB V : PENUTUP **53**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 9

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja 16

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025..... 19

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 36

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Kantor Kecamatan Budong-Budong. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju TengahTahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan kinerja perangkat daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian

kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahunke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sejalan dengan arahan RPJPD serta Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*" diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Mamuju Tengah secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
3. Mendorong daya saing perekonomian daerah;
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat;
6. Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2023;
14. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 25);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
19. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Budong-Budong;

2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kantor Kecamatan Budong-Budong yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya;
6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, meliputi :

I. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

2.1. Evaluasi Kerja Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2025;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Budong-Budong;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Sekretraiat Daerah;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal 2025 RKPD;

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. BAB III TUJUAN, DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2024

IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Budong-Budong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah di raih atau dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	MENINGKATNYA TATAKELOLA KINERJA DAN KEUANGAN PADA KECEMATAN BUDONG BUDONG			100 (%)	100	10,553,187,740	100	1,141,166,632	100	1,276,012,780																
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	9.093.849.205	0,00	979.660.632	100,00	1.151.463.448									0,00	766,356,990						
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera (%)	100	405.571.673	20,53	44.235.000	100	32.788.145	0%	3,970,000	0%	9,055,000	0%	10,730,000	0%	0	80,00 %	23,755,000	30,97%	67.990.000	**30,97%**	**16,76 %**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	182,173,571	4	30,525,000	2	27,458,453	1	3,000,000	0	7,700,000	1	9,750,000	0	0	2	20,450,000	6	50,975,000	**24,00%**	**27,98 %**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	49,821,525	1	4,530,000	1	1,633,651	1	970,000	0	0	0	0	0	0	1	970,000	2	5,500,000	**33,33%**	**11,04 %**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	28,693,529	2	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,960,000	**50,00%**	**13,80 %**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tidak Terlaksana

		7.01.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	40,000,000	0	0	1	1,419,216	0	0	1	635,000	0	0	0	0	1	635,000	1	635,000	**12,50%**	**1,59%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	104,883,048	4	5,220,000	4	2,276,825	0	0	2	720,000	1	980,000	0	0	3	1,700,000	7	6,920,000	**35,00%**	**6,60%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan kecamatan Budong-budongg (%)	100	5.736.482.407	16,47	732.810.733	100	956.329.380	0%	237,116,400	0%	199,680,543	0%	193,119,047	0%	0	40,00 %	629,915,990	22,94%	1.362.726.723	**22,94%**	**23,76 %**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	5,592,387,637	11	728,200,733	12	945,573,879	9	237,116,400	0	196,680,543	2	189,369,047	0	0	11	623,165,990	22	1,351,366,723	**25,88%**	**24,16 %**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	144,094,770	1	4,610,000	1	10,755,501	0	0	0	3,000,000	0	3,750,000	0	0	0	6,750,000	1	11,360,000	**20,00%**	**7,88%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100	646.030.000	2,78	36.862.899	100	10.015.093	0%	0	0%	1,040,000	0%	980,000	0%	0	0,00%	2,020,000	9,44%	38.882.899	**9,44%**	**6,02%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.01.2.05.00.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20	40,000,000	0	0	4	3,165,093	3	0	1	1,040,000	0	980,000	0	0	4	2,020,000	4	2,020,000	**20,00%**	**5,05%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.01.2.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	395,050,000	0	18,462,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,462,899	**0,00%**	**4,67%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tidak Terlaksana

		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24	210,980,000	2	18,400,000	2	6,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18,400,000	**8,33%**	**8,72%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	653.681.258	784,57	29.220.000	100	19.535.000	0%	2,020,000	0%	11,280,000	0%	2,850,000	0%	0	0,00%	16,150,000	792,65%	45.370.000	**792,65%**	**6,94%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	44	22,745,258	10	830,000	10	1,115,000	0	0	4	300,000	4	400,000	0	0	8	700,000	18	1,530,000	**40,91%**	**6,73%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	200,000,000	0	0	1	7,500,000	0	0	1	7,500,000	0	0	0	0	1	7,500,000	1	7,500,000	**11,11%**	**3,75%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	47,428,300	1	960,000	3	995,000	0	0	1	400,000	1	350,000	0	0	2	750,000	3	1,710,000	**17,65%**	**3,61%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	83	28,350,000	4,500	2,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	2,525,000	**5.421,69%**	**8,91%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tidak Terlaksana
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	112	24,540,000	24	1,800,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1,800,000	**21,43%**	**7,33%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tidak Terlaksana
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,200	63,687,700	145	13,965,000	180	5,705,000	20	900,000	90	1,440,000	30	2,100,000	0	0	140	4,440,000	285	18,405,000	**23,75%**	**28,90%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,101	266,930,000	90	9,140,000	181	4,220,000	7	1,120,000	25	1,640,000	10	0	0	0	42	2,760,000	132	11,900,000	**11,99%**	**4,46%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	877.264.600	10,00	72.000.000	100	72.000.000	0%	18,000,000	0%	12,000,000	0%	18,000,000	0%	0	0,00%	48,000,000	20,00%	120.000.000	**20,00%**	**13,68%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	877,264,600	1	72,000,000	2	72,000,000	1	18,000,000	0	12,000,000	0	18,000,000	0	0	1	48,000,000	2	120,000,000	**20,00%**	**13,68%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)	100	304.819.267	91,95	64.532.000	100	48.790.804	0%	14,535,000	0%	5,861,000	0%	16,680,000	0%	0	0,00%	37,076,000	176,35%	101.608.000	**176,35%**	**33,33%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	194,452,591	83	48,510,000	120	29,981,540	40	12,800,000	20	750,000	20	13,050,000	0	0	80	26,600,000	163	75,110,000	**339,58%**	**38,63%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	62,098,476	5	10,022,000	5	12,809,264	1	1,735,000	2	2,611,000	1	1,630,000	0	0	4	5,976,000	9	15,998,000	**100,00%**	**25,76%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai

		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	48,268,200	9	6,000,000	12	6,000,000	0	0	5	2,500,000	3	2,000,000	0	0	8	4,500,000	17	10,500,000	**89,47%**	**21,75%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Yang terpelihara (Unit)	2	470.000.000	0,00	0	2	12.005.026	0%	0	0%	1,150,000	0%	8,290,000	0%	0	0,00%	9,440,000	36,67%	9.440.000	**1.833,33%**	**2,01%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	270,000,000	0	0	4	6,660,000	1	0	0	1,150,000	3	2,950,000	0	0	4	4,100,000	4	4,100,000	**40,00%**	**1,52%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	200,000,000	0	0	1	5,345,026	0	0	0	0	1	5,340,000	0	0	1	5,340,000	1	5,340,000	**33,33%**	**2,67%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (%)	100,00	563.952.989	0,00	99.350.000	100,00	95.864.470									0,00	69,400,000					
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keg. pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	100	187.586.754	11,11	33.640.000	100	30.026.925	0%	30,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	30,000,000	22,22%	63.640.000	**22,22%**	**33,93%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9	187,586,754	1	33,640,000	1	30,026,925	1	30,000,000	0	0	0	0	0	0	1	30,000,000	2	63,640,000	**22,22%**	**33,93%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Dae ah yang ada di Kecamatan (%)	100	163.164.153	25,00	29.140.000	100	32.086.446	0%	2,250,000	0%	6,750,000	0%	8,550,000	0%	0	0,00%	17,550,000	41,67%	46.690.000	**41,67%**	**28,62%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24	163,164,153	6	29,140,000	6	32,086,446	1	2,250,000	2	6,750,000	1	8,550,000	0	0	4	17,550,000	10	46,690,000	**41,67%**	**28,62%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Persentase Keg. yang dilimpahkan ke kecamatan yang mencapai target (%)	100	213.202.082	11,11	36.570.000	100	33.751.099	0%	0	0%	15,850,000	0%	6,000,000	0%	0	0,00%	21,850,000	16,67%	58.420.000	**16,67%**	**27,40%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	

			kepada Camat																						
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18	213,202,082	2	36,570,000	1	33,751,099	0	0	1	15,850,000	0	6,000,000	0	0	1	21,850,000	3	58,420,000	**16,67%**	**27,40%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dikoordinasikan (%)	100,00	423.742.042	0,00	16.979.000	100,00	9.246.411									0,00	3,850,000						
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jmlah Keg. pemberdayaan yang dikoordinasikan (Kegiatan)	5	423.742.042	1.521,74	16.979.000	5	9.246.411	0%	0	0%	2,250,000	0%	1,600,000	0%	0	0,00%	3,850,000	1.560,87%	20.829.000	**31.217,39%**	**4,92%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23	423,742,042	350	16,979,000	11	9,246,411	0	0	6	2,250,000	3	1,600,000	0	0	9	3,850,000	359	20,829,000	**1.560,87%**	**4,92%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan (%)	100,00	214.958.851	0,00	12.997.000	100,00	5.189.307									0,00	2,250,000						
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan (%)	100	214.958.851	5,26	12.997.000	100	5.189.307	0%	0	0%	2,250,000	0%	0	0%	0	0,00%	2,250,000	47,37%	15.247.000	**47,37%**	**7,09%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	19	214,958,851	1	12,997,000	11	5,189,307	0	0	3	2,250,000	5	0	0	0	8	2,250,000	9	15,247,000	**47,37%**	**7,09%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi sara per 1.000 penduduk (%)	0,00	154.464.354	0,00	14.050.000	0,00	10.035.266									0,00	6,810,000						
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan (Kasus)	0	154.464.354	5,00	14.050.000	0	10.035.266	0%	0	0%	800,000	0%	6,010,000	0%	0	0,00%	6,810,000	10,00%	20.860.000	**0,00%**	**13,50%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	109,464,354	2	14,050,000	2	7,012,971	0	0	1	800,000	0	3,290,000	0	0	1	4,090,000	3	18,140,000	**15,00%**	**16,57%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai

		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20	45,000,000	0	0	1	3,022,295	0	0	0	0	1	2,720,000	0	0	1	2,720,000	1	2,720,000	**5,00%**	**6,04%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Tercapai
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyeleng garaan pemerinta han desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100,00	102.220.299	0,00	18.130.000	100,00	4.213.878									0,00	2,400,000						
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan (%)	100	102.220.299	38,46	18.130.000	100	4.213.878	0%	800,000	0%	320,000	0%	1,280,000	0%	0	0,00%	2,400,000	58,97%	20.530.000	**58,97%**	**20,08%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	39	102,220,299	15	18,130,000	11	4,213,878	2	800,000	4	320,000	2	1,280,000	0	0	8	2,400,000	23	20,530,000	**58,97%**	**20,08%**	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Belum Tercapai
										Total Target (RP)	**1,276,012,780**							**Total Realisasi (RP**		**851,066,990**					
																		Rata-rata capaian kinerja (%	**74,87**	**66,70**					
																		Predikat kinerja	**S**	**S**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisi kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan cara mengkaji indicator kinerja yang akan dicapai oleh instansi. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input),* keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Sesuai analisis yang telah dilakukan, Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memiliki sasaran sebagai berikut:

a. Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Budong-Budong;
b. Persentase penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Budong-Budong;
c. Jumlah kejadian konflik sosial skala Kecamatan Budong-Budong;
d. Persentase jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal;
e. Persentase jumlah Desa Berkembang;
f. Persentase jumlah Desa Maju;
g. Persentase jumlah Desa Mandiri.

Penetapan indikator kinerja tersebut diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan seperti pada tabel 2.2 berikut.

TABEL 2.2
TARGET PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
01. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	01	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Budong-Budong	60%	65%	70%	75%	80%
	02	Persentase penurunan kejadian kriminalitas di Kecamatan Budong-Budong	5%	10%	15%	20%	25%
	03	Jumlah kejadian konflik sosial skala Kecamatan Budong-Budong	5	5	4	4	3
02. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	04	Persentase jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	36%	27%	18%	9%	0%
	05	Persentase jumlah Desa Berkembang	64%	64%	55%	46%	37%
	06	Persentase jumlah Desa Maju	0%	9%	18%	27%	36%
	07	Persentase jumlah Desa Mandiri	0%	0%	9%	18%	27%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Budong-Budong

Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah yang akan dihadapi Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2025 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknogi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4) Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
6) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan komitmen;
7) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Budong-Budong adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang

signifikan bagi SKPD di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4. Riview terhadap Rancangan Awan RKPD Tahun Anggaran 2025.

Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam salah satu pelaksana peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi yang memfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan standarisasi ketatalaksanaan khususnya pelayanan publik berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Budong-Budong dilaksanakan penyesuaian terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

No	Rancangan Awal					Hasil Analis					Catatan Penting
	Pogram/Kegaiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pogram/Kegaiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI TEPAT WAKTU**	**100%**	**843.193.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI TEPAT WAKTU**	**100%**	**843.193.000,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	**Kec, Budong-budong**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan**	**100%**	56.000.000,00	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi KInerja Perangkat Daerah**	**Kec, Budong-budong**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggara**	**100%**	56.000.000,00	

				evaluasi tepat waktu							**n dan evaluasi tepat waktu**			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kec, Budong-budong	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dok	30.000.000,00			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen DPA-PD	6 Dok	30.000.000,00	
			Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	8.000.000,00			Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	8.000.000,00	
			Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	Kec, Budong-budong	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dok	8.000.000			Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	Kec, Budong-budong	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dok	8.000.000	

			Koordinasi Dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	10.000.000,00			Koordinasi Dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	10.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**539.093.000**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	**539.093.000**	
			Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Kec, Budong-budong	Jumlah Aparatur Sipil Negara	15 PNS	500.000.000			Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Kec, Budong-budong	Jumlah Aparatur Sipil Negara	15 PNS	500.000.000	
			Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	5 Dok	20.000.000			Koordinasi Dan Pelaksanaan	Kec, Budong-budong	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	5 Dok	20.000.000	

										Akuntansi SKPD					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	4 Lap	19.093.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	4 Lap	19.093.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Pegawai Kecamatan yang dilayani**	**100%**	**18.000.000**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Pegawai Kecamatan yang dilayani**	**100%**	**18.000.000**	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec, Budong-budong	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	20.000.000			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec, Budong-budong	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	20.000.000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	2 Org	10.000.000			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	2 Org	10.000.000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Kec, Budong-budong**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**80.000.000**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**80.000.000**	
			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kec, Budong-budong	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	6 Paket	2.000.000			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kec, Budong-budong	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	6 Paket	2.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec, Budong-budong	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	3 Paket	45.000.000			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec, Budong-budong	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	3 Paket	45.000.000	
			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Kec, Budong-budong	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	8 Paket	4.000.000			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Kec, Budong-budong	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	8 Paket	4.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah bahan exampler bacaan Undang – Undang	2 Dok	2.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kec, Budong-budong	Jumlah bahan exampler bacaan Undang - Undang	2 Dok	2.000.000	

										Perundang-Undangan					
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec, Budong-budong	Jumlah tamu yang difasilitas	150 Lap	12.000.000			Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec, Budong-budong	Jumlah tamu yang difasilitas	150 Lap	12.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi kecamatan	40 Laporan	15.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec, Budong-budong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi kecamatan	40 Laporan	15.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Kec, Budong-budong**	**Jumlah kendaraan yang disediakan**		**90.000.000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kec, Budong-budong**	**Jumlah kendaraan yang disediakan**		**90.000.000**	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	90.000.000			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	90.000.000	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec, Budong-budong**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**42.100.000**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec, Budong-budong**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**42.100.000**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec, Budong-budong	Jumlah persuratan yang disediakan	12 Lap	30.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec, Budong-budong	Jumlah persuratan yang disediakan	12 Lap	30.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec, Budong-budong	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	1 Lap	12.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec, Budong-budong	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	1 Lap	12.100.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec, Budong-budong**	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara**	**100%**	**18.000.0000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec, Budong-budong**	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara**	**100%**	**18.000.0000**	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kec, Budong-	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan*	1 Unit	18.000.000		Pemeliharaan / Rehabilitas	Kec, Budong-budong	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan*	1 Unit	18.000.000	

			Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	budon g	*Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi*					i Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi*			
	PROGRAM PENYELENGGRAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK			**KEC, BUD ONG-BUD ONG**	**PERSEPSI MASYARAKA TA TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**Baik**	**138.000.00 0**	**PROGRAM PENYELENGGRAAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK**			**KEC, BUDON G-BUDON G**	**PERSEPSI MASYARAKA TA TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**Baik**	**138.00 0.000**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Kec, Budo ng-budo ng**	**Persentase Keg. pemerintahan yang dikoordinasik an**	**100%**	**38.000.000**		**Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Kec, Budong - budong**	**Persentase Keg. pemerintahan yang dikoordinasik an**	**100%**	**38.000. 000**	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksnaan Kegiatann Pemerintahn dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tekait	Kec, Budo ng-budon g	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan*	11 Laporan	38.000.000			Koordinasi/ Sinergi Perencana an dan Pelaksnaa n Kegiatann Pemerinta	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat*	11 Laporan	38.000. 000	

					dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					hn dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tekait		*Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Dae ah yang ada di**	**100%**	**40.000.000**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Dae ah yang ada di**	**100%**	**40.000.000**	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	11 Dok	20.000.000			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	11 Dok	20.000.000	

			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	6 Lap	20.000.000			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	6 Lap	20.000.000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		**Kec, Budong-budong**	**Persentase Keg. yang dilimpahkan ke kecamatan yang Mencapai Target**	**100%**	**60.000.000**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**	**Kec, Budong-budong**	**Persentase Keg. yang dilimpahkan ke kecamatan yang Mencapai Target**	**100%**	**60.000.000**	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	5 Lap	30.000.000			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. yang terkait non perizinan yang dilaksanakan	5 Lap	30.000.000	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan*	2 Lap	30.000.000			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec, Budong-budong	Jumlah Keg. yang tidak berkaitan dengan	2 Lap	30.000.000	

					Lain yang Dilimpahkan					terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan		perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan ke kecamatan dan dijalankan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE KEG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**95%**	**15.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE KEG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**95%**	**15.000.000**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Kec, Budong-budong**	**Jmlah Keg. pemberdayaan yang dikoordinasikan**		**15.000.000**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Kec, Budong-budong**	**Jmlah Keg. pemberdayaan yang dikoordinasikan**		**15.000.000**	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	11 Lap	15.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kec, Budong-budong	Jumlah Kegiatan peningkatan efektifitas	11 Lap	15.000.000	

										Wilayah Kecamatan					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DILAKSANAKAN**	**100%**	**25.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DILAKSANAKAN**	**100%**	**25.000.000**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Kec, Budong-budong**	**Jumlah kasus yang diselesaikan**		**25.000.000**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Kec, Budong-budong**	**Jumlah kasus yang diselesaikan**		**15.000.000**	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	11 Lap	25.000.000			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	11 Lap	25.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK**		**57.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK**		**57.000.000**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec, Budong-budong	Jumlah kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan		57.000.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec, Budong-budong	57.000.000		57.000.000	
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec, Budong-budong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	22 Org	20.000.000			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec, Budong-budong	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	22 Org	20.000.000	
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec, Budong-budong	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*	11 Lap	25.000.000			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec, Budong-budong	Jumlah konflik sosial yang ditangani sesuai ketentuan UU	11 Lap	25.000.000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**95%**	**10.971.246**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**KEC, BUDONG-BUDONG**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**95%**	**10.971.246**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec, Budong-budong	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	10.971.246		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec, Budong-budong	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	10.971.246	
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kec, Budong-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan	11 Lap	10.971.246			Koordinasi Pelaksanaan	Kec, Budong-budong	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	11 Lap	10.971.246	

			di wilayah Kecamatan	budong	Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan					Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan			

Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah juga membuka usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui penelitian lapangan dan musrenbang, namun memiliki pagu yang sangat terbatas, sehingga plafon usulan dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang urgent dan prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis yang dapat diusulkan dalam Musrenbang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang berubah dari Rancangan awal Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Dalam tahun 2020-2025, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024, dan sekaligus

menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2026.

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung proses pembangunan daerah melalui dukungan Terhadap Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah 2021-2026, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi Bupati Terpilih.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kab. Mamuju Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara* dan mendukung misi keempat *"Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik".*

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong

3.2.1 Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi
b. Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Budong-Budong.

3.2.2 Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kantor Kecamatan Budong-Budong dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kantor Kecamatan Budong-Budong tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan;
b. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan;

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan

program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renja ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong pada periode 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana kerja merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review renja menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui

perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Kinerja Kantor Kecamatan Budong-Budong periode tahun 2024.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kantor Kecamatan Budong-Budong akan melaksanakan 6 program, 14 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI TEPAT WAKTU**	**Kec. Budong-budong**	**100%**	**843.193.000,00**	**DAU**		**100%**	**843.193.000**
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	56.000.000,00	**DAU**		**100%**	**54.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kec. Budong-Budong	6 Dok	30.000.000,00	DAU		6 dok	30.000.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Budong-Budong	2 Dok	8.000.000,00	DAU		2 dok	8.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan DPA -SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kec. Budong-Budong	2 Dok	8.000.000,00	DAU			8.000.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kec. Budong-Budong	5 Laporan	10.000.000,00			2 dok	8.000.000,00

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**539.093.000**	**DAU**		**100%**	**579.093.000**
		Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara	Kec. Budong-Budong	15 PNS	500.000.000	DAU		15 PNS	500.000.000
		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	Kec. Budong-Budong	5 Dok	20.000.000	DAU		5 Dok	20.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kec. Budong-Budong	4 Lap	19.093.000	DAU		1 Lap	59.093.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai Kecamatan yang dilayani**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**18.000.000**	**DAU**		**100%**	**18.000.000**
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kec. Budong-Budong	4 Dokumen	20.000.000			4 Dok	8.000.000
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Kec. Budong-Budong	2 Org	10.000.000	DAU		2 Org	10.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**80.000.000**	**DAU**		**100%**	**80.000.000**
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kec. Budong-Budong	6 Paket	2.000.000	DAU		6 Paket	2.000.000
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Budong-Budong	3 Paket	45.000.000			3 Paket	45.000.000
		Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kec. Budong-Budong	8 Paket	4.000.000	DAU		8 Paket	4.000.000

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan exampler bacaan Undang – Undang	Kec. Budong-Budong	2 Dok	2.000.000	DAU			2.000.000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitas	Kec. Budong-Budong	150 Lap	12.000.000	DAU		2 Dok	12.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi kecamatan	Kec. Budong-Budong	40 Laporan	15.000.000	DAU		150 Laporan	15.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah kendaraan yang disediakan**	**Kec. Budong-Budong**		**90.000.000**	**DAU**		**100%**	**90.000.000**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Kec. Budong-Budong	1 Unit	90.000.000	DAU		1 Unit	90.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**42.100.000**	**DAU**		**100%**	**42.100.000**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah persuratan yang disediakan	Kec. Budong-Budong	12 Lap	30.000.000	DAU		12 Lap	30.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Kec. Budong-Budong	1 Lap	12.100.000	DAU		2 Jenis	12.100.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	Kec. Budong-Budong	2 Dokumen	6.000.000	DAU			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**23.000.0000**	**DAU**		**100%**	**18.000.000**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Kec. Budong-Budong	4 Unit	5.000.000				

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya						
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara**	Kec. Budong-Budong	1 Unit	18.000.000			1 Unit	18.000.000
	PROGRAM PENYELENGGRAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK			**PERSEPSI MASYARAKATA TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**		**Baik**	**138.000.000**	**DAU**		**100%**	**138.000.000**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase Keg. pemerintahan yang dikoordinasikan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**38.000.000**	**DAU**		**100%**	**38.000.000**
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	Kec. Budong-Budong	1 Laporan	38.000.000	DAU		1 Kegiatan	38.000.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Dae ah yang ada di**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**40.000.000**	**DAU**		**100%**	**40.000.000**
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*		11 Dok	20.000.000	DAU		11 dok	20.000.000
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	Kec. Budong-Budong	6 Lap	20.000.000	DAU		6 Lap	20.000.000

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Keg. yang Dilimpahkan kepada Camat Yang mencapai Target**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**60.000.000**	**DAU**		**100%**	**60.000.000**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	Kec. Budong-Budong	5 Lap	30.000.000	DAU		6 Kegiatan	30.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kec. Budong-Budong	2 Lap	30.000.000	DAU		4 Kegiatan	30.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**16.979.301**	**DAU**		**100%**	**15.000.000**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang dikoordinasikan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**15.000.000**	**DAU**		**100%**	**15.000.000**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kec. Budong-Budong	11 Lap	15.000.000	DAU		11 Lap	15.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DISELESAIKAN**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**25.000.000**	**DAU**		**100%**	**25.000.00**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kasus yang diselesaiakan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**25.000.000**	**DAU**		**100%**	**25.000.000**
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	Kec. Budong-Budong	11 Lap	25.000.000	DAU		11 Lap	25.000.000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**57.000.000**	**DAU**		**100%**	**57.000.000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kasus Intoleransi Sara Yang diselesaikan ditingkat Kecamatan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**57.000.000**	**DAU**		**100%**	**57.000.000**
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	Kec. Budong-Budong	22 Org	20.000.000	DAU		22 Org	20.000.000
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*	Kec. Budong-Budong	11 Lap	25.000.000	DAU		11 Lap	25.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Yang dilaksanakan	Kec. Budong-Budong	1 Dokumen	12.000.000	DAU		1 Dok-	12.000.000-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PRERSENTASE PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**KEC. BUDONG-BUDONG**	**100%**	**10.971.246**	**DAU**		**100%**	**10.971.246**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**Kec. Budong-Budong**	**100%**	**10.971.246**	**DAU**		**100%**	**10.971.246**
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa	Kec. Budong-Budong	11 Lap	10.971.246	DAU		11 Desa	10.971.246

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN BUDONG-BUDONG

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, direncanakan akan dilaksanakan Program dan Kegiatan dengan total alokasi dana Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 982.232.287 (*sembilan ratus delapan Puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan Puluh Tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024	
			Target	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**100 %**	**890.160.955**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat waktu**	**100%**	**20.104.145**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	9.458.453
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.949.651
	Koordinasi Penyusunan DPA -SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	2.839.216
	Koordinasi Dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	3.856.825
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan**	**100%**	**723.160.887**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara	15 ASN	710.985.386
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	12.175.501
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentasi Pegawai Yang diniai**	**100%**	**10.015.093**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	3.165.093

			Bimbigan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	2 Orang	6.850.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**30.485.000**
			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	1.115.000
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.500.000
			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.095.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.500.000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	umlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	5.705.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	13.570.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan Barang**	**100%**	**72.000.000**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	72.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**	**100%**	**22.390.804**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah persuratan yang disediakan	12 Laporan	3.581.540
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumber daya Air dan Jasa Listik Yang dipakai	2 Laporan	12.809.264
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	2 Laporan	6.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara**		12.005.026

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.660.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara**	1 Unit	5.345.026
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR KECAMATAN**	**100%**	**50.646.470**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase Kegiatan PemerintahanYang dikoordinasikan**	**100%**	31.926..925
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	11 Laporan	31.926..925
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**6.886.446**
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	6 Laporan	6.886.446
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase Keg. yang Dilimpahkan kepada Camat Yang mencapai Target**	**100%**	11.833.099
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	2 Laporan	11.833.099
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DIKOORDINASIKAN**	**100%**	**11.734.411**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang dikoordinasikan**	**100%**	**11.734.411**
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	11.734.411
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**PERSENTASE KASUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG BERHASIL DISELESAIKAN**	**100%**	**5.477.307**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah Kasus yang diselesaiakan**	**100%**	**5.477.307**

			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	2 Laporan	5.477.307
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**RASIO KASUS INTOLERANSI SARA PER 1.000 PENDUDUK**	**100%**	10.412.971
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Kasus Intoleransi Sara Yang diselesaikan ditingkat Kecamatan**	**100%**	10.412.971
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11 Laporan	10.412.971
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5.536.295
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**PRERSENTASE PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**	**100%**	**8.263.878**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**100%**	**8.263.878**
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	umlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	8.263.878
					TOTAL	***982.232.287***

Sumber : SubBagian Perencanaan Kecamatan Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(Stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah adalah Program Tahunan Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah yang akan disempurnakan menjadi Rencana Kerja dengan menampung seluruh usulan dan perbaikan dari stakeholder terkait.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi rencana pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh staf Kantor Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

RENCANA KERJA

KECAMATAN TOBADAK

TAHUN

KECAMATAN TOBADAK

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

2025

KATAPENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Tobadak Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tobadak Tahun Anggaran 2025 ini, oleh sebab itu mohon kritikdansarandariberbagai pihakyang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini.

Tobadak, Janiari 2025

CAMAT TOBADAK

IRWAN ISMAIL.,S.Pd.,M.AP
Pangkat:Pembina IV/a
NIP. 19830911 201001 1 006

DAFTAR ISI

SAMPUL.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI .....

BAB IPENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulis .....

BAB II Hasil Evaluasi Kecamatan Tobadak Tahun Lalu .....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tobadak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tobadak .....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah .....

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....

3.2 Program dan Kegiatan kecamatan Tobadak 2024.....

BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah .....

4.1 Strategi dan Kebijakan .....

BAB V Penutup.....

BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah.Melalui perencanaan yang baik,diharapkan tujuan pembangunan yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja(RENJA), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan mengacu kepada RKPD.Berdasarkan hal tersebut,maka Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja(Renja) tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1tahunberjalan.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategiske dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pembangunan karena memuat seluruh kebijakan public sebagai berikut:

1.1.1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;

1.1.2. Menciptakan kepastian kebijakan,karena merupakan komitmen Pemerintah.

Rancangan Renja OPD dibahas pada forum OPD, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan,penajaman indicator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Proses penyusunan Rancangan awal RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPDdan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang,keuangan,Pelayananumum,pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran,arah kebijakan,program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju

Tengah Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis,yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,Prioritas pembangunan,rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rancangan Awal Rencana Kerja Keamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi,Misi dan Program dari Renstra OPD Kantor Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dibidang urusan Pelayanan.

Setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kecamatan Tobadak .

Penyusunan RENJA berpedoman pada Kecamatan Tobadak dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Tobadak merupakan bagian yang utuh dari rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Tobadak. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja Kecamatan Tobadak Tahun 2025 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 ini adalah :

1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundan g- undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 MaksuddanTujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tobadak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi pembangunan yang perlu untuk digali dan dikembangkan serta diaplikasikan pada tahun-tahun berikutnya ;
2. Untuk mengetahui prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan baik dalam program Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan masyarakat ;

3. Untuk mengetahui hambatan dan pemecahan masalah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan secara umum ;
4. Untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 ;
5. Untuk lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan Tobadak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta hasil pembangunannya.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tobadak Tahun 2025 adalah sebagai pedoman/ acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun.

1.4 SistematikaPenulisan

Rancangan Awal Rencana Kecamatan Tobadak kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025,disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan.

Bab II merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPDsudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tobadak tahun lalu yang berisi tentang: Evaluasi Pelaksnaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III merupakan penjelasan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari: Telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahan terhadap kebijakan provinsi,Tujuan dan Sasaran Renja,Program dan Kegiatan.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari Penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BABII

HASIL EVALUASI KECAMATAN TOBADAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tobadak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tobadak

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta TataCara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiapdokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.Oleh karena itu Renja Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi.Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 meliputi 4(Empat) hal,yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program &kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025,memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaanya serta organisasi pelaksananya Penyusunan Renja Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 juga memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah –masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun2024 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan			Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan (%)	100	7,600,193,703	100	0	100	1,300,312,095																
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	7.600.193.703	100,00	0	100,00	1.300.312.095									100,00	1,285,013,598						
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	99,00	161.129.902	0,00	0	99,00	17.054.515	0%	0	0%	6,900,000	20%	0	20%	10,154,000	99,00%	17,054,000	1,19%	17.054.000	**1,20%**	**10,58%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	92,909,267	0	0	8	17,054,515	1	0	0	6,900,000	0	0	0	10,154,000	1	17,054,000	1	17,054,000	**3,57%**	**18,36%**	KECAMATAN TOBADAK	Belum Tercapai
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	52,949,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	KECAMATAN TOBADAK	Tidak Terlaksana
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	15,271,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	KECAMATAN TOBADAK	Tidak Terlaksana
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu (%)	100,00	5.567.187.676	0,00	0	89,00	1.017.358.613	0%	318,181,000	0%	387,166,003	20%	0	20%	301,206,595	98,00%	1,006,553,598	24,74%	1.006.553.598	**27,80%**	**18,08%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	5,432,123,632	0	0	12	995,174,804	1	306,000,000	0	382,366,003	0	0	18	296,005,595	19	984,371,598	19	984,371,598	**29,23%**	**18,12%**	KECAMATAN TOBADAK	Melampaui
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4	33,862,462	0	0	1	1,681,821	0	1,381,000	0	0	0	0	1	300,000	1	1,681,000	1	1,681,000	**25,00%**	**4,96%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai

				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																					
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	101,201,582	0	0	4	20,501,988	0	10,800,000	0	4,800,000	0	0	4	4,901,000	4	20,501,000	4	20,501,000	**20,00%**	**20,26%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai perangkat daera yang dilayani (%)	100,00	197.202.932	0,00	0	80,00	46.724.021	0%	12,600,000	0%	7,500,000	20%	0	20%	26,124,000	100,00%	46,224,000	8,94%	46.224.000	**11,18%**	**23,44%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40	132,202,932	0	0	1	32,724,021	1	12,600,000	0	3,000,000	0	0	0	17,124,000	1	32,724,000	1	32,724,000	**2,50%**	**24,75%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13	65,000,000	0	0	2	14,000,000	0	0	0	4,500,000	0	0	2	9,000,000	2	13,500,000	2	13,500,000	**15,38%**	**20,77%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100,00	526.012.655	0,00	0	80,00	69.265.892	0%	23,174,000	0%	14,499,996	20%	0	20%	29,303,004	100,00%	66,977,000	7.773,54%	66.977.000	**9.716,93%**	**12,73%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	47	8,737,251	0	0	1	974,200	10	974,000	0	0	0	0	0	0	10	974,000	10	974,000	**21,28%**	**11,15%**	KECAMATAN TOBADAK	Melampaui
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	59	68,950,157	0	0	1	6,000,000	0	1,500,000	0	3,000,000	0	0	1	1,500,000	1	6,000,000	1	6,000,000	**1,69%**	**8,70%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18	34,405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	KECAMATAN TOBADAK	Tidak Terlaksana
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	28,646,000	0	0	100	6,250,000	1,000	1,200,000	0	500,000	0	0	6,000	4,550,000	7,000	6,250,000	7,000	6,250,000	**53.846,15%**	**21,82%**	KECAMATAN TOBADAK	Melampaui
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	9,100,000	0	0	10	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	**0,00%**	**16,48%**	KECAMATAN TOBADAK	Belum Tercapai
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	34	59,816,287	0	0	1	9,253,692	0	2,500,000	0	999,998	0	0	180	5,753,002	180	9,253,000	180	9,253,000	**529,41%**	**15,47%**	KECAMATAN TOBADAK	Melampaui
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,112	316,357,960	0	0	20	45,288,000	25	17,000,000	0	9,999,998	0	0	156	16,000,002	181	43,000,000	181	43,000,000	**16,28%**	**13,59%**	KECAMATAN TOBADAK	Melampaui
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Julmah Pengadaan Barang milik Daerah (Unit)	0,00	354.594.600	0,00	0	1,00	72.000.000	0%	18,000,000	0%	17,999,999	20%	0	20%	36,000,001	100,00%	72,000,000	20,00%	72.000.000	**2.000,00%**	**20,30%**	KECAMATAN TOBADAK	

		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	354,594,600	0	0	1	72,000,000	1	18,000,000	0	17,999,999	0	0	0	36,000,001	1	72,000,000	1	72,000,000	**20,00%**	**20,30%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 (%)	0,00	583.672.021	0,00	0	0,00	45.026.527	20%	15,534,000	10%	7,906,997	20%	7,000,000	20%	12,882,003	99,00%	43,323,000	105,00%	43.323.000	**0,00%**	**7,42%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	490,605,301	0	0	1	26,162,527	20	12,600,000	0	3,599,997	0	0	100	9,962,003	120	26,162,000	120	26,162,000	**200,00%**	**5,33%**	KECAMATAN TOBADAK	Melampaui
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	93,066,720	0	0	12	18,864,000	0	2,934,000	0	4,307,000	0	7,000,000	6	2,920,000	6	17,161,000	6	17,161,000	**10,00%**	**18,44%**	KECAMATAN TOBADAK	Belum Tercapai
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara (%)	90,00	210.393.917	0,00	0	74,00	32.882.527	0%	2,000,000	0%	11,600,000	20%	0	20%	19,282,000	99,00%	32,882,000	231,38%	32.882.000	**312,68%**	**15,63%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	62,838,874	0	0	16	10,021,000	4	1,500,000	0	2,000,000	0	0	12	6,521,000	16	10,021,000	16	10,021,000	**88,89%**	**15,95%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	11,800,000	0	0	20	2,000,000	5	500,000	0	500,000	0	0	15	1,000,000	20	2,000,000	20	2,000,000	**105,26%**	**16,95%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	135,755,043	0	0	25	20,861,527	0	0	0	9,100,000	0	0	25	11,761,000	25	20,861,000	25	20,861,000	**500,00%**	**15,37%**	KECAMATAN TOBADAK	Tercapai
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kecamatan			Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan (%)	100	866,227,336	90	0	90	80,374,702																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (%)	100,00	321.009.112	100,00	0	100,00	33.739.151									100,00	31,739,000						
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara tepat (%)	100,00	38.200.000	0,00	0	80,00	33.739.151	0%	0	0%	0	0%	0	0%	31,739,000	0,00%	31,739,000	0,00%	31.739.000	**0,00%**	**83,09%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15	38,200,000	0	0	1	33,739,151	0	0	0	0	0	0	0	31,739,000	0	31,739,000	0	31,739,000	**0,00%**	**83,09%**	KECAMATAN TOBADAK	Belum Tercapai
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase penyeleng garaan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan	100,00	262.409.112	95,00	0	95,00	46.635.551									95,00	46,635,000						

			KELURAHAN	ketentuan perundan gan yang berlaku (%)																					
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan di kelurahan (%)	96,00	262.409.112	0,00	0	80,00	46.635.551	0%	23,000,000	0%	13,000,000	0%	0	0%	10,635,000	0,00%	46,635,000	6.000,00%	46.635.000	**7.500,00 %**	**17,77%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	262,409,112	0	0	10	46,635,551	300	23,000,000	0	13,000,000	0	0	0	10,635,000	300	46,635,000	300	46,635,000	**6.000,00 %**	**17,77%**	KECAMATAN TOBADAK	Melampaui
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi sara per 1.000 penduduk (%)	0,00	282.809.112	0,00	0	0,00	0									0,00	0						
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tepat Waktu (%)	100,00	20.400.000	0,00	0	80,00	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	KECAMATAN TOBADAK	
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	KECAMATAN TOBADAK	Tidak Terlaksana
										Total Target (RP)		**1,380,686,797**				**Total Realisasi (RP)**			**1,363,387,598**						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		**2.151,29**				
																			Predikat kinerja		**ST**	**ST**			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Disusun	Disetujui
Tobadak, 2025 CAMAT TOBADAK	Tobadak, 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
IRWAN ISMAIL.,S.Pd.,M.AP Pangkat : Pembina ,IV/a Nip : 19830911 201001 1 006	LITHA FEBRIANI, SE, M.Si Pangkat: Pembina TK.I,IV NIP : 198302152003122004

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tobadak telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Tidak terdapat Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai saat ini belum ada program/kegiatan yang telah melebihi target yang telah ditentukan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPDA dapun implikasi yang timbul dari program kerja Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah berupaa danya peningkatan dedikasi sumberdaya aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Tobadak Kab.MamujuTengah.
4. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah:
   - Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
   - Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada terwujudnya Pembangunan di Kecamatan Tobadak.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Tobadak dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan,hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tobadak Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output),hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indicator tersebut dapat berupa dana,sumberdaya manusia,laporan,dan indicator lainnya.Penetapa nindikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing–masing jenis indicator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran

dilakukananalisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan Pemerinah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotaantara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional yang dikenal dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).Meskipun sistem musrenbang sudah dikembangkan lebih baik,dalam pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah selaku OPD yang menangani urusan Pilihan Kecamatan Tobadak mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi,singkronisasi,baik antar daerah antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,penganggaran,pelaksana dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam hal pengusulan Program dan Kegiatan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien,efektif,berkeadilan dan bekelanjutan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas,selanjutnya di tentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tobadak.

Kecamatan Tobadak Kab. Mamuju Tengah dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.Isu- isu strategis dimaksud antara lain:

1. Faktor sosiologis :

   Kecamatan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Ibukota Kec.Tobadak mempunyai kontribusi yang besar dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan.

1. Faktor ekonomi:

   Sebagian besar wilayah Kecamatan Tobadak merupakan wilayah perdagangan dan jasa, menuntut penyediaan layanan yang cepat, akurat,efektif,efisien dan akuntable.

2. Faktor pendidikan :

   Masyarakat Tingkat pendidikan yang relative menengah kebawah menjadi perhatian Pemerintah Kecamatan mendorong partisipasi dan kreatifitas masyarakat.

3. Faktor Kesehatan Masyarakat:

   Kesadaran dan perilaku warga perlu diarahkan dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

4. Faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan Masyarakat:

   Koordinasi dan kerja samaantara Linmas Desa dengan pembinaan Forkopimka setempat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga bahwa Perencanaan Pembangunan yang direncanakan agar tetap dalam koridor yang ada dan sesuai dengan yang diinginkan,tentunya Kecamatan Tobadak haru melakukan reviewTerhadap Program Kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan untuk mengetahui bahwa program dan kegiatan tersebut masih layak atau tidak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi actual yang ada.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cacat anPe nting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Belanja Langsung				**1.300.621.347,00**	**Belanja Lan gsung**					
A	**Kegiatan Rutin**	**Kecamatan Tobadak**			**1.300.621.347,00**	**KegiatanRutin**	**Kecamatan Topoyo**				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan**	**100%**	**1.212.621.347,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan**	**100%**	**1.212.621.347,00**	
1. 1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100%**	38.273.700,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu**	**100%**	38.273.700,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.423.700,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.423.700,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.650.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.650.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.200.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.500.000,00	
1. 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	704.989.000,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Tepat Waktu**	**100%**	704.989.000,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	657.759.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	657.759.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.400.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	41.830.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	41.830.000,00	
1. 3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	73.600.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100 %**	73.600.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	48.600.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	48.600.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	5 Orang	25.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	5 Orang	25.000.000,00	
1. 4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	143.891.647,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	143.891.647,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.750.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.750.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86000 Paket	9.821.647,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86000 Paket	9.821.647,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256 Laporan	76.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256 Laporan	76.000.000,00	
1. 5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	145.000.000,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	145.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	72.000.000,00	Pengadaan Mebel	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	72.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	23 Unit	32.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	23 Unit	32.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	35.000.000,00			*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	35.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	54.867.000,00			-	-	54.867.000,00	
1. 6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	36.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	36.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	18.867.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	18.867.000,00	
1. 7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	52.000.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	52.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	15.000.000,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan**	**100%**	**45.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan**	**100%**	**45.000.000,00**	

2. 1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan**	**100%**	45.000.000,00	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan**	**100%**	45.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	45.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	45.000.000,00	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**28.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan**	**100%**	**28.000.000,00**	
3. 1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan**	**100%**	**28.000.000,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan**	**100%**	**28.000.000,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk**	**100%**	**15.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk**	**100%**	**15.000.000,00**	
5. 1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan**	**100%**	15.000.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase kasus intoleransi SARA yang diselesaikan ditingkat kecamatan**	**100%**	15.000.000,00	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3 Laporan	15.000.000,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**Kecamatan Tobadak**	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3 Laporan	15.000.000,00	
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**2.500.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**-**	**-**	**2.500.000,00**	
6. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	2.500.000,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		-	-	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	2.500.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Kecamatan Tobadak**	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	2.500.000,00	

BABIII

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PerangkatDaerah

Rencana Kerja Kecamatan Tobadak Tahun 2024, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026 dan Hasil Pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Tobadak. Dimana tujuan pembuatan Ranwal renja Tahun 2025 lebih terfokus kepada pembangunan infrastruktur fasilitas atau sarana prasarana masyarakat, meningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor kecamatan Tobadak.

Dalam perencanaan kinerja Kecamatan Tobadak merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis lokasi, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan RI. Dengan perencanaan yang strategis yang jelas dan sinsergis, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tobadak, maka diperlukan arah kebijakan yang menjadi prioritas. Dalam arah kebijakan ini memuat juga tujuan, dan Sasaran.

Adapun Tujuan dan Sasaran Perankat Daerah Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah adalah Sebagai Berikut :

1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kecamatan Tobadak untuk Priode diarahkan kepada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kecamatan;
2. Mengadakan rapat kordinasi satu kali dalam satu bulan dan konsultasi keluar dan dalam daerah;
3. Meningkatkan disiplin administrasi perkantoran;
4. Meningkatkan peran aktif dan control masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;

5. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
6. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
7. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

2. Sasaran Renja

Adapun sasaran dari renja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Kebutuhan Pelengkapan Administrasi dan ATK Perkantoran ;
2. Memenuhi Kebutuhan Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.
3. Menyediakan kebutuhan kebersihan gedung dan lingkungan Kantor.
4. Memberikan kesempatan Kepada staf atau Pegawai untuk melakukan DIKLAT dan Pelatihan (LATPIM).
5. Memenuhi Kelengkapan sarana dan prasarana Gedung Kantor.
6. Mendapatkan juara dalam kegiatan lomba atau event-event nasional atau tingkat kota seperti MTQ dan Kegiatan Hari hari Besar lainnya

a. Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja

merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tabel dilembaran berikut :

s

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun2026 Kecamatan Tobadak KabupatenMamujuTengah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	KECAMATAN TOBADAK			**1.303.121.347,00**				**1.773.887.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.300.621.347,00**				**1.771.187.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**1.300.621.347,00**				**1.771.187.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**1.212.621.347,00**			**-**	**1.656.187.000,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	38.273.700,00			-	48.150.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.423.700,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.750.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6.500.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.650.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.500.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.500.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8.900.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	704.989.000,00			-	1.041.100.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	657.759.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		989.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6.500.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	41.830.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45.600.000,00	KECAMATAN TOBADAK

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	73.600.000,00			-	91.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	48.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		56.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	143.891.647,00			-	170.070.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.750.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.750.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86000 Paket	9.821.647,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.320.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256 Laporan	76.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		87.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	145.000.000,00			-	165.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	78.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		78.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	32.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		32.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	54.867.000,00			-	64.867.000,00	KECAMATAN TOBADAK

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		46.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.867.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18.867.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	52.000.000,00			-	76.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**45.000.000,00**			**-**	**55.000.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	45.000.000,00			-	55.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK

7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**28.000.000,00**			**-**	**35.000.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	28.000.000,00			-	35.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**	**15.000.000,00**			**-**	**25.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	15.000.000,00			-	25.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00	KECAMATAN TOBADAK
X	**NON URUSAN**			**2.500.000,00**				**2.700.000,00**	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**2.500.000,00**				**2.700.000,00**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**2.500.000,00**			**-**	**2.700.000,00**	

X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.500.000,00			-	2.700.000,00	KECAMATAN TOBADAK
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Mahahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.700.000,00	KECAMATAN TOBADAK
J U M L A H				**1.303.121.347,00**				**1.773.887.000,00**	

BABIV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategis umum untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :

1. Pemantapan dan Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Kelembagaan dalam rangka mendukung tugas penjabat Bupati Mamuju Tengah.
2. Pemantapan kualitas pembangunan dalam pelayanan masyarakat yang konsisten dan terpadu dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
3. Harmonisasi kerjasama antar lembaga multi stakeholders. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Kecamatan Topoyo sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
5. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
7. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
8. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
9. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

2. Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan Kasemen diarahkan Kepada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kecamatan;
2. Mengadakan rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah;
3. Meningkatkan disiplin administrasi perkantoran;

4. Meningkatkan peran aktif dan control masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
5. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
6. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
7. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi ;

BABV

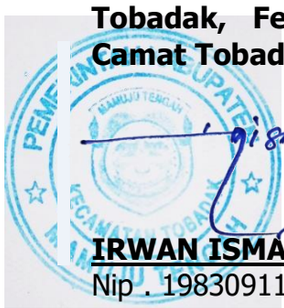
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tobadak tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja sebagai aparatur kecamatan Tobadak sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan efektif dan efisien.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tobadak selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tobadak. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Tobadak. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tobadak sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tobadak Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Tobadak untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Tobadak pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Tobadak, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Tobadak diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Tobadak, Februari 2025
Camat Tobadak



IRWAN ISMAIL.,S.Pd.,M.AP
Nip . 19830911 201001 1 006

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang sebesar-besarnya dihaturkan ke hadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-NYA, sehingga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai pedoman untuk melaksanakan program pembangunan, khususnya di bidang Koperasi UKM, perindustrian dan Perdagangan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri
86 Tahun2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Renja Kerja Tahun 2025 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Dengan adanya dokumen Rencana Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025

Tobadak, 01 Oktober 2025

KEPALA DINAS



COLLENG SULAIMAN, S.Sos

NIP. 19651231 198703 1 227

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 9

1.3. Maksud dan Tujuan 13

1.4. Sistematika Penulisan 14

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 16

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 35

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 40

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 47

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 48

3.3. Program dan Kegiatan 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 52

BAB V PENUTUP 64

BAB V PENUTUP 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk Sesuai dengan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nonor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupataen Mamuju Tengah. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis Dinas Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Tahun Anggaran Perubahan 2025 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2021–2026 yang diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran Perubah 2025 yang telah tersusun dengan baik secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Manfaat pembangunan , koperasi usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan secara langsung bagi daerah adalah peningkatan jumlah tenaga kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan secara tidak langsung yaitu pemanfaatan potensi pasar domestik dan ekspor, peningkatan kemampuan pertumbuhan industri daerah.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. Pengkordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi usaha kecil dan menengah,

perindustrian dan perdagangan.

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skal yang lebih spesifik.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, Rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah telah dijelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dimulai dengan menentukan sasaran, strategi kebijakan dan rencana detail untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder) memerlukan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang khusus yang cepat dan tepat. Hal ini dimaksudkan agar

perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah ,Perindustrian, Perdagangan Tahun 2025 antara lain :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah sangat dibutuhkan dalam

mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholders, oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengac pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023, berlandaskan :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
26. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud danTujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah . Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangantahun 2021-2026 dijadikan dasar patokan dalam penyusunan Renja Perubahan tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan program/kegiatan tahun 2025, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di tahun 2025, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangat Daerah.

BAB II EVALUASI RENJA

Terdiri dari :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan ke II Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan sampai dengan triwulan ke II mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian program, kegaiatan dan pendanaan yang direncanakan

BAB IV PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya

Pembangunan Koperasi UKM , perindustrian dan perdagangan, sebagai penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor koperasi UKM, perindusrian dan perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk itu peran industri dalam perekonomian dan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian haruslah menjadi prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Serta peran serta dari pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar,maka perekonomian derah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini di pengaruhi juga oleh kondisi fisik pasar itu sendiri, terutama pasar tradisional yang semakin lama kondisi fisiknya semakin memprihatinkan. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan resntra samapai dengan Tahun 2025.

Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Triwulan ke II Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Urusan Wajib									
1					Bidang Urusan Koperasi UKM									
1	1				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat dari Total Koperasi Aktif**	**100 %**	0 %	100,00 **%**	100,00 **%**	100,00 **%**	100 **%**	77,42 **%**	77,42 **%**

1	1	1			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasn Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Uniy Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100 %	0 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	50 %	50 %
1	2				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Sehat**	**100 %**	0 %	100,00 **%**	99,56 %	99,56 %	100 %	21,24 %	21,2389 %
1	2	1			Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian	100 %	0 %	100,00 **%**	99,56 **%**	99,56 %	100 %	100 %	100 %
1	3				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**	**100** %	100 %	**100 %**	**100** %	**100** %	33 %	0 %	0 %

1	3	1			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendapataan, kemitraan, kemudian Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang diberdayakan	61 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	33 %	0 %	0 %
1	4				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Jumlah usaha kecil dan Menengah dari total UMKM**	**100 %**	96 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	30 %	30 %
1	4	1			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	100 %	96 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	30 %	30 %
					Urusan Pilihan									
2					Bidang Urusan Perindustrian									
2	1				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertumbuhan industri kecil menengah di kabupaten**	**2,91 %**	1,91 %	100 %	99,50 %	99,50 %	2,45 %	-47,788 %	-1950,51 %

2	1	1			Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkanya menjadi perda	100	%	0	%	100	%	99,50	%	99,50	%	50	%	0	%	0	%
2	2				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**6,00**	**Dokumen**	6	dokumen	100,00	%	100,00	%	100,00	%	6	**dokumen**	4	**dokumen**	66,6667	**dokumen**

2	2	1			Penyedian informasi industr untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase dan perusahaan induustri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahan indutri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	### ##	%	48,41	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	65,75	%	15,78	%	24	%
					Urusan Pilihan																	
3					Bidang Urusan Perdagangan																	
3	1				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN**	**100**	%	0	%	100	%	100	%	100	%	50	%	85,71	%	171,429	%

3	1	1			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100	%	0	%	100	%	100	%	100	%	50	%	25	%	50	%
3	2				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya**	**39,5**	**%**	37,76	%	100	%	100	%	100,00	%	38,63	%	42,31	%	109,53	%
3	2	1			Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia	569	unit	549	unit	100	%	100	%	100	%	597	unit	597	unit	100	unit
3	2	2			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35	orang	30	orang	100	%	100	%	100	%	32	orang	15	orang	46,875	orang
3	3				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok**	**5,61**	**%**	5,61	%	100	%	100	**%**	100	%	6,01	**%**	0	**%**	0	**%**

3	3	1			Pengedalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang Penting di tingkat pasar kabupaten/kota	10	Dokumen	10	dokumen	100	%	100	%	100	%	10	dokumen	4	dokumen	40	dokumen
3	5				**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**95**	%	95	%	**100**	**%**	**99,42**	%	**99,42**	%	95	%	47,5	%	50	%
3	5	1			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ullang dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang diter/tera Ulang Dlaam tahun berjalan	95	%	95	%	**100**	**%**	**99,42**	%	**99,42**	%	95	%	47,5	%	50	%

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 sampai dengan triwulan ke II diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

a. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2025 melaksanakan sebanyak 4 program, dan 4 kegiatan. Adapun target dan realisasi setiap program dan kegiatan kami jabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, indikator dari program ini yaitu Persentase Koperasi Sehat dari Total Koperasi Aktif dengan target sebesar 100% , dan terealisasi sebesar 77,42% dengan rincian sebanyak 31 unit koperasi aktif dan ada 24 unit koperasi yang dinyatakan sehat. Untuk mencapai target kinerja program ini ada satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
   a) Pemeriksaan dan Pengawasn Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Uniy Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah. Indikator kinerja kegiatan yaitu Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dengan target 100% dan sudah terealisasi 50%. Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat 113 unit koperasi dan sudah dilakukan pemeriksaaan dan pengawasan sebesar 56 unit koperasi.
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi. Adapun indikator kinerja program ini yaitu Persentase KSP/USP Sehat, dengan target 100% dan terealisasi sebesar 21,24%. Dimana terdapat 24 unit koperasi sehat dan total koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 113 unit. Untuk mendukung program ini , terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
   a) Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini yaitu persentase ksp/usp yang mendapatkan penilaian dengan target 100% dengan realisai 100% dimana terdapat 24 unit koperasi sehat yang sudah dilakukan penilaian.
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), adapun indikator kinerja program ini yaitu Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dengan target 33% dan belum ada ada

realisasi kinerja atau 0%. Untuk mendukung program terssebut bidang koperasi ukm melaksanakan satu kegiatan yaitu :

a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendapataan, kemitraan, kemudian Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan dengan indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Yang diberdayakan dan menargetkan 33% dan belum terealisasi atau 0%.

4. Program Pengembangan Umkm dengan indikator kinerja Persentase Jumlah usaha kecil dan Menengah dari total UMKM. Adapun target yang ditetapkan sebesar 100% dan sudah terealisasi sebesar 30%. Untuk mendukung program tersebut bidang koperasi UKM melaksanakan satu kegiatan yaitu:

   a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan indikator kinerja Persentase Usaha Mikro yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha. Adapun target yang ditetapkan yaitu 100% dan sudah terealisasi sebesar 30%.

b. Perindustrian

Urusan perindustrian pada tahun 2023 melaksanakan 2 program dan 2 kegiatan, adapun program, kegiatan, indikator kinerja beserta target dan realisasi sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja Persentase pertumbuhan industri kecil menengah di kabupaten, adapun target nya yaitu 2,45 % dan terealisasi sebesar -47,79%, dengan rincian per triwulan ke II jumlah IKM yang terdata sebanyak 118 sedangkan tahun 2022 per desember jumlah industri sebanya 226 unit usaha. Penurunan jumlah IKM ini disebabkan banyaknya IKM yang beralih menjadi UKM, karena langkanya bahan baku dan mahalnya biaya produksi, akan tetapi pada akhir tahun di targetkan dapat meningkatkan jumlah IKM dengan adanya bantuan peralatan produksi. Untuk mendukung program tersebut bidang perindustrian melaksanakan satu kegiatan yaitu :

   a) Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota, dengan indikator kinerja Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkanya menjadi perda dengan target 50% akan tetapi tidak ada

realisasi kinerja ini dikarenakan belum adanya kawasan industri di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga dokumen RPIK belum dapat disusun.

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, indikator kinerja program ini yaitu Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini. Terget kinerja sebesar 6 dokumen yang memuat semua informasi mengenai IKM mulai dari nama, alamat, nilai produksi, investasi, jumlah tenaga kerja dan sudah terealisasi 4 dokumen. Untuk mendukung program ini terdapat satu kegiatan yaitu :

    a) Penyedian informasi industr untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase dan perusahaan induustri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahan indutri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota. Target yang di tetapkan pada tahun 2024 yaitu 65,75% dan terealisasi sebesar 15,78%.

c. Perdagangan

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan. Indikator Program yaitu Pertsentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Seusai Dengan Ketentuan Dengan target 50% dan terealisasi sebesar 85,71%. Realisasi ini masih sama dengan tahun lalu dimana terdapat 7 minimarket dan 6 diantaranya sudah memiliki izin usaha. Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu :

    a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan indikator Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan, dengan target 50% dan terealisasi sebesar 85%.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator Program ini yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya. Adapun target yang di tetapkan pada tahun 2025 yaitu 38,63% dan terealisasi sebesar 36,78% atau terdapat 597 unit sarana distribusi perdagangan yang dipergunakan sesuai fungsinya dan terdapat 1.411 unit sarana

distribusi perdagangan di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada program ini terdapat dua kegiatan pendukung yaitu :

a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia, adapun target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 597 unit dan terealisasi 597 unit tetap sama dengan tahun lalu, karena belum ada pembangunan sarana distribusi perdagangan.
b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan target 32 orang dan sudah terealisasi sebanyak 15 orang.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan Indikator Program Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok, dengan target 6,01% dengan realisasi 0%. Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan pendukung yaitu:
   a) Pengedalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang Penting di tingkat pasar kabupaten/kota dengan target 4 dokumen dan sudah terealisai 2 dokumen.
4. Program Pengembangan Ekspor, indikator kinerjanya yaitu Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih dengan target 33,60 % dan terealisasi 0%. Belum adanya realisasi ini disebabkan perhitungan ekspor bersih dilakukan pada akhir tahun. Pada program ini erdapat satu kegiatan pendukung yaitu:
   a) Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi produksi ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kaupaten/kota. Adapun target yang ditetapkan yaitu 1 kali mengikuti pameran dan terealisasi 0 kali, hal ini dikarenakan pameran yang diikuti bertepatan pada ulang tahun Kabupaten Mamuju Tengah yang jatuh pada bulan desember.
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Indikator Program yaitu Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku dengan target 95% dan

terealisasi sebesar 47,5%. Pada program ini terdapat satu kegiatan pendukung yaitu:

a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan indikator kinerja Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang diter/tera Ulang Dalam tahun berjalan dengan target 95% dan sudah terealisasi sebesar 47,5%.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Indikator Program Jumlah Promosi pemasaran yang dilaksanakan dengan target 1 kali dan terealisai 0 kali, hal ini disebabkan pelaksanaan promosi produk lokal dilaksanakan pada saat seremoni ulang tahun Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga dilaksanakan pada bulan desember. Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:

a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan indikator Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan dan terget yang ditetapkan 1 unit produk.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Pengolahan data dalam jumlah banyak, serta adanya perubahan yang bersifat rutin dan berulang–ulang, sering menimbulkan kesulitan dalam penyediaan informasi.

2.2.1 Bidang Koperasi UKM

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Banyaknya koperasi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah tentunya diperlukan suatu data yang akurat dan bisa menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan. Pendataan koperasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Jumlah

Koperasi di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 tercatat sebanyak 163 Koperasi.

Dari seluruh Koperasi tersebut, terdapat koperasi aktif sebanyak 163 dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 17 koperasi. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Koperasi juga terbagi ke dalam beberapa jenis, dimana jenis koperasi tersebut dibedakan berdasarkan beberapa faktor. Diantaranya faktor jenis usaha,

tingkatan, status anggota dan fungsinya.

Adapun jumlah UKM di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 sebanyak 1.336, dari seluruh UKM yang telah memiliki NIB yaitu 127 UKM.

2.2.2 Bidang Industri

Industri kecil dan menegah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 266 ikm,dari jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingan pada tahun 2024 yaitu sebesar 19,88% hal ini disebabkan oleh banyaknya IKM yang menghentikan produksinya dan beralih menjadi usaha perdagangan.

2.2.3 Bidang Perdagangan

Salah satu tugas yang diamanatkan pada Bidang Perdagangan adalah melaksanakan monitoring harga dan ketersedian Barang pokok di pasar rakyat dan toko modern, pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah serta Sidak Pasar dalam Satgas Pangan dengan tujuan utama adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan penting di Kabbupaten Mamuju Tengah dengan melakukan tindakan preventif maupun antisipatif apabila terjadi gejolak harga barang kebutuhan pokok dan penting.

Stabilitas harga dapat diketahui per komoditas pangan berdasarkan perhitungan harga pangan yang terdapat di Kabuapten Mamuju Tengah. Harga bahan pangan di Kabuapten Mamuju Tengah dapat diamati perhari, perbulan dan pertahun. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan kurang dari 5%. Gejolak harga dilihat dari besarnya koefisien variasi (CV) dari komoditas pangan.

sebesar 6,05% masi di atas dari angaka 5%.

Dalam rangka upaya pengamanan perdagangan terutama untuk upaya perlindungan konsumen, melalui Metrologi Legal menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Kegiatan Metrologi Legal mempunyai sasaran untuk memberikan jaminan ketepatan pengukuran, penakaran, dan penimbangan produk yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, adapun kegiatan UTTP cukup tinggi pencapainnya yaitu sebesar 99,59%. Berikut kami sajikan Tabel Target dan realisasi Pencapaaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi Sehat dari Total Koperasi Aktif	100	100	100	33,33	38,89	0	46	13	33,33
2	Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100	100	25,71	26,47	27,69	0	46	50	26,47
3	Persentase KSP/USP Sehat			100	72,73	72,73	0	0	50	72,73
4	Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian			100	37,5	43,75	0	0	50	37,5
5	Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian			0	29,41	20,51	0	0	0	29,41
6	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan			0	83,33	74,07	0	0	0	83,33
7	Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100	18	33	14,29	16,67	100	100	0	14,29
8	Persentase Usaha Mikro Yang diberdayakan	100	100	33	8,93	10	100	100	0	8,93
9	Persentase Jumlah usaha kecil dan Menengah dari total UMKM	100	10	100	3,21	3,23	96	10	30	3,21
10	Persentase Usaha Mikro yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	100	10	100	2,21	2,67	96	10	0	2,21

	Persentase Pelaku Usaha									
11	yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0	85,7	50	87,50	88,89	0	85,71	25	87,50
12	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko Swalayan	0	25	50	87,50	88,89	0	85,71	25	87,50
13	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	549	573	597	39,1	39,5	549	926	597	39,1
14	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia	549	573	597	559	569	549	926	597	559
15	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	32	32	33	35	30	32	15	33
16	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6,46	6,26	6,01	5,81	5,61	6,46	6,05	3	5,81
17	Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dan terdistribusi	10	10	10	10	10	10	10	4	10
18	Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	0	0,000636	0,000638	0,000650	0,000652	0,00006	0,150	0	0,000650
20	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih	32,51	33,60	0	34,79	35,33	32,51	0	0	34,79
21	Jumlah pameran dan misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan	0	1	2	2	3	0	0	0	2
22	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perelngkapannya (UTTP) yang ditera/tera ualang dalam tahun berjalan	95	95	95	95	95	95	99,59	47,5	95
23	Jumlah promosi, pemasaran yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	0	0	1
24	Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan	1	1	1	2	4	1	0	0	2
25	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten	1,91	2,19	2,45	2,69	2,91	1,91	-19,88	0,61	2,69

26	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	0	0	50	70	100	0	0	0	70
27	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	6	6	6	6	6	6	6	4	6
28	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	48,41	64,06	65,75	65,97	67,15	48,41	36,84	15,78	65,97

1.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas pada tahun 2025 dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang perlu di perhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi,kinerja pelayanan Dinas serta tantangan ekternal baik dari lokal yang bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional. Isu strategis merupakan kondisi keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Adapun permasalahan dan hambatan yang dijumpai adalah :

1. Ketatnya persaingan dunia usaha baik mikro, kecil dan menengah yang menuntut jiwa kewirausahaan yang inovatif dan berdaya saing.
2. Fasilitasi akses sumber daya produktif bagi koperasi dan pelaku usaha mikro belum optimal.
3. Kurangnya informasi terkait produsen komoditas untuk pemenuhan bahan pokok

4. Fluktuasi harga pangan yang tidak dapat diprediksi.
5. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya .
6. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah.

1.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini

Tabel 2.3 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tobadak	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**2.750.114.777**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tobadak	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**2.289.265.992**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tobadak	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**138.344.365**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tobadak	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**108.071.603**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	34.380.753	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.844.365	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	26.457.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.834.258	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tobadak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.065.096	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.334.096	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**100%**	**1.943.850.252**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tobadak	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	**100%**	**1.905.650.252**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	1.905.650.252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobadak	Jumlah ASN	21	1.905.650.252	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.200.000						

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobadak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000							
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	1 Lapoaran	30.000.000							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**91.000.000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**13.960.000**	
	MonitoringEvaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dikondisikan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	5.000.000							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	60.000.000							
	Sosialisai Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	10.000.000							
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	16.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	13.960.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**215.100.000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100%**	**128.122.649**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	889.333	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.349.316	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	1 paket	5.000.000						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	700 paket	7.000.000						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	700 Paket	2.100.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	700 Paket	1.992.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan	8.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181 Laporan	181.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181 Laporan	115.892.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis PD	1 Dokumen	3.100.000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**225.000.000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**19.159.674**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	5.000.000						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19.159.674	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**84.820.160**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**73.269.814**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat	90	900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8120	11.920.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	8120	11.874.794	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	72.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	60.495.020	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**52.000.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**41.032.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	44.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	33.032.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif	100%	110.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif	100%	18.557.729	

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	100%	110.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	100%	18.557.729	
	Pengawasan Kekuatan KesehatanKemandirianKetangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	50.000.000						
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	65 Unit usaha	60.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	65 Unit usaha	18.557.729	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP sehat	100%	125.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP sehat	100%	19.494.056	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian	100%	125.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KSP/USP yang mendapatkan Penilaian	100%	19.494.056	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	143 Unit Usaha	75.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	143 Unit Usaha	19.494.056	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USPKoperasi KewenangaKabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan Kesehatan	2 Unit Usaha	50.000.000						

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	33%	257.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	33%	120.000.025	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	33%	257.800.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	33%	120.000.025	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	132.500.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	120.000.025	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	63.900.000						
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5 Orang	61.400.000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM	100%	759.610.192	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM	100%	759.610.192	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usah	100%	759.610.192	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usah	100%	759.610.192	

	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 Unit Usaha	759.610.192	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 Unit Usaha	759.610.192	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN	**50%**	**15.000.000**	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN	**50%**	**14.968.684**	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**50%**	15.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**50%**	14.968.684	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 dokumen	14.968.684	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**597%**	**3.776.000.000**	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**597%**	**397.436.903**	

	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia**	597 unit	**3.515.000.000**	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia**	597 unit	**205.472.208**	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	597 unit	3.500.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	549 unit	205.472.208	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	15.000.000						
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	32 orang	**261.000.000**	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	**32**	**191.964.695**	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	131.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	106.632.469	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	130.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	85.332.226	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan poko**	**6,01%**	**1.064.440.327**	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	**6,26**	**50.185.327**	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dan terdistribusi**	**10 Jenis**	**140.000.000**					**-**	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	**12 Laporan**	70.000.000						
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	**12 Laporan**	70.000.000						
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota**	1 dokumen	**887.440.327**	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	**1**	**50.185.327**	
	Pemantauan Harga dan barang stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dan pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kota/kabupaten		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	80.000.000						
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	50.185.327	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	50.185.327	

	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	757.255.000						
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	0,00064	37.000.000					-	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Kecamatan	37.000.000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih	35,51%	223.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih	35,51%	150.011.533	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pameran dan misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan	2 Kali	223.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pameran dan misi dagang yang diikuti dan diselenggarakan	2 Kali	150.011.533	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	3 Pelaku Usaha	75.000.000						
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	100.000.000						
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspo		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 Pelaku Usaha	48.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspo		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 Pelaku Usaha	150.011.533	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	**95%**	95.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	95%	77.711.003	

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perelngkapannya (UTTP) yang ditera/tera ualang dalam tahun berjalan**	**95%**	95.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase UTTP yang ditera dalam tahun berjalan	95%	77.711.003	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	95 unit	45.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	95%	35.339.394	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3 orang	50.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3	42.371.609	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Jumlah promosi, pemasaran yang dilaksanakan	1 Kali	118.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Jumlah promosi, pemasaran yang dilaksanakan	1	58.331.445	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan	2 buah	118.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk yang lokal yang dipromosikan	0	58.331.445	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kali	50.000.000						
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	68.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	58.331.445	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten	2.45 %	**5.819.964.035**	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten**	2,19	**170.962.760**	

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	50%	5.819.964.035	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	0	170.962.760	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	4.400.000.000					-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	694.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	45.557.525	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	600.058.800						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	125.405.235	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	125.405.235	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	6 jenis	**290.000.000**	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**6,00**	**76.724.427**	

	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	65.75 %	290.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	64,06%	76.724.427	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional		umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	1 dokumen	60.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	49.414.519	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	120.000.000						

	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	110.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	27.309.908	

1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah. Berikut Kami sajikan Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia**		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dusun Sentral Desa Pangale	Jumlah Sarana yang tersedia	1 los Pasar	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten**		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dusun Pioked, Desa Sanjango. Dusun Tomemba, Desa Tasokko. Desa Karossa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya ada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UMKM diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya, yaitu: “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk mendukun Presiden mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.”. Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024, maka misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari pokok visi tersebut di atas, yaitu:

7. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
8. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
2. Modernisasi Koperasi;
3. Melahirkan Wirausaha Baru *(New Enterpreuner)*.
4. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
5. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
6. UMKM Naik Kelas *(Scalling Up)*;
7. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
8. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran strategis pembangunan industri adalah :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri;
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
6. Meningkatnya Persebaran Industri;
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif;
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait lansung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (***good governance***) di Sektor Perdagangan.

1.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Skpd

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Koperasi UMKM, Perindustrain Dan Perdagngan	Kontribusi PDRB Sktor Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagnagn Terhadap Total PDRB	8,32	8,42	8,53	8,63	8,73
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Koperasi UMKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi UMKM	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,28	7,57	8,00	8,50	9,00
	Meningkatnya Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagngan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagngan	1,50	6,12	6,50	7,00	7,50

2							
	Meningkatnya Tata Kelola Pada Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Indeks RB Dinas Perdagangan dan Perindustrian	CC	B	BB	A	AA
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Temuan Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0	0	0

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 telah menetapkan rencana program dan kegiatan sebanyak 13 (empat belas) program dengan 22 (dua puluh satu) Kegiatan dan 49 (empat puluh satu) sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu waktu 1 (satu) tahun dan telah disetujui dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah, adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

TABEL 3.2 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**2.931.452.754,00**	**2.285.296.000,00**	**3.535.379.089,00**	**603.926.335,00**							**4.758.389.224,00**	
	2	**NON URUSAN**							**2.388.696.714,00**	**2.006.886.283,00**	**2.713.351.121,00**	**324.654.407,00**							**2.630.859.988,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.388.696.714,00**	**2.006.886.283,00**	**2.713.351.121,00**	**324.654.407,00**							**2.630.859.988,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**2.241.894.617,00**	**1.966.915.379,00**	**2.600.063.400,00**	**447.194.560,00**							**2.689.089.177,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD* *Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				100 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	100 Dokumen 1 Dokumen	135.844.365,00	70.357.574,00	86.859.178,00	-48.985.187,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	perangkat daerah		137.944.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.388.696.714,00**	**2.006.886.283,00**	**2.713.351.121,00**	**324.654.407,00**							**2.630.859.988,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**2.388.696.714,00**	**2.006.886.283,00**	**2.713.351.121,00**	**324.654.407,00**							**2.630.859.988,00**	
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.844.365,00	14.680.368,00	44.574.498,00	13.730.133,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.844.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.244.838,00	16.182.230,00	11.182.230,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			6.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			6.100.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				21 orang	21 orang	1.915.650.252,00	1.742.053.109,00	2.385.542.834,00	469.892.582,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh PNS di Koperindag		1.948.850.252,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.905.650.252,00	1.721.722.405,00	2.367.250.476,00	461.600.224,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.905.650.252,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	20.330.704,00	18.292.358,00	13.292.358,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			38.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				1 Orang	1 Orang	7.900.000,00	6.850.000,00	7.110.000,00	-790.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	7.900.000,00	6.850.000,00	7.110.000,00	-790.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Laporan 1 Paket 700 Paket 79 Laporan	-	66.700.000,00	82.826.731,00	56.724.731,00	-9.975.269,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		210.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.700.000,00	33.654.731,00	28.654.731,00	26.954.731,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7000 Paket	7000 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			3.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				180 Laporan	180 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181 Laporan	181 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang*				1 unit	1 unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pengadaan Barang		10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan	2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan	71.000.000,00	26.700.965,00	25.699.657,00	-45.300.343,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.294.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	120 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	11.200.000,00	0,00	0,00	-11.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	58.600.000,00	0,00	0,00	-58.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				11 Unit	11 Unit	38.800.000,00	38.127.000,00	38.127.000,00	-673.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	8 Unit	33.800.000,00	0,00	0,00	-33.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			16.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**30.820.688,00**	**25.016.979,00**	**58.334.850,00**	**34.179.312,00**							**65.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif*				38,89 %	38,89 %	30.820.688,00	25.016.979,00	58.334.850,00	27.514.162,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi		65.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	30.820.688,00	25.016.979,00	58.334.850,00	27.514.162,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			65.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Presentase koperasi/UKM yang di bina**				**72,73 %**	**72,73 %**	**50.116.038,00**	**0,00**	**0,00**	**74.883.962,00**							**125.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				7 unit	-	50.116.038,00	0,00	0,00	-50.116.038,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	UMKM dan Koperasi		125.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	25.116.038,00	0,00	0,00	-25.116.038,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian**				**20,51 %**	**20,51 %**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan*				74,07 %	74,07 %	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Pengurus Koperasi yang ada di Mamuju tengah		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	20 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**				**16,67 %**	**16,67 %**	**25.000.000,00**	**14.156.258,00**	**6.721.978,00**	**15.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan*				10 %	10 %	25.000.000,00	14.156.258,00	6.721.978,00	-18.278.022,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	kelompok UMKM		40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	25.000.000,00	14.156.258,00	6.721.978,00	-18.278.022,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM**				**3,23 %**	**3,23 %**	**55.865.371,00**	**164.830.000,00**	**164.830.000,00**	**60.000.000,00**							**115.865.371,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha*				2,67 %	2,67 %	55.865.371,00	164.830.000,00	164.830.000,00	108.964.629,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Kelompok UMKM		115.865.371,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	55.865.371,00	164.830.000,00	164.830.000,00	108.964.629,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			115.865.371,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**542.756.040,00**	**278.409.717,00**	**822.027.968,00**	**279.271.928,00**							**2.127.529.236,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**324.776.396,00**	**246.246.894,00**	**761.776.814,00**	**437.000.418,00**							**867.470.436,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**2.241.894.617,00**	**1.966.915.379,00**	**2.600.063.400,00**	**447.194.560,00**							**2.689.089.177,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD* *Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				100 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	100 Dokumen 1 Dokumen	135.844.365,00	70.357.574,00	86.859.178,00	-48.985.187,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	perangkat daerah		137.944.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.962.024,00	25.191.990,00	25.191.990,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Laporan 1 Paket 700 Paket 79 Laporan	-	66.700.000,00	82.826.731,00	56.724.731,00	-9.975.269,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		210.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				180 Laporan	180 Laporan	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181 Laporan	181 Laporan	0,00	40.972.000,00	19.870.000,00	19.870.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			184.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan	2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan	71.000.000,00	26.700.965,00	25.699.657,00	-45.300.343,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.294.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	11.100.965,00	10.099.657,00	10.099.657,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			13.094.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			108.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				11 Unit	11 Unit	38.800.000,00	38.127.000,00	38.127.000,00	-673.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	8 Unit	0,00	36.727.000,00	36.727.000,00	36.727.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			44.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN**				**100 %**	**100 %**	**6.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300.000,00**							**15.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan*				100 %	100 %	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	pelaku usaha		15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**				**39,5 %**	**39,5 %**	**176.608.304,00**	**32.006.292,00**	**583.071.428,00**	**84.474.370,00**							**261.082.674,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia*				10 unit	10 unit	15.525.630,00	15.180.000,00	14.060.000,00	-1.465.630,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	pengelolaan sarana distribusi perdagangan		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	15.525.630,00	15.180.000,00	14.060.000,00	-1.465.630,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				926 Unit	926 Unit	161.082.674,00	16.826.292,00	569.011.428,00	407.928.754,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	sarana distribusi perdagangan		211.082.674,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	414.120.876,00	414.120.876,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	161.082.674,00	16.826.292,00	154.890.552,00	-6.192.122,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			161.082.674,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**66.593.202,00**	**22.644.228,00**	**45.160.360,00**	**41.000.000,00**							**107.593.202,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	66.593.202,00	17.692.510,00	42.355.910,00	-24.237.292,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Para pedagang		66.593.202,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	66.593.202,00	17.692.510,00	42.355.910,00	-24.237.292,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			66.593.202,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.951.718,00	2.804.450,00	2.804.450,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	-		41.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				5 Laporan	5 Laporan	0,00	4.951.718,00	2.804.450,00	2.804.450,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			41.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**				**95 %**	**95 %**	**74.874.890,00**	**35.034.385,00**	**17.856.379,00**	**14.825.110,00**							**89.700.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				120 Unit	120 Unit	74.874.890,00	35.034.385,00	17.856.379,00	-57.018.511,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Pelaksana Metrologi		89.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				95 Unit	95 Unit	49.700.000,00	18.149.166,00	9.334.630,00	-40.365.370,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			49.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				2 Orang	2 Orang	25.174.890,00	16.885.219,00	8.521.749,00	-16.653.141,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**217.979.644,00**	**32.162.823,00**	**60.251.154,00**	**-157.728.490,00**							**1.260.058.800,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**2.241.894.617,00**	**1.966.915.379,00**	**2.600.063.400,00**	**447.194.560,00**							**2.689.089.177,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD* *Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				100 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	100 Dokumen 1 Dokumen	135.844.365,00	70.357.574,00	86.859.178,00	-48.985.187,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	perangkat daerah		137.944.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	3.564.396,00	455.230,00	-29.544.770,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	3.905.948,00	455.230,00	-29.544.770,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten**				**2,91 %**	**2,91 %**	**80.970.039,00**	**0,00**	**0,00**	**749.088.761,00**							**830.058.800,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.970.039,00	0,00	0,00	-80.970.039,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Pelaku Usaha industri Kecil Menengah		830.058.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			55.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			600.058.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	45.970.039,00	0,00	0,00	-45.970.039,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**undefined undefined**	**-**	**77.009.605,00**	**24.692.479,00**	**59.340.694,00**	**292.990.395,00**							**370.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				1 Dokumen undefined undefined	-	77.009.605,00	24.692.479,00	59.340.694,00	-17.668.911,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	PELAKU USAHA		370.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	44.218.786,00	24.692.479,00	59.340.694,00	15.121.908,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			120.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	32.790.819,00	0,00	0,00	-32.790.819,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			190.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								**2.931.452.754,00**	**2.285.296.000,00**	**3.535.379.089,00**	**603.926.335,00**							**4.758.389.224,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Koperasi UKM Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 adalah sebagai "pengarah" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 dapat dilihat dalam table 4.1 di bawah ini :

TABEL 4.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**2.931.452.754,00**	**2.285.296.000,00**	**3.535.379.089,00**	**603.926.335,00**							**4.758.389.224,00**	
	2	**NON URUSAN**							**2.388.696.714,00**	**2.006.886.283,00**	**2.713.351.121,00**	**324.654.407,00**							**2.630.859.988,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.388.696.714,00**	**2.006.886.283,00**	**2.713.351.121,00**	**324.654.407,00**							**2.630.859.988,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**2.241.894.617,00**	**1.966.915.379,00**	**2.600.063.400,00**	**447.194.560,00**							**2.689.089.177,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD* *Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				100 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	100 Dokumen 1 Dokumen	135.844.365,00	70.357.574,00	86.859.178,00	-48.985.187,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	perangkat daerah		137.944.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.388.696.714,00**	**2.006.886.283,00**	**2.713.351.121,00**	**324.654.407,00**							**2.630.859.988,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**2.388.696.714,00**	**2.006.886.283,00**	**2.713.351.121,00**	**324.654.407,00**							**2.630.859.988,00**	
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.844.365,00	14.680.368,00	44.574.498,00	13.730.133,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.844.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.244.838,00	16.182.230,00	11.182.230,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			6.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			6.100.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				21 orang	21 orang	1.915.650.252,00	1.742.053.109,00	2.385.542.834,00	469.892.582,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh PNS di Koperindag		1.948.850.252,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.905.650.252,00	1.721.722.405,00	2.367.250.476,00	461.600.224,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.905.650.252,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	20.330.704,00	18.292.358,00	13.292.358,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			38.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				1 Orang	1 Orang	7.900.000,00	6.850.000,00	7.110.000,00	-790.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	7.900.000,00	6.850.000,00	7.110.000,00	-790.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Laporan 1 Paket 700 Paket 79 Laporan	-	66.700.000,00	82.826.731,00	56.724.731,00	-9.975.269,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		210.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.700.000,00	33.654.731,00	28.654.731,00	26.954.731,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7000 Paket	7000 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			3.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				180 Laporan	180 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181 Laporan	181 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang*				1 unit	1 unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pengadaan Barang		10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan	2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan	71.000.000,00	26.700.965,00	25.699.657,00	-45.300.343,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.294.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	120 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	11.200.000,00	0,00	0,00	-11.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	58.600.000,00	0,00	0,00	-58.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				11 Unit	11 Unit	38.800.000,00	38.127.000,00	38.127.000,00	-673.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	8 Unit	33.800.000,00	0,00	0,00	-33.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			16.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**30.820.688,00**	**25.016.979,00**	**58.334.850,00**	**34.179.312,00**							**65.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi sehat dari total koperasi aktif*				38,89 %	38,89 %	30.820.688,00	25.016.979,00	58.334.850,00	27.514.162,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi		65.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	30.820.688,00	25.016.979,00	58.334.850,00	27.514.162,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			65.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Presentase koperasi/UKM yang di bina**				**72,73 %**	**72,73 %**	**50.116.038,00**	**0,00**	**0,00**	**74.883.962,00**							**125.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				7 unit	-	50.116.038,00	0,00	0,00	-50.116.038,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	UMKM dan Koperasi		125.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	25.116.038,00	0,00	0,00	-25.116.038,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase pengelolah Koperasi yang berkompeten dalam manajemen perkoperasian**				**20,51 %**	**20,51 %**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan*				74,07 %	74,07 %	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Pengurus Koperasi yang ada di Mamuju tengah		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	20 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**				**16,67 %**	**16,67 %**	**25.000.000,00**	**14.156.258,00**	**6.721.978,00**	**15.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan*				10 %	10 %	25.000.000,00	14.156.258,00	6.721.978,00	-18.278.022,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	kelompok UMKM		40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	25.000.000,00	14.156.258,00	6.721.978,00	-18.278.022,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumlah usaha kecil dan menenga dari total UMKM**				**3,23 %**	**3,23 %**	**55.865.371,00**	**164.830.000,00**	**164.830.000,00**	**60.000.000,00**							**115.865.371,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha*				2,67 %	2,67 %	55.865.371,00	164.830.000,00	164.830.000,00	108.964.629,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Kelompok UMKM		115.865.371,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	55.865.371,00	164.830.000,00	164.830.000,00	108.964.629,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			115.865.371,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**542.756.040,00**	**278.409.717,00**	**822.027.968,00**	**279.271.928,00**							**2.127.529.236,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**324.776.396,00**	**246.246.894,00**	**761.776.814,00**	**437.000.418,00**							**867.470.436,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**2.241.894.617,00**	**1.966.915.379,00**	**2.600.063.400,00**	**447.194.560,00**							**2.689.089.177,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD* *Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				100 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	100 Dokumen 1 Dokumen	135.844.365,00	70.357.574,00	86.859.178,00	-48.985.187,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	perangkat daerah		137.944.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.962.024,00	25.191.990,00	25.191.990,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Laporan 1 Paket 700 Paket 79 Laporan	-	66.700.000,00	82.826.731,00	56.724.731,00	-9.975.269,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		210.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				180 Laporan	180 Laporan	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181 Laporan	181 Laporan	0,00	40.972.000,00	19.870.000,00	19.870.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			184.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan	2 LLaporan 7 Laporan 90 Laporan	71.000.000,00	26.700.965,00	25.699.657,00	-45.300.343,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.294.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	11.100.965,00	10.099.657,00	10.099.657,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			13.094.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			108.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				11 Unit	11 Unit	38.800.000,00	38.127.000,00	38.127.000,00	-673.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	8 Unit	0,00	36.727.000,00	36.727.000,00	36.727.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			44.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERTSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SEUSAI DENGAN KETENTUAN**				**100 %**	**100 %**	**6.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300.000,00**							**15.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan*				100 %	100 %	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	pelaku usaha		15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**				**39,5 %**	**39,5 %**	**176.608.304,00**	**32.006.292,00**	**583.071.428,00**	**84.474.370,00**							**261.082.674,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia*				10 unit	10 unit	15.525.630,00	15.180.000,00	14.060.000,00	-1.465.630,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	pengelolaan sarana distribusi perdagangan		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	15.525.630,00	15.180.000,00	14.060.000,00	-1.465.630,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				926 Unit	926 Unit	161.082.674,00	16.826.292,00	569.011.428,00	407.928.754,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	sarana distribusi perdagangan		211.082.674,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	414.120.876,00	414.120.876,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	161.082.674,00	16.826.292,00	154.890.552,00	-6.192.122,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			161.082.674,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**66.593.202,00**	**22.644.228,00**	**45.160.360,00**	**41.000.000,00**							**107.593.202,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	66.593.202,00	17.692.510,00	42.355.910,00	-24.237.292,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Para pedagang		66.593.202,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	66.593.202,00	17.692.510,00	42.355.910,00	-24.237.292,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			66.593.202,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.951.718,00	2.804.450,00	2.804.450,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	-		41.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				5 Laporan	5 Laporan	0,00	4.951.718,00	2.804.450,00	2.804.450,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			41.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**				**95 %**	**95 %**	**74.874.890,00**	**35.034.385,00**	**17.856.379,00**	**14.825.110,00**							**89.700.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				120 Unit	120 Unit	74.874.890,00	35.034.385,00	17.856.379,00	-57.018.511,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Pelaksana Metrologi		89.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				95 Unit	95 Unit	49.700.000,00	18.149.166,00	9.334.630,00	-40.365.370,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			49.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				2 Orang	2 Orang	25.174.890,00	16.885.219,00	8.521.749,00	-16.653.141,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**217.979.644,00**	**32.162.823,00**	**60.251.154,00**	**-157.728.490,00**							**1.260.058.800,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**2.241.894.617,00**	**1.966.915.379,00**	**2.600.063.400,00**	**447.194.560,00**							**2.689.089.177,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD* *Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD* *Jumlah Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				100 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	100 Dokumen 1 Dokumen	135.844.365,00	70.357.574,00	86.859.178,00	-48.985.187,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	perangkat daerah		137.944.365,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	3.564.396,00	455.230,00	-29.544.770,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	3.905.948,00	455.230,00	-29.544.770,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengeah di Kabupaten**				**2,91 %**	**2,91 %**	**80.970.039,00**	**0,00**	**0,00**	**749.088.761,00**							**830.058.800,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.970.039,00	0,00	0,00	-80.970.039,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	Pelaku Usaha industri Kecil Menengah		830.058.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			55.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			600.058.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	45.970.039,00	0,00	0,00	-45.970.039,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**undefined undefined**	**-**	**77.009.605,00**	**24.692.479,00**	**59.340.694,00**	**292.990.395,00**							**370.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				1 Dokumen undefined undefined	-	77.009.605,00	24.692.479,00	59.340.694,00	-17.668.911,00			-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah	PELAKU USAHA		370.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	44.218.786,00	24.692.479,00	59.340.694,00	15.121.908,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			120.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	32.790.819,00	0,00	0,00	-32.790.819,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah			190.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								**2.931.452.754,00**	**2.285.296.000,00**	**3.535.379.089,00**	**603.926.335,00**							**4.758.389.224,00**	

BAB V
PENUTUP

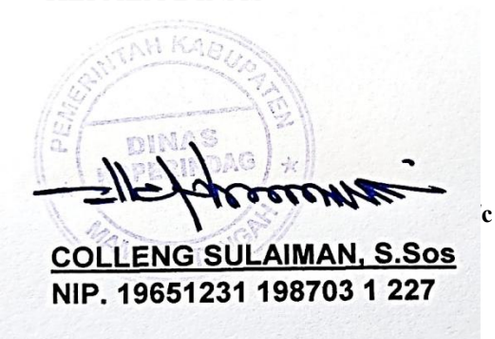
Renja atau Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian, Perdagangan Tahun 2021-2026 berdasarkan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berisi tentang rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan tujuannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM ,Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 mengacu pada usulan dari Desa/Kecamatan, pokok-pokok pikiran, prioritas kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, dan pagu indikatif. Secara keseluruhan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2023 akan dibiayai dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 4.366.689.251,00 ,- (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 13 (empat belas) program yang dijabarkan kedalam 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 49 (empat puluh dua) sub kegiatan.

Keberhasilan pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, industri, perdagangan maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan khususnya ekonomi kerakyatan merupakan prioritas yang sangat vital dalam mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2023.

KEPALA DINAS



COLLENG SULAIMAN, S.Sos
NIP. 19651231 198703 1 227

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

DINAS PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Jl. M. Saleh, Kompleks KSM Dsn Lomba Bou Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini.

Tobadak, Juli 2025

Plt. **Kepala Dinas**

H. BAHRI, S. IP., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19710822 199303 1 007

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR 2

BAB I. PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 12

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36

BAB IV. PENUTUP 46

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui perencanaan yang baik, diharapkan tujuan pembangunan yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan mengacu kepada RKPD Perubahan. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Kerja Perubahan menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja Kerja Perubahan menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Kerja Perubahan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Kerja Perubahan mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Rancangan Renja Kerja Perubahan OPD dibahas pada forum OPD, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi

pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Proses penyusunan Renja Kerja Perubahan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Kerja Perubahan SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Kerja Perubahan SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja Kerja Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Kerja Perubahan SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra OPD Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dibidang urusan Kelautan dan Perikanan.

Renja Kerja Perubahan Dinas Perubahan tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2025. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perikanan dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya Masyarakat yang bergerak di bidang Kelautan dan Perikanan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Kerja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kerja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah Periode 2025 diarahkan sebagai perwujudan visi misi pemerintah daerah periode 2021-2025 yang telah memasuki tahun ketiga dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal terarah dan berkelanjutan.

Subtansi dan muatan Renja Kerja Perubahan OPD, meliputi : (1). Program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, (2). Lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/Kel. atau kecamatan, (3). Indikator Kinerja yang terdiri dari kinerja Program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang akan dicapai dari program dan indicator kinerja Kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. (4). Kelompok Sasaran yang memuat penjelasan terhadap karateristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok

masyarakat yang rentan termarginalkan (5). Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja Kerja Perubahan OPD disusun melalui tahapan sebagai berikut ; (1) Persiapan penyusunan Renja Kerja Perubahan OPD, (2) Penyusunan rancangan Renja Kerja Perubahan OPD, (3) Pelaksanaan forum OPD dan (4). Pentapan Renja Kerja Perubahan OPD. Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2021 - 2025 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, Renstra OPD Dinas Perikanan agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomer 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah nomer 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota, pengelolaan dan

penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
16. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Bupati Mamuju Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kerja Perubahan Perubahan Dinas Perikanan tahun 2025 adalah untuk menjabarkan RKPD Perubahan 2025 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten

Mamuju Tengah Tahun 2021-2025 terutama yang terkait dengan urusan penunjang, yakni perencanaan kebijakan pembangunan yang secara umum. Untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kab. Mamuju Tengah, sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah, sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD 2025 dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Penyusunan Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah tahun 2024 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Tengah yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Tengah dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan.

Bab II merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja Kerja Perubahan OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kerja Perubahan OPD. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III merupakan penjelasan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari: Telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahan terhadap kebijakan provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Kerja Perubahan, Program dan Kegiatan.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari Penjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Sampai triwulan II tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaanya serta organisasi pelaksananya.

Penyusunan Renja Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah -masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kerja Perubahan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/dTriwulan II Tahun 2025
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)	
1	2	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatknya Produksi Perikanan Budidaya		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	2	21.376.126.701	2	2.551.889.784	2	862.238.359						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase penigkatan produksi perikanan budidaya (%)	100,00	21.376.126.701	0,00	2.551.889.784	100,00	862.238.359	0,00	91,153,000				
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibina atau diberdayakan (%)	100	340.000.000	33,33	730.109.100	28	0	0,00%	0	33,33%	730.109.100	**119,05 %**	**214,74%**

		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30	310.000.000	10	626.449.100	0	0	0	0	10	626.449.100	**33,33%**	**202,08%**
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6	30.000.000	2	103.660.000	0	0	0	0	2	103.660.000	**33,33%**	**345,53%**
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan (%)	100	21.036.126.701	23,97	1.821.780.684	23	862.238.359	0,00%	91,153,000	33,10%	1.912.933.684	**143,89%**	**9,09%**
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	9.820.532.847	6	533.101.084	11	195.922.860	5	61.250.000	11	594.351.084	**18,33%**	**6,05%**

		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	105	10.485.762.503	10	1.052.292.400	6	598.968.610	1	15.400.000	11	1.067.692.400	**10,48%**	**10,18%**
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	210	729.831.351	110	236.387.200	70	67.346.889	38	14.503.000	148	250.890.200	**70,48%**	**34,38%**
2	Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap		Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap (%)	0,8	6.172.835.105	0,7	880.336.010	0,8	191.108.174						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	100,00	6.172.835.105	0,00	880.336.010	100,00	191.108.174	0,00	16,914,500				

		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya (%)	100	4.377.835.105	5,71	301.449.000	15	0	0,00%	0	5,71%	301.449.000	**38,10%**	**6,89%**
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	105	4.377.835.105	6	301.449.000	0	0	0	0	6	301.449.000	**5,71%**	**6,89%**
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan (%)	100	1.795.000.000	15,73	578.887.010	27	191.108.174	0,00%	16,914,500	29,10%	595.801.510	**107,78%**	**33,19%**
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	445	1.195.000.000	140	578.887.010	70	46.831.674	30	11.814.500	170	590.701.510	**38,20%**	**49,43%**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10	600.000.000	0	0	5	144.276.500	2	5.100.000	2	5.100.000	**20,00%**	**0,85%**

3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan		Capaian Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) (Kg/Kapita/Tahun)	63,42	3.146.811.361	64,94	142.226.990	63,1	147.864.887						
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan (%)	100,00	3.146.811.361	0,00	142.226.990	100,00	147.864.887	0,00	15,759,500				
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan binaan (%)	100	1.104.809.000	17,24	26.363.890	23	39.354.900	0,00%	15,759,500	20,69%	42.123.390	**89,96%**	**3,81%**

		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	29	1.104.809.000	5	26.363.890	2	39.354.900	1	15.759.500	6	42.123.390	**20,69%**	**3,81%**
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Menyiapkan Ketersediaan Ikan Konsumsi dan Bahan Baku Industri Perikanan (%)	100	2.042.002.361	17,72	115.863.100	28	108.509.987	0,00%	0	24,16%	115.863.100	**85,79%**	**5,67%**
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.680	550.000.000	936	63.919.500	950	48.509.987	474	0	1.410	63.919.500	**38,32%**	**11,62%**

		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20	1.492.002.361	2	51.943.600	3	60.000.000	0	0	2	51.943.600	**10,00%**	**3,48%**
4	Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan		Nilai Sakip Perangkat Daerah (%)	100	13.427.500.000	100	2.205.369.780	100	2.484.011.383						
			Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas Perikanan (%)	0		0		0							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	13.427.500.000	0,00	2.205.369.780	100,00	2.484.011.383	0,00	1,118,799,598				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran (%)	99	1.430.000.000	20,00	39.102.500	100	38.175.387	80,00%	11,100,000	26,11%	50.202.500	**26,11%**	**3,51%**

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	250.000.000	2	20.318.000	2	23.838.124	1	7.500.000	3	27.818.000	**30,00%**	**11,13%**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	175.000.000	1	4.015.000	1	1.018.289	0	0	1	4.015.000	**20,00%**	**2,29%**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	150.000.000	1	3.884.000	1	1.587.829	0	0	1	3.884.000	**20,00%**	**2,59%**
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	100.000.000	1	1.870.000	1	1.338.354	1	600.000	2	2.470.000	**40,00%**	**2,47%**

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	100.000.000	1	1.175.000	1	1.583.737	0	0	1	1.175.000	**20,00%**	**1,18%**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	655.000.000	3	7.840.500	3	8.809.054	1	3.000.000	4	10.840.500	**26,67%**	**1,66%**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	100	8.475.000.000	20,00	1.639.802.072	100	2.033.424.792	40,00%	887,686,985	30,00%	2.527.489.057	**30,00%**	**29,82%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	7.900.000.000	12	1.603.350.072	12	2.001.041.701	3	875.228.985	15	2.478.579.057	**25,00%**	**31,37%**

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	250.000.000	1	3.438.000	1	1.719.481	1	0	2	3.438.000	**40,00%**	**1,38%**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20	325.000.000	4	33.014.000	4	30.663.610	1	12.458.000	5	45.472.000	**25,00%**	**13,99%**
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100	100.000.000	20,00	3.900.000	100	4.008.725	40,00%	0	20,00%	3.900.000	**20,00%**	**3,90%**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	100.000.000	1	3.900.000	1	4.008.725	0	0	1	3.900.000	**20,00%**	**3,90%**

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100	300.000.000	20,00	29.968.500	100	29.289.743	0,00%	14,322,000	22,50%	44.290.500	**22,50%**	**14,76%**
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	100.000.000	4	4.998.500	4	5.499.743	1	592.000	5	5.590.500	**25,00%**	**5,59%**
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	200.000.000	4	24.970.000	4	23.790.000	0	13.730.000	4	38.700.000	**20,00%**	**19,35%**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100	640.000.000	67,07	215.256.449	100	80.442.731	0,00%	45,635,444	82,07%	260.891.893	**82,07%**	**40,76%**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	250.000.000	6	57.580.000	2	12.545.500	0	0	6	57.580.000	**12,00%**	**23,03%**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	125	75.000.000	12	7.111.250	12	4.250.000	0	1.375.000	12	8.486.250	**9,60%**	**11,32%**
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	75.000.000	4	5.219.000	12	6.089.828	0	2.500.000	4	7.719.000	**6,67%**	**10,29%**

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	240.000.000	12	145.346.199	12	57.557.403	3	41.760.444	15	187.106.643	**300,00 %**	**77,96%**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	1.925.000.000	11,43	175.145.659	100	186.693.049	0,00%	119,155,169	22,86%	294.300.828	**22,86%**	**15,29%**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	750.000.000	1	95.990.490	1	96.000.000	1	40.000.000	2	135.990.490	**28,57%**	**18,13%**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	175.000.000	0	0	3	8.550.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	1.000.000.000	1	79.155.169	1	82.143.049	1	79.155.169	2	158.310.338	**40,00%**	**15,83%**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)	100	532.500.000	21,04	101.650.000	100	111.101.956	0,00%	40,900,000	30,74%	142.550.000	**30,74%**	**26,77%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73	37.500.000	12	1.020.000	12	701.804	3	150.000	15	1.170.000	**20,55%**	**3,12%**

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	150.000.000	12	18.080.000	12	21.600.152	3	7.250.000	15	25.330.000	**25,00%**	**16,89%**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	345.000.000	4	82.550.000	12	88.800.000	3	33.500.000	7	116.050.000	**46,67%**	**33,64%**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	100	25.000.000	20,00	545	100	875	0,00%	0	20,00%	545	**20,00%**	**2,18%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	25.000.000	4	544.600	5	875.000	0	0	4	544.600	**20,00%**	**2,18%**

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 telah dilaksanakan hingga triwulan II, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi terget kinerja antara lain:
   - Penyediaan Gedung Kantor
   - Pendampingan kegiatan kenelayanan
   - Pendampingan Kegiatan Pembudidayaan Ikan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai saat ini belum ada
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja. Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target dari beberapa program/kegiatan pada tahun berjalan, tahun 2025 disebabkan karena pengaturan anggaran kas yang pelaksanaan atau realisasinya pada periode semester I tahun berjalan, sehingga program/kegiatan belum dapat direalisasikan dan mencapai target yang diharapkan. Sedangkan program/kegiatan yang telah memenuhi target yang diharapkan penyebabnya adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja serta kerjasama yang baik dan pemahaman tugas dari setiap Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Perikanan sehingga kerja dapat diraih sesuai harapan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Adapun implikasi yang timbul dari program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah berupa adanya peningkatan dedikasi sumber daya aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah.
6. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah:
   - Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
   - Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada terwujudnya Pembangunan Masyarakat Pembudidaya, Tangkap, dan Pesisir yang berdaya saing dan Berkepribadian.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perikanan dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolak ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perikanan, seperti kebutuhan bibit ikan, kebutuhan ikan konsumsi, kebutuhan ikan hasil olahan, serta menjaga kualitas benih, kualitas ikan konsumsi segar, serta kualitas ikan olahan. Disamping itu, kinerja pelayanan juga diprioritaskan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Hal-hal tersebut akan diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah dengan menggunakan prinsip-prinsip tata Pemerintah yang baik.

Tabel 2.2. berikut merupakan analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kab Mamuju Tengah :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perikanan

Kabupaten Mamuju Tengah

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	0	20	20	25	25	30	37	26	25	25	
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-	0	0	0	0	100	100	-	-	0	100	
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	-	-	4	6	8	10	12	-	8	8	10	
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	-	51	55	60	65	70	75	70	62	65	70	
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi (Ekor)	-	-	200.000	300.000	350.000	400.000	500.000	235.000	500.000	350.000	400.000	

Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi:

a. Koordinasi yang masih parsial, sehingga menghambat dalam proses pelayan publik
b. Koordinasi dengan SKPD lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal
c. Tingkat pemahaman aparatur pelaksana pelayanan terhadap tugas dan fungsinya belum maksimal
d. Kurangnya Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas yang diberikan
e. Kepedulian dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas belum terwujud dengan baik
f. Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, capaian program nasional maka tugas dan fungsi Dinas Perikanan yaitu merumuskan kebijakan teknis mengenai Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa kendala diantaranya:

1. Terbatasnya kewenangan daerah dalam urusan pengelolaan ruang laut terkait penangkapan ikan dan pengawasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir
2. Terbatasnya penyuluhan, pembinaan dan pengawasan perikanan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah
3. Belum adanya master plan dan zonasi pembangunan perikanan
4. Belum terkelolanya secara maksimal pemanfaatan dan Pelaku usaha perikanan perairan Darat
5. Kenaikan harga pakan ikan dan pupuk mengakibatkan biaya operasional usaha budidaya ikan semakin tinggi dan mengurangi keuntungan usaha karena ketergantungan terhadap pakan jadi masih cukup tinggi;
6. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul;
7. Terbatasnya akses dalam pelayanan izin usaha perikanan
8. Belum adanya tempat pelelangan ikan dan pelabuhan perikanan
9. Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang olahan hasil Perikanan untuk konsumsi;
10. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan;

11. Belum terlaksananya standar kelayakan mutu Pengolahan perikanan;
12. Belum adanya Kerjasama akses permodalan dari Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar;
13. Rendahnya fasilitasi pemasaran ikan yang mendukung stabilitas harga ikan.
14. Ketersediaan Ikan Konsumsi yang masih terbatas
15. Belum adanya Penjaminan Mutu dan Keamanan ikan konsumsi yang masuk ke wilayah Mamuju Tengah
16. Belum adanya peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ikan Non Konsumsi (Ikan Hias dan Kerajinan Tangan.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, yaitu:

a. Perlunya kajian pengelolaan lingkungan pendukung sumber daya perikanan
b. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui pemberdayaan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review/telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cacatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Langsung					Belanja Langsung					
A	Kegiatan Rutin	DISKAN Mateng				Kegiatan Rutin	DISKAN Mateng				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100.0%**	**2.021.678.362,08**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100.0%**	2.021.678.362, 08	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	45.630.620	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	45.630.620	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKAN Mateng	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	24.963.124	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKAN Mateng	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	24.963.124	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen RKA-Perangkat Daerah	1	3.047.711	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen RKA-Perangkat Daerah	1	3.047.711	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1	2.637.829	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1	2.637.829	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen DPA-PD	1	1.858.354	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen DPA-PD	1	1.858.354	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1	2.473.448	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1	2.473.448	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3	10.650.154	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	3	10.650.154	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DISKAN Mateng**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	1.580.101.350,08	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DISKAN Mateng**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	1.580.101.350, 08	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKAN Mateng	Jumlah ASN	12	1.546.720.892,08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKAN Mateng	Jumlah ASN	12	1.546.720.892,08	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1	2.375.748	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1	2.375.748	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4	31.004.710	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4	31.004.710	
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	4.008.725	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	4.008.725	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	1	4.008.725	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Laporan BMD-PD	1	4.008.725	
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	33.753.231	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	33.753.231	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	6.353.231	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DISKAN Mateng	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	6.353.231	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISKAN Mateng	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan (Orang)	4	27.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISKAN Mateng	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan (Orang)	4	27.400.000	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	120.714.431	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DISKAN Mateng	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	120.714.431	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKAN Mateng	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	12.545.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKAN Mateng	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	12.545.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISKAN Mateng	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	12	6.875.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISKAN Mateng	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	12	6.875.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISKAN Mateng	Jumlah tamu yang difasilitasi	12	6.089.828	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISKAN Mateng	Jumlah tamu yang difasilitasi	12	6.089.828	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	95.204.103	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKAN Mateng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	95.204.103	
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	1	186.693.049	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	1	186.693.049	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	100%	96.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	100%	96.000.000	

	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	1	8.550.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	1	8.550.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	82.143.049	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	82.143.049	
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	1	49.901.956	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	1	49.901.956	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat	100%	701.804	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat	100%	701.804	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	1	21.600.152	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	1	21.600.152	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2	27.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2	27.600.000	
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	1	875.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	1	875.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	**100%**	**875.000**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	**100%**	**875.000**	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap**	**80.00%**	**848,523,333**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap**	**80.00%**	**848,523,333**	
2.1	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan**	**60%**	**41.170.174**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan**	**60%**	**41.170.174**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50	17.261.674	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50	17.261.674	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0	23.908.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0	23.908.500	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**80.0%**	**131.981.815**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**80.0%**	**131.981.815**	
‘ 3.1	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**45%**	**1,022,826,504**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**45%**	**1,022,826,504**	

	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	100.002.910	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	100.002.910	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	16.040.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	16.040.000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50	15.938.905	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50	15.938.905	
4	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan**	**80%**	**45.178.737**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan**	**80%**	**45.178.737**	
4.1	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan**	**65%**	**15.214.250**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Mamuju Tengah**	**Persentase peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan**	**65%**	**15.214.250**	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2	15.214.250	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2	15.214.250	
4.2	**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Kab. Mamuju Tengah	**Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan**	**65%**	**71,136,126**	**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Kab. Mamuju Tengah	**Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan**	**65%**	**71,136,126**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan (Ton)	1000	9.964.487	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan (Ton)	1000	9.964.487	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2	20.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2	20.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan, Dinas Perikanan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para stakholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Perikanan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan Button Up lainnya seperti permohonan dan Proposal Langsung oleh kelompok Binaan mupun progrm kegiatan yang menjadi program unggulan dari dinas perikanan sendiri (Top down).

Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan acara forum OPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari Bottom up maupun Top down. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritaskan berdasarkan tingkat ketergesaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu Dinas Perikanan juga secara aktif melakukan koordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relevan terhadap pembangunan perikanan Kabupaten Mamuju Tengah.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel T-C.32 untuk usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2025 berikut ini:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
	Pengadaan Bibit ikan Pokdakan Sumber Rezeki Desa Polo Camba Kec. Pangale	Desa Polo Camba Kec. Pangale			
2	**Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
	Pengadaan Pakan Ikan	Mamuju Tengah			
3	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala**		**Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)**		
	Pengadaan Alat Tangkap KUB BATU PUTIH Desa Babana	Desa Babana			
	Pengadaan Alat Tangkap KUB SINAR MENTARI Dusun Lemba Utara Desa Lumu	Desa Lumu			

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berdasarkan Kebijakan Prioritas Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan, Pada Tahun 2025 Dinas Perikanan Melaksanakan Program dan Kegiatan Prioritas yang telah diamanatkan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025.

Rencana Kerja sangat terkait dengan sebuah penganggaran, karena Rencana Kerja yang berisikan program dan kegiatan pembangunan akan dapat dilaksanakan dan menjadi manfaat apabila didukung oleh pendanaan yang telah direncanakan pula. Berikut adalah rencana program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN (*SUBOUTPUT*)	TARGET			PAGU			KET.
		MENJADI	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	*2*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	2.000.582.862, 08	2.000.582.862, 08	**2.484.011.383, 14**	
		KEGIATAN 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	45.630.620	45.630.620	38.175.387	
		SUBKEGIATAN								
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	24.963.124	24.963.124	23.838.124,	
		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.047.711	3.047.711	1.018.289	

		1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.637.829	2.637.829	1.587.829	
		1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.858.354	1.858.354	1.338.354	
		1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.473.448	2.473.448	1.583.737	
		1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.650.154	10.650.154	8.809.054	
		KEGIATAN 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.580.101.350, 08**	**1.580.101.350, 08**	**2.033.424.792, 14**	
		SUBKEGIATAN								
		1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.546.720.892, 08	1.546.720.892, 08	2.001.041.701, 14	
		1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.375.748	2.375.748	1.719.481	

		1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	31.004.710	31.004.710	30.663.610	
		KEGIATAN 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**4.008.725**	**4.008.725**	**4.008.725**	
		SUBKEGIATAN								
		1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.008.725	4.008.725	4.008.725	
		KEGIATAN 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**33.753.231**	**33.753.231**	**29.289.743**	
		SUBKEGIATAN								
		1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.353.231	6.353.231	5.499.743	
		1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	4 Orang	23.790.000	23.790.000	23.790.000	

		KEGIATAN 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**120.714.431**	**120.714.431**	**80.442.731**	
		SUB KEGIATAN								
		1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4 Paket	12.545.500	12.545.500	12.545.500	
		1.5.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.875.000	6.875.000	4.250.000	
		1.5.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6.089.828	6.089.828	6.089.828	
		1.5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95.204.103	95.204.103	57.557.403	
		KEGIATAN 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**186.693.049**	**186.693.049**	**186.693.049**	
		SUBKEGIATAN								
		1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	96.000.000	96.000.000	96.000.000	
		1.6.2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	2 Unit	8.550.000	8.550.000	8.550.000	

		1.6.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	82.143.049	82.143.049	82.143.049	
		KEGIATAN 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**49.901.956**	**49.901.956**	**111.101.956**	
		SUBKEGIATAN								
		1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	701.804,00	701.804,00	701.804,00	
		1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.600.152	21.600.152	21.600.152	
		1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	27.600.000	27.600.000	88.800.000	
		KEGIATAN 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**875.000**	**875.000**	**875.000**	
		SUBKEGIATAN								
		1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	4 Unit	875.000	875.000	875.000	

		2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap**	**80%**	**80%**	**80%**	**41.170.174**	**41.170.174**	**191.108.174**	
		KEGIATAN 2.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan**	**70%**	**70%**	**70%**	**41.170.174**	**41.170.174**	**191.108.174**	
		SUBKEGIATAN								
		2.2.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	35 Orang	70 Orang	17.261.674	17.261.674	46.831.674	
		2.2.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	5 Unit	2 Unit	6 Unit	23.908.500	23.908.500	144.276.500	
		3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**80%**	**80%**	**80%**	**129.381.815**	**129.381.815**	**862.238.359**	
		KEGIATAN 3.1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Persentase peningkatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**45%**	**45%**	**45%**	**129.381.815**	**129.381.815**	**862.238.359**	
		SUBKEGIATAN								
		3.2.1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100.002.910	100.002.910	195.922.860	

		3.2.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	6 Unit	16.040.000	16.040.000	598.968.610	
		3.2.3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	70 Orang	70 Orang	70 Orang	15.938.905	15.938.905	67.346.889	
		4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase Peningkatan Hasil Produksi Olahan Perikanan dan Pemasaran Perikanan**	**80%**	**80%**	**80%**	**45.178.737**	**45.178.737**	**147.864.887**	
		KEGIATAN 4.1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Persentase Usaha Pengolahana Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Tanda Daftar Usaha**	**65%**	**65%**	**65%**	**15.214.250**	**15.214.250**	**39.354.900**	
		SUBKEGIATAN								
		4.1.1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	15.214.250	15.214.250	39.354.900	

		KEGIATAN 4.2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan binaan**	**65%**	**65%**	**65%**	**29.964.487**	**29.964.487**	**108.509.987**	
		SUBKEGIATAN								
		4.2.1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1000 Ton	1000 Ton	1000 Ton	9.964.487	9.964.487	48.509.987	
		4.2.2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	20.000.00	20.000.00	60.000.00	

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja Kerja Perubahan) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Perencanaan Sektor Perikanan serta sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah adalah Program Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah serta Visi, Misi Pembangunan nasional dan pemerintah daerah kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Kerja (RENJA KERJA PERUBAHAN) Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA KERJA

PERUBAHAN juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Mamuju Tengah. RENJA KERJA PERUBAHAN juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan kabupaten Mamuju Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Mamuju Tengah, Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Perikanan

H. BAHRI,. S. IP., MM
NIP: 19710822 199303 1 007

RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN

MAMUJU TENGAH

TAHUN ANGGARAN

2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah *subhanawata'ala* atas limpahan rahmatNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Penyusunan dokumen Renja OPD merupakan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengamati pelaksanaan program dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Dalam penyusunan dokumen Renja ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan sehingga kami berharap adanya saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penyusunan tahun berikutnya.

Semoga dokumen Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Topoyo, Juni 2024

KEPALA DINAS,

PAISAL ANWAR, S.S.,M.A.P
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/IV.b
NIP: 19810822 200901 1 007

RENCANA KERJA i

..... i

PEMERINTAH KABUPATEN..... i

KATA PENGANTAR ii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II..... 8

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah..... 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 48

BAB III 54

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 54

BAB IV 79

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 79

BAB V..... 93

PENUTUP..... 93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 dimana pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional serta RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. RKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari dokumen pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Pada tahun ini Kabupaten Mamuju Tengah mengusung Tema RKPD yaitu “Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Didukung dengan Ketentraman dan Ketertiban”. Tema pembangunan tahun 2025 berpedoman pada RPJMD dimana arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 yaitu “Pemantapan Infrastruktur Dasar untuk Penguatan Perekonomian Rakyat

Berbasis Agribisnis-Agropolitan Didukung Pemeliharaan Ketertiban dan Ketenteraman". Melihat dari evaluasi pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya maka didapatkan beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan di Mamuju Tengah yang meliputi: meningkatkanya angka kemiskinan dan stunting, meningkatkanya inflasi, belum optimalnya ketersediaan infrastruktur, masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas, masih rendanya penilaian pelayanan publik, pelaksanaan pemilihan umum, rencana pemindahan Ibu Kota Negara, pelaksanaan Pekan Olahrga Provinsi, serta pengelolaan lingkungan dan bencana alam. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis tersebut maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun 2025 meliputi: 1) Mendorong Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah, 2) Memantapakan Infrastruktur Dasar, 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 4) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, 5) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif. Serangkaian tahapan telah dilakukan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tengah dimulai dari tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan mustawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir RKPD dan sampai pada tahapan penetapan RKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah menjadi sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah di Mamuju Tengah tahun 2025 yang selanjutnya akan menjadi bahan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 serta APBD tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 disusun dan disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah diantaranya sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
7) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Implementasinya;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabuparen;
10) Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
17) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang penetapan hasil pemetaan dan pedoman organisasi perangkap daerah bidang pertanahan;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021- 2026.
23) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
24) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Bupati Mamuju Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah:

1) Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran atau dana untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah selama satu tahun;
2) Sebagai arahan sekaligus tolok ukur kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun tujuannya adalah:

1) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

2) Menciptakan kepastian dalam perencanaan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;
3) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, yang mengimplementasikan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sitematika sebagai berikut:

Bab – I : Pendahuluan

Bab ini memuat : Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab – II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab – III : Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah;

3.3. Program dan Kegiatan.

Bab – IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab – V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah yang pada Tahun 2023, disimpulkan bahwa semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena dasar basis data yang digunakan menyesuaikan kebutuhan pemangku kebijakan. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Sedangkan untuk tahun 2024, kegiatan masih berjalan dan diupayakan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) urusan

yaitu Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program utama yang tercantum dalam Penetapan Kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan anggaran sebesar Rp. 2.112.537.565,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 2.093.861.561 atau sebesar 99,12%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkap Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkap Daerah
   - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkap Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

   Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 206.901.352, proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 206.735.920 atau sebesar 99,92%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

   Program Kawasan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 416.528.861,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 414.444.573,- atau sebesar 99,50%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
   - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

   Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) dengan anggaran sebesar Rp. 4 60.250.545,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 59.531.120,- atau sebesar 98,81%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   - Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan

5. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

   Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.939.909.377,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.824.579.066,- atau sebesar 94,05%%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun Anggaran 2023 dana yang dialokasikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan kegiatan yang telah diprogramkan adalah sebesar Rp. 4.736.127.700,- (Empat milyar Tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuhrupiah) dan direalisasikan sebesar Rp.4.599.152.240,- (Empat Milyar lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau 97,11%. Hasil Analisis Pencapaian Kinerja 5 Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan reaisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka ratarata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar 99,11%. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah s/d Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	*11.447.500.000*	*8.660.082.569*	*2.347.500.000*	*2.419.639.081*	*103%*	*2.136.000.000*	*13.215.721.650*	*115%*
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	360.000.000	199.208.082	*72.000.000*	102.664.080	*143%*	107.000.000	*408.872.162*	*114%*

	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	125.000.000	123.853.192	25.000.000	62.709.020	*251%*	60.000.000	*246.562.212*	*197%*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan tersedia	135.000.000	19.825.520	27.000.000	19.235.616	*71%*	27.000.000	*66.061.136*	*49%*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja tersedia	100.000.000	55.529.370	20.000.000	20.719.444	*104%*	20.000.000	*96.248.814*	*96%*
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	6.240.000.000	3.245.462.380	1.248.000.000	1.167.066.757	*94%*	1.248.000.000	*5.660.529.137*	*91%*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	6.100.000.000	3.164.379.320	1.220.000.000	1.122.576.639	*92%*	1.220.000.000	*5.506.955.959*	*90%*
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	25.000.000	9.239.800	5.000.000	18.278.637	*366%*	5.000.000	*32.518.437*	*130%*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	115.000.000	71.843.260	23.000.000	26.211.481	*114%*	23.000.000	*121.054.741*	*105%*
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	50.000.000	69.155.960	10.000.000	19.474.369	*195%*		*88.630.329*	*177%*
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	50.000.000	69.155.960	10.000.000	19.474.369	*195%*	20.000.000	*108.630.329*	*217%*
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	475.000.000	20.801.675	95.000.000	46.780.499	*49%*	65.000.000	*132.582.174*	*28%*
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	75.000.000	7.301.675	15.000.000	27.780.499	*185%*	15.000.000	*50.082.174*	*67%*

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	400.000.000	13.500.000	80.000.000	19.000.000	*24%*	50.000.000	*82.500.000*	*21%*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	1.037.500.000	3.004.244.093	257.500.000	325.777.520	*127%*	336.000.000	*3.666.021.613*	*353%*
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT PD yang disediakan	150.000.000	62.278.348	30.000.000		*0%*	30.000.000	*92.278.348*	*62%*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	112.500.000	177.187.210	22.500.000	46.993.500	*209%*	50.000.000	*274.180.710*	*244%*
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	75.000.000	813.308.000	15.000.000	56.120.000	*374%*	56.000.000	*925.428.000*	*1234%*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	500.000.000	1.642.341.840	150.000.000	203.219.750	*135%*	160.000.000	*2.005.561.590*	*401%*
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis PD	200.000.000	309.128.695	40.000.000	19.444.270	*49%*	40.000.000	*368.572.965*	*184%*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-	-	270.000.000	232.383.490	*86%*	155.000.000	*387.383.490*	*#DIV/0!*
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	750.000.000	466.216.000	150.000.000	95.997.240	*64%*	10.000.000	*572.213.240*	*76%*
	Pengadaan Mebel	Jumlah komponen	50.000.000	4.400.000	-	15.396.250	*#DIV/0!*	25.000.000	*44.796.250*	*90%*
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	600.000.000	247.720.000	120.000.000	120.990.000	*101%*	120.000.000	*488.710.000*	*81%*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	1.560.000.000	1.268.422.879	330.000.000	149.520.130	*45%*	160.000.000	*1.577.943.009*	*101%*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa	160.000.000	181.342.879	50.000.000	60.220.130	*120%*	10.000.000	*251.563.009*	*157%*

		sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50.000.000	46.750.000	10.000.000	7.700.000	*77%*	50.000.000	*104.450.000*	*209%*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1.350.000.000	1.040.330.000	270.000.000	81.600.000	*30%*	100.000.000	*1.221.930.000*	*91%*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	325.000.000	134.451.500	65.000.000	50.194.716	*77%*	65.000.000	*249.646.216*	*77%*
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	325.000.000	134.451.500	65.000.000	50.194.716	*77%*	65.000.000	*249.646.216*	*77%*
2	Program Pengembangan Perumahan	Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah	*856.000.000*	*2.886.073.373*		206.735.920	*#DIV/0!*		*3.092.809.293*	*361%*
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	266.000.000	66.351.250	53.200.000	47.049.820	*88%*	20.000.000	*133.401.070*	*50%*
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	266.000.000	66.351.250	53.200.000	47.049.820	*88%*	20.000.000	*133.401.070*	*50%*
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	40.000.000	358.028.043	8.000.000	5.000.000	*63%*	30.000.000	*393.028.043*	*983%*

	Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	40.000.000	358.028.043	8.000.000	5.000.000	*63%*	30.000.000	*393.028.043*	*983%*
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	220.000.000	2.361.049.150	100.000.000	154.686.100	*155%*	100.000.000	*2.615.735.250*	*1189%*
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	220.000.000	2.361.049.150	100.000.000	154.686.100	*155%*	100.000.000	*2.615.735.250*	*1189%*
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30.000.000	51.416.580	6.000.000	-	*0%*	6.000.000	*57.416.580*	*191%*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30.000.000	51.416.580	6.000.000	-	*0%*	6.000.000	*57.416.580*	*191%*
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB		300.000.000	49.228.350	60.000.000	-	*0%*	40.000.000	*89.228.350*	*30%*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	300.000.000	49.228.350	60.000.000	-	*0%*	40.000.000	*89.228.350*	*30%*
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman layak huni	*3.100.000.000*	*1.175.738.338*	400.000.000	414.444.573	*104%*	*600.000.000*	*2.190.182.911*	*71%*
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	presentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.600.000.000	381.351.253	100.000.000	124.904.550	*125%*	570.000.000	*1.076.255.803*	*67%*

	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	200.000.000	216.884.649	-		*#DIV/0!*	30.000.000	*246.884.649*	*123%*
	Penyusunan /Review/Legalisasi kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi			-	124.904.550	*#DIV/0!*	500.000.000	*624.904.550*	*#DIV/0!*
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.400.000.000	164.466.604	100.000.000	-	*0%*	40.000.000	*204.466.604*	*15%*
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	presentase Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.500.000.000	794.387.085	150.000.000	39.774.032	*27%*	30.000.000	*864.161.117*	*58%*
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	500.000.000	715.689.285	100.000.000		*0%*		*715.689.285*	*143%*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.000.000.000	78.697.800	50.000.000	39.774.032	*80%*	30.000.000	*148.471.832*	*15%*
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	50.150.000.000	1.322.635.000	150.000.000	249.765.991	*167%*	-	*1.572.400.991*	*3%*
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50.150.000.000	1.322.635.000	150.000.000	249.765.991	*167%*		*1.572.400.991*	*3%*

4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PRESENTASE PROGRAM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			40.000.000	59.531.120	*149%*	-	*59.531.120*	*#DIV/0!*
	Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000	59.531.120	*149%*	-	*59.531.120*	*#DIV/0!*
	koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangk Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			40.000.000	59.531.120	*149%*		*59.531.120*	*#DIV/0!*
5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	*25.050.000.000*	*5.368.555.240*	8.018.700.000	6.423.731.306	*80%*	*5.500.000.000*	*17.292.286.546*	*69%*
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	presentase Luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanag untuk pembangunan oleg pemerintah daerah kabupaten	25.050.000.000	5.368.555.240	8.018.700.000	6.423.731.306	*80%*	5.500.000.000	*17.292.286.546*	*69%*
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat penerima santunan tanah	50.000.000	24.136.375	150.000.000	150.228.508	*100%*	1.000.000.000	*1.174.364.883*	*2349%*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah	25.000.000.000	5.344.418.865	2.500.000.000	1.674.350.558	*67%*	4.500.000.000	*11.518.769.423*	*46%*
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		80.410.208.082	14.690.492.607	5.368.700.000	4.599.152.240	*86%*	8.714.872.162	*28.004.517.009*	*35%*

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	100%	150%		Rp 2	3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Perumahan dan Permukiman telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut :

1. SDM personil yang masih kurang memadai, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur.
2. Sering terjadinya kendala-kendala teknis dan non-teknis selama tahun anggaran berlangsung

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam NSPK, SPM dan IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelayanan Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

Permukiman Kondisi permukiman di Kabupaten Mamuju Tengah pada saat ini masih ditandai oleh belum mantapnya sistem penyelenggaraan termasuk sistem kelembagaan yang diperlukan, rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, dimana secara fungsional kualitas pelayanan sebagian besar perumahan dan permukiman yang ada masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau masih belum dapat diimbangi dengan kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah. Kebutuhan perumahan di Kabupaten

Mamuju Tengah masih relatif besar. Sebagai gambaran status kebutuhan perumahan pada saat ini meliputi :

- Pertumbuhan kebutuhan rumah baru;
- Kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak huni sebanyak 7.847 Unit. Dari segi kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan, masih terdapat banyak kawasan yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 Pembangunan Rumah Layak Huni yang dibiayai melalui dana APBD/APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 4.056 unit. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan tahun 2025 belum bisa dilakukan secara maksimal karena kegiatan 2024 baru berjalan (triwulan II) sehingga untuk mengukur kinerja tahun 2024 belum dapat dilakukan.

Jenis indikator yang dikaji berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah antara lain terkait dengan persentase ketersediaan rumah layak huni, persentase permukiman layak huni, Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), Rata-rata capaian SPM Perumahan , penurunan rumah tidak layak huni rumah tangga miskin, Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum dan Persentase penyelesaian sengketah tanah garapan dalam daerah kab/kota yang secara rinci disajikan pda table, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah

Target indikator lama

NO	Indikator	Target IKK	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisaasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase rumah layak huni			79,79 %	81,41%	82,76%	84,12%	82,76%	81, 34%			
2	persentase permukiman layak huni			98,95 %	98,99%	99,03%	99,07%	99,03%	87,73%			
3	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)			51%	53%	56%	59%	56%	100%			
4	Rata-rata capaian SPM Perumahan			100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
5	penurunan rumah tidak layak huni rumah tangga miskin			20,21 %	18,85%	17,49%	16,13%	17,49%	18, 464 %			
6	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum			25,00 %	29,17%	33,33%	37,50%	3,33 %	28,96%			
7	Nilai Akuntabebilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			C	C	CC	CC	CC	B			
8	Presentase Peningkatan disiplin ASN			100%	100 %	100 %	100 %	0%	0%			

Target indikator perubahan 2024

NO	INDIKATOR	Target IKK	SPM	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi capaian		Proyeksi capaian		Catatan
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase rumah layak huni	79,79 %		82,76 %	84, 12 %	80%	81%	81, 34%		84,12 %	80%	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	98,95 %		98,95 %	80, 00 %	90,05%	91,00%	87,73%		80,00 %	90,05 %	
2	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	25,00 %		33,33 %	37, 00 %	37,05%	40,00%	28,96 %		37,00 %	37,05 %	

3	Nilai Akuntabebilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	B		B	B	B	A	B		B	B	
	Persentasetemuan material pemeriksaankeuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0%		0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan, solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Isu strategis menjadi titik prioritas penanganan permasalahan yang ada. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

2.3.1 Isu Strategis Bidang Perumahan

a. Adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah layak huni dengan jumlah rumah layak huni yang tersedia (*backlog*).
b. Tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

c. Belum tersedianya database perumahan yang berbasis spasial.
d. Belum tersedianya prasarana dan sarana utilitas yang memadai pada perumahan.
e. Minimnya kuota alokasi program melalui APBN.
f. Penuntasan Kemiskinan Extrim

2.3.2 Isu Strategis Bidang Kawasan Permukiman

a. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh tiap tahunnya .
b. Belum adanya legalitas dokumen perencanaan untuk pengembangan kawasan permukiman berdasarkan tata ruang wilayah.
c. Belum tersedianya prasarana dan sarana utilitas yang memadai pada Kawasan Permukiman, terutama di permukiman Kumuh.
d. Minimnya dukungan anggaran melalui APBD.
e. Penuntasan Kemiskinan Extrim

2.3.3 Isu Strategis Bidang Pertanahan

a. Adanya kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah daerah.
b. Besarnya jumlah aset daerah dalam bentuk tanah yang belum memiliki legalitas.
c. Adanya konflik pertanahan terutama tapal batas antar Desa

2.3.4 Isu Strategis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten.

   Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan

yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten.

   Tingkat keberhasilan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

2.3.5 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan PelayananPerangkat Daerah

Tantangan

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta Pertanahan adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Disisi lain, terdapat Tantangan penyediaan perumahan, yaitu:

1. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
2. Tidak adanya sinkronisasi data antar OPD (Data e-RTLH, TNP2K, BDT, P3KE)
3. Kordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal;

4. Peran kontrol pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal;
5. Efisiensi proses dan mahalnya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal;
6. Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan;
7. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal;
8. Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan; dan
9. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu di kembangkan.
10. Telah tersedianya database Rumah Tidak Layak Huni namun masih perlu dimutakhirkan.
11. Belum tersedianya regulasi berupa peraturan daerah tentang RP3KP, RP2KPKP dan PSU.
12. Kabupaten mamuju tengah belum masuk dalam daftar program KOTAKU.
13. Masyarakat dalam kategori miskin tidak dapat menjadi target pembiayaan APBN dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Peluang:

Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tiga urusan wajib (Urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan) adalah:

1. Urusan perumahan mengemban amanah untuk mendukung KDH dalam mewujudkan misi pembangunan sesuai dengan RPJMD 2021-2026, terkhusus dalam misi (1), misi (2) dan misi (3).
2. Dukungan Pemerintah Daerah, DPRD dan *stakeholder* terkait di Kabupaten Mamuju Tengah yang besar dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;

3. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur Perumahan di Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Potensi sumber daya alam Kabupaten Mamuju Tengah yang sangat strategis;
5. Perkembangan permukiman yang masih sejalan dengan pertambahan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah;

2.3.6 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi penyusunan ranperda tentang PSU, RP3KP, RP2KPKP dan ranperda tentang Membara (Membangun Rumah Rakyat)
2. Optimalisasi penyusunan ranperda tentang Penyerahan PSU
3. Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
4. Perwujudan Kondisi Lingkungan Yang Sehat, Aman, Harmonis Dan Berkelanjutan Untuk Pembangunan Permukiman Baru.
5. Strategi Pengembangan Berbagai Jenis Dan Mekanisme Subsidi Perumahan.
6. Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
7. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

8. Strategi Pengembangan Tatacara Pengawasan Dan Pengendalian.
9. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh.
10. Strategi Perbaikan Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Pada Kawasan Permukiman Yang Telah Terbangun.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Adapun proses yang dilakuan terhadap review rencana awal dengan renja (rencana kerja) yaitu proses perubahan terdapat perubahan nomenklatur subkegiatan dengan adanya Kemendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kemendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Interventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Program/kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Mamuju Tengah perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.
Untuk melihat review rancangan awal RKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

No	Rancangan awal Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 1.913.500.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 1.913.500.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		Rp 82.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		Rp 82.000.000,00	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 25.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 25.000.000,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	

03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 27.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 27.000.000,00	
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100	Rp 1.015.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100	Rp 1.015.000.000,00	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang /bulan	Rp 920.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	Rp 920.000.000,00	

02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	Rp 5.000.000,00	
03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	Rp 15.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	Rp 15.000.000,00	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45 Dokumen	Rp 15.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45 Dokumen	Rp 15.000.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 5.000.000,00	
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Rp 5.000.000,00	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Rp 23.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Rp 23.000.000,00	
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Rp 27.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Rp 27.000.000,00	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	Rp 15.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	Rp 15.000.000,00	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	
02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp 10.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp 10.000.000,00	
03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	Rp 144.800.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	Rp 144.800.000,00	
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	62 Unit	Rp 18.600.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	62 Unit	Rp 18.600.000,00	
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	Rp 18.600.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	Rp 18.600.000,00	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62 Dokumen	Rp 18.600.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62 Dokumen	Rp 18.600.000,00	

04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	62 Dokumen	Rp 10.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	62 Dokumen	Rp 10.000.000,00	
05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp 79.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp 79.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	Rp 267.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	Rp 267.500.000,00	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 10.000.000,00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 50.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 50.000.000,00	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp 30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp 30.000.000,00	
04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	Rp 22.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	Rp 22.500.000,00	
05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	Rp 15.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	Rp 15.000.000,00	

06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	Rp 100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	Rp 100.000.000,00	
07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	Rp 40.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	Rp 40.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	Rp 302.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	Rp 302.000.000,00	
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Rp 150.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Rp 150.000.000,00	
02	Pengadaan Mebel	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Rp 25.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Rp 25.000.000,00	
03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 7.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 7.000.000,00	
04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 120.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 120.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	Rp -	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	Rp -	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62 Laporan	6.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62 Laporan	6.500.000,00	

02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000,00	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	270.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	270.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	Rp 87.200.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	Rp 87.200.000,00	
01	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	Rp 65.000.000,00	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	Rp 65.000.000,00	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	Rp 22.200.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	Rp 22.200.000,00	

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	Rp 777.800.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	Rp 777.800.000,00	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana	4 unit	Rp 159.200.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana	4 unit	Rp 159.200.000,00	
01	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen Dokumen	Rp 10.000.000,00	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen Dokumen	Rp 10.000.000,00	
02	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	3 Dokumen Dokumen	Rp 6.000.000,00	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	3 Dokumen Dokumen	Rp 6.000.000,00	
03	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	03 Dokumen	Rp 6.000.000,00	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	03 Dokumen	Rp 6.000.000,00	
04	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen	Rp 42.000.000,00	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen	Rp 42.000.000,00	

05	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Dokumen	Rp 53.200.000,00	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Dokumen	Rp 53.200.000,00	
06	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	50 Dokumen	Rp 42.000.000,00	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	50 Dokumen	Rp 42.000.000,00	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	85 orang	Rp 122.600.000,00	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	85 orang	Rp 122.600.000,00	
01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 105.000.000,00	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 105.000.000,00	
02	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	100 Orang	Rp 8.000.000,00	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	100 Orang	Rp 8.000.000,00	
03	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban	Kab. Mamuju	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan	5 Orang	Rp 4.800.000,00	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban	Kab. Mamuju	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan	5 Orang	Rp 4.800.000,00	

	Bencana Kabupaten/Kota	Tengah,	Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Bencana Kabupaten/Kota	Tengah,	Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
04	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	5 Orang	Rp 4.800.000,00	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	5 Orang	Rp 4.800.000,00	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 420.000.000,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 420.000.000,00	
01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	Rp 40.000.000,00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	Rp 40.000.000,00	
02	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	Rp 150.000.000,00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	Rp 150.000.000,00	
03	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	253 Unit Rumah	Rp 50.000.000,00	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	253 Unit Rumah	Rp 50.000.000,00	
04	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat	Kab. Mamuju	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi	3 Ruma	Rp 80.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat	Kab. Mamuju	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi	3 Rumah Tangga	Rp 80.000.000,00	

	yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Tengah,	Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	h Tangga		yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Tengah,	Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah			
05	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah	Rp 100.000.000,00	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah	Rp 100.000.000,00	
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi	3 unit	Rp 10.000.000,00	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi	3 unit	Rp 10.000.000,00	
01	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Rp 5.000.000,00	
02	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	Rp 5.000.000,00	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	Rp 5.000.000,00	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah rumah susun umum dan/atau khusus yang dibina	48 unit	Rp -	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah rumah susun umum dan/atau khusus yang dibina	48 unit	Rp -	
01	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	48 Dokumen	20.000.000,00	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	48 Dokumen	20.000.000,00	

	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan	10 laporan	Rp 6.000.000,00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan	10 laporan	Rp 6.000.000,00	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 laporan	Rp 6.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 laporan	Rp 6.000.000,00	
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		Jumlah rekomendasi untuk penerbitan SKBG	10 laporan	Rp 60.000.000,00	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		Jumlah rekomendasi untuk penerbitan SKBG	10 laporan	Rp 60.000.000,00	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	10 Laporan	Rp 60.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	10 Laporan	Rp 60.000.000,00	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%	Rp 1.595.000.000,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%	Rp 1.595.000.000,00	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1 kawasan	Rp 50.000.000,00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1 kawasan	Rp 50.000.000,00	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	

	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	100%	Rp 345.000.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	100%	Rp 345.000.000,00	
01	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	
02	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	3 Kelompok Masyarakat	Rp 100.000.000,00	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	3 Kelompok Masyarakat	Rp 100.000.000,00	
03	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	Rp 20.000.000,00	
04	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	Rp 50.000.000,00	
05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	24 Rumah Tangga	Rp 75.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	24 Rumah Tangga	Rp 75.000.000,00	

			Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	8 unit	Rp 1.200.000.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	8 unit	Rp 1.200.000.000,00	
01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	Rp 400.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	Rp 400.000.000,00	
02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5 Dokumen	Rp 100.000.000,00	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5 Dokumen	Rp 100.000.000,00	
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	
04	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	
05	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang	1 Rumah Tangga	Rp 50.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang	1 Rumah Tangga	Rp 50.000.000,00	

	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
06	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	1 Ha	Rp 50.000.000,00	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	1 Ha	Rp 50.000.000,00	
07	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Rp 500.000.000,00	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Rp 500.000.000,00	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		(Ha)	100%	Rp 130.000.000,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		(Ha)	100%	Rp 130.000.000,00	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	503 unit	Rp 130.000.000,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	503 unit	Rp 130.000.000,00	
01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	100 Unit Rumah	Rp 50.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	100 Unit Rumah	Rp 50.000.000,00	

	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
02	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	Rp 30.000.000,00	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	Rp 30.000.000,00	
03	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 LAPORAN Orang	Rp 50.000.000,00	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 LAPORAN Orang	Rp 50.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Jumlah permukiman yang tefasilitasi PSU			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Jumlah permukiman yang tefasilitasi PSU			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	Rp 196.000.000,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	Rp 196.000.000,00	
01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Rp 6.000.000,00	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Rp 6.000.000,00	

02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	Rp 100.000.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	Rp 100.000.000,00	
03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	Rp 40.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	Rp 40.000.000,00	
04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				Rp 1.940.126.854,00	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				Rp 1.940.126.854,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				Rp 1.940.126.854,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				Rp 1.940.126.854,00	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan		Rp -	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan		Rp -	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus yang diselesaikan	1 kasus	Rp -	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus yang diselesaikan	1 kasus	Rp -	
01	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1	Kab. Mamuju	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1	1 Berita Acara	30.000.000,00	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1	Kab. Mamuju	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1	1 Berita Acara	30.000.000,00	

	(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tengah,	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tengah,	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan		Rp 1.940.126.854,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan		Rp 1.940.126.854,00	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten	100%	Rp 1.940.126.854,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten	100%	Rp 1.940.126.854,00	
01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	9 Dokumen	Rp 150.000.000,00	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	9 Dokumen	Rp 150.000.000,00	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Rp 1.500.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Rp 1.500.000.000,00	
03	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah laporan penyelesaian	5 Laporan	Rp 190.126.854,00	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah,	Jumlah laporan penyelesaian	5 Laporan	Rp 190.126.854,00	
04	Penyelesaian santunan tanah musnah pada	Kab. Mamuju	Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk	5 Laporan	Rp 100.000.000,00	Penyelesaian santunan tanah musnah pada	Kab. Mamuju	Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk	5 Laporan	Rp 100.000.000,00	

	Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Tengah,				Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Tengah,				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain isu-isu penting yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang

selama ini dilaksanakan oleh Dinas Perkimtan, program dan kegiatan di tahun 2024 nantinya juga berasal dari usulan masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi (Musrenbang) Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Tematik, Musrenbang Kabupaten sampai menjadi RKPD Kabupaten atau terdapat usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat yang bersumber dari hasil reses DPRD, hasil Musrenbang Kecamatan dan hasil sinkronisasi bersama DPRD Ditambah dengan masukan-masukan dari Perangkat Daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat atau Perangkat Daerah terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang kemudian dianalisis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun beberapa usulan dari Perangkat Daerah lain atau kelompok masyarakat tercantum dalam Ranwal Renja Dinas Perkimtan Tahun 2024 tabel usulan program dan kegiatan dari Pemangku kepentingan pada sebagai berikut:

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Program Pengembangan Perumahan, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Lara, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3 Unit	Disetujui ke Forum OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
2	Program Pengembangan Perumahan,Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, pembangunan rumah layak huni korban bencana	Desa Batu Parigi, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 unit	Usulan Forum OPD
3	Program Pengembangan Perumahan,Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota,pembangunan rumah layak huni korban bencana	Desa Bambamanurung, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 unit	Usulan Forum OPD
4	Program Kawasan Permukiman, PermukimanPeningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Pontanakayang, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit	Disetujui ke Forum OPD
5	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tinali, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit	Disetujui ke Forum OPD
6	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Lembah Hada, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit	Disetujui ke Forum OPD
7	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tabolang, Kab. Mamuju Tengah		20 Unit	Disetujui ke Forum OPD
8	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Pangalloang, Dusun Pangalloang, Dusun Kalubibing, Dusun Karacang, Dusun Kampung Baru , Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Disetujui ke Forum OPD
9	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa batuparigi, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	150 Unit	Disetujui ke Forum OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
10	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Kabubu, Dusun Transari 15 Rumah, Dusun Kabubu 15 Rumah, Dusun Mekarsari 15 Rumah, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Disetujui ke Forum OPD
11	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Paraili, Dusun Mertasari, Dusun Lombok Permai, Dusun Polmas Indah, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Disetujui ke Forum OPD
12	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha,Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Polo Pangale,Dusun Puncak, Dusun Mekarsari, Dusun Beringin, Dusun Mario dan Dusun Sidomulyo, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit	Disetujui ke Forum OPD
13	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha,Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa polo camba, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	30 Unit	Disetujui ke Forum OPD
14	Program Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Benggaulu.1. DUSUN BENGGAULU UTARA 2. DUSUN BENGGAULU TIMUR 3. DUSUN SUMBER HARAPAN 4. DUSUN NUSANTARA 5. DUSUN KEMBANG JAYA, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Disetujui ke Forum OPD
15	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Mahahe, Dusun Sipatuo, Sukamaju, Panrannungku, Samieling, Tenko Situru, dan Sangayoka, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Disetujui ke Forum OPD
16	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Dusun Tobadak,Dusun Margamulya,Dusun Sidomulyo,Dusun Mandalika,Dusun Pattallassang Desa Bambadaru, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Disetujui ke Forum OPD
17	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh)	Desa Palongaan, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi	20 Unit	Disetujui ke Forum OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	Ha, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni		untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
18	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha,Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Sinabatta, Dusun Durian Mariri, Dusun Sinabatta, Dusun Sinabatta Baru, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Disetujui ke Forum OPD
19	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa SertanamajuPangale, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
20	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Kire, Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
21	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Lumu, Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
22	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Salumanurung, Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
23	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Barakkang, Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
24	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa tobadak, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di	100 unit	Usulan Forum OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
			Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
25	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Sejati, tobadak, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
26	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Batu parigi, tobadak, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
27	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Kambunong, topoyo, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
28	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Tasokko, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
29	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Pangale, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
30	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengadaan	Kab. Mamuju Tengah		2 ha	Usulan Forum OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	Tanah untuk tempat Kerja (pembangunan gedung BLK)				
31	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Karossa, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
32	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha, Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Tasokko, Karossa, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 unit	Usulan Forum OPD
	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha,Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kabubu, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	45	EKA ALI AKBAR
	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha,Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Budong-Budong, Dusun Gallang, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	15	EKA ALI AKBAR
	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha,Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Saloadak, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10	EKA ALI AKBAR
	Program Kawasan Permukiman,Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha,Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Sinabatta, Kab. Mamuju Tengah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	70	SULMI

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan perumahan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka arah kebijakan Perumahan Nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Penciptaan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan ditingkat pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan hak dasar rakyat atas rumah.
b) Peningkatan pemenuhan rumah sejahtera yang didukung dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta kepastian bermukim bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan dan pedesaan.
c) Kelembagaan sistem pendanaan dan pembiayaan perumahan dan permukiman.
d) Peningkatan pendayagunaan sumber daya pembangunan permukiman, pemanfaatan hasil-hasil IPTEK yang mengacu tata ruang dan kearifan lokal.
e) Peningkatan sinergi antara pusat, daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Mamuju Tengah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kepuasaan masyarakata atas layanan perumahan 2. Meningkkan kualitas layanan pertanahan 3. Meningkatnya tata kelola pada Dinas Perumahan Rakyat dan	1. Terpenuhinya rumah layak huni MBR 2. Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan SPM Perumahan 3. Terselenggaranya layanan pertanahan 4. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1. Pembangunan rumah/ Peningkatan kualitas rumah bagi MBR 2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 4. Pembangunan rumah bagi masyarakat Korban Bencana 5. Pembangunan rumah bagi masyarakat	1. Terwujudnya rumah layak huni bagi MBR 2. Terwujudnya Permukiman layak huni 3. Terwujudnya perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) 4. Terwujudnya rumah hunian bagi masyarakat Korban Gempa 5. Terwujudnya rumah hunian bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah

Kawasan Permukiman serta Pertanahan		terkena relokasi program pemerintah, fasilitasi dan pendampingan 6. Penyediaan rumah layak huni bagi Rumah Tangga miskin	6. Terwujudnya peningkatan kualitas rumah hunian bagi masyarakat Rumah Tangga Miskin

3.3 Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2025 yaitu "Mamuju Tengah yang sejahtera mandiri dan berwawasan lingkungan tahun 2025". Selain itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dan yang merupakan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Adapun rumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kemendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Interventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Mamuju Tengah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				5.099.600.000				9.184.000.000
1	04				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan				5.099.600.000				9.184.000.000
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.270.000.000				2.560.000.000
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu			82.000.000				82.000.000
1	04	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Mateng	1 dok	25.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	2 DOK	25.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mateng	1 dok	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	1 dok	5.000.000
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mateng	1 dok	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	1 dok	5.000.000
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mateng	2 dokumen	27.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	2 dokumen	27.000.000
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mateng	1 dok	20.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	1 dok	20.000.000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100	1.015.000.000			100	1.315.000.000
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mateng	18 orang	920.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	18 orang	1.220.000.000
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mateng	18 orang	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	18 orang	5.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mateng	48 dokumen	15.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	48 dokumen	15.000.000
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Mateng	45 Dokumen	15.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	72 Dokumen	15.000.000
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mateng	1 dokumen	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	1 dokumen	5.000.000
1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Mateng	2 dokumen	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	2 dokumen	5.000.000
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mateng	16 laporan	23.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	16 laporan	23.000.000
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Mateng	4 laporan	27.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	4 laporan	27.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	15.000.000			100%	15.000.000
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maten g	1 laporan	5.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	1 laporan	5.000.000
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maten g	2 laporan	10.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	2 laporan	10.000.000
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	-	100%	144.800.000	-	-	100%	144.800.000
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Maten g	62 Unit	18.600.000	DAU	Kegiatan Rutin	62 orang	18.600.000
1	04	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Maten g	62 pasang	18.600.000	DAU	Kegiatan Rutin	62 pasang	18.600.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mateng	62 orang	18.600.000	DAU	Kegiatan Rutin	62 orang	18.600.000
1	04	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Mateng	62 orang	10.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	63 orang	10.000.000
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Mateng	3 orang	79.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	3 orang	79.000.000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100%	267.500.000			100%	267.500.000
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mateng	12 komponen	10.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	12 komponen	10.000.000
1	04	01	2.06	02	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mateng	4 unit	50.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	4 unit	50.000.000
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mateng	5 unit	30.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	5 unit	30.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mateng	150 rim	22.500.000	DAU	Kegiatan Rutin	150 rim	22.500.000
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mateng	1000 orang	15.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	1000 orang	15.000.000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mateng	62 orang	100.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	62 orang	100.000.000
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mateng	20 jenis	40.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	20 jenis	40.000.000
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100%	302.000.000			100%	330.000.000
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Mateng	3 unit	150.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	3 unit	150.000.000
1	04	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mateng	3 komponen	25.000.000	DAU	Kegiatan Rutin		

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	01	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mateng	1 komponen	7.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	3 UNIT	Rp60.000.000
1	04	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mateng	1 unit	120.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	1 unit	120.000.000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	356.500.000			100%	318.500.000
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMe nyurat	Kab. Mateng	62 orang	6.500.000	DAU	Kegiatan Rutin	62 orang	6.500.000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mateng	322581 KWH, 432 MPBS, 4290 m3	70.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	322581 KWH, 432 MPBS, 4290 m3	32.000.000
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mateng	12 jenis	10.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	12 jenis	10.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mateng	45 orang	270.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	45 orang	270.000.000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100%	87.200.000			100%	87.200.000
1	04	01	2.09	01	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mateng	12 bulan	65.000.000	DAU	Kegiatan Rutin	12 bulan	65.000.000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mateng	12 unit	22.200.000	DAU	Kegiatan Rutin	12 unit	22.200.000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah		100%	744.600.000			100%	1.169.000.000
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana		4 unit	106.000.000			3 unit	123.200.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	02	2.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Mateng	3 Dokumen	10.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	3 Dokumen	10.000.000
1	04	02	2.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Mateng	3 Dokumen	6.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	3 Dokumen	6.000.000
1	04	02	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Mateng	3 Dokumen	6.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	3 Dokumen	6.000.000
1	04	02	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Mateng	50 dokumen	42.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	50 dokumen	42.000.000
1	04	02	2.01	6	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mateng			DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	50 dokumen	53.200.000
1	04	02	2.01	6	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Mateng	50 dokumen	42.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	50 dokumen	6.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		85 orang	122.600.000			85 orang	127.800.000
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mateng	100 orang	105.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	100 orang	105.000.000
1	04	02	2.02	2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Kab. Mateng	30 orang	8.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	30 orang	8.000.000
1	04	02	2.02	3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mateng	5 dokumen	4.800.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	5 dokumen	4.800.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	02	2.02	4	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Mateng	5 dokumen	4.800.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	5 dokumen	10.000.000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mateng	4 unit	420.000.000			4 unit	820.000.000
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Mateng	2 unit	40.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	2 unit	40.000.000
1	04	02	2.03	02	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Site Plan dan/atau Detail *Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mateng	2 site plant	150.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	3 unit	150.000.000
1	04	02	2.03	3	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kab. Mateng	253 UNIT	50.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	253 UNIT	100.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	02	2.03	4	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Kab. Mateng	3 unit	80.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	3 unit	380.000.000
1	04	02	2.03	5	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mateng		100.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	3 unit	150.000.000
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi	Kab. Mateng	3 unit	10.000.000			3 unit	12.000.000
1	04	02	2.04	1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mateng	5 dokumen	5.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	5 dokumen	6.000.000
1	04	02	2.04	2	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Kab. Mateng	5 laporan	5.000.000	DAU	Kegiatan mendukung pemenuhan SPM	5 laporan	6.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan/atau khusus yang dibina	Kab. Mateng	48 unit	20.000.000			48 unit	20.000.000
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Mateng	48 Dokumen	20.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	48 Dokumen	20.000.000
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan		10 laporan	6.000.000			10 laporan	6.000.000
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Mateng	10 laporan	6.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	10 laporan	6.000.000
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah rekomendasi untuk penerbitan SKBG		10 laporan	60.000.000			10 laporan	60.000.000
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	10 laporan	60.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	10 laporan	60.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		100%	1.645.000.000			100%	4.895.000.000
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman		1 kawasan	50.000.000			1 kawasan	200.000.000
1	04	03	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1 laporan	50.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 laporan	200.000.000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		100%	395.000.000			100%	895.000.000
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	1 kegiatan	50.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 kegiatan	100.000.000
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Te*review* /Terlegalisasi	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 Dokumen	300.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	4 KSM	100.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	4 KSM	300.000.000
1	04	03	2.02	7	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		5 dokumen	20.000.000		Mendukung Pemenuhan prioritas	5 dokumen	20.000.000
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	5 Kecamatan	50.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	5 Kecamatan	100.000.000
1	04	03	2.02	15	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	24 keluarga	75.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	24 keluarga	75.000.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		8 unit	1.200.000.000			8 unit	3.800.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Mamuju Tengah	20 unit	400.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	20 unit	400.000.000
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	100.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	5 dokumen	100.000.000
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	50.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 laporan	200.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Mamuju Tengah	1 DOKUMEN	50.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 DOKUMEN	100.000.000
1	04	03	2.03	10	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mamuju Tengah	1 kawasan	50.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 kawasan	1.000.000.000
1	04	03	2.03	11	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Kab. Mamuju Tengah	1 kawasan	50.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 kawasan	1.000.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	03	2.03	12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	20 unit	500.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	20 unit	1.000.000.000
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	(Ha)		100%	30.000.000			100%	150.000.000
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani		503 unit	30.000.000			503 unit	150.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	04	2.01	5	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	30.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	5 dokumen	100.000.000
1	04	04	2.01	9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen		DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	5 dokumen	50.000.000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah permukiman yang tefasilitasi PSU		61	410.000.000			61	410.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100%	196.000.000	DAU		100%	396.000.000
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSUPerumahan	Kab. Mamuju Tengah	1 dokumen	6.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 dokumen	6.000.000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Mamuju Tengah	1 LOKASI	100.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 LOKASI	250.000.000
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	40.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 laporan	40.000.000
1	04	06	2.01	10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	50.000.000	DAU	Mendukung Pemenuhan prioritas	1 laporan	100.000.000
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				1.870.126.854				3.080.126.854

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.870.126.854				3.080.126.854
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan			30.000.000				40.000.000
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang diselesaikan		1 kasus	30.000.000			1 kasus	30.000.000
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	1 BERITA ACARA	30.000.000	DAU	Mendukung kegiatan Pilihan	1 BERITA ACARA	30.000.000
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan			1.840.126.854				3.040.126.854
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten		100%	1.840.126.854			100%	3.040.126.854
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan	Kab. Mamuju	9 dokumen	150.000.000	DAU	Mendukung	9 dokumen	150.000.000

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerima Santunan Tanah	Tengah				kegiatan Pilihan		
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	5 HA	1.500.000.000	DAU	Mendukung kegiatan Pilihan	5 HA	2.500.000.000
2	10	05	2.01	5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Kab. Mateng	5 HA	190.126.854	DAU	Mendukung kegiatan Pilihan	5 HA	390.126.854
TOTAL PAGU									6.969.726.854				12.264.126.854

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD). Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah tertuang dalam table berikut :

Tabel 4.1. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah

Kode Rek.					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**5.099.600.000**	
1	04				**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**				**5.099.600.000**	
1	04	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.270.000.000**	
1	04	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**			**82.000.000**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	25.000.000	DAU
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	DAU
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	5.000.000	DAU

1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju Tengah	2 dokumen	27.000.000	DAU
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju Tengah	1 dok	20.000.000	DAU
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**		**100**	**1.015.000.000**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju Tengah	18 orang	920.000.000	DAU
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mamuju Tengah	18 orang	5.000.000	DAU
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju Tengah	48 dokumen	15.000.000	DAU
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Mamuju Tengah	45 Dokumen	15.000.000	DAU
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 dokumen	5.000.000	DAU
1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Mamuju Tengah	2 dokumen	5.000.000	DAU
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju Tengah	16 laporan	23.000.000	DAU

				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Mamuju Tengah	4 laporan	27.000.000	DAU
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**		**100 %**	**15.000.000**	
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	5.000.000	DAU
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	2 laporan	10.000.000	DAU
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**-**	**100%**	**144.800.000**	**-**
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Mamuju Tengah	62 Unit	18.600.000	DAU
1	04	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mamuju Tengah	62 pasang	18.600.000	DAU
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	62 orang	18.600.000	DAU
1	04	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Mamuju Tengah	62 orang	10.000.000	DAU
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Mamuju Tengah	3 orang	79.000.000	DAU
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**		**100%**	**267.500.000**	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	12 komponen	10.000.000	DAU

1	04	01	2.06	02	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	4 unit	50.000.000	DAU
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	5 unit	30.000.000	DAU
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	150 rim	22.500.000	DAU
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju Tengah	1000 orang	15.000.000	DAU
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju Tengah	62 orang	100.000.000	DAU
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Mamuju Tengah	20 jenis	40.000.000	DAU
1	04	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**		**100%**	**302.000.000**	
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	3 unit	150.000.000	DAU
1	04	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	3 komponen	25.000.000	DAU
1	04	01	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	1 komponen	7.000.000	DAU
1	04	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	1 unit	120.000.000	DAU
1	04	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**100%**	**356.500.000**	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMe nyurat	Kab. Mamuju Tengah	62 orang	6.500.000	DAU

1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	322581 KWH, 432 MPBS, 4290 m3	70.000.000	DAU
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	12 jenis	10.000.000	DAU
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju Tengah	45 orang	270.000.000	DAU
1	04	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**		**100%**	**87.200.000**	
1	04	01	2.09	01	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju Tengah	12 bulan	65.000.000	DAU
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju Tengah	12 unit	22.200.000	DAU
1	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Presentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah daerah**		**100%**	**744.600.000**	
1	04	02	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**jumlah unit rumah yang berada pada kawasan rawan bencana**		**4 unit**	**106.000.000**	
1	04	02	2.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	10.000.000	DAU

1	04	02	2.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	6.000.000	DAU
1	04	02	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Mamuju Tengah	3 Dokumen	6.000.000	DAU
1	04	02	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Mamuju Tengah	50 dokumen	42.000.000	DAU
1	04	02	2.01	6	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah			DAU
1	04	02	2.01	6	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Mamuju Tengah	50 dokumen	42.000.000	DAU
1	04	02	2.02		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**85 orang**	**122.600.000**	
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	100 orang	105.000.000	DAU
1	04	02	2.02	2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Kab. Mamuju Tengah	30 orang	8.000.000	DAU
1	04	02	2.02	3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	4.800.000	DAU

1	04	02	2.02	4	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	4.800.000	DAU
1	04	02	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	**4 unit**	**420.000.000**	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Mamuju Tengah	2 unit	40.000.000	DAU
1	04	02	2.03	02	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Site Plan dan/atau Detail *Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	2 site plant	150.000.000	DAU
1	04	02	2.03	3	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kab. Mamuju Tengah	253 UNIT	50.000.000	DAU
1	04	02	2.03	4	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Kab. Mamuju Tengah	3 unit	80.000.000	DAU
1	04	02	2.03	5	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah		100.000.000	DAU
1	04	02	2.04		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit rumah bagi korban bencana atau relokasi yang terdistribusi**	Kab. Mamuju Tengah	**3 unit**	**10.000.000**	
1	04	02	2.04	1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	5.000.000	DAU

1	04	02	2.04	2	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Kab. Mamuju Tengah	5 laporan	5.000.000	DAU
1	04	02	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah rumah susun umum dan/atau khusus yang dibina**	Kab. Mamuju Tengah	**48 unit**	**20.000.000**	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Mamuju Tengah	48 Dokumen	20.000.000	DAU
1	04	02	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah izin pembangunan dan pengembangan yang diterbitkan**		**10 laporan**	**6.000.000**	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	10 laporan	6.000.000	DAU
1	04	02	2.07		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)**	**Jumlah rekomendasi untuk penerbitan SKBG**		**10 laporan**	**60.000.000**	
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	10 laporan	60.000.000	DAU
1	04	03			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**		**100%**	**1.645.000.000**	
1	04	03	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**		**1 kawasan**	**50.000.000**	
1	04	03	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1 laporan	50.000.000	DAU

1	04	03	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh**		**100%**	**395.000.000**	
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	1 kegiatan	50.000.000	DAU
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T*ereview* /Terlegalisasi	Kab. Mamuju Tengah	1 Dokumen	100.000.000	DAU
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	4 KSM	100.000.000	DAU
1	04	03	2.02	7	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		5 dokumen	20.000.000	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	5 Kecamatan	50.000.000	DAU
1	04	03	2.02	15	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	24 keluarga	75.000.000	DAU
1	04	03	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH**		**8 unit**	**1.200.000.000**	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Mamuju Tengah	20 unit	400.000.000	DAU

1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	100.000.000	DAU
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	50.000.000	DAU
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Mamuju Tengah	1 DOKUMEN	50.000.000	DAU
1	04	03	2.03	10	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mamuju Tengah	1 kawasan	50.000.000	DAU
1	04	03	2.03	11	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Kab. Mamuju Tengah	1 kawasan	50.000.000	DAU
1	04	03	2.03	12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Unit**	20 unit	500.000.000	DAU
1	04	04			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**(Ha)**		**100%**	**30.000.000**	

1	04	04	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani**		**503 unit**	**30.000.000**	
1	04	04	2.01	5	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen	30.000.000	DAU
1	04	04	2.01	9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Mamuju Tengah	5 dokumen		DAU
1	04	05			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah permukiman yang tefasilitasi PSU**		**61**	**410.000.000**	
1	04	05	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**100%**	**196.000.000**	DAU
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	1 dokumen	6.000.000	DAU
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Mamuju Tengah	1 LOKASI	100.000.000	DAU

1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	40.000.000	DAU
1	04	06	2.01	10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Mamuju Tengah	1 laporan	50.000.000	DAU
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				1.870.126.854	
2	10				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**1.870.126.854**	
2	10	04			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan**			**30.000.000**	
2	10	04	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kasus yang diselesaikan**		**1 kasus**	**30.000.000**	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	1 BERITA ACARA	30.000.000	DAU
2	10	05			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan**			**1.840.126.854**	
2	10	05	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase luas tanah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten**		**100%**	**1.840.126.854**	

2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Mamuju Tengah	9 dokumen	150.000.000	DAU
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju Tengah	5 HA	1.500.000.000	DAU
2	10	05	2.01	5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Kab. Mamuju Tengah	5 HA	190.126.854	DAU
TOTAL PAGU									**6.969.726.854**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan perioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indicator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

1.1 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai inplementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MAMUJU TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang sangat kompleks, yaitu kompleks dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jenis pelayanan yang diberikan. Kompleksitas rumah sakit ini perlu didukung oleh berbagai pihak terkait serta manajemen yang kuat agar dapat berjalan sesuai standar pelayanan. Agar Rumah Sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, Rumah Sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mamuju Tengah Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang hendak dicapai pada Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Perubahan Renja RSUD Mamuju Tengah akan menjadi landasan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) PD tahun 2025. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja ini. Besar harapan kami perencanaan ini dapat terwujud dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang kami layani.

Demikian Rencana Kerja Perubahan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini kami buat, mudah-mudahan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah bilamana diperlukan.

Mamuju Tengah, 7 Agustus 2025
Direktur RSUD Mamuju Tengah

dr. NUR FITRIANA, Sp.GK.
NIP. 19861234 201412 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perubahan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Perubahan tahun 2023.

Rencana kerja perubahan perangkat daerah RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) RSUD Kabupaten Mamuju Tengah akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun.

Rencana kerja perubahan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubulanik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rebubulanik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguanan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja perubahan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD Kabupaten Tengah terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2025 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Rencana kerja Perubahan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Kabupaten Mamuju tengah ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja RSUD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025;
4. Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2025 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja perubahan RSUD Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Realisasi program/kegiatan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2025, faktor-faktor penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

RSUD Mamuju Tengah sebagai pelaksana urusan pemerintah bidang kesehatan pada sub urusan upaya kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan melaksanakan upaya rujukan. Pada tahun 2025, RSUD Mamuju Tengah telah menganggarkan dana sebesar Rp 38.844.853.442 yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 2 (dua) Program, 4 (Empat) Kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Periode Pelaksanaan Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit			Status Akreditasi Rumah Sakit (%)	PARIPURNA	148,600,000,000	PARIPURNA	0	PARIPURNA	5,625,309,604																
				Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) RSUD (%)	B		B		B																	
				Presentasi Pokja Akreditasi Yang dilulusi (%)	100		95,0		100																	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata pencapaian SPM RSUD (%)	60,00	148.600.000.000	0,00	0	58,00	5.625.309.604									0,00	1,946,461,240						
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang memenuhi Standar (%)	99	75.000.000.000	0,00	0	90	533.684.604	0%%	0	0%%	249,875,000					0,00%	249,875,000	3,89%	249.875.000	**4,32%**	**0,33%**	Rumah Sakit Umum Daerah	
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22	45,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Rumah Sakit Umum Daerah	Tidak Terlaksana
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3	18,000,000,000	0	0	1	533,684,604	0	0	0	249,875,000					0	249,875,000	0	249,875,000	**11,67%**	**1,39%**	Rumah Sakit Umum Daerah	Belum Tercapai
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	300	12,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Rumah Sakit Umum Daerah	Tidak Terlaksana
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar (%)	62	73.600.000.000	0,00	0	60	5.091.625.000	0%%	661,500,000	0%%	1,035,086,240					0,00%	1,696,586,240	0,12%	1.696.586.240	**0,20%**	**2,31%**	Rumah Sakit Umum Daerah	
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	420	73,600,000,000	0	0	1	5,091,625,000	0	661,500,000	0	1,035,086,240					1	1,696,586,240	1	1,696,586,240	**0,12%**	**2,31%**	Rumah Sakit Umum Daerah	Belum Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit			Indeks RB Rumah Sakit (%)	B	34,139,217,849	B	0	B	33,219,543,838																
				Nilai SAKIP Rumah Sakit (%)	B		B		B																	
				Persentase Temuan material pemeriksaan keuangan pada Rumah Sakit (%)	0		0		0																	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	34.139.217.849	0,00	0	100,00	33.219.543.838									0,00	14,707,996,820						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	100	31.839.217.849	0,00	0	100	12.219.543.838	0%	4,070,395,132	0%	2,492,415,612					40,00%	6,562,810,744	186,73%	6.562.810.744	**186,73%**	**20,61%**	Rumah Sakit Umum Daerah	
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	904	31,839,217,849	0	0	2,954	12,219,543,838	844	4,070,395,132	844	2,492,415,612					1,688	6,562,810,744	1,688	6,562,810,744	**186,73%**	**20,61%**	Rumah Sakit Umum Daerah	Belum Tercapai
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	99	1.800.000.000	0,00	0	100	0	0%	0	0%	0					0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	Rumah Sakit Umum Daerah	
		1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Rumah Sakit Umum Daerah	Tidak Terlaksana
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD yang berjalan baik (%)	0	500.000.000	0,00	0	0	21.000.000.000	0%	3,420,005,370	0%	4,725,180,706					40,00%	8,145,186,076	45,00%	8.145.186.076	**0,00%**	**1.629,04%**	Rumah Sakit Umum Daerah	
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	500,000,000	0	0	1	21,000,000,000	0	3,420,005,370	0	4,725,180,706					0	8,145,186,076	0	8,145,186,076	**45,00%**	**1.629,04%**	Rumah Sakit Umum Daerah	Belum Tercapai
Total Target (RP)						**38,844,853,442**											**Total Realisasi (RP)**			**16,654,458,060**					
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**46,79**	**42,87**					
Predikat kinerja																			**SR**	**SR**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Sumber : Evaluasi Renja RSUD Mamuju Tengah Triwulan II

Untuk hasil Realisasi Kinerja RSUD Mamuju Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, meliputi 2 (dua) Program yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target anggaran sebesar Rp. 33.219.543.838 pada Evaluasi Renja Triwulan II per tanggal 4 Juli 2025 terealisasi sebesar Rp. 14.707.996.818 dengan persentase sebesar 44,28%.
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat target anggaran sebesar Rp 5.625.309.604 pada Evaluasi Renja Triwulan II per tanggal 4 Juli 2025 terealisasi sebesar Rp1.946.461.240 dengan presentase sebesar 34,60%.

Realisasi anggaran RSUD Mamuju Tengah Triwulan II yang ditampilkan adalah data realisasi per tanggal 4 Juli 2025

2.2 Faktor-faktor Penyebab Pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam penyelenggaraan Kinerja RSUD Mamuju Tengah terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja program/kegiatan, antara lain :

Dalam penyelenggaraan Kinerja RSUD Mamuju Tengah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja program/kegiatan, antara lain :

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target realisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12,219,543,838 pada Triwulan II per tanggal 4 Juli 2025 terealisasi sebesar Rp. 6,562,810,744 Pencapaian realisasi 53,71%.
- Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD target realisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp. 21,000,000,000 pada Triwulan II per tanggal 4 Juli 2025 terealisasi sebesar Rp. 8,145,186,076 Pencapaian realisasi sebesar 38,79%.
- Sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit target realisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp. 533,684,604 pada Triwulan II per tanggal 4 Juli 2025 terealisasi sebesar Rp. 249,875,000 Pencapaian realisasi sebesar 46,82%.
- Sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit target realisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5,091,625,000 pada Triwulan II per tanggal 4 Juli 2025 terealisasi sebesar Rp. 1,696,586,240 Pencapaian realisasi 33,32%.

2.3 Implikasi yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran triwulan II, dapat diketahui bahwa capaian kinerja RSUD Mamuju Tengah masuk dalam kategori sangat rendah, begitu pula dengan penyerapan anggaran RSUD Mamuju Tengah 42,87%. Oleh karena itu, Implikasi yang timbul terhadap capaian program rencana kerja perangkat daerah ialah tingginya target realisasi pada TW III dan TW IV sehingga harus terus melakukan perbaikan dan meningkatkan realisasi pada TW III dan TW IV agar seluruh rencana kerja pada tahun 2025 dapat terlaksana.

2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh RSUD Mamuju Tengah untuk mengatasi factor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Meningkatkan proses administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien dengan menjalin koordinasi antar seksi dan subseksi.
2. PPTK segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan

BAB III
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Mamuju Tengah yang direncanakan untuk periode tahun 2025 meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota

Kegiatan dari program ini meliputi :

- Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah

  Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi gaji dan Tunjangan ASN
- Peningkatan Pelayanan BLUD

  Kegiatan dari program ini yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan dari program ini meliputi :

- Peyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

  Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung rumah sakit dan pembangunan fasilitas lainnya. Kegiatan ini pula bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit. Pengadaan alat kesehatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan standar peralatan serta mengikuti perkembangan teknologi kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan bahan habis pakai dan obat di rumah sakit.
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

  Kegiatan dari program ini yaitu Evaluasi dan pengembanganstandar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diarahkan untuk operasional pelayanan rumah sakit.

Rencana kerja dan pendanaan RSUD Mamuju Tengah tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel dibawah berisi program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra RSUD Mamuju Tengah dan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Mamuju Tengah tahun 2025 adalah sebanyak 2 Program dan 4 Kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 34.896.069.434 sebelum perubahan. Sedangkan untuk perubahan kebutuhan dana sebesar Rp. 38.844.853.442 dengan sumber pendanaan seluruh anggaran bersumber dari APBD dan BLUD.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**51.190.882.105,00**	**34.896.069.434,00**	**38.844.853.442,00**	**-12.346.028.663,00**							**55.047.541.721,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**51.190.882.105,00**	**34.896.069.434,00**	**38.844.853.442,00**	**-12.346.028.663,00**							**55.047.541.721,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**51.190.882.105,00**	**34.896.069.434,00**	**38.844.853.442,00**	**-12.346.028.663,00**							**55.047.541.721,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 persen**	**100 persen**	**32.021.030.721,00**	**29.603.944.434,00**	**33.219.543.838,00**	**2.842.272.000,00**							**34.863.302.721,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	12.021.030.721,00	11.603.944.434,00	12.219.543.838,00	198.513.117,00				-			12.863.302.721,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				215 Orang/ bulan	215 Orang/ bulan	12.021.030.721,00	11.603.944.434,00	12.219.543.838,00	198.513.117,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			12.863.302.721,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase layanan BLUD yang berjalan baik*				100 persen	100 persen	20.000.000.000,00	18.000.000.000,00	21.000.000.000,00	1.000.000.000,00			-	-	-		22.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	20.000.000.000,00	18.000.000.000,00	21.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase SPM RSUD yang Tercapai**				**100 persen**	**100 persen**	**19.169.851.384,00**	**5.292.125.000,00**	**5.625.309.604,00**	**1.014.387.616,00**							**20.184.239.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenhi standar*				100 persen	100 persen	14.965.612.384,00	200.000.000,00	533.684.604,00	14.451.927.780,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dandatau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	14.965.612.384,00	200.000.000,00	533.684.604,00	14.451.927.780,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESTIATAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB PENUGASAN PEMBANGUNAN RS INDUK			Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar*				100 persen	100 persen	4.184.239.000,00	5.092.125.000,00	5.091.625.000,00	907.386.000,00				Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			10.184.239.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	4.184.239.000,00	5.092.125.000,00	5.091.625.000,00	907.386.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Permasalahan 4 + 1 (Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi)			10.184.239.000,00	DINAS KESEHATAN
	JUMLAH								**51.190.882.105,00**	**34.896.069.434,00**	**38.844.853.442,00**	**-12.346.028.663,00**							**55.047.541.721,00**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mamuju Tengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan. Renja RSUD Mamuju Tengah merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Renja RSUD Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan penting yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 sekaligus untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025. Dalam upaya mencapai target tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh Aparatur RSUD Mamuju Tengah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun pada Renstra RSUD Mamuju Tengah. Perubahan Rencana Kerja yang dilaksanakan diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Tobadak, 7 Agustus 2025
Direktur

dr. Nur Fitriana, Sp.GK.
Pangkat : Penata Tingkat 1
NIP. 19861234 201412 2 001

RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan kegiatan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang memuat uraian lebih rinci Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) secara garis besar berisikan tentang evaluasi kinerja Tahun sebelumnya dan Rencana Kerja Tahun yang akan datang. Uraian dan evaluasi Program dan kegiatan tahun sebelumnya, berfungsi sebagai pedoman serta arah kebijakan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran serta digunakan sebagai dasar penilaian tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan Rencana Kerja Tahun yang akan berjalan merupakan pedoman rencana program dan kegiatan serta target kinerja tahun yang akan datang.

Akhir kata melalui dokumen Rencana kerja ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Tobadak, 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran

Drs. H. Muhammad Samsir, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199412 1 069

DAFTAR ISI

Kata pengantar i

Daftar isi ii

Bab I Pendahuluan 1

a. Latar Belakang 1

b. Dasar Hukum..... 1

c. Maksud dan Tujuan 2

d. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... 4

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 4

b. Sumber Daya Perangkat Daerah 6

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah 7

BAB III Tujuan Sasaran dan Arah kebijakan..... 9

1. Tujuan Renstra 7

2. Sasaran Renstra .....

3. Strategi Perangkat Daerah.....

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....

BAB IV Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan 17

BAB V Penutup..... 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Setiap tahun pada Organisasi Perangkat Daerah (Renstra –OPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 – 2029, Dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 – 2029. Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasanaparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan sertapeningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKabupatenMamuju Tengah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwaRencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2025-2029 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, programdan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerahmaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja OPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dankegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalamRenstra OPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKabupatenMamuju Tengah sebagai salahsatu Dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No. 8 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah, merupakan implementasi dari

berlakunya Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2008 tentang Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau disebut juga dengan Renja-OPDmerupakan dokumen perencanaan tahunan tingkat OPD. Penyusunan Renja OPDmerupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan oleh aturan hukum yang berlaku mengacu kepada RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dan berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029. Secara ringkas penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaranterdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025



Lebih jelas tahapan dan proses yang mesti dilakukan dalam penyusunan renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Tahapan Persiapan ;

(1) Pembentukan SK tim penyusun renja

(2) Orientasi tim kerja

(3) Penyusunan agenda tim kerja

(4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

II. Tahapan Penyusunan rancangan renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025;

(1) Penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun 2025 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada RPJP 2025- 2029 Kabupaten Mamuju Tengah

(2) Mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya

(3) Memecahkan masalah yang sedang dihadapi

(4) Berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

III. Pelaksanaan Forum OPD.

Peserta forum OPD terdiri dari wakil peserta MusrenbangKecamatan, OPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD kabupaten/kota. Dimana teknik pelaksanaan forum OPD tidak diatur secara rinci dalam Permendagri 86 tahun 2017, namun disarankan agar dapat dilakukan menggabungkan beberapa OPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangka ntingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Adapun tujuan pelaksanaan forum OPD adalah untuk :

a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masingOPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;

b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugasdan fungsi OPD;

c. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD; dan;
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD.

Hasil pelaksanaan forum OPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan forumOPD, berita acara forum OPD dijadikan bahan dalam penyempurnaan rancangan Renja OPD. Dimana penyempurnaan seluruh rancangan renja OPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD yang akan dijadikan bahan dalam Musrenbang RKPD tahun 2025.

IV. Penetapan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025.

Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyempurnaan didasarkan pada isi RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi Renja OPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakarankepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, proses akhir adalah ditetapkannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranTahun 2025 melalui Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranTahun 2025 mengacu kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranTahun 2025 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranTahun 2025 adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran tahun 2025.
- Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepadaSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sesuai aturan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKabupaten Mamuju Tengah ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**

  Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan rencana kerja yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

  Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- **BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**

  Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD, program dan kegiatan.
- **BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan tentang rencana kerja dan pendanaan oragnisasi perangkat daerah pada tahun 2025 yang disusun berdasarkan pagu indikatif.

- **BAB V Penutup**

  Bab ini berisikan tentang catatan penting dalam rangka pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RenstraSatpol PP Dan Damkar Kab. Mamuju Tengah

Dalam melakukan penyusunan RenjaSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKab. Mamuju Tengah Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasiatas pelaksanaan kegiatanSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu, evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2022, dan 2023 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam KebakaranKab. Mamuju Tengah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2025 yang merupakan tahun ke-1 periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah Tahun 2025-2029. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah pada tabel berikut :

Tabel 2.1

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Menurunnya Gangguan Ketenteraman Dan ketertiban Umum			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	11,675,836,650	100	2,912,602,460	100	2,765,062,477																
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	100,00	11.675.836.650	0,00	2.912.602.460	100,00	2.765.062.477									0,00	1.866.560.300						
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan GangguanKetentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (%)	100	11.656.261.650	55,00	2.912.602.460	100	2.710.050.565	0%	557,001,800	0%	293,408,000	0%	961,312,500	0%	0	0,00%	1,811,722,300	83,75%	4.724.324.760	**83,75%**	**40,53%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	58,193,250	1	37,194,160	1	3,700,000	1	3,201,800	0	480,000	0	0	0	0	1	3,681,800	2	40,875,960	**200,00%**	**70,24%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	206,472,000	1	150,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150,480,000	**100,00%**	**72,88%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tidak Terlaksana
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60	11,361,822,000	12	2,724,928,300	12	2,625,930,210	3	553,800,000	3	292,928,000	3	880,900,000	0	0	9	1,727,628,000	21	4,452,556,300	**35,00%**	**39,19%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Tercapai
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0	29,774,400	0	0	3	80,420,355	0	0	0	0	3	80,412,500	0	0	3	80,412,500	3	80,412,500	**0,00%**	**270,07%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	50	19.575.000	0,00	0	50	55.011.912	0%	0	0%	23,520,000	0%	31,318,000	0%	0	0,00%	54,838,000	75,00%	54.838.000	**150,00%**	**280,14%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	0	0	0	1	35,436,912	0	0	0	3,945,000	1	31,318,000	0	0	1	35,263,000	1	35,263,000	**50,00%**	**0,00%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1	19,575,000	0	0	1	19,575,000	0	0	1	19,575,000	0	0	0	0	1	19,575,000	1	19,575,000	**100,00%**	**100,00%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
2	Meningkatnya Layanan Penanganan Korban Bencana Kebakaran			Cakupan Pelayanan Korban Bencana Kebakaran (%)	100	7,392,099,994	100	2,755,200,000	100	1,456,200,000																
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase pelayananan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran (%)	100,00	7.392.099.994	0,00	2.755.200.000	100,00	1.456.200.000									0,00	907,520,000						

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan penaganan bahan berbahaya (%)	100	7.392.099.994	14,17	2.755.200.000	100	1.456.200.000	0%	331,250,000	0%	113,900,000	0%	462,370,000	0%	0	0,00%	907,520,000	21,67%	3.662.720.000	**21,67%**	**49,55%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	6,005,099,994	12	1,456,200,000	12	1,456,200,000	3	331,250,000	3	113,900,000	3	462,370,000	0	0	9	907,520,000	21	2,363,720,000	**35,00%**	**39,36%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Tercapai
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12	1,387,000,000	1	1,299,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,299,000,000	**8,33%**	**93,66%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tidak Terlaksana
3	Meningkatnya dukungan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Persentase capaian kinerja program perangkat Daerah (%)	100	13,349,374,156	100	2,504,233,296	100	3,782,523,610																
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	13.349.374.156	0,00	2.504.233.296	100,00	3.782.523.610									0,00	1,946,356,447						
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	0	125.848.809	26,11	38.211.600	0	5.330.208	0%	0	0%	5,330,100	0%	0	0%	0	80,00%	5,330,100	56,11%	43.541.700	**0,00%**	**34,60%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	64,922,118	2	24,769,900	3	2,837,763	0	0	3	2,837,700	0	0	0	0	3	2,837,700	5	27,607,600	**83,33%**	**42,52%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	38,611,349	1	6,761,800	2	2,492,445	0	0	2	2,492,400	0	0	0	0	2	2,492,400	3	9,254,200	**60,00%**	**23,97%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	22,315,342	1	6,679,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,679,900	**25,00%**	**29,93%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tidak Terlaksana
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	0	6.807.997.734	22,50	1.680.805.196	0	3.250.019.402	0%	516,545,468	0%	327,657,480	0%	791,677,799	0%	0	40,00%	1,635,880,747	43,03%	3.316.685.943	**0,00%**	**48,72%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	6,726,668,671	19	1,647,857,596	68	3,243,852,188	17	516,545,468	17	327,657,480	17	788,066,399	0	0	51	1,632,269,347	70	3,280,126,943	**92,11%**	**48,76%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Tercapai
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	28,134,674	1	19,992,200	1	2,555,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19,992,200	**25,00%**	**71,06%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Tercapai
		1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	25	8,490,097	5	5,923,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5,923,200	**20,00%**	**69,77%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tidak Terlaksana
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	44,704,292	4	7,032,200	4	3,611,437	0	0	0	0	3	3,611,400	0	0	3	3,611,400	7	10,643,600	**35,00%**	**23,81%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Tercapai

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100	30.865.319	0,00	0	100	9.000.000	0%	0	0%	0	10%	0	20%	0	0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	30,865,319	0	0	4	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Tercapai
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	738.955.240	18,33	136.400.000	100	146.000.000	0%	66,000,000	0%	32,000,000	30%	24,000,000	10%	0	0,00%	122,000,000	36,67%	258.400.000	**36,67%**	**34,97%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	458,445,240	1	86,400,000	1	96,000,000	1	16,000,000	0	32,000,000	0	24,000,000	0	0	1	72,000,000	2	158,400,000	**40,00%**	**34,55%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	280,510,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1	50,000,000	2	100,000,000	**33,33%**	**35,65%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)	100	4.965.680.060	20,00	487.041.500	100	339.367.000	0%	37,293,000	0%	49,812,000	20%	63,241,000	30%	0	0,00%	150,346,000	45,50%	637.387.500	**45,50%**	**12,84%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	263,106,000	5	84,541,500	12	82,982,000	3	1,503,000	3	10,777,000	3	6,801,000	0	0	9	19,081,000	14	103,622,500	**56,00%**	**39,38%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Tercapai
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	4,702,574,060	12	402,500,000	12	256,385,000	3	35,790,000	3	39,035,000	3	56,440,000	0	0	9	131,265,000	21	533,765,000	**35,00%**	**11,35%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Tercapai
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (Unit)	12	680.026.994	51,61	161.775.000	12	32.807.000	0%	15,089,600	0%	5,340,000	5%	12,370,000	5%	0	0,00%	32,799,600	100,00%	194.574.600	**833,33%**	**28,61%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	680,026,994	16	161,775,000	15	32,807,000	4	15,089,600	4	5,340,000	7	12,370,000	0	0	15	32,799,600	31	194,574,600	**100,00%**	**28,61%**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tercapai
						Total Target (RP)				**8,003,786,087**						**Total Realisasi (RP)**				**4,720,436,747**					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**79,41**		**58,98**		
																				Predikat kinerja		**T**		**R**		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																										

Disusun
Tobadak, 06 Desember 2025

KEPALA SATUAN POLISI PP DAN DAMKAR

Drs. MUHAMMAD SAMSIR, M.Pd
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV
NIP : 196912311994121069

Disetujui
Tobadak, ... 2025
PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

DZULKIFLI, S.IP., M.Si., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV
NIP : 198107072001121005

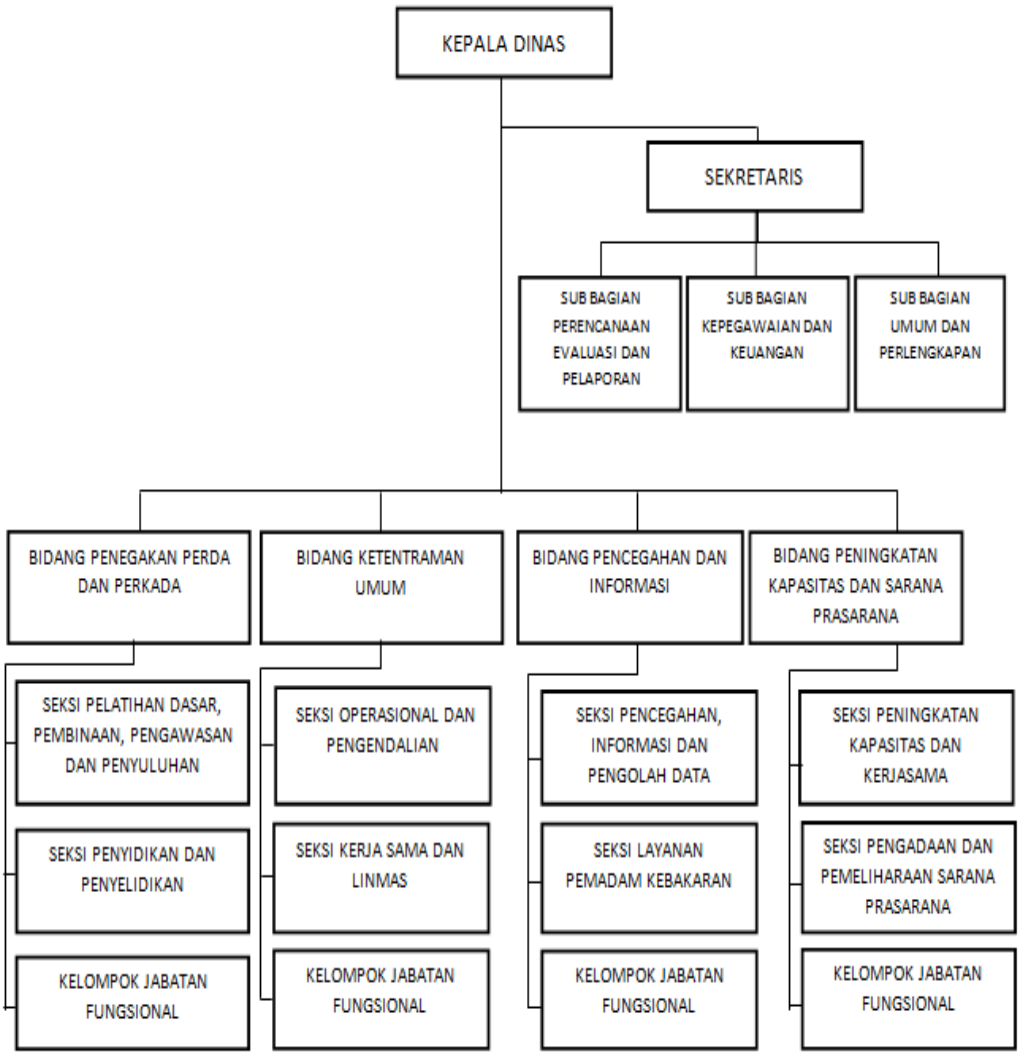
Dicetak melalui https://matengkab.emonev.com/laporan/export_evaluasi_renja/pdf

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai tugas pokok fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, struktur Organisasai Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

a) Kepala Satuan
b) Sekretariat, membawahi :
   - Sub Bagian BagianPerencanaan dan Pelaporan
   - Sub Bagian Bagian Keuangan
   - Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian
c) Kepala Bidang Penegakan Perda Dan Perkada, membawahi:
   - Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan
   - Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
d) BidangKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
   - Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
   - Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman
e) BidangPencegahan, membawahi :
   - Kepala Seksi Seksi Pencegahan dan Inspeksi
   - Kepala SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
f) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahi:
   - Kepala SeksiPemadaman Kebakaran
   - Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolahan Data
g) Unit pelaksana teknis dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang diatur tersendiri sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA KEBAKARAN
Kabupaten Mamuju Tengah



Untuk menjalankan tugas dan fungsi Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia serta sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran dapat digambarkan melalui tabel berikut :

No	Pendidikan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil		
1.	S2	4 Orang
2.	S1	10 Orang
3.	D3	-
4.	D2	-
5.	SLTA	-
Jumlah		14 Orang
No	**Pendidikan**	**Jumlah**
Non PNS		
1.	S2	- Orang
2.	S1	21 Orang
3.	D3	5 Orang
4.	D2	3 Orang
5.	SLTA	286 Orang
6.	SLTP	-
Jumlah		297 Orang
No	**Golongan**	**Jumlah**
1.	I	-Orang
2.	II	-Orang
3.	III/a	1 Orang
4.	III/b	1 Orang
5.	III/c	3 Orang
6.	III/d	3 Orang
7.	IV/a	5 Orang
8.	IV/c	1 Orang
Jumlah		14O rang

Kondisi Sarana dan Prasarana
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mobil Operasional Kasat	-
2.	Mobil Operasional Kasi	-
3.	Mobil Pengawal	-
4.	Mobil Operasional Lapangan	-
5.	Mobil Dalmas	-
6.	Mobil Pemantau Kagiatan	-
7.	Mobil Patroli Wilayah	-
8.	Mobil Pemadam Kebakaran	9 Unit
9.	Mobil Tangki Pemadam	1 Unit
10.	Motor Patroli dan Pengawalan	2 Unit
11.	Motor Operasional Pegawai	6 unit
12.	Motor Petugas Reaksi Cepat	-

2.3 Isu-isu PentingPenyelenggaraan Tugas dan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Isu – isu penting berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum yang menjadi isu penting pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Belum memiliki PPNS
2. Belum memiliki anggota Satpol- PP
3. Antisipasi meningkatnya tindak kriminalitas/gangguan keindahan, keamanan dan ketertiban
4. Keterbatasan anggaran Diklat Damkar Dan SATPOL PP
5. JumlahTenaga Pemadam yang masih minim
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan, khususnya perlengkapan keamanan personil pemadam kebakaran.
7. Peningkatan kebutuhan suku cadang kendaraan operasional Damkar

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah telah sesuai dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai beserta indikator kinerja sasaran. Dan rencana capaiannya yang merupakan representase tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rencana kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah dibuat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya:

1. Sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Rencana pembangunan jangka panjang nasional

3. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
4. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal
5. Rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat
6. Rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Visi misi Bupati terpilih Kabupten Mamuju Tengah
8. Potensi dan permasalahan yang menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabuapten Mamuju Tengah
9. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
10. Musyawarah pembangunan ditingkat kecamatan
11. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabuapten Mamuju Tengah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Prabowo Subianto pada 8 Januari 2025, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Dalam satu tahun pertama, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya."Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut. Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya. "Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu RPJMN 2025-2029 merupakan visi, misi, dan agenda Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029. RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana

strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan 9 Nawacita Presiden Repoblik Indoinesia diataranya yang berhubungan dengan Visi Misi **Satpol-PP Dan Damkar** adalah **"Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Untuk Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara, Melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Keamanan Nasional Yang Terpercaya Dan Pembangunan Pertahanan Negara Tri Matra Terpadu Yang Dilandasi Kepentingan Nasioanaldan Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim''**

3.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, maka perlu di jabarkan dalam Renja untuk menjadi tujuan dan sasaran yang lebih operasional yang di tuangkan dalam APBD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yaitu :

- **Tujuan :**

  " Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman,Nyaman dan tertib menuju Masyarakat Mamuju Tengah yang sadar dan patuh hukum."

- **Sasaran :**
  - Meningkatkan kinerja atas pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan aturan lainnya yang dilaksanakan oleh OPD
  - Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
  - Meningkatkan penanganan dan pelayanan personil Pemadam Kebakaran
  - Meningkatkan kerjasama antar leading sektor dalam peningkatan kinerja
  - Meningkatkan sistem penegakan hukum dalam rangka penegakan/kepastian hukum

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran direncanakan akan dilaksanakan beberapa Program dan Kegiatan dengan total alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024 ialah sebesar Rp. **6.366.200.000,-**. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**7.760.764.583,00**	**2.161.507.005,00**	**8.003.786.087,00**	**243.021.504,00**							**7.596.065.867,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.760.764.583,00**	**2.161.507.005,00**	**8.003.786.087,00**	**243.021.504,00**							**7.596.065.867,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7.760.764.583,00**	**2.161.507.005,00**	**8.003.786.087,00**	**243.021.504,00**							**7.596.065.867,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**3.126.265.867,00**	**2.107.810.093,00**	**3.782.523.610,00**	**-88.000.000,00**							**3.038.265.867,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Laporan perencanaan , penganggaran & evaluasi tepat waktu*				4 Dokumen	4 Dokumen	46.500.000,00	6.117.758,00	5.330.208,00	41.169.792,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol-PP dan Damkar		46.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	3.148.008,00	2.837.163,00	-27.162.837,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00	2.969.750,00	2.492.445,00	6.007.555,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*				9 Orang	9 Orang	1.952.985.067,00	1.632.547.335,00	3.250.019.402,00	1.297.034.335,00			-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol-PP dan Damkar		1.952.985.067,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.930.485.067,00	1.626.345.906,00	3.243.862.188,00	1.313.367.121,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DIKURANGI PERHITUNGAN ALAS KEDJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			1.930.485.067,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	3.021.582,00	2.555.777,00	6.444.223,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00	4.179.847,00	3.611.437,00	-3.888.563,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai PD yang dilayani*				9 Orang	9 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol-PP dan Damkar		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kendangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD terpalan sesuai standar*				100 %	100 %	50.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-41.000.000,00			-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol-PP dan Damkar		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-41.000.000,00	Kab. Memuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD PD penunjang yang terpenuh*				10 buah	10 buah	296.780.800,00	146.000.000,00	146.000.000,00	-62.780.800,00			-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol-PP dan Damkar		208.780.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	103.780.800,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-7.780.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			103.780.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Memuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Memuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah jasa penunjang urusan yang tersedia*				1 Dokumen	1 Dokumen	643.000.000,00	281.047.500,00	339.367.000,00	-203.633.000,00			-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol-PP dan Damkar		643.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	93.000.000,00	84.662.500,00	82.982.000,00	-10.018.000,00	Kab. Memuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			93.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	196.385.000,00	256.385.000,00	-193.615.000,00	Kab. Memuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah BMD penunjang urusan yang terpelihara*				5 Unit	5 Unit	275.000.000,00	33.097.500,00	32.807.000,00	-242.193.000,00			-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	-		187.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	275.000.000,00	33.097.500,00	32.807.000,00	-242.193.000,00	Kab. Memuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			187.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dapat di selesaikan**				**100 %**	**100 %**	**3.178.298.716,00**	**53.696.912,00**	**2.765.062.477,00**	**-76.698.716,00**							**3.101.600.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pemeliharaan dan Perlyuhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				3 Dokumen	3 Dokumen	2.838.298.716,00	3.700.000,00	2.710.050.565,00	128.248.151,00				Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol PP dan Damkar		2.761.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pengelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	137.698.716,00	3.700.000,00	3.700.000,00	133.998.716,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				13 laporan	13 laporan	1.315.200.000,00	0,00	2.625.930.210,00	1.310.730.210,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			1.276.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Ditakukan Penindakan				13 Laporan	13 laporan	1.385.400.000,00	0,00	80.470.355,00	1.304.979.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			1.385.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang dilegakkan*				100 %	100 %	340.000.000,00	49.996.912,00	55.011.912,00	284.988.088,00				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol PP dan Damkar		340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	49.996.912,00	35.436.912,00	-84.563.088,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	19.575.000,00	80.425.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pelayananan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**1.456.200.000,00**	**0,00**	**1.456.200.000,00**	**0,00**							**1.456.200.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan dan Jenis Layanan Penyelamatan dan penagnani bahan berbahaya*				1 Dokumen	1 Dokumen	686.400.000,00	0,00	1.456.200.000,00	769.800.000,00			-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol-PP dan Damkar		686.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	686.400.000,00	0,00	1.456.200.000,00	769.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			686.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*jumlah pemberdayaan Masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran*				5 kali	5 kali	769.800.000,00	0,00	0,00	-769.800.000,00			-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satpol-PP dan Damkar		769.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	100 Orang	769.800.000,00	0,00	0,00	-769.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			769.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	J U M L A H								**7.760.764.583,00**	**2.161.597.005,00**	**8.003.786.087,00**	**243.021.504,00**							**7.596.065.867,00**	

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagaipersoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyatadari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatberdasarkan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community BaseDevelopment* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku kepentingan(*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigmabaru. Proses perencanaan pembangunan seperti ini pada gilirannya akan mampumenciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat (*trickle downeffect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah adalah **Program Tahunan** yang sesuai dengan Tupoksi. Rencana Kerja ini, selainmenjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, berfungsi pula sebagai saranapeningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruhstaf Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2025 disusun dan menyadari bahwa perkembangan ilmupengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, maka Renjaini buat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan.

Tobadak, 2024
Kepala Satuan,

Drs. H. Muhammad Samsir, M.Pd
Pangkat : PembinaUtama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199412 1 069

2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KAB. MAMUJU TENGAH

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Jl. Tammauni Pue Ballung No. 1, Gedung Kantor Bupati Mamuju Tengah, Kompleks KTM. Tobadak, Tobadak, Mamuju Tengah 91563

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Perkenaan dan Rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen mengacu Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*". Untuk mencapai Visi yang telah diuraikan di atas, ditetapkan beberapa Misi Pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga. Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam pencapaian sasaran dan program Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari sempurna, maka dalam proses perumusan dan penyusunannya menjadi dokumen Perubahan Rencana Kerja akan melibatkan setiap unit kerja atau Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan seluruh stakeholder terkait, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyelesaian dokumen Perubahan Rencana

Kerja. Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut, besar harapan Sekretariat Daerah untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

Tobadak, 30 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH



Litha Febriani, SE., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025 SEMESTER PERTAMA DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH **8**

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekreatriat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 8

2.2. Penetapan Indikator Kinerja 15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah 17

2.4. Reviu terhadap RKPD Tahun 2024 18

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH **31**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.3. Program dan Kegiatan 33

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**

BAB V : PENUTUP **49**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 9

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja..... 16

Tabel 2.4. Review terhadap RKPD tahun 2025..... 19

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 36

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang didalamnya juga mencakup perencanaan mengenai pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju TengahTahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan kinerja perangkat daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sejalan dengan arahan RPJPD serta Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun

2021-2026 yaitu "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara*" diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Mamuju Tengah secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
3. Mendorong daya saing perekonomian daerah;
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik;
5. Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat;
6. Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawsi Barat Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor x Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Perubahan Rencana Kerja ini bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah dalam bentuk Perubahan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perubahan rencana kerja.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;

4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya;
6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, meliputi :

I. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Kerja Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 pada semester pertama;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Sekretraiat Daerah;

2.4. Review Terhadap RKPD;

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. BAB III TUJUAN, DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025

IV. BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Semester Pertama dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah penyesuaian stelah dilaksanakannya program dan kegiatan pada semester pertaa Tahun Anggaran 2025 dan penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah di raih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Semester Pertama Tahun Anggaran 2025		
		Target Renja Perangkat Daerah tahun (S-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (S-1)	Tingkat Realisasi (%)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**495.878.296**	**314.204.553**	
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi**	**471.813.164**	**313.104.553**	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	201.124.354	114.161.917	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60.765.708	21.902.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	209.923.102	177.040.636	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Persentase kerjasama yang difasilitasi**	**25.065.132**	**1.100.000**	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24.264.462	1.100.000	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	800.670	0	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**313.231.979**	**199.698.300**	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	161.336.640	106.081.100	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55.092.654	32.968.200	
Penumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Diumentasi	96.802.685	60.649.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Pesentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**	**2.640.906.616**	**1.402.935.566**	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.305.436.954	1.163.086.954	

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	235.581.280	198.077.580	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	99.888.382	41.771.032	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**396.564.005**	**230.886.540**	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**353.445.501**	**198.986.540**	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	237.930.284	169.540.540	
Koordinasi singkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen singkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	51.001239	0	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	64.513.978	29.746.000	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam yang di Pantau**	**43.118.504**	**31.900.000**	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	43.118.504	31,900.000	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana**	**255.063.801**	**160.473.058**	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	173.468.063	116.628.464	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	45.598.500	28.564.594	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pe Pelaksanaan Pembangunan	35.997.238	15.280.000	

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Paket yang Ditender/Lelang secara Elektronik**	**815.415.580**	**648.800.887**	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	317.275.458	265.409.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	375.681.493	338.942.487	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	122.458.629	44.449.400	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**23.100.990.997**	**15.933.279.849**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan umen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**24.438.460**	**7.844.000**	
Koordinasi dan Penyusunan Doumen RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan umen RKA-SKPD	10.221.960	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan umen DPA-SKPD	6.371.960	0	
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.844.540	7.844.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**5.280.505.404**	**3.376.760.712**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.061.190.167	3.252.715.712	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	219.311.237	164.045.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**463.898.145**	**417.632.350**	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	370.000.000	369.034.350	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.898.145	48.598.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**1.011.120.000**	**490.840.000**	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.011.120.000	490.840.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**4.734.469.894**	**3.887.560.893**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	286.795.695	153.371.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.138.090.400	922.458.100	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	226.485.000	112.045.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.326.050.000	950.039.146	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.757.048.800	1.749.647.647	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**1.646.133.850**	**1.499.285.000**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.432.785.000	1.416.085.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42.550.000	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	170.798.850	83.200.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**3.396.123.929**	**2.376.310.579**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.876.612	21.873.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.089.142.000	561.032.619	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.564.305.400	1.436.665.400	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	698.799.917	356.739.560	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**2.643.158.000**	**1.227.220.614**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.112.975.000	698.916.614	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	540.495.000	362.715.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	989.688.000	165.589.000	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi**	**982.743.314**	**749.046.210**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.973.314	123.174.701	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	232.770.000	231.687.000	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Medical Check Up Kepala Daeran dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000	94.384.500	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	299.800.000	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase kerumahtanggaan setda yang difasilitasi**	**2.918.400.000**	**1.901.229.500**	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1.622.400.000	1.057.527.500	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1.296.000.000	843.702.000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi**	**433.883.386**	**297.579.196**	
Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	239.980.619	187.567.196	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	83.280.000	62.275.000	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	110.622.767	47.737.000	

Penataan Organisasi	**Jumlah Dokumen penataan organisasi**	**701.089.046**	**676.033.596**	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	67.203.818	54.143.818	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80.899.078	72.639.078	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	109.088.424	98.088.000	
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	443.897.726	441.162.700	

Sumber : Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisi kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan cara mengkaji indicator kinerja yang akan dicapai oleh instansi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah indikator kinerja kunci Sekretariat tertuang secara langsung, indikator apa yang akan ditetapkan dan dicapai oleh Sekretariat Daerah. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input),* keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Sesuai analisis yang telah dilakukan, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah;
c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa;
d. Terkendalikannya Inflasi Daerah;
e. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah;
f. Terpenuhinya Penunjang Pemerintahan dalam Percapaian Kinerja Setda.

Indikator kinerja kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diuraikan pada tabel 2.2 berikut.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN INDKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO.	Fungsi Penunjang	IKK	TARGET				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kwartal pertama	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3,45 %	3 %	3 %
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	9 %	10 %	11 %	14 %	10 %	10,71 %	14 %	14 %
		Rasio nilai belanja yang melalui pengadaan	45 %	47 %	48 %	49 %	48 %	49,30 %	48 %	49 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *world class governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah yang akan dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2025 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknogi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4) Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
6) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan komitmen;
7) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025.

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam salah satu pelaksana peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi yang memfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan standarisasi ketatalaksanaan khususnya pelayanan publik berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada sekretariat daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap RKPD Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU POKOK	PAGU PERUBAHAN
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**495.878.296**	**314.204.553**
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi**	**471.813.164**	**313.104.553**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	201.124.354	114.161.917
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60.765.708	21.902.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	209.923.102	177.040.636
Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Persentase kerjasama yang difasilitasi**	**25.065.132**	**1.100.000**
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24.264.462	1.100.000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	800.670	0
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**313.231.979**	**199.698.300**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	161.336.640	106.081.100
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55.092.654	32.968.200
Penumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Diumentasi	96.802.685	60.649.000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Pesentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**	**2.640.906.616**	**1.402.935.566**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.305.436.954	1.163.086.954
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	235.581.280	198.077.580
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	99.888.382	41.771.032

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**396.564.005**	**230.886.540**
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**353.445.501**	**198.986.540**
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	237.930.284	169.540.540
Koordinasi singkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen singkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	51.001239	0
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	64.513.978	29.746.000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam yang di Pantau**	**43.118.504**	**31.900.000**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	43.118.504	31,900.000
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana**	**255.063.801**	**160.473.058**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	173.468.063	116.628.464
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	45.598.500	28.564.594
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pe Pelaksanaan Pembangunan	35.997.238	15.280.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Paket yang Ditender/Lelang secara Elektronik**	**815.415.580**	**648.800.887**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	317.275.458	265.409.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	375.681.493	338.942.487
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	122.458.629	44.449.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**23.100.990.997**	**15.933.279.849**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan umen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**24.438.460**	**7.844.000**

Koordinasi dan Penyusunan Doumen RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan umen RKA-SKPD	10.221.960	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan umen DPA-SKPD	6.371.960	0
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.844.540	7.844.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**5.280.505.404**	**3.376.760.712**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.061.190.167	3.252.715.712
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	219.311.237	164.045.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**463.898.145**	**417.632.350**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	370.000.000	369.034.350
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.898.145	48.598.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**1.011.120.000**	**490.840.000**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.011.120.000	490.840.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**4.734.469.894**	**3.887.560.893**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	286.795.695	153.371.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.138.090.400	922.458.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	226.485.000	112.045.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.326.050.000	950.039.146
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.757.048.800	1.749.647.647

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**1.646.133.850**	**1.499.285.000**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.432.785.000	1.416.085.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42.550.000	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	170.798.850	83.200.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**3.396.123.929**	**2.376.310.579**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.876.612	21.873.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.089.142.000	561.032.619
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.564.305.400	1.436.665.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	698.799.917	356.739.560
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**2.643.158.000**	**1.227.220.614**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.112.975.000	698.916.614
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	540.495.000	362.715.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	989.688.000	165.589.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi**	**982.743.314**	**749.046.210**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.973.314	123.174.701
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	232.770.000	231.687.000

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Medical Check Up Kepala Daeran dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000	94.384.500
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	299.800.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase kerumahtanggaan setda yang difasilitasi**	**2.918.400.000**	**1.901.229.500**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1.622.400.000	1.057.527.500
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1.296.000.000	843.702.000
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi**	**433.883.386**	**297.579.196**
Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	239.980.619	187.567.196
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	83.280.000	62.275.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	110.622.767	47.737.000
Penataan Organisasi	**Jumlah Dokumen penataan organisasi**	**701.089.046**	**676.033.596**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	67.203.818	54.143.818
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80.899.078	72.639.078
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	109.088.424	98.088.000
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	443.897.726	441.162.700

Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah juga membuka usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui penelitian lapangan dan musrenbang, namun Sektertariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah hanya memiliki pagu yang sangat terbatas, sehingga plafon usulan dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang urgent dan prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis yang dapat diusulkan dalam Musrenbang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang berubah dari Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi Bupati Terpilih.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kab. Mamuju Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi "*Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara* dan mendukung misi keempat *"Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik".*

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.2.1 Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi
b. Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda.

3.2.2 Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Meningkatnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah;
c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa;
d. Terkendalikannya Inflasi Daerah;
e. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah;
f. Terpenuhinya Penunjang Pemerintahan dalam Percapaian Kinerja Setda.

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renja ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini

dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2025. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana kerja sebelumnya merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review renja menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2025 terbagi pada Sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun

2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 20 kegiatan, dan 56 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut tertuang dalam bagian berikutnya yakni pada bab IV (empat) Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, direncanakan akan dilaksanakan Program dan Kegiatan dengan total alokasi dana Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 32.265.210.946 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU POKOK	PAGU PERUBAHAN	Selisih
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase capaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**495.878.296**	**496.864.567**	**(14.748.979)**
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang terpenuhi**	**439.951.014**	**471.799.435**	**31.848.421**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	162.609.104	201.124.354	39.085.090
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	46.313.308	60.765.708	13.912.400
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	231.028.602	209.923.102	21.149.069
Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Persentase kerjasama yang difasilitasi**	**71.662.532**	**25.065.132**	**(46.597.400)**
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	59.212.512	24.264.462	(34.948.050)
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12.450.020	800.670	(11.649.350)
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**375.482.904**	**313.231.979**	**(62.250.925)**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	180.420.640	161.336.640	(19.259.372)
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	84.621.784	55.092.654	(29.529.130)
Penumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Diumentasi	110.440.480	96.802.685	(13.462.423)
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Pesentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**	**2.648.428.616**	**2.640.906.616**	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.371.506.954	2.659.432.954	287.926.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan	193.937.030	235.581.280	41.644.250

	Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	82.984.632	99.888.382	1.903.750
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**			
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**273.347.262**	**353.445.501**	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	214.653.284	237.930.284	23.277.000
Koordinasi singkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen singkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	0	51.001239	51.001239
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	58.693.978	64.513.978	6.429.000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam yang di Pantau**	**44.558.754**	**43.118.504**	**(2.049.250)**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	44.558.754	43.118.504	(2.049.250)
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana**	**271.798.801**	**255.063.801**	**(16.749.447)**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	179.691.313	173.468.063	(6.477.697)
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	46.670.250	45.598.500	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pe Pelaksanaan Pembangunan	45.437.238	35.997.238	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Paket yang Ditender/Lelang secara Elektronik**	**786.374.070**	**815.415.580**	**29.041.510**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	244.744.248	317.275.458	72.531.210

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	402.535.693	375.681.493	(26.854.200)
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.094.129	122.458.629	(16.635.500)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**21.529.730.313**	**23.100.990.997**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan umen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**24.438.460**	**24.438.460**	**0**
Koordinasi dan Penyusunan Doumen RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan umen RKA-SKPD	10.221.960	10.221.960	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan umen DPA-SKPD	6.371.960	6.371.960	0
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.844.540	7.844.540	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**3.427.535.350**	**5.280.505.404**	**1.517.723.498**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.269.424.113	5.061.190.167	1.452.833.066
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.111.237	219.311.237	64.890.432
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**401.498.145**	**463.898.145**	**59.300.000**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	370.000.000	370.000.000	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.498.145	93.898.145	60.250.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**217.920.000**	**1.011.120.000**	**725.200.000**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	217.920.000	1.011.120.000	725.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**5.993.036.265**	**6.081.987.865**	**88.951.600**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	190.795.695	346.045.695	155.250.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	908.890.400	1.138.090.400	224.867.600,
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53.235.000	226.485.000	244.950.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.326.050.000	1.326.050.000	172.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.514.065.170	2.805.449.170	708.616.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**1.470.348.850**	**2.251.947.350**	**781.598.500**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.257.000.000	1.432.785.000	230.085.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42.550.000	201.550.000	159.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	170.798.850	170.798.850	563.312.350
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**3.448.323.929**	**3.309.560.137**	**(138.763.792)**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.876.612	43.876.612	36.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.089.142.000	1.089.142.000	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.564.305.400	1.564.305.400	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	786.999.917	721.371.125	65.628.792
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**2.692.286.000**	**3.220.202.000**	**527.916.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.112.975.000	1.112.975.000	0

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	540.495.000	705.195.000	164.700.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.038.816.000	1.402.032.000	363.216.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase keuangan dan operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi**	**935.943.314**	**982.743.314**	**46.800.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	173.173.314	219.973.314	46.800.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	232.770.000	232.770.000	0
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Medical Check Up Kepala Daeran dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000	130.000.000	0
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	0
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase kerumahtanggaan setda yang difasilitasi**	**2.918.400.000**	**3.418.160.000**	**499.760.000**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1.622.400.000	1.968.150.000	345.750.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1.296.000.000	1.450.010.000	154.010.000
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi**	**411.029.155**	**433.883.386**	**22.853.926**
Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	185.545.140	239.980.619	57.440.348
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	94.684.748	83.280.000	(14.404.748)
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	130.799.267	110.622.767	(20.181.674)
Penataan Organisasi	**Jumlah Dokumen penataan organisasi**	**719.136.956**	**982.584.884**	**263.447.928**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	70.561.818	102.838.344	32.276.526
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	61.628.578	111.367.950	49.739.372
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	147.648.834	109.088.424	(38.560.410)
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	439.297.726	659.290.166	219.992.440

Sumber : Bagian-Bagian Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Tengah

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan yang termuat dalam Renstra yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 untuk dipergunakan rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara utuh serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen lainnya, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian target indikator serta parameter yang ada.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana strategis OPD yang telah ditetapkan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama semester kedua Tahun Anggaran 2025, Perubahan Renja juga dapat digunakan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

RENJA PERUBAHAN
T.A 2025

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor dan Instansi Pemerintah lainnya. RENJA Perubahan OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen perencanaan, juga diharapkan menyatukan Visi, Misi dan Strategi OPD dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang maju, mandiri khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan, serta untuk mengevaluasi kinerja OPD pada semester pertama pada tahu berjalan dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada semester berikutnya, terutama peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah.

RENJA Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Adapaun berhasil dan tidaknya RENJA ini tidak lepas dari profesionalitas, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap Prioritas Program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang pada akhirnya mampu mewujutkan VISI dan MISI Kabupaten Mamuju Tengah.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masih banyak kelemahan-kekurangan, oleh karena itu kami mohon masukan dari semua pihak dan Masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan Program dan Kegiatan yang Startegis pada masa yang akan datang.

Tobadak, 07 Oktober 2025

KEPALA DINAS

BAHTIAR, S.Kep

NIP. 19680915 198803 1 005

DAFTAR ISI

SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar belakang 3
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II 8

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah 8
2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah 15
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 18
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 19
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 25

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB IV PENUTUP 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah merupakan penjabaran dari penjabaran rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memberikan gambaran tentang program kegiatan yang akan dikerjakan oleh organisasi oleh perangkat daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten mamuju Tengah tahun 2021-2026. Yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten mamuju Tengah.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Mamuju Tengah dalam pelayanan dibidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan berdasarkan visi dan misi Kabupaten mamuju Tengah yang tertuan dalam Renstra 2021-2026 Yaitu :

Visi

“Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Bingkai Lalla Tasi’sara Melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ”

Misi

1. Percepatan peningaktan infranstruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energy listrik serta sumber energy lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Perbaikan dan peningaktan infranstruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumber daya manusia dibidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.
3. Perbaikan dan peningkatan infranstruktur pendidikan sumber daya manusia dibidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkaulitas handal dan bermoral.
4. Peningkatan dan penyediaan infranstruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, prikanan dan peternakan sebagai sector unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Mendorong peningaktan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah disetiap kecamatan yang ada dikabupaten mamuju tengah.
6. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerinathan yang bersih jujur dan bermartabat dan serta berdaya saing.
7. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat mamuju tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia.

8. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai wilayah, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah kabupaten mamuju tengah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten mamuju Tengah

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambanhan Lembaran Negara Republic Nomor 4700);
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5397);
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Singkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 105m, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6041)
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keluangan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6322);
g. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam pencapai visi, misi dan tujuan organsiasi serta memberikan pedoman dalam pencapaian program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah ini bertujuan untuk mensikronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah untuk

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan rencana kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025 ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, reviu terhadap rancangan perubahan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana perubahan program, kegiatan, serta kebutuhan dana dan pagu indikatif Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat komitmen pelaksanaan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Renja Dinas TransNaker Kabupaten mamuju Tengah Tahun 2025 Triwulan II meliputi kebiajakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan.

Table 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
Kabupaten Mamuju Tengah

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase rencana tenaga kerja (%)	100,00	212.000.000	0,00	0	100,00	39.724.410	0	39,314,410		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	100,00	212.000.000	0,00	0	100,00	39.724.410	0,00%	39,314,410	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5	212.000.000	0	0	1	39.724.410	1	39.314.410	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompet ensi (%)	40,00	952.000.000	0,00	0	25,00	54.743.054	0	54,733,054		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	100,00	740.000.000	0,00	0	100,00	54.743.054	0,00%	54,733,054	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	190	740.000.000	0	0	20	54.743.054	20	54.733.054	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
2			Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial (%)	100	3.756.244.524	100	0	100	1.941.765.796				
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih (%)	100,00	3.756.244.524	0,00	0	100,00	1.941.765.796	0	1,931,744,123		
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Perkara)	4,00	3.756.244.524	0,00	0	5,00	1.941.765.796	0,00%	1,931,744,123	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25	3.756.244.524	0	0	5	1.941.765.796	5	1.931.744.123	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
3			Persentase Transmigran yang mandiri (%)	100	4.251.064.500	80	0	85	129.117.193				

	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perenc anaan pertana han dan kawas an transm igrasiyang tereali sasi menjad i kegiat an teknis (%)	100,00	402.021.500	0,00	0	100,00	119	0	0		
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu (%)	100,00	402.021.500	0,00	0	100,00	119	0,00%	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	5	402.021.500	0	0	1	119.000	0	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Belum Tercapai
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perencanaan pertanahan dan kawasan transmigrasi yang terealisasi menjadi kegiatan teknis (%)	100,00	1.430.021.500	0,00	0	100,00	65.784.109	0	65,650,021		
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan Transmigrasi yang dibangun (%)	100,00	1.028.000.000	0,00	0	100,00	65.784.109	0,00%	65,650,021	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	228.000.000	0	0	2	29.511.080	2	29.376.992	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai

	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	90	800.000.000	0	0	24	36.273.029	24	36.273.029	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase produktivitas pertanian pada kawasan transmigrasi (%)	88,00	2.419.021.500	0,00	0	74,00	63.214.084	0	62,952,210		
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Transmigran yang mandiri (%)	100,00	989.000.000	0,00	0	100,00	63.214.084	0,00%	62,952,210	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	254	279.000.000	0	0	24	43.040.410	24	43.013.260	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	10	710.000.000	0	0	2	20.173.674	2	19.938.950	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
4			Persentase pencapaian kinerja Transnaker (%)	100	7.215.243.279	100	0	100	1.688.641.132				
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	7.215.243.279	0,00	0	100,00	1.688.641.132	0	1,659,987,559		

	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran (%)	100,00	323.476.651	0,00	0	100,00	241.456.276	99,00%	236,756,276	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	91.456.650	0	0	2	53.049.204	2	52.949.204	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	153.569.700	0	0	1	37.171.152	1	36.771.152	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	16.080.000	0	0	1	36.620.562	1	36.520.562	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	15.430.000	0	0	1	35.661.214	1	32.961.214	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	15.731.621	0	0	1	36.817.478	1	36.417.478	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai

	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	31.208.680	0	0	4	42.136.666	4	41.136.666	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	100,00	5.720.251.081	0,00	0	100,00	1.203.647.386	98,00%	1,182,914,313	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	5.619.668.930	0	0	12	1.175.327.448	12	1.154.594.375	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	100.582.151	0	0	4	28.319.938	4	28.319.938	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100,00	67.508.061	0,00	0	100,00	5.241.202	100,00%	3,741,202	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	73	67.508.061	0	0	1	5.241.202	1	3.741.202	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100,00	66.825.000	0,00	0	100,00	25.400.000	100,00%	25,380,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	66.825.000	0	0	4	25.400.000	4	25.380.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100,00	327.028.456	0,00	0	100,00	79.830.228	100,00%	79,687,028	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	########	36.000.008	0	0	1	17.000.000	1	17.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44	11.070.000	0	0	7.000	1.125.000	7.000	1.125.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	204.958.448	0	0	180	5.110.000	180	5.110.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	75.000.000	0	0	181	56.595.228	181	56.452.028	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang (%)	100,00	475.020.000	0,00	0	100,00	95.997.240	100,00%	95,997,240	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	475.020.000	0	0	1	95.997.240	1	95.997.240	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (%)	100,00	139.185.880	0,00	0	100,00	27.472.300	99,00%	25,915,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	139.185.880	0	0	5	27.472.300	5	25.915.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	100,00	95.948.150	0,00	0	100,00	9.596.500	99,00%	9,596,500	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	44.698.150	0	0	16	8.596.500	16	8.596.500	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	51.250.000	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
Total Target (RP)								**3.853.991.585**		**3.814.381.377**			
Rata-rata capaian kinerja (%)										**96,15**	**98,97**		
Predikat kinerja										**ST**	**ST**		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:													

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib Ketenagakerjaan dan urusan pilihan Transmigrasi. Meskipun sebagai organisasi pelaksana urusan non pelayanan dasar, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab besar bagi keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah Periode 2021 – 2026.

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD dapat diukur dengan menggunakan dasar Indikator SPM/Standar nasional, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama SKPD.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Tengah

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKU											
1	Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)			2.70%	2.20%	1.87%	1.50%	2,52%	1.88%	1.87%	1.50%	
2	Tingkat partisipasi angkatan Kerja(TPAK)			70%	80%	85%	90%	70,84%	63,15%	85%	90%	
3	jumlah usaha industrial			0	5	5	5	5	5	5	5	
	IKK											
1	Persentase Kegiatan Yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			20%	25%	30%	35%	29%	23%	30%	35%	

2	Persentase Tenaga Kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten / Kota			30%	30%	40%	40%	39,32%	0.036%	40%	40%	
3	Persentase Tenaga kerja bersertifikat Kompetensi			100%	100%	100%	100%	2.28%	0,95%	100%	100%	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			15%	20%	20%	25%	32,00%	14,22%	20%	25%	
5	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Bina			2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum yang menjadi isu strategis pada Dinas Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten mamuju tengah melalui program Transmigrasi
2. Melakukan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia didaerah eks Transmigrasi
3. Peningkatan infranstruktur dan pemberian bantuan pada daerah-daerah eks Transmigrasi
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
5. Belum tersedianya balai latihan kerja
6. Pelatihan dan penampatan tenaga kerja
7. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja mandiri

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Table 2.2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota Mamuju Tengah

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output)*	Satuan	2025		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output)*	Satuan	2025		Catatan Penting
			target	Rp				target	Rp	
(4)	(5)		(13)	(14)	(4)	(5)		(13)	(14)	
DINAS TRANSMIGRASI					**DINAS TRANSMIGRASI**					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	***Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan***		40	19.903.987	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan***		40	19.903.987	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga kerja yang di fasilitasi pelayanan antar kerja*		40	19903987	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga kerja yang di fasilitasi pelayanan antar kerja*		40	19903987	

Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*	*Orang*	40	19.903.987	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*	*Orang*	40	19.903.987	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	***Rasio Tenaga Kerja yang siap kerja***		**1**	**0**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Rasio Tenaga Kerja yang siap kerja***		**1**	**16.255.944**	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase peningkatan tenaga kerja yang terdata*		-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase peningkatan tenaga kerja yang terdata*		10	16.255.944	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusunan RTK Mikro*	*Orang*	0	0	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusunan RTK Mikro*	*Orang*	10	16.255.944	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	***Persentase kasus terselesaikan***		**100%**	**1.671.082.255**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase kasus terselesaikan***		**100%**	**1.618.563.095**	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		18.005	1.671.082.255	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		5	1.618.563.095	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*Perkara*	5	10.574.695	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*Perkara*	5	2.880.695	

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	*Orang*	18.000	1.660.507.560		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	*Orang*	18.000	1.615.682.400	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian**		**1**	**35.281.361**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian**		**1**	**168.335.461**	
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*		2	35.281.361		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*		2	168.335.461	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*Satuan Permukiman*	2	35.281.361		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*Satuan Permukiman*	2	168.335.461	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	***Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)***		1.201	14.904.852		**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)***		1.201	67.953.118	
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Persentase Perncanaan Transmigrasi*		1.201	14.904.852		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Persentase Perncanaan Transmigrasi*		1.201	67.953.118	
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain*	*Dokumen*	1	14.904.852		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain*	*Dokumen*	1	47.952.852	

Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	*Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Hektar*	1.200	0	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	*Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Hektar*	1.200	20.000.266	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***		**16**	**74.222.750**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***		**16**	**39.277.750**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**16**	**74.222.750**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**16**	**39.277.750**	
Fasilitas kunjungan tamu	*Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu*	*laporan*	12	5.000.000	Fasilitas kunjungan tamu	*Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu*	*laporan*	12	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	4	69.222.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	4	29.277.750	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**1**	**15.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**1**	**15.600.000**	
Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	27.452.824	Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	27.452.824	
Penydiaan jasa pelayanan umum kantor	*jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor*	*Laporan*	12	15.600.000	Penydiaan jasa pelayanan umum kantor	*jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor*	*Laporan*	12	15.600.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***		**1**	**1.091.502.757**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***		**1**	**1.275.110.773**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	14	1.091.502.757		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	14	1.275.110.773	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	4	1.556.231		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	4	1.110.146	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	4	2.635.042		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	4	32.255.125	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi kepegawaian terlayani***		**1**	**106.450.000**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi kepegawaian terlayani***		**1**	**64.000.000**	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Unit*	14	30.000.000		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Unit*	14	30.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Dokumen*	1	20.500.000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Dokumen*	1	20.500.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	1	22.125.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	0	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	2	33.825.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	2	13.500.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***		**1**	**99.000.000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***		**1**	**95.997.240**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*	3	99.000.000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Unit*	3	95.997.240	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***		**1**	**19.888.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***		**1**	**139.742.350**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan*	*Unit*	6	17.922.200		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	6	35.922.200	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	0	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	0	4.200.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	3	19.888.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	3	99.620.150	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***		**6**	**8.623.562**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***		**6**	**33.304.168**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	1.417.067		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	28.417.067	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	2.039.302		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	952.725	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan*	*Dokumen*	1	1.978.099		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan*	*Dokumen*	1	1.741.653	

		Dokumen Perubahan RKA-SKPD						*Dokumen Perubahan RKA-SKPD*					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	1.597.254		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	958.777	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*Laporan*	1	1.591.840		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	1	1.233.946	

Tobadak, 07 Oktober 2025

Kepala Dinas

BAHTIAR, S.Kep

Nip. 19660915 198903 1 005

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelahkegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Rencana Kinerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelahkegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*) dan Kegiatan *(output)*	Satuan	2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
											target	Rp		
(1)	(2)		(3)					(4)	(5)		(13)	(14)	(19)	(20)
			02.	**0 7**				**DINAS TRANSMIGRASI**						
			2.	**0 7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
Meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah		Tingkat Penganggur an terbuka (TPT)	2.	0 7	0 4			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan***		20	19.903.987	DISTRANSNAK ER	Mamuju Tengah
	Meningkatnya Kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK)	2.	0 7	0 4	2.0 3		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga kerja yang di fasilitasi pelayanan antar kerja*		20	19903987	DISTRANSNAK ER	Mamuju Tengah
			2.	0 7	0 4	2.0 1	2	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*	*Orang*	20	19.903.987	DISTRANSNAK ER	Mamuju Tengah
			2.	**0 7**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Rasio Tenaga Kerja yang siap kerja***		**100**	**16.255.944**	**DISTRANSNAK ER**	**Mamuju Tengah**

			2.	07	02	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase peningkatan tenaga kerja yang terdata*		10	16.255.944	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			2.	07	02	2.01	02		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusunan RTK Mikro*	*Orang*	10	16.255.944	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
	meningkatnya Penyelesaian perselisishan hubungan industrial	**jumlah usaha industrial**	**2.**	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		***Persentase kasus terselesaikan***		**100%**	**1.671.082.255**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			2.	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		18.010	1.671.082.255	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			2.	07	05	2.02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	*Perkara*	10	10.574.695	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			2.	07	05	2.02	05		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	*Orang*	18.000	1.660.507.560	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

mewujudkan kawasan Transmigrasi sebagai lumbung pertanian	**meningkatnya persentase Peningkatan produktivitas pertanian kawasan Transmigrasi**	**persentase Produktivitas pertanian pada kawasan transmigrasi yang di bina**	**3.**	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian**		**1**	**168.335.461**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3.	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Luas Pengembangan kawasan Transmigrasi berbasis pertanian*		2	168.335.461	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	04	2.01	02		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	*Satuan Permukiman*	2	168.335.461	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	02			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		***Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)***		27	34.905.118	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	02	2.01			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Persentase Perncanaan Transmigrasi*		27	34.905.118	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	02	2.01	01		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain*	*Dokumen*	2	14.904.852	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	32	02	2.01	03		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	*Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Hektar*	25	20.000.266	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
Mneingkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Transmigrasi	**Meningkatnya dukungan dan pencapaian kinerja**	**Persentase capaian Program Dinas Transmigrasi dan**	**3**	**32**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***		**95**	**1.673.350.394**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**

dan Tenaga Kerja	**urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**	**Tenaga Kerja**														
			3.	**32**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**16**	**39.277.750**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	32	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu*	*Paket*	12	10.000.000	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	32	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	4	29.277.750	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**32**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**24**	**43.052.842**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	32	01	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunkiasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	12	27.452.842	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	32	01	2.08	2		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Laporan*	12	15.600.000	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**32**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu***		**22**	**1.308.476.044**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	32	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	14	1.275.110.773	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	32	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	4	1.110.146	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

			3	3 2	0 1	2.0 2	0 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Laporan*	4	32.255.125	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**3 2**	**0 1**	**2.0 5**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi kepegawaian terlayani***		**3**	**13.500.000**	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 5	0 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	1	0	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 5	1 1			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	2	13.500.000	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**3 2**	**0 1**	**2.0 7**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi***		**1**	**95.997.240**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	3 2	0 1	2.0 7	0 2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*Unit*	1	95.997.240	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3.	**3 2**	**0 1**	**2.0 9**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara***		**23**	**139.742.350**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	3 2	0 1	2.0 9	0 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Unit*	14	35.922.200	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.1 2	0 6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	6	4.200.000	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.1 0	0 9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	3	99.620.150	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

			3	**3 2**	**0 1**	**2.0 1**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggar dan evaluasi tepat waktu***		**6**	**33.304.168**	**DISTRANSNAKER**	**Mamuju Tengah**
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	2	28.417.067	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	952.725	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Dokumen*	1	1.741.653	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Dokumen*	1	958.777	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
			3	3 2	0 1	2.0 1	0 5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Laporan*	1	1.233.946	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah
JUMLAH													244	3.583.833.159	DISTRANSNAKER	Mamuju Tengah

BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Maka dengan ini diharapkan pelaksanakan pembangunan akan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mencapai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) , Khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah .

Keberhasilan pencapain tujuan dan sasaran rencana strategis Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah tidak hanya tergantung pada Dinas yang terkait saja akan tetapi harus dikoordinasikan secara terpadu dengan instansi itu sendiri dan keikutsertaan masyarakat , mulai dari perencanaan , penyusunan program dan pelaksanaan.

Diharapkan Renja ini dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kita semua khusus Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah serta mampu mengoptimalkan upaya untuk pencapaian tujuan yang kita inginkan.

Tobadak, 07 Oktober 2025
Kepala Dinas

BACHTIAR, S.Kep
NIP. 19680915 198803 1 005

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2025



Pemuda Maju Olahraga Jaya!

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030.

Rencana kerja Perubahan DISPORAPAR Kabupaten Mamuju Tengah disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai visi, misi, tujuan strategis, kebijakan dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai leading sektor di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Mamuju Tengah. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada Renstra, RKPD, RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan DISPORAPAR Kab Mamuju Tengah yang telah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025. Harapan kami dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kab. Mamuju Tengah sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Mamuju Tengah.

Topoyo, September 2025

Kepala Dinas,

ACHMAD SETIAWAN, SH
Pangkat : Pembina/IV.a
NIP. : 19870329 201001 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……

Daftar Isi ……

BAB I PENDAHULUAN ……..

1.1. Latar Belakang ……...

1.2. Dasar Hukum ……

1.3. Maksud dan Tujuan ……..

1.4. Sistematika Penulisan ……..

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II …….....

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD ……

BAB IV PENUTUP ……..

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Pengertian Renja Perubahan

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perbaikan dan penyesuaian dari Renja Pokok Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Mamuju Tengah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memperbaiki dan menyesuaikan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025;
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

B. Proses Penyusunan Renja Perubahan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 23 Tahun 2014

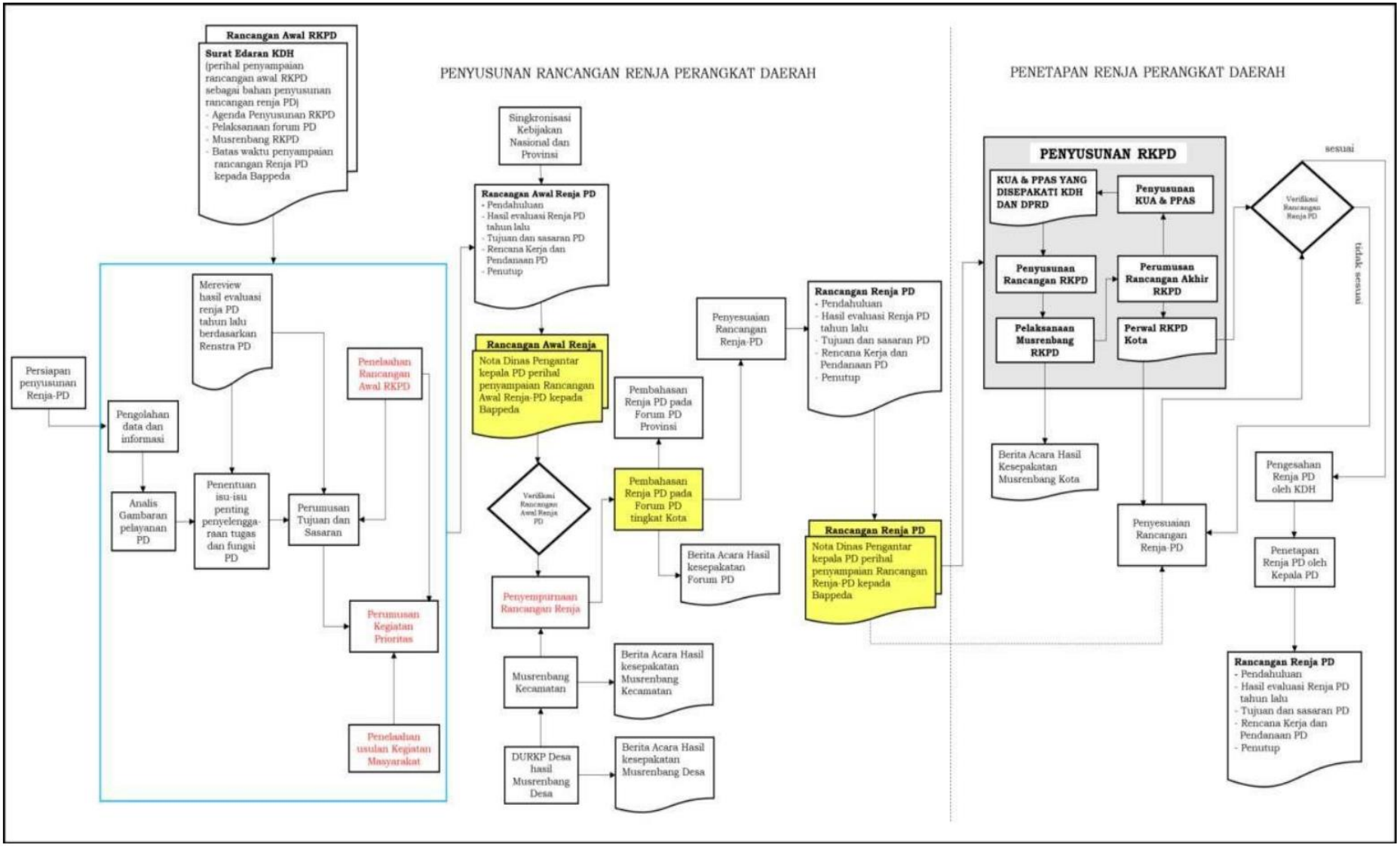
tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini :


PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja PD)
- Agenda Penyusunan RKPD
- Pelaksanaan forum PD
- Musrenbang RKPD
- Batas waktu penyampaian rancangan Renja PD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-PD
Pengolahan data dan informasi
Analis Gambaran pelayanan PD
Mereview hasil evaluasi renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Perumusan Kegiatan Prioritas
Penelaahan usulan Kegiatan Masyarakat
Singkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Awal Renja PD
- Pendahuluan
- Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
- Tujuan dan sasaran PD
- Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Penutup
Rancangan Awal Renja
Nota Dinas Pengantar kepala PD perihal penyampaian Rancangan Awal Renja-PD kepada Bappeda
Verifikasi Rancangan Awal Renja PD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan
DURKP Desa hasil Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja PD pada Forum PD Provinsi
Pembahasan Renja PD pada Forum PD tingkat Kota
Berita Acara Hasil kesepakatan Forum PD
Penyesuaian Rancangan Renja-PD
Rancangan Renja PD
- Pendahuluan
- Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
- Tujuan dan sasaran PD
- Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Penutup
Rancangan Renja PD
Nota Dinas Pengantar kepala PD perihal penyampaian Rancangan Renja-PD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA & PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Perwal RKPD Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-PD
Verifikasi Rancangan Renja PD
sesuai
tidak sesuai
Pengesahan Renja PD oleh KDH
Penetapan Renja PD oleh Kepala PD
Rancangan Renja PD
- Pendahuluan
- Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
- Tujuan dan sasaran PD
- Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Penutup

C. Keterkaitan antara Renja Perubahan PD dan Dokumen Perencanaan lainnya

Renja Perubahan OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perubahan OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perubahan OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perubahan OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik. Keterkaitan Renja Perubahan OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perubahan OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Keterkaitan Renja Perubahan OPD dengan Renja Provinsi dilakukan secara integrative dengan dokumen - dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kab. Mamuju Tengah.

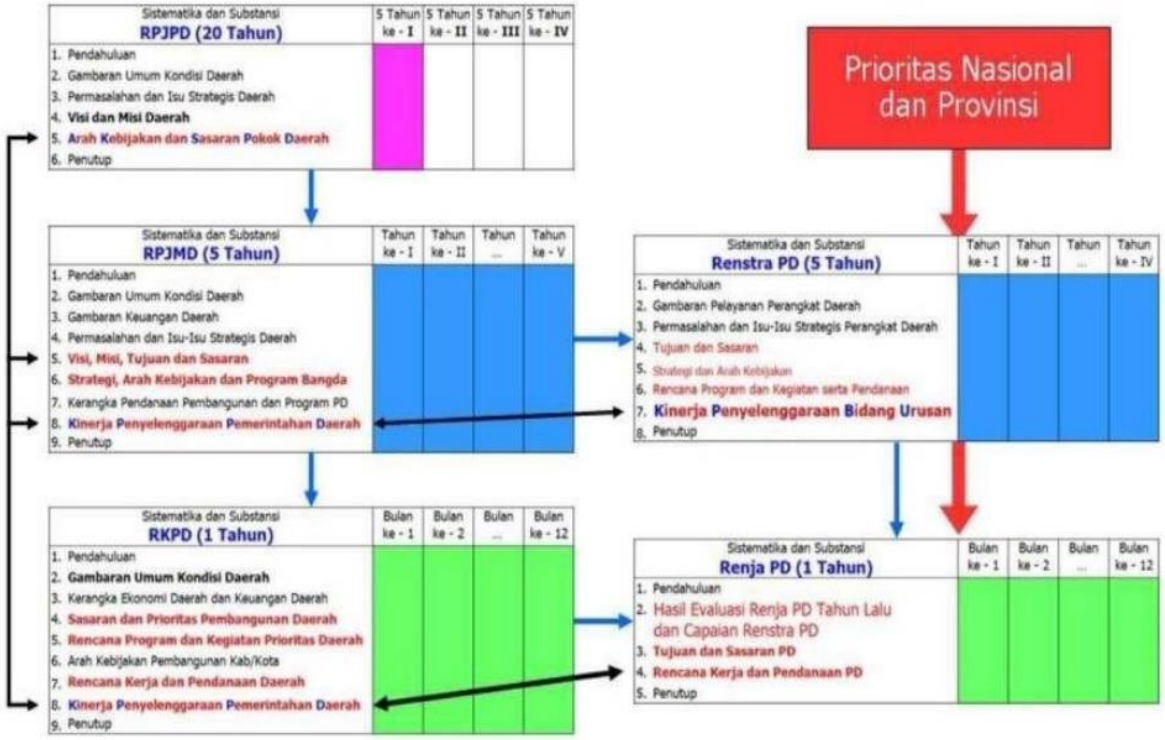
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja

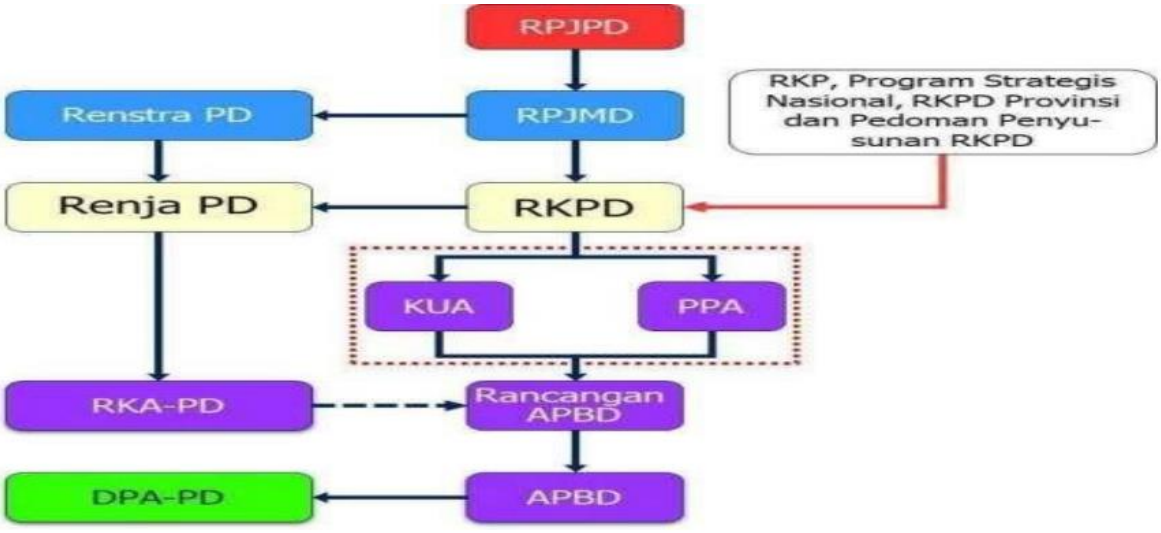
SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA PPAS, dan RAPBD.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian Lembaga dan Renja Kabupaten/kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut :



D. Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :



1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah yaitu :

1. Undang–undang Nomor 26 tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
11. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Renja 2026 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab Mamuju Tengah adalah :

1. Pedoman bagi DISPORAPAR Kab Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Mamuju Tengah dalam RPJMD 2021 – 2026;
2. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, dan evaluasi di DISPORAPAR Kab Mamuju Tengah.

Adapun tujuan dari penuyusunan Renja DISPOARAPAR Kab Mamuju Tengah adalah:

1. Sebagai landasan operasional DISPORAPAR Kab Mamuju Tengah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
2. Sebagai pedoman untuk melakukan monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja DISPORAPAR Kabupaten Mamuju Tengah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat

Daerah, dengan Renja K/L dan Renja kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD s/d triwulan II, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PD

3.1. Rencana kerja dan pendanaan Daerah, paling sedikit mencakup urusan/ program/ kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Pada bagian ini dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan TRIWULAN II dapat disajikan dalam table berikut :

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)	80	8,823,664,457	50	1,331,073,560	65	1,299,669,855																
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	8.823.664.457	0,00	1.331.073.560	100,00	1.299.669.855									0,00	882,670,458						
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran (%)	80	297.946.830	24,60	75.961.125	65	34.520.000	0%	11,750,000	0%	7,020,000	0%	4,500,000	0%	0	80,00%	23,270,000	26,19%	99.231.125	**40,29%**	**33,30%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	82,946,830	4	18,074,471	4	34,520,000	2	11,750,000	0	7,020,000	0	4,500,000	0	0	2	23,270,000	6	41,344,471	**33,33%**	**49,84%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	40,000,000	2	14,085,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14,085,025	**25,00%**	**35,21%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	30,000,000	1	14,366,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14,366,092	**25,00%**	**47,89%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	40,000,000	1	9,121,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,121,301	**25,00%**	**22,80%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	30,000,000	1	9,867,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,867,702	**25,00%**	**32,89%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	35,000,000	1	4,913,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,913,715	**25,00%**	**14,04%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	40,000,000	4	5,532,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5,532,819	**25,00%**	**13,83%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (%)	80	6.549.561.977	23,75	874.235.442	65	1.030.611.176	0%	290,199,328	0%	180,446,894	0%	222,477,257	0%	0	40,00%	693,123,479	30,00%	1.567.358.921	**46,15%**	**23,93%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	5,573,861,977	13	795,435,136	13	962,931,176	0	273,699,328	0	167,766,894	0	211,477,257	0	0	0	652,943,479	13	1,448,378,615	**25,00%**	**25,99%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150	860,700,000	30	61,340,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	61,340,165	**20,00%**	**7,13%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana

				Keuangan Akhir Tahun SKPD																								
		2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	100,000,000	0	0	4	67,680,000	1	16,500,000	1	12,680,000	0	11,000,000	0	0	2	40,180,000	2	40,180,000	**25,00%**	**40,18%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	80	55.000.000	25,00	23.567.933	65	9.000.000	0%	2,250,000	0%	1,500,000	0%	1,500,000	0%	0	40,00%	5,250,000	25,00%	28.817.933	**38,46%**	**52,40%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	40,000,000	0	0	1	9,000,000	0	2,250,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000	**0,00%**	**13,13%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	15,000,000	1	23,567,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23,567,933	**50,00%**	**157,12%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	80	928.400.000	32,32	196.996.325	65	65.523.750	0%	9,032,800	0%	17,011,000	0%	0	0%	0	0,00%	26,043,800	32,32%	223.040.125	**49,72%**	**24,02%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	305,000,000	2	72,799,589	5	34,050,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	2	81,799,589	**16,67%**	**26,82%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	6,000,000	1	1,202,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,202,000	**25,00%**	**20,03%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	40,000,000	2	8,265,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8,265,536	**25,00%**	**20,66%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26	50,000,000	12	13,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13,860,000	**46,15%**	**27,72%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164	527,400,000	80	100,869,200	1	31,473,750	0	9,032,800	0	8,011,000	0	0	0	0	0	17,043,800	80	117,913,000	**48,78%**	**22,36%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	80	600.000.000	20,00	92.120.179	65	92.120.179	0%	92,120,179	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	92,120,179	40,00%	184.240.358	**61,54%**	**30,71%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

		2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	600,000,000	1	92,120,179	1	92,120,179	1	92,120,179	0	0	0	0	0	0	1	92,120,179	2	184,240,358	**40,00%**	**30,71%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (%)	80	250.344.000	29,67	33.161.556	65	52.852.530	0%	9,960,000	0%	13,058,000	0%	15,120,000	0%	0	0,00%	38,138,000	29,67%	71.299.556	**45,65%**	**28,48%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26	19,000,000	12	7,065,000	1	10,266,286	0	3,360,000	0	3,398,000	0	1,000,000	0	0	0	7,758,000	12	14,823,000	**46,15%**	**78,02%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	124,844,000	12	26,096,556	1	26,986,244	0	6,600,000	0	4,460,000	0	8,920,000	0	0	0	19,980,000	12	46,076,556	**42,86%**	**36,91%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	106,500,000	0	0	1	15,600,000	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000	**0,00%**	**9,77%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (%)	80	142.411.650	17,65	35.031.000	65	15.042.220	0%	0	0%	4,725,000	0%	0	0%	0	0,00%	4,725,000	17,65%	39.756.000	**27,15%**	**27,92%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	142,411,650	3	35,031,000	1	15,042,220	0	0	0	4,725,000	0	0	0	0	0	4,725,000	3	39,756,000	**17,65%**	**27,92%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
2	Meningkatnya cakupan organisasi pemuda aktif			Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	80	5,375,746,564	50	1,442,428,934	65	364,646,564																
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelaan dan kepeloporan pemuda (%)	85,00	4.775.746.564	0,00	1.442.428.934	80,00	264.646.564									0,00	127,509,000						
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan (%)	80	4.550.746.564	13,26	1.442.428.934	65	89.646.564	0%	14,909,000	0%	6,000,000	0%	6,600,000	0%	0	0,00%	27,509,000	13,26%	1.469.937.934	**20,40%**	**32,30%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	460	650,000,000	100	83,372,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	83,372,798	**21,74%**	**12,83%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	210	765,000,000	65	267,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	267,750,000	**30,95%**	**35,00%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	888	1,975,000,000	150	1,061,110,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	1,061,110,868	**16,89%**	**53,73%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	430	420,000,000	100	30,195,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	30,195,268	**23,26%**	**7,19%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2	147,670,371	0	0	1	46,570,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	200	431,200,000	0	0	100	31,200,000	0	7,800,000	0	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	18,200,000	0	18,200,000	**0,00%**	**4,22%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	200	161,876,193	0	0	100	11,876,193	0	7,109,000	0	800,000	0	1,400,000	0	0	0	9,309,000	0	9,309,000	**0,00%**	**5,75%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	80	225.000.000	0,00	0	65	175.000.000	0%	25,000,000	0%	75,000,000	0%	0	0%	0	0,00%	100,000,000	0,00%	100.000.000	**0,00%**	**44,44%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10	225,000,000	0	0	5	175,000,000	0	25,000,000	0	75,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	**0,00%**	**44,44%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan keperamukaan (%)	60,00	600.000.000	0,00	0	55,00	100.000.000									0,00	100,000,000						
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka yang mendapatkan pembinaan (%)	80	600.000.000	0,00	0	65	100.000.000	0%	0	0%	50,000,000	0%	50,000,000	0%	0	0,00%	100,000,000	0,00%	100.000.000	**0,00%**	**16,67%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	600,000,000	0	0	1	100,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	**0,00%**	**16,67%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
3	Meningkatnya cakupan cabang olahraga aktif			Persentase Cabang Olahraga yang Aktif dalam kompetisi Daerah (%)	80	21,406,296,028	50	9,242,746,244	65	13,456,828,898																
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga (%)	46,00	21.406.296.028	0,00	9.242.746.244	46,00	13.456.828.898									0,00	1,772,970,000						
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Olahraga pada Jenjang Pendidikan Kab/Kota (%)	80	14.622.454.752	6,67	6.899.758.500	65	11.597.454.752	0%	0	0%	3,120,000	0%	0	0%	0	0,00%	3,120,000	6,67%	6.902.878.500	**10,26%**	**47,21%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

		2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	15	2,325,000,000	2	6,899,758,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6,899,758,500	**13,33%**	**296,76%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10	12,297,454,752	0	0	5	11,597,454,752	0	0	0	3,120,000	0	0	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000	**0,00%**	**0,03%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah (%)	80	1.849.467.130	23,81	2.299.348.132	65	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	23,81%	2.299.348.132	**36,63%**	**124,32%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7	350,000,000	1	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,800,000,000	**14,29%**	**514,29%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3	1,499,467,130	1	499,348,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	499,348,132	**33,33%**	**33,30%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet dalam mengikuti kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi (%)	80	609.374.146	0,00	0	65	109.374.146	0%	5,930,000	0%	6,720,000	0%	7,200,000	0%	0	0,00%	19,850,000	0,00%	19.850.000	**0,00%**	**3,26%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100	609,374,146	0	0	50	109,374,146	0	5,930,000	0	6,720,000	0	7,200,000	0	0	0	19,850,000	0	19,850,000	**0,00%**	**3,26%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Organisasi Olahraga (%)	80	4.325.000.000	9,09	43.639.612	65	1.750.000.000	0%	875,000,000	0%	0	0%	875,000,000	0%	0	0,00%	1,750,000,000	9,09%	1.793.639.612	**13,99%**	**41,47%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	11	475,000,000	2	43,639,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	43,639,612	**18,18%**	**9,19%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	3,850,000,000	0	0	1	1,750,000,000	0	875,000,000	0	0	0	875,000,000	0	0	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000	**0,00%**	**45,45%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan lokal dan mancanaegara			Jumlah Wisatawan asing dan Domestik (%)	80	7,191,416,484	50	693,646,812	65	308,180,739																	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentasi daya tarik destinasi pariwisata (%)	100,00	4.881.416.484	0,00	339.781.279	80,00	50.856.059									0,00	28,825,500						

		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Stategis Pariwisata yang ditetapkan (%)	80	2.461.416.484	2,21	259.242.478	65	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	2,21%	259.242.478	**3,40%**	**10,53%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	20	1,556,616,484	0	74,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,700,000	**0,00%**	**4,80%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	113	904,800,000	5	184,542,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	184,542,478	**4,42%**	**20,40%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Kab/Kota (%)	80	2.420.000.000	27,78	80.538.801	65	50.856.059	0%	20,532,500	0%	8,293,000	0%	0	0%	0	0,00%	28,825,500	27,78%	109.364.301	**42,74%**	**4,52%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	18	2,420,000,000	5	80,538,801	5	50,856,059	0	20,532,500	0	8,293,000	0	0	0	0	0	28,825,500	5	109,364,301	**27,78%**	**4,52%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pariwisata (%)	60,00	2.310.000.000	0,00	353.865.533	60,00	257.324.680									0,00	0						
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kunjungan Wisatawan di Kab/Kota (%)	60	2.310.000.000	25,00	353.865.533	30	257.324.680	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	25,00%	353.865.533	**83,33%**	**15,32%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3	310,000,000	0	0	1	257,324,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	2,000,000,000	2	353,865,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	353,865,533	**50,00%**	**17,69%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Terlaksana
5	Meningkatnya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif			Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat (%)	80	500,000,000	50	175,523,559	65	43,780,337																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (%)	80,00	500.000.000	0,00	175.523.559	60,00	43.780.337									0,00	18,834,000						
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Bimbingan dan Pengembangan (%)	80	500.000.000	46,88	175.523.559	65	43.780.337	0%	11,772,000	0%	7,062,000	0%	0	0%	0	0,00%	18,834,000	46,88%	194.357.559	**72,12%**	**38,87%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	32	500,000,000	15	175,523,559	1	43,780,337	0	11,772,000	0	7,062,000	0	0	0	0	0	18,834,000	15	194,357,559	**46,88%**	**38,87%**	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belum Tercapai
						Total Target (RP)			**15,473,106,393**									**Total Realisasi (RP)**		**2,930,808,958**					
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		**9,09**	**18,94**				
																		Predikat kinerja		**SR**	**SR**				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																										

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program DISPORAPAR Kab Mamuju Tengah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DISPORAPAR. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan program untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan DISPORAPAR. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DISPORAPAR.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Indicator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menetukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kineja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan triwulan II yang telah diuraikan pada Bab II, maka disusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**7.047.180.415,00**	**15.184.180.962,00**	**15.572.809.555,00**	**8.525.629.140,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.932.180.415,00**	**14.824.657.886,00**	**15.220.848.479,00**	**9.288.668.064,00**
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5.932.180.415,00**	**14.824.657.886,00**	**15.220.848.479,00**	**9.288.668.064,00**
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**65 %**	**65 %**	**2.037.180.415,00**	**986.950.926,00**	**1.399.373.017,00**	**524.819.585,00**
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu*				65 %	65 %	55.756.209,00	5.000.000,00	34.520.000,00	-21.236.209,00
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.074.471,00	5.000.000,00	34.520.000,00	25.445.529,00
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.085.025,00	0,00	0,00	-14.085.025,00
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.334.538,00	0,00	0,00	-9.334.538,00
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.121.301,00	0,00	0,00	-9.121.301,00
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.994.340,00	0,00	0,00	-4.994.340,00
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.663.715,00	0,00	0,00	-4.663.715,00
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.482.819,00	0,00	0,00	-4.482.819,00
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*				65 %	65 %	1.334.424.206,00	682.169.225,00	1.130.314.338,00	-204.109.868,00
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.069.424.206,00	682.169.225,00	1.062.634.338,00	-6.789.868,00
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00
	2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00

	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	0,00	67.680.000,00	7.680.000,00
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar*				65 %	65 %	30.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-21.000.000,00
	2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-11.000.000,00
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Pendapatan Daerah yang sudah terlaksana*				30 %	30 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	2.19.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai PD yang dilayani*				65 %	65 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
	2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*				65 %	65 %	162.000.000,00	146.606.772,00	65.523.750,00	-96.476.250,00
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	99.209.272,00	34.050.000,00	-45.950.000,00
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	47.397.500,00	31.473.750,00	-38.526.250,00
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi*				65 %	65 %	200.000.000,00	92.120.179,00	92.120.179,00	-107.879.821,00

	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	92.120.179,00	92.120.179,00	-7.879.821,00
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia*				65 %	65 %	85.000.000,00	46.012.530,00	52.852.530,00	-32.147.470,00
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.426.286,00	10.266.286,00	5.266.286,00
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	26.986.244,00	26.986.244,00	1.986.244,00
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-34.400.000,00
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*				65 %	65 %	50.000.000,00	15.042.220,00	15.042.220,00	-34.957.780,00
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	15.042.220,00	15.042.220,00	-4.957.780,00
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**				**65 %**	**65 %**	**845.000.000,00**	**242.670.564,00**	**264.646.564,00**	**155.000.000,00**
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Berbagai Sektor Kegiatan*				65 %	65 %	800.000.000,00	67.670.564,00	89.646.564,00	-710.353.436,00
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota										
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda										
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota										
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	47.670.371,00	46.570.371,00	-3.429.629,00
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota										
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	0,00	31.200.000,00	-368.800.000,00
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota										
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	20.000.193,00	11.876.193,00	-88.123.807,00
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan*				65 %	65 %	45.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	130.000.000,00
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota										
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota										
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	150.000.000,00

3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten/Kota**				**65 %**	**65 %**	**2.850.000.000,00**	**13.495.036.396,00**	**13.456.828.898,00**	**850.000.000,00**
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Prestasi Olahraga pada Jenjang Pendidikan Kab/Kota*				65 %	65 %	400.000.000,00	11.605.208.250,00	11.597.454.752,00	11.197.454.752,00
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				5 Unit	5 Unit	400.000.000,00	11.605.208.250,00	11.597.454.752,00	11.197.454.752,00
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Atlet dalam mengikuti kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi*				65 %	65 %	400.000.000,00	139.828.146,00	109.374.146,00	-290.625.854,00
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah										
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)										
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				2 Pelatda	2 Pelatda	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota										
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	139.828.146,00	109.374.146,00	9.374.146,00
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Organisasi Olahraga*				65 %	65 %	2.050.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	-300.000.000,00
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota										
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait										
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	-250.000.000,00
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Partisipasi Pramuka**				**65 %**	**65 %**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase Anggota Pramuka yang mendapatkan pembinaan*				65 %	65 %	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00

	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah										
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.115.000.000,00**	**359.523.076,00**	**351.961.076,00**	**-763.038.924,00**
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.115.000.000,00**	**359.523.076,00**	**351.961.076,00**	**-763.038.924,00**
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Sektor Pariwisata**				**65 %**	**65 %**	**845.000.000,00**	**40.000.059,00**	**50.856.059,00**	**725.000.000,00**
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan di Kab/Kota*				65 %	65 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang ditetapkan*				65 %	65 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Kab/Kota*				65 %	65 %	550.000.000,00	40.000.059,00	50.856.059,00	-499.143.941,00
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	500.000.000,00	40.000.059,00	50.856.059,00	-449.143.941,00
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang sudah mempunyai Izin*				55 %	55 %	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota										
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				50 Usaha	50 Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)										
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				20 Usaha	20 Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00

	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota										
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan**				**65 %**	**65 %**	**50.000.000,00**	**279.522.680,00**	**257.324.680,00**	**30.000.000,00**
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*persentase destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipromosikan*				65 %	65 %	50.000.000,00	279.522.680,00	257.324.680,00	207.324.680,00
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	279.522.680,00	257.324.680,00	207.324.680,00
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**				**65 %**	**65 %**	**200.000.000,00**	**40.000.337,00**	**43.780.337,00**	**150.000.000,00**
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kawasan Usaha Ekonomi Kreatif*				65 %	65 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Bimbingan dan Pengembangan*				65 %	65 %	150.000.000,00	40.000.337,00	43.780.337,00	-106.219.663,00
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	40.000.337,00	43.780.337,00	-6.219.663,00
	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)										
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Mutu Pelaku Usaha Kreatif**				**65 %**	**65 %**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Pengembangan SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif*				30 %	30 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
	J U M L A H								**7.047.180.415,00**	**15.184.180.962,00**	**15.572.809.555,00**	**8.525.629.140,00**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan. Sebagai sebuah dokumen rencana, setiap tahapan telah diusahakan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini. Namun jika terdapat situasi- situasi yang masih belum diperhitungkan atau berpengaruh pada perjalanan dokumen ini maka dokumen rencana ini dapat ditinjau kembali untuk perbaikan dan penyesuaian kondisi.

Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terkait kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berpengaruh terhadap strategi dan pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten. Dokumen Renja DISPORAPAR Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) dan angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Mamuju Tengah.

Topoyo, 12 September 2025

Kepala Dinas

ACHMAD SETIAWAN, SH

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP : 19870329 201001 1 003